



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



Nomor : 45a/LHP/XV/05/2013

Tanggal : 20 Mei 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210
Telp / Fax (021) 5720954

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI	ii
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012	iii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012	1

Handwritten signature

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012

Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 terdiri dari lima laporan pokok dan satu laporan tambahan sebagai berikut.

1. Ringkasan Eksekutif

Ringkasan Eksekutif memuat lingkup pemeriksaan, opini BPK atas LKPP dan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) Tahun 2008 s.d. 2012, temuan-temuan signifikan berupa kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, rekomendasi, serta hasil revidi atas transparansi fiskal.

2. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan I memuat:

- a. Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan (LK) yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, batasan pemeriksaan, dan hasil pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN; dan
- c. LKPP Tahun 2012.

3. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern

Laporan II memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern.

4. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan

Laporan III memuat:

- a. Resume Laporan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan.

5. Laporan IV: Laporan Pemantauan Tindak Lanjut

Laporan IV memuat:

- a. Resume Pemantauan Tindak Lanjut; dan
- b. Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2007 s.d. 2011.

6. Laporan Tambahan: Laporan Hasil Revidi atas Pelaksanaan Transparansi Fiskal

Laporan tambahan tersebut memuat hasil revidi mengenai pemenuhan kriteria-kriteria terkait:

- a. kejelasan aturan mengenai peran dan tanggung jawab Pemerintah;
- b. keterbukaan proses penganggaran;
- c. ketersediaan informasi bagi publik; dan
- d. integritas data yang dilaporkan.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012**

- 01 Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Pusat tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas (LAK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.
- 02 Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf 04 – 07 berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.
- 03 Dalam Laporan BPK Nomor 24a/LHP/XV/05/2012 tanggal 24 Mei 2012, BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPP Tahun 2011 karena: (a) permasalahan yang berkaitan dengan pelaksanaan dan pencatatan hasil Inventarisasi dan Penilaian (IP) Aset Tetap dan (b) pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang belum berdasarkan dokumen yang valid dan belum disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Dalam tahun 2012, Pemerintah telah melakukan upaya perbaikan dengan melakukan koordinasi dengan masing-masing KL terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan, menyelesaikan IP sebagian besar aset tetap yang belum di-IP, dan menerbitkan ketentuan terkait penyusutan BMN, serta menelusuri, memverifikasi dokumen *cessie*, dan membentuk penyisihan atas Aset Eks BPPN.
- 04 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.1.2.3, B.2.2.1.8, dan C.2.48 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya, Belanja Lain-Lain, dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Setelah

Penyesuaian TA 2012 masing-masing sebesar Rp73,46 triliun, Rp4,07 triliun, dan Rp21,02 triliun. PNBPN Lainnya dan Belanja Lain-Lain tersebut diantaranya berasal dari pendapatan lainnya dari selisih kurs sebesar Rp2,09 triliun dan belanja lainnya dari rugi selisih kurs sebesar Rp282,39 miliar. Sementara nilai SiLPA Setelah Penyesuaian termasuk saldo selisih kurs dari kas (*unrealized*) sebesar minus Rp499,28 miliar. Pemerintah belum menghitung untung/rugi selisih kurs dari seluruh transaksi mata uang asing sesuai dengan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Nomor 12 tentang Akuntansi Transaksi Dalam Mata Uang Asing. Penerimaan/belanja dari untung/rugi selisih kurs dapat berbeda secara signifikan jika dihitung berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 12 tersebut. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai untuk memperoleh keyakinan atas pendapatan dan belanja lainnya karena untung/rugi selisih kurs dan selisih kurs dari kas (*unrealized*).

- 05 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan B.2.2.1 atas Laporan Keuangan, Pemerintah menyajikan realisasi belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010,56 triliun dan anggarannya sebesar Rp1.069,53 triliun. Jumlah realisasi belanja tersebut diantaranya merupakan Belanja Barang sebesar Rp140,88 triliun, Belanja Modal sebesar Rp145,10 triliun, dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp75,62 triliun. Terdapat kelemahan-kelemahan dalam penganggaran dan penggunaan anggaran Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial, yaitu (a) Adanya kelemahan pengendalian atas pelaksanaan revisi DIPA sehingga terjadi realisasi belanja yang melampaui pagu DIPA sebesar Rp11,37 triliun untuk belanja selain Belanja Pegawai; (b) penggunaan Belanja Barang dan Belanja Modal yang melanggar ketentuan/peraturan perundang-undangan dan berindikasi merugikan negara sebesar Rp546,01 miliar termasuk yang belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp240,16 miliar serta pembayaran Belanja Barang dan Belanja Modal di akhir tahun sebesar Rp1,31 triliun tidak sesuai realisasi fisik; dan (c) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1,91 triliun yang masih mengendap di rekening pihak ketiga dan/atau rekening penampungan KL tidak disetor ke kas negara; dan (d) Penggunaan anggaran Belanja Bantuan Sosial tidak sesuai sasaran sebesar Rp269,98 miliar. Masalah tersebut mengakibatkan realisasi Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial tidak menggambarkan realisasi belanja yang sebenarnya.
- 06 Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan C.2.13 dan C.2.30 atas Laporan Keuangan, Pemerintah mengungkapkan Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp120,93 triliun dan Rp19,89 triliun serta Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp378,99 triliun dan Rp454,62 triliun. Piutang Bukan Pajak tahun 2012 tersebut diantaranya sebesar Rp63,72 triliun merupakan aset kredit Eks BPPN. Sementara Aset Lainnya tahun 2012 tersebut diantaranya sebesar Rp3,97 triliun merupakan aset properti Eks BPPN. Pemerintah telah melakukan inventarisasi dan penelusuran atas Aset Eks BPPN khususnya yang berupa aset kredit berdasarkan dokumen yang ada dan telah menilai kembali nilai wajar aset properti Eks BPPN. Namun demikian, Pemerintah belum menelusuri keberadaan Aset Eks BPPN sebesar Rp8,79 triliun yang tercantum dalam Sistem Aplikasi Pengganti Bunisys (SAPB) dan daftar nominatif properti Eks BPPN serta belum menyelesaikan penilaian atas Aset properti Eks BPPN yang berasal dari kelolaan PT PPA sebesar Rp1,12 triliun. Nilai Aset Eks BPPN yang dicatat dalam LKPP dapat berbeda secara signifikan jika Pemerintah selesai menelusuri keberadaan dan menilai seluruh Aset Eks BPPN. Data yang tersedia tidak memungkinkan BPK untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran saldo Aset Eks BPPN.

- 07 Dalam Catatan C.2.47 atas Laporan Keuangan, Pemerintah melaporkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada akhir tahun 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp70,26 triliun dan Rp105,09 triliun. SAL akhir tahun 2012 tersebut terdiri dari SAL Awal Setelah Penyesuaian sebesar Rp49,24 triliun dan SiLPA Setelah Penyesuaian sebesar Rp21,02 triliun. SAL akhir tahun 2012 tersebut masih berbeda dengan rincian fisik SAL sebesar Rp8,15 miliar dan penambahan fisik SAL sebesar Rp33,49 miliar tidak dapat dijelaskan. Pemerintah juga melakukan koreksi manual atas pencatatan SiLPA sebesar Rp30,89 miliar yang tidak didukung dokumen sumber yang memadai. Pemerintah tidak dapat memberikan penjelasan yang memadai atas penambahan fisik SAL dan koreksi yang berpengaruh terhadap catatan SAL serta perbedaan antara catatan dan fisik SAL.
- 08 Menurut opini BPK, kecuali ketidakpatuhan dalam realisasi belanja barang, modal, dan bansos, serta dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika Pemerintah menghitung seluruh selisih kurs dari kas (*unrealized*) dan untung/rugi selisih kurs, menyelesaikan penelusuran dan penilaian atas seluruh Aset Eks BPPN, dan menyelesaikan permasalahan SAL, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf pertama di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 dan 2011 serta realisasi anggaran dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 09 Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45b/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013 dan Nomor 45c/LHP/XV/05/2013 tanggal 20 Mei 2013, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
KETUA,



 **Drs. Hadi Poernomo, Ak**
Register Negara No. D-786 

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 didasarkan pada peraturan sebagai berikut.

- a) UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b) UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 berpedoman pada SPKN yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2007.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran LKPP Tahun 2012 dengan memperhatikan:

- a) kesesuaian LKPP dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b) kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan pengungkapan yang seharusnya dibuat seperti disebutkan dalam SAP;
- c) efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI); dan
- d) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2012 yang meliputi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL), Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN), dan Laporan Keuangan Bagian Anggaran BUN (LK BABUN).

5. Lingkup Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan atas LKPP Tahun 2012 yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2012, LRA, LAK, dan CaLK yang telah direviu Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

6. Sasaran Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 meliputi pengujian kewajaran atas saldo akun-akun yang ada di Neraca dan transaksi-transaksi pada LRA dan LAK, SPI, dan Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk tindak lanjut pemeriksaan sebelumnya.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012 dilakukan dengan metodologi pemeriksaan dengan pendekatan berdasarkan risiko, yang dirancang untuk menemukan kesalahan dan penyimpangan informasi atas laporan keuangan dengan menelaah kegiatan pemerintahan. Kegiatan pemeriksaan dimulai dengan melakukan penelaahan sistem pengendalian intern untuk menentukan area risiko penting yang menjadi fokus pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas proses penyusunan dan penyajian laporan

keuangan. Dalam menganalisis dan menguji proses penyusunan dan penyajian LKPP, BPK telah melakukan prosedur-prosedur di bawah ini.

- 1) Menguji sistem akuntansi yang ditetapkan Pemerintah apakah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- 2) Menguji proses akuntansi dan pelaporan keuangan yang diterapkan apakah telah mengikuti sistem akuntansi yang telah ditetapkan Menteri Keuangan.

Pemeriksaan BPK juga mencakup pengujian pengendalian, prosedur analitis, dan pengujian substantif untuk menilai efektivitas pengendalian dan kewajaran LKPP.

Selain itu, BPK juga melakukan pemantauan tindak lanjut temuan pemeriksaan yang diungkapkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP Tahun 2007 s.d. 2011.

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 77 hari sesuai dengan Surat Tugas Anggota BPK Nomor 12/ST/IV-XV.2/02/2013 tanggal 7 Februari 2013.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan LKPP merupakan tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh Pemerintah.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

10. Hasil Pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN

BPK juga melakukan pemeriksaan atas LKKL dan LKBUN Tahun 2012 yang hasilnya digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2012.

Hasil pemeriksaan atas 86 LKKL Tahun 2012 (termasuk BPK yang diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik), LK BUN, dan 7 BA BUN menunjukkan terdapat 50 KL yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), 19 KL mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), 22 KL mendapatkan opini

Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 2 KL mendapatkan opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP), dan 1 KL belum selesai dilakukan pemeriksaan.

Rincian Hasil pemeriksaan BPK atas LKKL Tahun 2008 s.d. 2012 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Rincian Opini atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Tahun 2008-2012**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2008	2009	2010	2011	2012
1.	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2.	002	Dewan Perwakilan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.	004	Badan Pemeriksa Keuangan	WTP – DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
4.	005	Mahkamah Agung	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP
5.	006	Kejaksaan Agung	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
6.	007	Sekretariat Negara	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
7.	010	Kementerian Dalam Negeri	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
8.	011	Kementerian Luar Negeri	WDP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP
9.	012	Kementerian Pertahanan	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
10.	013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP-DPP
11.	015	Kementerian Keuangan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12.	018	Kementerian Pertanian	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
13.	019	Kementerian Perindustrian	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
14.	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	WTP
15.	022	Kementerian Perhubungan	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
16.	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17.	024	Kementerian Kesehatan	WDP	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP
18.	025	Kementerian Agama	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
19.	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
20.	027	Kementerian Sosial	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
21.	029	Kementerian Kehutanan	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
22.	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
23.	033	Kementerian Pekerjaan Umum	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
24.	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
25.	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
26.	036	Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
27.	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP
28.	041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
29.	042	Kementerian Riset dan Teknologi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
30.	043	Kementerian Lingkungan Hidup	TMP	TMP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP
31.	044	Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP-DPP
32.	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
33.	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2008	2009	2010	2011	2012
34.	050	Badan Intelijen Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
35.	051	Lembaga Sandi Negara	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP
36.	052	Dewan Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
37.	054	Badan Pusat Statistik	TMP	WDP	WDP	WTP	WTP
38.	055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
39.	056	Badan Pertanahan Nasional	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP-DPP
40.	057	Perpustakaan Nasional	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
41.	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
42.	060	Kepolisian Negara RI	TMP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
43.	063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	WDP	WDP	WTP-DPP	WTP	TMP
44.	064	Lembaga Ketahanan Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
45.	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
46.	066	Badan Narkotika Nasional	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
47.	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
48.	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	WDP	WTP	WDP	WTP-DPP	WTP
49.	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
50.	075	Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP
51.	076	Komisi Pemilihan Umum	TMP	TMP	WDP	WDP	WDP
52.	077	Mahkamah Konstitusi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
53.	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
54.	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	WDP	WDP	WTP	WTP	WDP
55.	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
56.	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
57.	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	WDP	WTP	WTP	WTP	WDP
58.	083	Badan Informasi Geospasial (sebelumnya: Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional)	WTP	WTP	WDP	WTP	WDP
59.	084	Badan Standarisasi Nasional	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
60.	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	WTP	WTP	WTP-DPP	WDP	WDP
61.	086	Lembaga Administrasi Negara	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
62.	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
63.	088	Badan Kepegawaian Negara	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
64.	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	WTP-DPP	WTP	WTP	WTP	WTP
65.	090	Kementerian Perdagangan	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
66.	091	Kementerian Perumahan Rakyat	WTP	WTP	WTP	WTP	WDP
67.	092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	WDP	WTP	WDP	WDP	WDP

7
13
R
H
d

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	Opini BPK atas LKKL				
			2008	2009	2010	2011	2012
68.	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
69.	095	Dewan Perwakilan Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
70.	100	Komisi Yudisial	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
71.	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
72.	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
73.	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	WDP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
74.	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1)	1)	WTP	WTP	WTP
75.	107	Badan SAR Nasional	1)	1)	WDP	WTP-DPP	WTP
76.	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1)	1)	WTP	WDP	WTP
77.	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	4)	4)	4)	WDP	WDP
78.	110	Ombudsman RI	4)	4)	4)	WTP	WTP
79.	111	Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan	4)	4)	4)	TMP	WDP
80.	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	5)	5)	5)	5)	6)
81.	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	5)	5)	5)	5)	WDP
82.	114	Sekretariat Kabinet	5)	5)	5)	5)	WTP
83.	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	5)	5)	5)	5)	WDP
84.	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	5)	5)	5)	5)	WDP
85.	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	5)	5)	5)	5)	WDP
86.	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	5)	5)	5)	5)	TMP
87.	999.01	Pengelolaan Utang	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP-DPP
88.	999.02	Pengelolaan Hibah	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP-DPP
89.	999.03	Investasi Pemerintah	WDP	WTP	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP-DPP
90.	999.04	Penerusan Pinjaman	TMP	TMP	WDP	WTP	WTP
91.	999.05	Transfer ke Daerah	WDP untuk Dana Perimbangan dan WTP untuk Otonomi Khusus	WTP-DPP	WTP-DPP	WTP	WTP
92.	999.06	Belanja Subsidi dan Belanja Lain-Lain	TMP untuk Belanja Lain-lain; WTP-DPP untuk Belanja Subsidi	WDP	2)	2)	2)
93.	999.07	Belanja Subsidi	1)	1)	WDP	WTP	WTP-DPP
94.	999.08	Belanja Lain-lain	1)	1)	WDP	WTP-DPP	WTP
95.		Bendahara Umum Negara	3)	3)	WDP	WDP	WDP

Keterangan :

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian
WTP-DPP : Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan
WDP : Wajar Dengan Pengecualian

8
13 fuf
d

- TMP : Tidak Menyatakan Pendapat
1) : Dibentuk Tahun 2010
2) : BA.999.06 pada Tahun 2010 dipecah menjadi BA 999.07 dan BA 999.08
3) : Diberikan Opini mulai Tahun 2010
4) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2011
5) : Menjadi Bagian Anggaran mulai Tahun 2012
6) : Belum Selesai Diperiksa

Jakarta, 20 Mei 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT TAHUN 2012 (AUDITED)



MEI 2013



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH PUSAT
TAHUN 2012
*(AUDITED)***

MEI 2013

INDEKS ISI	iii
INDEKS TABEL	iv
INDEKS GRAFIK	v
INDEKS DAFTAR	vii
INDEKS SINGKATAN	viii
INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	xi
RINGKASAN	2
I. LAPORAN REALISASI APBN	6
II. NERACA	9
III. LAPORAN ARUS KAS	13
IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	16
A. PENJELASAN UMUM	16
A.1. DASAR HUKUM	16
A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO	16
A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN	51
A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI	55
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN	70
B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN	70
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN	71
B.3. CATATAN PENTING LAINNYA	96
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA	100
C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM	100
C.2. PENJELASAN PER POS NERACA	101
C.3. CATATAN PENTING LAINNYA	167
C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN	191
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS	192
D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS	192
D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS	195
DAFTAR	214

1.	Asumsi Dasar APBNP TA 2012	17
2.	Realisasi Anggaran TA 2011 dan Perubahan APBN 2012	18
3.	Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2012	28
4.	Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia dan Berbagai Negara	28
5.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2008 – 2012	29
6.	Perkembangan Tax Ratio Indonesia Tahun 2009-2012	30
7.	Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak dengan APBN dan APBN-P Tahun 2008 - 2012	33
8.	Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2012	38
9.	Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja	39
10.	Perkembangan Belanja Negara tahun 2008-2012	45
11.	Presentase Anggaran Dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2012	49
12.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2008-2012	50
13.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2012 dan TA 2011	77
14.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak	107
15.	Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai	108
16.	Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan <i>Promissory Notes</i>	160
17.	Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing	161
18.	Saldo Anggaran Lebih TA 2012 dan TA 2011	161
19.	Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2012 dan 2011	168
20.	<i>Sharing</i> Pembayaran Manfaat Pensiun	187
21.	Jenis dan Outstanding SPN tahun 2012	437
22.	Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2012	438
23.	Realisasi pelaksanaan <i>Debtswitching</i> tahun 2012	438
24.	Rincian realisasi pelaksanaan <i>Debtswitching</i> tahun 2012	439
25.	Transaksi <i>Buyback</i> tahun 2012	440
26.	Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2012	442
27.	<i>Outstanding</i> SBN seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2012	444
28.	Jatuh Tempo SBN seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2012	445
29.	Kupon SBN Seri <i>Fixed Rate</i> (FR) per 31 Desember 2012	446
30.	Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012	447
31.	Nilai <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo <i>Zero Coupon</i> (ZC) per 31 Desember 2012	448
32.	Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri <i>Variable Rate</i> (VR) per 31 Desember 2012	449
33.	Nilai dan <i>Outstanding</i> Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2012	451
34.	Nilai <i>Outstanding</i> dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2012	453
35.	Nilai dan Jatuh Tempo SR per 31 Desember 2012	455
36.	Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012	457
37.	Mutasi <i>Principle Outstanding</i> SBN Tahun 2012	460

1. Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2008-2012	21
2. Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2008 – 2012	21
3. Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan tahun 2012	22
4. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012	22
5. Perkembangan PDB Per Kapita tahun 2008-2012	23
6. Tren Laju Inflasi Bulanan (m-t-m) selama Tahun 2011 - 2012	24
7. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2010-2012	25
8. Perkembangan Ekspor tahun 2012	25
9. Perkembangan Impor tahun 2012	26
10. Cadangan Devisa Triwulanan 2010-2012	26
11. Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2012	27
12. Perbandingan <i>Tax Ratio</i> Indonesia tahun 2009-2012	30
13. Target Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2008-2012	31
14. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak yang Dikelola Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2008-2012	32
15. Realisasi PNBPN Lainnya tahun 2007-2011	35
16. Target Dan Realisasi Penerimaan PNBPN Tahun 2008-2012	36
17. K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar Tahun Anggaran 2012	37
18. Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2012 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi	39
19. Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2012	40
20. Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2012	41
21. Tren Belanja Barang Bulanan TA 2012	41
22. Tren Belanja Modal Bulanan TA 2012	42
23. Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2012	42
24. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2012	43
25. Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2012	43
26. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2012	44
27. Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2012	45
28. Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2011	46
29. Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2008-2012	47
30. Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SIKPA/SILPA Tahun 2008-2012	48
31. Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBPN TA 2008 - 2012	70
32. Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2008 - 2012	71
33. Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012	72
34. Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat	77

TA 2012	
35. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2012	78
36. Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012	78
37. Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012	85
38. Komposisi Pendapatan BLU TA 2012	98
39. Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2012	98
40. Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2008 – Tahun 2012	100
41. Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011	176
42. Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	193
43. Struktur <i>Outstanding</i> ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2012	444
44. Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2012	445
45. Tingkat kupon Seri FR per 31 Desember 2012	446
46. Struktur <i>Outstanding</i> ORI per 31 Desember 2012	447
47. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012	448
48. Struktur <i>Outstanding Zero Coupon</i> (ZC) per 31 Desember 2012	448
49. Struktur Jatuh Tempo <i>Zero Coupon</i> (ZC) per 31 Desember 2012	449
50. Struktur <i>Outstanding</i> VR per 31 Desember 2012	450
51. Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2012	450
52. Struktur <i>Outstanding</i> SPN per 31 Desember 2012	451
53. Struktur <i>Outstanding</i> SUP per 31 Desember 2012	452
54. Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2012	452
55. Struktur <i>Outstanding Fixed Rate</i> SBSN per 31 Desember 2012	454
56. Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2012	454
57. Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2012	455
58. Struktur <i>Outstanding</i> SR per 31 Desember 2012	456
59. Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012	456
60. Struktur <i>Outstanding</i> SBN Valas per 31 Desember 2012	458
61. Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012	458
62. Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 Desember 2012	459
63. Struktur <i>Outstanding</i> SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2012	459

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Pemerintah Pusat TA 2012	214
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2012	227
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2012	244
4. Jasa Siaran dan Non Siaran LPP RRI dan LPP TVRI	290
5. Daftar Rekening Khusus per 31 Desember 2012	293
6. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2012	294
7. Monitoring Hasil Kegiatan Usaha Hulu Migas Tahun 2012	295
8. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Umum Tahun 2012	302
9. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2012	303
10. Kas pada K/L per 31 Desember 2012	309
11. Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	312
12. Piutang Pajak TA 2012	313
13. Piutang PNB per 31 Desember 2012	318
14. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi	319
15. Piutang Aset Eks BPPN	320
16. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	325
17. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	326
18. Penyertaan Modal Negara Pada BUMN	328
19. BPYBDS Pada BUMN per 31 Desember 2012	333
20. Penyertaan Modal Negara Pada Perusahaan Negara/Lembaga Dibawah Pembinaan Kementerian Keuangan	334
21. Penyertaan Modal Negara Pada Non BUMN	336
22. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/Regional	337
23. Ikhtisar Laporan Keuangan Bank Indonesia	338
24. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan	340
25. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	342
26. Tagihan TP/TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	344
27. Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	345
28. Aset KKKS per 31 Desember 2012	347
29. Aset Eks BPPN per 31 Desember 2012	359
30. Utang Kepada Pihak Ketiga dan Pendapatan Diterima di Muka pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2012	364
31. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang – Surat Berharga Negara per 31 Desember 2012	367
32. Surat Berharga Negara Jangka Panjang per 31 Desember 2012	371
33. Ikhtisar laporan Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada K/L per 31 Desember 2012	374
34. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU per 31 Desember 2012	375
35. Penyusutan Aset Tetap Pada Satuan Kerja BLU per 31 Desember 2012	381
36. Ikhtisar Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan	384
37. Rekapitulasi Hasil Penilaian Aset Bekas Milik Asing/Cina s.d. 31 Desember 2012	387
38. Ikhtisar Laporan Keuangan SKK MIGAS	398
39. Tindak Lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011	400
40. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara Tahun Anggaran 2012	434

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: Bahan Bakar Minyak
BDL	: Bank Dalam Likuidasi
BEJ	: Bursa Efek Jakarta
BHMN	: Badan Hukum Milik Negara
BI	: Bank Indonesia
BKKBN	: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	: Badan Layanan Umum
BPMIGAS	: Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	: Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPJT	: Badan Pengatur Jalan Tol
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
BPOM	: Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	: Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	: Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi
BULOG	: Badan Urusan Logistik
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BUN	: Bendahara Umum Negara
CBN	: Cadangan Benih Nasional
CBP	: Cadangan Beras Pemerintah
CFO	: <i>Chief Financial Officer</i>
CGI	: <i>Consultative Group on Indonesia</i>
COO	: <i>Chief Operating Officer</i>
CPI	: <i>Consumer Price Index</i>
DAK	: Dana Alokasi Khusus
DAU	: Dana Alokasi Umum
DAU	: Dana Abadi Umat
DBH	: Dana Bagi Hasil
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	: Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	: Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	: Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTP	: Ditanggung Pemerintah
EDI	: <i>Electronic Data Exchange</i>
GBHN	: Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	: Hutan Tanaman Industri
INDRA	: <i>Indonesian Debt Restructuring Agency</i>
KITE	: Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	: Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L	: Kementerian Negara/Lembaga

KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
KONI	: Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	: Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	: Kiriman Uang
KUHR	: Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	: Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	: Kas Umum Negara
KUT	: Kredit Usaha Tani
LAK	: Laporan Arus Kas
LBMN	: Laporan Barang Milik Negara
LDKP	: Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	: <i>Loan to Deposit Ratio</i>
LKBUN	: Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKP	: Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	: Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
MPN	: Modul Penerimaan Negara
MP3	: Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	: Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	: <i>Non-Performing Loan</i>
PDB	: Pendapatan Domestik Bruto
PFK	: Perhitungan Pihak Ketiga
PIP	: Pusat Investasi Pemerintah
PMA	: Penanaman Modal Asing
PMDN	: Penanaman Modal Dalam Negeri
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PMN	: Penyertaan Modal Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	: Pajak Penghasilan
PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	: Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	: <i>Past Service Liability</i>
PSO	: <i>Public Service Obligation</i>
PT PPA	: PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	: <i>Recovery of Aceh Nias Trust Fund</i>
RDI	: Rekening Dana Investasi
RPD	: Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPL	: Rekening Pemerintah Lainnya
SA-BUN	: Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara
SAI	: Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	: Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	: Saldo Anggaran Lebih
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	: Sistem Akuntansi Umum
SBN	: Surat Berharga Negara
SBSN	: Surat Berharga Syariah Negara
SDA	: Sumber Daya Alam
SDHI	: Sukuk Dana Haji Indonesia
SiAP	: Sistem Akuntansi Pusat

SIBOR	:	<i>Singapore Interbank Offered Rate</i>
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SIMAK-BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	<i>Subsidiary Loan Agreement</i>
SP2D	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SPN	:	Surat Perbendaharaan Negara
SP3	:	Surat Perintah Pengesahan Pembukuan
SUN	:	Surat Utang Negara
TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	<i>Treasury Single Account</i>
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	<i>United State Dollar</i>
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP/TUP	:	Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

		Halaman
Catatan	B.2.1 Pendapatan Negara dan Hibah	71
Catatan	B.2.1.1 Penerimaan Perpajakan	72
Catatan	B.2.1.1.1 Pajak Dalam Negeri	72
Catatan	B.2.1.1.2 Pajak Perdagangan Internasional	73
Catatan	B.2.1.2 Penerimaan Negara Bukan Pajak	73
Catatan	B.2.1.2.1 Penerimaan Sumber Daya Alam	74
Catatan	B.2.1.2.2 Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	74
Catatan	B.2.1.2.3 Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	75
Catatan	B.2.1.2.4 Pendapatan BLU	75
Catatan	B.2.1.3 Penerimaan Hibah	75

Belanja Negara

Catatan	B.2.2 Belanja Negara	76
Catatan	B.2.2.1 Belanja Pemerintah Pusat	76
Catatan	B.2.2.1.1 Belanja Pegawai	79
Catatan	B.2.2.1.2 Belanja Barang	79
Catatan	B.2.2.1.3 Belanja Modal	80
Catatan	B.2.2.1.4 Pembayaran Bunga Utang	80
Catatan	B.2.2.1.5 Subsidi	81
Catatan	B.2.2.1.6 Belanja Hibah	84
Catatan	B.2.2.1.7 Belanja Bantuan Sosial	84
Catatan	B.2.2.1.8 Belanja Lain-lain	85
Catatan	B.2.2.2 Transfer ke Daerah	85
Catatan	B.2.2.2.1 Dana Perimbangan	86
Catatan	B.2.2.2.1.1 Dana Bagi Hasil	86
Catatan	B.2.2.2.1.2 Dana Alokasi Umum	86
Catatan	B.2.2.2.1.3 Dana Alokasi Khusus	87
Catatan	B.2.2.2.2 Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	87
Catatan	B.2.2.2.2.1 Dana Otonomi Khusus	87
Catatan	B.2.2.2.2.2 Dana Penyesuaian	87
Catatan	B.2.2.3 Suspen	88

Surplus (Defisit) Anggaran

Catatan	B.2.3 Defisit Anggaran	88
---------	-------------------------------	----

Pembiayaan

Catatan	B.2.4 Pembiayaan	89
Catatan	B.2.4.1 Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	89
Catatan	B.2.4.1.1 Penggunaan SAL	89
Catatan	B.2.4.1.2 Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	89
Catatan	B.2.4.1.3 Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	90
Catatan	B.2.4.1.4 Surat Berharga Negara (Neto)	90
Catatan	B.2.4.1.5 Pinjaman Dalam Negeri	91
Catatan	B.2.4.1.6 Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	91
Catatan	B.2.4.1.7 Kewajiban Penjaminan	92

Catatan	B.2.4.1.8	Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	93
Catatan	B.2.4.2	Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	93
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	93
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	93
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	94
Catatan	B.2.4.2.2	Penerusan Pinjaman	95
Catatan	B.2.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	95

SILPA (SiKPA)

Catatan	B.2.5	Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)	95
---------	-------	--	----

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	B.3	Catatan Penting Lainnya	96
---------	-----	-------------------------	----

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	101
Catatan	C.2.2	Rekening Pemerintah Lainnya	102
Catatan	C.2.3	Rekening Kas di KPPN	103
Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	103
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	103
Catatan	C.2.6	Kas Lainnya dan Setara Kas	103
Catatan	C.2.7	Kas Pada BLU	104
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	105
Catatan	C.2.9	Investasi Jangka Pendek	105
Catatan	C.2.10	Investasi Jangka Pendek Lainnya	106
Catatan	C.2.11	Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	106
Catatan	C.2.12	Piutang Pajak	106
Catatan	C.2.13	Piutang Bukan Pajak	108
Catatan	C.2.14	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	116
Catatan	C.2.15	Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	116
Catatan	C.2.16	Piutang dari Kegiatan BLU	118
Catatan	C.2.17	Piutang Lain-lain	119
Catatan	C.2.18	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang	119
Catatan	C.2.19	Persediaan	120
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.20	Dana Bergulir	121
Catatan	C.2.21	Dana Bergulir Diragukan Tertagih	122
Catatan	C.2.22	Investasi Non Permanen Lainnya	123
Catatan	C.2.23	Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	124
Catatan	C.2.24	Investasi Permanen PMN	124
Catatan	C.2.25	Investasi Permanen BLU	132
Catatan	C.2.26	Investasi Permanen Lainnya	132
Catatan	C.2.27	Aset Tetap	132
Catatan	C.2.28	Piutang Jangka Panjang	133
Catatan	C.2.29	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	135
Catatan	C.2.30	Aset Lainnya	136
Catatan	C.2.31	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya	148

KEWAJIBAN

		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.32	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	149
Catatan	C.2.33	Utang Kepada Pihak Ketiga	149
Catatan	C.2.34	Utang Biaya Pinjaman	150
Catatan	C.2.35	Utang Subsidi	151
Catatan	C.2.36	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	152
Catatan	C.2.37	Utang SBN Jangka Pendek	153
Catatan	C.2.38	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	154
Catatan	C.2.39	Pendapatan Diterima di Muka	154
Catatan	C.2.40	Utang Jangka Pendek Lainnya	154

		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.41	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	155
Catatan	C.2.42	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Surat Berharga Negara	156
Catatan	C.2.43	Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	157
Catatan	C.2.44	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	158
Catatan	C.2.45	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	159
Catatan	C.2.46	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	160

EKUITAS

		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.47	Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian	161
Catatan	C.2.48	SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	162
Catatan	C.2.49	Cadangan Piutang	163
Catatan	C.2.50	Cadangan Persediaan	163
Catatan	C.2.51	Pendapatan yang Ditangguhkan	163
Catatan	C.2.52	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	164
Catatan	C.2.53	Selisih Kurs Bagian Lancar	164
Catatan	C.2.54	Dana Lancar Lainnya	165
Catatan	C.2.55	Barang/Jasa yang Harus Diterima	165
Catatan	C.2.56	Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	165

		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.57	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	165
Catatan	C.2.58	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	165
Catatan	C.2.59	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	166
Catatan	C.2.60	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	166
Catatan	C.2.61	Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	166

CATATAN PENTING LAINNYA

Catatan	C.3	Catatan Penting Lainnya	167
---------	-----	-------------------------	-----

KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

Catatan	C.4	Kejadian Penting Setelah Tanggal Pelaporan	191
---------	-----	--	-----

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	195
Catatan	D.2.1.1	Pajak Penghasilan	195
Catatan	D.2.1.2	Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	196
Catatan	D.2.1.3	Pajak Bumi dan Bangunan	196
Catatan	D.2.1.4	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	197
Catatan	D.2.1.5	Cukai	197
Catatan	D.2.1.6	Pajak Lainnya	197
Catatan	D.2.1.7	Pajak Perdagangan Internasional	197
Catatan	D.2.2	PNBP	198
Catatan	D.2.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	198
Catatan	D.2.2.2	Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	198
Catatan	D.2.2.3	Penerimaan PNBP Lainnya	199
Catatan	D.2.2.4	Penerimaan BLU	199
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	199
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	200
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	200
Catatan	D.2.6	Belanja Pembayaran Bunga Utang	201
Catatan	D.2.7	Subsidi	202
Catatan	D.2.8	Belanja Hibah	202
Catatan	D.2.9	Bantuan Sosial	202
Catatan	D.2.10	Belanja Lain-Lain	203
Catatan	D.2.11	Dana Bagi Hasil Pajak	203
Catatan	D.2.12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	203
Catatan	D.2.13	Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau	204
Catatan	D.2.14	Dana Alokasi Umum	204
Catatan	D.2.15	Dana Alokasi Khusus	204
Catatan	D.2.16	Dana Otonomi Khusus	204
Catatan	D.2.17	Dana Penyesuaian	204

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.18	Penjualan Aset	205
Catatan	D.2.19	Belanja Modal	205

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	206
Catatan	D.2.21	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	207
Catatan	D.2.22	Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	208
Catatan	D.2.23	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	208
Catatan	D.2.24	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	209
Catatan	D.2.25	Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah	209
Catatan	D.2.26	Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)	209

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.27	Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	210
Catatan	D.2.28	Kiriman Uang	210
Catatan	D.2.29	Transito	211
Catatan	D.2.30	Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	212



REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 4 Tahun 2012, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2012 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara, Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan Badan Lainnya.

LKPP Tahun 2012 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Lampiran II (PSAP Berbasis Kas Menuju Akrua).

LKPP Tahun 2012 ini disusun berdasarkan konsolidasian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN-P TA 2012 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2012 - 31 Desember 2012. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.338,11 triliun atau 98,52 persen dari APBN-P. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491,41 triliun atau 96,33 persen dari APBN-P. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010,56 triliun atau 94,49 persen dari APBN-P, dan realisasi Transfer ke Daerah sebesar Rp480,65 triliun atau 100,39 persen dari APBN-P. Selain itu, pada TA 2012 terdapat Suspen Belanja sebesar Rp206,91 miliar.

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan realisasi Belanja Negara, terjadi Defisit Anggaran TA 2012 sebesar Rp153,30 triliun. Realisasi Pembiayaan Neto TA 2012 adalah sebesar Rp175,16 triliun atau 92,14 persen dari APBN-P, sehingga terjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp21,86 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2012 dan 2011 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam triliun rupiah)

Uraian	TA 2012 (<i>audited</i>)			TA 2011 (<i>audited</i>)
	Anggaran (UU No. 4/2012)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	1.358,21	1.338,11	98,52	1.210,60
Belanja Negara	1.548,31	1.491,41	96,33	1.295,00
Belanja Pemerintah Pusat	1.069,53	1.010,56	94,49	883,72
Transfer ke Daerah	478,78	480,65	100,39	411,32
Suspen Belanja Negara	-	0,21	-	(0,08)
Surplus (Defisit) Anggaran	(190,10)	(153,30)	80,64	(84,40)
Pembiayaan Neto	190,10	175,16	92,14	130,95
SiLPA (SiKPA)		21,86		46,55

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2012.

Jumlah Aset per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp3.432,98 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp241,31 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp932,41 triliun; Aset Tetap sebesar Rp1.895,50 triliun; Piutang Jangka Panjang (netto) sebesar Rp4,67; dan Aset Lainnya sebesar Rp359,09 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.156,89 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp266,14 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.890,75 triliun.

Sementara itu, jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp1.276,10 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp23,58 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp1.299,68 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam triliun rupiah)		
Uraian	31 Desember 2012 (Audited)	31 Desember 2011 (Audited)
Aset	3.432,98	3.023,44
Aset Lancar	241,31	266,81
Investasi Jangka Panjang	932,41	750,03
Aset Tetap	1.895,50	1.567,97
Piutang Jangka Panjang	4,67	3,43
Aset Lainnya	359,09	435,20
Kewajiban	2.156,89	1.947,37
Kewajiban Jangka Pendek	266,14	246,44
Kewajiban Jangka Panjang	1.890,75	1.700,93
Ekuitas Dana Neto	1.276,10	1.076,07
Ekuitas Dana Lancar	(23,58)	40,81
Ekuitas Dana Investasi	1.299,68	1.035,26

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama TA 2012 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2012.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN), Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Kas Badan Layanan Umum (BLU), dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp107,84 triliun, sedangkan pada awal tahun 2012 terjadi koreksi tambah sebesar Rp0,31 triliun, sehingga saldo awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan tahun 2012 menjadi Rp108,15 triliun.

Selama TA 2012 terjadi penurunan kas dari aktivitas operasi sebesar Rp8,87 triliun, penurunan kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp144,43 triliun, kenaikan kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp175,16 triliun, penurunan kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp1,50 triliun, penurunan karena penggunaan SAL sebesar Rp56,17 triliun, dan penurunan karena penyesuaian pembukuan sebesar Rp0,76 triliun. Dengan demikian,

saldo Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung yang telah disahkan per 31 Desember 2012 menjadi Rp71,58 triliun.

Selain kas di atas, terdapat Rekening Pemerintah Lainnya sebesar Rp13,49 triliun, Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,21 triliun, Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,20 triliun, Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5,45 triliun, dan Kas pada BLU yang Belum Disahkan sebesar Rp0,08 triliun. Selama tahun 2012 terdapat deposito (Investasi Jangka Pendek) yang berasal dari Kas pada BLU yang telah disahkan sebesar Rp0,77 triliun, sehingga saldo akhir Kas dan Bank Pemerintah Pusat sebesar Rp90,24 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas TA 2012 dan TA 2011 dapat disajikan sebagai berikut.

(dalam triliun rupiah)		
Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	107,84	98,98
Koreksi Saldo Awal	0,31	0,03
Saldo Awal Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung setelah Koreksi	108,15	99,01
Kenaikan (Penurunan) Kas		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	(8,87)	32,78
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(144,43)	(117,62)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	175,16	131,39
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	(1,50)	1,31
Penggunaan SAL	(56,17)	(40,32)
Penyesuaian Pembukuan	(0,76)	1,29
Kenaikan (Penurunan) Kas	(36,57)	8,83
Saldo Akhir Kas BUN, Kas KPPN, Kas BLU, dan Kas Hibah Langsung	71,58	107,84

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.



REPUBLIK INDONESIA

**LAPORAN REALISASI APBN
(AUDITED)**

I. LAPORAN REALISASI APBN (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
 UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)			TA 2011 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	B.2.1				
I. Penerimaan Perpajakan	B.2.1.1	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,49	873.873.892.399.381
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	968.293.241.511.000	930.861.839.509.438	96,13	819.752.426.342.423
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	47.944.100.000.000	49.656.293.809.881	103,57	54.121.466.056.958
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.2.1.2	341.142.610.103.000	351.804.746.666.862	103,13	331.471.821.098.730
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	217.158.876.693.000	225.843.973.463.751	104,00	213.823.349.552.827
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	30.776.336.250.000	30.797.972.717.670	100,07	28.183.973.126.600
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	72.799.374.473.000	73.458.504.524.407	100,91	69.360.502.832.532
4. Pendapatan BLU	B.2.1.2.4	20.408.022.687.000	21.704.295.961.034	106,35	20.103.995.586.771
III. Penerimaan Hibah	B.2.1.3	825.091.586.000	5.786.749.186.777	701,35	5.253.939.861.304
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)		1.358.205.043.200.000	1.338.109.629.172.958	98,52	1.210.599.653.359.415
B. Belanja Negara	B.2.2				
I. Belanja Pemerintah Pusat	B.2.2.1	1.069.534.444.947.000	1.010.558.236.531.814	94,49	883.721.886.196.519
1. Belanja Pegawai	B.2.2.1.1	212.971.607.708.622	197.863.565.816.235	92,91	175.737.918.419.015
2. Belanja Barang	B.2.2.1.2	160.031.270.543.988	140.884.875.397.761	88,04	124.639.479.502.304
3. Belanja Modal	B.2.2.1.3	182.621.948.581.508	145.104.148.492.853	79,46	117.854.532.071.332
4. Pembayaran Bunga Utang	B.2.2.1.4	117.785.423.800.000	100.515.994.274.844	85,34	93.261.919.810.886
5. Subsidi	B.2.2.1.5	245.076.318.862.000	346.420.404.182.332	141,35	295.358.229.636.324
6. Belanja Hibah	B.2.2.1.6	1.790.936.805.000	75.079.293.554	4,19	300.108.798.353
7. Belanja Bantuan Sosial	B.2.2.1.7	80.716.444.343.429	75.621.057.138.995	93,69	71.104.328.162.347
8. Belanja Lain-lain	B.2.2.1.8	68.540.494.302.453	4.073.111.935.240	5,94	5.465.369.795.958
II. Transfer ke Daerah	B.2.2.2	478.775.933.233.000	480.645.074.235.761	100,39	411.324.764.631.790
1. Dana Perimbangan	B.2.2.2.1	408.352.055.705.000	411.293.124.979.761	100,72	347.246.213.954.316
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	108.421.669.502.000	111.537.202.920.761	102,87	96.908.991.981.316
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	273.814.438.203.000	273.814.438.203.000	100,00	225.533.712.048.000
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	26.115.948.000.000	25.941.483.856.000	99,33	24.803.509.925.000

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)			TA 2011 (Audited)
		Anggaran	Realisasi	% Realisasi terhadap Anggaran	Realisasi
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	B.2.2.2.2	70.423.877.528.000	69.351.949.256.000	98,48	64.078.550.677.474
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	11.952.577.528.000	11.952.577.528.000	100,00	10.421.312.993.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	58.471.300.000.000	57.399.371.728.000	98,17	53.657.237.684.474
III. Suspen Belanja Negara	B.2.2.3		206.913.823.419		(47.504.353.285)
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		1.548.310.378.180.000	1.491.410.224.590.994	96,33	1.294.999.146.475.024
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	B.2.3	(190.105.334.980.000)	(153.300.595.418.036)	80,64	(84.399.493.115.609)
D. Pembiayaan	B.2.4				
I. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1	194.531.004.181.000	198.622.535.177.645	102,10	148.748.034.850.068
1. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	56.173.747.225.000	56.170.000.000.000	99,99	40.319.043.049.000
2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman	B.2.4.1.2	4.387.875.576.000	6.533.098.103.446	148,89	8.608.845.495.456
3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.3	280.000.000.000	1.277.994.564.583	456,43	1.597.981.517.178
4. Surat Berharga Negara (Neto)	B.2.4.1.4	159.596.700.000.000	159.704.323.637.096	100,07	119.864.365.459.065
Penerimaan Surat Berharga Negara			282.897.267.989.790		207.136.113.196.150
Pengeluaran Surat Berharga Negara			(123.192.944.352.694)		(87.271.747.737.085)
5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)	B.2.4.1.5	991.161.538.000	799.676.359.939	80,68	619.382.641.633
6. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	B.2.4.1.6	(19.265.140.158.000)	(18.862.557.487.419)	97,91	(19.643.883.312.264)
7. Kewajiban Penjaminan	B.2.4.1.7	(633.340.000.000)	-	-	-
8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	B.2.4.1.8	(7.000.000.000.000)	(7.000.000.000.000)	100,00	(2.617.700.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	B.2.4.2	(4.425.669.201.000)	(23.464.366.857.270)	530,19	(17.799.165.225.648)
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	B.2.4.2.1	53.731.053.828.000	31.403.481.754.448	58,45	33.747.178.723.921
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	15.603.899.524.000	15.003.476.180.432	96,15	15.266.144.513.219
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	38.127.154.304.000	16.400.005.574.016	43,01	18.481.034.210.702
2. Penerusan Pinjaman (Neto)	B.2.4.2.2	(8.431.823.029.000)	(3.753.031.242.391)	44,51	(4.223.841.471.298)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	B.2.4.2.3	(49.724.900.000.000)	(51.114.817.369.327)	102,80	(47.322.502.478.271)
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		190.105.334.980.000	175.158.168.320.375	92,14	130.948.869.624.420
E. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran-SiLPA (SiKPA)		-	21.857.572.902.339	-	46.549.376.508.811



REPUBLIK INDONESIA

NERACA
(AUDITED)

II. NERACA (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Des 2012 (audited)	31 Des 2011 (audited)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Setara Kas			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	37.382.696.367.039	82.453.918.298.407
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.2	13.495.665.498.447	6.615.552.720.213
Rekening Kas di KPPN	C.2.3	16.207.882.323.813	11.870.556.947.661
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	213.458.829.221	292.795.937.959
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	196.150.458.978	252.900.321.124
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.6	6.103.251.516.103	6.756.875.778.441
Kas pada BLU	C.2.7	16.643.419.462.034	13.019.388.257.063
Jumlah Kas dan Bank		90.242.524.455.635	121.261.988.260.868
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	787.370.392.558	1.408.995.648.910
Investasi Jangka Pendek BLU	C.2.9	768.125.137.193	170.553.016.059
Investasi Jangka Pendek Lainnya	C.2.10	-	135.839.486.878
Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja	C.2.11	1.893.533.561.965	1.279.165.315.147
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.12	93.468.526.344.200	108.063.462.383.641
Piutang Bukan Pajak	C.2.13	120.925.758.512.257	19.885.890.412.635
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.14	366.808.908.475	60.470.939.992
Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	C.2.15	5.325.797.572.454	4.462.395.347.776
Piutang dari Kegiatan BLU	C.2.16	2.473.903.438.486	1.216.391.989.142
Piutang Lain-lain	C.2.17	-	24.977.956.337.945
Jumlah Piutang (Bruto)		222.560.794.775.872	158.666.567.411.131
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	C.2.18	(136.953.775.912.378)	(75.330.131.480.506)
Jumlah Piutang (Bersih)		85.607.018.863.494	83.336.435.930.625
Persediaan	C.2.19	62.016.561.796.415	59.214.846.453.160
Jumlah Aset Lancar		241.315.134.207.260	266.807.824.111.647
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Dana Bergulir	C.2.20	11.453.274.948.550	8.195.256.111.510
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	C.2.21	(20.196.519.935)	-
Jumlah Dana Bergulir (bersih)		11.433.078.428.615	8.195.256.111.510
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.22	7.969.545.521.754	4.749.737.167.996
Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.23	(8.096.081.815)	-
Jumlah Investasi Non Permanen Lainnya (bersih)		7.961.449.439.939	4.749.737.167.996
Jumlah Investasi Non Permanen		19.394.527.868.554	12.944.993.279.506
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.24	912.877.699.396.801	736.991.554.233.014
Investasi Permanen BLU	C.2.25	134.165.377.149	6.637.194.500
Investasi Permanen Lainnya	C.2.26	-	87.609.772.784
Jumlah Investasi Permanen		913.011.864.773.950	737.085.801.200.298
Jumlah Investasi Jangka Panjang		932.406.392.642.504	750.030.794.479.804
Aset Tetap	C.2.27		
Tanah		996.878.472.254.880	806.436.356.598.744
Peralatan dan Mesin		238.129.446.805.797	184.852.199.595.042
Gedung dan Bangunan		170.243.266.954.328	152.223.086.918.162
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		379.236.269.019.824	347.164.628.245.235
Aset Tetap Lainnya		14.566.662.581.210	11.517.129.897.802
Konstruksi Dalam Pengerjaan		96.447.328.590.044	65.780.773.332.765
Jumlah Aset Tetap		1.895.501.446.206.083	1.567.974.174.587.750

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (audited)

Uraian	Catatan	31 Des 2012 (audited)	31 Des 2011 (audited)
Piutang Jangka Panjang	C.2.28		
Tagihan Penjualan Angsuran		1.375.031.741	1.375.031.741
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		246.721.313.918	249.626.424.418
Piutang Jangka Panjang Lainnya		4.767.505.815.736	3.737.310.550.736
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bruto)		5.015.602.161.395	3.988.312.006.895
Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	C.2.29	(342.011.579.591)	(553.935.159.903)
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		4.673.590.581.804	3.434.376.846.992
Aset Lainnya	C.2.30		
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		225.918.302.700	212.907.765.825
Aset Tak Berwujud		15.705.813.685.536	12.406.618.813.595
Aset yang Dibatasi Penggunaannya		43.873.903.783.522	37.253.051.374.408
Dana Penjaminan		68.309.705.830	75.371.634.076
Dana Kelolaan BLU		21.179.600.007.891	19.320.332.310.233
Aset KKKS		143.976.028.336.922	150.508.980.296.216
AsetEks BPPN		3.972.872.786.807	67.543.984.466.405
Aset Lain-lain		103.540.902.717.960	105.992.977.283.250
Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya		2.430.048.955.900	14.762.445.010.365
Aset Lainnya Penerusan Pinjaman		44.014.286.077.588	46.540.275.969.109
Jumlah Aset Lainnya (Bruto)		378.987.684.360.656	454.616.944.923.482
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Aset Lainnya	C.2.31	(19.901.414.612.944)	(19.416.938.848.980)
Jumlah Aset Lainnya (Bersih)		359.086.269.747.712	435.200.006.074.502
JUMLAH ASET		3.432.982.833.385.363	3.023.447.176.100.695
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga	C.2.32	451.860.600.337	1.755.574.696.265
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.33	29.738.138.976.562	31.780.634.369.020
Utang Biaya Pinjaman	C.2.34	23.099.285.717.583	21.924.038.335.465
Utang Subsidi	C.2.35	54.678.143.480.247	29.767.908.989.742
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.36	118.216.112.940.270	106.777.089.696.825
Utang SBN Jangka Pendek	C.2.37	22.689.283.544.000	39.408.181.897.000
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.38	812.930.306.639	704.437.258.982
Pendapatan Diterima di Muka	C.2.39	6.721.668.089.201	8.639.914.082.680
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.40	9.728.965.176.829	5.687.100.837.136
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		266.136.388.831.668	246.444.880.163.115
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan	C.2.41	1.658.364.752.248	877.330.765.232
Utang Jangka Panjang SBN Dalam Negeri	C.2.42	1.279.847.990.292.207	1.085.324.545.750.551
Utang Kepada Dana Pensiun dan THT	C.2.43	18.161.745.000.000	11.822.231.724.875
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya	C.2.44	5.024.283.525.498	5.033.082.825.744
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		1.304.692.383.569.953	1.103.057.191.066.402
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.45	559.487.514.862.710	571.982.048.619.444
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.46	26.569.686.370.533	25.889.179.304.040
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		586.057.201.233.243	597.871.227.923.484
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		1.890.749.584.803.196	1.700.928.418.989.886
JUMLAH KEWAJIBAN		2.156.885.973.634.864	1.947.373.299.153.001
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL Awal Setelah Penyesuaian	C.2.47	49.242.263.157.735	58.656.722.496.062
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	C.2.48	21.020.562.086.738	46.432.649.228.692
Cadangan Piutang	C.2.49	86.265.604.108.265	84.574.619.543.073
Cadangan Persediaan	C.2.50	62.016.561.796.415	59.214.846.453.160
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.51	9.043.802.422.858	3.810.469.839.673
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.52	(241.956.232.377.965)	(204.483.884.343.763)
Selisih Kurs Bagian Lancar	C.2.53	(4.443.013.069.514)	(2.798.692.210.245)
Dana Lancar Lainnya	C.2.54	56.475.093.646	451.833.601.148
Barang/Jasa yang Masih Harus Diterima	C.2.55	1.889.360.514.088	1.276.453.004.389
Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	C.2.56	(6.721.668.089.201)	(6.321.674.677.095)
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		(23.586.284.356.935)	40.813.342.935.093

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2012 (*audited*)

Uraian	Catatan	31 Des 2012 (<i>audited</i>)	31 Des 2011 (<i>audited</i>)
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.57	932.406.392.642.504	750.030.794.479.804
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.58	1.895.501.446.206.083	1.567.974.174.587.750
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.59	362.406.005.769.186	417.130.365.123.476
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.60	(1.850.355.668.169.689)	(1.679.033.615.946.059)
Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang	C.2.61	(40.275.032.340.650)	(20.841.184.232.370)
JumlahEkuitas Dana Investasi		1.299.683.144.107.434	1.035.260.534.012.601
EKUITAS DANA NETO		1.276.096.859.750.499	1.076.073.876.947.694
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		3.432.982.833.385.363	3.023.447.176.100.695



REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS **(AUDITED)**

III. LAPORAN ARUS KAS (AUDITED)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan	D.2.1.1	465.069.641.549.059	431.121.712.728.316
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	D.2.1.2	337.584.577.488.285	277.800.076.679.384
c. Pajak Bumi dan Bangunan	D.2.1.3	28.968.862.702.282	29.893.164.324.396
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	D.2.1.4	-	(730.151.679)
e. Cukai	D.2.1.5	95.027.881.221.457	77.010.010.613.795
f. Pajak Lainnya	D.2.1.6	4.210.876.548.355	3.928.192.148.211
g. Pajak Perdagangan Internasional	D.2.1.7	49.656.293.809.881	54.121.466.056.958
Total Penerimaan Perpajakan		980.518.133.319.319	873.873.892.399.381
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	D.2.2.1	225.843.973.463.751	213.823.349.552.827
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	D.2.2.2	30.797.972.717.670	28.183.973.126.600
c. PNBP Lainnya	D.2.2.3	73.332.319.648.034	69.226.130.305.985
d. Penerimaan BLU	D.2.2.4	21.704.295.961.034	20.103.995.586.771
Total PNBP		351.678.561.790.489	331.337.448.572.183
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	4.141.701.818.979	4.258.217.536.874
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		1.336.338.396.928.787	1.209.469.558.508.438
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	197.859.657.528.774	175.745.947.140.204
2. Belanja Barang	D.2.5	140.020.870.803.375	124.159.163.392.116
3. Belanja Bunga Utang	D.2.6	100.515.994.274.160	93.260.261.464.346
4. Belanja Subsidi	D.2.7	346.420.404.182.332	295.358.422.916.324
5. Belanja Hibah	D.2.8	75.079.945.754	300.108.798.355
6. Bantuan Sosial	D.2.9	75.602.528.863.964	71.076.290.233.168
7. Belanja Lain-Lain	D.2.10	4.072.855.812.156	5.464.234.053.592
8. Bagi Hasil Pajak	D.2.11	47.214.136.030.788	41.525.561.096.164
9. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.12	62.600.285.617.315	53.974.986.297.954
10. Bagi Hasil Cukai	D.2.13	1.722.781.272.658	1.408.448.764.184
11. Dana Alokasi Umum	D.2.14	273.814.438.203.000	225.533.712.048.000
12. Dana Alokasi Khusus	D.2.15	25.941.483.856.000	24.802.229.752.980
13. Dana Otonomi Khusus	D.2.16	11.952.577.528.000	10.421.312.993.000
14. Dana Penyesuaian	D.2.17	57.399.369.998.082	53.657.183.069.474
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		1.345.212.463.916.358	1.176.687.862.019.861
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		(8.874.066.987.571)	32.781.696.488.577
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset	D.2.18	126.184.876.373	134.372.526.547
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		126.184.876.373	134.372.526.547
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Modal	D.2.19	144.552.713.306.838	117.759.087.730.733
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		144.552.713.306.838	117.759.087.730.733

Uraian	Catatan	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		(144.426.528.430.465)	(117.624.715.204.186)
C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.20	341.258.374.433.800	249.672.520.403.961
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.21	31.403.481.754.448	33.747.178.723.921
3. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	D.2.22	6.533.098.103.446	8.608.845.495.456
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		379.194.954.291.694	292.028.544.623.338
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.23	130.306.379.872.182	89.889.447.737.085
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.24	51.114.817.369.327	47.322.502.478.271
3. Penyertaan Modal Negara/Dana Investasi Pemerintah	D.2.25	18.862.557.487.419	19.200.357.712.264
4. Penerusan Pinjaman	D.2.26	3.753.031.242.391	4.223.841.471.298
Jumlah Arus Kas Keluar (C.II)		204.036.785.971.319	160.636.149.398.918
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		175.158.168.320.375	131.392.395.224.420
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.27	(1.303.714.095.928)	171.690.576.787
2. Kiriman Uang (Neto)	D.2.28	(279.648.621.588)	12.521.440.111
3. Transito (Neto)	D.2.29	99.792.905.182	219.674.491.857
4. Transaksi NA Pihak Ketiga karena kesalahan Rekening (retur) dan koreksi kesalahan KU (Neto)	D.2.30	(17.893.087.832)	909.656.106.798
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran		(1.501.462.900.166)	1.313.542.615.553
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS Penggunaan SAL Penyesuaian Pembukuan		20.356.110.002.173 (56.170.000.000.000) (755.835.540.649)	47.862.919.124.364 (40.319.043.049.000) 1.287.457.711.323
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU Koreksi Saldo Awal	D.1.2	(36.569.725.538.476)	8.831.333.786.687
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi	D.1.1	107.842.612.387.387 305.453.644.869	98.985.089.736.159 26.188.864.543
SALDO AWAL KAS BUN, KPPN DAN BLU setelah Koreksi	D.1.1	108.148.066.032.256	99.011.278.600.702
SALDO AKHIR KAS BUN, KPPN, DAN BLU		71.578.340.493.780	107.842.612.387.389
Rekening Pemerintah Lainnya	C.2.4	13.495.665.498.448	6.615.552.720.213
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.5	213.458.829.221	292.795.937.959
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.6	196.150.458.978	252.900.321.124
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2.7	5.447.004.782.640	6.327.755.216.087
Kas pada BLU yang Belum Disahkan	D.1.3	80.029.529.762	100.924.694.157
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)		(768.125.137.193)	(170.553.016.059)
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		90.242.524.455.636	121.261.988.260.870



REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Kas Menuju Akrual).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
9. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/20011.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

PEREKONOMIAN GLOBAL

Kondisi
perekonomian
global tahun
2012

Kondisi perekonomian global tahun 2012 menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Di negara maju, pertumbuhan perekonomian yang relatif rendah ini diakibatkan oleh adanya krisis utang di Eropa dan masalah jurang fiskal (*fiscal cliff*) di Amerika Serikat. Memburuknya perekonomian negara-negara maju tersebut telah berdampak pada melambatnya perekonomian sebagian besar negara *emerging markets* seperti China dan India. Kedua negara yang merupakan mitra dagang utama Indonesia juga mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan perlambatan ekonomi dunia, tekanan inflasi dunia selama tahun 2012 secara umum mengalami penurunan.

ASUMSI DASAR EKONOMI MAKRO

Dalam paruh kedua tahun 2011 hingga memasuki tahun 2012, perkembangan berbagai faktor eksternal seperti pertumbuhan ekonomi global dan harga minyak mentah di pasar internasional, telah menyebabkan beberapa indikator ekonomi makro terutama harga minyak mentah Indonesia (ICP) dan nilai tukar Rupiah berbeda cukup signifikan dari asumsi yang digunakan dalam APBN 2012. Berbagai perkembangan tersebut diperkirakan memberikan tekanan yang sangat berat terhadap pelaksanaan APBN 2012. Perkembangan berbagai asumsi dasar ekonomi makro tersebut menjadi latar belakang perlunya pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2012, lebih cepat dari jadwal regular, yang biasanya dilakukan setelah penyampaian laporan pelaksanaan APBN Semester I.

Perubahan
Asumsi Dasar
pada APBN dan
Relisasi TA 2012

Tabel 1 Asumsi Dasar APBN TA 2012

Indikator	APBN 2012	APBNP 2012
Pertumbuhan Ekonomi (%)	6,7	6,5
Tingkat Inflasi (%)	5,3	6,8
Nilai tukar Rupiah (Rp/USD)	8.800	9.000
Suku Bunga (SPN) 3 bulan (%)	6,0	5,0
Harga Minyak (USD/Barrel)	90,0	105,0
Lifting Minyak (Ribu Barrel/Hari)	950	930,0

Sumber: Nota Keuangan APBNP 2012

POKOK-POKOK KEBIJAKAN FISKAL DAN PERUBAHAN POSTUR APBN 2012

Tema
Pembangunan
RKP 2012

Tema pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2012 yang ditetapkan oleh Pemerintah bersama dengan DPR RI tahun 2012 adalah “Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas, Inklusif dan Berkeadilan Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat”. Untuk mendukung rencana tersebut, Pemerintah memfokuskan pada tiga langkah utama, yakni: (i) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia sejahtera; (ii) memperkuat pilar-pilar demokrasi; dan (iii) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang.

RKP 2012
sebagai
penjabaran
RPJMN 2010-
2014

RKP tahun 2012 adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) tahun 2010-2014. RKP tahun 2012 adalah untuk mendukung sasaran pembangunan dalam RPJM 2010-2014 dalam bentuk: (i) sasaran pembangunan kesejahteraan; (ii) sasaran pembangunan demokrasi; dan (iii) sasaran penegakan hukum. Pemerintah Indonesia senantiasa konsisten untuk menjalankan komitmen mendorong pertumbuhan ekonomi (*pro-growth*), mengurangi pengangguran (*pro-job*), mengentaskan kemiskinan (*pro-poor*), serta pembangunan berwawasan lingkungan (*pro-environment*). Sejalan dengan hal tersebut, sasaran di bidang ekonomi ditujukan untuk mencapai tingkat pertumbuhan pada kisaran 6,5 persen sejalan dengan sasaran RPJMN 2010-2014 rata-rata 6,3-6,8 persen pertahun. Pengendalian tingkat inflasi pada tahun 2012 diupayakan sebesar 6,8 persen (APBNP 2012). Penurunan tingkat pengangguran menjadi sekitar 6,4 - 6,6 persen dimana sasaran RPJMN adalah sebesar 5 sampai 6 persen pada akhir tahun 2014 dan kemiskinan menjadi 10,5 sampai 11,5 persen dimana sasaran RPJMN pada akhir tahun 2014 sebesar 8 sampai 10 persen. Untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran tersebut, Pemerintah menetapkan sebelas prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RKP 2012 yang meliputi (1) reformasi birokrasi dan tata kelola; (2) pendidikan; (3) kesehatan dan kependudukan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6) infrastruktur, (7) iklim investasi dan iklim usaha, (8) energi, (9) lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik, (11) kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi.

Pokok-pokok
Kebijakan Fiskal
dan Postur APBN
2012

Perubahan APBN 2012, selain menampung perubahan indikator ekonomi makro dalam tahun 2012, juga dimaksudkan agar berbagai besaran APBN menjadi realistis dan dapat dilaksanakan secara baik. Perubahan kebijakan fiskal dan langkah-langkah antisipatif dalam perubahan APBN 2012 meliputi antar lain: (1) Penambahan dana infrastuktur dan kebutuhan mendesak, yang dibiayai dari pemanfaatan saldo anggaran lebih (SAL); (2) Kebijakan pengendalian subsidi BBM; (3) pemotongan Belanja Pegawai dan Belanja Barang yang tidak mempengaruhi *output* dan *outcome* pada kementerian negara/lembaga; (4) perluasan defisit anggaran serta (5) optimalisasi pendapatan negara utamanya peningkatan PNBPN.

Tabel 2 Realisasi Anggaran TA 2012 dan Perubahan APBN 2012

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	TA 2012 (Realisasi)	TA 2012	
		APBN	APBNP
Penerimaan Perpajakan	980,52	1.032,57	1.016,24
PNBP	352,00	227,99	341,14
Penerimaan Hibah	5,79	0,82	0,82
Pendapatan Negara & Hibah	1.338,31	1.261,38	1.358,20
Belanja Pemerintah Pusat	1.010,56	964,99	1.069,53
Transfer ke Daerah	480,65	470,41	478,77
Total Belanja Negara	1.491,41	1.435,40	1.548,30
<i>Suspen</i>	0,21	-	-
Surplus (Defisit)	(153,10)	(174,02)	(190,10)
Pembiayaan	174,96	124,02	190,10

Sumber: Nota Keuangan APBNP 2012

*Kebijakan Umum
Perpajakan*

Dari sisi penerimaan negara, Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui pokok-pokok kebijakan umum perpajakan. Pokok-pokok kebijakan umum perpajakan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut: (a) melanjutkan pokok-pokok kebijakan perpajakan yang telah dilakukan di tahun 2011; (b) melakukan perbaikan pelayanan dan penyuluhan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela; (c) melakukan perbaikan kebijakan perpajakan untuk mendukung optimalisasi pendapatan Negara dan mendukung kegiatan ekonomi, termasuk dengan pemberian insentif fiskal; (d) melakukan pembenahan internal aparatur dan sistem perpajakan; (e) penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak yang tidak patuh; dan (f) mensinergikan unsur Pemerintah dalam penggalan potensi perpajakan dengan memberikan dukungan data/informasi kepada Kementerian Keuangan.

*Program
Penggalan
Potensi
Perpajakan*

Sepanjang tahun 2012, Pemerintah telah melakukan berbagai program yang bertujuan untuk menggali potensi penerimaan perpajakan. Program-program tersebut antara lain adalah program intensifikasi perpajakan; program ekstensifikasi perpajakan; program *canvassing* (penyisiran potensi pajak berbasis wilayah); program intensifikasi penagihan; program penyempurnaan mekanisme keberatan banding dalam proses pengadilan pajak; *law enforcement*, yang meliputi pemeriksaan dan penagihan serta melakukan kegiatan pembinaan kepada wajib pajak yang telah terdaftar; dan mengefektifkan kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan.

Boks 1. Kebijakan Pajak Tahun 2012

Krisis yang terjadi pada beberapa negara Eropa memiliki potensi untuk mempengaruhi penerimaan pajak tahun 2012. Dampak krisis tersebut sudah mulai terasa dengan adanya penurunan ekspor-impor. Penurunan ekspor-impor akan berdampak pada turunnya penerimaan pajak terutama sektor Pajak Penghasilan (PPH) Impor dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Impor. Penerimaan perpajakan semester I 2012 mencapai Rp 457,00 triliun atau sekitar 44,26 persen dari target tahun 2012. Capaian tersebut sudah cukup baik mengingat kondisi perekonomian global yang tidak menentu. Untuk itu, pada semester II-2012, Pemerintah menggenjot semua sektor guna mencapai target penerimaan perpajakan yang sudah ditentukan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp 1.016,24 triliun. Selama ini tren penerimaan pajak pada semester II biasanya lebih tinggi dibandingkan realisasinya pada semester I. Namun demikian untuk tahun 2012, kemungkinan terjadinya perlambatan perekonomian Indonesia terkait krisis global harus diwaspadai. Oleh karena itu Pemerintah mengambil beberapa langkah pengamanan penerimaan pajak seperti perbaikan sistem PPN, perbaikan sistem teknologi informasi untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak serta melakukan sensus pajak untuk menggali potensi penerimaan pajak yang lebih besar lagi.

Registrasi Ulang PKP

Tahapan awal dari perbaikan sistem PPN adalah Ditjen Pajak melaksanakan registrasi ulang pada Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dimulai sejak Februari sampai dengan 31 Agustus 2012. Ditjen Pajak merencanakan akan mencabut sekitar 300.000 PKP yang berpotensi menyelewengkan faktur pajak. Selama ini status PKP rawan disalahgunakan oleh pengusaha dengan menerbitkan faktur pajak fiktif. Dengan langkah ini diharapkan dapat mencegah kebocoran penerimaan PPN.

Sensus Pajak Nasional

Sensus Pajak Nasional adalah proses pengumpulan data Wajib Pajak untuk penggalan potensi perpajakan. SPN dilaksanakan karena sampai saat ini masih sangat banyak orang pribadi dan perusahaan di Indonesia yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sensus pajak akan mendata para Wajib Pajak atau objek pajak yang berada di sentra bisnis, *high rise building*, perumahan dan ditambah dengan objek pajak potensial. Tahun 2012, SPN dilaksanakan mulai 1 Mei 2012 hingga 31 Oktober 2012. Ditjen Pajak menargetkan 2 juta Wajib Pajak bisa terdata dalam sensus pajak tahun ini atau meningkat dari target 2011 yaitu sebesar 900 ribu Wajib Pajak.

Kebijakan Lainnya

Selain kebijakan-kebijakan perpajakan yang ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak, Pemerintah juga membuat kebijakan-kebijakan perpajakan yang memberikan keringanan perpajakan bagi masyarakat. Kebijakan itu antara lain rencana kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penetapan sumbangan umat Hindu sebagai pengurang pajak, dan pembebasan PPN untuk rumah murah.

Pemerintah di tahun 2012 merencanakan kenaikan PTKP dari Rp 15,8 juta menjadi Rp 24 juta per tahun. Dengan kata lain, masyarakat penghasilan hingga Rp 2 juta per bulan tidak akan dipungut pajak. Kenaikan PTKP ini diharapkan akan membantu meringankan beban masyarakat yang berpenghasilan rendah. Kenaikan PTKP juga diharapkan dalam jangka panjang akan meningkatkan penerimaan pajak. Hal ini karena peningkatan PTKP itu akan memberikan insentif bagi masyarakat kecil, baik untuk pengembangan usaha baru, maupun ke arah konsumsi.

Pada bulan Juni 2012, Pemerintah telah menetapkan sumbangan wajib umat Hindu yang disumbangkan lewat Badan Dharma Dana Nasional Yayasan Adikara Dharma Parisad (BDDN YADP) dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dengan begitu, sumbangan tersebut dapat menjadi pengurang penghasilan kena pajak. Sebelumnya pada tahun 2011, Pemerintah juga telah menetapkan 20 Badan/Lembaga penerima zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto.

Pemerintah juga merencanakan membebaskan pengenaan PPN untuk rumah murah senilai Rp 90 juta sampai Rp 145 juta. Untuk harga rumah Rp 90 juta berlaku untuk rumah di Jabodetabek termasuk daerah lainnya dan rumah Rp 145 juta khusus di Papua. Dengan kebijakan ini diharapkan membantu masyarakat kelas bawah yang akan membeli rumah murah.

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak

PEREKONOMIAN INDONESIA

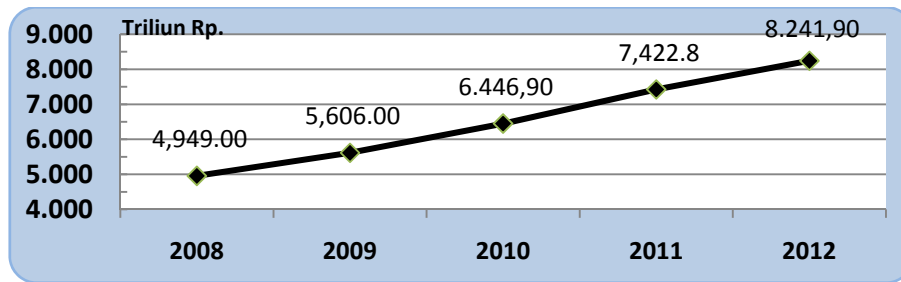
*Pengaruh
Perlambatan
Perekonomian
Global terhadap
kondisi
perekonomian
Indonesia*

Di tengah kondisi perlambatan perekonomian dunia, ekonomi Indonesia sepanjang tahun 2012 tumbuh cukup baik sebesar 6,23 persen meskipun lebih rendah dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,49 persen. Daya tahan perekonomian ini didukung oleh stabilitas makro dan sistem keuangan yang mampu memperkuat basis permintaan domestik. Dari sisi penggunaan, pertumbuhan ini didukung oleh tingkat konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang meningkat. Peningkatan ini mampu menahan dampak menurunnya pertumbuhan ekspor di tahun 2012. Pertumbuhan komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mengalami peningkatan sebesar 9,81 persen dan pertumbuhan konsumsi rumah tangga meningkat sebesar 5,28 persen, lebih tinggi dibanding dengan tahun sebelumnya. Faktor-faktor yang mendukung tingginya konsumsi rumah tangga tersebut antara lain meningkatnya jumlah kelas menengah, menguatnya keyakinan konsumen, membaiknya daya beli masyarakat, rendahnya inflasi dan tersedianya pembiayaan konsumsi. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga didukung keyakinan konsumen yang cukup tinggi sebagaimana tercermin dari Indeks Tendensi Konsumen (ITK) nasional tahun 2012 yang mencapai rata-rata di atas 100 yang artinya kondisi ekonomi konsumen meningkat dari periode sebelumnya. Membaiknya ekonomi konsumen didorong oleh peningkatan pendapatan, rendahnya pengaruh inflasi terhadap konsumsi makanan sehari-hari, dan peningkatan konsumsi beberapa komoditi makanan dan bukan makanan. Kinerja investasi pada tahun 2012 mencapai 10,7 persen meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja investasi disebabkan antara lain adanya optimisme pelaku usaha terhadap perekonomian Indonesia, perbaikan iklim investasi, serta terjaganya kestabilan makro ekonomi. Dari sisi produksi pertumbuhan ekonomi terutama ditopang oleh kinerja sektor Industri Pengolahan, sektor Perdagangan, Hotel, dan Restoran, serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi.

*Produk -Domestik
Bruto*

Jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara, atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dinyatakan dalam Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Sesuai dengan pendekatan produksi, penghitungan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan tersebut dikelompokkan ke dalam sembilan lapangan usaha/sector. Dari pendekatan pendapatan, PDB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi, berupa upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan dari pendekatan pengeluaran, PDB adalah gabungan dari jumlah pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori, dan ekspor neto. PDB atas harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun, sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar. Kedua jenis PDB ini menjadi indikator yang digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi (PDB atas dasar harga berlaku), dan mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun (PDB atas dasar harga konstan).

PDB atas dasar harga berlaku selama tahun 2012 mencapai Rp8.241,9 triliun, naik sebesar Rp819,1 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 sebesar Rp7.422,8 triliun. Peningkatan terjadi disemua sektor ekonomi. Pertumbuhan tertinggi terjadi di sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 9,98 persen. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2012 mencapai Rp2.618,1 triliun, naik Rp153,4 triliun dibandingkan tahun 2011 sebesar Rp2.464,7 triliun.

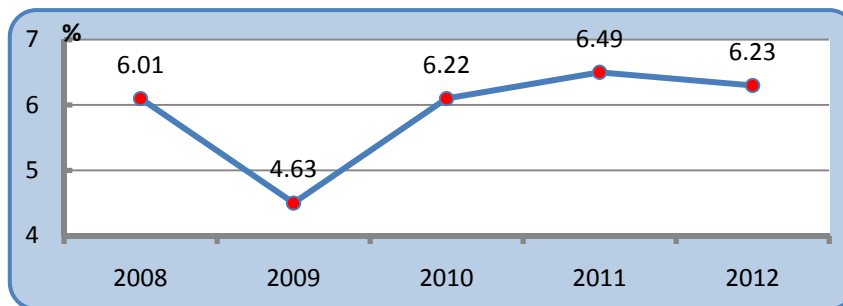


Sumber : Badan Pusat Statistik

Grafik 1 Tren PDB Harga Berlaku Tahun 2008-2012 (rp triliun)

Tren pertumbuhan ekonomi tahun 2008-2012

Lima tahun terakhir (tahun 2008-2012) pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai rata-rata sebesar 5,9 persen. Pada tahun 2008 perekonomian domestik tumbuh sebesar 6,01 persen, selanjutnya melambat pada posisi 4,63 persen di tahun 2009. Pada tahun 2010 dan 2011 meningkat menjadi 6,22 persen dan 6,49 persen kemudian mengalami perlambatan menjadi 6,23 persen pada tahun 2012. Perlambatan perekonomian domestik ini sejalan dengan perlambatan ekonomi global.



Sumber : Badan Pusat Statistik

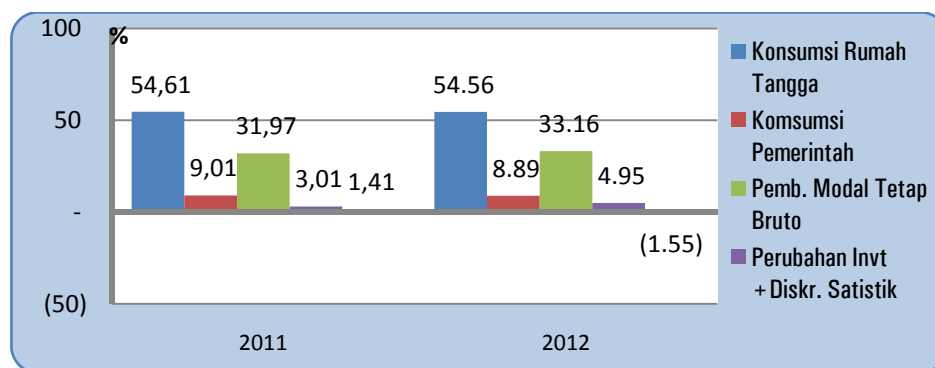
Grafik 2 Pertumbuhan Ekonomi Selama Tahun 2008 – 2012

Sumber-sumber pertumbuhan

Dilihat dari sisi penggunaan atau permintaan, PDB dipengaruhi oleh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, investasi fisik (Pembentukan Modal Tetap Bruto dan Perubahan Inventori) dan Ekspor-Impor. Secara *y-on-y* pertumbuhan PDB pada tahun 2012 terhadap tahun 2011 didukung oleh komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebesar 9,81 persen, diikuti Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh sebesar 5,28 persen, Komponen Ekspor Barang dan Jasa 2,01 persen, dan Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 1,25 persen. Sementara, Komponen Impor sebagai faktor pengurang mengalami pertumbuhan 6,65 persen.

Komponen PDB berdasarkan penggunaan

Struktur PDB menurut komponen penggunaan tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 3. Kontribusi terbesar terhadap PDB masih berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga yaitu sebesar 54,56 persen, mengalami penurunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 54,61 persen. Kontribusi pengeluaran konsumsi Pemerintah turun dari semula 9,01 persen pada tahun 2011 menjadi 8,89 persen pada tahun 2012. Kontribusi PMTB pada tahun 2012 sebesar 33,16 persen, mengalami kenaikan bila dibandingkan periode yang sama tahun 2011 yang mencapai 31,97 persen. Kontribusi Perubahan Inventori dan Diskrepansi Statistik pada tahun 2012 sebesar 4,95 persen naik dari tahun 2011 sebesar 3,01 persen. Kontribusi Ekspor dan impor dari semula 26,35 persen dan 24,94 persen pada tahun 2011 turun menjadi 24,26 persen dan 25,81 persen pada tahun 2012.

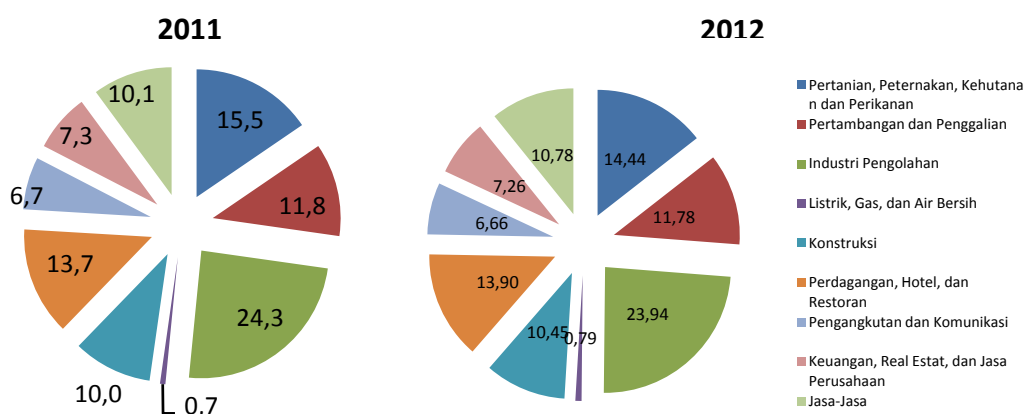


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 3 Struktur PDB Menurut Komponen Penggunaan tahun 2012

Komponen PDB berdasarkan lapangan usaha

Komponen PDB berdasarkan lapangan usaha pada tahun 2012 antara lain adalah Sektor Industri Pengolahan yang apabila dilihat dari kontribusinya terhadap PDB sebesar 23,94 persen mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 24,33 persen, tetapi secara nominal tumbuh sebesar 5,73 persen; kemudian Sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan tumbuh 3,97 persen dan berkontribusi sebesar 14,44 persen mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 14,70 persen; disusul oleh Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran tumbuh 8,11 persen dan berkontribusi 13,90 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 13,80 persen; Sektor Pertambangan dan Penggalan tumbuh sebesar 1,49 persen dan berkontribusi sebesar 11,78 persen mengalami penurunan dari tahun 2011 sebesar 11,85 persen; sektor Jasa-jasa tumbuh 5,24 persen dan berkontribusi sebesar 10,78 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 10,56 persen; sektor Konstruksi tumbuh 7,50 persen dan berkontribusi sebesar 10,45 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 10,16 persen; Sektor Keuangan, Real Estat dan Jasa Perusahaan tumbuh 7,15 persen dan berkontribusi sebesar 7,26 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 7,21 persen; Sektor Pengangkutan dan Komunikasi tumbuh 9,98 persen dan berkontribusi sebesar 6,66 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 6,62 persen; dan Sektor Listrik, Gas dan Air Bersih tumbuh 6,40 persen dan berkontribusi sebesar 0,79 persen mengalami kenaikan dari tahun 2011 sebesar 0,77 persen. (lihat Grafik 4).

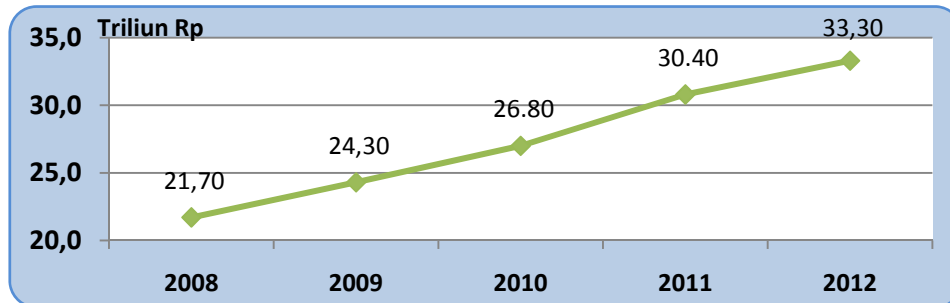


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 4 Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha tahun 2012 (%)

PDB perkapita tahun 2012

Seiring dengan tren peningkatan pertumbuhan PDB, maka PDB per kapita tahun 2012 juga mengalami peningkatan cukup signifikan. PDB perkapita merupakan PDB atas dasar harga berlaku dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Pada tahun 2012, nilai PDB perkapita mencapai Rp33,3 juta (USD3.562,6) dengan laju peningkatan sebesar 9,58 persen dibandingkan dengan PDB per kapita tahun 2011 yang sebesar Rp30,4 juta (USD3.498,2)



Sumber: Badan Pusat Statistik

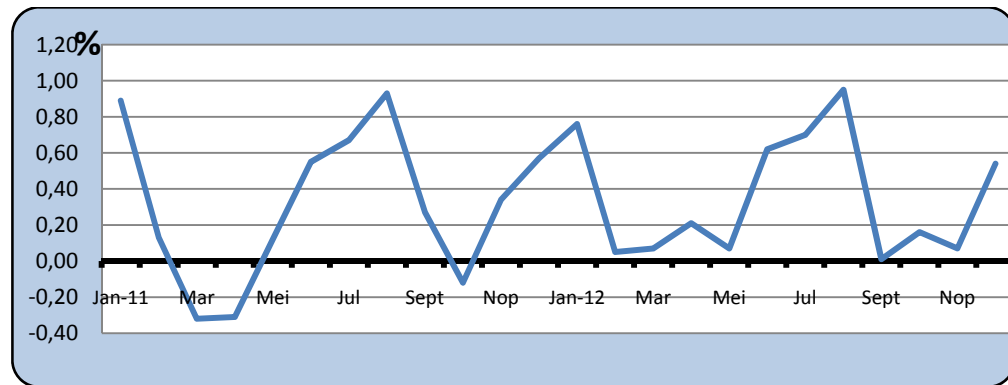
Grafik 5 Perkembangan PDB Per Kapita tahun 2008-2012 (Triliun Rp)

Inflasi

Laju inflasi tahun kalender 2012 tercatat sebesar 4,30 persen di bawah yang ditetapkan dalam APBNP sebesar 6,8 persen. Apabila dilihat dari komponen yang membentuk inflasi, hingga Desember 2012, inflasi komponen bergejolak (*volatile foods*) menunjukkan peningkatan tertinggi. Pada Desember 2012, inflasi tahunan komponen *volatile foods* mencapai 5,68 persen (*y-o-y*) lebih tinggi bila dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 3,37 persen (*y-o-y*). Komponen inflasi inti berada dalam tingkat yang moderat sebesar 4,40 persen (*y-o-y*) walaupun sedikit meningkat dibanding dengan tahun sebelumnya sebesar 4,34 persen (*y-o-y*). Terkendalnya tingkat inflasi inti tersebut didukung oleh terkelolanya permintaan domestik serta meningkatnya kemampuan sisi produksi dalam merespons permintaan domestik sejalan dengan tingginya pertumbuhan investasi dalam beberapa tahun terakhir.

Relatif rendahnya inflasi inti juga disebabkan oleh rendahnya tingkat inflasi dari sisi impor (*imported inflation*) seiring dengan penurunan harga komoditas akibat perlambatan perekonomian dunia, nilai tukar yang terjaga dengan tingkat volatilitas rendah, serta kebijakan Pemerintah terkait bea masuk impor. Selain itu, percepatan pelaksanaan pembangunan sarana dan infrastruktur transportasi melalui inisiatif MP3EI diharapkan dapat memperlancar arus distribusi dalam wilayah maupun antar wilayah. Komponen inflasi harga diatur Pemerintah (*administered prices*) mencapai 2,66 persen (*y-o-y*) relatif lebih rendah dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai 2,78 persen (*y-o-y*). Relatif rendahnya inflasi komponen ini didorong oleh relatif minimnya perubahan kebijakan pemerintah di bidang harga, khususnya dengan dibatalkannya kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi per 1 April 2012. Berdasarkan kelompok pengeluaran, kelompok makanan jadi, kelompok bahan makanan, dan kelompok sandang merupakan tiga kelompok utama yang mendorong kenaikan inflasi tahunan. Selama tahun 2012, kelompok makanan jadi mengalami inflasi sebesar 6,11 persen (*y-o-y*), Kelompok bahan makanan mengalami peningkatan sebesar 5,68 persen (*y-o-y*), seiring dengan kenaikan harga bahan makanan pokok di pasar domestik. Sementara itu kelompok sandang mengalami peningkatan sebesar 4,67 persen (*y-o-y*).

Sepanjang tahun 2012, inflasi tertinggi terjadi pada bulan Agustus 2012 sebesar 0,95 persen. Komoditas yang dominan menyumbang inflasi pada bulan tersebut antara lain: tarif angkutan udara, ikan segar, tarif angkutan antar kota, tahu mentah, dan tempe. Dalam rangka menjaga kestabilan harga domestik, Pemerintah terus melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia melalui forum TPI dan TPID terutama pada upaya peningkatan produksi, kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga pangan strategis. Upaya ini tercermin dari inflasi yang rendah dan stabil yang merupakan prasyarat utama bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Laju inflasi bulanan (*m-t-m*) selama tahun 2012 tergambar di Grafik 6.



Sumber: Badan Pusat Statistik

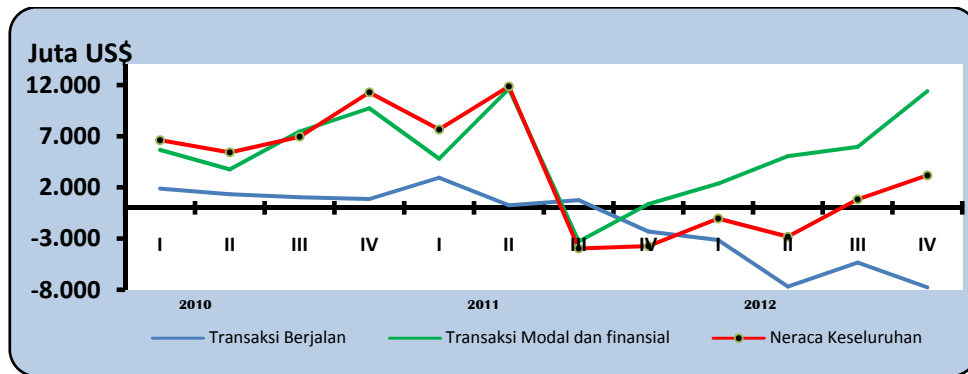
Grafik 6 Tren Laju Inflasi Bulanan (m-t-m) selama Tahun 2011 - 2012

Nilai tukar Rupiah

Nilai tukar Rupiah pada tahun 2012 mengalami depresiasi dengan volatilitas yang cukup rendah. Rupiah secara rata-rata terdepresiasi sebesar 6,3 persen (*y-o-y*) ke Rp9.638/USD dibawah asumsi APBNP 2012 sebesar Rp9.000/USD. Sementara itu, secara *point-to-point*, rupiah melemah sebesar 5,91 persen dan ditutup pada level Rp9.670/USD dengan volatilitas yang lebih terjaga pada level 4,3 persen (*annualised*). Tekanan depresiasi rupiah selama tahun 2012 terutama disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global dan melebarnya defisit transaksi berjalan. Tekanan depresiasi terutama terjadi pada triwulan II dan III tahun 2012 terkait dengan memburuknya kondisi perekonomian global, khususnya di kawasan Eropa, yang berdampak pada penurunan arus masuk portofolio asing ke Indonesia. Dari sisi domestik, tekanan rupiah berasal dari tingginya permintaan valas untuk keperluan impor di tengah perlambatan kinerja ekspor. Nilai tukar rupiah kembali bergerak stabil pada triwulan IV 2012 seiring dengan peningkatan arus masuk modal asing yang cukup besar, baik dalam bentuk arus masuk modal portofolio maupun investasi langsung. Meningkatnya arus modal asing yang cukup besar tersebut didukung oleh kepercayaan investor terhadap kondisi fundamental dan prospek ekonomi Indonesia, perolehan status atau peringkat layak investasi (*investment grade*), faktor risiko yang membaik, dan tingkat imbal hasil dalam aset rupiah yang masih menarik.

Neraca Pembayaran Indonesia

Pertumbuhan ekonomi dunia yang mengalami perlambatan turut mempengaruhi kinerja Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) tahun 2012. Setelah mengalami defisit pada triwulan I dan II, kinerja NPI pada triwulan III dan IV tahun 2012 mengalami surplus. Secara keseluruhan tahun 2012, NPI mencatat surplus USD0,2 miliar. Kinerja NPI tahun 2012 antara lain dipengaruhi oleh meningkatnya tekanan dari meningkatnya defisit neraca Transaksi Berjalan (TB). Defisit neraca TB tersebut sejalan dengan menurunnya ekspor sebagai akibat dari perlambatan ekonomi dunia di tengah impor yang masih tinggi akibat aktifitas ekonomi domestik yang masih kuat. Meningkatnya defisit neraca transaksi berjalan tersebut juga akibat dari melonjaknya konsumsi BBM di dalam negeri. Namun, defisit transaksi berjalan dapat diimbangi oleh surplus transaksi modal dan finansial yang meningkat dibanding tahun sebelumnya. Transaksi modal dan finansial (TMF) mencatat surplus yang cukup signifikan ditopang oleh kenaikan investasi langsung (PMA), investasi portofolio, maupun penarikan utang luar negeri swasta. Meningkatnya arus modal masuk tersebut menunjukkan bahwa di tengah kondisi perekonomian global yang masih diliputi oleh ketidakpastian, keyakinan investor asing terhadap ketahanan dan prospek perekonomian Indonesia tetap tinggi.

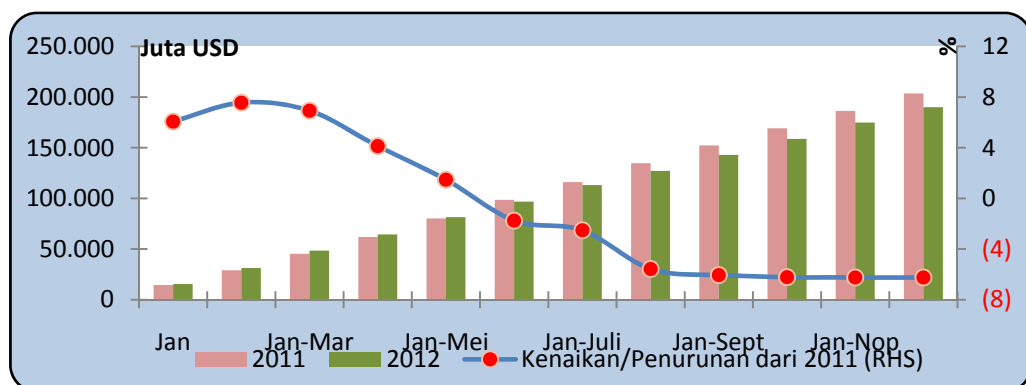


Sumber : Bank Indonesia

Grafik 7 Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) Triwulanan 2010-2012

Ekspor tahun
2012 turun

Secara kumulatif nilai ekspor selama tahun 2012 sebesar USD190.04 miliar turun sebesar 6,61 persen dibanding tahun sebelumnya, terdiri dari ekspor non migas senilai USD153.07 miliar turun 5,52 persen dari tahun sebelumnya dan ekspor migas sebesar USD36.97 miliar turun 10,50 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Kinerja pertumbuhan ekspor selama tahun 2012 mengalami tren perlambatan bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebagaimana tercermin pada grafik 8. Perlambatan ini sebagai dampak melemahnya perekonomian global sepanjang tahun 2012. Perlambatan ekspor disebabkan utamanya oleh melambatnya permintaan dari negara mitra dagang utama Indonesia seperti China dan Jepang, terutama pada komoditas industri. Melambatnya ekspor juga didorong oleh tren penurunan harga komoditas terutama komoditas sumber daya alam. Dari sisi domestik, penurunan kinerja ekspor disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk mengetatkan ekspor mineral mentah yang ditujukan untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam jangka menengah.

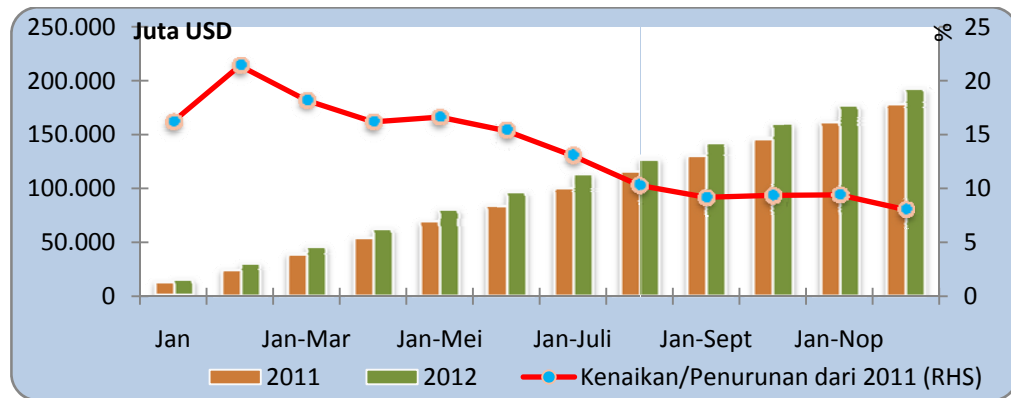


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 8 Perkembangan Ekspor tahun 2012 (juta USD)

Tren Impor Tahun
2012 mengalami
penurunan

Permintaan domestik yang masih kuat menyebabkan impor masih tumbuh cukup tinggi walaupun mengalami tren penurunan di tengah melambatnya ekspor. Sepanjang tahun 2012 total impor mencapai USD191.67 miliar naik sebesar 8,02 persen dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya, terdiri dari impor non migas senilai USD149.10 miliar naik 9,05 persen dari tahun sebelumnya dan impor migas sebesar USD42.56 miliar naik 4,58 persen dibanding dengan tahun sebelumnya. Sejalan dengan meningkatnya kegiatan investasi, peningkatan impor terutama terjadi di kelompok barang modal, terutama dalam bentuk mesin dan alat angkut, termasuk pesawat terbang. Sementara itu masih tingginya kegiatan produksi di dalam negeri mengakibatkan impor bahan baku juga masih tetap tinggi diantaranya adalah impor jenis golongan barang besi dan baja yang mengalami peningkatan sebesar 36,82 persen dibanding tahun sebelumnya. Tren perkembangan impor selama tahun 2012 dapat dilihat pada grafik 9.

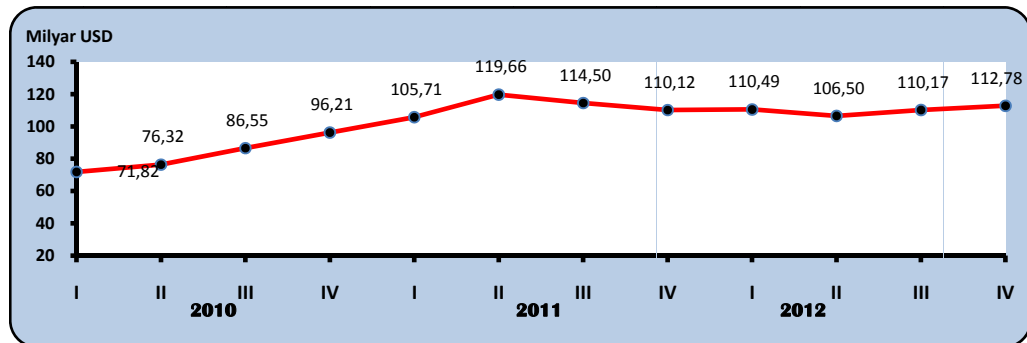


Sumber: Badan Pusat Statistik

Grafik 9 Perkembangan Impor tahun 2012 (juta USD)

Cadangan Devisa

Derasnya arus modal asing masuk ke Indonesia baik investasi portofolio maupun FDI, telah mampu meningkatkan posisi cadangan devisa Indonesia. Cadangan Devisa sampai dengan akhir Desember 2012 mencapai USD112,78 miliar atau setara dengan 6,1 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Cadangan Devisa ini secara nominal naik dibanding dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar USD110,1 miliar.



Sumber : Bank Indonesia

Grafik 10 Cadangan Devisa Triwulanan 2010-2012

BI Rate

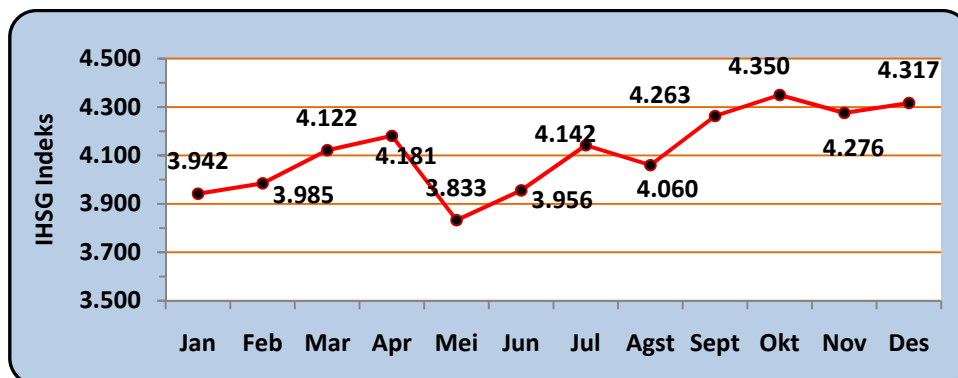
Pada awal tahun 2012, BI *rate* ditetapkan sebesar 6,00 persen, selanjutnya mengalami penurunan di bulan Februari 2012 menjadi sebesar 5,75 persen yang tidak mengalami perubahan hingga bulan Desember 2012. Langkah ini sejalan dengan arah kebijakan moneter BI untuk membawa inflasi ke dalam rentang sasaran 4,5 persen \pm 1 persen.

Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN)

Kinerja pasar Surat Berharga Negara (SBN) tetap tumbuh positif meski pemulihan perekonomian global masih diliputi ketidakpastian. Walaupun pada awal tahun 2012 para pelaku SBN merespon positif penurunan BI *rate*, dalam perkembangan selanjutnya memburuknya risiko eksternal dan domestik menyebabkan tekanan di pasar SBN meningkat pada pertengahan tahun 2012. Pada Mei 2012 imbal hasil di pasar SBN mengalami kenaikan menjadi 6,52 persen. Realisasi SBN 3 bulan seiring dengan langkah-langkah lanjutan yang dilakukan oleh pemerintah dan pencapaian peringkat layak investasi (*investment grade*), pergerakan imbal hasil SBN kembali menurun dan sampai dengan akhir tahun ditutup pada level lebih rendah dibanding dengan tahun 2011. Imbal hasil SBN seluruh tenor tahun 2012 turun sebesar 72 bps ke level 5,16 persen dibanding tahun sebelumnya. Selama tahun 2012, investor asing mencatat aksi beli pada seluruh tenor lebih tinggi dari pada periode yang sama tahun sebelumnya. Adapun rata-rata realisasi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) 3 bulan selama tahun 2012 adalah 3,19 persen. Hal ini seiring dengan fundamental ekonomi domestik yang membaik dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang stabil serta imbal hasil yang cukup menarik dibandingkan dengan negara-negara di kawasan.

IHSG

Kinerja saham domestik di tahun 2012 mencatat prestasi yang positif walaupun diwarnai dengan beberapa gejolak sebagai imbas dari peningkatan risiko eksternal. Dalam perkembangannya, kinerja saham sempat terimbas oleh gejolak pasar keuangan global menyusul berlarutnya penyelesaian krisis Eropa. Hal tersebut mengakibatkan selama beberapa periode kinerja pasar saham domestik mengalami penurunan. Dukungan stabilitas makro ekonomi yang cukup kondusif, kinerja emiten yang stabil serta kebijakan perekonomian yang akomodatif menjadi faktor penopang penguatan IHSG hingga kembali mencapai level tertinggi sebesar 4.375,71 pada tanggal 26 Nopember 2012. Sampai dengan tanggal 28 Desember 2012, IHSG ditutup pada level 4.316,69 atau tumbuh sebesar 12,9 persen jika dibanding dengan tahun 2011. Dinamika yang terjadi selama tahun 2012 menunjukkan peningkatan daya tahan pasar saham domestik dalam menghadapi imbas dari ketidakpastian perekonomian global. Peningkatan daya tahan tersebut antara lain tercermin dari *market confidence* yang relatif terjaga pada saat pasar saham mengalami tekanan. Indikasi dari *market confidence* yang relatif terjaga dapat dilihat antara lain dari (i) volume perdagangan yang tidak mengalami perubahan drastis sehingga pembentukan harga terjadi secara normal, (ii) reaksi investor non residen dalam melakukan aksi jual (*force sale*) yang bersifat temporer dan diikuti dengan aksi pembelian kembali (*buy back*), (iii) kecepatan pemulihan harga saham yang lebih baik. Jika dilihat lebih jauh, relatif terjeganya *market confidence* tersebut dilandasi oleh kepercayaan pasar terhadap komitmen yang kuat dari Pemerintah dan Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas makro ekonomi serta prospek emiten yang cukup baik. Dukungan kedua faktor tersebut mendorong mekanisme stabilisasi oleh pelaku pasar berjalan dengan baik sehingga pemulihan kinerja pasar dapat segera terjadi.



Sumber: Bank Indonesia

Grafik 11 Tren Laju IHSG Bulanan Tahun 2012

Fungsi
intermediasi
perbankan yang
membaik

Secara umum, selama tahun 2012 sistem keuangan dan perbankan menunjukkan kinerja yang positif dengan ketahanan yang tetap terjaga di tengah kondisi eksternal dan domestik yang masih diliputi oleh ketidakpastian. Stabilitas sistem keuangan nasional terjaga disertai dengan fungsi intermediasi yang terus meningkat dalam mendukung pembiayaan perekonomian. Kinerja intermediasi perbankan dapat dipertahankan pada tingkat pertumbuhan yang aman bagi perekonomian. Pertumbuhan kredit hingga akhir Desember 2012 mencapai 23,1 persen. Tingginya pertumbuhan kredit tersebut terutama disalurkan dalam bentuk kredit investasi. Kredit Investasi tercatat tumbuh paling tinggi sebesar 27,4 persen (*y-o-y*), yang diikuti dengan pertumbuhan kredit modal kerja (KMK) sebesar 23,2 persen (*y-o-y*) dan kredit konsumsi sebesar 20,0 persen (*y-o-y*). Dengan meningkatnya penyaluran kredit ke sektor-sektor produktif diharapkan dapat menambah kapasitas ekonomi ke depan. Dari sisi penghimpunan dana masyarakat, jumlah dana pihak ketiga (DPK) pada tahun 2012 mengalami pertumbuhan sebesar 15,8 persen (*y-o-y*) atau mencapai Rp3.225 triliun. Pertumbuhan DPK yang masih kuat tersebut terutama dikontribusi oleh pertumbuhan tabungan dan deposito yang tetap stabil. Sementara itu, dari sisi permodalan, rasio kecukupan modal bank (*CAR/Capital Adequacy Ratio*) tercatat jauh di atas batas minimum 8 persen. Selama tahun 2012 kemampuan bank dalam mengelola risiko masih tetap terjaga. Di tengah penyaluran kredit yang tumbuh meningkat, risiko kredit masih terjaga, yang terlihat dari rasio kredit bermasalah (*NPL/Non Performing Loan*) Gross perbankan sebesar 1,9 persen yang merupakan rasio NPLs terendah yang pernah dialami oleh perbankan nasional.

Tabel 3 Perkembangan CAR, LDR, dan NPL Bulanan Tahun 2012

Indikator	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
LDR (%)	78,8	79,7	80,2	81,6	82,0	83,0	83,4	84,1	83,8	84,2	84,0	84,0
NPL (%)	2,4	2,3	2,3	2,3	2,3	2,2	2,2	2,2	2,1	2,2	2,0	1,9
CAR	18,4	18,5	18,3	18,0	17,9	17,5	17,3	17,2	17,3	17,2	17,4	17,3

Sumber: Bank Indonesia

Lifting Minyak

Lifting minyak mentah Indonesia selama tahun 2012 mencapai kisaran 860 ribu barel per hari yang berarti lebih rendah bila dibandingkan dengan target APBNP tahun 2012 sebesar 930 ribu per barel per hari. Penurunan ini antara lain terkait dengan menurunnya kapasitas produksi dari sumur-sumur tua, faktor *unplanned shut down* dan hambatan non-teknis seperti permasalahan di daerah dan lain-lain.

Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia sepanjang tahun 2012 mengalami fluktuasi. Selama Januari-Maret tahun 2012 harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan secara signifikan. Pada awal tahun 2012, harga ICP berada di level USD115.91 per barel yang terus meningkat hingga mencapai USD128.14 per barel pada bulan Maret 2012. Sementara pada triwulan II mengalami penurunan hingga mencapai level USD99.08 per barel pada bulan Juni 2012. Selanjutnya pada triwulan III dan IV tahun 2012 tren harga minyak mentah Indonesia mengalami kenaikan yang tertinggi pada bulan Oktober 2012 yang mencapai USD109.85 per barel. Tren kenaikan seiring dengan terbatasnya pasokan minyak mentah dunia terkait geopolitik di negara-negara teluk yang mempengaruhi pasokan minyak mentah dunia. Harga rata-rata ICP Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 sebesar USD112.73 per barel lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2011 yaitu sebesar USD111.5 per barel.

Rasio utang terhadap PDB

Utang Pemerintah diperlukan untuk membiayai defisit APBN, penyediaan arus kas jangka pendek dan *refinancing* utang lama. Pengelolaan utang pemerintah diarahkan untuk mendapatkan sumber pembiayaan dengan biaya dan risiko rendah, jangka panjang dan tidak ada ikatan politik. Meskipun secara nominal, jumlah utang mengalami peningkatan, namun rasio utang terhadap PDB cenderung menurun dan saat ini telah mencapai batas yang aman. Rasio utang Indonesia terhadap PDB tahun 2012 adalah 24,0 persen (angka sementara). Rasio ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2011 sebesar 24,4 persen. Perkembangan rasio utang terhadap PDB selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang membaik dan bahkan dibanding rasio-rasio yang sama di negara lain termasuk negara maju.

Tabel 4. Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia dan Berbagai Negara (%)

NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012
Argentina	58.5	58.7	49.2	44.9	45.2
Brasil	63.5	66.9	65.2	64.9	64.1
Germany	66.9	74.7	82.4	80.6	83.0
India	74.1	74.2	68.0	67.0	67.6
Indonesia	33.0	28.3	26.0	24.4	24,0*)
Italy (RHS)	105.7	116.0	118.6	120.1	126.3
Japan (RHS)	191.8	210.2	215.3	229.6	236.6
Turkey	40.0	46.1	42.4	39.3	37.7
United Kingdom	52.2	68.0	75.0	81.8	88.7
United States	76.1	89.7	98.6	102.9	107.2

Sumber: DJPU Kementerian Keuangan

*) angka sementara

Kemiskinan dan Pengangguran

Laju pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberikan banyak kesempatan kerja sehingga makin banyak keluarga Indonesia yang dapat menikmati hasil-hasil pembangunan dan keluar dari kemiskinan. Hal ini sejalan dengan tiga pilar pembangunan yaitu *pro growth*, *pro job*, dan *pro poor*. Di tahun 2012 Pemerintah terus berupaya melakukan akselerasi perekonomian melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan program-program perbaikan kesejahteraan masyarakat. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di

Indonesia pada September 2012 mencapai 28,59 juta orang (11,66 persen), berkurang 0,54 juta orang (0,30 persen) dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2011 yang sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen). Beberapa faktor terkait penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin selama periode September 2011-September 2012 adalah (a) Peningkatan jumlah penerima beras murah/raskin pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah, (b) Peningkatan jumlah penerima pelayanan kesehatan gratis pada kelompok 20 persen penduduk dengan pendapatan terendah, (c) Tingkat inflasi relatif rendah, (d) Perbaikan penghasilan petani, (e) Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih cukup tinggi. Dalam hal program pengurangan pengangguran, prosentase tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada Agustus 2012 mencapai 6,14 persen mengalami penurunan dibanding TPT periode yang sama tahun 2011 sebesar 6,56 persen.

REALISASI PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah

Dalam tahun 2012, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp1.338,31 triliun atau 98,54 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P 2012 sebesar Rp1.358,21 triliun. Jumlah ini berarti mengalami kenaikan Rp127,71 triliun (10,55 persen) dari realisasi 2011 sebesar Rp1.210,60 triliun.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2008-2012) pendapatan negara dan hibah cenderung mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 14 persen. Realisasi pendapatan negara dan hibah pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 39 persen sebelum mengalami penurunan 14 persen di tahun 2009. Sedangkan pertumbuhan selama kurun waktu 2010-2012 berturut-turut sebesar 17 persen, 22 persen dan 11 persen.

Tabel 5. Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah tahun 2008 – 2012

(dalam triliun rp)

Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real	APBN-P	Real
Pendapatan Negara Dan Hibah	894,99	981,60	870,99	848,77	992,40	995,27	1.169,92	1.210,58	1.358,20	1.338,32
1. Penerimaan Perpajakan	609,23	658,70	651,95	619,92	743,32	723,30	878,68	873,87	1.016,23	980,52
a. Pajak Dalam Negeri	580,25	622,36	631,93	601,25	720,76	694,39	831,74	819,75	968,29	930,86
b. Pajak Perdagangan Internasional	28,98	36,34	20,02	18,67	22,56	28,91	46,94	54,12	47,94	49,66
2. PNBPN	282,81	320,60	218,03	227,18	247,18	268,95	286,58	331,46	341,15	352,01
a. Penerimaan SDA	192,79	224,46	138,65	138,96	164,73	168,83	191,98	213,82	217,16	225,87
b. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	31,24	29,09	28,61	26,05	29,50	30,10	28,84	28,18	30,78	30,80
c. PNBPN Lainnya	58,78	63,32	44,88	53,80	43,46	59,43	50,34	69,36	72,80	73,64
d. Pendapatan BLU	-	3,73	5,89	8,37	9,49	10,59	15,42	20,10	20,41	21,70
3. Hibah	2,95	2,30	1,01	1,67	1,90	3,02	4,66	5,25	0,82	5,79

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Peningkatan realisasi pendapatan negara terutama didorong oleh dipertahankannya pertumbuhan ekonomi nasional serta didukung oleh pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pendapatan negara. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap meningkatnya pendapatan perpajakan dalam negeri, perpajakan perdagangan internasional dan penerimaan sumber daya alam sebagai penyumbang pendapatan terbesar.

Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2012

Di tahun 2012 perpajakan tetap menunjukkan sebagai kontributor utama realisasi pendapatan negara dan hibah. Realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp980,52 triliun (96,45 persen dari sasaran APBN-P 2012 sebesar Rp1.016,24 triliun), atau naik sebesar Rp106,65 triliun (12,20 persen dari realisasi 2011 sebesar Rp873,87 triliun). Dari sektor perpajakan semua komponen penerimaan mengalami perbaikan. PPh dan PPN mengalami peningkatan kinerja sejalan dengan membaiknya tingkat pendapatan masyarakat. Hal ini didukung juga oleh penggalan potensi perpajakan baik melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi.

Peningkatan juga terjadi pada pajak perdagangan internasional, khususnya Bea Masuk. Adapun Bea Keluar mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini seiring dengan perlambatan ekspor akibat dari imbas perlambatan perekonomian dunia. Meningkatnya rata-rata harga minyak mentah pada tahun 2012 mendorong peningkatan pendapatan pajak penghasilan migas. Kondisi penurunan ekonomi global (*global economic slowdown*) selama tahun 2012 telah berimbas pada turunnya ekspor komoditas sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor industri pengolahan. Akibatnya pembayaran pajak yang berasal dari Wajib Pajak sektor ini mengalami penurunan sebesar Rp22,46 triliun pada sektor pertambangan dan penggalian, dan sebesar Rp12,83 triliun pada sektor industri pengolahan.

Tax ratio

Tax ratio adalah salah satu indikator ketahanan fiskal suatu negara yang merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) negara tersebut. Setelah sempat mengalami penurunan pada tahun 2009, *tax ratio* Indonesia berangsur-angsur meningkat pada periode 2010-2012. Realisasi rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) tahun 2012 mencapai 12,5 persen. Persentase ini meningkat jika dibandingkan tahun 2011 sebesar 11,77 persen dan tahun 2010 sebesar 11,26 persen.

Boks.2 Tax Ratio

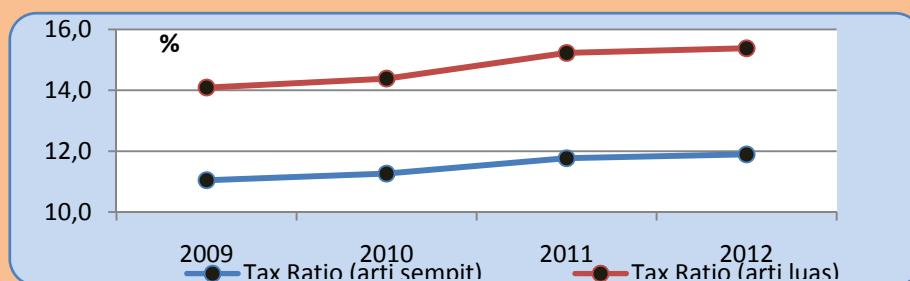
Rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (*tax ratio*) Indonesia tahun 2009–2012 berkisar antara 11,0 persen–11,9 persen. Besarnya penerimaan perpajakan dalam perhitungan *tax ratio* tersebut hanya memperhitungkan penerimaan perpajakan yang dipungut oleh Pemerintah Pusat, tidak termasuk penerimaan pajak daerah dan SDA migas. Jika penerimaan pajak daerah dan SDA migas dimasukkan dalam perhitungan *tax ratio*, maka *tax ratio* Indonesia tahun 2009–2012 menjadi lebih tinggi, yaitu berkisar antara 14,1 persen–15,4 persen. Perhitungan *tax ratio* yang memasukkan penerimaan pajak daerah dan SDA migas merupakan *tax ratio* dalam arti yang lebih luas. Perkembangan *tax ratio* Indonesia tahun 2009–2012 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 6 Perkembangan *Tax Ratio* Indonesia Tahun 2009-2012

(dalam triliun rupiah)

	2009	2010	2011	2012
Penerimaan Perpajakan (1)	619,9	723,3	873,9	980,52
SDA Migas (2)	125,8	152,7	193,5	205,8
Penerimaan Pajak Daerah (3)	45,1	47,7	63,6	81,6
PDB (4)	5.613,4	6.422,2	7.427,1	8.241,9
<i>Tax Ratio</i> (arti sempit) = 1 : 4	11.0%	11.3%	11.8%	11.9%
<i>Tax Ratio</i> (arti luas) = (1 + 2 + 3) : 4	14.1%	14.4%	15.3%	15.4%

Sumber : Kementerian Keuangan



Sumber : Kementerian Keuangan

Grafik 12 Perbandingan *Tax Ratio* Indonesia tahun 2009-2012

Tren realisasi penerimaan perpajakan selama 5 tahun terakhir

Penerimaan perpajakan merupakan sumber utama pendapatan negara. Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan perpajakan sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan perpajakan, sedikit mengalami fluktuasi. Realisasi penerimaan perpajakan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp980,52 triliun atau meningkat sebesar 48,86 persen dari realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008 yang sebesar Rp658,70 triliun. Pada tahun 2009 realisasi penerimaan perpajakan sebesar 95,09 persen dari APBN-P atau sebesar Rp619,92 triliun. Di tahun 2010 terjadi sedikit peningkatan realisasi penerimaan perpajakan menjadi 97,31 persen dari APBN-P atau sebesar Rp723,31 triliun, dan di tahun 2011 meningkat menjadi 99,45 persen atau sebesar Rp873,87 triliun. Pada tahun 2012 realisasi penerimaan perpajakan mengalami penurunan menjadi hanya 96,49 persen dari pagu APBN-P 2012 atau sebesar Rp980,52 triliun dan 94,96 persen dari APBN 2012. Target APBN dan APBN-P serta realisasi penerimaan perpajakan tahun 2008-2012 dapat dilihat pada grafik 13



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 13 Target Dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2008-2012

Penerimaan perpajakan terdiri dari penerimaan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Realisasi penerimaan pajak dalam negeri TA 2012 adalah sebesar Rp930,54 triliun atau mencapai 96,10 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp968,29 triliun.

Penerimaan pajak dalam negeri dikelola oleh dua Satuan Kerja di Kementerian Keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang mengelola penerimaan pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mengelola penerimaan cukai.

Pada tahun 2012, realisasi netto penerimaan pajak yang berhasil dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sebesar Rp835,83 triliun. Realisasi tersebut hanya sebesar 94,44 persen dari target dalam APBN-P atau kurang sebesar Rp49,20 triliun. Dan apabila dibandingkan dengan APBN, maka realisasi tahun 2012 hanya mencapai 91,43 persen atau kurang sebesar Rp78,37 triliun.

Dalam 5 tahun terakhir, penerimaan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak sangat mendominasi penerimaan negara walaupun jika dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan pajak, cenderung mengalami penurunan. Realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak pada tahun 2012 adalah sebesar Rp835,83 triliun atau kurang Rp49,20 triliun dari

target APBN-P sebesar Rp885,03 triliun dan kurang Rp78,37triliun dari target APBN sebesar Rp914,20 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 mencapai 106,84 persen dari target APBN-P atau melampaui Rp36,58 triliun. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2009 mencapai 94,31 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp32,85 triliun dari target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2010 mencapai 94,97 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp33,27 triliun dari target. Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 mencapai 97,26 persen dari target APBN-P atau kurang sebesar Rp20,92 triliun dari target. Target dan realisasi penerimaan pajak yang dikelola Direktorat Jenderal Pajak tahun 2008-2012 dalam triliun rupiah dapat dilihat pada grafik 14



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 14 Target APBN/APBN-P Dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2008-2012

Target penerimaan pajak ditetapkan dalam APBN dan selanjutnya apabila terjadi perubahan target, ditetapkan dalam APBN-P. Selama lima tahun terakhir, perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target APBN dan APBN-P dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 7 Perbandingan realisasi penerimaan pajak dengan APBN dan APBN-P Tahun 2008 – 2012
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Jenis Pajak	Target		Realisasi	Selisih		
		APBN	APBN-P		APBN dengan APBN-P	Realisasi dengan APBN	Realisasi dengan APBN-P
2008	A. PPh Non Migas	264,31	251,37	250,48	(12,94)	(13,83)	(0,89)
	B. PPN dan PPnBM	187,63	195,46	209,65	7,83	22,02	14,19
	C. PBB dan BPHTB	29,01	30,70	30,93	1,69	1,92	0,23
	D. Pajak Lainnya	2,94	3,35	3,03	0,41	0,09	(0,32)
	E. PPh Migas	41,65	53,65	77,02	12,00	35,37	23,37
	Jumlah	525,54	534,53	571,11	8,99	45,57	36,58
2009	A. PPh Non Migas	300,68	291,18	267,57	(9,50)	(33,11)	(23,61)
	B. PPN dan PPnBM	249,51	203,08	193,07	(46,43)	(56,44)	(10,01)
	C. PBB dan BPHTB	36,67	30,84	30,73	(5,83)	(5,94)	(0,11)
	D. Pajak Lainnya	4,27	3,25	3,12	(1,02)	(1,15)	(0,13)
	E. PPh Migas	56,72	49,03	50,04	(7,69)	(6,68)	1,01
	Jumlah	647,85	577,38	544,53	(70,47)	(103,32)	(32,85)
2010	A. PPh Non Migas	303,93	306,84	298,17	2,91	(5,76)	(8,67)
	B. PPN dan PPnBM	269,54	262,96	230,60	(6,58)	(38,94)	(32,36)
	C. PBB dan BPHTB	33,90	32,47	36,61	(1,43)	2,71	4,14
	D. Pajak Lainnya	3,85	3,84	3,97	(0,01)	0,12	0,13
	E. PPh Migas	47,02	55,38	58,87	8,36	11,85	3,49
	Jumlah	658,24	661,49	628,22	3,25	(30,02)	(33,27)
2011	A. PPh Non Migas	364,94	366,75	358,03	1,81	(6,91)	(8,72)
	B. PPN dan PPnBM	312,11	298,44	277,80	(13,67)	(34,31)	(20,64)
	C. PBB dan BPHTB	27,68	29,06	29,89	1,38	2,21	0,83
	D. Pajak Lainnya	4,20	4,19	3,93	(0,01)	(0,27)	(0,26)
	E. PPh Migas	55,55	65,23	73,10	9,68	17,55	7,87
	Jumlah	764,48	763,67	742,75	(0,81)	(21,73)	(20,92)
2012	A. PPh Non Migas	459,05	445,73	381,61	(13,32)	(77,44)	(64,12)
	B. PPN dan PPnBM	352,95	336,06	337,58	(16,89)	(15,37)	1,52
	C. PBB dan BPHTB	35,65	29,69	28,97	(5,96)	(6,68)	(0,72)
	D. Pajak Lainnya	5,63	5,63	4,21	-	(1,42)	(1,42)
	E. PPh Migas	60,92	67,92	83,46	7,00	22,54	15,54
	Jumlah	914,20	885,03	835,83	(29,17)	(78,37)	(49,20)
Total Penerimaan Pajak yang Tidak Tercapai					(88,21)	(187,7)	(99,66)

Perubahan target penerimaan pajak dari APBN menjadi APBN-P disebabkan antara lain karena terjadi perkembangan dan perubahan asumsi dasar ekonomi makro yang sejalan dengan kondisi perekonomian global dan domestik antara lain meliputi tingkat pertumbuhan ekonomi, rata-rata nilai tukar rupiah, tingkat inflasi, harga minyak ICP, lifting minyak, suku bunga SBI, yang disertai dengan perubahan kebijakan fiskal yang berdampak cukup signifikan sehingga perlu dilakukan penyesuaian atas berbagai sasaran pendapatan negara agar menjadi lebih realistis. Perkembangan tersebut salah satunya adalah kinerja perekonomian Indonesia Tahun 2012 yang diperkirakan mengalami perlambatan dan mencapai sebesar 6,5% dari yang semula diperkirakan sebesar 6,7%.

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 melebihi target, yaitu mencapai 106,84% dari target APBN-P. Namun tahun 2009 – 2012 realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target dan hanya berkisar 94,31% - 97,26% dari target APBN-P. Dengan demikian selama periode empat tahun terakhir (2009 – 2012) penerimaan pajak yang tidak tercapai dibandingkan dengan APBN-P sebesar Rp136,24 triliunan dengan APBN sebesar Rp233,44triliun.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan realisasi penerimaan pajak tahun 2009 – 2012 tidak mencapai target adalah belum diimplementasikannya secara efektif ketentuan yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak.

Mengingat pentingnya data dalam rangka penggalan potensi perpajakan, maka pada acara penyerahan LHP LKPP Tahun 2010 kepada Presiden tanggal 1 Juni 2011, BPK menegaskan

kepada pemerintah untuk segera mengimplementasikan ketentuan Pasal 35A UU KUP dengan harapan Direktorat Jenderal Pajak dapat menghimpun data perpajakan dari para pihak yang disebutkan dalam ketentuan tersebut dan menjadikannya sebagai pusat data pajak yang dapat dipergunakan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak.

Selanjutnya Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwa instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain wajib memberikan Data dan Informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Walaupun peraturan pemerintah tersebut telah berlaku efektif pada tanggal 27 Februari 2012, namun secara teknis peraturan dimaksud baru dapat diimplementasikan setelah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur rincian jenis data, tata cara penyampaian, dan saat penyampaian data dan informasi perpajakan.

Sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Pemerintah tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.03/2013 yang mulai berlaku efektif tanggal 4 Januari 2013 tentang Rincian Jenis Data dan Informasi serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan tersebut menetapkan 14 instansi pemerintah, lembaga, asosiasi atau pihak lain (ILAP) yang diminta memberikan data. Selanjutnya Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.03/2013 tanggal 11 April 2013 yang menambah lima ILAP.

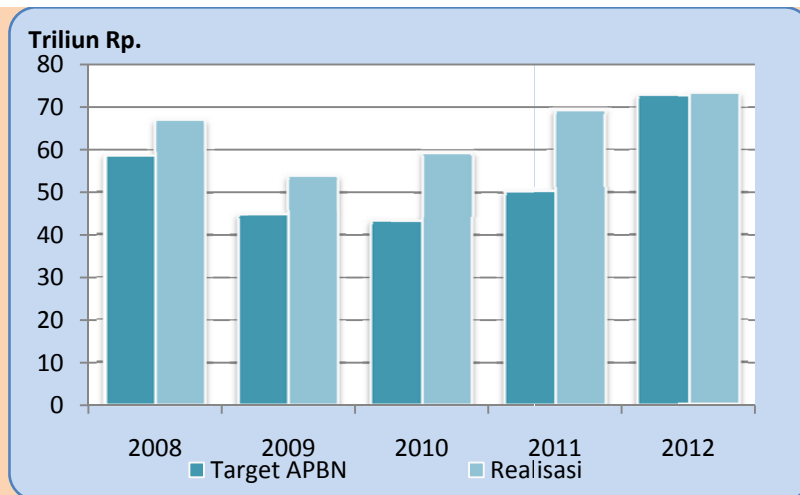
Realisasi PNB tahun 2012

Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp352,01 triliun (103,18 persen dari sasaran APBN-P 2012 sebesar Rp341,14 triliun). Jumlah ini naik Rp20,53 triliun (6,19 persen) dari realisasi PNBP tahun 2011 sebesar Rp331,47 triliun. Realisasi PNBP dipengaruhi antara lain oleh (a) penerapan kebijakan di bidang PNBP, (b) meningkatnya ICP, dan (c) meningkatnya penerimaan dari PNBP non migas.

Nilai realisasi PNBP tahun 2012 tersebut berasal dari realisasi penerimaan SDA sebesar Rp225,87 triliun yang merupakan sumber utama penerimaan PNBP, realisasi penerimaan laba BUMN senilai Rp30,80 triliun, realisasi PNBP lainnya sebesar Rp73,64 triliun dan realisasi pendapatan BLU sebesar Rp21,70 triliun. Dalam tahun 2012, Pemerintah terus melakukan berbagai langkah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan PNBP. Untuk penerimaan SDA, upaya dan kebijakan antara lain difokuskan pada (a) pemberian fasilitas fiskal dan non-fiskal terhadap kegiatan usaha sektor hulu migas; (b) memperkuat penagihan dan pengawasan penerimaan dari sektor migas; (c) meningkatkan produksi komoditas mineral dan batubara; dan (d) menggali potensi penerimaan yang ada di sektor kehutanan dengan tanpa merusak lingkungan dan mempertahankan kelestarian hutan. Untuk PNBP yang bersumber dari BUMN, langkah kebijakan dilakukan melalui pembenahan internal dalam upaya meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN), baik manajemen maupun upaya penyehatan BUMN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN). Sedangkan untuk penerimaan PNBP Lainnya dan Badan Layanan Umum (BLU), upaya peningkatannya dilakukan antara lain melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi, pelayanan serta penyempurnaan peraturan di bidang PNBP dan BLU.

Boks 3. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya

Dilihat dari realisasinya sejak tahun 2008, pada umumnya PNBP lainnya cenderung berfluktuasi (lihat grafik 15). Tren peningkatan semenjak tahun 2009 mencerminkan kontribusi keberhasilan kebijakan-kebijakan Pemerintah menyangkut PNBP, juga mengindikasikan masih terdapatnya potensi PNBP lainnya yang dapat terus ditingkatkan.



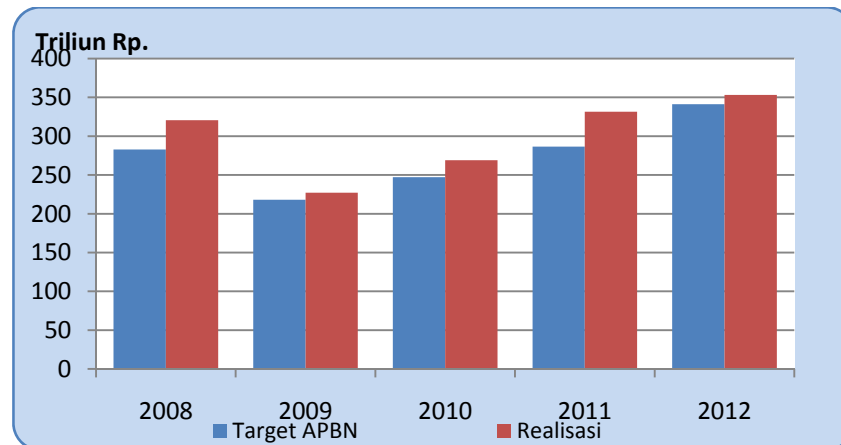
Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 15 Realisasi PNBPN Lainnya tahun 2008-2012

Sumber utama PNBPN lainnya berasal dari jasa pelayanan yang diberikan oleh kementerian negara/lembaga (K/L) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing K/L. Secara garis besar, PNBPN lainnya terbagi dalam beberapa jenis pendapatan, antara lain: (a) pendapatan dari pengelolaan barang milik negara (BMN) serta pendapatan dari penjualan; (b) pendapatan jasa; (c) pendapatan bunga; (d) pendapatan kejaksaan dan peradilan; (e) pendapatan pendidikan; (f) pendapatan gratifikasi dan uang sitaan hasil korupsi; (g) pendapatan iuran dan denda; serta (h) pendapatan lain-lain. Dalam rangka optimalisasi PNBPN K/L, pada tahun 2012 telah dilakukan upaya, antara lain: (a) meningkatkan pelayanan dan memperbaiki administrasi PNBPN K/L; (b) melakukan penyempurnaan beberapa peraturan terkait dengan jenis dan tarif PNBPN K/L; dan (c) melakukan monitoring, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan pengelolaan PNBPN K/L. Selama periode tahun 2008–2012, PNBPN lainnya meningkat rata-rata sebesar 5,36 persen. Perkembangan PNBPN lainnya selama periode 2008–2012 dapat dilihat dalam grafik 15. Pada tahun 2012, terdapat tujuh K/L yang memberikan kontribusi terbesar dalam PNBPN lainnya. Ketujuh K/L tersebut adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemendikbud), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM), Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Tren realisasi PNBPN selama 5 tahun terakhir

Dilihat dari tingkat pencapaian target penerimaan PNBPN, selama tahun 2008-2012 secara umum realisasi penerimaan PNBPN melebihi target yang ditetapkan dalam APBN-P. Pada tahun 2008 realisasi penerimaan PNBPN meningkat menjadi 113,36 persen dari pagu sebesar Rp320,60 triliun. Sedangkan pada tahun 2009 terjadi penurunan tingkat realisasi penerimaan PNBPN menjadi sebesar 104,19 persen dari pagu sebesar Rp227,17 triliun. Kemudian pada tahun 2010 realisasi penerimaan PNBPN kembali meningkat menjadi 108,80 persen dari pagu sebesar Rp268,94 triliun. Pada tahun 2011 meningkat menjadi 115,67 persen dari pagu APBN-P 2011 sebesar Rp331,47 triliun. Sedangkan tahun 2012 mencatat penerimaan PNBPN sebesar Rp352,01 triliun atau 103,18 persen dari pagu APBNP. Sebagai kontributor terbesar untuk penerimaan PNBPN, SDA migas menjadi faktor penting yang menentukan naik turunnya penerimaan PNBPN. Tren peningkatan SDA migas tersebut dipengaruhi oleh perkembangan beberapa faktor, seperti (a) jumlah rata-rata lifting minyak bumi harian, (b) peningkatan ICP, dan (c) penguatan nilai rupiah.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan
 Grafik 16 Target Dan Realisasi Penerimaan PNPB Tahun 2008-2012

*Realisasi
 Penerimaan Hibah
 tahun 2012*

Penerimaan hibah tahun 2012 terealisasi sebesar Rp5,79 triliun yakni sebesar 701,35 persen dari target APBN-P tahun 2012 sejumlah Rp0,82 triliun. Angka realisasi tersebut naik dibandingkan realisasi hibah tahun 2011 yang mencapai Rp5,25 triliun.

Faktor yang mempengaruhi realisasi penerimaan hibah antara lain komitmen akan kesediaan negara atau lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia serta kebijakan Pemerintah untuk mempermudah lembaga donor dalam memberikan bantuan kepada Pemerintah Indonesia, yaitu bahwa hibah dapat disalurkan melalui mekanisme hibah terencana maupun hibah langsung. Selain itu, realisasi penerimaan hibah dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah dalam penerapan sistem akuntansi hibah dan mekanisme pengelolaan hibah, dalam hal ini, K/L penerima hibah diwajibkan untuk mencatatkan semua penerimaan hibah dalam APBN.

REALISASI BELANJA NEGARA

*Realisasi belanja
 negara tahun
 2012*

Dalam tahun 2012, realisasi belanja negara mencapai Rp1.491,41 triliun, atau 96,33 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp1.548,31 triliun. Jumlah tersebut naik Rp196,41 triliun atau 15,17 persen dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp1.295,99 triliun. Target maupun realisasi belanja negara memiliki kecenderungan yang terus meningkat. Kecenderungan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi eksternal yang terkait dengan ekonomi makro seperti harga minyak mentah (ICP), nilai tukar Rupiah, dan perkembangan tingkat suku bunga, juga banyak ditentukan oleh kebijakan di bidang pembelanjaan yang diambil oleh Pemerintah. Apabila kondisi perekonomian sedang mengalami kelesuan usaha dan perlambatan aktifitas bisnis akibat resesi, Pemerintah melakukan kebijakan yang bersifat ekspansif dengan meningkatkan volume belanja khususnya Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal, agar mampu berperan dalam memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas dan memperkuat fundamental ekonomi makro. Sedangkan dalam kondisi ekonomi yang memanas akibat tingginya permintaan agregat, Pemerintah akan meluncurkan kebijakan kontraktif yang berfungsi untuk menyeimbangkan kondisi permintaan dan penyediaan sumber-sumber perekonomian. Kebijakan alokasi anggaran belanja pemerintah pusat sangat berperan dalam stabilisasi bagi perekonomian atau menjadi *counter cyclical* yang efektif dalam meredam gejolak ekonomi.

10 K/L yang memiliki alokasi anggaran belanja terbesar dalam APBN-P tahun 2012

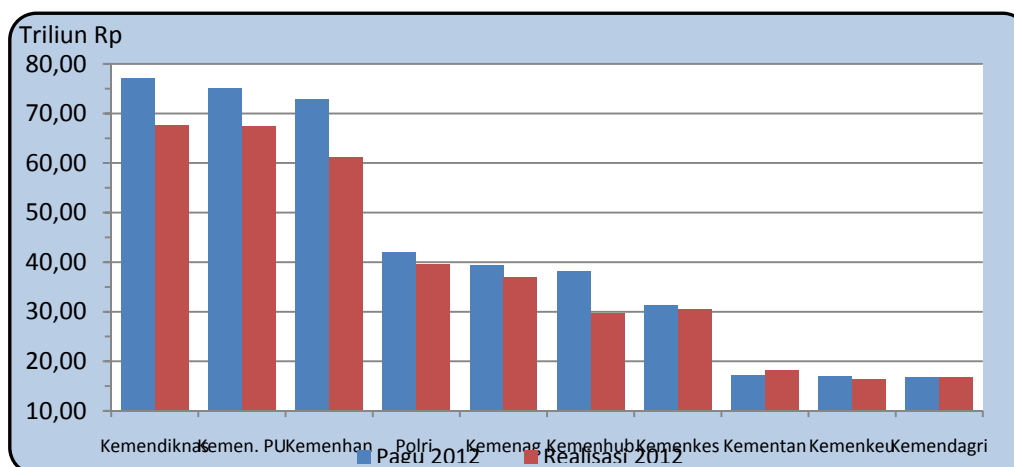
Dalam melaksanakan ketiga pilar pembangunan (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) dan melaksanakan prioritas-prioritas pembangunan, anggaran dialokasikan kepada kementerian negara/lembaga. Adapun sepuluh K/L yang memperoleh alokasi anggaran terbesar adalah:

- 1). Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp77,18 triliun (14,08 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 87,56 persen atau Rp67,58 triliun.
- 2). Kementerian Pekerjaan Umum alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp74,98 triliun (13,68 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 90,66 persen atau Rp67,98 triliun.
- 3). Kementerian Pertahanan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp72,90 triliun (13,30 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 83,94 persen atau Rp61,30 triliun.
- 4). Kepolisian Negara Republik Indonesia alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp41,89 triliun (6,77 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 94,32 persen atau Rp39,51 triliun.
- 5). Kementerian Agama alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp39,37 triliun (7,67 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 93,73 persen atau Rp36,90 triliun.
- 6). Kementerian Perhubungan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp38,14 triliun (5,01 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 77,84 persen atau Rp30,08 triliun.
- 7). Kementerian Kesehatan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp31,20 triliun (6,38 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 97,98 persen atau Rp30,57 triliun.
- 8). Kementerian Pertanian alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp17,09 triliun (3,78 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 106,79 persen atau Rp18,25 triliun.

Terdapat penambahan pagu anggaran dan revisi setelah APBN-P pada Sekretariat Jenderal karena adanya pemberian tunjangan kinerja bagi pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian dan penambahan pagu anggaran pada Direktorat Jenderal Tanaman Pangan karena adanya penambahan dana kontinjensi untuk penanganan pasca panen tanaman berupa bantuan peralatan dan mesin serta tempat penyimpanannya.

- 9). Kementerian Keuangan alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp16,91 triliun (3,84 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 96,51 persen atau Rp16,32 triliun
- 10). Kementerian Dalam Negeri alokasi anggaran pada APBN 2012 sebesar Rp16,72 triliun (3,63 persen dari belanja K/L) dengan tingkat realisasi 100,24 persen atau Rp16,76 triliun.

Kementerian Pendidikan Nasional tetap merupakan kementerian yang memperoleh alokasi anggaran terbesar, untuk peringkat kedua diduduki oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Grafik K/L yang menerima alokasi anggaran belanja terbesar menurut organisasi dapat dilihat pada grafik 17.



Sumber: Realisasi Anggaran Kemenkeu

Grafik 17 K/L Penerima Alokasi Anggaran Belanja Terbesar Tahun Anggaran 2012

Anggaran dan Realisasi belanja Pemerintah berdasarkan 11 fungsi

Menurut klasifikasi fungsi, alokasi anggaran belanja pemerintah pusat dirinci ke dalam 11 fungsi, yang pengklasifikasiannya bertujuan untuk menggambarkan tugas pemerintah dalam melaksanakan fungsi-fungsi pelayanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.

Fungsi-fungsi tersebut mencakup: (1) pelayanan umum; (2) pertahanan; (3) ketertiban dan keamanan; (4) ekonomi; (5) lingkungan hidup; (6) perumahan dan fasilitas umum; (7) kesehatan; (8) pariwisata dan budaya; (9) agama; (10) pendidikan; dan (11) perlindungan sosial. Alokasi anggaran belanja pemerintah pusat menurut fungsi merupakan pengelompokan belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi-fungsi utama pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam berbagai subfungsi, yang pada dasarnya merupakan kompilasi dari anggaran berbagai program/kegiatan di setiap kementerian negara/lembaga. Kegiatan adalah penjabaran dari program yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon II/satuan kerja atau penugasan tertentu K/L yang berisi satu atau beberapa komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (*output*) dengan indikator kinerja yang terukur. Selain itu, kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya, baik yang berupa sumber daya manusia (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, serta dana, atau dengan kata lain kegiatan adalah kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang/jasa. Satker merupakan *business unit* yang melakukan siklus anggaran dari sejak perencanaan dan penganggaran hingga pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporannya. Dalam RAPBN tahun 2012, alokasi belanja pemerintah pusat berdasarkan fungsi masih didominasi oleh fungsi pelayanan umum, fungsi ekonomi dan fungsi pendidikan, yaitu sebesar 61,4 persen terhadap total belanja Pemerintah pusat, yang kemudian diikuti secara berturut-turut oleh fungsi ekonomi sebesar 11,4 persen, dan fungsi pendidikan sebesar 11,0 persen. Relatif tingginya porsi alokasi anggaran pada fungsi pelayanan umum menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pelayanan umum kepada masyarakat merupakan fungsi utama pemerintah, yang terdiri dari pemberian subsidi, pembayaran Bunga Utang, dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, peyelenggaraan diplomasi dan kerjasama internasional, penataan administrasi kependudukan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan daerah, serta penelitian dan pengembangan iptek.

Tabel 8 Pagu dan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi Tahun 2012
(dalam triliun rupiah)

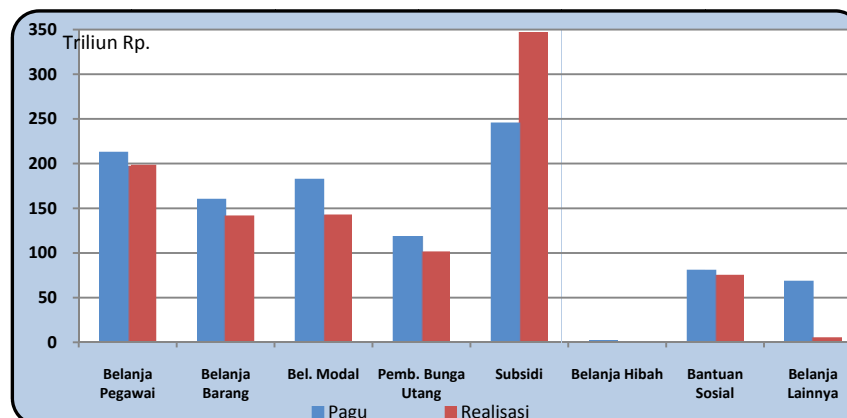
Fungsi	Pagu	Realisasi
Pelayanan Umum	656,82	647,68
Pertahanan	72,86	61,23
Ketertiban dan Keamanan	33,10	29,09
Ekonomi	122,21	105,57
Lingkungan Hidup	10,67	8,81
Perumahan dan Fasilitas Umum	28,46	26,44
Kesehatan	15,21	15,18
Pariwisata dan Budaya	3,11	2,52
Agama	3,54	3,42
Pendidikan	118,01	105,21
Perlindungan Sosial	5,53	5,08

Sumber: Realisasi Anggaran, Kemenkeu

Realisasi belanja berdasarkan klasifikasi ekonomi

Realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2012 tercatat sebesar Rp1.010,56 triliun, atau secara nominal naik sebesar Rp126,84 triliun (14,35 persen) dari realisasi 2011 sebesar Rp883,72 triliun. Realisasi tersebut menunjukkan daya serap anggaran sebesar 94,49 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp1.069,53 triliun. Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp197,86 triliun (92,91 persen dari pagu) lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp.175,74 triliun. Sedangkan realisasi Belanja Barang Rp140,88 triliun (88,04 persen dari pagu) lebih tinggi dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp124,64 triliun. Realisasi

Belanja Modal Rp145,10 triliun (79,46 persen dari pagu), lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp 117,85 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Grafik 18 Pagu dan Realisasi Belanja Tahun 2012 Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi

Sedangkan realisasi pembayaran Bunga Utang mencapai Rp100,52 triliun (85,34 persen dari pagu) lebih tinggi dari realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp. 93,26 triliun. Terkait subsidi, realisasinya mencapai Rp346,42 triliun (141,35 persen dari pagu) atau naik Rp51,1 triliun dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp295,36 triliun. Realisasi Bantuan Sosial mencapai Rp75,62 triliun (93,69 persen dari pagu). Sedangkan realisasi Belanja Lain-lain mencapai Rp4,07 triliun minus 5,94 persen terhadap pagu), lebih rendah dari realisasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp5,47 triliun. Secara persentase, kontribusi belanja Pemerintah Pusat terbesar berdasarkan klasifikasi ekonomi selama tahun 2012 adalah realisasi belanja subsidi sebesar 34,28 persen (lebih besar dibandingkan proporsi di tahun 2011 sebesar 33,42 persen) diikuti oleh realisasi Belanja Pegawai sebesar 19,57 persen, diikuti dengan Belanja Modal sebesar 14,35 persen, Belanja Barang sebesar 13,96 persen. Sedangkan belanja pembayaran Bunga Utang sebesar 9,94 persen, belanja Bantuan Sosial sebesar 7,49 persen, Belanja Lain-lain sebesar 0,40 persen dan belanja hibah 0,01 persen dari total belanja.

Tren realisasi belanja berdasarkan jenis belanja

Sejak tahun 2008, realisasi anggaran belanja Pemerintah Pusat didominasi oleh belanja operasional, yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang, subsidi, dan pembayaran bunga, rata-rata mencapai 75,63 persen dari total belanja pemerintah pusat. Belanja pemerintah pusat dalam periode 2008–2012, secara nominal menunjukkan peningkatan rata-rata 15,98 persen per tahun, yaitu dari Rp693.35 triliun dalam tahun 2008 menjadi Rp1.010,56 triliun dalam tahun 2012. Dilihat dari komposisinya secara per jenis, belanja yang mengalami peningkatan secara signifikan adalah Belanja Modal dan Belanja Barang. Belanja Modal meningkat dari 10,50 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008, menjadi 14,24 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012. Sedangkan, Belanja Barang mengalami peningkatan dari 8,07 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2008, menjadi 13,96 persen terhadap total belanja pemerintah pusat dalam tahun 2012.

Tabel 9 Perkembangan Komposisi Realisasi Belanja Berdasarkan Jenis Belanja Tahun 2008-2012

(dalam triliun rupiah)

Rincian	2008		2009		2010		2011		2012	
	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)	(Rp. Triliun)	(%)
Jumlah Bel Pem. Pusat	693.35	100	628.81	100	697.41	100	883.71	100	1,010,53	100
Bel Operasional Pem. Pusat	532.51	76.80	440.20	70.01	526.77	75.53	689.00	77.97	785.67	77.74
Belanja Pegawai	112.83	16.27	127.67	20.30	148.08	21.23	175.74	19.89	197.86	19.57
Belanja Barang	55.96	8.07	80.67	12.83	97.60	13.99	124.64	14.10	140.88	13.96

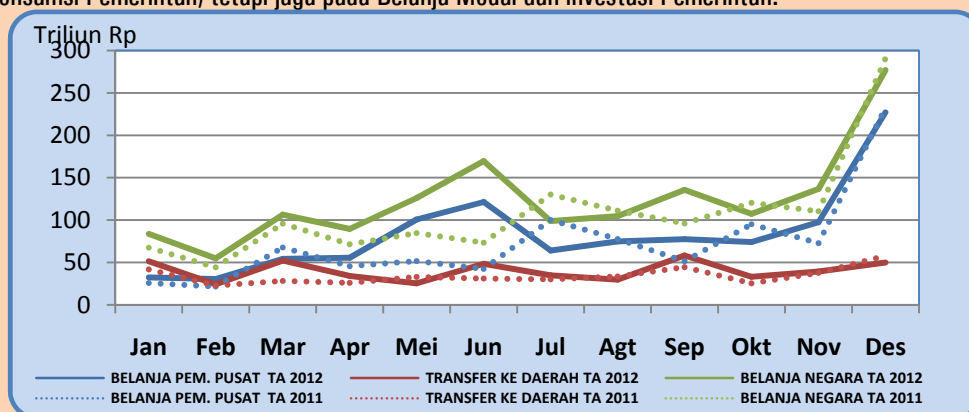
Pemb. Kewajiban /Bunga Hutang	88.43	12.75	93.78	14.91	88.38	12.67	93.26	10.55	100.51	9.94
Subsidi	275.29	39.70	138.08	21.96	192.71	27.63	295.36	33.42	346.42	34.28
Belanja Modal	72.77	10.50	75.87	12.07	80.29	11.51	117.85	13.34	145.10	14.35
Hibah		-	-	-	0.07	0.01	0.30	0.03	0.07	0.01
Bantuan Sosial	57.74	8.33	73.81	11.74	68.61	9.84	71.10	8.05	75.62	7.49
Belanja Lain-lain	30.33	4.37	38.93	6.19	21.67	3.11	5.46	0.62	4.07	0.40

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Boks 4. Tren Penyerapan Anggaran Belanja TA 2012

Kecenderungan peningkatan belanja Pemerintah dari tahun ke tahun memiliki implikasi terhadap makro ekonomi yakni pada sektor riil yang berpengaruh pada konsumsi, investasi dan pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi nasional dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini seharusnya dibarengi dengan pola penyerapan dana yang responsif terkait peran APBN sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi. Fenomena kecenderungan penyerapan anggaran tereskalasi pada akhir tahun menunjukkan kurang optimalnya pelaksanaan anggaran. Salah satu kendala yang ditengarai menjadi penyebab kurang optimalnya penyerapan anggaran belanja negara adalah kesiapan kementerian negara/ lembaga dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta kesiapan dalam menyediakan berbagai dokumen pencairan, serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.

Mencermati hal tersebut Pemerintah berupaya terus memperbaiki tren pencairan dana yang antara lain dilakukan melalui percepatan proses kerja dalam area pelaksanaan anggaran serta melakukan monitoring pelaksanaan rencana kerja K/L. Pemerintah telah membentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) untuk melakukan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan belanja di masing-masing kementerian negara/ lembaga. Dengan demikian, diharapkan penyerapan dan pelaksanaan anggaran dapat lebih terarah dan tepat waktu, sehingga penyerapan anggaran dapat sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Upaya memperbaiki kinerja penyerapan anggaran dan belanja Pemerintah juga diiringi dengan implementasi yang lebih baik dari penerbitan Perpres Nomor 54 tahun 2010 dan telah diubah dengan Perpres 35 tahun 2011 yang merupakan langkah untuk memperbaiki dan mempercepat proses pengadaan barang dan jasa oleh instansi-instansi pemerintah. Kebijakan pembentukan TEPPA dan Perpres Nomor 54 tahun 2010 tidak saja diarahkan pada Belanja Barang dan pegawai (komponen konsumsi Pemerintah) tetapi juga pada Belanja Modal dan investasi Pemerintah.

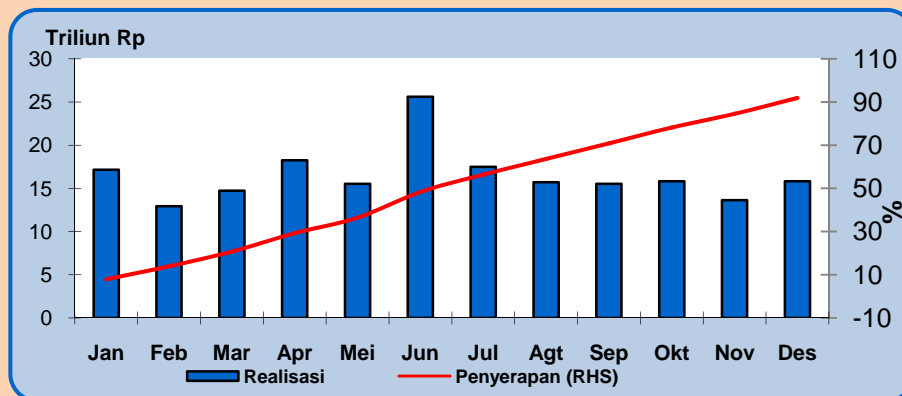


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 19 Tren Belanja Negara Bulanan TA 2011 dan TA 2012

Dari grafik di atas (Grafik 19) belanja negara yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Ke Daerah memperlihatkan pergerakan secara perlahan pada awal tahun hingga mencapai puncaknya pada

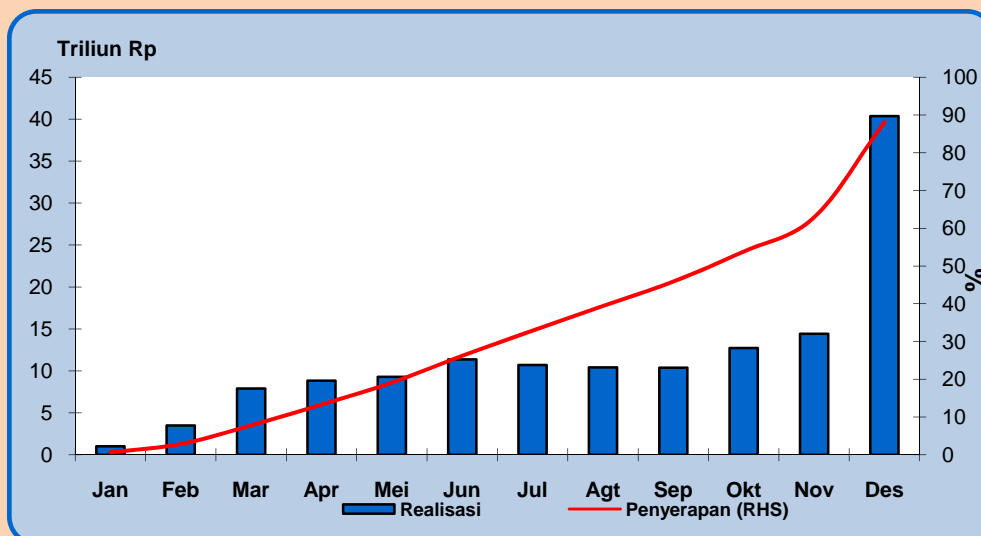
bulan Juli, selanjutnya mengalami penurunan hingga bulan Agustus dan meningkat tajam kembali dari bulan November dengan nilai realisasi tertinggi pada bulan Desember sebesar Rp276,85 triliun dan rata-rata nilai serapan per bulan sebesar Rp124,15 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 20 Tren Belanja Pegawai Bulanan TA 2012

Belanja Pegawai pada tahun 2012 terealisasi sebesar Rp197,86 triliun atau 92,91 persen dari pagu APBN-P sebesar Rp212,97 triliun, secara nominal meningkat sebesar Rp22,1 triliun atau 12,59 persen bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp175,74 triliun. Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2012 tren Belanja Pegawai berfluktuasi tipis dengan nominal yang hampir sama, dan pada bulan Juli 2012 mengalami peningkatan cukup tajam yang dipengaruhi pembayaran gaji ke-13 untuk aparatur negara dengan nilai realisasi tertinggi sebesar Rp25,62 triliun. Selanjutnya dari bulan Oktober sampai Desember tingkat serapan cenderung mendatar atau meningkat tipis. Secara umum tren ini tidak jauh berbeda dengan tren tahun sebelumnya.

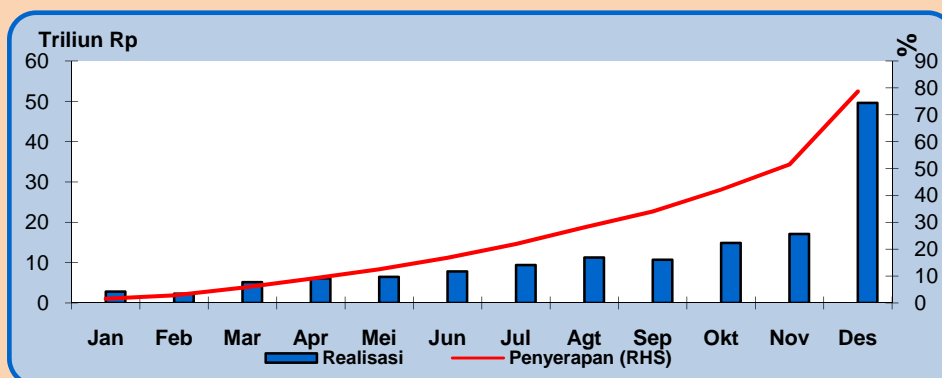


Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 21 Tren Belanja Barang Bulanan TA 2012

Pagu Belanja Barang pada tahun anggaran 2012 sebesar Rp160.03 triliun atau meningkat sebesar Rp17,66 triliun atau 12,41 persen dibanding pagu tahun 2011 sebesar Rp142,34 triliun. Belanja Barang terealisasi sebesar Rp140,88 triliun atau 88,04 persen dari pagu, yang berarti mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2011 yang terealisasi sebesar Rp124,64 triliun. Adapun tren Belanja Barang pada tahun 2012 tidak banyak berbeda dengan tren tahun sebelumnya, terutama terjadi peningkatan yang cukup signifikan pada akhir tahun anggaran. Secara nominal, realisasi terendah terjadi pada awal tahun anggaran (bulan Januari) sebesar Rp1,02 triliun. Sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp40,36 triliun. Rendahnya tingkat serapan Belanja Barang ditengarai masih terkait dengan

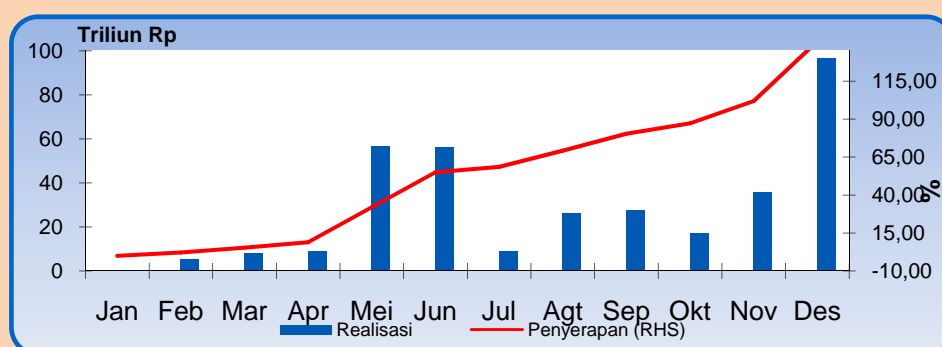
kesiapan kementerian negara/lembaga dalam melaksanakan prosedur pengadaan barang dan jasa serta tingginya tingkat kehati-hatian pejabat pengadaan dalam mengambil keputusan.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 22 Tren Belanja Modal Bulanan TA 2012

Alokasi anggaran Belanja Modal pada tahun 2012 sebesar Rp182,62 triliun yang berarti naik sebesar Rp38,05 triliun atau 26,3 persen dibanding pagu tahun 2011 sebesar Rp144,6 triliun. Adapun realisasi Belanja Modal tahun 2012 sebesar Rp145,10 triliun atau 79,46 persen dari pagunya, lebih rendah dari penyerapan tahun sebelumnya sebesar 81,52 persen. Secara umum tren realisasi Belanja Modal tidak jauh berbeda dengan tren realisasi Belanja Barang yakni sepanjang tahun mengalami fluktuasi dan meningkat secara signifikan pada bulan Desember. Realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp2,82 triliun dan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp49,61 triliun. Rata-rata realisasi bulanan di tahun 2012 sebesar Rp11,97 triliun, sudah jauh lebih besar dibandingkan kemampuan rata-rata penyerapan tahun sebelumnya sebesar Rp9,96 triliun. Kenaikan realisasi anggaran Belanja Modal tersebut sejalan dengan kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan pengeluaran investasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi juga cermin dari besarnya perhatian Pemerintah terhadap pembangunan infrastruktur. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan dasar, mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan inflasi, serta mendorong distribusi barang.

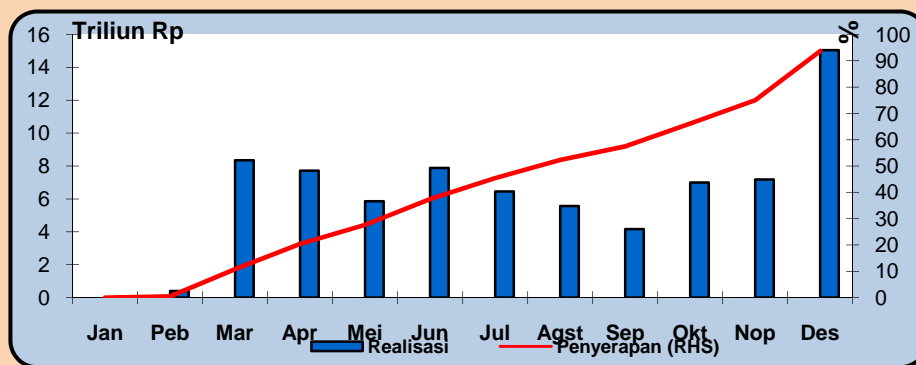


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 23 Tren Belanja Subsidi Bulanan TA 2012

Pagu belanja subsidi pada tahun 2012 senilai Rp245,08 triliun atau meningkat sebesar Rp6,61 triliun (2,77 persen) dibanding yang dialokasikan pada tahun 2011 sebesar Rp238,47 triliun. Realisasi belanja subsidi mencapai Rp346,42 triliun atau 141,35 persen dari yang pagu APBN-P 2012 yang berarti mengalami kenaikan realisasi sebesar Rp51,1 triliun atau 17,29 persen dibanding realisasi tahun lalu yang berada pada level Rp295,36 triliun. Adapun tren penyerapan belanja subsidi sepanjang tahun 2012 berfluktuasi. Penyerapan baru mulai terealisasi pada bulan Februari dan kemudian naik sampai bulan Juni serta meningkat secara tajam pada bulan Desember sebesar Rp96,68 triliun atau 39,45 persen dari total pagu. Penyerapan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp5,2 triliun. Secara umum, nilai serapan per

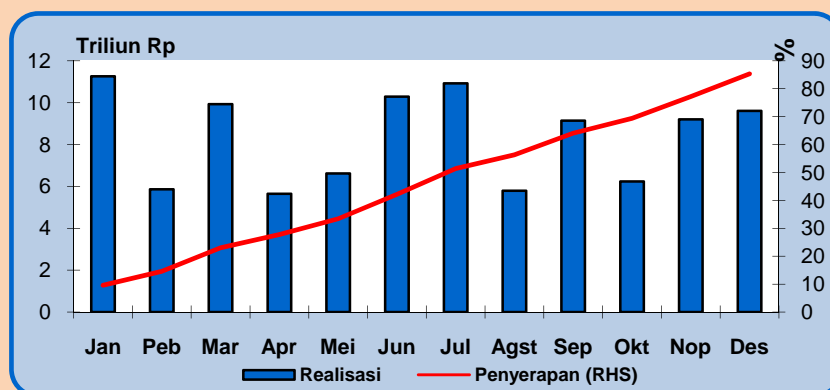
bulan untuk belanja subsidi rata-rata Rp28,86 triliun



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 24. Tren Belanja Bantuan Sosial Bulanan TA 2012

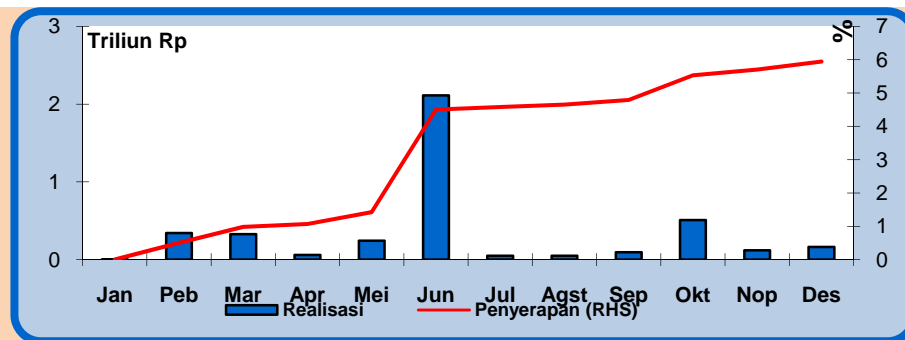
Pada tahun 2012, belanja Bantuan Sosial menerima alokasi anggaran sebesar Rp80,72 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp3,25 triliun atau 4,19 persen bila dibandingkan dengan alokasi anggaran tahun 2011 sebesar Rp77,47 triliun. Belanja Bantuan Sosial terealisasi sebesar Rp75,62 triliun atau 93,69 persen dari pagu APBN-P 2012 atau mengalami kenaikan sebesar Rp4,5 triliun atau 6,36 persen dibanding realisasi tahun 2011 sebesar Rp71,10 triliun. Tren belanja Bantuan Sosial berfluktuasi sepanjang tahun 2012, dan baru ada realisasi pada bulan Februari, penyerapan terendah terjadi pada bulan Februari sebesar Rp0,40 triliun dan penyerapan tertinggi terjadi pada bulan Desember sebesar Rp15,05 triliun dan secara rata-rata penyerapan belanja Bantuan Sosial per bulan Rp6,30 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 25 Tren Belanja Pembayaran Bunga Utang Bulanan TA 2012

Alokasi anggaran belanja pembayaran Bunga Utang pada tahun 2012 mencapai Rp117,79 triliun atau mengalami kenaikan sebesar Rp11,20 triliun atau 10,50 persen bila dibandingkan alokasi tahun lalu sebesar Rp106,58 triliun. Realisasi belanja pembayaran Bunga Utang sebesar Rp100,52 triliun atau 85,34 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2012 atau mengalami kenaikan sebesar Rp7,3 triliun atau 7,77 persen dibanding realisasi tahun 2011 yang mencapai Rp93,26 triliun. Peningkatan besaran pembayaran Bunga Utang seiring dengan peningkatan *outstanding* utang dari tahun ke tahun, dimana sebagai konsekuensinya, beban utang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Realisasi pembayaran Bunga Utang tahun 2012 berfluktuasi dengan rata-rata bulanan sebesar Rp8,38 triliun.



Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 26. Tren Belanja Lain-lain Bulanan TA 2012

Pada tahun 2012, Belanja Lain-lain terealisasi sebesar Rp4,07 triliun atau 5,94 persen dari yang dialokasikan dalam APBN-P 2012 atau mengalami penurunan sebesar Rp1,39 triliun atau 25,47 persen dibanding realisasi tahun 2011 sebesar Rp5,47 triliun. Tren penyerapan Belanja Lain-lain sepanjang tahun 2012 berfluktuasi dan realisasi terendah terjadi pada bulan Januari sebesar Rp0,002 triliun, sedangkan realisasi tertinggi terjadi pada bulan Juni sebesar Rp2,11 triliun. Secara rata-rata penyerapan Belanja Lain-lain per bulan selama tahun 2012 adalah sebesar Rp0,34 triliun.

Kontribusi belanja Pemerintah dan Belanja Modal terhadap perekonomian

Sejalan dengan program pembangunan yang dilaksanakan pemerintah sesuai dengan RPJMN tahun 2010-2014 yang menetapkan 3 (tiga) agenda yang menjadi misi pembangunan yaitu (1) melanjutkan pembangunan menuju Indonesia yang sejahtera, (2) memperkuat pilar-pilar demokrasi, dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Agenda yang dituangkan dalam besaran dan kebijakan alokasi belanja negara memiliki peran strategis dalam mendukung percepatan pembangunan. Sejalan dengan itu, maka baik pagu maupun realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2012 diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pencapaian misi tersebut. Peran APBN dalam mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting untuk melakukan stimulus bagi perekonomian terutama melalui belanja negara, dengan rata-rata kontribusi 17,67 persen terhadap PDB di lima tahun terakhir. Data perkembangan realisasi belanja negara dan defisit tahun 2008 – 2012 (lihat tabel 10) menunjukkan bahwa Pemerintah telah menjalankan kebijakan fiskal yang ekspansif.

Realisasi belanja negara tahun 2008 sebesar Rp985,73 triliun atau sekitar 19,90 persen PDB. Kemudian belanja negara tahun 2009 (16,70 persen PDB) turun sebesar 4,90 persen dibanding tahun sebelumnya dan meningkat di tahun 2010 sebesar 11,17 persen (16,23 persen PDB). Di tahun 2011 realisasi belanja naik 24,27 persen menjadi Rp1.294,98 triliun (17,44 persen PDB). Selanjutnya tahun 2012 realisasi belanja negara mencapai Rp1.491,41 triliun yang terdiri dari belanja Pemerintah pusat Rp1.010,56 triliun (12,26 persen PDB), dan transfer ke daerah mencapai Rp480,65 triliun (5,83 persen PDB).

Kontribusi pos Belanja Modal dalam APBN memiliki dampak yang cukup besar terhadap sektor riil terutama melalui pembentukan modal tetap bruto (PMTB). Secara nominal, realisasi Belanja Modal tahun 2008-2012 cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun, rasio Belanja Modal terhadap PDB sempat mengalami penurunan selang kurun waktu 2009-2010, dan kembali naik di tahun 2011. Rasio realisasi Belanja Modal terhadap PDB dalam kurun waktu 2008-2012 adalah: 1,47 persen; 1,35 persen; 1,25 persen; 1,59 persen; dan 1,76 persen.

Tabel 10 Perkembangan Belanja Negara tahun 2008-2012

(dalam triliun rupiah)

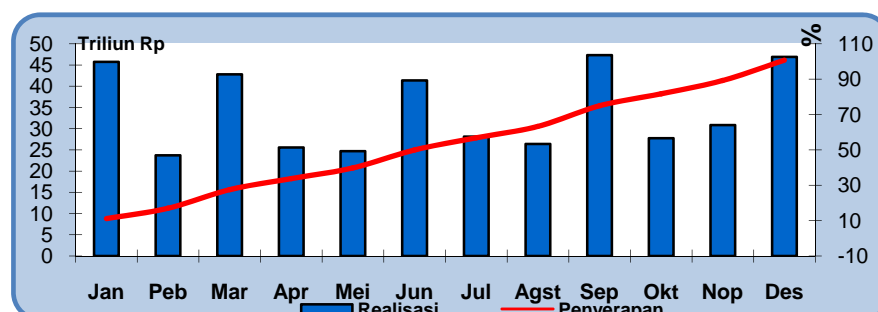
Uraian	2008		2009		2010		2011		2012	
	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB	Real	% PDB
Belanja Negara	985,73	19.90	937,38	16.70	1.042,12	16.23	1.295,00	17,44	1.491,41	18,09
Belanja Pemerintah Pusat	693,36	14.00	628,81	11.20	697,41	10.86	883.72	11,90	1.010,56	12,26
Transfer ke Daerah	292,43	5.90	308,59	5.50	344,73	5.37	411,32	5,54	480,65	5,83
Suspen	(0,06)	0.00	(0,02)	0.00	(0,02)	0.00	(0,05)	0,001	(0,21)	(0,002)
Surplus/ Defisit	(4,12)	(0,08)	(88,62)	(1,58)	(46,85)	(0,73)	(84,38)	(1,14)	(153,10)	(1,85)
Belanja Modal	72,77	1,47	75,87	1,35	80,29	1,25	117,85	1,59	145,10	1,76
PDB	4.954		5.613,4		6.422,9		7.427,1		8.241,9	

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Realisasi transfer ke daerah

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, kebijakan desentralisasi fiskal telah memasuki dasawarsa yang kedua. Prinsip dan tujuan desentralisasi fiskal yang dianut Pemerintah antara lain untuk mengurangi *vertical* dan *horizontal fiscal imbalance*, meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, meningkatkan efisiensi sumber daya nasional, membangun tata kelola pelaksanaan transfer ke daerah yang tepat sasaran dan tepat waktu, serta mendukung *fiscal sustainability* dalam kebijakan ekonomi makro. Transfer ke daerah yang salah satu sumber pendanaan daerah semakin meningkat seiring dengan naiknya pendapatan negara. Selain anggaran Transfer ke Daerah yang dialokasikan dan disalurkan ke daerah sebagai penerimaan APBD, juga terdapat beberapa jenis dana APBN yang dialokasikan melalui anggaran kementerian negara/lembaga untuk mendanai beberapa kegiatan di daerah. Dana dari kementerian negara/lembaga tersebut antara lain berupa dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dana dalam rangka pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), dan dana untuk pelaksanaan berbagai jenis subsidi, yang pengelolaannya dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga terkait dan tidak menjadi bagian dari penerimaan APBD. Secara keseluruhan, dana APBN yang digunakan untuk mendanai kegiatan di daerah, baik berupa Transfer ke Daerah maupun anggaran dari kementerian negara/lembaga, jumlahnya saat ini hampir mencapai 60 persen dari total belanja dalam APBN.

Realisasi Transfer ke Daerah dalam tahun 2012 mencapai Rp480,65 triliun (100,39 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp478,78 triliun), atau naik Rp69,32 triliun (16,85 persen) dari realisasi tahun 2011 sebesar Rp411,32 triliun. Realisasi transfer ke daerah tersebut terdiri dari dana perimbangan, dana otsus dan penyesuaian. Realisasi Dana Perimbangan tahun 2012 sebesar Rp411,29 triliun atau sebesar 100,72 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp408,35 triliun. Untuk dana otsus dan penyesuaian terealisasi sebesar Rp69,35 triliun atau 98,48 persen dari pagu APBN-P 2012 sebesar Rp70,42 triliun.

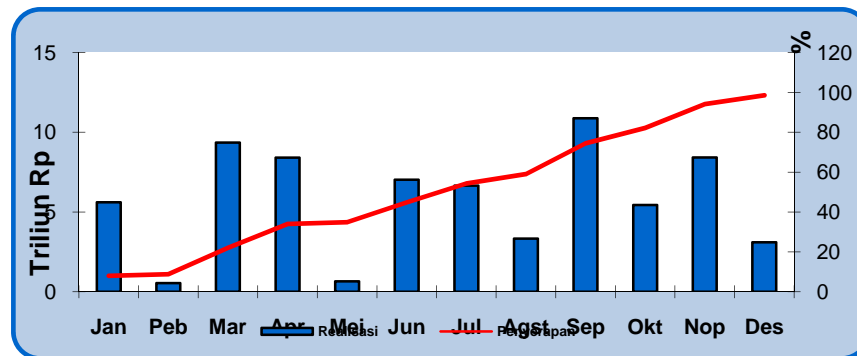


Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 27 Tren Serapan Dana Perimbangan Bulanan TA 2012

Tren serapan transfer ke daerah tersebut tidak berbeda jauh dengan tren belanja Pemerintah Pusat yakni berfluktuasi sepanjang tahun 2012. Untuk dana perimbangan, pada awal tahun terjadi penyerapan sebesar

Rp45,75 triliun atau 11,2 persen terhadap total realisasi dana perimbangan, selanjutnya berfluktuasi dengan kenaikan di bulan terakhir pada masing-masing triwulan dan pada akhir tahun terjadi penyerapan tertinggi sebesar Rp46,90 triliun atau 11,40 persen dari total pagu dana perimbangan. Secara nominal, dana perimbangan terserap sebesar Rp411,29 triliun dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp34,27 triliun, lebih besar dari rata-rata tahun sebelumnya sebesar Rp28,94 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 28 Tren Serapan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Bulanan TA 2012

Untuk penyerapan dana otonomi khusus dan penyesuaian, penyerapan tertinggi ada di bulan September (Rp10,88 triliun), berikutnya bulan Maret (Rp9,35 triliun), dan April (Rp8,41 triliun). Secara nominal, dengan rata-rata serapan per bulan sebesar Rp5,78 triliun. Dana otonomi khusus dan penyesuaian terserap sebesar Rp69,35 triliun, lebih besar dibandingkan realisasi tahun sebelumnya sebesar Rp64,08 triliun.

PEMBIAYAAN

Dampak kebijakan stimulus fiskal terhadap defisit APBN

Peningkatan defisit fiskal utamanya merupakan implikasi dari kebijakan stimulus fiskal dalam beberapa tahun terakhir. Defisit dan pembiayaan anggaran adalah komponen APBN yang kondisinya tidak bisa terlepas dari perkembangan faktor-faktor eksternal. Kebijakan fiskal ekspansif mendukung perekonomian negara dan memberikan stimulus fiskal bagi perekonomian nasional serta untuk meredam dampak krisis global. Pasca krisis global yang mencapai puncaknya pada tahun 2008, fundamental perekonomian Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin baik yang tercermin antara lain dari pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, tingkat inflasi yang terkendali, *sovereign credit rating* yang semakin baik, cadangan devisa yang meningkat, dan nilai tukar Rupiah yang terkendali.

Penetapan kebutuhan besaran defisit APBN dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai hal, antara lain kebutuhan kegiatan prioritas yang harus dibiayai di tahun yang bersangkutan, kapasitas pembiayaan anggaran, kondisi perekonomian dan pasar keuangan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Walaupun kebijakan fiskal ekspansif memiliki kecenderungan terjadinya defisit, Pemerintah terus berupaya menjaga defisit fiskal pada tingkat yang relatif rendah. Di samping itu, upaya perhitungan besaran dan realisasi defisit ini dilakukan dengan memperhatikan kemampuan pembiayaan tanpa merusak indikator makro ekonomi seperti inflasi. Defisit yang meningkat juga diseimbangkan dengan kebijakan di bidang pendapatan yang mengupayakan peningkatan pendapatan negara terutama yang berasal dari dalam negeri. Realisasi defisit anggaran tahun 2012 mencapai Rp153,10 triliun atau 80,53 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp190,10 triliun.

Sumber-sumber pembiayaan

Sumber-sumber pembiayaan terus digali untuk menutup defisit anggaran. Sumber pembiayaan itu sendiri berasal dari sumber pembiayaan utang dan non utang, serta terdiri dari pembiayaan dalam negeri dan pembiayaan luar negeri. Pemerintah mengoptimalkan dan mengefisienkan penggunaan anggaran dengan terlebih dahulu memenuhi kebutuhan pembiayaan melalui non utang. Sementara realisasi

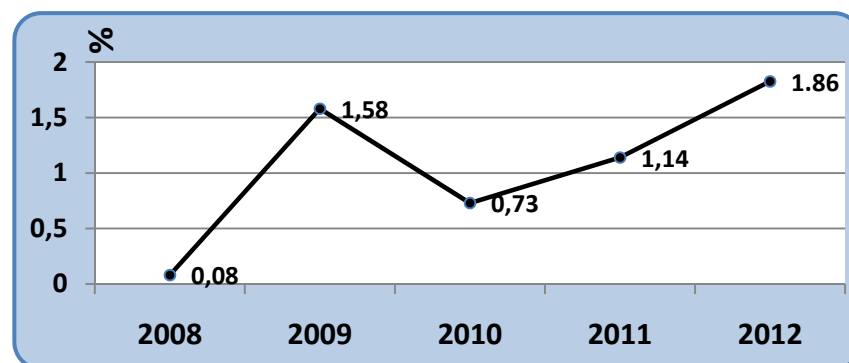
pembiayaan utang diupayakan menyesuaikan kebutuhan pembiayaan anggaran. Dalam rangka meningkatkan tingkat kemandirian, Pemerintah menekankan sumber pembiayaan dalam negeri sebagai sumber pembiayaan APBN. Hal ini mengingat risiko utang dalam negeri relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan utang luar negeri. Selain itu, dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dalam negeri disaat yang bersamaan Pemerintah dapat mengembangkan pasar keuangan domestik dan meningkatkan *multiplier* perekonomian nasional. Adapun sumber pembiayaan luar negeri juga digali dengan memperhatikan dan mempertahankan penurunan rasio utang terhadap PDB secara berkesinambungan (*debt sustainability*). Pada tahun 2012 sumber pembiayaan didominasi oleh sumber pembiayaan utang yang diakibatkan oleh terbatasnya sumber pembiayaan non utang yang antara lain dipengaruhi oleh kebijakan penerimaan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk sumber yang berasal dari utang, Pemerintah menggunakan Surat Berharga Negara (SBN) dan Surat Utang Negara (SUN), serta Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai instrumen utama. Pembiayaan non utang bersumber dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman, dan hasil pengelolaan aset (HPA). Sementara pembiayaan utang bersumber dari Surat Berharga Negara (SBN), pinjaman luar negeri, dan pinjaman dalam negeri.

Realisasi pembiayaan APBN

Realisasi pembiayaan anggaran pada tahun 2012 mencapai Rp174,96 triliun, lebih rendah Rp15,14 triliun (7,96 persen) dari target APBN-P 2012 sebesar Rp190,11 triliun. Untuk realisasi pembiayaan dalam negeri mencapai Rp198,42 triliun, lebih tinggi Rp3,89 triliun (1,99 persen) dari target APBN-P 2012 sebesar Rp194,53 triliun. Realisasi pembiayaan luar negeri mencapai negatif Rp23,46 triliun, naik Rp20,96 triliun dari target APBN-P 2011 sebesar Rp4,42 triliun.

Rasio defisit terhadap PDB

Rasio defisit terhadap PDB menunjukkan salah satu indikator kesinambungan fiskal. Selama tahun 2008-2012 rasio tersebut berfluktuatif dan berada di bawah level 3 persen dengan rata-rata sebesar 1,07 persen. Angka rasio defisit terhadap PDB selama periode 2008-2012 berturut-turut adalah 0,08 persen, 1,58 persen, 0,73 persen, 1,14 persen dan 1,86 persen.



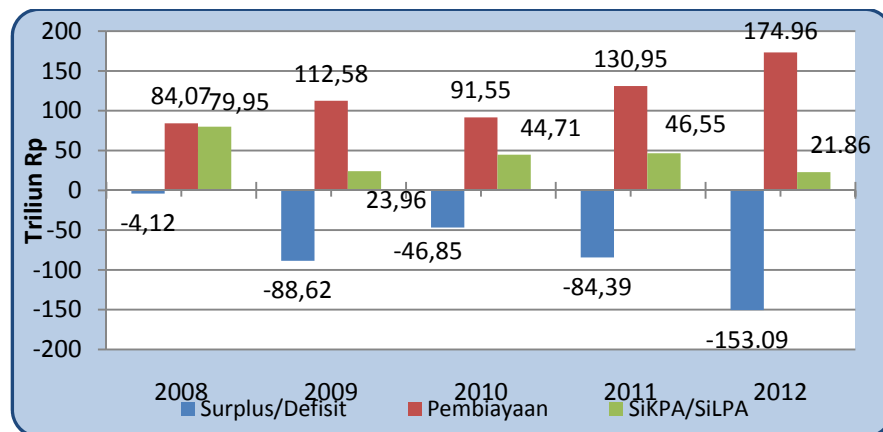
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 29 Perkembangan Rasio Realisasi Defisit Anggaran terhadap PDB tahun 2008-2012

Perkembangan surplus/defisit, pembiayaan, SiKPA/SiLPA

Surplus/defisit menunjukkan perbedaan antara seluruh penerimaan anggaran dengan seluruh pengeluaran anggaran. Sedangkan SiLPA (sisa lebih pembiayaan anggaran)/SiKPA (sisa kurang pembiayaan anggaran) merupakan selisih antara surplus/defisit dengan pembiayaan. Secara umum, dalam beberapa tahun terakhir realisasi anggaran Pemerintah Pusat menghasilkan SiLPA. SiLPA yang dihasilkan dapat digunakan untuk pengeluaran pada periode anggaran berikutnya. Penambahan SiLPA tahun anggaran berjalan dengan saldo SiLPA tahun sebelumnya menghasilkan Sisa Anggaran Lebih (SAL) Pemerintah.

Pada tahun 2008 realisasi APBN mengalami SiLPA Rp 79,95 triliun. SiLPA tersebut menjadi SAL tahun 2008 yang digunakan untuk kegiatan tahun 2009 yakni terutama terkait dengan PNPM. Pada tahun 2009, realisasi pembiayaan lebih tinggi dibanding realisasi defisit sehingga terjadi SiLPA sebesar Rp23,96 triliun dan pada tahun 2010 realisasi APBN mengalami SiLPA sebesar Rp44,71 triliun. Tahun 2011 jumlah SiLPA berkurang menjadi Rp46,55 triliun. Sedangkan tahun 2012 jumlah SiLPA menjadi Rp21,86 triliun (grafik 30). Selama tahun 2008-2012, SiLPA rata-rata sebesar Rp43,40 triliun.



Sumber: Laporan Realisasi Anggaran-Kementerian Keuangan

Grafik 30 Perkembangan Surplus/Defisit, Pembiayaan serta SiKPA/SiLPA Tahun 2008-2012

Tabel 11 Presentase Anggaran dan Realisasi APBN Terhadap PDB Tahun 2012
(dalam triliun rupiah)

Uraian	2012			
	APBN-P	persen thd PDB	Realisasi	persen thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah	1.358,20	16,48	1.338,31	16,24
1. Penerimaan Perpajakan	1.016,23	12,33	980,52	11,89
a. Pendapatan Pajak Dalam Negeri	968,29	11,75	930,86	11,29
b. Pendapatan Pajak Perdagangan Internasional	47,94	0,58	49,66	0,60
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	341,15	4,14	352,00	4,28
a. Penerimaan SDA	217,16	2,63	225,87	2,75
b. Pendapatan Bagian Laba BUMN	30,78	0,37	30,80	0,37
c. Pendapatan PNPB lainnya	72,80	0,88	73,63	0,89
d. Pendapatan BLU	20,41	0,25	21,70	0,26
3. Penerimaan Hibah	0,82	0,01	5,79	0,07
Belanja Negara	1.548,31	18,79	1.491,17	18,09
1. Belanja Pemerintah Pusat	1.069,54	12,98	1.010,53	12,26
a. Belanja Pegawai	212,97	2,58	197,86	2,40
b. Belanja Barang	160,03	1,94	140,88	1,71
c. Belanja Modal	182,62	2,22	145,10	1,76
d. Belanja Pembayaran Kewajiban Utang	117,79	1,43	100,51	1,22
e. Belanja Subsidi	245,08	2,97	346,42	4,20
f. Belanja Hibah	1,79	0,02	0,07	0,00
g. Belanja Bantuan Sosial	80,72	0,98	75,62	0,92
h. Belanja Lain-lain	68,54	0,83	4,07	0,05
2. Transfer ke Daerah	478,77	5,81	480,64	5,83
a. Dana Perimbangan	408,35	4,95	411,29	4,99
i. Dana Bagi Hasil	108,42	1,32	111,54	1,35
ii. Dana Alokasi Umum	273,81	3,32	273,81	3,32
iii. Dana Alokasi Khusus	26,12	0,32	25,94	0,31
b. Otonomi Khusus dan Penyesuaian	70,42	0,85	69,35	0,84
i. Dana Otonomi Khusus	11,95	0,14	11,95	0,14
ii. Dana Penyesuaian	58,47	0,71	57,40	0,70
Défisit Anggaran	(190,11)	(2,31)	(153,10)	(1,86)
Pembiayaan	190,11	2,31	174,96	2,12

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran Kementerian Keuangan

Tabel 12. Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan (Rp Triliun)	2.082,1	2.177,0	2.310,7	2.462,2	2.618,1	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	4.948,7	5.606,2	6.436,3	7.427,1	8.241,9	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	21,4	23,9	27,1	30,8	33,3	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	6,0	4,6	6,2	6,5	6,23	(1)
5	Inflasi (%)	11,1	2,8	7,0	3,8	4,3	(1)
6	Total ekspor (USD miliar)	137,0	116,5	157,8	203,8	190,0	(1)
7	Eskpor Non Migas (USD miliar)	107,8	97,47	129,68	162,02	153,07	(1)
8	Total Impor (USD miliar)	129,2	96,8	135,7	177,4	191,7	(1)
9	Impor Non Migas (USD miliar)	98,3	77,87	108,24	136,61	149,10	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	51,6	66,1	96,2	110,1	112,78	(2)
11	Rupiah/USD (y-oy)	10.950	10.408	9.078	8.776	9.638	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	981,60	848,76	995,27	1.210,59	1.338,31	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	985,73	937,38	1.042,12	1.294,98	1.491,41	(4)
14	Défisit Anggaran (Rp Triliun)	(4,12)	(88,62)	(46,85)	(84,38)	(153,10)	(4)
15	Uang Beredar (Rp Triliun)						
	a. Arti Sempit (M1)	466,4	506,06	518,45	565,15	841,78	(2)
	b. Arti Luas (M2)	1.883,9	1.865,0	2.206,02	2.489,80	3.304,04	(2)
16	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	1.315,7	1.408,6	1.796,0	1.989,06	2.707,9	(2)
17	Suku Bunga (% per tahun, posisi akhir tahun)						
	a. Deposito 1 bulan	8,2	6,87	6,78	6,35	5,58	(2)
	b. Kredit Modal Kerja	15,2	13,69	12,83	12,16	11,49	(2)
	c. Kredit Investasi	14,4	12,96	12,28	12,04	11,27	(2)
18	Realisasi Investasi						
	a. Domestik (Rp Triliun)	20,36	37,80	60,5	76	92,18	(5)
	b. Asing (USD Miliar)	14,87	10,82	16,21	19,47	24,56	(5)
19	IHSG BEJ	1.355,0	2.534,0	3.704	3.822	4.316,7	(2)
20	Harga Minyak (USD/Barrel)	96,13	61,5	79,4	111,5	112,7	(6)
21	Lifting Minyak (ribu Barrel/hari)	931	952	954	898,1	860	(6)
22	Rasio Utang terhadap PDB (DSR, %)	33	28	26	25,4	23,1	(3)

Sumber :

- (1) Badan Pusat Statistik
- (2) Bank Indonesia
- (3) DJPU, Kementerian Keuangan
- (4) Laporan Realisasi APBN, Kementerian Keuangan
- (5) Badan Koordinasi Penanaman Modal
- (6) Kementerian ESDM

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2012 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga (K/L), beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun oleh Menteri Keuangan selaku Pengelola Fiskal berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN).

Untuk LKPP Tahun 2012, entitas pelaporan keuangan tingkat K/L dan BUN, serta entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup, meliputi:

*Daftar entitas pelaporan
keuangan tingkat
kementerian
negara/lembaga*

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2012	2011
1	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2	2
2	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2	2
3	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	70	70
4	BA 005	Mahkamah Agung	1.629	1.602
5	BA 006	Kejaksaan Agung	517	517
6	BA 007	Sekretariat Negara	16	17
7	BA 010	Kementerian Dalam Negeri	942	763
8	BA 011	Kementerian Luar Negeri	142	142
9	BA 012	Kementerian Pertahanan	261	256
10	BA 013	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia	776	753
11	BA 015	Kementerian Keuangan	1.073	1.067
12	BA 018	Kementerian Pertanian	1.954	2.733
13	BA 019	Kementerian Perindustrian	109	109
14	BA 020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	99	93
15	BA 022	Kementerian Perhubungan	666	680
16	BA 023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	388	396
17	BA 024	Kementerian Kesehatan	1.279	1.185
18	BA 025	Kementerian Agama	6.955	6.961
19	BA 026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	820	1.009
20	BA 027	Kementerian Sosial	278	284
21	BA 029	Kementerian Kehutanan	407	403
22	BA 032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	794	745
23	BA 033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.245	1.024
24	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	2	2
25	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	2	2
26	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	2	1
27	BA 040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	242	210
28	BA 041	Kementerian Badan Usaha Milik Negara	1	1
29	BA 042	Kementerian Riset dan Teknologi	5	5
30	BA 043	Kementerian Lingkungan Hidup	48	48
31	BA 044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	36	36
32	BA 047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	17	7
33	BA 048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	2	1
34	BA 050	Badan Intelijen Negara	1	1
35	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1	1
36	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1	1
37	BA 054	Badan Pusat Statistik	507	484
38	BA 055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	35	1
39	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	468	461
40	BA 057	Perpustakaan Nasional	35	35
41	BA 059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	60	60
42	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.207	1.133
43	BA 063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	40	39

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker	
			2012	2011
44	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1	1
45	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	39	39
46	BA 066	Badan Narkotika Nasional	119	74
47	BA 067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	7	40
48	BA 068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	42	42
49	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1	1
50	BA 075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	183	183
51	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	531	531
52	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1	1
53	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1	1
54	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	50	50
55	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	21	21
56	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	19	19
57	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	20	19
58	BA 083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	1	1
59	BA 084	Badan Standardisasi Nasional	1	1
60	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3	3
61	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	13	13
62	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	34	34
63	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13	13
64	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	39	31
65	BA 090	Kementerian Perdagangan	304	311
66	BA 091	Kementerian Perumahan Rakyat	42	42
67	BA 092	Kementerian Pemuda dan Olahraga	34	34
68	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1	1
69	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	2	2
70	BA 100	Komisi Yudisial	1	1
71	BA 103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1	1
72	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24	24
73	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1	1
74	BA 106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1	1
75	BA 107	Badan SAR Nasional	25	25
76	BA 108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1	1
77	BA 109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	1	1
78	BA 110	Ombudsman RI	1	1
79	BA 111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	28	32
80	BA 112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam *)	1	-
81	BA 113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme *)	1	-
82	BA 114	Sekretariat Kabinet *)	1	-
83	BA 115	Badan Pengawas Pemilihan Umum *)	1	-
84	BA 116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia *)	73	-
85	BA 117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia *)	29	-
86	BA 118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang *)	1	-
87	BA 999	Bendahara Umum Negara, yang terdiri dari:		
	BA 999.01	Pengelolaan Utang **)	1	1
	BA 999.02	Hibah **)	1	1
	BA 999.03	Investasi Pemerintah **)	8	4
	BA 999.04	Penerusan Pinjaman **)	1	1
	BA 999.05	Transfer ke Daerah **)	1	3
	BA 999.07	Belanja Subsidi **)	14	15
	BA 999.08	Belanja Lain-lain **)	14	182
	BA 999.99	Transaksi Khusus **)		-
	BA 999.--	Badan Lainnya **)		-
		Jumlah Satker	24.889	25.145

*) Bagian Anggaran tersebut baru terbentuk sejak tahun anggaran 2012

**) BA tersebut merupakan entitas pelaporan, dan laporan keuangan BA tersebut dikonsolidasikan menjadi LKBUN.

LKPP Tahun 2012 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset Pemerintah, yaitu Unit Badan Lainnya nonsatuan kerja.

LKPP Tahun 2012 ini tidak mencakup entitas:

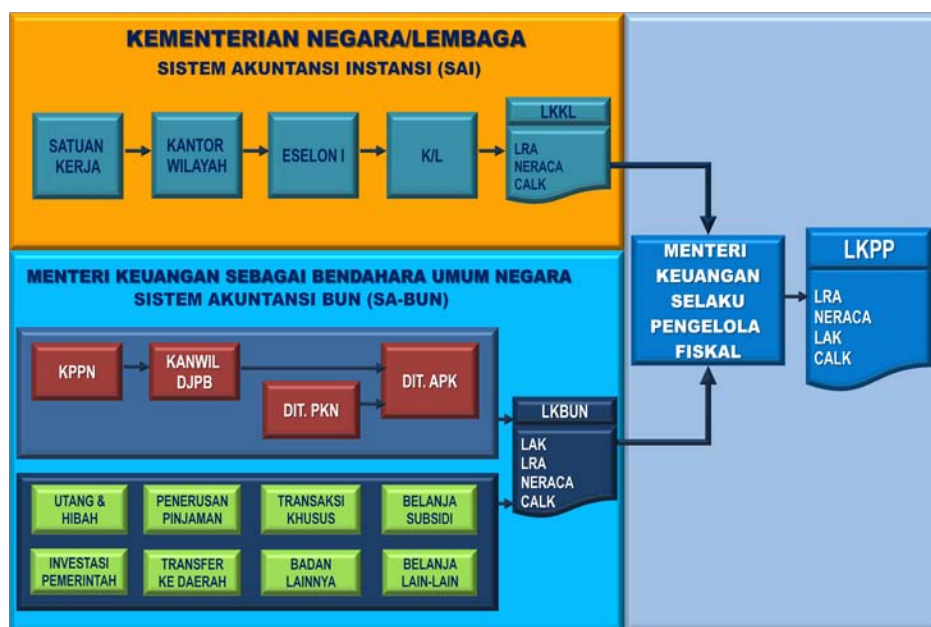
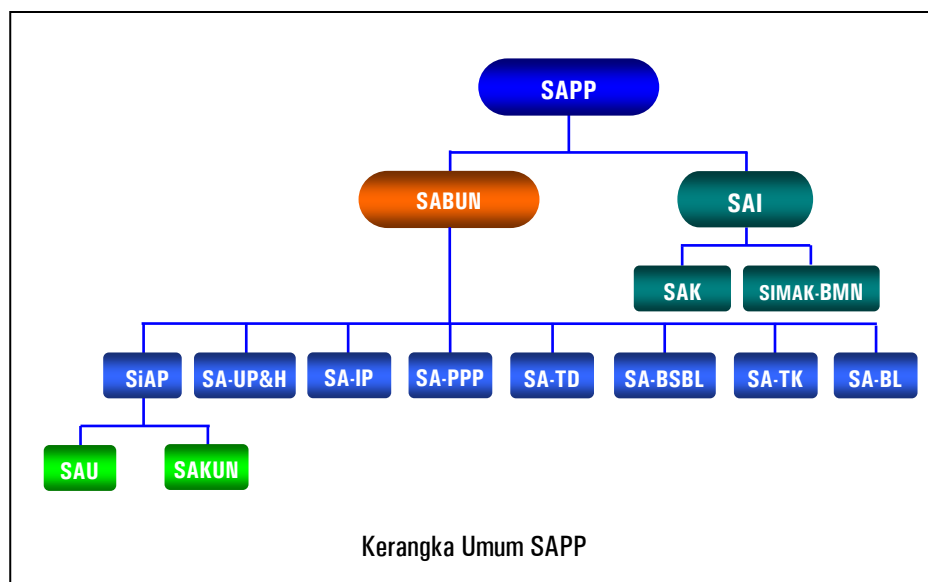
- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, penyertaan modal (investasi) Pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN), dan BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi Pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

Sesuai dengan PMK Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 233/PMK.05/2011, LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh K/L secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat K/L (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca, sedangkan SIMAK-BMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara dalam rangka menghasilkan neraca.

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menyelenggarakan Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) untuk menghasilkan Laporan Keuangan BUN. SA-BUN terdiri dari beberapa sub sistem, yaitu Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H), Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP), Sistem Akuntansi dan Pelaporan Penerusan Pinjaman (SA-PPP), Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD), Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL), Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK), dan Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL). SiAP terdiri dari dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI.

Kerangka Umum SAPP dan alur penyusunan LKPP adalah sebagaimana disajikan pada diagram di bawah ini.



Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan K/L dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

- Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2012 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan

uang yang riil masuk ke Kas Negara atau melalui pengesahan pendapatan. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah dari K/L berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.

- Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2012 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas K/L, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja K/L. Apabila terjadi perbedaan antara realisasi belanja berdasarkan data K/L dengan data BUN, perbedaan tersebut disajikan pada Laporan Realisasi APBN sebagai "Suspen."
- Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2012 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan dan pengeluaran uang yang riil masuk ke atau keluar dari Kas Negara.

2. Neraca

Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan konsolidasi Neraca seluruh K/L dan Neraca LKBUN. Neraca LKBUN disusun berdasarkan konsolidasi Neraca Kas Umum Negara (KUN) dan Neraca Bagian Anggaran – Bagian Anggaran BUN termasuk Laporan Keuangan Badan Lainnya. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2012 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN dan rekening BUN (rekening 502.000000980, rekening 600.502411980, rekening 600.502111980, rekening 519.000122980, rekening 608.001411980, rekening 608.000111980, rekening SAL, dan rekening Penempatan Uang Negara), termasuk transaksi pengesahan pendapatan hibah, serta pendapatan dan belanja pada BLU. Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, pendekatan penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas, serta informasi penting lainnya dalam rangka pengungkapan yang memadai.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2012 telah mengacu pada Standar Akuntansi

Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Lampiran II (Pernyataan SAP (PSAP) Berbasis Kas Menuju Akrual). Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik di lingkungan pemerintahan.

Dalam rangka penerapan akuntansi berbasis akrual, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pemerintah telah menetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP tersebut mengatur SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Sesuai dengan PP tersebut, Pemerintah dapat menerapkan SAP Berbasis Akrual secara bertahap dengan ketentuan penerapan sepenuhnya paling lambat tahun anggaran 2015.

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas pendapatan melalui dokumen pengesahan oleh KPPN. Pendapatan yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Pendapatan BLU.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap asas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2012 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam Rekening Minyak dan Gas Bumi (600.000411980) dan Rekening Panas Bumi (508.000084980). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai, karena penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, *Domestic Market Obligation (DMO) fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Penerimaan migas pada rekening 600.000411980 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000084980 setelah dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang dapat diestimasi diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan." Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN dan terjadinya pengesahan oleh KPPN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN atau pada saat terjadinya pengesahan atas belanja melalui dokumen pengesahan oleh KPPN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh KPPN. Belanja yang diakui pada saat pengesahan oleh KPPN antara lain Belanja yang berasal dari Pendapatan Hibah Langsung K/L dan Belanja BLU. Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN atau terjadinya pengesahan oleh BUN

(3) Pembiayaan

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN atau terjadinya pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan oleh BUN. Penerimaan Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain penerimaan pinjaman luar negeri melalui mekanisme *direct payment*. Pengeluaran Pembiayaan yang diakui pada saat pengesahan antara lain pencatatan investasi permanen yang berasal dari hibah saham. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

Nilai pembiayaan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dan pembayaran cicilan pokok atas pinjaman luar negeri yang disajikan baik pada Laporan Realisasi APBN maupun Laporan Arus Kas berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN (data Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN). Sementara itu, saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca LKPP berdasarkan saldo pinjaman/utang luar negeri yang disajikan pada Neraca Bagian Anggaran 999.01 (Pengelolaan Utang) oleh Ditjen Pengelolaan Utang. Perbedaan data penarikan pinjaman luar negeri antara Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa BUN dan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran dijelaskan pada CaLK.

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan persediaan.

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal pelaporan.
- Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo uang persediaan (UP) yang belum disetorkan ke kas negara atau belum dipertanggungjawabkan sampai dengan tanggal pelaporan.
- Kas dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang belum disetor ke kas negara disajikan sebagai Kas di Bendahara Penerimaan. Bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Penerimaan disajikan sebagai bagian dari Kas di Bendahara

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Penerimaan.

- Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari bunga dan jasa giro atas rekening Bendahara Pengeluaran, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetorkan ke kas negara sampai dengan tanggal pelaporan, dana lancar BLU, serta kas dari hibah langsung dan dana yang berasal dari SPM-LS Bendahara Pengeluaran yang belum dibayarkan kepada pihak ketiga.
- Kas pada BLU yang disajikan merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN maupun yang belum disahkan. Kas di BLU yang merupakan dana kelolaan yang belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Aset Lainnya.
- Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas pada BLU didasarkan pada Neraca K/L yang disusun melalui SAI.
- Termasuk dalam klasifikasi Kas adalah Kas Dalam Transito. Kas Dalam Transito merupakan kas yang telah dipindahbukukan dari satu rekening Pemerintah (rekening asal) ke rekening Pemerintah yang lain (rekening tujuan), namun sampai dengan tanggal pelaporan, kas tersebut belum masuk ke dalam rekening tujuan.
- Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Termasuk dalam pos Piutang adalah Piutang Pajak, Piutang Bukan Pajak, Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Uang Muka Belanja, Piutang dari Kegiatan BLU, Piutang Lain-lain, dan Piutang Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. LKPP Tahun 2012 ini telah menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) atas piutang dengan memperhitungkan penyisihan atas piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada CaLK. Penyisihan piutang tidak tertagih tidak diterapkan pada Uang Muka Belanja/Belanja Dibayar di Muka.
- Termasuk dalam persediaan adalah barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nilai persediaan didasarkan pada perhitungan fisik pada tanggal pelaporan, kecuali untuk persediaan dalam bentuk beras.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:

- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2012 meliputi investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

Investasi jangka pendek yang disajikan pada Neraca Pemerintah Pusat per 31

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen

Desember 2012 adalah investasi berupa deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan yang ada di BLU.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR, kelompok petani, nelayan, dan kelompok usaha lainnya.
- Investasi Non Permanen Lainnya berupa dana pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang telah diinvestasikan dalam bentuk pinjaman atau surat berharga.

Investasi non Permanen disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan Dana kelolaan BLU yang masih berupa kas dan belum digulirkan/diinvestasikan disajikan sebagai Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan pada pos Aset Lainnya.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen dan/atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelembagaan. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha atau badan hukum lainnya.

- Investasi Permanen PMN terdiri dari investasi pada perusahaan negara, lembaga keuangan internasional, Badan Hukum Milik Negara (BHMN), dan badan usaha lainnya. PMN pada perusahaan negara yang sama dengan atau lebih dari 51 persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PMN pada perusahaan negara yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN;
- PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga (kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan);
- Aset-aset yang berstatus Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. BPYBDS merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berasal dari belanja K/L yang diserahkan kepada BUMN di masing-masing sektor. Pengalihan BMN dari K/L menjadi aset BUMN berdasarkan dokumen Berita Serah Terima Operasi (BASTO). Metode pencatatan BPYBDS masih variatif, sebagian berdasarkan BASTO dan yang lain menggunakan nilai hasil *review*

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP); dan

- PMN pada lembaga keuangan internasional dicatat sebagai investasi permanen sebesar kontribusi Pemerintah yang telah dibayar tunai maupun dalam bentuk penerbitan *Promissory Notes*. Di sisi lain, *Promissory Notes* tersebut disajikan sebagai kewajiban.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen serta investasi pada BI disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pemberian pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya. Khusus untuk penyertaan pada lembaga keuangan internasional disajikan dengan menggunakan metode biaya berdasarkan hasil konfirmasi dan disesuaikan dengan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.

Pada LKPP Tahun 2011, Investasi Permanen PMN pada BPMIGAS dicatat sebesar nilai ekuitas bersih per 31 Desember 2011. Dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, maka nilai investasi permanen PMN pada BPMIGAS disajikan sebesar ekuitas bersih per 13 November 2012. Pendanaan BPMIGAS tanggal 13 November 2012 s.d 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pengerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset Tetap dilaporkan berdasarkan neraca K/L per 31 Desember 2012 dengan harga perolehan. Sejak tahun 2007, Pemerintah telah melakukan penertiban Barang Milik Negara (BMN) yang meliputi inventarisasi dan penilaian kembali BMN. Penilaian kembali dilakukan untuk BMN yang diperoleh sebelum tahun 2004. Hasil inventarisasi dan penilaian kembali BMN tersebut menjadi dasar penyajian Aset Tetap pada Neraca per 31 Desember 2012.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

- (a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan
- (b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih

dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

Pengeluaran yang memenuhi batasan minimum kapitalisasi diperlakukan sebagai penambah nilai Aset Tetap.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, Pemerintah menetapkan bahwa dalam penyusunan LKPP Tahun 2012, seluruh aset tetap yang dikelola oleh K/L selaku pengguna barang belum disusutkan/didepresiasi. Hal ini disebabkan antara lain peraturan dan kebijakan penyusutan, serta umur manfaat dari masing-masing kelompok aset tetap belum ditetapkan. Penerapan penyusutan aset tetap akan dilaksanakan mulai pelaporan keuangan tahun 2013. Untuk tahun 2012, penyusutan aset tetap dilaksanakan untuk satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU yang telah melaksanakan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Nilai perolehan, penyusutan, dan nilai buku atas aset tetap pada satker yang menerapkan pengelolaan keuangan BLU diungkapkan dalam CaLK.

Terhadap Aset Tetap yang penyelesaian pengerjaannya melebihi dan atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan aset tersebut selesai dan siap untuk digunakan. Dengan demikian terhadap pengerjaan/perolehan aset tetap yang pada akhir tahun anggaran belum selesai, maka dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan yang sudah selesai dibuat atau dibangun dan telah siap untuk digunakan harus segera direklasifikasikan ke salah satu akun yang sesuai dalam pos aset tetap

d. Piutang Jangka Panjang

Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Penerusan Pinjaman, Piutang Kredit Pemerintah yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.

- TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.
- TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
- Piutang Penerusan Pinjaman adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya penerusan pinjaman yang berasal pinjaman/hibah baik yang bersumber dari dalam dan/atau luar negeri, yang diberikan kepada pemda, BUMN,

BUMD/atau penerima lainnya yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran masuk sumber daya ekonomi Pemerintah, termasuk di dalamnya piutang sehubungan dengan pemberian pinjaman kepada BUMN, BUMD, pemda/atau penerima lainnya.

- Piutang Kredit Pemerintah adalah aset yang dimiliki Pemerintah sehubungan dengan adanya pemberian kredit oleh Pemerintah kepada pemda, BUMN, BUMD, atau penerima lainnya.
- TPA, Tagihan TGR, Penerusan Pinjaman, dan Piutang Kredit Pemerintah yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

TP, TGR, TPA, dan Penerusan Pinjaman yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 ini telah memperhitungkan penyisihan piutang tidak tertagih yang disajikan pada pos tersendiri dalam lembar muka Neraca dan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Apabila kemitraan berakhir, maka aset yang menjadi hak Pemerintah akan direklasifikasi menjadi aset definitif sesuai jenisnya.
- Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti yang disimpan pada rekening cadangan subsidi/PSO, rekening cadangan Dana Bagi Hasil, rekening dana reboisasi, Dana Abadi Umat, dana Biaya Penyelenggaraan Iuran Haji, dan kas besi perwakilan RI di luar negeri, Dana Abadi Pendidikan, serta dana lain yang sejenis.
- Aset Tidak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tidak Berwujud meliputi *software* komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang, serta hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.
- Aset KKKS yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 adalah:
 - Aset KKKS yang diperoleh sampai dengan akhir tahun 2004 disajikan pada LKPP tahun 2012 sebesar nilai wajar berdasarkan hasil penilaian, sedangkan yang diperoleh tahun 2005 – 2010 disajikan berdasarkan harga perolehan, bila tidak diketahui harga perolehannya maka dapat menggunakan nilai wajar berdasarkan hasil penilaian. untuk aset KKKS yang diperoleh sejak tahun 2011 dicatat berdasarkan harga perolehan. Aset KKKS yang belum diserahkan dan belum dilakukan inventarisasi dan penilaian, serta aset KKKS yang sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian namun belum dapat diyakini, tidak dicatat dalam neraca, namun diungkapkan dalam CaLK.

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Piutang Jangka Panjang Lainnya, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, Dana Penjaminan, Aset KKKS, Aset Eks BPPN, Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya, dan Aset Lain-lain.

- Aset KKKS yang diperoleh serta digunakan sejak tahun 2011, apabila berupa Harta Barang Modal Aset disajikan pada LKPP Tahun 2012 setelah *Placed Into Services* (PIS), dan apabila berupa tanah disajikan setelah digunakan oleh KKKS. PIS adalah kondisi sebuah barang yang diadakan oleh KKKS telah siap/sudah digunakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.

Aset KKKS yang telah diserahkan kepada Pemerintah c.q Kementerian ESDM dan sudah dilakukan inventarisasi dan penilaian, dicatat dalam neraca sebagai aset tetap atau persediaan.

Untuk Aset KKKS yang masih dikuasai oleh KKKS, ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi aset mengikuti kebijakan akuntansi pada industri hulu minyak dan gas bumi.

- Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya merupakan kekayaan bersih (ekuitas) pada Unit Badan Lainnya non satuan kerja seperti Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabakti, dan Yayasan Gedung Veteran. Nilai Aset Lainnya tersebut disajikan sebesar nilai kekayaan bersih (aset dikurangi kewajiban). Dalam hal badan-badan lain tersebut mendapatkan alokasi APBN dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), maka aset dan kewajiban atas KPA dikeluarkan dalam penghitungan nilai kekayaan bersih.
- Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam jenis aset sebagaimana dijelaskan di atas. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang belum ditetapkan status penggunaannya seperti aset eks Pertamina, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA). Aset eks BPPN berupa kredit atau tagihan pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Piutang Lain-lain sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Termasuk juga dalam Aset Lainnya adalah dana kelolaan BLU yang masih berupa kas yang belum digulirkan/diinvestasikan.

(5) Kewajiban

Kewajiban terdiri dari kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga/Biaya Pinjaman (*accrued interest*), Utang Subsidi, Surat Perbendaharaan Negara (SPN), dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

- Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum

disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

- Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.
- Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
- SPN adalah instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto yang berjangka waktu kurang dari 12 bulan.
- Termasuk dalam kewajiban jangka pendek adalah kewajiban Pemerintah terkait dengan penerimaan migas yang masuk ke rekening 600.000411.980 dan 508.000084.980, seperti *under lifting*, *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB, yang akan dibayarkan kepada KKKS berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh Pemerintah bersama BPMIGAS.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Kementerian Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds*, *zero coupon bonds*, *international bonds*, Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dikelola Kementerian Keuangan.

Utang Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal 31 Desember 2011 disajikan sebagai bagian lancar.

- ***Fixed Rate (FR) Bonds*** adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Obligasi jenis ini dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Obligasi Negara Ritel (ORI)*** adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Variable Rate (VR) Bonds*** adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan adalah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka tiga bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Obligasi VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- ***Zero Coupon (ZC) Bonds*** adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. *Zero Coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan

kepemilikannya di pasar sekunder.

- **Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia (SUP kepada BI)** merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). SUP kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01
- **SU-002 dan SU-004** adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- **SU-007** adalah surat utang hasil konversi indeksasi dan tunggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025. angsuran pokok SU-007 diamortisasi secara *semiannually* dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU-007 dapat dilakukan dengan cara tunai (*cash*) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan (*tradable*).
- **SRBI-01** adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI-01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik dua kali setahun.
- **International Bonds** adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Obligasi ini disajikan di neraca dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan.
- **Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)** adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya akad atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap USD yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi Pemerintah sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja

atas jasa yang telah diberikan. *Past service liability (unfunded liability)* berupa kewajiban pensiun PNS diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan *Past service liability* terkait Tabungan Hari Tua PNS disajikan dalam Neraca.

Termasuk dalam kelompok kewajiban adalah *Promissory Notes* yang diterbitkan oleh Pemerintah dalam rangka keanggotaan pada lembaga internasional. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar kurang dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka pendek. *Promissory Notes* yang akan dilunasi/dibayar lebih dari satu tahun setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. *Promissory notes* pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi yang dilakukan IMF pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal pelaporan.

*Kewajiban kontinjensi
diungkapkan dalam
catatan penting lainnya*

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta, tanggungan kelebihan biaya pengadaan tanah sebagai akibat adanya kenaikan harga pada saat pembebasan lahan pada proyek pembangunan jalan tol, dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu bara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

Kewajiban Kontinjensi terkait dengan *risk sharing* atas Program Kredit Usaha Tani Tahun Penyediaan 1998/1999 disajikan dalam Neraca.

(7) Ekuitas Dana

*Ekuitas Dana terdiri dari
Ekuitas Dana Lancar dan
Ekuitas Dana Investasi*

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan menjadi Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang. Khusus untuk akun Dana yang Dibatasi Penggunaannya (kelompok Aset Lainnya-aset tidak lancar) berupa dana pihak ketiga yang dikelola Pemerintah mempunyai akun lawan kewajiban jangka pendek.

(8) Kurs Mata Uang Asing

Kurs Mata Uang Asing

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Lampiran II PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi. Lebih lanjut, Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP) Nomor 01 tentang Transaksi dalam Mata Uang Asing, menyatakan bahwa:

- Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan

menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh valuta asing tersebut.
- Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
 - a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
 - b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Perlakuan yang sama juga diterapkan pada transaksi penerimaan/penarikan.

Transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, seperti USD dan Yen, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal tersebut dilakukan karena dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan. Namun, transaksi dalam mata uang asing, dimana Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang tersebut di BI, dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini dilakukan karena dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Berikut adalah kurs tengah BI (Rupiah terhadap Mata Uang Asing) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011.

Mata Uang Asing	Satuan	31 Desember 2012	31 Desember 2011
Dolar Amerika Serikat [USD]	1	10,025.39	9.068,00
Dolar Australia [AUD]	1	7,907.12	9.202,68
Dolar Canada [CAD]	1	9,722.03	8.881,50
Franc Swiss [CHF]	1	10,596.70	9.636,07
Yuan China [CNY]	1	1,537.46	1.439,16
Kroner Denmark [DKK]	1	1,717.16	1.579,22
EURO [EUR]	1	12,809.86	11.738,99
Poundsterling Inggris [GBP]	1	15,578.86	13.969,27
Yen Jepang [JPY]	100	11,196.68	11.680,32
Korean Won [KRW]	1	9.03	7,84

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2012 ini menyajikan selisih kurs atas kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

Selisih kurs terkait dengan kas dalam valas, bagian lancar penerusan pinjaman dan utang luar negeri disajikan pada ekuitas dana lancar, sedangkan selisih kurs yang terkait dengan penerusan pinjaman, utang jangka panjang luar negeri dan SBN Valas disajikan pada ekuitas dana investasi.

Pencatatan selisih kurs atas Kas BUN di BI dalam mata uang asing (valas):

- a. Selisih kurs yang terealisasi dihitung dari:
 - kurs transaksi pada saat konversi dikurangi kurs tengah BI hari sebelumnya dikalikan dengan mata uang asing yang dikonversi; dan
 - ditambah dengan proporsi akumulasi selisih kurs yang belum terealisasi sampai dengan hari sebelumnya dari mata uang asing yang dikonversi terhadap total mata uang asing.

Selisih kurs untung diakui sebagai PNBK Lainnya, sedangkan selisih kurs rugi diakui sebagai Belanja Lain-lain, dan dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- b. Selisih kurs yang belum terealisasi dibukukan pada saat tanggal pelaporan keuangan dengan menjabarkan saldo mata uang asing dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal pelaporan. Selisih kurs yang belum terealisasi tersebut disajikan pada Neraca sebagai penambah atau pengurang SiLPA setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang telah terealisasi.

Pencatatan selisih kurs atas utang dalam valas:

Formulasi penghitungan selisih kurs atas utang dalam mata uang asing.

- a. *Outstanding* valas dikali kurs tengah pada tanggal neraca dikurangi *outstanding* valas dikali kurs penarikan pada tanggal terakhir penarikan.
- b. Kurs penarikan terakhir penarikan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - *Loan* yang penarikan terakhirnya sebelum tahun 2004 menggunakan kurs tengah BI pada tanggal 31 Desember 2004
 - *Loan* yang penarikan terakhirnya tahun 2004 dan sesudahnya menggunakan kurs dengan membagi nilai rupiah dengan valas pada tanggal penarikan terakhir.
 - Dalam hal mata uang penarikan terakhir berbeda dengan mata uang *outstanding* (2011) maka kurs dihitung dengan nilai rupiah penarikan terakhir dibagi dengan hasil konversi mata uang terakhir.

(9) Aset/Kewajiban Eks BRR NAD-Nias

*Aset/Kewajiban Eks
BRR NAD-Nias*

Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR NAD-Nias) sebagaimana telah ditetapkan menjadi UU Nomor 10 Tahun 2005, masa tugas BRR NAD-Nias adalah empat tahun. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009, masa tugas BRR NAD-Nias berakhir tanggal 16 April 2009. Berdasarkan ketentuan tersebut, BRR-NAD Nias sebagai suatu organisasi berakhir per tanggal 16 April 2009. Namun sebagai Entitas Pelaporan, BRR-NAD Nias telah berakhir per 31 Desember 2008, sehingga Neraca Penutup BRR NAD-Nias adalah per 31 Desember 2008.

Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2012, Neraca Likuidasi BRR NAD-Nias belum selesai disusun, sehingga aset/kewajiban eks BRR NAD-Nias yang disajikan pada LKPP Tahun 2012 ini adalah aset/kewajiban BRR NAD-Nias per 31 Desember 2008 yang telah diaudit oleh BPK dikurangi dengan aset/kewajiban yang telah diserahkan kepada pihak lain sampai dengan 31 Desember 2012.

*Daftar Perubahan
Kebijakan Akuntansi*

(10) Daftar Perubahan Kebijakan Akuntansi

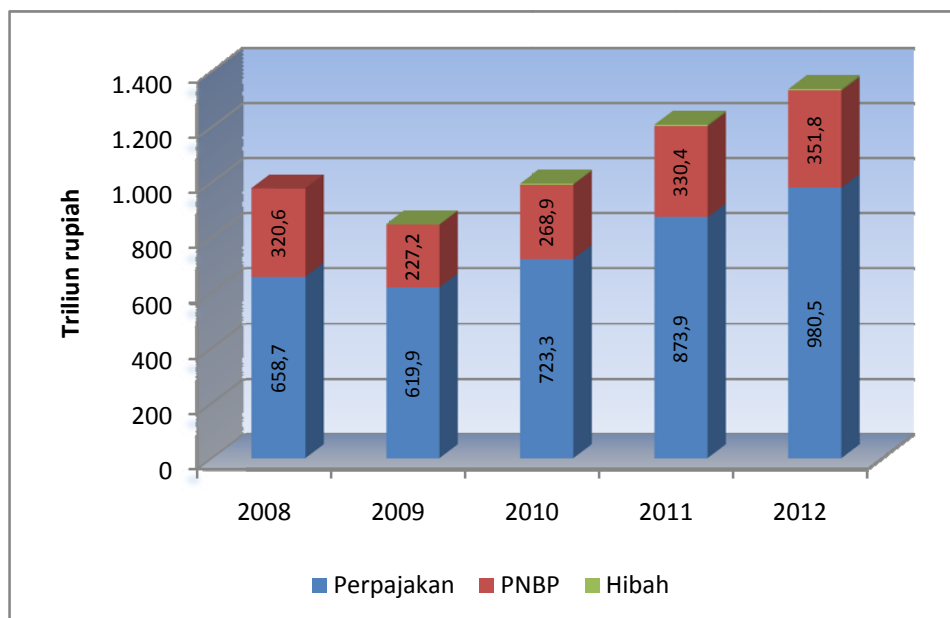
No.	Kebijakan Akuntansi	LKPP Tahun 2012	LKPP Tahun 2011
1.	Piutang Jangka Panjang (Tagihan Penjualan Angsuran, Tagian tuntutan Perbendaharaan/Tagihan Ganti Rugi, dll)	Disajikan pada akun tersendiri sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 42/2012 Tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca Pada Bagan Akun Standar	Disajikan pada Aset Lainnya
2.	Piutang yang berasal dari Aset Eks BPPN yang berupa aset kredit dan tagihan	Disajikan pada kelompok Aset Lancar – Piutang Lain-lain. Telah diterapkan penyisihan piutang yaitu sebesar 100% dikurangi presentase rata-rata nilai penerimaan pembiayaan	Disajikan pada kelompok Aset Lainnya. Belum diterapkan penyisihan piutang.
3.	Selisih Kurs Kas BUN di BI dan UP Valas (<i>unrealized</i>)	Disajikan pada Neraca sebagai bagian dari SiLPA setelah penyesuaian	Disajikan pada neraca sebagai akun tersendiri dan bukan bagian dari SiLPA.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

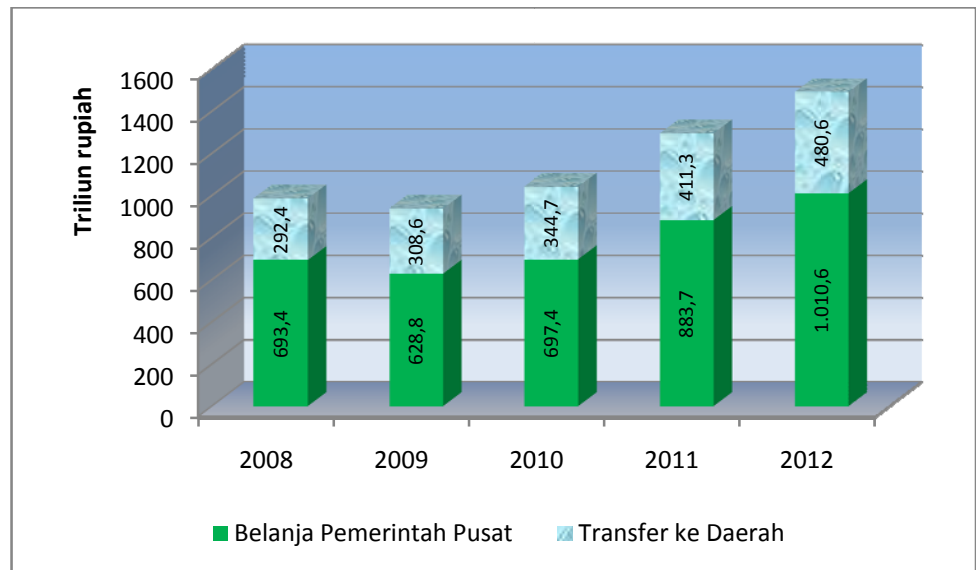
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2012 adalah sebesar Rp1.338.109.629.172.958 atau mencapai 98,52 persen dari target APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.358.205.043.200.000. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp980.518.133.319.319, PNBP sebesar Rp351.804.746.666.862, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp5.786.749.186.777. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (DTP) sebesar Rp3.665.260.413.269 dan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp99.813.751.137 serta dalam Pendapatan Hibah termasuk Pendapatan Hibah non kas (barang dan jasa) sebesar Rp1.645.047.367.798.

Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 mengalami kenaikan Rp127.509.975.813.543 atau 10,53 persen jika dibandingkan dengan TA 2011. Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP sejak TA 2008 terlihat pada Grafik 31.



Grafik 31 Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2008 - 2012

Realisasi Belanja Negara pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.491.410.224.590.994 atau 96,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2012 sebesar Rp1.548.310.378.180.000. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2011 adalah sebesar Rp1.294.999.146.475.024. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp1.010.558.236.531.814, Transfer ke Daerah sebesar Rp480.645.074.235.761, dan terdapat Suspen sebesar Rp206.913.823.419. Suspen tersebut merupakan selisih Belanja Negara menurut catatan Kas Negara dengan Kementerian Negara/Lembaga. Perkembangan realisasi Belanja Negara sejak TA 2008 dapat dilihat pada Grafik 32.



Grafik 32 Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2008 - 2012

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp1.338.109.629.172.958 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp1.491.410.224.590.994, maka Defisit Anggaran pada TA 2012 sebesar Rp153.300.595.418.036.

Sementara itu, realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2012 adalah sebesar Rp175.158.168.320.375, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp198.622.535.177.645 dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp23.464.366.857.270.

Terjadinya Defisit Anggaran dan adanya Realisasi Pembiayaan Neto mengakibatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2012 sebesar Rp21.857.572.902.339.

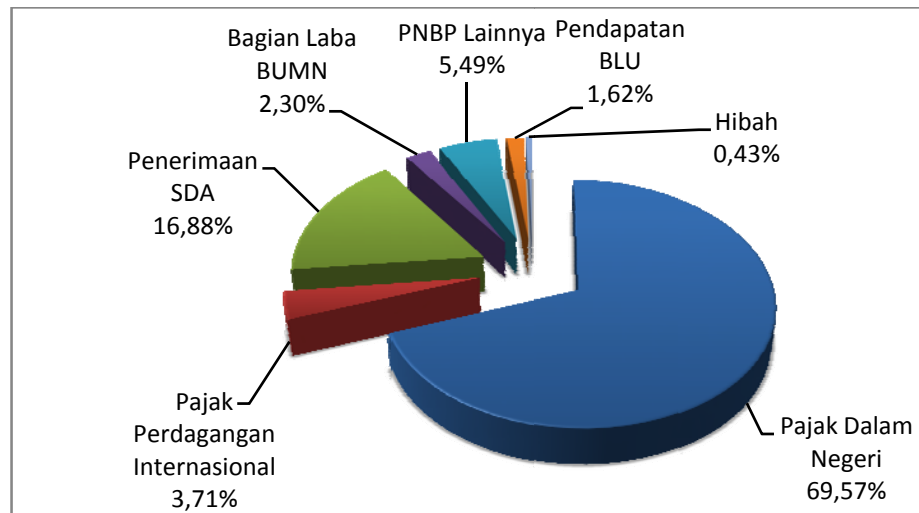
B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Pendapatan Negara dan Hibah Rp1.338,11 triliun

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012 adalah sebesar Rp1.338.109.629.172.958, berarti mencapai 98,52 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.358.205.043.200.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Penerimaan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 33.



Grafik 33 Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2012

*Penerimaan Perpajakan
Rp980,52 triliun*

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2012 adalah sebesar Rp980.518.133.319.319 atau mencapai 96,49 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp1.016.237.341.511.000. Hal ini berarti Penerimaan Perpajakan TA 2012 lebih besar Rp106.644.240.919.938 atau naik 12,20 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri, dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional. Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan tersebut termasuk Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.665.260.413.269, dan Bea Masuk DTP sebesar Rp99.813.751.137.

Perkembangan realisasi penerimaan pajak dan targetnya selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tahun	Penerimaan Perpajakan		Prosentase (%)
	Target	Realisasi	
2008	609.227.490.000.000	658.700.790.664.236	108,12
2009	651.954.823.000.000	619.922.172.626.415	95,09
2010	743.325.906.000.000	723.306.668.621.739	97,31
2011	878.685.216.762.000	873.873.892.399.381	99,45
2012	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.319	96,49
Jumlah	3.899.430.777.273.000	3.856.321.657.631.090	

Salah satu penyebab realisasi penerimaan pajak tahun 2009 – 2012 tidak mencapai target adalah belum efektifnya pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35A Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2008 yang mengharuskan setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi, dan pihak lain memberikan data dan informasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, penyebab penerimaan pajak di TA 2012 tidak mencapai target antara lain terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi di beberapa negara sebagai akibat krisis ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya permintaan komoditas, turunnya harga komoditas dan menurunnya pertumbuhan ekspor yang mempengaruhi pajak sektor industri pengolahan.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

*Penerimaan Pajak Dalam
Negeri Rp930,86 triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp930.861.839.509.438 atau mencapai 96,13 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp968.293.241.511.000. Hal ini berarti realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2012 lebih besar

Rp111.109.413.167.015 atau naik 13,55 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
PPh Migas	83.460.868.001.301	73.095.496.754.938
PPh Nonmigas	377.942.175.058.445	354.683.553.082.514
PPh Fiskal	1.338.076.044	4.026.576.864
PPh Ditanggung Pemerintah	3.665.260.413.269	3.338.636.314.000
PPN dan PPnBM	337.584.577.488.285	277.800.076.679.384
PBB	28.968.862.702.282	29.893.164.324.396
BPHTB	-	(730.151.679)
Cukai	95.027.881.221.457	77.010.010.613.795
Pajak Lainnya	4.210.876.548.355	3.928.192.148.211
Jumlah	930.861.839.509.438	819.752.426.342.423

Dalam realisasi Penerimaan Perpajakan Dalam Negeri tersebut termasuk penerimaan atas Pajak Penghasilan DTP sebesar Rp3.665.260.413.269 dalam bentuk Subsidi.

Pendapatan Pajak Dalam Negeri mengalami kenaikan dibandingkan dengan TA 2011, dikarenakan antara lain adanya kebijakan registrasi ulang PKP, sensus pajak nasional serta kebijakan lainnya yang ditujukan untuk mendorong penerimaan pajak.

Realisasi Pendapatan Cukai TA 2012 mengalami kenaikan karena kenaikan tarif Cukai Hasil Tembakau dan efektifitas pengawasan peredaran Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) melalui pelekatan pita cukai.

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

*Pajak Perdagangan
Internasional Rp49,66
triliun*

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 adalah sebesar Rp49.656.293.809.881, atau mencapai 103,57 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp47.944.100.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 lebih kecil Rp4.465.172.247.077 atau turun 8,25 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Rincian realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Bea Masuk	28.418.359.044.419	25.265.863.309.375
Bea Keluar	21.237.934.765.462	28.855.602.747.583
Jumlah	49.656.293.809.881	54.121.466.056.958

Dalam realisasi Penerimaan Bea Masuk TA 2012, termasuk Penerimaan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DTP) sebesar Rp99.813.751.137.

Penurunan Bea Keluar TA 2012 disebabkan oleh penurunan tarif Bea Keluar dan Harga Patokan Ekspor (HPE) sehingga terjadi pergeseran komoditi ekspor *Crude Palm Oil* (CPO).

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP Rp351,80 triliun

Realisasi PNBP TA 2012 adalah sebesar Rp351.804.746.666.862 mencapai 103,13 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp341.142.610.103.000. Hal ini berarti realisasi PNBP TA 2012 lebih besar Rp20.332.925.568.133 atau naik 6,13 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; (iii) PNBP Lainnya, dan (iv) Pendapatan BLU.

*Penerimaan
SDA Rp225,87 triliun*

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2012 adalah sebesar Rp225.843.973.463.751, atau mencapai 104,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp217.158.876.693.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2012 lebih besar Rp12.020.623.910.924 atau naik 5,62 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.022.468	141.303.493.452.283
Pendapatan Gas Alam	61.106.427.615.761	52.187.085.923.633
Pendapatan Pertambangan Umum	15.877.387.816.604	16.369.789.735.678
Pendapatan Kehutanan	3.188.338.362.520	3.216.476.006.406
Pendapatan Perikanan	215.766.602.000	183.802.161.080
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	738.966.044.398	562.702.273.747
Jumlah	225.843.973.463.751	213.823.349.552.827

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam Daftar 1.

Peningkatan pendapatan minyak bumi pada TA 2012 utamanya disebabkan oleh naiknya harga rata-rata minyak mentah Indonesia, dimana pada tahun 2011 rata-rata harga minyak mentah Indonesia mencapai USD111.55/barrel sementara pada tahun 2012 harganya naik hingga pada level USD112.73/barrel. Pendapatan Gas Bumi juga mengalami kenaikan sebesar 17,09 persen. Kondisi ini antara lain disebabkan karena lebih tingginya rata-rata *Indonesian Crude Price* (ICP) tahun 2012 bila dibandingkan dengan tahun 2011, dimana ICP tersebut mempengaruhi formula harga LNG. Mengingat kontribusi terbesar Pendapatan Gas Bumi berasal dari penerimaan LNG, maka kenaikan ICP tersebut sangat berpengaruh terhadap capaian Pendapatan Gas Bumi.

*Bagian Pemerintah atas
Laba BUMN Rp30,80
triliun*

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2012 adalah sebesar Rp30.797.972.717.670 atau mencapai 100,07 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp30.776.336.250.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2012 lebih besar Rp2.613.999.591.070 atau naik 9,27 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011.

Realisasi Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Laba BUMN Perbankan	4.070.293.177.055	3.627.944.571.970
Pendapatan Laba BUMN Non Perbankan	26.727.679.540.615	24.556.028.554.630
Jumlah	30.797.972.717.670	28.183.973.126.600

Dari realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2012 tersebut, sebesar 78,81 persen berasal dari 10 BUMN terbesar, yaitu:

	Nama BUMN	Jumlah (Rp)
1	PT Pertamina	7.257.043.000.000
2	PT Telkom	3.832.434.555.606
3	PT PLN	3.500.000.000.000
4	PT Pupuk Indonesia	2.042.313.500.701
5	PT Bank Rakyat Indonesia	1.711.944.248.000
6	PT Perusahaan Gas Negara	1.708.868.546.055
7	PT Bank Mandiri	1.469.525.260.000
8	PT Tambang Batubara Bukit Asam Tbk	1.049.380.332.000
9	PT Semen Gresik	1.001.076.591.340
10	PT Bank Negara Indonesia	699.100.833.310
Total 10 BUMN		24.271.686.867.012

PNBP Lainnya Rp73,46 triliun

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP Lainnya TA 2012 adalah sebesar Rp73.458.504.524.407 atau 100,90 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp72.799.374.473.000. Hal ini berarti realisasi PNBP Lainnya TA 2012 lebih besar Rp4.098.001.691.875 atau naik 5,91 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Penjualan dan Sewa	23.253.375.898.356	21.650.214.589.444
Pendapatan Jasa	26.207.952.723.749	26.634.516.584.922
Pendapatan Bunga	11.667.960.412.611	4.893.238.511.754
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	251.243.211.606	240.761.503.805
Pendapatan Pendidikan	2.375.603.736.186	2.965.915.235.801
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	158.144.829.032	92.848.578.390
Pendapatan Iuran dan Denda	1.459.529.823.727	1.319.106.624.583
Pendapatan Lain-lain	8.084.693.889.140	11.563.901.203.833
Jumlah	73.458.504.524.407	69.360.502.832.532

Pendapatan lain-lain dari penerimaan bukan pajak lainnya berasal dari pendapatan penerimaan kembali belanja Tahun Anggaran yang lalu sebesar Rp4.661.015.950.737, pendapatan pelunasan piutang sebesar Rp54.165.965.036, pendapatan dari penutupan rekening sebesar Rp56.455.641.949, pendapatan dari selisih kurs sebesar Rp2.091.891.225.681 serta pendapatan lain-lain sebesar Rp1.221.165.105.737.

Pendapatan BLU Rp21,70 triliun

B.2.1.2.4. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU)

Realisasi Pendapatan BLU TA 2012 adalah sebesar Rp21.704.295.961.034 atau 106,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp20.408.022.687.000. Hal ini berarti realisasi Pendapatan BLU TA 2012 lebih besar Rp1.600.300.374.263 atau naik 7,96 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi Pendapatan BLU terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Jasa Layanan Umum:		
Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa kepada Masyarakat	17.237.212.849.937	17.215.810.979.582
Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	742.623.094.171	102.760.116.486
Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	1.492.015.834.729	503.261.094.628
Total Pendapatan Jasa Layanan Umum	19.471.851.778.837	17.821.832.190.696
Pendapatan Hibah BLU	83.863.755.868	167.462.819.227
Pendapatan Hasil Kerjasama BLU	1.081.392.058.923	647.563.491.201
Pendapatan BLU Lainnya	1.067.188.367.406	1.467.137.085.647
Jumlah	21.704.295.961.034	20.103.995.586.771

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah Rp5,79 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2012 adalah sebesar Rp5.786.749.186.777 atau 701,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp825.091.586.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2012 lebih besar Rp532.809.325.473 atau naik 10,14 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011.

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2012 termasuk realisasi Pendapatan Hibah Non Kas (barang dan jasa) sebesar Rp1.645.047.367.798. Pendapatan Hibah Non Kas tersebut dicatat dengan jumlah yang sama pada sisi belanja. Pendapatan Hibah Non Kas tidak dicatat pada Laporan Arus Kas.

Pada TA 2012, masih terdapat Pendapatan Hibah Langsung pada beberapa K/L yang belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN. Hal ini terjadi dikarenakan K/L tidak mematuhi ketentuan pengelolaan hibah sesuai dengan PMK 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah.

Rincian lebih lanjut Penerimaan Hibah dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.2. Belanja Negara

*Belanja Negara
Rp1.491,41 triliun*

Realisasi Belanja Negara TA 2012 adalah sebesar Rp1.491.410.224.590.994 atau 96,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.548.310.378.180.000. Belanja Negara TA 2012 lebih besar Rp196.411.078.115.970 atau naik 15,17 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2011. Realisasi Belanja Negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer ke Daerah.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

*Belanja Pemerintah
Pusat Rp1.010,56 triliun*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 adalah sebesar Rp1.010.558.236.531.814 atau 94,49 persen dari APBN-P sebesar Rp1.069.534.444.947.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 lebih besar Rp126.836.350.335.295 atau 14,35 persen dari Realisasi TA 2011.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) klasifikasi, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja (Ekonomi).

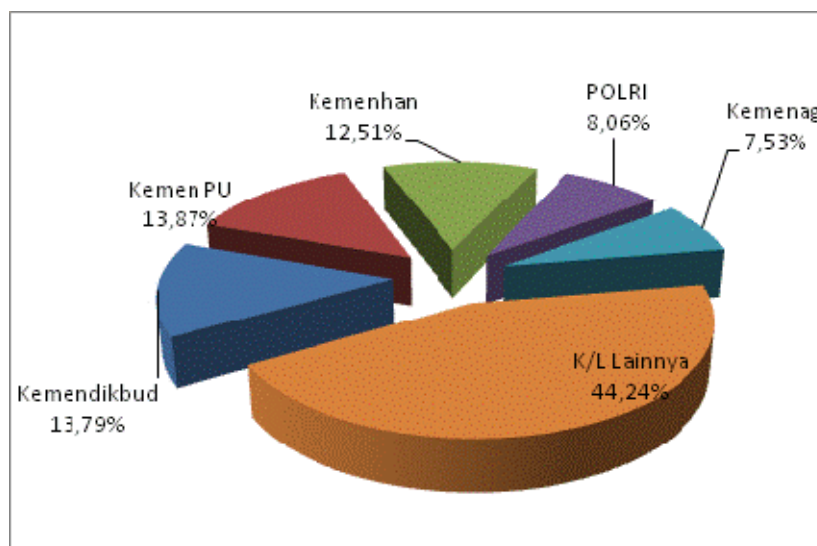
Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

*Belanja Pemerintah Pusat
menurut Organisasi/BA*

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 999 (Bendahara Umum Negara) sebesar Rp520.491.471.144.915 atau 51,51 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat.

Sementara itu, total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2012 pada K/L (selain BA BUN) adalah sebesar Rp490.066.765.386.899. Dari total realisasi belanja tersebut, realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp67.585.415.013.820 atau 13,79 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 999 (Bendahara Umum Negara) pada TA 2012 dapat dilihat pada Grafik 34.



Grafik 34 Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2012

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat diklasifikasikan berdasarkan fungsi. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi terbagi dalam 11 (sebelas) fungsi, yaitu fungsi pelayanan umum, fungsi pertahanan, fungsi ketertiban dan keamanan, fungsi ekonomi, fungsi lingkungan hidup, fungsi perumahan dan fasilitas umum, fungsi kesehatan, fungsi pariwisata dan budaya, fungsi agama, fungsi pendidikan, dan fungsi perlindungan sosial.

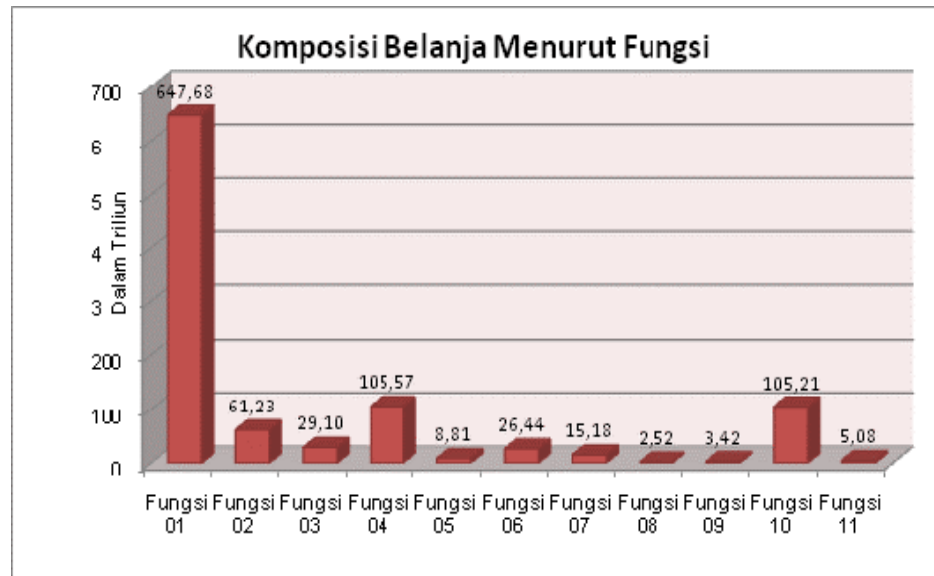
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per fungsi pada TA 2012 dan 2011 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 12.

**Tabel 13 Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2012 dan TA 2011**

(dalam rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
01	Pelayanan Umum	647.679.133.687.265	508.945.453.627.554
02	Pertahanan	61.226.856.461.850	51.120.989.252.897
03	Ketertiban dan Keamanan	29.096.481.226.224	21.691.237.865.477
04	Ekonomi	105.574.547.152.010	87.246.161.514.834
05	Lingkungan Hidup	8.814.131.853.162	8.615.095.671.607
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	26.440.889.955.614	22.937.807.929.477
07	Kesehatan	15.181.702.690.994	14.088.769.256.193
08	Pariwisata dan Budaya	2.516.325.963.996	3.553.453.017.287
09	Agama	3.419.676.039.247	1.424.732.819.450
10	Pendidikan	105.207.547.524.813	97.854.046.904.341
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	5.081.514.261.077	3.906.376.361.526
00	Tidak ada fungsi	319.429.715.562	62.337.761.975.876
	Total	1.010.558.236.531.814	883.721.886.196.519

Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2012 dapat terlihat pada Grafik 35.



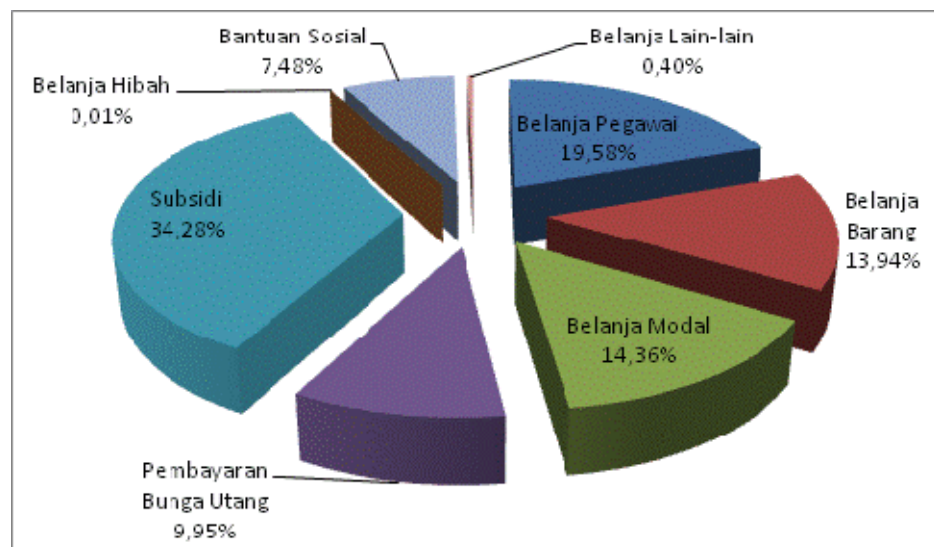
Grafik 35 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2012

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dapat dilihat dalam Daftar 2.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis Belanja

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 36.

*Belanja Pemerintah
Pusat menurut Jenis
Belanja*



Grafik 36 Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja TA 2012

*Belanja Pegawai
Rp197,86 triliun*

B.2.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2012 adalah sebesar Rp197.863.565.816.235 yang berarti 92,91 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp212.971.607.708.622. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2012 lebih besar Rp22.125.647.397.220 atau naik 12,59 persen dari realisasi TA 2011. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	55.882.007.708.730	49.445.102.508.675
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/POLRI	44.483.930.328.017	40.263.378.647.670
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	719.204.490.870	819.043.606.833
Belanja Gaji Dokter PTT	822.268.259.230	771.007.436.015
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	263.852.761.938	248.850.447.822
Belanja Honorarium	1.388.430.803.700	1.369.522.161.066
Belanja Lembur	652.210.581.779	501.542.768.155
Belanja Vakasi	231.246.787.842	217.880.587.087
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	23.491.693.093.887	20.337.994.683.749
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	67.282.448.603.246	59.472.181.551.185
Belanja Asuransi Kesehatan	2.482.037.544.996	2.141.251.233.920
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	164.234.852.000	150.576.864.996
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	-	(374.730.220)
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dep. Hub. Pada PT KAI	-	(39.347.938)
Jumlah	197.863.565.816.235	175.737.918.419.015

Belanja Barang Rp140,88 triliun

B.2.2.1.2. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2012 adalah sebesar Rp140.884.875.397.761 yang berarti 88,04 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp160.031.270.543.988. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2012 lebih besar Rp16.245.395.895.457 atau naik 13,03 persen dari Realisasi TA 2011. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Barang Operasional	24.071.839.666.586	21.729.366.193.581
Belanja Barang Non Operasional	43.962.828.987.692	42.942.839.212.826
Belanja Jasa Untuk Pencatatan Jasa dari Hibah	855.186.352.250	-
Belanja Barang Penunjang Kegiatan DK/TP *)	-	82.251.235.675
Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan*)	-	2.054.644.291.841
Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah	26.778.115.731	2.167.190.771
Belanja Jasa	17.697.456.305.673	16.360.913.536.031
Belanja Pemeliharaan	10.964.292.083.598	9.284.590.642.833
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	17.862.360.165.289	17.919.945.204.322
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.831.343.630.403	1.719.352.848.549
Belanja Barang BLU	15.548.283.729.110	12.543.409.145.875
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda	6.747.090.396.287	-
Belanja Barang Penunjang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan	246.266.412.038	-
Belanja Barang Lainnya Untuk Diserahkan Pada Masyarakat atau Pemda	1.071.149.553.104	-
Jumlah	140.884.875.397.761	124.639.479.502.304

*) Belanja Barang Fisik Lain Tugas Pembantuan dan Belanja Barang Pencatatan Persediaan Hibah pada tahun 2012 disajikan pada Belanja Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat atau Pemda.

Belanja Barang BLU sebesar Rp15.548.283.729.110 terdiri dari:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan	5.837.763.744.726	4.336.578.718.401
Belanja Barang	5.212.176.260.326	4.590.288.645.438
Belanja Jasa	1.679.228.854.277	1.498.345.274.987
Belanja Pemeliharaan	518.994.766.653	421.634.028.720
Belanja Perjalanan	503.406.694.730	346.829.623.278
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	1.796.713.408.398	1.349.732.855.051
Jumlah	15.548.283.729.110	12.543.409.145.875

Belanja gaji dan tunjangan yang didanai dari pendapatan BLU, sesuai ketentuan belanja tersebut dimasukkan sebagai Belanja Barang.

Pada TA 2012, terdapat Belanja Barang yang dianggarkan dalam Belanja Modal dan sebaliknya, Belanja Modal yang dianggarkan dalam Belanja Barang. Kondisi ini dikarenakan K/L tidak cermat dalam penyusunan RKA K/L dan dokumen pelaksanaan anggaran. Dalam hal Belanja Barang menghasilkan Aset Tetap, Aset Tetap tersebut dilaporkan pada Neraca dan Laporan BMN.

B.2.2.1.3. Belanja Modal

Belanja Modal Rp145,10 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2012 adalah sebesar Rp145.104.148.492.853 berarti 79,46 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp182.621.948.581.508. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2012 lebih besar Rp27.249.616.421.521 atau naik 23,12 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Modal Tanah	3.621.341.327.511	3.488.566.777.978
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.489.836.812.569	38.946.011.361.882
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.549.767.573.166	20.705.816.487.069
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	72.322.551.241.233	49.586.433.921.962
Belanja Modal Fisik Lainnya	4.011.444.117.446	3.342.382.032.693
Belanja Modal BLU	2.103.005.518.752	1.785.321.489.748
Belanja Dana Bergulir	6.201.902.176	-
Jumlah	145.104.148.492.853	117.854.532.071.332

Belanja Modal BLU terdiri dari (Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Modal Tanah	150.719.912.664	60.615.528.743
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	848.275.218.082	802.897.438.638
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	830.813.852.516	707.869.155.393
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	43.048.248.487	32.102.737.074
Belanja Modal Fisik Lainnya	230.148.287.003	181.836.629.900
Jumlah	2.103.005.518.752	1.785.321.489.748

B.2.2.1.4. Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp100,52 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 adalah sebesar Rp100.515.994.274.844 yang berarti 85,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp117.785.423.800.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2012 lebih besar Rp7.254.074.463.958 atau naik 7,78 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2012 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN – Jangka Panjang	60.781.137.150.467	57.210.627.839.839
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN – Jangka Panjang	28.911.498.253.076	25.547.248.269.356
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN DN	6.297.744.208.100	4.768.589.586.200
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN LN	930.763.140.850	514.676.089.450
Belanja Pembayaran Discount SUN DN	1.456.999.522.900	3.236.157.597.300
Belanja Pembayaran Discount SUN LN	449.948.400.000	373.905.900.000
Belanja Pembayaran <i>Loss on Bond Redemption</i> atas Pembelian Kembali Obligasi Negara DN	158.467.625.000	310.612.680.000
Belanja Pembayaran Discount Imbalan SBSN DN	913.801.227.200	51.466.619.000
Belanja Pembayaran Denda (Imbalan Bunga Pajak)	615.634.747.251	1.247.399.871.387
Belanja Pembayaran Biaya Penerimaan Hibah		1.235.358.354
Jumlah	100.515.994.274.844	93.261.919.810.886

B.2.2.1.5. Subsidi

Subsidi Rp346,42 triliun

Realisasi Subsidi TA 2012 adalah sebesar Rp346.420.404.182.332 yang berarti 141,35 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp245.076.318.862.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2012 ini lebih besar Rp51.062.174.546.008 atau naik 17,29 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Subsidi Premium	107.245.394.379.018	79.782.409.098.742
Subsidi Minyak Solar	64.671.963.110.933	53.345.090.871.434
Subsidi Minyak Tanah	7.129.123.174.256	9.441.089.427.448
Subsidi Elpiji	32.849.226.819.432	22.592.749.583.351
Subsidi Pangan	19.117.023.857.614	16.539.282.621.000
Subsidi Listrik	94.583.027.782.554	90.447.485.461.331
Subsidi Benih	60.261.413.488	96.913.542.095
Subsidi Pupuk	13.958.483.702.000	16.344.587.997.389
Belanja Subsidi PPh	3.663.360.000.000	3.338.636.314.000
Belanja Subsidi BM	99.813.751.137	73.117.396.000
Belanja Subsidi PT KAI	680.157.912.253	630.870.912.779
Belanja Subsidi PT PELNI	897.631.980.000	872.752.505.000
Subsidi PT Pos dan Giro	272.465.000.000	256.944.900.000
Belanja Subsidi dalam rangka PSO Lainnya	82.095.280.087	73.359.751.500
Subsidi Bunga KPR	-	611.843.137.443
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	196.083.320.374	179.386.459.289
Subsidi Bunga Kredit Program Eks KLB	7.280.924.101	10.070.776.218
Subsidi Bunga Kredit Biofuel (KPEN-RP)	76.986.565.900	74.504.074.566
Belanja Subsidi Bunga Kredit Program Lainnya	97.100.045	-
Belanja Subsidi Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR)	801.125.000.000	624.165.242.603
Subsidi Bunga Pengusaha NAD dan Nias	1.393.147.033	2.760.047.151
Belanja Subsidi Kredit Sektor Peternakan	26.980.152.536	20.080.545.778
Belanja Subsidi Kredit Resi Gudang	429.809.571	128.971.207
Jumlah	346.420.404.182.332	295.358.229.636.324

Terlampauinya realisasi Belanja Subsidi dalam APBN-P dapat terjadi sesuai dengan Pasal 15 UU Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, yang menyatakan bahwa Belanja Subsidi dapat disesuaikan dengan kebutuhan realisasi pada tahun anggaran berjalan untuk mengantisipasi deviasi realisasi asumsi ekonomi makro dan perubahan parameter subsidi, berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Di dalam realisasi pembayaran subsidi listrik tahun 2012 sebesar Rp94.583.027.782.554 sudah termasuk pula pembayaran kekurangan subsidi listrik tahun 2010 sebesar Rp4.506.797.782.554.

Pagu subsidi Listrik pada Pasal 8 UU Nomor 4 Tahun 2012 ditetapkan sebesar Rp64.973.400.000.000, dan Cadangan Energi sebesar Rp23.000.000.000.000, sedangkan

Pagu Subsidi Listrik pada DIPA Nomor : 0145/999-07.1.03/00/2012 tanggal 31 Januari 2012 sebesar Rp94.583.030.000.000 sehingga DIPA Subsidi Listrik TA 2012 lebih tinggi sebesar Rp6.609.630.000.000. Perhitungan jumlah Subsidi Listrik tahun 2012 yang diusulkan oleh Pemerintah sebesar Rp93.052,66 miliar tersebut, didasarkan pada asumsi dan parameter Subsidi Listrik sebagai berikut :

No	parameter	APBN 2012	APBNP 2012	Selisih
1	ICP (US\$/bbl)	90.00	105.00	15.00
2	Kurs (Rp/US\$)	8.800	9.000	200
3	TTL	10%	3%/tw	0%
4	<i>Growth Sales (%)</i>	9.00	9.00	-
	<i>Energy Sales (TW/H)</i>	173.77	170.30	(3.47)
5	<i>Losses (%)</i>	8.50	8.50	-
6	<i>Fuel Mix</i>			
	- HSD (juta/kl)	2.30	5.72	3.42
	- MFO (juta/kl)	1.36	1.72	0.36
	- IDO (juta/kl)	-	0.02	0.02
	- Batubara (juta ton)	48.1	39.4	(8.7)
	- Gas (juta BBTU)	0.37	0.35	(0.02)
	- Panas Bumi (TW H)	3.40	3.47	0.07
	- Bio Diesel (juta KL)	0.24	0.01	(0.24)
7	Margin (%)	7	7	-
	Subsidi Tahun Berjalan (miliar RP)	40.453,40	89.545,86	49,092.46
	Kurang bayar 2010 (<i>audited</i>)	4.506,8	4.506,8	0.0
	Kekurangan 2011 (<i>unaudited</i>)	4.500,0	3.500,0	(1.000,0)
	<i>Carryover</i> 2012 ke 2013	(4.500,0)	(4.500,0)	-
	Total Subsidi (miliar Rp)	44.960,20	93.052,66	48.092,47

Kenaikan realisasi belanja subsidi jenis premium, minyak solar dan subsidi LPG disebabkan oleh:

- a. Kenaikan rata-rata realisasi harga indeks pasar BBM *Mean of Platts Singapore* (MOPS) tahun 2012 yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dengan rincian.

(dalam US\$/bbl)

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Premium	118,13	114,53	3,60
Minyak Solar	126,21	122,72	3,49

- b. Realisasi volume jenis premium dan minyak solar serta LPG tabung 3 Kg yang lebih tinggi dibandingkan tahun 2011 dengan rincian.

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Premium (ribu KL)	27.341	25.523	1.818
Minyak Solar (ribu KL)	14.840	14.538	302
LPG Tabung 3 Kg (jutaKg)	3.690	3.258	432

- c. Realisasi nilai tukar tahun 2012 yang digunakan dalam perhitungan subsidi (rata-rata kurs beli Bank Indonesia) mengalami pelemahan dibandingkan tahun 2011, dengan rincian:

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Nilai Tukar (kurs beli BI)	9.337	8.732	(605)

Sementara itu, realisasi subsidi BBM jenis minyak tanah Tahun 2012 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2011 terutama disebabkan penurunan realisasi volume konsumsi

minyak tanah.

Uraian	TA 2012	TA 2011	Naik/(Turun)
Minyak Tanah (ribu KL)	1.152	1.696	(544)

Dalam realisasi subsidi TA 2012 terdapat pembayaran beberapa jenis subsidi yang dananya belum tersalurkan sampai dengan akhir TA 2012, dan ditempatkan pada rekening dana cadangan subsidi/PSO sebesar Rp3.333.841.884.281. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena dokumen penagihan dari pihak penerima subsidi belum selesai diverifikasi. Setelah verifikasi selesai, maka dana cadangan subsidi tersebut akan dibayarkan kepada penerima. Rincian penempatan dana atas realisasi subsidi TA 2012 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Subsidi Premium	3.252.194.040
Subsidi LPG	1.558.786.147.699
Subsidi Pupuk	1.099.268.374.258
Subsidi Benih	32.779.806.860
Subsidi PT Pos Indonesia	61.662.500.000
Subsidi PT PELNI	197.631.980.000
Subsidi PT KAI	192.532.247.000
Subsidi Pangan	187.928.634.424
Jumlah	3.333.841.884.281

Terkait dengan Imbalan Jasa Penjamin Kredit Usaha Rakyat (KUR), Subsidi tersebut digunakan untuk meningkatkan kemampuan Usaha Mikro, Kecil Menengah (UMKM) dalam permodalan, maka Pemerintah membuat program Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah kredit/pembiayaan kepada UMKM yang bersumber dari dana perbankan dengan persyaratan ringan dan terjangkau serta didukung fasilitas penjaminan dari Pemerintah melalui perusahaan penjamin. UMKM atau calon debitur yang dapat memperoleh KUR adalah calon debitur yang memiliki usaha produktif yang feasible namun belum bankable dalam dan digunakan untuk keperluan modal kerja dan/atau investasi.

Skema KUR melibatkan tiga pihak yaitu Pemerintah, Bank Pelaksana dan perusahaan penjamin, yang terikat dalam satu nota kesepahaman (MoU). Perbankan memiliki peran memberikan KUR kepada debitur sasaran yang secara otomatis dijamin oleh perusahaan penjamin. Premi atas penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penjamin dibayar oleh pemerintah sebagai subsidi Kredit Program.

Sejak tahun 2010, target penyaluran KUR oleh perbankan ditetapkan oleh ketiga pihak tersebut secara bersama sebesar Rp20 triliun pertahun. Mengingat bahwa KUR adalah kredit program pemerintah maka agar tidak menimbulkan kerugian dan untuk memenuhi kecukupan modal bagi perusahaan penjamin, pemerintah harus menambah penyertaan modal kepada perusahaan penjamin tersebut. Besarnya penyertaan modal oleh pemerintah ditentukan oleh target KUR yang akan dicapai dan rasio penjaminan yang ditentukan (*gearing ratio*).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka total pengeluaran Pemerintah pada program pemberdayaan UMKM melalui KUR adalah:

1. Imbal jasa penjaminan (IJP) yang dibayarkan pemerintah sebagai subsidi kepada debitur KUR dalam bentuk premi atas usaha penjaminan kredit yang dilakukan oleh perusahaan penjamin.
2. Penyertaan modal negara (PMN) yang dibayarkan pemerintah sebagai pengeluaran investasi dalam rangka memenuhi kecukupan modal di perusahaan penjamin, sehingga mereka dapat melakukan penjaminan sebesar kredit yang ditargetkan tersalur kepada UMKM melalui KUR.

Belanja Hibah Rp75,08 miliar

B.2.2.1.6. Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp75.079.293.554 yang berarti 4,19 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp1.790.936.805.000. Realisasi belanja Hibah tersebut terdiri dari:

Proyek/Kegiatan	Jumlah (Rp)
Local Basic Education Capacity (L-BEC)	42.004.416.316
Water and Sanitation Program, Sun Program D-Sanitation City Pilot Projects (Wasap-D)	9.634.198.250
Investment Enhancement Grant (IEG)	5.365.305.713
Mass Rapid Transit (MRT)	3.490.518.501
Water Resource and Irrigation Sector Management Projects (WISMP)	14.584.854.774
Jumlah	75.079.293.554

Belanja hibah tersebut merupakan belanja yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan yang merupakan penerusan hibah dari luar negeri kepada Pemerintah Daerah maupun dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Rendahnya realisasi belanja hibah dikarenakan tidak terlaksananya proyek *Mass Rapid Transportation* (MRT). Dari total alokasi dana MRT yang disediakan sebesar Rp1.570.577.681.000 hanya terealisasi sebesar Rp3.490.518.501 (0,22%).

Belanja Bantuan Sosial Rp75,62 triliun

B.2.2.1.7. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2012 adalah sebesar Rp75.621.057.138.995 yang berarti 93,69 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp80.716.444.343.429. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2012 lebih besar Rp4.516.728.976.648 atau naik 6,35 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian realisasi Belanja Bantuan Sosial adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Belanja Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	460.848.354.684	-
Belanja Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	-	6.246.014.999.528
Belanja Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	24.659.995.333.311	-
Belanja Bantuan Langsung (<i>Block Grant</i>) Sekolah/Lembaga/Guru	-	32.091.722.341.802
Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	35.772.640.725.904	-
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	-	3.729.510.000
Belanja Bantuan Sosial untuk Perlindungan Sosial	1.992.433.852.977	-
Belanja Bantuan Beasiswa	-	4.685.060.980.695
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.685.370.018.093	-
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	-	146.690.983.500
Belanja Bantuan Sosial untuk Penanggulangan Bencana	1.049.768.854.026	-
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	-	27.931.109.346.822
Jumlah	75.621.057.138.995	71.104.328.162.347

Perubahan rincian Belanja Bantuan Sosial pada tahun 2012 terjadi karena perubahan akun terkait dengan Belanja Bantuan Sosial.

Pada tahun 2012, terdapat Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang digunakan untuk rehabilitasi gedung sekolah dan sarana prasarana sekolah lainnya untuk SD dan SMP sebesar Rp9.608.449.732.468 dalam bentuk tunai. Adapun pertimbangan rehabilitasi gedung sekolah dan sarana prasarana sekolah tersebut dimasukkan dalam belanja Bantuan Sosial adalah:

- Terdapat puluhan ribu sekolah yang berstatus negeri maupun swasta yang kondisinya rusak termasuk sekolah di daerah perbatasan yang harus segera dilakukan rehabilitasi gedung dan penyediaan sarana-prasarana agar kegiatan belajar-mengajar dapat dilaksanakan dengan baik.
- Rehabilitasi dan penyediaan sarana-prasarana sekolah tersebut dilaksanakan oleh sekolah atau komite sekolah secara swakelola dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas pendidikan.

B.2.2.1.8. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp4,07 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2012 adalah sebesar Rp4.073.111.935.240 atau 5,94 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp68.540.494.302.453. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2012 lebih kecil Rp1.392.257.860.718 atau turun 25,47 persen dari Realisasi TA 2011. Rincian Belanja Lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Belanja Cadangan Beras Pemerintah	2.000.000.000.000	-
Belanja Cadangan Benih Nasional	342.764.387.131	-
Belanja Selisih Harga Beras Bulog	18.255.217.000	-
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	5.218.952.593	-
Belanja Penugasan PT SMI	43.490.221.465	-
Belanja Kerjasama Teknis Internasional	-	13.893.595.128
Belanja Cadangan tunjangan beras PNS/TNI/Polri	-	9.778.482.000
Belanja Non Modal-Otorita Batam	-	557.785.893
Belanja Karena Rugi Selisih Kurs	282.390.817.867	360.991.025.539
Jasa Perbendaharaan	199.994.423.436	199.847.380.770
Belanja TVRI	-	685.547.340.402
Belanja RRI	-	677.104.143.519
Dana Cadangan Risiko Kenaikan Harga Tanah (<i>Land Capping</i>)	310.062.000.000	406.145.000.000
Belanja Lain-lain BUN Lainnya	44.748.296.369	-
Belanja Lain-lain	826.187.619.379	3.111.505.042.707
Jumlah	4.073.111.935.240	5.465.369.795.958

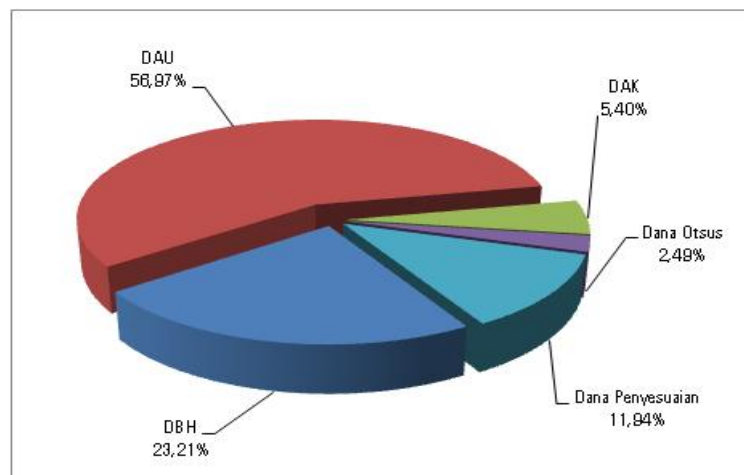
Kecilnya realisasi Belanja Lain-lain pada TA 2012 dibandingkan dengan APBN-P dikarenakan adanya realokasi anggaran belanja lain-lain ke anggaran K/L sesuai dengan *nature of transaction*-nya.

B.2.2.2. Transfer ke Daerah

Transfer ke Daerah Rp480,65 triliun

Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012 adalah sebesar Rp480.645.074.235.761 yang berarti 100,39 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp478.775.933.233.000. Hal ini berarti Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012 ini lebih besar Rp69.320.309.603.971 atau naik 16,85 persen dari Realisasi TA 2011. Transfer ke Daerah terdiri dari (i) Dana Perimbangan, dan (ii) Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

Komposisi realisasi Transfer untuk Daerah TA 2012 disajikan pada Grafik 37.



Grafik 37 Komposisi Realisasi Transfer ke Daerah TA 2012

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

*Dana Perimbangan
Rp411,29 triliun*

Realisasi Dana Perimbangan TA 2012 adalah sebesar Rp411.293.124.979.761 atau 100,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp408.352.055.705.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2012 ini lebih besar Rp64.046.911.025.445 atau naik 18,44 persen dari realisasi TA 2011. Dana Perimbangan terdiri dari *(i)* Dana Bagi Hasil (DBH), *(ii)* Dana Alokasi Umum (DAU), dan *(iii)* Dana Alokasi Khusus (DAK).

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

DBH Rp111,54 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2012 adalah sebesar Rp111.537.202.920.761 atau 102,87 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp108.421.669.502.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2012 ini lebih besar Rp14.628.210.939.445 atau naik 15,09 persen dari realisasi TA 2011. Terlampauinya realisasi DBH dari anggarannya tersebut disebabkan oleh kenaikan pendapatan yang dibagihasilkan yang melampaui anggarannya. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Pajak sebesar Rp47.214.136.030.788, Dana Bagi Hasil Cukai sebesar Rp1.722.781.272.658 dan Dana Bagi Hasil SDA sebesar Rp62.600.285.617.315.

Rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dapat dilihat sebagaimana tabel di bawah ini:

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
DBH Pajak		
DBH Pajak Penghasilan Perorangan	19.378.280.456.694	13.237.326.489.261
DBH Pajak Bumi dan Bangunan	27.597.042.553.038	28.281.482.553.025
DBH Biaya Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	238.813.021.056	6.747.876.892
Jumlah DBH Pajak	47.214.136.030.788	41.525.556.919.178
DBH Cukai	1.722.781.272.658	1.408.448.764.184
DBH SDA		
DBH SDA Minyak Bumi	26.165.822.138.467	20.634.080.735.284
DBH SDA Gas Bumi	21.231.675.084.265	16.672.249.758.993
DBH SDA Pertambangan Umum	12.860.854.426.197	14.498.126.522.475
DBH SDA Pertambangan Panas Bumi	626.278.978.409	519.987.115.194
DBH SDA Kehutanan	1.535.890.432.615	1.512.465.063.891
DBH SDA Perikanan	179.764.557.362	138.077.102.117
Jumlah DBH SDA	62.600.285.617.315	53.974.986.297.954
Total DBH	111.537.202.920.761	96.908.991.981.316

Dalam realisasi DBH SDA sebesar Rp62.600.285.617.315, terdapat Rp13.429.204.255.033 yang sampai dengan akhir TA 2012 dananya masih tersimpan pada rekening dana cadangan (*escrow account*), karena masih menunggu identifikasi daerah penerima. Penempatan dana cadangan tersebut dilakukan karena masih dilakukan rekonsiliasi dan verifikasi daerah penerima oleh DJPK, pemerintah daerah, dan pihak/kementerian terkait. Setelah rekonsiliasi/verifikasi selesai, maka dana cadangan DBH tersebut akan dibayarkan kepada pemerintah daerah.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

DAU Rp273,81 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2012 adalah sebesar Rp273.814.438.203.000 atau 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp273.814.438.203.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2012 ini lebih besar Rp48.280.726.155.000 atau naik 21,41 persen

dari realisasi TA 2011.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

DAK Rp25,94 triliun

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2012 adalah sebesar Rp25.941.483.856.000, atau 99,33 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp26.115.948.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2012 ini lebih besar Rp1.137.973.931.000 atau naik 4,59 persen dari realisasi TA 2011.

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah, dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu adalah daerah yang memperoleh alokasi DAK berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Pada TA 2012, DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional pada 19 bidang sebagaimana ditetapkan melalui PMK Nomor: 209/PMK.07/2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi DAK TA 2012.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian Rp69,35 triliun

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2012 adalah sebesar Rp69.351.949.256.000 atau 98,48 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp70.423.877.528.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2012 ini lebih besar Rp5.273.398.578.526 atau naik 8,23 persen dari realisasi TA 2011. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari (i) Dana Otonomi Khusus, dan (ii) Dana Penyesuaian.

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Daftar 3

Dana Otonomi Khusus Rp11,95 triliun

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi Dana Otonomi Khusus (Otsus) TA 2012 adalah sebesar Rp11.952.577.528.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp11.952.577.528.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2012 ini lebih besar Rp1.531.264.535.000 atau naik 14,69 persen dari realisasi TA 2011.

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Transfer Dana Otsus Untuk Propinsi Aceh	5.476.288.764.000	4.510.656.496.500
Transfer Dana Otonomi Khusus Untuk Papua	3.833.402.135.000	3.957.459.547.550
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua	571.428.571.000	-
Transfer Dana Otonomi Khusus untuk Papua Barat	1.642.886.629.000	1.953.196.948.950
Transfer Dana Tambahan Infrastruktur Papua Barat	428.571.429.000	-
Jumlah	11.952.577.528.000	10.421.312.993.000

Dana Penyesuaian Rp57,40 triliun

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2012 adalah sebesar Rp57.399.371.728.000, yang berarti 98,17 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp58.471.300.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2012 ini lebih besar Rp3.742.134.043.526 atau naik 6,97 persen dari realisasi TA 2011. Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan membantu

mendukung percepatan pembangunan di daerah. Dana Penyesuaian TA 2012 terdiri dari:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Dana Penyesuaian Lainnya	-	78.907.877.152
Dana untuk Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah	2.883.278.000.000	3.678.526.736.060
Dana Insentif Daerah (DID)	1.387.800.000.000	1.387.800.000.000
Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	30.557.995.724.250	18.510.236.637.649
Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	22.540.298.003.750	16.329.888.218.250
Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah	-	7.535.043.988.000
Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)	30.000.000.000	-
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah	-	6.136.838.227.363
Jumlah	57.399.371.728.000	53.657.241.684.474

B.2.2.3. Suspen

Suspen Rp206,91 miliar

Suspen merupakan perkiraan (akun) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Jumlah suspen belanja TA 2012 adalah sebesar Rp206.913.823.419, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga *)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat			
Belanja Pegawai	197.859.657.528.774	197.863.565.816.235	(3.908.287.461)
Belanja Barang	140.020.870.803.375	140.002.910.929.780	17.959.873.595
Belanja Modal	144.552.713.306.838	144.341.065.593.036	211.647.713.802
Pembayaran Bunga Utang	100.515.994.274.160	100.515.994.274.844	(684)
Subsidi	346.420.404.182.332	346.420.404.182.332	-
Belanja Hibah	75.079.945.754	75.079.293.554	652.200
Belanja Bantuan Sosial	75.602.528.863.964	75.621.057.138.995	(18.528.275.031)
Belanja Lain-lain	4.072.855.812.156	4.073.111.935.240	(256.123.084)
Total	1.009.120.104.717.353	1.008.913.189.164.016	206.915.553.337
Transfer ke Daerah			
Dana Bagi Hasil	111.537.202.920.761	111.537.202.920.761	-
Dana Alokasi Umum	273.814.438.203.000	273.814.438.203.000	-
Dana Alokasi Khusus	25.941.483.856.000	25.941.483.856.000	-
Dana Otonomi Khusus	11.952.577.528.000	11.952.577.528.000	-
Dana Penyesuaian	57.399.369.998.082	57.399.371.728.000	(1.729.918)
Total	480.645.072.505.843	480.645.074.235.761	(1.729.918)
Suspen			206.913.823.419

*) Data K/L tidak termasuk Pendapatan dan Belanja terkait dengan Pendapatan Hibah Non Kas (Barang/Jasa)

B.2.3. Defisit Anggaran

*Defisit Anggaran
Rp153,10 triliun*

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan Realisasi Belanja Negara TA 2012, maka Defisit Anggaran TA 2012 adalah sebesar Rp153.300.595.418.037, yang berarti 80,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp190.105.334.980.000. Perhitungan Defisit Anggaran sebagai berikut:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.338.109.629.172.957	1.210.599.653.359.415
Belanja Negara	(1.491.410.224.590.994)	(1.294.999.146.475.020)
Defisit Anggaran	(153.300.595.418.037)	(84.399.493.115.605)

B.2.4. Pembiayaan

Pembiayaan (Neto)
Rp175,16 triliun

Realisasi Pembiayaan (Neto) TA 2012 adalah sebesar Rp175.158.168.320.375 yang berarti 92,14 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp190.105.334.980.000. Pembiayaan terdiri dari (i) Pembiayaan Dalam Negeri, dan (ii) Pembiayaan Luar Negeri. Realisasi Pembiayaan yang akan diuraikan di bawah ini adalah realisasi Pembiayaan berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)

Pembiayaan Dalam Negeri
Rp198,62 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp198.622.535.177.645, yang berarti 102,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp194.531.004.181.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari (i) Rekening Pemerintah, (ii) Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman (iii) Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, (iv) Surat Berharga Negara (Neto), (v) Pinjaman Dalam Negeri (Neto), (vi) Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah, (vii) Kewajiban Penjaminan, dan (viii) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional.

B.2.4.1.1. Penggunaan SAL

Rekening Pemerintah
Rp56,17 triliun

Pembiayaan dari Penggunaan SAL adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dari penggunaan rekening SAL. Realisasi Penggunaan SAL TA 2012 adalah sebesar Rp56.170.000.000.000, yang berarti 99,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp56.173.747.225.000. Rincian Penggunaan SAL adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Penggunaan SAL	56.170.000.000.000	40.319.043.049.000
Jumlah	56.170.000.000.000	40.319.043.049.000

B.2.4.1.2. Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman
Rp6,53 triliun

Realisasi Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman TA 2012 adalah sebesar Rp6.533.098.103.446 yang berarti 148,89 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp4.387.875.576.000. Rincian Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN kepada Daerah	50.384.445.450	18.972.303.278
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMD	64.051.278.943	75.477.991.357
Penerusan Pinjaman DN kepada BUMN	565.052.615.026	479.070.633.171
Penerusan Pinjaman DN kepada Non Pemerintah	271.583.137.860	760.965.268.000
Penerusan Pinjaman LN Tahun Anggaran Berjalan (TAB) kepada Daerah	94.826.202.823	47.857.604.646
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMD	338.102.505.982	353.489.013.568
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	5.127.413.643.152	6.873.012.681.436
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Non Pemerintah	21.684.274.210	-
Total	6.533.098.103.446	8.608.845.495.456

*Pembiayaan Privatisasi
dan Penjualan Aset
Program Restrukturisasi
Rp1,28 triliun*

B.2.4.1.3. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2012 sebesar Rp1.277.994.564.583 atau 456,23 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp280.000.000.000.

Program privatisasi dilakukan Pemerintah dengan tujuan utama yaitu untuk peningkatan kinerja BUMN. Peningkatan kinerja tersebut dapat dilakukan dengan peningkatan kapasitas modal BUMN dan pelepasan kepemilikan pemerintah kepada swasta agar BUMN lebih mampu bersaing. Sementara itu, Penjualan Aset Program Restrukturisasi dilakukan oleh PT PPA melalui penjualan aset pasca dibubarkannya BPPN. Rincian realisasi pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi adalah:

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Penerimaan Hasil Privatisasi	138.269.961.371	425.044.145.867
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	330.323.053
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Eks BPPN	876.202.056.673	801.228.042.527
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks BDL	263.522.546.539	371.379.005.731
Jumlah	1.277.994.564.583	1.597.981.517.178

Rincian penerimaan hasil privatisasi tahun 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

No.	Tanggal Setor	Nilai Setoran	Keterangan Setoran
1.	5 Januari 2012	38.056.809,90	PT Kertas Blabak (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
2.	5 Januari 2012	113.533.470,86	PT Intirub (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
3.	5 Januari 2012	213.138.574,71	PT KBR (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
4.	5 Januari 2012	678.790.148,69	PT Atmindo (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
5.	5 Januari 2012	1.355.379.866,83	PT Jakarta International Hotel Development (JIHD) (Setoran ke-2, setelah verifikasi)
6.	23 November 2012	135.871.062.500,00	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (Hasil penjualan rights Pemerintah)
Jumlah		138.269.961.370,99	

Penerimaan pembiayaan yang merupakan setoran ke-2 (dua) adalah penerimaan dari kegiatan privatisasi yang telah dilakukan pada tahun 2011 dan terdapat setoran kembali setelah dilakukannya verifikasi oleh Kantor Akuntan Publik atas hasil bersih dari pelaksanaan privatisasi.

Penjualan rights pemerintah merupakan penjualan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dimiliki oleh pemerintah, atas diterbitkannya saham baru pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.

B.2.4.1.4. Surat Berharga Negara (Neto)

*Surat Berharga Negara
(Neto) Rp159,70 triliun*

Realisasi Pembiayaan dari Surat Berharga Negara (SBN) Neto TA 2012 adalah sebesar Rp159.704.323.637.096 atau 100,07 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp159.596.700.000.000. Pemerintah dapat menerbitkan SBN untuk membiayai kebutuhan pengelolaan kas bagi pelaksanaan APBN, apabila dan tunai kas tidak cukup tersedia untuk memenuhi kebutuhan pengeluaran di awal tahun anggaran dan untuk kepentingan stabilisasi pasar dan pengelolaan kas dengan tetap memperhatikan jumlah kebutuhan penerbitan SBN neto untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan yang ditetapkan.

Perhitungan Surat Berharga Neto adalah sebagai berikut :

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penerimaan		
Penerbitan/Penjualan SPN	30.520.000.000.000	40.000.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara DN	146.780.745.000.000	110.514.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	2.251.726.240.000	1.817.637.491.000
Penerbitan/Penjualan SBSN – Jangka Panjang	46.069.805.000.000	22.951.410.000.000
Imbalan Dibayar di muka SBSN – Jangka Panjang	171.346.293.000	56.028.850.000
Penerbitan/Penjualan SUN Perbendaharaan – DN	1.380.000.000.000	1.320.000.000.000
Penerbitan/Penjualan Obligasi Negara – Valas	46.018.969.099.520	21.441.986.560.150
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara – Valas	65.670.205.270	-
Penerimaan Penerbitan SBSN – Valas	9.639.006.152.000	9.035.050.295.000
Total Penerimaan	282.897.267.989.790	207.136.113.196.150
Pengeluaran		
Pelunasan SPN	(37.600.000.000.000)	(38.045.000.000.000)
Pelunasan Obligasi DN	(58.582.418.279.852)	(42.980.975.945.085)
Pembelian Kembali Obligasi DN	(12.996.527.000.000)	(4.163.986.000.000)
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Negara DN	(2.384.108.740.000)	(2.029.197.406.000)
Pelunasan SBSN-Jangka Pendek	-	-
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	(8.898.290.000.000)	-
Pembayaran Imbalan Dibayar di Muka SBSN- Jk Panjang	(158.900.711.000)	(52.588.386.000)
Pelunasan SPN Syariah	(2.505.000.000.000)	-
Pembayaran Utang Bunga Obligasi Valas	(67.699.621.842)	-
Total Pengeluaran	(123.192.944.352.694)	(87.271.747.737.085)
Jumlah SBN (Neto)	159.704.323.637.096	119.864.365.459.065

B.2.4.1.5. Pinjaman Dalam Negeri (Neto)

*Pinjaman Dalam Negeri
(Neto) Rp799,68 miliar*

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp799.676.359.939, yang berarti 80,68 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp991.161.538.000. Pinjaman ini merupakan pinjaman dari BUMN. Rincian Pinjaman Dalam Negeri TA 2012 adalah:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penerimaan pinjaman dalam negeri dari BUMN	706.470.597.706	393.606.359.471
Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri dan Persahaan Daerah	206.641.281.721	-
Pembayaran cicilan pokok pinjaman dalam negeri	(113.435.519.488))	-
Jumlah	799.676.359.939	393.606.359.471

B.2.4.1.6. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

*PMN/ Investasi
Pemerintah Rp18,86
triliun*

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah TA 2012 adalah sebesar Rp18.862.557.487.419, yang berarti 97,91 persen dari jumlah yang dianggarkan APBN-P sebesar Rp19.265.140.158.000. Rincian Pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) TA 2012 adalah:

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya	7.600.000.000.000	9.295.783.312.264
PMN untuk Badan Internasional	541.150.086.050	-
Penyertaan Modal Lainnya	378.394.401.369	-
Investasi Pemerintah	3.299.600.000.000	1.000.000.000.000
Investasi Pemerintah untuk Dana Geothermal	876.500.000.000	1.126.500.000.000
Pembiayaan Kredit Investasi Pemerintah	-	550.000.000.000
Dana Bergulir	6.166.913.000.000	7.671.600.000.000
Jumlah	18.862.557.487.419	19.643.883.312.264

PMN untuk BUMN dan Badan Lainnya sebesar Rp7.600.000.000.000, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	1.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Sarana Multi Infrastruktur Indonesia (Persero)	2.000.000.000.000
Penyertaan pada PT Dirgantara Indonesia (Persero)	1.400.000.000.000
PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	831.000.000.000
Perum Jaminan Kredit Indonesia	1.169.000.000.000
Penyertaan pada PT PAL (Persero)	600.000.000.000
Penyertaan pada PT Pindad	300.000.000.000
Penyertaan pada PT Industri Kapal Indonesia	200.000.000.000
Penyertaan pada PT Garam	100.000.000.000
Jumlah	7.600.000.000.000

PMN untuk Badan Internasional sebesar Rp541.150.086.845, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Penyertaan pada Bank for Reconstruction and Development	147.613.078.223
Penyertaan pada Asean Development Bank	352.860.063.674
Penyertaan pada International Finance Corporation	8.116.354.379
Penyertaan pada Fund for Agricultural Development	18.919.241.089
Penyertaan pada International Development Association	4.647.225.000
Penyertaan pada The Islamic Corporation for the Development of Private Sector	8.994.124.480
Jumlah	541.150.086.845

Investasi Pemerintah sebesar Rp3.299.600.000.000, terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Investasi pemerintah pada Pusat Investasi Pemerintah	1.299.600.000.000
Investasi pemerintah pada PT Indonesia Asahan Aluminium	2.000.000.000.000
Jumlah	3.299.600.000.000

Dana Bergulir sebesar Rp6.166.913.000.000 dikelola oleh beberapa BLU, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan Kementerian Perumahan Rakyat	4.709.253.000.000
BLU Bidang Pendanaan Sekretarian BPJT Kementerian PU	900.000.000.000
BLU LPDB Kementerian Koperasi dan UKM	557.660.000.000
Jumlah	6.166.913.000.000

B.2.4.1.7. Kewajiban Penjaminan

Kewajiban Penjaminan Rp0

Pada TA 2012 tidak terdapat realisasi pengeluaran pembiayaan Kewajiban Penjaminan, sedangkan jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp633.340.000.000.

Kewajiban penjaminan adalah penjaminan yang secara potensial menjadi beban Pemerintah akibat pemberian jaminan kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp623.340.000.000. dalam rangka mendukung percepatan pembangkit listrik 10.000 MW atas kewajiban kepada kreditor perbankan dan jaminan sebesar 70% atas kewajiban pembayaran kembali pokok kredit investasi PDAM sebesar Rp10.000.000.000. Pada akhir tahun kewajiban penjaminan tersebut tidak direalisasikan karena PT PLN dan PDAM mampu untuk membayar kewajiban kepada krediturnya.

Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp7 triliun

B.2.4.1.8. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional

Realisasi pengeluaran Dana Pengembangan Pendidikan Nasional pada TA 2012 adalah sebesar Rp7.000.000.000.000, yang berarti 100 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp7.000.000.000.000. Alokasi dana pengembangan pendidikan nasional adalah untuk pembentukan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak. Dana tersebut dikelola oleh Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pada Kementerian Keuangan.

Pembiayaan LN (Neto) minus Rp23,46 triliun

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2012 adalah sebesar minus Rp23.464.366.857.270, yang berarti 530,18 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp4.425.669.201.000. Pembiayaan Luar Negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman luar negeri, (ii) penerusan pinjaman dan (iii) pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

Penarikan Pinjaman LN Rp31,40 triliun

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri TA 2012 adalah sebesar Rp31.403.481.754.448 yang berarti 58,45 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp53.731.053.828.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari (i) penarikan pinjaman program, dan (ii) penarikan pinjaman proyek.

Penarikan Pinjaman Program Rp15,00 triliun

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2012 adalah sebesar Rp15.003.476.180.432, yang berarti 96,15 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp15.603.899.524.000.

Pinjaman Program adalah pinjaman yang diterima dalam bentuk tunai (*cash financing*) yang memerlukan *policy matrix* untuk pencairannya. *Policy matrix* adalah suatu *set of policy* yang menjadi *collateral* pinjaman program yang harus dipenuhi agar pinjaman dapat dicairkan. Pinjaman program digunakan untuk mendukung pembiayaan defisit tunai APBN. Besarnya pinjaman program dilakukan dengan mempertimbangkan defisit pada suatu tahun anggaran. Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program TA 2012 dan TA 2011 (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	-	873.396.325.700
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	8.620.410.260.122	10.758.748.187.519
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	5.812.200.000.000	3.634.000.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	570.865.920.310	-
Jumlah	15.003.476.180.432	15.266.144.513.219

Realisasi Penarikan Pinjaman Program ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp26.673.845.960. Selisih ini disebabkan adanya perbedaan saat pengakuan penerimaan pinjaman (selisih kurs) antara Ditjen Perbendaharaan selaku kuasa BUN dengan Ditjen Pengelolaan Utang selaku Kuasa Pengguna Anggaran 999.01. Rincian perbedaan tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	8.620.410.260.122	8.610.410.260.122	10.000.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	5.812.200.000.000	5.796.000.000.000	16.200.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	570.865.920.310	570.392.074.350	473.845.960
Jumlah	15.003.476.180.432	14.976.802.334.472	26.673.845.960

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

*Penarikan Pinjaman
Proyek Rp16,40 triliun*

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2012 adalah sebesar Rp16.400.005.574.016, yang berarti 43,01 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp38.127.154.304.000

Pinjaman Proyek merupakan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk membiayai kegiatan/proyek pembangunan tertentu. Kegiatan pembangunan ini adalah kegiatan yang telah menjadi kegiatan prioritas pembangunan yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Kegiatan prioritas ini disusun BAPPENAS berdasarkan usulan dari kementerian negara/lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN.

Berikut di bawah ini adalah rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek TA 2012 dan TA 2011 (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (Audited)	TA 2011 (Audited)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	8.020.242.160.124	9.046.106.089.582
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.870.256.474.519	5.246.144.127.735
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	2.451.886.647.371	4.188.783.993.385
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	57.562.877.025	-
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	57.414.977	-
Jumlah	16.400.005.574.016	18.481.034.210.702

Realisasi Penarikan Pinjaman Proyek ini berbeda dengan realisasi yang dilaporkan oleh BA 999.01 (Utang Pemerintah), dengan selisih sebesar Rp1.962.913.849.879 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	Data BUN	Data BA 999	Selisih
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	8.020.242.160.124	8.585.188.340.458	(564.946.180.334)
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.870.256.474.519	5.439.586.992.674	430.669.481.845
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	2.451.886.647.371	3.170.936.740.981	(719.050.093.610)
Penarikan Pinjaman Proyek Komersial	57.562.877.025	1.167.152.881.552	(1.109.590.004.527)
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	57.414.977	54.468.230	2.946.747
Jumlah	16.400.005.574.016	18.362.919.423.895	(1.962.913.849.879)

Perbedaan penarikan pinjaman luar negeri disebabkan oleh:

Uraian	Jumlah
Selisih Kurs	(575.458.967.770)
SP3 Tahun 2012, NoD tahun 2011	(4.515.221.049)
SP4HLN batal	(16.812.873.452)
Nilai SP3 yang terbit hanya sebagian dari WA/NoD	61.526.666.016
SP3/SP2D diterbitkan tahun 2013	354.146.987.699
Pagu DIPA Minus	2.027.647.909.428
Refund	(926.751.473)
NoD Reksus diterima Dit PKN tahun 2013	11.604.000.000
NoD Nordea sesuai agreement dianggap penarikan	47.063.974.414
SP3/DP2D akan terbit 2013	58.637.626.066
Selisih masih dalam penelusuran	500.000
Total	(1.962.913.849.879)

*Penerusan Pinjaman
Rp3,75 triliun*

B.2.4.2.2. Penerusan Pinjaman

Realisasi pengeluaran pembiayaan Penerusan Pinjaman TA 2012 adalah sebesar Rp3.753.031.242.391, yang berarti 44,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp8.431.823.029.000. Rincian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada Daerah	(92.016.402.136)	(116.927.902.866)
Penerusan Pinjaman LN TAB kepada BUMN	(3.661.014.840.255)	(4.106.913.568.432)
Total	(3.753.031.242.391)	(4.223.841.471.298)

*Pembayaran Cicilan
Pokok Utang LN
Rp51,11 triliun*

B.2.4.2.3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2012. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2012 adalah sebesar Rp51.114.817.369.327 yang berarti 102,80 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp49.724.900.000.000.

Berikut di bawah ini adalah rincian Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri TA 2011 dan TA 2010 (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN – Pinjaman Program	-	391.155.555.858
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Program	10.862.794.957.111	9.038.453.328.006
Pembiayaan Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	3.031.328.895.738	2.275.910.434.365
Cicilan Pokok Utang LN - Pinjaman Proyek	37.220.693.516.478	35.616.983.160.042
Jumlah	51.114.817.369.327	47.322.502.478.271

SiLPA Rp21,86 triliun

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SiLPA (SiKPA)

Berdasarkan Defisit Anggaran sebesar Rp153.300.595.418.036 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp175.158.168.320.375 sebagaimana diuraikan di atas, maka terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp21.857.572.902.338, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (<i>Audited</i>)	TA 2011 (<i>Audited</i>)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.338.109.629.172.958	1.210.599.653.359.415
Belanja Negara	1.491.410.224.590.994	1.294.999.146.475.024
Surplus (Defisit)	(153.300.595.418.036)	(84.399.493.115.609)
Pembiayaan Neto	175.158.168.320.375	130.948.869.624.420
SiLPA (SiKPA)	21.857.572.902.339	46.549.376.508.811

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA**1. Informasi Pendapatan dan Belanja Akrua**

Sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN TA 2012, Laporan Realisasi Anggaran pada LKPP dilengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual. Informasi tentang pendapatan dan belanja secara akrual dimaksudkan sebagai tahap menuju pada penerapan akuntansi berbasis akrual yang dilengkapi dengan informasi hak dan kewajiban yang diakui sebagai penambah atau pengurang nilai kekayaan bersih Pemerintah dalam penganggaran berbasis kas. Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrua disajikan secara tersendiri dalam Suplemen LKPP Tahun 2012.

2. Data Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Berdasarkan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga terdapat realisasi belanja terkait dengan dana dekonsentrasi/tugas pembantuan TA 2012, dengan rincian sebagai berikut:

Kode BA	Kementerian Negara/Lembaga	Realisasi TA 2012 (dalam Rp)		
		Dekonsentrasi	Tugas Pembantuan	Urusan Bersama
010	Kementerian Dalam Negeri	1.179.432.183.587	735.524.177.791	8.934.210.874.182
018	Kementerian Pertanian	3.087.363.484.302	6.601.987.328.769	-
019	Kementerian Perindustrian	111.980.698.372	-	-
020	Kementerian ESDM	31.204.525.536	-	-
023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	9.041.471.675.659	23.701.235.725	-
024	Kementerian Kesehatan	700.206.850.531	4.873.530.957.110	4.611.417.000
026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	457.083.033.022	1.353.290.593.043	-
027	Kementerian Sosial	576.848.410.108	105.224.488.230	-
029	Kementerian Kehutanan	161.126.201.803	5.679.044.168	-
032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	325.633.717.406	914.357.307.881	-
033	Kementerian Pekerjaan Umum	194.144.046.166	1.916.088.237.971	1.324.451.000.000
040	Kementerian Kebudayaan & Pariwisata	69.051.533.609	58.910.612.939	-
043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	318.217.764	-	-
044	Kementerian Negara Koperasi dan UKM	184.185.019.944	-	-
047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	13.320.674.641	-	-
055	Kementerian Negara PPN/Bappenas	20.810.511.761	-	-
057	Perpustakaan Nasional	97.526.344.917	-	-
065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	15.009.897.314	-	-
067	Kementerian PDT	-	60.137.356.969	-
068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	12.299.182.605	-	-
087	Arsip Nasional Republik Indonesia	4.506.687.738	-	-
090	Kementerian Perdagangan	69.443.758.004	602.615.282.964	-
091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	13.611.746.274	-	-
092	Kementerian Pemuda dan Olah Raga	132.345.135.146	-	-
111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	2.957.662.300	36.598.934.200	-
	Total	16.501.881.198.509	17.287.645.557.760	10.263.273.291.182

3. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian reformasi manajemen keuangan negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU 1/2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyeter surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan RBA dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan 31 Desember 2012, terdapat 142 Satuan Kerja di lingkungan pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yang berasal dari 20 Kementerian Negara/Lembaga, yaitu:

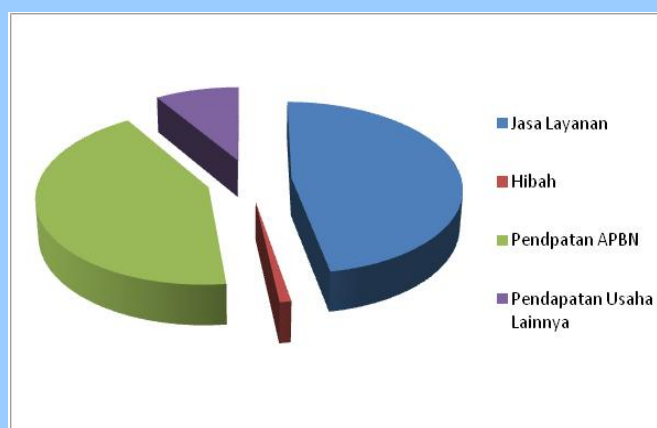
No	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah BLU
1	Sekretariat Negara	2
2	Kementerian Keuangan	3
3	kementerian Pertanian	2
4	Kementerian Perindustrian	5
5	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1
6	Kementerian Perhubungan	7
7	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	33
8	Kementerian Kesehatan	52
9	Kementerian Agama	15
10	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3
11	Kementerian Kehutanan	1
12	Kementerian Pekerjaan Umum	1
13	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	1
14	Kementerian Koperasi dan UKM	2
15	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1

16	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	1
17	Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional	1
18	Kementerian Perumahan Rakyat	1
19	POLRI	9
20	BP Batam	1
	Jumlah BLU	142

Ditinjau dari bidang layanan, dari 142 BLU tersebut dapat dibagi menjadi:

- 133 BLU bidang Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
- 3 BLU bidang Pengelolaan Wilayah Kawasan;
- 6 BLU bidang Pengelolaan Dana Khusus.

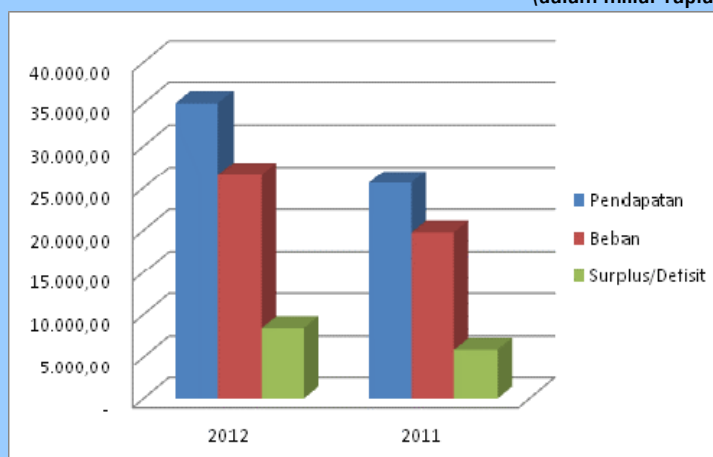
Berdasarkan laporan keuangan 142 BLU, total pendapatan pada tahun 2012 adalah sebesar Rp35.013.146.018.920. Komposisi pendapatan BLU pada TA 2011 dapat dilihat pada Grafik 38.



Grafik 38 Komposisi Pendapatan BLU TA 2012

Sementara itu, Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU Tahun 2012 dapat dilihat pada Grafik 39.

(dalam miliar rupiah)



Grafik 39 Pendapatan, Beban, dan Surplus/Defisit BLU TA 2012
Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan secara lengkap pada Daftar 37.

4. LPP RRI dan LPP TVRI

UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, PP No.11/2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran LPP, PP No.12/2005 tentang LPP RRI dan PP No.13/2005 tentang LPP TVRI menyebutkan bahwa pembiayaan LPP TVRI dan RRI berasal dari iuran penyiaran, APBN/APBD, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran. Pembiayaan yang berasal dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan, dan usaha lain yang sah terkait dengan penyelenggaraan penyiaran merupakan penerimaan negara yang dikelola langsung secara transparan untuk membiayai dan menunjang operasional LPP.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: S-714/MK.02/2011 tanggal 17 November 2011 Tentang Penerbitan Bagian Anggaran, status LPP RRI dan LPP TVRI mulai tahun anggaran 2012 telah menjadi Bagian Anggaran. Pendapatan dan belanja yang bersumber dari iuran penyiaran, sumbangan masyarakat, siaran iklan dan usaha lain yang sah dari kedua lembaga tersebut dilaporkan dalam suplemen laporan keuangan BA 116 dan BA 117. Terkait dengan Jasa Siaran dan Non Siaran (Jasinonsi) yang diperoleh oleh kedua lembaga tersebut dapat dilihat pada **Daftar 4**.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

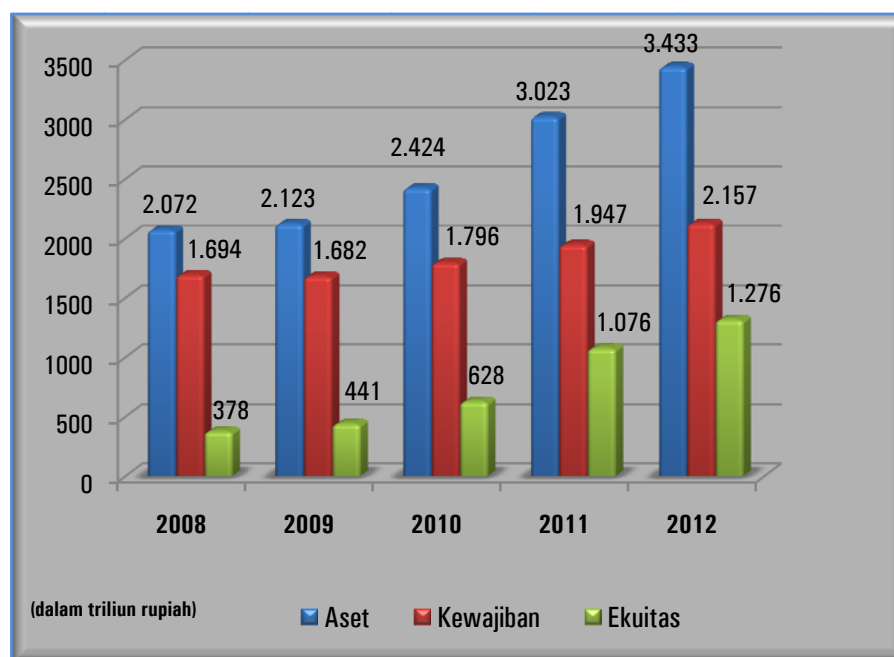
Ringkasan Neraca per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Aset Lancar	241.315.134.207.260	266.807.824.111.647
Investasi Jangka Panjang	932.406.392.642.504	750.030.794.479.804
Aset Tetap	1.895.501.446.206.083	1.567.974.174.587.750
Piutang Jangka Panjang	4.673.590.581.804	3.591.386.926.385
Aset Lainnya	359.086.269.747.712	435.042.995.995.109
Jumlah Aset	3.432.982.833.385.363	3.023.447.176.100.695
Kewajiban Jangka Pendek	266.136.388.831.668	246.444.880.163.115
Kewajiban Jangka Panjang	1.890.749.584.803.196	1.700.928.418.989.886
Jumlah Kewajiban	2.156.885.973.634.864	1.947.373.299.153.001
Ekuitas Dana Lancar	(23.586.284.356.935)	40.813.342.935.093
Ekuitas Dana Investasi	1.299.683.144.107.434	1.035.260.534.012.601
Jumlah Ekuitas Dana Neto	1.276.096.859.750.499	1.076.073.876.947.694
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.432.982.833.385.363	3.023.447.176.100.695

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama lima tahun terakhir disajikan pada **Grafik 40**.

Perbandingan Neraca selama 5 tahun terakhir



Grafik 40 Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2008 – Tahun 2012

Grafik di atas menunjukkan bahwa selama lima tahun berturut-turut, nilai Ekuitas Dana selalu meningkat. Ekuitas Dana per 31 Desember 2012 naik 18,58 persen dari posisi 31 Desember 2011.

C.2 PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1 Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Rekening Kas BUN di BI
Rp37,38 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp37.382.696.367.039 dan Rp82.453.918.298.407 merupakan saldo Rekening Bendahara Umum Negara (BUN) yang ada di BI, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Rekening	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Rekening BUN Nomor 502.000000980	2.199.992.464.994	2.381.060.659.952
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	6.339.139.103	8.471.861.156
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	680.372.438.864	1.068.162.472.870
Rekening Kas Penempatan dalam Rupiah Nomor 518.000122980	940.127.275.397	4.790.148.672.956
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	4.985.649.807.746	23.301.620.886.188
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	564.701.567.195	-
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta YEN Nomor 608.000111980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam Rupiah Nomor 519.000124980	8.492.000.735	8.492.000.706
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam USD Nomor 609.022411980	-	-
Rek. Penerimaan Bantuan Bencana Alam Sumatera dalam EURO Nomor 609.000991980	-	-
Rekening SAL Nomor 500.000002980	25.755.966.698.308	48.505.945.197.525
Rekening Khusus	1.907.213.434.609	2.390.016.547.054
Rekening RDI/RPD	-	-
Rekening Penerimaan pada Bank Mandiri	8.666.185	-
Kas dalam Transito	333.832.873.903	-
Jumlah	37.382.696.367.039	82.453.918.298.407

Kas dalam transito merupakan transaksi kiriman uang yang dilimpahkan pada akhir Desember 2012 dan baru diterima di RKUN sebesar Rp300.338.121.000 pada tanggal 2 Januari 2013 dan sebesar Rp33.494.752.903 merupakan transaksi pemindahbukuan antar Rekening Khusus.

Rekening Kas BUN di BI dalam valuta asing (valas) sesuai rincian berikut.

Jenis Rekening	Saldo Valas	Saldo Rupiah
Rekening KUN dalam Valuta USD Nomor 600.502411980	USD655.546,96	6.339.139.103
Rekening KUN dalam Valuta YEN Nomor 600.502111980	YEN6.076.555.183,00	680.372.438.864
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta USD Nomor 608.001411980	USD515.579.090,77	4.985.649.807.746
Rekening Kas Penempatan dalam Valuta EURO Nomor 608.000991980	EUR044.083.351,98	564.701.567.195

Seluruh saldo Rekening Kas BUN di BI merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL). Rincian Rekening Khusus dapat dilihat pada **Daftar 5**.

C.2.2 Rekening Pemerintah Lainnya

RPL Rp13,50 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp13.495.665.498.447 dan Rp6.615.552.720.213 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya (RPL) yang ada di BI dan Bank Umum dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Bank	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. Bank Indonesia	13.480.066.191.673	6.558.844.586.613
2. Bank Umum	15.599.306.774	56.708.133.600
Jumlah	13.495.665.498.447	6.615.552.720.213

Seluruh saldo RPL bukan merupakan bagian dari SAL.

1. Rekening Pemerintah Lainnya di BI, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Rekening	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980)	347.992.721.305	197.960.188.008
Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS (Nomor 600.000411980)	13.005.460.815.909	6.237.138.752.226
Rekening Pemerintah Lain	126.612.654.459	123.745.646.379
Jumlah	13.480.066.191.673	6.558.844.586.613

Rincian lebih lengkap masing-masing RPL di BI dapat dilihat pada **Daftar 6**.

Rekening Panas Bumi sebesar Rp347.992.721.305 merupakan kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan panas bumi di Indonesia serta untuk menyelesaikan kewajiban Pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN dan pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi.

Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp13.005.460.815.909 merupakan Kas BUN yang ada di rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah.

Monitoring hasil kegiatan hulu migas tahun 2012 dapat dilihat pada **Daftar 7**. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Hasil Minyak Perjanjian KPS dan Rekening Panas Bumi disajikan pada **Catatan Penting Lainnya**.

Rekening Pemerintah Lain sebesar Rp126.612.654.459 terdiri dari rekening untuk menampung penerimaan pertambangan dan perikanan.

2. Rekening Pemerintah Lainnya pada Bank Umum sebesar Rp15.599.306.774 merupakan Kas pada BA 999.04 (Penerusan Pinjaman) yang tersimpan di berbagai Bank Umum berupa rekening kredit program yang digunakan untuk mengelola proyek Perusahaan Inti Rakyat (PIR)/Unit Pelaksana Proyek (UPP) Perkebunan.

Rincian saldo RPL pada Bank Umum dapat dilihat pada **Daftar 8**.

C.2.3 Rekening Kas di KPPN

*Rekening Kas di KPPN
Rp16,21 triliun*

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp16.207.882.323.813 dan Rp11.870.556.947.661 merupakan saldo Rekening Kas Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Seluruh saldo Rekening Kas di KPPN merupakan bagian dari Saldo Anggaran Lebih (SAL).

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 9**.

C.2.4 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp213,46 miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp213.458.829.221 dan Rp292.795.937.959 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran pada KL dapat dilihat pada **Daftar 10**.

C.2.5 Kas di Bendahara Penerimaan

*Kas di Bendahara
Penerimaan
Rp196,15 miliar*

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp196.150.458.978 dan Rp252.900.321.124 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank, termasuk bunga dan jasa giro, maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara.

Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada KL dapat dilihat pada **Daftar 10**.

C.2.6 Kas Lainnya dan Setara Kas

*Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp6,10 triliun*

Jumlah Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp6.103.251.516.103 dan Rp6.756.875.778.441 merupakan kas yang berada di bendahara pengeluaran selain uang persediaan. Saldo tersebut dapat berupa pendapatan seperti bunga jasa giro, pungutan pajak, dan pengembalian belanja yang belum disetor ke kas negara, belanja yang sudah dicairkan akan tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga, dan kas dari hibah langsung KL. Kas Lainnya dan Setara Kas terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Bunga dan Jasa Giro, dan Pengembalian Belanja yang Belum Disetor ke Kas Negara	3.150.005.278.192	2.367.515.283.864
Kas yang Belum Dibayarkan kepada Pihak Ketiga	2.470.915.669.777	3.943.049.544.201
Dana Lancar Lainnya (hibah langsung KL)	482.330.568.134	443.660.153.197
Dana Lancar BLU	-	2.650.797.179
Jumlah	6.103.251.516.103	6.756.875.778.441

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas menurut organisasi Kementerian Negara/Lembaga dan BUN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. KL	4.075.227.758.750	1.830.725.363.653
2. BUN	2.028.023.757.353	4.926.150.414.788
Jumlah	6.103.251.516.103	6.756.875.778.441

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas masing-masing KL dapat dilihat pada **Daftar 10**.

Kas Lainnya dan Setara Kas yang berada di BUN sebesar Rp2.028.023.757.353 terdiri dari:

1. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Bagian Anggaran (BA) 999.03 sebesar Rp1.429.667.753 merupakan kas atas pengembalian program dana bergulir yang saat ini masih tertampung dalam rekening LPT Indak;
2. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.05 sebesar Rp768.861.261.146 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan DBH yang tidak disalurkan ke pemerintah daerah, dan disetorkan ke Kas Negara pada akhir Februari 2013;
3. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.07 sebesar Rp551.551.995.942 merupakan kas yang terdapat pada rekening dana cadangan sebagai sisa atas dana cadangan subsidi yang tidak disalurkan kepada pihak ketiga, dan disetorkan ke Kas Negara pada akhir Februari 2013; dan
4. Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.08 sebesar Rp706.180.832.512 terdiri dari:
 - a. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Kementerian Pertanian sebesar Rp29.399.785.771 berupa sisa biaya penyegaran dan jasa giro pengelolaan dana Cadangan Benih Nasional (CBN) yang belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca.
 - b. Kas Lainnya dan Setara Kas pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar Rp676.781.046.741 merupakan saldo Dana kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi TA 2011 yang baru dilaksanakan dalam TA 2012, dan sampai dengan 31 Desember 2012 masih berada di Bendahara Pengeluaran Pembantu BPBD penerima bantuan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR). Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas dimaksud berada pada beberapa BPP BPBD Provinsi/Kabupaten/Kota penerima bantuan dana RR TA 2011 yang sudah tidak dapat digunakan lagi karena sudah melewati batas waktu sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Kepala BNPB.

C.2.7 Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp16,64 triliun

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp16.643.419.462.034 dan Rp13.019.388.257.063 merupakan saldo kas yang ada di satuan kerja BLU pada beberapa KL, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	621.292.524.757	529.314.721.403
2. BLU di Kementerian Keuangan	3.641.157.122.268	2.168.961.124.597
3. BLU di Kementerian Pertanian	5.541.107.213	3.466.155.684
4. BLU di Kementerian Perindustrian	33.304.572.029	20.011.012.451
5. BLU di Kementerian ESDM	19.979.456.001	18.498.791.552
6. BLU di Kementerian Perhubungan	161.040.871.577	132.850.346.828
7. BLU di Kementerian Dikbud	4.648.837.613.868	4.497.383.942.144
8. BLU di Kementerian Kesehatan	1.237.850.673.943	1.056.474.212.524
9. BLU di Kementerian Agama	222.780.109.509	160.067.061.688
10. BLU di Kementerian Nakertrans	958.406.319	714.674.920
11. BLU di Kementerian Kehutanan	96.050.928.714	-
12. BLU di Kementerian Pekerjaan Umum	643.925.235.828	311.877.696.631
13. BLU di Kementerian Ristek	2.129.679.285	1.587.736.326
14. BLU di Kementerian Negara KUKM	314.893.667.838	222.839.454.602

15. BLU di Kementerian Kominfo	4.256.475.093.238	3.710.216.950.149
16. BLU di Kepolisian RI	43.290.564.998	31.085.827.403
17. BLU di BPPT	17.884.193.545	7.013.147.667
18. BLU di LAPAN	3.206.179.400	1.956.045.700
19. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	286.119.242.296	145.069.354.794
20. BLU di BPKPBPB Batam	386.702.219.408	-
Jumlah	16.643.419.462.034	13.019.388.257.063

Berdasarkan data BUN, Kas pada BLU yang telah disahkan oleh KPPN adalah sebesar Rp17.331.515.069.465 (lihat **Catatan D.1**). Dari Kas pada BLU tersebut sebesar Rp768.125.137.193 telah didepositokan dengan jangka waktu lebih dari tiga bulan (disajikan pada Investasi Jangka Pendek - lihat **Catatan C.2.19**). Dengan demikian, terdapat Kas pada BLU yang belum disahkan sebesar Rp80.029.529.762, yaitu berasal dari (Rp16.643.419.462.034 + Rp768.125.137.193 - Rp17.331.515.069.465).

C.2.8 Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari
Rekening BUN Rp787,37
miliar

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp787.370.392.558 dan Rp1.408.995.648.910 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari *lender*.

Uang Muka dari Rekening BUN sebesar Rp787.370.392.558 adalah Uang Muka dari Rekening BUN yang *eligible*, yaitu uang muka yang masih dapat ditagihkan kepada *lender* yang terjadi sejak tahun 2009. Saldo tersebut berasal dari saldo akhir tahun 2011 sebesar Rp1.408.995.648.910 dikurangi dengan Uang Muka BUN yang diselesaikan selama tahun 2012 sebesar Rp621.625.256.352. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut *lender* adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

<i>Lender</i>	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. IBRD	185.506.947.772	434.796.198.957
2. ADB	341.516.046.918	557.243.342.772
3. OECF/JBIC	44.025.426.500	14.116.106.369
4. Lainnya	216.321.971.367	402.840.000.812
Jumlah*)	787.370.392.557	1.408.995.648.910

*) selisih antara data neraca dengan rincian Uang Muka BUN sebesar Rp1 karena pembulatan

C.2.9 Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek
Rp768,13 miliar

Jumlah Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp768.125.137.193 dan Rp170.553.016.059, merupakan nilai investasi yang dilakukan dan diharapkan akan diperoleh kembali dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan keuangan. Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2012 merupakan deposito yang berada di BLU pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp730.699.384.448, BLU pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp28.653.752.745, dan BLU pada Kementerian Agama sebesar Rp8.772.000.000.

C.2.10 Investasi Jangka Pendek Lainnya*Investasi Jangka Pendek Lainnya Rp0*

Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp135.839.486.878. Jumlah Investasi Jangka Pendek Lainnya Tahun 2011 merupakan investasi berupa deposito. Pada LKPP Tahun 2012, seluruh Investasi Jangka Pendek Lainnya disajikan dalam pos Investasi Jangka Pendek.

C.2.11 Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja*Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja Rp1,89 triliun*

Belanja Dibayar di Muka dan Uang Muka Belanja per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.893.533.561.965 dan Rp1.279.165.315.147 merupakan uang muka dan/atau pembayaran termin yang telah diterima oleh kontraktor atau pihak ketiga atas pekerjaannya dalam rangka penyediaan barang/jasa yang berada di beberapa KL. Belanja Dibayar di Muka yang nilainya paling signifikan terdapat pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp1.036.431.395.605 yang merupakan pembayaran uang muka terhadap beberapa paket pekerjaan. Tidak dilakukan penyisihan piutang tak tertagih atas Uang Muka Belanja. Rincian Uang Muka Belanja pada masing-masing KL dapat dilihat pada **Daftar 11**.

C.2.12 Piutang Pajak*Piutang Pajak Rp93,47 triliun*

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp93.468.526.344.200 dan Rp108.063.462.383.641. Nilai Piutang Pajak per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*) adalah Rp48.917.583.713.256 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp93.468.526.344.200 dikurangi penyisihan piutang tak tertagih sebesar Rp44.550.942.630.944.

Rincian Piutang Pajak menurut organisasi adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Direktorat Jenderal Pajak:		
Nilai Bruto	70.721.181.887.660	86.801.366.456.341
Penyisihan	(42.929.017.362.023)	(46.205.692.087.023)
Nilai Bersih	27.792.164.525.637	40.595.674.369.318
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai:		
Nilai Bruto	22.747.344.456.540	21.262.095.927.300
Penyisihan	(1.621.925.268.921)	(1.611.617.003.316)
Nilai Bersih	21.125.419.187.619	19.650.478.923.984
Piutang Pajak (Bruto)	93.468.526.344.200	108.063.462.383.641
Total Penyisihan	(44.550.942.630.944)	(47.817.309.090.339)
Piutang Pajak (Bersih)	48.917.583.713.256	60.246.153.293.302

Piutang Pajak pada Ditjen Pajak

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp70.721.181.887.660 dan Rp86.801.366.456.341 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2012. Rincian Piutang Pajak (nilai bruto sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 14**.

Tabel 14 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Pajak
(dalam rupiah)

No.	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.391.617.937.283	1.085.067.767.115
2.	Piutang PPh Pasal 22	468.432.815.179	466.665.742.712
3.	Piutang PPh Pasal 23	4.918.350.082.956	1.971.735.365.857
4.	Piutang PPh Pasal 25 Orang Pribadi	1.218.354.326.211	1.011.913.424.152
5.	Piutang PPh Pasal 25 Badan	18.473.224.608.353	14.272.978.070.717
6.	Piutang PPh Pasal 26	2.093.962.968.364	2.831.091.117.252
7.	Piutang PPh Final dan Fiskal LN	589.715.652.211	517.874.742.847
8.	Piutang PPN Dalam Negeri	15.704.901.728.808	42.235.408.556.549
9.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	176.236.958.386	208.754.851.900
10.	Piutang PBB Pedesaan	2.996.934.810.829	2.401.365.978.916
11.	Piutang PBB Perkotaan	11.591.237.794.772	11.291.484.268.102
12.	Piutang PBB Perkebunan	661.307.597.823	394.209.918.227
13.	Piutang PBB Kehutanan	558.001.107.117	630.580.993.822
14.	Piutang PBB Pertambangan	7.587.645.821.758	5.602.915.905.581
15.	Piutang PTLL	15.396.781	691.914.937
16.	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.291.242.280.829	1.878.627.837.655
	Jumlah	70.721.181.887.660	86.801.366.456.341

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJP dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)		
Umur Piutang	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	20.573.515.583.316	19.470.734.026.870
1 Tahun dan Kurang dari 3 Tahun	14.312.073.025.071	37.888.573.637.081
3 Tahun dan Kurang dari 5 Tahun	12.904.367.823.451	8.503.983.799.836
5 Tahun atau Lebih	22.931.225.455.842	20.938.074.992.554
Jumlah *)	70.721.181.887.680	86.801.366.456.341

*) selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp20 karena pembulatan

- a. Dari nilai piutang pajak sebesar Rp70.721.181.887.660 terdapat piutang pajak yang disisihkan sebesar Rp42.929.017.362.023. Nilai piutang yang disisihkan tersebut termasuk piutang yang telah daluwarsa penagihannya sebesar Rp8.638.230.038.255. Selama tahun 2012, atas nilai piutang pajak yang telah daluwarsa tersebut, telah diusulkan penghapusan sebesar Rp1.176.047.212.013. Selama tahun 2012, nilai piutang yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan untuk dihapusbukukan sebesar Rp28.075.790.794.612. Rincian Piutang Pajak dapat dilihat pada **Daftar 12**.
 - b. Dalam rangka pemenuhan hak dan kewajiban Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan pembetulan, keberatan, pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan Surat Tagihan Pajak, pembatalan hasil pemeriksaan pajak atau surat ketetapan pajak, banding, gugatan dan peninjauan kembali. Nominal ketetapan pajak kurang bayar yang menjadi sengketa pajak tersebut diatas yang belum diterbitkan keputusan atau putusan sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 adalah Rp55.217.723.152.085.
2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp22.747.344.456.540 dan Rp21.262.095.927.300 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang

diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak (nilai awal sebelum penyisihan) per jenis pajak dapat dilihat pada **Tabel 15**.

Berdasarkan umurnya, Piutang Pajak di DJBC dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Umur Piutang	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Kurang dari 1 Tahun	20.767.263.500.578	19.648.918.985.526
1 Tahun s.d 2 Tahun	522.021.007.821	217.266.179.964
2 Tahun s.d 3 Tahun	43.158.722.530	103.555.167.066
Di atas 3 Tahun	1.414.901.225.612	1.292.355.594.744
Jumlah *)	22.747.344.456.541	21.262.095.927.300

*) selisih antara data neraca dengan data piutang per umur sebesar Rp1 karena pembulatan

Tabel 15 Piutang Pajak per Jenis Pajak pada Ditjen Bea dan Cukai

(dalam rupiah)

*Piutang Pajak pada
Ditjen Bea dan Cukai*

No	Jenis Piutang Pajak	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1	Piutang PPh Pasal 22	6.545.000	-
2	Piutang PPh Pasal 22 Impor	38.935.638.305	45.892.299.214
3	Piutang PPN Dalam Negeri	3.208.801.445.758	3.146.910.248.970
4	Piutang PPN Impor	203.237.408.922	240.562.578.649
5	Piutang PPN Lainnya	-	13.975.000
6	Piutang PPnBM Impor	62.468.918.221	26.715.140.404
7	Piutang PPnBM Lainnya	-	-
8	Piutang Cukai Hasil Tembakau	17.033.037.355.284	15.612.436.025.861
9	Piutang Cukai Ethyl Alkohol	889.000.000	889.000.000
10	Piutang Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	3.130.764.100	3.108.046.600
11	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Cukai	106.520.802.678	102.598.902.174
12	Piutang Pendapatan Cukai Lainnya	46.852.066.615	46.830.933.374
13	Piutang Bunga Penagihan PPN	4.652.265.594	9.710.326.332
14	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	-	16.682.000
15	Piutang Bea Masuk	902.381.234.997	851.036.853.853
16	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Pabean	800.768.267.334	773.536.556.838
17	Piutang Pendapatan Pabean Lainnya	177.749.777.036	173.032.494.314
18	Piutang Pajak/Pungutan Ekspor	149.477.642.624	222.278.975.975
19	Piutang Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar	8.143.652.172	6.238.348.382
20	Piutang Pendapatan Bunga Bea Keluar	291.671.900	288.539.360
Jumlah		22.747.344.456.540	21.262.095.927.300

C.2.13 Piutang Bukan Pajak

*Piutang Bukan Pajak
Rp120,92 triliun*

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp120.925.758.512.257 dan Rp19.885.890.412.635. Nilai Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp29.562.629.523.524, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp120.925.758.512.257 dikurangi penyisihan sebesar Rp91.363.128.988.733. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Piutang Bukan Pajak	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Piutang pada KL:		
Nilai Bruto	28.251.523.543.928	13.796.526.308.176
Penyisihan	(19.423.908.193.716)	(9.935.371.734.586)
Nilai Bersih	8.827.615.350.212	3.861.154.573.590
Piutang pada BUN:		
Nilai Bruto	92.674.234.968.329	6.089.364.104.459
Penyisihan	(71.939.220.795.017)	(318.025.168.038)
Nilai Bersih	20.735.014.173.312	5.771.338.936.421
Piutang Bukan Pajak (Bruto)	120.925.758.512.257	19.885.890.412.635
Total Penyisihan	(91.363.128.988.733)	(10.253.396.902.624)
Piutang Bukan Pajak (Bersih)	29.562.629.523.524	9.632.493.510.011

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp120.925.758.512.257 merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang, atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran serta diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun.

Beberapa Piutang PNBPN pada KL yang mempunyai nilai cukup signifikan, yaitu Piutang PNBPN pada Kejaksaan sebesar Rp12.570.632.222.592 merupakan piutang dari uang pengganti, denda tilang dan sewa rumah dinas, Piutang PNBPN pada Kementerian ESDM sebesar Rp9.399.082.826.374 merupakan piutang yang berasal dari luran Royalty dan luran Tetap KK/IUP dan PKP2B, Piutang PNBPN pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp2.067.471.003.070 berasal dari tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi, tunggakan ganti rugi tegakan, dan Piutang PNBPN pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp2.780.032.927.625 berasal dari Biaya Hak Penyelenggaraan telekomunikasi dan pengenaan denda.

Rincian Piutang Bukan Pajak pada KL per 31 Desember 2012 dapat dilihat pada **Daftar 13**.

Piutang Bukan Pajak pada BUN per 31 Desember 2012 terdiri dari:

(dalam rupiah)

*Piutang Bukan Pajak di
BUN Rp92,67triliun*

Piutang PNBPN	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Piutang Dividen dan Denda pada BA 999.03:		
Nilai Bruto	185.384.473.276	54.914.355.161
Penyisihan	(100.617.241.298)	(51.548.429.777)
Nilai Bersih	84.767.231.978	3.365.925.384
2. Piutang pada BA 999.05		
Nilai Bruto	3.913.204.981.704	419.570.214.233
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	3.913.204.981.704	419.570.214.233
3. Piutang pada BA 999.07:		
Nilai Bruto	1.142.775.784.247	878.939.094.800
Penyisihan	(5.713.878.921)	(4.394.695.474)
Nilai Bersih	1.137.061.905.326	874.544.399.326
4. Piutang pada BA 999.08:		
Nilai Bruto	211.015.741.654	7.438.160.200
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	211.015.741.654	7.438.160.200
5. Piutang PT PPA pada BA 999.99:		
Nilai Bruto I	2.816.000.000	2.786.071.531
Penyisihan	(2.590.720.000)	-
Nilai Bersih	225.280.000	2.786.071.531
6. Piutang Migas pada BA 999.99:		

Nilai Awal	7.623.335.855.030	5.145.286.422.767
Penyisihan	(470.531.669.198)	(262.082.042.787)
Nilai Bersih	7.152.804.185.832	4.883.204.379.980
7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset Eks Pertamina pada BA 999.99:		
Nilai Awal	2.804.109.072.920	-
Penyisihan	(14.020.545.365)	-
Nilai Bersih	2.790.088.527.555	-
8. Piutang pada BA 999.99 - Bank Dalam Likuidasi		
Nilai Bruto	10.692.391.724.314	10.953.666.946.224
Penyisihan	(10.573.232.359.354)	(10.912.573.238.618)
Nilai Bersih	119.159.364.960	41.093.707.606
9. Piutang pada BA 999.99 - Belanja Pensiun		
Nilai Bruto	42.120.486.400	34.940.343.422
Penyisihan	-	-
Nilai Bersih	42.120.486.400	34.940.343.422
10. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA		
Nilai Bruto	63.722.116.582.074	-
Penyisihan	(58.624.347.255.508)	-
Nilai Bersih	5.097.769.326.566	-
11. Piutang pada BA 999.99 – Aset Kredit yang diserahkan kepada PT PPA		
Nilai Bruto	2.334.964.266.710	-
Penyisihan	(2.148.167.125.373)	-
Nilai Bersih	186.797.141.337	-
Piutang PNB (Bruto)	92.674.234.968.329	17.497.541.608.338
Total Penyisihan	(71.939.220.795.017)	(11.230.598.406.656)
Piutang PNB (Bersih)	20.735.014.173.312	6.266.943.201.682

1. Piutang Dividen dan Denda (BA 999.03) sebesar Rp185.384.473.276 terdiri dari:

a. Piutang Lancar sebesar Rp39.255.985.379 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (0,5%)	Nilai Bersih
1. PT PDI P Batam	85.865.000	429.325	85.435.675
2. PT. Perkebunan Nusantara IX	1.450.120.379	7.250.602	1.442.869.777
3. Perum Perumnas	500.000.000	2.500.000	497.500.000
4. PT. Perkebunan Nusantara II	1.500.000.000	7.500.000	1.492.500.000
5. PT Inhutani I	600.000.000	3.000.000	597.000.000
6. PT Inhutani V	120.000.000	600.000	119.400.000
7. PT Pelindo II	35.000.000.000	175.000.000	34.825.000.000
Jumlah	39.255.985.379	196.279.927	39.059.705.452

b. Piutang Diragukan sebesar Rp91.415.053.053 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (50%)	Nilai Bersih
1. PT PDI P Batam	59.419.638	29.709.819	29.709.819
2. Perum Perumnas	67.225.637.648	33.612.818.824	33.612.818.824
3. PT. Perkebunan Nusantara II	19.717.527.690	9.858.763.845	9.858.763.845
4. PT Inhutani I	4.412.468.076	2.206.234.038	2.206.234.038
Jumlah*)	91.415.053.052	45.707.526.526	45.707.526.526

*) selisih antara data neraca dengan data piutang diragukan sebesar Rp1 karena pembulatan

c. Piutang Macet sebesar Rp54.713.434.845 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Nama BUMN	Jumlah	Penyisihan Piutang tidak Tertagih (100%)	Nilai Bersih
1. PT. Istaka Karya	6.391.154.934	6.391.154.934	-
2. PT. Bina Karya	566.628.402	566.628.402	-
3. PT. Balai Pustaka	786.749.799	786.749.799	-
4. PT. Industri Sandang Nusantara	43.586.982.444	43.586.982.444	-
5. PT Inhutani V	3.381.919.266	3.381.919.266	-
Jumlah	54.713.434.845	54.713.434.845	-

Dalam piutang dividen tersebut di atas, belum termasuk dividen tahun 2011 dari PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebesar Rp956.493.260.000,00, dimana pada Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan telah ditetapkan sebagai dividen dalam bentuk saham kepada para pemegang saham. Keputusan pemberian dividen dalam bentuk saham ini, mengakibatkan perubahan nilai modal saham yang dimiliki oleh Pemerintah pada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Perubahan nilai modal disetor dari dividen saham tersebut, telah dituangkan dalam perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

Dividen saham yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan dicatat dan diakui sebagai penerimaan dividen, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah tentang Penyertaan Modal Negara kepada PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang berasal dari penerimaan dividen tahun 2011 tersebut. Pemerintah akan mengalokasikan penerimaan dari dividen dan pelaksanaan penyertaan modal negara dari penerimaan dividen tersebut pada APBN-P Tahun 2013.

2. Piutang pada BA 999.05 per 31 Desember 2012 sebesar Rp3.913.204.981.704 merupakan piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran (lebih salur) Dana Perimbangan. Lebih salur tersebut akan dikompensasikan dengan pembayaran Dana Perimbangan TA 2013.
3. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Subsidi (BA 999.07) sebesar Rp1.142.775.784.247 merupakan Piutang yang berasal dari kelebihan pembayaran atas subsidi Pangan berdasarkan hasil audit BPK tahun 2011 dan tahun 2012 masing-masing sebesar Rp435.113.206.842 dan Rp707.662.577.405.
4. Piutang pada Bagian Anggaran Belanja Lain-Lain (BA 999.08) sebesar Rp211.015.741.654 terdiri dari:
 - a. Piutang pada Perum BULOG sebesar Rp2.978.120.000; dan
 - b. Piutang pada Kementerian Pertanian sebesar Rp208.037.621.654 berupa cadangan benih yang berada di penangkaran yang merupakan nilai stok Cadangan Benih Nasional (CBN) yang berada di penangkar PT Sang Hyang Seri (SHS) dan PT. Pertani sebanyak 16.081.053 kg dalam lima komoditas yaitu Padi Non Hibrida, Padi Hibrida, Jagung Komposit, Jagung Hibrida, dan Kedelai, serta biaya distribusi CBN.
5. Piutang PT PPA sebesar Rp2.816.000.000 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolaan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada Pemerintah, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Saldo Awal (1)	2.786.071.531	2.121.512.481
Koreksi Saldo Awal (2)	88.928.469	755.838
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	295.000.000	38.000.000.000
Dividen atas saham yang dikelola	2.978.000.000	466.040.291
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	-	-
Pokok dan Bunga Bunga atas obligasi yang dikelola	159.445.000.000	156.974.861.111
Redemption Obligasi		
Penjualan dari right saham	-	-
HPA aset lainnya	1.962.000.000	
Jumlah HPA	164.680.000.000	195.440.901.402
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	-	2.627.252.574
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	2.829.000.000	690.648.835
Jumlah Penerimaan (3)	167.509.000.000	198.758.802.811
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	121.000.000	100.414.305
Imbalan Pengelolaan Aset	48.899.000.000	50.337.375.239
PPN atas Imbalan Pengelolaan Aset	4.890.000.000	5.033.737.524
PPN atas Penggantian Biaya Pengelolaan	12.000.000	10.041.430
Biaya aset periode sebelumnya	-	-
Imbalan Kinerja	-	1.363.997.000
PPN Imbalan Kinerja	-	136.399.700
Tunggakan biaya/biaya aset dengan penugasan khusus	-	-
Jumlah Pengurangan (4)	53.922.000.000	56.981.965.198
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((5) = (1) + (2) + (3) - (4))	116.462.000.000	143.899.105.932
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (6)	113.646.000.000	141.113.034.401
Jumlah HPA yang masih harus disetor (7) = (5) - (6)	2.816.000.000	2.786.071.531

6. Piutang Migas pada BA 999.99 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Piutang pada PT Pertamina	57.925.277.546	625.801.393.360
Piutang Migas Lainnya	7.565.410.577.484	4.519.485.029.407
Piutang Migas (Bruto)	7.623.335.855.030	5.145.286.422.767
Penyisihan	(470.531.669.198)	(262.082.042.787)
Piutang Migas (Netto)	7.152.804.185.832	4.883.204.379.980

Rincian Piutang PT Pertamina sebesar Rp57.925.277.546 terdiri dari USD1,224,469 dan Rp46.084.659.028.

Uraian	USD	Rp
Nilai Lawan		46.084.659.028
Ekspor Minyak Mentah	514	-
Natural Gas	999.319	-
LPG	224.636	-
Jumlah	1.224.469	46.084.659.028
Total (setelah konversi ke rupiah)		57.925.277.546

Rincian Piutang Non PT Pertamina sebesar USD782,358,901 ekuivalen dengan Rp7.565.410.577.484 terdiri dari:

No	Piutang	USD
1	Penjualan Minyak Bumi	68,402,752.100
2	Penjualan Gas Alam	165,902,126.678
	a. Melalui <i>Trustee</i>	158,397,155.572
	1) Ekspor LNG	-
	2) Ekspor Gas Alam	128,361,674.870
	3) Domestik Gas Alam	30,035,480.702
	4) Domestik LPG	-
	5) Domestik LNG	-
	b. Melalui <i>Non Trustee</i> (Kewajiban KKKS)	7,504,971.106
	1) Ekspor LPG	248,670
	2) Domestik Gas Alam	7,504,722.436
3	<i>Overlifting</i> KKKS	544,294,203.780
	a. Minyak Bumi	343,025,279.252
	b. Gas Alam	201,268,924.528
4	Lainnya	3,759,818.940
	a. Bonus Produksi	3,000,025.000
	b. Transfer Material	759,793.940
	Total Piutang	782,358,901.498

7. Piutang Bukan Pajak pemanfaatan aset eks Pertamina pada BA 999.99 sebesar Rp2.804.109.072.920 terdiri dari:

- Piutang sewa tanah di Jalan Terogong 33, Jakarta Selatan oleh Jakarta International School sebesar Rp65.875.527.324; dan
- Piutang sewa aset oleh PT Pertamina (Persero) c.q. PT Pertamina EP sebesar Rp2.738.233.545.596.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.6/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa antara Menteri Keuangan dan Jakarta International School dan surat Nomor S-533/MK.6/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, atas penggunaan lahan di Jalan Terogong 33, Jakarta Selatan periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 (46 bulan) oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa sebesar Rp90.677.717.599.

Pada tanggal 14 Desember 2012, pihak Jakarta International School telah melakukan pembayaran sewa sebesar 50% melalui setoran ke Rekening Kas Umum Negara, sehingga masih terdapat Piutang PNP dari sewa BMN sebesar Rp45.338.858.800.

Selanjutnya, untuk perpanjangan sewa, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-150/MK.6/2013 tanggal 26 Maret 2013 hal Sewa Tanah di Jalan Terogong 33 oleh Jakarta International School, telah ditetapkan pengenaan sewa periode 1 Maret 2012 s.d. 28 Februari 2013 (12 bulan) sebesar Rp20.536.668.524.

Berdasarkan Laporan Keuangan PT Pertamina (Persero) Tahun 2012, diketahui terdapat pencatatan Hutang Kepada Pemerintah berupa sewa BMN eks Pertamina yang digunakan oleh PT Pertamina sejak tahun 2003 s.d. 2012, dengan total nilai terhutang per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp2.738.233.545.596.

8. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang pada 20 Bank Dalam Likuidasi (BDL) terdiri dari:

(dalam Rp)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah	8.045.563.970.917	8.298.437.312.747
5 BDL eks Dana Penjaminan Pemerintah	2.646.827.753.397	2.655.229.633.477
Nilai Bruto	10.692.391.724.314	10.953.666.946.224
Penyisihan	(10.573.232.359.354)	(10.912.573.238.618)
Nilai Bersih	119.159.364.960	41.093.707.606

a. Piutang pada 15 BDL eks Dana Talangan Pemerintah berasal dari.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Dana BLBI BDL yang di- <i>cessie</i> -kan	11.888.938.781.558	11.888.938.781.558
Dikurangi:		
- Pengembalian s.d. Desember 2006	(2.730.645.774.151)	(2.730.645.774.151)
- Pengembalian tahun 2007	(228.053.353.977)	(228.053.353.977)
- Pengembalian tahun 2008	(323.144.463.070)	(323.144.463.070)
- Pengembalian tahun 2009	(140.764.168.751)	(140.764.168.751)
- Pengembalian tahun 2010	(84.175.667.811)	(84.175.667.811)
- Pengembalian tahun 2011	(83.718.041.051)	(83.718.041.051)
- Pengembalian tahun 2012	(252.873.341.830)	
Jumlah	8.045.563.970.917	8.298.437.312.747

Dari 15 BDL, 13 BDL telah melaksanakan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Tim Likuidasi kepada Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan dengan, satu BDL yaitu Bank Umum Majapahit Jaya telah melaksanakan RUPS pembubaran Tim Likuidasi, dan satu BDL belum melakukan penandatanganan BAST Aset, yaitu PT Bank Jakarta. Rincian Piutang 15 BDL lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 14**.

b. Piutang pada lima BDL eks Dana Penjaminan merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap lima BDL yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan bank pembayar PT BNI (Persero), dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011 (audited)	31 Desember 2010 (audited)
Total dana BLBI BDL yang di- <i>cessie</i> -kan	3.321.282.950.812	3.321.282.950.812
Dikurangi:		
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2006	(9.000.000.000)	(9.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2007	(28.500.000.000)	(28.500.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2008	(15.000.000.000)	(15.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2009	(366.663.664.470)	(366.663.664.470)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2010	(146.889.652.865)	(146.889.652.865)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2011	(100.000.000.000)	(100.000.000.000)
- Pengembalian dari Tim Likuidasi Th 2012	(8.401.880.081)	
Jumlah*)	2.646.827.753.396	2.655.229.633.477

*) selisih antara data neraca dengan rincian piutang sebesar Rp1 karena pembulatan

9. Piutang pada BA 999.99 berupa Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp42.120.486.400 terdiri dari:

a. Pengembalian Setoran DAMU Pensiun Bulan Januari s.d. Juni 2012 sebesar Rp19.488.628.600;

- b. Pengembalian Setoran damu Pensiun Bulan Juli s.d. Desember 2012 sebesar Rp20.163.161.100; dan
- c. Pengembalian Setoran Damu Pensiun Rapel dan Gaji ke 13 Tahun 2012 sebesar Rp2.468.696.700.

Seluruh Piutang Belanja Pensiun sebesar Rp42.120.486.400 telah dilunasi dan telah disetorkan ke kas negara pada TA 2013 sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak TA 2013.

10. Piutang pada BA 999.99 sebesar Rp63.722.116.582.074, terdiri dari Piutang Aset Kredit eks BPPN sebesar Rp57.875.238.023.263 dan eks Kelolaan PT PPA sebesar Rp5.846.878.558.811. Piutang Aset Kredit eks BPPN dan eks Kelolaan PT PPA yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp5.097.769.326.566, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp63.722.116.582.074 dikurangi penyisihan sebesar Rp58.624.347.255.508. Piutang tersebut terdiri dari:

(dalam rupiah)

Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA	Jumlah
Aset kredit eks BPPN	57.875.238.023.263
Eks Kelolaan PT PPA	5.846.878.558.811
Piutang (Bruto)	63.722.116.582.074
Penyisihan	(58.624.347.255.508)
Piutang (Bersih)	5.097.769.326.566

Aset eks BPPN sebesar Rp57.875.238.023.263 merupakan aset Pemerintah hasil penyitaan oleh pemerintah karena para debitor tidak mampu melunasi hutangnya kepada Pemerintah atas fasilitas likuiditas yang dikururkan Pemerintah pada saat terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998. Aset-aset tersebut pada awalnya dikelola oleh BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap pemberian dana talangan kepada perbankan yang CAR (*Capital Adequate Ratio*) di bawah batas minimal yang ditetapkan BI. Setelah BPPN dibubarkan kemudian sebagian pengelolaannya beralih pada Tim Pemberesan BPPN yang diketuai langsung oleh Menteri Keuangan. Aset-aset yang dikelola oleh Tim Pemberesan BPPN adalah aset-aset yang masih berperkara.

Aset kredit eks BPPN per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp57.875.238.023.263 dan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp 65.071.997.186.144. Perubahan jumlah ini disebabkan oleh adanya pembayaran dan/atau pelunasan oleh debitor, koreksi jumlah utang, pengembalian pengurusan piutang negara oleh PUPN kepada Penyerah Piutang (dhi. Kantor Pusat DJKN), dan adanya revaluasi pada tahun 2012 atas hasil inventarisasi dan penilaian (IP) sisa aset eks BPPN tahun 2011. Selain itu, perubahan juga disebabkan adanya perubahan struktur penyajian aset kredit eks BPPN pada laporan keuangan Tahun 2012 yakni memasukkan tagihan PKPS menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aset kredit eks BPPN.

Sebagai tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK tahun 2011, maka pada tahun 2012 dilakukan verifikasi ulang atas hasil IP Tahun 2011 sebanyak 1.319 berkas dan menunjukkan keberadaan piutang tersebut dengan dokumen pendukung berupa dokumen pengalihan piutang dari Bank Asal kepada BPPN (*Cessie*).

Aset kredit eks kelolaan PT PPA sebesar Rp5.846.878.558.811 merupakan hak tagih atau piutang eks BPPN yang semula diserahkan pengelolaannya kepada PT PPA kemudian dikembalikan ke Menteri Keuangan sesuai berita acara serah terima tanggal 27 Februari 2009. Pengelolaan atas aset eks kelolaan PT PPA ini oleh Kementerian Keuangan dilakukan melalui mekanisme penyerahan kepada PUPN, namun sebagian aset

kredit ini masih dalam pengelolaan Kantor Pusat DJKN.

Pada LKPP Tahun 2011 Aset kredit eks BPPN dan Tagihan PKPS dicatat sebagai Aset Lainnya eks BPPN. Rincian Piutang Aset Kredit Eks BPPN dan Eks Kelolaan PT PPA dapat dilihat pada **Daftar 15**.

11. Piutang Lain-lain pada BA 999.99 berupa Piutang Aset Kredit yang Diserahkankekelolaan kepada PT PPA sebesar Rp2.334.964.266.710 merupakan aset kredit yang sebelumnya berasal dari BPPN yang tidak terkait dengan perkara, yang dikelola oleh PT PPA berdasarkan perjanjian serah-keleola aset antara Menteri Keuangan dan PT PPA tanggal 7 Maret 2012.

Rincian Piutang Aset Kredit yang Diserahkankekelolaan kepada PT PPA adalah sebagai berikut.

Debitur	Nilai Aset (dalam Rp)	Nilai Aset (dalam USD)
PT Jaya Perkasa Engineering	151.367.074.750	38,822,432
PT Polysindo Eka Perkasa	459.555.536	960,092
PT Texmaco Jaya	365.572.613	2,435
PT Wastra Indah	10.493.948	-
PT Bina Prima Perdana	470.399.713.486	25,540,008
PT Tuban Petrochemical Industries	1.083.805.023.903	-
Total	1.706.407.434.236	65,324,967
Total (setelah konversi ke Rp)		2.334.964.266.710

C.2.14 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan
TGR Rp366,81 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp366.808.908.475 dan Rp60.470.939.992 merupakan saldo Tagihan TGR pada KL dan BUN yang akan jatuh tempo kurang dari 12 bulan setelah tanggal neraca. Saldo Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp296.853.225.635 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp366.808.908.475 dikurangi penyisihan sebesar Rp69.955.682.840.

Rincian Bagian Lancar TGR pada masing-masing KL dan BUN dapat dilihat pada **Daftar 16**.

C.2.15 Bagian Lancar Penerusan Pinjaman

Bagian Lancar Penerusan
Pinjaman Rp5,32 triliun

Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp5.325.797.572.454 dan Rp5.306.849.159.688. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman terdiri dari:

1. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp4.112.004.157.416 merupakan potensi kewajiban pokok Penerusan Pinjaman yang jatuh tempo sampai dengan akhir tahun 2012. Nilai Bagian Lancar Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.091.444.136.629 yang berasal dari nilai bruto Rp4.112.004.157.416 dikurangi penyisihan sebesar Rp20.560.020.787, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
BUMN	3.559.205.061.823	3.822.754.353.377
BUMD	384.443.942.135	453.602.028.304
Pemda	64.970.519.686	76.293.160.709

Lainnya	100.085.268.993	109.745.805.386
RIDL	3.299.364.779	-
Nilai Bruto	4.112.004.157.416	4.462.395.347.776
Penyisihan	(20.560.020.787)	(22.311.976.739)
Nilai Bersih	4.091.444.136.629	4.440.083.371.037

2. Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman sebesar Rp1.213.793.415.038 merupakan piutang yang terkait dengan Penerusan Pinjaman, terdiri dari:

- a. Potensi Tunggakan dapat ditagih sebesar Rp736.967.707.027 yang merupakan bagian hak tagih Pemerintah yang telah jatuh tempo dan menunggak serta memiliki potensi untuk dapat ditagih pada 2012. Berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 12/PB/2011 mengenai Kualitas dan Penyisihan Piutang, piutang disajikan berdasarkan umur piutang. Piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di bawah 12 bulan per tanggal neraca dikategorikan sebagai potensi tunggakan yang dapat ditagih. Sedangkan piutang yang tertunggak dengan kolektibilitas di atas 12 bulan per tanggal neraca diklasifikasikan pada aset lainnya RDI. Jumlah potensi tunggakan yang dapat ditagih terdiri dari piutang pada:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	567.643.657.084
BUMD	131.467.308.183
Pemda	22.935.756.186
Lainnya	14.920.985.574
Nilai Bruto	736.967.707.027
Penyisihan	(97.681.346.302)
Nilai Bersih	639.286.360.725

- b. Piutang Bunga sebesar Rp289.724.637.548 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	248.711.538.497
BUMD	17.970.941.240
Pemda	7.532.262.744
Lainnya (<i>Channeling</i> dan KUMK SUP 005)	15.509.895.067
Nilai Bruto	289.724.637.548
Penyisihan	(1.448.623.188)
Nilai Bersih	288.276.014.360

- c. Piutang Denda yang telah diterbitkan Surat Tagihannya sebesar Rp187.101.070.462 berdasarkan debitur, yaitu:

Uraian	Jumlah (Rp)
BUMN	44.468.788.857
BUMD	139.045.384.728
Pemda	3.586.896.877
Nilai Bruto	187.101.070.462
Penyisihan	(935.505.352)
Nilai Bersih	186.165.565.110

Piutang Lainnya Penerusan Pinjaman pada LKPP Tahun 2011 disajikan pada pos Piutang Lainnya, sedangkan pada LKPP Tahun 2012 disajikan pada pos Bagian Lancar Penerusan Pinjaman.

*Piutang dari Kegiatan
BLU Rp2,47 triliun*

C.2.16 Piutang dari Kegiatan BLU

Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp2.473.903.438.486 dan Rp1.216.391.989.142. Saldo Piutang dari Kegiatan BLU per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.624.780.324.255 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp2.473.903.438.486 dikurangi penyisihan sebesar Rp849.123.114.231. Piutang dari Kegiatan BLU terdiri dari piutang kegiatan operasional BLU sebesar Rp2.391.229.848.357, dan non operasional BLU sebesar Rp82.673.590.129.

Piutang Kegiatan Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	776.749.968.403	250.789.471.050
2. BLU di Kementerian Keuangan	20.520.519.164	14.938.119.944
3. BLU di Kementerian Perindustrian	2.191.005.720	2.465.869.970
4. BLU di Kementerian ESDM	20.153.640.443	14.319.049.849
5. BLU di Kementerian Perhubungan	1.617.931.020	409.502.500
6. BLU di Kementerian Dikbud	393.579.565.638	170.476.463.630
7. BLU di Kementerian Kesehatan	689.346.027.709	651.984.000.111
8. BLU di Kementerian Agama	2.992.342.229	1.911.791.625
9. BLU di Kementerian PU	90.789.338.228	46.058.787.010
10. BLU di Kementerian KUKM	1.178.510.599	2.298.548.194
11. BLU di Kepolisian RI	14.915.843.477	13.590.873.945
12. BLU di BPPT	3.548.440.500	5.779.508.330
13. BLU di LAPAN	250.105.154	246.647.687
14. BLU di Kemen Perumahan Rakyat	11.267.537.247	2.154.033.443
15. BLU di Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas & Pelabuhan Bebas Batam	362.129.072.826	-
Jumlah Nilai Bruto	2.391.229.848.357	1.177.422.667.288
Penyisihan	(836.493.290.147)	(198.298.929.059)
Jumlah Nilai Bersih	1.554.736.558.210	979.123.738.229

Piutang Kegiatan Non Operasional BLU terdiri dari:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BLU di Sekretariat Negara	13.594.201.903	13.078.384.966
2. BLU di Kementerian Keuangan	32.766.356.150	22.027.746.408
3. BLU di Kementerian Perhubungan	42.357.400	62.895.200
4. BLU di Kementerian Dikbud	31.707.607.821	
5. BLU di Kementerian Kesehatan	3.207.152.029	3.462.783.610
6. BLU di Kementerian Agama	1.354.184.936	335.446.062
7. BLU di LAPAN	1.729.890	2.065.608
Jumlah Nilai Awal	82.673.590.129	38.969.321.854
Penyisihan	(12.629.824.084)	(1.160.387.275)
Jumlah Nilai Bersih	70.043.766.045	37.808.934.579

*Piutang Lain-lain Rp0***C.2.17 Piutang Lain-lain**

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp24.977.956.337.945 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas. Piutang Lain-lain pada tahun 2011 merupakan Piutang Lainnya pada Kejaksaan Agung – piutang uang pengganti untuk perkara tindak pidana korupsi, piutang denda dan biaya tilang verstek, piutang sewa rumah dinas, dan piutang sewa BRI, piutang terkait penerusan pinjaman, piutang lebih salur DBH Pajak, piutang pada Kementerian Pertanian berupa cadangan benih nasional, piutang pada 20 Bank BDL, dan piutang belanja pensiun. Piutang tersebut pada LKPP Tahun 2012 disajikan sebagai Piutang Bukan Pajak.

Reklasifikasi piutang Lain-lain menjadi piutang PNBPN menyesuaikan perubahan pada Bagan Akun Standar berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Akun Neraca pada Bagan Akun Standar, dimana akun untuk Piutang Lain-Lain tidak digunakan lagi.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang
Rp136,95 triliun***C.2.18 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang**

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang per 31 Desember 2012 sebesar Rp136.953.775.912.378 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Piutang Pajak	44.550.942.630.944
2. Piutang Bukan Pajak	91.363.128.988.733
3. Bagian Lancar TP/TGR	69.955.682.840
4. Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	120.625.495.630
5. Piutang dari kegiatan BLU	849.123.114.231
Penyisihan Piutang	136.953.775.912.378

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lancar.

1. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Pajak sebesar Rp44.550.942.630.944 merupakan penyisihan Piutang Pajak pada Kementerian Keuangan.
2. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Bukan Pajak sebesar Rp91.363.128.988.733 dapat dilihat pada **Daftar 13**.
3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar TP/TGR sebesar Rp69.955.682.840 dapat dilihat pada **Daftar 16**.
4. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Bagian Lancar Penerusan Pinjaman sebesar Rp120.625.495.630 merupakan penyisihan Bagian Lancar Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
5. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang dari Kegiatan BLU sebesar Rp849.123.114.231 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. BLU di Sekretariat Negara	539.587.324.577
2. BLU di Kementerian Keuangan	745.235.221
3. BLU di Kementerian Perindustrian	373.036.619
4. BLU di Kementerian ESDM	10.900.489.822
5. BLU di Kementerian Perhubungan	48.163.630
6. BLU di Kementerian Dikbud	49.322.263.781
7. BLU di Kementerian Kesehatan	245.396.151.822

8. BLU di Kementerian Agama	93.060.000
9. BLU di Kementerian PU	377.635.698
10. BLU di Kementerian KUKM	160.434.192
11. BLU di Kepolisian RI	84.948.621
12. BLU di BPPT	17.742.203
13. BLU di LAPAN	149.644.995
14. BLU di Kementerian Perumahan Rakyat	56.337.686
15. BLU di BPKPBPB Batam	1.810.645.364
Jumlah	849.123.114.231

C.2.19 Persediaan

*Persediaan
Rp62,02 triliun*

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp62.016.561.796.415 dan Rp59.214.846.453.160 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca KL dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Persediaan	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Persediaan di KL	56.391.184.287.688	56.048.193.411.852
Persediaan di BLU	732.879.110.391	590.795.321.790
Persediaan di BUN	4.892.498.398.336	2.575.857.719.518
Jumlah	62.016.561.796.415	59.214.846.453.160

Persediaan di KL per 31 Desember 2012 terbesar berada di Kementerian Pertahanan sebesar Rp44.647.358.307.542, POLRI sebesar Rp2.514.597.356.111, Kementerian Kesehatan sebesar Rp982.793.939.244, Kementerian Perumahan Rakyat sebesar Rp911.749.448.150, Kementerian Pertanian sebesar Rp905.627.537.236, dan Kementerian ESDM sebesar Rp819.945.422.944. Rincian Persediaan di KL dan BLU dapat dilihat pada **Daftar 17**.

Persediaan di BUN per 31 Desember 2012 sebesar Rp4.892.498.398.336 adalah Persediaan pada BA 999.08 yang merupakan nilai persediaan berdasarkan neraca KL dan Satker Khusus Pengguna Dana BA BUN – Belanja Lainnya (BA BUN - 999.08), yang terdiri dari:

- Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) pada Kementerian Pertanian sebesar Rp146.138.014.925 setara dengan 12.517.368 kg dengan rincian sebagai berikut.

No.	Tahun	kg	Nilai (Rp)
1	Padi Non Hibrida	9.619.007	65.457.342.635
2	Padi Hibrida	437.160	20.678.040.424
3	Jagung Komposit	142.907	1.208.570.421
4	Jagung Hibrida	1.541.434	50.354.661.241
5	Kedelai	776.860	8.439.382.125
Jumlah*)		12.517.368	146.137.996.846

*) selisih antara data neraca dengan data persediaan CBN sebesar Rp18.079 karena pembulatan

- Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) di Neraca 999.08 (BA BUN - Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2012 pada Perum BULOG sebesar Rp3.234.574.665.000 setara dengan kuatam 431.276.622 kg dikalikan dengan biaya perolehan persediaan yang terakhir yaitu Rp7.500/kg. Sedangkan nilai stok CBP berdasarkan harga perolehan per tahun dapat dirinci sebagai berikut.

No.	Tahun	Kuatam (kg)	Harga Perolehan per kg (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2009	9.571.196	5.500	52.641.576.250
2	2011	155.038.760	6.450	1.000.000.000.000
3	2012	266.666.666	7.500	2.000.000.000.000
Jumlah		431.276.622		3.052.641.576.250

Realisasi penyaluran CBP pada Tahun 2012 sebesar 213.813.109,71 kg berdasarkan *Delivery Order* (DO) terdiri dari penyaluran Bencana Alam sebanyak 13.321.928,4 kg dan penyaluran Operasi Pasar Murni Tahun 2012 sebanyak 200.491.181,31 kg.

Penggunaan CBP selama Tahun 2012 dan saldo per 31 Desember 2012 disajikan sebagai berikut.

URAIAN	Kwantum (Kg)	Nilai Neraca	Nominal (Rp)	KETERANGAN
STOK AWAL (Lap Audited) Koreksi Stok Awal	378.838.048,31	6450	2.443.505.411.611	Nilai Persediaan (kwantum x nilai neraca)
	165.000,00	(-)		DO 2011 Telat Melaporkan Sulteng
	223.575,23	(-)		DO 2011 Bencana Alam Koreksi tambah
	378.449.473,08			Stok awal Lap. Div Lur tgl 29/01/2013
	26.408,00	(-)		DO 2011 Koreksi Tambah DKI
	378.423.065,08			
PENAMBAHAN STOK		7500	2.000.000.000.000	Pembelian Pemerintah
STOK AWAL 2012	645.089.731,75			
PENGUNAAN OP (PENDAPATAN NEGARA)				
- DO TA 2011			5.464.249.000	Outstanding OPM TA 2011
- DO TA 2011			1.023.000.000	TA 2011, DO telat melaporkan
- Selama Tahun 2012 (Berdasarkan DO)	200.491.181,31		1.236.825.248.622	Bukti SSBP, tahun 2012
1. Total	200.491.181,31		1.243.312.497.622	Penerimaan pada Tahun 2012
(Outstanding TA 2012 yang belum disetor)			2.978.120.000	
PENGUNAAN BENCANA ALAM				
- DO TA 2012	13.321.928,40			
2. Total	13.321.928,40			
Total Penggunaan (1 + 2)	213.813.109,71			
STOK AKHIR	431.276.622,04	7500	3.234.574.665.288	Nilai Persediaan (kwantum x nilai neraca)

c. Persediaan diberbagai instansi lainnya pengguna BA 999.08 sebesar Rp1.511.785.718.411.

C.2.20 Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp11,45 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp11.453.274.948.550 dan Rp8.195.256.111.510 merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat, pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat, dan lain-lain yang dikelola oleh KL maupun BLU KL dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Kementerian Kehutanan	7.292.664.804	4.223.566.054
2. Kementerian Lingkungan Hidup	42.189.062.456	49.306.342.015
3. Kementerian Koperasi dan UKM	2.517.304.363.535	2.050.276.290.126
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	6.251.054.894.460	3.872.785.113.151
5. Kementerian Pekerjaan Umum	2.635.433.963.295	2.218.664.800.164
Jumlah	11.453.274.948.550	8.195.256.111.510

Dari Dana Bergulir sebesar Rp11.453.274.948.550, terdapat Dana Bergulir yang sumber pembiayaannya berasal dari BA 999.03 sebesar Rp11.411.085.886.094 dan disalurkan melalui BLU pada Kementerian Perumahan Rakyat, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Koperasi dan UKM, dan Kementerian Kehutanan.

Penjelasan masing-masing dana bergulir adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir di Kementerian Kehutanan per 31 Desember 2012 sebesar Rp7.292.664.804 adalah dana bergulir yang dikelola oleh Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan yang berasal dari BA 999.03.
2. Dana Bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp42.189.062.456 dan Rp49.306.342.015 merupakan Dana Bergulir kepada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang merupakan realisasi *Separate Arrangement Agreement* (SAA) antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jerman untuk program *Debt for Nature Swap* (DNS) yang ditandatangani pada tanggal 3 Agustus 2006. Program yang disetujui dalam rangka DNS ini adalah *Financial Assistance for Environmental Investment for Micro and Small Enterprises*. Program ini dijalankan oleh KLH selama 5 tahun, yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010.
3. Dana Bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.517.304.363.535 berasal dari BA 999.03 yang disalurkan kepada Lembaga Pengelolaan Dana bergulir (LPDB) Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
4. Dana Bergulir di Kementerian Negara Perumahan Rakyat per 31 Desember 2012 sebesar Rp6.251.054.894.460 merupakan dana bergulir untuk pembiayaan perumahan yang berasal dari BA 999.03. Pembiayaan perumahan ini merupakan dana yang digulirkan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan menengah bawah untuk Kredit Kepemilikan Rumah Sederhana Sehat (KPRSH).
5. Dana Bergulir di Kementerian Pekerjaan Umum per 31 Desember 2012 sebesar Rp2.635.433.963.295 merupakan hak tagihan BLU BPJT kepada pihak ketiga khususnya Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang telah diberikan pinjaman untuk dana uang ganti rugi pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol.

C.2.21 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Dana Bergulir Diragukan Tertagih minus Rp20,20 triliun

Jumlah Dana Bergulir Diragukan Tertagih per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp20.196.519.935 dan Rp0 merupakan penyisihan yang dibentuk untuk mendapatkan nilai realisasi bersih dana bergulir yang dikelola oleh KL maupun BLU KL dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)	
Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (audited)
1. Kementerian Kehutanan	0
2. Kementerian Lingkungan Hidup	16.080.898.500
3. Kementerian Koperasi dan UKM	4.115.621.435
4. Kementerian Negara Perumahan Rakyat	0
5. Kementerian Pekerjaan Umum	0
Jumlah	20.196.519.935

Secara rinci kebijakan pembentukan nilai realisasi bersih dana bergulir pada masing-masing entitas adalah sebagai berikut.

1. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp0 karena semua penyaluran masih dalam masa tenggang (*grace period*).
2. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp16.080.898.500 merupakan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) yang

telah dilakukan Bank Syariah Mandiri dengan golongan diragukan dan macet. Akumulasi nilai PPAP dengan golongan diragukan dan macet dicatat dan dilaporkan pada akun Dana Bergulir yang Diragukan Realisasinya.

3. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU LPDB KUKM sebesar Rp4.115.621.435 merupakan dana bergulir yang diragukan tertagih, dan dana bergulir yang telah diserahkan pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).
4. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp0 karena semua risiko penyaluran menjadi beban perbankan.
5. Dana Bergulir Diragukan Tertagih pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp0, dengan pertimbangan: (1) BUJT wajib melakukan pelunasan dana talangan pengadaan tanah dimaksud sebelum pelaksanaan konstruksi pembangunan Jalan Tol, (2) sampai dengan saat ini semua dana talangan selalu dibayar oleh BUJT, serta (3) tanah yang ditalangi oleh Dana Bergulir menjadi BMN pada Kementerian Pekerjaan Umum.

C.2.22 Investasi Non Permanen Lainnya

*Investasi Non Permanen
Lainnya Rp7,97 triliun*

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp7.969.545.521.754 dan Rp4.749.737.167.996 merupakan investasi yang dikelola oleh beberapa KL atau BUN, yaitu:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Kementerian Perindustrian	23.044.785.419	37.380.370.139
BLU Pusat Investasi Pemerintah-Kemenkeu	7.927.713.973.835	4.701.776.528.784
Perguruan Tinggi Eks BHMN	18.786.762.500	10.580.269.073
Jumlah	7.969.545.521.754	4.749.737.167.996

Penjelasan masing-masing Investasi Non Permanen Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Investasi non permanen pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp23.044.785.419 merupakan investasi yang terbentuk dari pinjaman kepada perusahaan Industri Tekstil dan Produk Tekstil (ITPT) dalam program SKIM 2 dengan jangka waktu pengembalian sampai dengan lima tahun. Nilai realisasi bersih investasi jangka panjang yang dimiliki oleh Kementerian Perindustrian adalah sebesar Rp14.948.703.604, yang merupakan nilai hasil pengurangan investasi pokok dengan nilai yang dicadangkan sebagai pengurang nilai investasi permanen lainnya sebesar Rp8.096.081.815.
2. Nilai Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (Kementerian Keuangan) merupakan nilai investasi atau pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga sebagai bagian dari kegiatan operasi BLU PIP. Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada BLU PIP adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Investasi atau Penyaluran Kepada Pemerintah Daerah	
1. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type B di Provinsi Sulawesi Tenggara	190.000.000.000
2. Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Type C di Kota Surakarta	32.124.156.924
3. Pembangunan RSUD Type C di Kabupaten Muko Muko	16.715.116.050
4. Pembangunan Pasar Umum Amlapura Timur serta Pusat Seni dan Kerajinan	23.408.109.310
5. Pembangunan Pasar Tradisional Masbagik di Kabupaten Lombok Timur	4.933.258.800

6. Pembangunan Dua Jembatan layang serta peningkatan dan pelebaran tujuh ruas jalan di kota Bandar Lampung	39.770.558.309
7. Pembangunan RSUD Tipe C di Kabupaten Karangasem	6.644.467.500
8. Pembangunan Jalan dan Jembatan di Povinsi Sulawesi Tenggara	19.203.513.300
Total Penyaluran Kepada Pemda	332.799.180.193
Investasi atau Penyaluran Kepada BUMN atau Badan Usaha	
1. Pinjaman dengan Persyaratan Lunak dalam Rangka Pelaksanaan Pasal 22A UU Nomor 2 Tahun 2010 - PLN	7.500.000.000.000
2. Pengadaan 1200 Unit Gerbong PPCW- PT INKA	94.914.793.642
Total Penyaluran Kepada BUMN/Badan Usaha	7.594.914.793.642
Total Investasi/Penyaluran PIP	7.927.713.973.835

3. Investasi jangka panjang non permanen pada Perguruan Tinggi Eks Badan Hukum Milik Negara sebesar Rp18.786.762.500 merupakan investasi yang dikelola oleh:
- Universitas Gadjah Mada dengan nilai sebesar Rp13.308.637.500 yang merupakan *joint operation* dengan pihak ketiga; dan
 - Institut Teknologi Bandung dengan nilai sebesar Rp5.478.125.000 merupakan investasi dalam bentuk obligasi.

C.2.23 Cadangan Penurunan Nilai Investasi Non Permanen Lainnya

*Cadangan Penurunan
Nilai Investasi Non
Permanen Lainnya minus
Rp8,09 Miliar*

Cadangan Penurunan Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp8.096.081.815 dan Rp0 merupakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya pada investasi non permanen SKIM 2 yang dikelola oleh Kementerian Perindustrian. Kebijakan pencadangan penurunan nilai investasi non permanen lainnya mulai diterapkan pada LKPP Tahun 2012 *audited* dengan kebijakan bahwa nilai yang dicadangkan adalah sebesar:

- investasi yang diragukan pengembaliannya dengan bobot pengurang sebesar 50%, dalam hal debitur hanya melakukan pembayaran paling banyak sebanyak tiga kali pembayaran dalam 1 (satu) tahun; dan
- investasi macet dengan bobot pengurang sebesar 100%, dalam hal debitur sama sekali tidak melakukan pembayaran dalam satu tahun.

Pembentukan cadangan penurunan nilai Investasi Non Permanen Lainnya dilakukan dalam rangka pembentukan nilai realisasi bersih investasi non permanen. Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Akuntansi Investasi, investasi non permanen disajikan pada laporan keuangan sesuai dengan nilai realisasi bersihnya.

C.2.24 Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

PMN Rp912,87 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp912.877.699.396.801 dan Rp736.991.554.233.014 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, Lembaga Keuangan Internasional, Badan Usaha Lainnya, BI, dan LPS dengan jumlah:

(dalam rupiah)

PMN	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. BUMN	677.338.383.256.170	589.766.661.926.137
2. BHMN	1.904.129.212.677	1.168.034.176.846
3. Non BUMN	5.178.641.951.881	4.261.956.608.163
4. Lembaga Internasional	38.497.052.327.727	35.495.913.032.610

5. Badan Usaha Lainnya	434.267.346	224.634.258
6. Bank Indonesia	166.468.468.000.000	89.572.275.000.000
7. Lembaga Penjamin Simpanan	23.490.590.381.000	16.726.488.855.000
Jumlah	912.877.699.396.801	736.991.554.233.014

PMN pada BUMN

1. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp677.338.383.256.170 dan Rp589.766.661.926.137 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 tersebut merupakan nilai PMN pada 141 BUMN sebesar Rp656.663.652.845.436 dan lima BUMN/Lembaga dibawah pembinaan Kementerian Keuangan sebesar Rp20.674.730.410.734. Status laporan keuangan pada 141 BUMN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah
<i>Audited</i> 2012	129	660.681.516.511.192
<i>Unaudited</i> 2012	8	(3.952.371.613.911)
PP Pendirian	1	97.952.690.300
Prognosa 2012	1	(100.305.000.000)
<i>Unaudited</i> 2010	1	7.247.892.217
<i>Audited</i> 2005	1	(70.387.634.362)
Jumlah	141	656.663.652.845.436

Terdapat laporan keuangan BUMN yang disajikan dalam mata uang Dollar Amerika, yaitu PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.; PT Krakatau Steel (Persero) Tbk.; PT. Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.; dan PT. Pertamina. Dalam melakukan konversi ke dalam mata uang Rupiah, digunakan kurs tengah BI pada tanggal 28 Desember 2012, yaitu Rp9.670/1USD untuk akun-akun selain nilai modal disetor, mengingat akun modal disetor menggunakan *historical cost* untuk konversinya.

Rincian PMN pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 18**.

Nilai PMN pada BUMN 31 Desember 2012 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 21 BUMN dengan nilai sebesar Rp38.575.956.501.883. (**Daftar 19**)

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2012 termasuk PMN pada lima BUMN sebesar Rp20.674.730.410.734 yang berada di bawah pembinaan Kementerian Keuangan yaitu Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia sebesar Rp7.550.047.000.000, PT Sarana Multigriya Financial sebesar Rp2.647.607.277.078, PT Sarana Multi Infrastruktur sebesar Rp4.310.317.058.916, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp4.917.117.265.000, dan PT Geo Dipa Energi sebesar Rp1.249.641.809.740. (**Daftar 20**)

Penambahan nilai PMN pada Perusahaan Negara antara lain disebabkan oleh:

- a. Perubahan Nilai Ekuitas pada masing-masing Perusahaan Negara dari Aktivitas Operasi.

Perubahan ekuitas Perusahaan Negara terutama disebabkan atas pembentukan cadangan yang dilakukan perusahaan, yang bersumber dari laba bersih yang tidak disetorkan menjadi dividen. Cadangan yang dibentuk akan menambah nilai ekuitas masing-masing Perusahaan Negara. Selain karena pembentukan cadangan, perubahan nilai ekuitas dapat disebabkan adanya saldo laba tahun berjalan yang belum ditetapkan penggunaannya.

b. Penambahan Nilai PMN

Selama periode 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, Pemerintah memberikan tambahan Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2012 kepada beberapa Perusahaan Negara, yaitu:

- 1) penambahan PMN kepada PT Dirgantara Indonesia (Persero), sebesar Rp1.400.000.000.000;
- 2) penambahan PMN kepada PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero) sebesar Rp831.000.000.000;
- 3) penambahan PMN kepada Perum Jaminan Kredit Indonesia sebesar Rp1.169.000.000.000;
- 4) penambahan PMN kepada PT PAL Indonesia sebesar Rp600.000.000.000;
- 5) penambahan PMN kepada PT Pindad sebesar Rp300.000.000.000;
- 6) penambahan PMN kepada PT Industri Kapal Indonesia, sebesar Rp200.000.000.000;
- 7) penambahan PMN kepada PT Garam sebesar Rp100.000.000.000.

c. Perubahan persentase kepemilikan negara

- 1) Penerbitan saham baru PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
- 2) *Initial Public Offering* PT Waskita Karya (Persero)

d. Perubahan jumlah komposisi Perusahaan Negara

- 1) Penggabungan PT Pradnya Paramita (Persero) ke dalam PT Balai Pustaka (Persero). Besarnya nilai kekayaan Negara pada PT Pradnya Paramita (Persero) yang akan dialihkan ke dalam PT Balai Pustaka (Persero) telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 82/KMK.06/2006.
- 2) Pengambilan bagian saham oleh Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset mengakibatkan kepemilikan saham Negara secara langsung pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya menjadi 1% (satu persen) dan kepemilikan saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Nindya Karya menjadi 99% (sembilan puluh sembilan persen).
- 3) Dengan transaksi tersebut, PT Nindya Karya berubah statusnya dari BUMN menjadi Non-BUMN, karena kepemilikan negara pada PT Nindya Karya terdilusi menjadi 1%.
- 4) Pendirian Perum Layanan Penyelenggaraan Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia, dengan modal awal sebesar Rp97.952.690.300 yang berasal dari pengalihan barang milik negara pada Kementerian Perhubungan yang pengadaannya bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 dan 2011. Pada tahun 2012, perusahaan belum beroperasi, karena perangkat perusahaan baru terbentuk pada tahun 2013, dan mulai beroperasi pada tahun 2013.
- 5) Pemerintah melakukan pengurangan PMN pada PT Perusahaan Pengelola Aset sebesar Rp804.671.584.634 yang antara lain sebesar Rp474.992.100.000 merupakan tambahan modal disetor PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) pada PT Waskita Karya. Awalnya komposisi kepemilikan modal PT Waskita Karya adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) sebesar 99% dan Pemerintah sebesar 1%, setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah

Nomor 86 Tahun 2012 tentang Pengurangan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Pengelola Aset, maka kepemilikan Pemerintah menjadi 100% pada PT Waskita Karya, sehingga status PT Waskita Karya menjadi Perusahaan Negara PT Waskita Karya (Persero).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 18**.

PMN pada BHMN

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 masing-masing sebesar Rp1.904.129.212.677 dan Rp1.168.034.176.846 dengan merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

BHMN	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
a. Institut Pertanian Bogor (IPB)	874.896.460.513	879.080.915.526
b. Universitas Airlangga	437.711.135.427	412.443.985.336
c. BP MIGAS	591.521.616.737	(123.490.724.016)
Jumlah	1.904.129.212.677	1.168.034.176.846

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), seluruh penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP, untuk itu seluruh Perguruan Tinggi Negeri (PTN) BHMN harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai BHP sesuai ketentuan UU tersebut. Namun, sebelum dilakukannya penyesuaian perubahan bentuk dan tata kelola menjadi BHP, telah ditetapkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 tanggal 31 Maret 2010 dalam sidang putusan uji materi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang memutuskan antara lain bahwa Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang memberikan landasan hukum penyelenggara pendidikan dalam bentuk BHMN tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan juga menyatakan UU BHP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Sebagai tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan yang menetapkan antara lain PTN BHMN ditetapkan sebagai perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, semua Perguruan Tinggi eks Badan Hukum Milik Negara (BHMN) berubah status hukumnya menjadi Satuan Kerja Badan Layanan Umum, dengan klausul masa transisi untuk pengalihan aset Perguruan Tinggi Eks BHMN dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013.

Mengingat pengalihan aset dilakukan paling lambat pada tanggal 28 September 2013, telah diambil kebijakan bahwa aset Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara yang telah ditetapkan menjadi kekayaan negara dipisahkan, yaitu pada Universitas Airlangga dan Institut Pertanian Bogor, per 31 Desember 2012 tetap dicatat sebagai investasi permanen pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012, dengan *cut off* pencatatan

per 31 Desember 2010, dengan dilakukan beberapa penyesuaian. Kebijakan ini diambil dalam masa transisi, sambil menunggu selesainya proses pengalihan kekayaan negara dipisahkan menjadi kekayaan negara tidak dipisahkan/barang milik negara pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Universitas Airlangga menggunakan data Laporan Keuangan Universitas Airlangga Tahun 2012 *audited* dengan dilakukan beberapa penyesuaian atas aset-aset lancar dan aset-aset yang telah dicatat atau dialihkan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Nilai penyertaan modal negara/kekayaan negara dipisahkan pada Institut Pertanian Bogor per 31 Desember 2012 masih menggunakan data Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 *unaudited*.

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012 tentang Pembubaran BPMIGAS, Mahkamah Konstitusi telah mencabut dasar hukum yang mengatur dan menetapkan BPMIGAS, sehingga per 31 November 2012 BPMIGAS telah dibubarkan.

Menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 dan Nomor 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 telah diatur hal-hal antara lain:

- a. penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sampai dengan diterbitkannya undang-undang baru di bidang minyak dan gas bumi, dilaksanakan oleh satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas);
- b. dalam rangka Penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi, SKK Migas memanfaatkan aset eks BPMIGAS dengan prinsip optimalisasi dan efisiensi;
- c. biaya operasional dalam rangka pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi berasal dari jumlah tertentu dari bagian negara dari setiap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi; dan
- d. biaya operasional yang diperlukan dalam pengelolaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran BPMIGAS tahun 2012.

Sesuai dengan surat Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM Nomor S-33/MK.05/2013 tanggal 16 Januari 2013 hal Penyajian Laporan Keuangan BPMIGAS pada LKPP Tahun 2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

- a. BPMIGAS menyusun Laporan Keuangan per 13 November 2012;
- b. Pendanaan BPMIGAS tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) BA 999.03;
- c. LKPP Tahun 2012 menyajikan BPMIGAS sebagai investasi permanen PMN sebesar *net equity* per 13 November 2012; dan
- d. Laporan Keuangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2012 mengungkapkan BPMIGAS dan Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Atas kebijakan yang telah diambil terkait BPMIGAS tersebut, nilai investasi permanen pada BPMIGAS yang dicatat pada Laporan Keuangan BA 999.03 Tahun 2012 adalah nilai aset bersih yang dimiliki oleh BPMIGAS per 13 November 2012, berdasarkan Laporan Keuangan BPMIGAS (*unaudited*) per 13 November 2012 yang telah disusun oleh BPMIGAS. Sampai dengan LKPP Tahun 2012 (*audited*) diserahkan kepada BPK, proses audit terhadap neraca tersebut belum selesai dilakukan.

Ekuitas BPMIGAS per 13 November 2012 naik sebesar Rp715.012.340.753 dari posisi per 31 Desember 2011. Kenaikan tersebut akibat dari peningkatan Surplus Kinerja Bersih sebesar Rp437.907.203.984 dan kenaikan Ekuitas Lainnya sebesar Rp277.105.136.769.

Terkait transaksi yang terjadi setelah tanggal 13 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, tidak terdapat pendapatan yang diperoleh melainkan terdapat belanja sebesar Rp393.006.130.829. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan nilai ekuitas menjadi sebesar Rp97.314.910.162. Transaksi setelah tanggal 13 November 2012 dilaporkan di Badan Lainnya sebagai Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya.

PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN)

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp5.178.641.951.881, merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% sampai dengan 50% disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*).

Perubahan nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN per 31 Desember 2012 disebabkan oleh:

- a. Perubahan total ekuitas pada Non-BUMN dengan kepemilikan Pemerintah antara 20% sampai dengan 50%, karena perhitungan Pemerintah menggunakan metode ekuitas;
- b. Perubahan komposisi Non-BUMN, yaitu PT Waskita Karya yang berubah statusnya menjadi BUMN, dikarenakan peningkatan kepemilikan Negara Republik Indonesia, PT Nindya Karya berubah status menjadi non-BUMN, dikarenakan penambahan modal yang dilakukan oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset dalam rangka restrukturisasi perusahaan, penambahan *Asean Infrastructure Fund* sebagai salah satu non-BUMN, yang merupakan perusahaan bentukan negara-negara Asean dalam bidang pembiayaan infrastruktur dan pengurangan *Asean Aceh Fertilizer*, karena berdasarkan penelitian lebih lanjut, keterwakilan Indonesia dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia, sehingga penyertaan telah tercatat pada LK konsolidasi PT Pupuk Indonesia (Persero);
- c. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Dollar Amerika. Per tanggal 28 Desember 2012 kurs tengah BI adalah 1 USD = Rp9.670, sedangkan per tanggal 30 Desember 2011 adalah 1 USD = Rp9.068. Perubahan kurs tengah BI berpengaruh pada kepemilikan Pemerintah pada PT Freeport, PT Prasadha Pamunah Limbah Industri, *Asean Infrastructure Fund*, dan PT Indonesia Asahan Aluminium. Pada ketiga perusahaan tersebut, Laporan Keuangan disajikan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, sehingga harus dikonversi ke dalam mata uang Rupiah, untuk menghitung kepemilikan Pemerintah;
- d. Adanya perubahan kurs tengah BI untuk nilai tukar Ringgit Malaysia per tanggal 28 Desember 2012 kurs tengah BI adalah 1 MYR = Rp3.159,625, sedangkan per tanggal 30 Desember 2011 adalah 1 MYR = Rp2.852,925. Perubahan kurs tengah BI untuk Ringgit Malaysia berpengaruh pada kepemilikan di *Asean Bintulu Fertilizer*, mengingat Laporan Keuangan penyertaan modal negara dan Laporan Keuangan

Asean Bintulu Fertilizer menggunakan mata uang Ringgit Malaysia; dan

- e. keikutsertaan Negara Republik Indonesia dalam Pendirian *Asean Infrastructure Fund*, yang merupakan perusahaan patungan negara-negara Asean bersama *Asean Development* dalam bidang pembiayaan infrastruktur. Kepemilikan negara-negara Asean pada perusahaan tersebut secara total adalah sebesar 68,10% dan kepemilikan ADB adalah sebesar 31,90%. Indonesia sendiri mempunyai kepemilikan sebesar 25,52% pada *Asean Infrastructure Fund*. Karena sampai dengan saat ini Perusahaan tersebut belum beroperasi, karena masih dalam proses penyempurnaan organisasi, nilai penyertaan Indonesia masih menggunakan nilai penyertaan yang diberikan, yang disesuaikan dengan nilai tukar per 31 Desember 2012.

Pada non-BUMN dengan kepemilikan negara di bawah 20%, nilai penyertaan negara pada Non-BUMN tersebut tetap, sepanjang tidak ada penambahan penyertaan yang dilakukan Pemerintah, mengingat perhitungan kepemilikan negara menggunakan metode biaya. Berdasarkan hal tersebut, nilai kepemilikan negara pada Non-BUMN tersebut tidak tergantung pada status laporan keuangan non-BUMN tersebut, atau perubahan ekuitas.

Rincian kepemilikan negara pada Non-BUMN dapat dilihat pada **Daftar 21**.

Penyertaan pada Lembaga Internasional

4. Penyertaan pada Lembaga Internasional per 31 Desember 2012 sebesar Rp38.497.052.327.727 merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia dalam rangka keanggotaan pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional baik yang telah disetor maupun yang masih dalam bentuk *promissory notes*. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada tanggal 28 Desember 2012. Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 22**.

Dari total penyertaan pada Lembaga Internasional sebesar Rp38.497.052.327.727, termasuk penyertaan dalam bentuk *promissory notes* sebesar Rp26.569.686.370.533 di antaranya sebesar **Rp26.550.675.238.720** kepada *International Monetary Fund* (IMF). Rincian *promissory notes* per Lembaga International adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Nama Lembaga	Jumlah (Rp)
1.	International Monetary Fund	26.550.675.238.720
2.	International Development Association	5.173.139.668
3.	Multilateral Investment Guarantee Agency	10.975.624.060
4.	Common Fund for Commodities	2.862.368.085
Jumlah total		26.569.686.370.533

Promissory notes pada IMF disajikan berdasarkan revaluasi IMF yang dilakukan pada bulan April tahun berjalan, bukan pada tanggal 31 Desember 2012.

Nilai penyertaan yang masih merupakan *promissory notes* dapat berkurang, yang disebabkan:

- a. pembayaran atas *promissory notes*; dan
- b. pengurangan/penghapusan *promissory notes*, yang dapat disebabkan antara lain adanya apresiasi nilai tukar Rupiah.

Penyertaan dalam bentuk *Promissory Notes* disajikan sebagai bagian utang. Lihat Catatan **C.2.40** dan Catatan **C.2.46**.

Pada tanggal 15 Desember 2010, Board of Governor's IMF mengadopsi Resolusi Nomor 66-2 perihal 14th *General Review of Quotas*. Salah satu isi dari resolusi tersebut adalah kesepakatan tentang kenaikan kuota ke-14. Untuk Indonesia, kenaikan kuota ke-14 dimaksud setara dengan Rp38.182.006.333.240 (kurs tanggal 28 Desember 2012), yakni dari SDR 2.079 juta menjadi SDR 4.648,4 juta atau dari 0,872% menjadi 0,975%

(peringkat 1 di konstituen South East Asia Voting Group/SEAVG). IMF mensyaratkan persetujuan atas pembayaran kenaikan kuota ke-14 harus telah disampaikan oleh masing-masing negara anggota paling lambat 31 Desember 2011. Pemerintah dan BI telah melakukan koordinasi yang antara lain menyepakati untuk mengalihkan pembayaran kuota tersebut kepada Bank Indonesia. Akan tetapi masih terdapat kendala hukum dikarenakan UU BI tidak mengatur secara eksplisit mengenai pembayaran keanggotaan di lembaga internasional dan berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 1967, bahwa Menteri Keuangan diberi kuasa, dengan mengadakan pinjaman atau cara-cara lain yang layak, untuk mendapatkan dan membayarkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia jumlah-jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada IMF, menurut persetujuan IMF, dan berdasarkan resolusi-resolusi dari Dewan Gubernur IMF. Pemerintah dan BI sepakat untuk melakukan pembahasan terkait revisi PP Nomor 1 Tahun 1967 untuk memberikan kewenangan bagi BI untuk mewakili Negara Republik Indonesia dan melakukan pembayaran kuota untuk dan atas nama Negara.

PMN pada Badan Usaha Lainnya

5. Penyertaan pada Badan Usaha Lainnya sebesar Rp434.267.346 merupakan Investasi Permanen Pemerintah pada perusahaan penerbit SBSN. Perusahaan penerbit SBSN terdiri atas enam perusahaan, yaitu Perusahaan Penerbit SBSN, Perusahaan Penerbit SBSN I, Perusahaan Penerbit SBSN II, Perusahaan Penerbit SBSN III, Perusahaan Penerbit SBSN IV, dan Perusahaan Penerbit SBSN V. Nilai kepemilikan Negara pada masing-masing perusahaan tersebut sebesar Rp10.000.000, Rp10.000.000, Rp109.507.903, Rp104.759.443, Rp100.000.000, dan Rp100.000.000.

PMN pada BI

6. Penyertaan pada Bank Indonesia per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp166.468.468.000.000 dan Rp89.572.275.000.000. Modal Bank Indonesia dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan penjelasan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, modal Bank Indonesia merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Bank Indonesia dapat dilihat pada **Daftar 23**.

PMN pada LPS

7. Penyertaan pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp23.490.590.381.000 dan Rp16.726.488.855.000. Modal Lembaga Penjamin Simpanan dicatat dan dilaporkan sebagai bagian dari investasi permanen sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, modal Lembaga Penjamin Simpanan merupakan kekayaan negara dipisahkan. Ikhtisar laporan keuangan Lembaga Penjamin Simpanan dapat dilihat pada **Daftar 24**.

Nilai PMN pada Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2012 menggunakan data Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan per 31 Desember 2012. Laporan Keuangan Lembaga Penjamin Simpanan tahun 2012 mendapatkan opini *Disclaimer* oleh BPK yang disebabkan terdapat penyertaan modal sementara (PMS) pada Bank Mutiara, Tbk (d.h. PT Bank Century, Tbk) per 31 Desember 2012 sebesar harga perolehan yaitu Rp6.762.361.000.000 yang tidak dapat diyakini kewajarannya. Nilai tercatat PMS pada Neraca LPS tidak memperhitungkan jumlah yang dapat diperoleh kembali (*recoverable amount*), hal ini akan berpengaruh terhadap Laporan Surplus Defisit, Cadangan Tujuan dan Cadangan Penjaminan pada Laporan Perubahan Modal LPS.

C.2.25 Investasi Permanen BLU

*Investasi Permanen BLU
Rp134,16 miliar*

Saldo Investasi Permanen BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 yang berjumlah Rp134.165.377.149 dan Rp6.637.194.500 merupakan penyertaan modal oleh BLU dan Perguruan Tinggi eks BHMN yang telah ditetapkan menjadi Satuan Kerja BLU pada perusahaan. Saldo per 31 Desember 2012 terdiri dari:

1. penyertaan modal BLU PPK Gelora Bung Karno (Sekretariat Negara) sebesar Rp6.637.194.500 pada PT Senayan Trikarya Sempana (PT STS) dengan porsi kepemilikan sebesar 10%; dan
2. penyertaan modal Institut Teknologi Bandung sebesar Rp32.685.105.653, Universitas Indonesia sebesar Rp11.488.902.626, Universitas Gajah Mada sebesar Rp61.810.850.000, Universitas Pendidikan Indonesia sebesar Rp6.518.536.641, Universitas Airlangga sebesar Rp10.421.613.561, dan Institut Pertanian Bogor sebesar Rp4.603.174.168.

C.2.26 Investasi Permanen Lainnya

*Investasi Permanen
Lainnya Rp0*

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp87.609.772.784 merupakan nilai PMN pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*). Nilai Investasi Permanen Lainnya berupa penyertaan atau kepemilikan Perguruan Tinggi Eks BHMN pada beberapa perusahaan pada LKPP 2012 disajikan pada pos Investasi Permanen BLU.

C.2.27 Aset Tetap

*Aset Tetap Rp1.895,50
triliun*

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.895.501.446.206.083 dan Rp1.567.974.174.587.750 merupakan nilai Aset Tetap berdasarkan neraca KL dan Neraca BUN. Aset Tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Tanah	996.878.472.254.880	806.436.356.598.744
Peralatan dan Mesin	238.129.446.805.797	184.852.199.595.042
Gedung dan Bangunan	170.243.266.954.328	152.223.086.918.162
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	379.236.269.019.824	347.164.628.245.235
Aset Tetap Lainnya	14.566.662.581.210	11.517.129.897.802
Konstruksi Dalam Pengerjaan	96.447.328.590.044	65.780.773.332.765
Jumlah	1.895.501.446.206.083	1.567.974.174.587.750

Dalam nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 tersebut termasuk Aset Tetap yang dikelola oleh BLU sebesar Rp182.566.561.428.821, dengan rincian.

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Tanah	130.676.108.835.137	108.693.570.123.457
Peralatan dan Mesin	19.253.528.366.020	12.275.080.859.622
Gedung dan Bangunan	24.128.206.445.290	16.536.052.792.384
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1.536.971.319.943	1.128.925.602.545
Aset Tetap Lainnya	764.507.710.018	458.589.026.465
Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.207.238.752.413	3.507.228.774.998
Jumlah	182.566.561.428.821	142.599.447.179.471

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp327.527.271.618.333 atau 20,89 persen dari nilai per 31 Desember 2011. Kenaikan nilai Aset Tetap ini terutama karena perolehan dari realisasi Belanja Modal sebesar Rp145,10 triliun, koreksi penambahan hasil IP, koreksi pencatatan nilai, penambahan aset tetap dari BLU Otorita Batam, LPP TVRI dan RRI, serta penambahan aset Tetap yang diperoleh dari hibah.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L dan BUN disajikan pada **Daftar 25**.

*Piutang Jangka Panjang
Rp5,01 triliun*

C.2.28 Piutang Jangka Panjang

Jumlah Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp5.015.602.161.395 dan Rp3.988.312.006.895. Nilai bersih Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp4.673.590.581.804, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp5.015.602.161.395 dikurangi penyisihan sebesar Rp342.011.579.591. Pada LKPP Tahun 2011 Piutang Jangka Panjang diklasifikasikan dalam Aset Lainnya, sedangkan pada LKPP Tahun 2012 disajikan tersendiri.

Piutang Jangka Panjang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.375.031.741	1.375.031.741
2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	246.721.313.918	249.626.424.418
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	4.767.505.815.736	3.737.310.550.736
Jumlah	5.015.602.161.395	3.988.312.006.895
Penyisihan	(342.011.579.591)	(553.935.159.903)
Nilai Bersih	4.673.590.581.804	3.434.376.846.992

Penjelasan masing-masing Piutang Jangka Panjang adalah sebagai berikut.

TPA Rp1,38 miliar

1. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA)

Saldo TPA per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.375.031.741 dan Rp1.375.031.741. Saldo TPA per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp46.989.276 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.375.031.741 dikurangi penyisihan sebesar Rp1.328.042.465. Saldo TPA tersebut berada di Kementerian KUKM.

Tagihan TGR Rp246,72 miliar

2. Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp246.721.313.918 dan Rp249.626.424.418. Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp59.998.210.174 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp246.721.313.918 dikurangi penyisihan sebesar Rp186.723.103.744. Rincian Tagihan TGR pada KL dapat dilihat pada **Daftar 26**.

*Piutang Jangka Panjang
Lainnya Rp4,77 triliun*

3. Piutang Jangka Panjang Lainnya

Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp4.767.505.815.736 dan Rp3.737.310.550.736. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp4.613.545.382.354, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp4.767.505.815.736 dikurangi penyisihan sebesar Rp153.960.433.382. Berikut rincian Piutang Jangka Panjang Lainnya.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	12.824.000.000	-
2. Kementerian Kehutanan	340.314.515.268	758.821.015.245
3. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1.023.896.389	-
4. Perpustakaan Nasional	44.400.000	-
5. BKKBN	8.499.808.374	-
6. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan	6.372.083	-
7. Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.354.164	-
8. Badan Pengelola Kawasan Batam	85.263.299.514	-
9. BA BUN 999.04	2.773.982.230.890	2.978.489.535.491
10. BA BUN 999.99	1.545.545.939.054	-
Nilai Bruto	4.767.505.815.736	3.737.310.550.736
Penyisihan	(153.960.433.382)	(396.925.080.510)
Nilai Bersih	4.613.545.382.354	3.340.385.470.226

Penjelasan Piutang Jangka Panjang Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp12.824.000.000 pada satker Institut Pertanian Bogor merupakan piutang afiliasi kepada PT BLST yang merupakan anak perusahaan IPB, termasuk di antaranya untuk pinjaman dari kompensasi PT Indah Pesona Bogor, Pinjaman untuk unit usaha Agrifresh, pinjaman untuk jaminan deposito, pinjaman untuk *shareholder* PT Grahawita Cendikia, Pinjaman untuk *pool* bus, dan pinjaman jangka panjang kepada PT Prima Kelola. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp12.759.880.000, berasal dari nilai bruto sebesar Rp12.824.000.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp64.120.000.
2. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Kehutanan sebesar Rp340.314.515.268. Penurunan Piutang Jangka Panjang Lainnya dibandingkan dengan tahun 2011 disebabkan oleh adanya bunga/denda piutang HTI *rescheduling* sebesar Rp9.506.729.000, pembayaran piutang HTI *rescheduling* sebesar Rp114.675.374.968, dan reklasifikasi piutang HTI *nonrescheduling* sebesar Rp313.337.854.009. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Kementerian Kehutanan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp294.056.601.041, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp340.314.515.268 dikurangi penyisihan sebesar Rp46.257.914.227.
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp1.023.896.389 merupakan piutang atas pemotongan penghasilan pada sembilan orang debitur yang merupakan pejabat/pegawai pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang akan jatuh tempo setelah TA 2013. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp1.018.776.907, berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.023.896.389 dikurangi penyisihan sebesar Rp5.119.482.
4. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Perpustakaan Nasional sebesar Rp44.400.000 merupakan piutang atas sewa ruang dan pemakaian listrik untuk ATM periode 2012 s.d. 2014. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Perpustakaan Nasional berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp44.178.000, berasal dari nilai bruto sebesar Rp44.400.000 dikurangi penyisihan sebesar Rp222.000.

5. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN merupakan piutang atas dana bantuan modal yang diberikan dengan sistem bergulir pada kelompok UPPKS mulai tahun 2008. Berdasarkan hasil pemetaan terhadap UPPKS didapatkan sisa piutang sebesar Rp8.499.808.374 yang berpotensi menjadi piutang tak tertagih dan sedang proses pengusulan untuk penghapusan piutang. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada BKKBN berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan sebesar Rp0, berasal dari nilai bruto sebesar Rp8.499.808.374 dikurangi penyisihan sebesar Rp8.499.808.374.
6. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp6.372.083. Nilai tersebut merupakan piutang kelebihan pembayaran tunjangan umum kepada 3 (tiga) pegawai dengan umur piutang lebih dari 12 bulan. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp6.340.223 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp6.372.083 dikurangi penyisihan sebesar Rp31.860.
7. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp1.354.164 merupakan pengembalian Tunjangan Bahaya Nuklir. Nilai Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Tenaga Nuklir Nasional berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp1.347.393 yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp1.354.164 dikurangi penyisihan sebesar Rp6.771.
8. Piutang Jangka Panjang Lainnya pada Badan Pengelola Kawasan Batam sebesar Rp85.263.299.514. Nilai Piutang Jangka Panjang pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam diklasifikasikan sebagai piutang dengan kualitas macet, sehingga disisihkan seluruhnya.
9. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.04 sebesar Rp2.773.982.230.890 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. KUMK	2.729.780.000.000
2. Kredit Koperasi Primer untuk Anggota Bagi Hasil Bank Muamalat	9.000.000.000
3. Dana Induk Lingkungan	35.202.230.889
Nilai Bruto	2.773.982.230.889
Penyisihan piutang tidak tertagih	(13.869.911.154)
Nilai Bersih	2.760.112.319.735

10. Piutang Jangka Panjang pada BA 999.99 sebesar Rp1.545.545.939.054 atau senilai USD159,828,949 merupakan piutang migas yang jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 bulan. Piutang Jangka Panjang tersebut berasal dari PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI) sebesar USD140,320,046 dan PT PIM sebesar USD19,508,903. Terkait dengan Piutang PT TPPI, telah terdapat rencana restrukturisasi penyelesaian piutang PT TPPI yang tertuang dalam Kesepakatan Bersama antara SKK Migas, Pertamina, dan PPA tanggal 15 April 2013 yang disetujui/ diketahui oleh Menteri ESDM, Menteri Negara BUMN, dan Menteri Keuangan.

*Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Jangka Panjang
Rp342.05 triliun*

C.2.29 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp342.011.579.591 dan Rp553.935.159.903 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Tagihan Penjualan Angsuran	1.328.042.465	-
2. Tagihan TP/Tuntutan Ganti Rugi	186.723.103.744	157.010.079.393
3. Piutang Jangka Panjang Lainnya	153.960.433.382	396.925.080.510
Jumlah	342.011.579.591	553.935.159.903

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Piutang Jangka Panjang.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan Penjualan Angsuran sebesar Rp1.328.042.465 merupakan penyisihan pada Tagihan Penjualan Angsuran Kementerian KUKM.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Tagihan TP/TGR sebesar Rp186.723.103.744 dapat dilihat pada **Daftar 26**.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Piutang Jangka Panjang Lainnya sebesar Rp153.960.433.382 merupakan Penyisihan pada Piutang Jangka Panjang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp64.120.000, Kementerian Kehutanan sebesar Rp46.257.914.227, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebesar Rp5.119.482, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia sebesar Rp222.000, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebesar Rp8.499.808.374, Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar Rp31.860, Badan Tenaga Nuklir Nasional sebesar Rp6.771, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Rp85.263.299.514, dan BA 999.04 sebesar Rp13.869.911.154.

C.2.30 Aset Lainnya

Aset Lainnya
Rp379,99 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp378.987.684.360.657 dan Rp454.616.944.923.482. Nilai bersih Aset Lainnya per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp359.086.269.747.713, yaitu berasal dari nilai bruto sebesar Rp378.987.684.360.657 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.901.414.612.944.

Aset Lainnya terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga	225.918.302.700	212.907.765.825
2. Penerusan Pinjaman	44.014.286.077.588	46.540.275.969.109
3. Aset Tak Berwujud	15.705.813.685.536	12.406.618.813.595
4. Aset yang Dibatasi Penggunaannya	43.873.903.783.522	37.253.051.374.408
5. Dana Kelolaan BLU	21.179.600.007.891	19.320.332.310.233
6. Dana Penjaminan	68.309.705.830	75.371.634.076
7. Aset KKKS	143.976.028.336.922	150.508.980.296.216
8. Aset Eks BPPN (Tim Koordinasi)	3.972.872.786.807	67.543.984.466.405
9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya	2.430.048.955.900	14.762.445.010.365
10. Aset Lain-lain	103.540.902.717.961	105.992.977.283.250
Jumlah	378.987.684.360.657	454.616.944.923.482
Penyisihan	(19.901.414.612.944)	(19.416.938.848.980)
Nilai Bersih	359.086.269.747.713	435.200.006.074.502

Penjelasan masing-masing Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

1. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp225,92 miliar

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp225.918.302.700 dan Rp212.907.765.825 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di:

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	13.308.637.500	298.100.625
2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	128.962.165.200	128.962.165.200
3. Kementerian Negara PPN/ BAPPENAS	83.647.500.000	83.647.500.000
Jumlah	225.918.302.700	212.907.765.825

2. Penerusan Pinjaman

Penerusan Pinjaman Rp44,01 triliun

Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp44.014.286.077.588 dan Rp46.540.275.969.109 merupakan total pokok pinjaman Penerusan Pinjaman yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Saldo Penerusan Pinjaman per 31 Desember 2012 tersebut terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Penerusan Pinjaman kepada BUMN	42.081.008.045.563	44.093.413.855.680
Penerusan Pinjaman kepada BUMD	967.907.115.392	1.406.255.914.320
Penerusan Pinjaman kepada Pemerintah Daerah	448.808.648.201	422.494.717.139
Penerusan Pinjaman Lainnya	516.562.268.432	618.111.481.970
Nilai Bruto	44.014.286.077.588	46.540.275.969.109
Penyisihan	(220.071.430.388)	(232.701.379.846)
Nilai Bersih	43.794.214.647.200	46.307.574.589.263

3. Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud Rp15,70 triliun

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp15.705.813.685.536 dan Rp12.406.618.813.595 merupakan aset yang berupa *software*, dan hak paten yang berada di KL. Rincian Aset Tak Berwujud dapat dilihat pada **Daftar 27**.

4. Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp43,87 triliun

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp43.873.903.783.522 dan Rp37.253.051.374.408, terdiri atas:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
1. Sekretariat Negara	399.950.434	-
2. Kementerian Luar Negeri	426.599.804.567	325.201.782.094
3. Kementerian Pertahanan	6.719.107.771.665	5.763.321.157.149
4. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	146.852.004	-
5. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	304.184.836.079	266.446.173.044
6. Kementerian Kesehatan	2.180.231.243.962	2.033.538.302.485
7. Kementerian Agama	1.183.992.839.523	3.244.412.872.236
8. Kementerian Kehutanan	-	50.000.899
9. Kementerian Kelautan dan Perikanan	85.513.964.067	87.114.525.722
10. Lembaga Ketahanan Nasional	3.939.156.000	-
11. LPP TVRI	796.422.954	-
12. BUN	32.968.990.942.267	25.532.966.560.779
Jumlah	43.873.903.783.522	37.253.051.374.408

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut.

- 1) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Sekretariat Negara sebesar Rp399.950.434 merupakan uang jaminan dari pelanggan pada BLU Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran.
- 2) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp426.599.804.567 merupakan saldo kas besi pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan Nomor S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila *remise (cash supply)* terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Kementerian Luar Negeri.
- 3) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pertahanan sebesar Rp6.719.107.771.665 merupakan dana kegiatan lintas tahun yang belum selesai sampai dengan akhir tahun 2012, dana *reimbursement* untuk menyelenggarakan administrasi dana khusus Satgas TNI penugasan luar negeri dibawah koordinasi PBB, *Outstanding L/C* devisa, dan dana siaga untuk mendukung kegiatan operasi.
- 4) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp146.852.004 berada pada Unit Badan Litbang ESDM.
- 5) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp304.184.836.079 adalah Dana Abadi pada Universitas Airlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, Universitas Pendidikan Indonesia, dan Universitas Indonesia.
- 6) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kesehatan sebesar Rp2.180.231.243.962 merupakan dana Bantuan Sosial berupa jaminan kesehatan masyarakat yang belum digunakan sampai dengan akhir tahun 2012.
- 7) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Agama sebesar Rp1.183.992.839.523 merupakan aset bersih Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) sebesar Rp1.183.992.839.523. BPIH mengelola setoran awal hingga adanya pelunasan BPIH sebagai akibat adanya keputusan keberangkatan jemaah atau adanya keputusan dari jemaah itu sendiri untuk menunda atau membatalkan kepesertaan dalam program BPIH atau adanya keputusan dari pejabat yang berwenang.
- 8) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp85.513.964.067 berupa Dana Penguatan Modal (DPM) dan Dana Ekonomi Produktif (DEP) merupakan bagian dari program pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat.
- 9) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada Lembaga Ketahanan Nasional sebesar Rp3.939.156.000 merupakan nilai jaminan sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012.
- 10) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada LPP TVRI sebesar Rp796.422.954 berupa garansi bank dan jaminan sewa atas sisa pekerjaan yang belum selesai sampai dengan 31 Desember 2012.
- 11) Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BUN sebesar Rp32.968.990.942.267, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Rekening Cadangan	19.989.510.992.821	21.576.465.725.102
<i>Escrow</i> Bank Mutiara	167.097.369.854	156.694.824.182
Rekening Lainnya di BUN	162.809.726.952	149.465.989.003
BA 999.03	12.649.572.852.640	3.643.972.716.732
BA 999.08	-	6.367.305.761
Jumlah	32.968.990.942.267	25.532.966.560.779

Rincian masing-masing dana yang dibatasi penggunaannya pada BUN adalah:

- a. Rekening Cadangan sebesar Rp19.989.510.992.821 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
Rekening Cadangan Reboisasi	4.546.878.110.595	4.546.878.110.595
Rekening Cadangan Subsidi/PSO	2.782.289.888.339	7.523.846.941.346
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	12.660.342.993.887	9.505.740.673.161
Jumlah	19.989.510.992.821	21.576.465.725.102

- Rekening Cadangan Reboisasi sebesar Rp4.546.878.110.595 adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Kementerian Kehutanan. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan.
- Rekening Cadangan Subsidi/PSO adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa subsidi/PSO yang belum disalurkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Penyaluran dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran 2013 sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO, yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK.

Rincian Rekening Cadangan Subsidi yang disajikan sebagai Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 <i>(audited)</i>	31 Desember 2011 <i>(audited)</i>
Subsidi Premium	2.566.317.591	31.666.361.825
Subsidi Minyak Tanah	-	238.206.878.679
Subsidi Minyak Solar	-	110.794.727.694
Subsidi LPG	1.082.924.124.704	348.690.214.595
Subsidi Listrik	-	284.141.726.597
Subsidi Pangan	-	3.880.034.638.700
Subsidi Benih	14.040.573.919	38.607.101.708
Subsidi Pupuk	1.099.268.374.258	2.250.517.999.430
Subsidi Minyak Goreng	-	-
Subsidi PELNI	197.631.980.000	124.457.849.390
Subsidi PT KAI	136.267.383.443	152.468.942.728
Subsidi PT Pos dan Giro	61.662.500.000	64.260.500.000
PSO Perum BULOG	187.928.634.424	-
Subsidi Bunga Kredit Program	-	-
Jumlah	2.782.289.888.339	7.523.846.941.346

Total rekening Dana Cadangan Subsidi/PSO adalah sebesar Rp3.333.841.884.281. Dari jumlah tersebut, yang disajikan dalam Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah sebesar Rp2.782.289.888.339 karena akan disalurkan kepada pihak ketiga sampai dengan akhir Februari 2013, sementara sisanya sebesar

Rp551.551.995.942 disajikan dalam Kas Lainnya dan Setara Kas karena telah disetorkan ke Kas Negara sampai akhir Februari 2013.

- Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp12.660.342.993.887 berasal dari jumlah dana cadangan DBH Sumber Daya Alam TA 2012 yang sudah menjadi hak daerah dan belum dipindahbukukan dari rekening Dana Cadangan ke pemerintah daerah karena pemerintah daerah penerima belum dapat diidentifikasi. Rekening Dana Cadangan tersebut akan disalurkan paling lambat pada akhir bulan Februari 2013. Rincian besaran Dana Cadangan per akun DBH SDA adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Transfer	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Dana Cadangan DBH Minyak Bumi 15%	5.935.626.914.274	3.127.743.501.674
2. Dana Cadangan DBH Gas Bumi 30%	4.448.499.593.791	3.555.354.558.735
3. Dana Cadangan DBH Iuran Tetap	45.710.693.021	19.230.900.313
4. Dana Cadangan DBH Royalti	1.948.305.577.541	2.527.994.480.676
5. Dana Cadangan DBH IIUPH/IHPH	14.870.257.118	23.157.369.419
6. Dana Cadangan DBH PSDH	121.037.677.197	114.471.796.956
7. Dana Cadangan DBH Dana Reboisasi	123.404.794.865	122.439.418.268
8. Dana Cadangan DBH Perikanan	22.887.486.080	15.348.647.120
Total	12.660.342.993.887	9.505.740.673.161

- b. Rekening *escrow* Bank Mutiara sebesar Rp167.097.369.854 adalah Rekening *escrow* pada rekening Nomor 1022-000320250-001 atas nama Dirjen Anggaran yang berada di Bank Mutiara (dulu Bank Century) yang setara dengan USD17,279,976.20. Rekening tersebut digunakan untuk menampung hibah dari Pemerintah Amerika Serikat.
- c. Rekening Lainnya yang digunakan untuk tujuan tertentu adalah sebesar Rp162.809.726.952 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian Rekening	Jumlah (Rp)
1. Menteri Keuangan C.O Direktur Jenderal Perbendaharaan Untuk Menampung Pengembalian Dana Talangan Dan Pencairan Aset BPR Nomor 500.000004980	63.966.437.523
2. Menteri Keuangan Pengeluaran untuk Surat Berharga Negara nomor 502.000001980	12.625.000.000
3. BUN Untuk Obligasi Dalam Rangka Penjaminan nomor 502.000002980	82.107.368.550
4. Rekening Khusus Menteri Keuangan Karena Penjualan Saham PT Telkom Di Pasar Domestik nomor 510.000239980	1.367.896.768
5. Rekening Depkeu U/Penampungan Hibah Dari luar Negeri Dlm Rangka Bencana Alam Nasional Dalam Valuta USD nomor 602.074411980	2.743.024.111
Total	162.809.726.952

- d. Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BA 999.03 terdiri dari:
 - 1) Dana pada rekening Kementerian Lingkungan Hidup terkait dengan dana bergulir atas *Debt Nature Swap* sebesar Rp31.872.852.640 yang terdiri atas:
 - Dana pada rekening penampungan anggaran *Debt Nature Swap* Kementerian Lingkungan Hidup sebesar Rp1.784.349; dan
 - Dana pada rekening penampungan dana pokok dan bagi hasil sebesar Rp31.871.068.291.
 - 2) Dana Pengembangan Pendidikan Nasional sebesar Rp10.617.700.000.000 yang merupakan *endowment fund* yang bertujuan untuk menjamin keberlangsungan program bagi generasi berikutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban

antargenerasi dan dana cadangan pendidikan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak.

Endowment Fund berupa Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN) bersumber dari realisasi atas anggaran yang telah ditetapkan pada BA 999.03 dan dikelola oleh BLU Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) di bawah Kementerian Keuangan.

- 3) Dana yang ditempatkan pada Rekening Induk Dana Investasi pada PIP sebesar Rp2.000.000.000.000 untuk pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Penyediaan Dan Pencairan Dana Investasi Pemerintah Untuk Pembelian PT Indonesia Asahan Aluminium.

5. Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Disalurkan

*Dana Kelolaan BLU yang
Belum Digulirkan
Rp21,18 triliun*

Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp21.179.600.007.891 dan Rp19.320.332.310.233 merupakan dana yang masih berupa kas yang belum disalurkan/diinvestasikan oleh BLU kepada pihak ketiga, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

BADAN LAYANAN UMUM	Jumlah Dana
BLU Pusat Investasi Pemerintah	9.302.552.213.906
BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT	4.414.566.036.705
BLU Pusat Pembiayaan Perumahan	4.712.847.105.540
BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	2.007.290.034.196
BLU LPDB KUKM	742.344.617.544
JUMLAH DANA KELOLAAN	21.179.600.007.891

- a. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah sebesar Rp9.302.552.213.906 merupakan dana investasi yang telah diterima PIP dari Bagian Anggaran 999.03, dan per 31 Desember 2012 berada pada rekening Pusat Investasi Pemerintah atau tidak *outstanding* berbentuk investasi pemerintah. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Pusat Investasi Pemerintah per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Penempatan Dana	Jumlah Dana
RIDI Reguler	
1. Giro di Bank BRI (RIDI)	26.016.026.165
2. Giro dollar AS di Bank BRI	1.936.187.741
3. Deposito BRI (9 bilyet)	3.839.600.000.000
4. Deposito Bank Mandiri (4 bilyet)	1.071.000.000.000
5. Deposito Bank BTN (5 bilyet)	940.000.000.000
6. Deposito Bank Bukopin (5 bilyet)	750.000.000.000
7. Deposito Bank Sumut (1 bilyet)	400.000.000.000
8. Deposito Bank Muamalat (2 bilyet)	200.000.000.000
9. Deposito Bank Syariah Bukopin (2 bilyet)	32.000.000.000
10. Deposito Bank BRI Syariah (1 bilyet)	9.000.000.000
11. Deposito Bank BJB Syariah (1 bilyet)	30.000.000.000
Jumlah RIDI Reguler	7.299.552.213.906
RIDI GEOTHERMAL	
1. Giro di Bank BRI (RIDI Geothermal)	500.000.000
2. Deposito BRI (2 bilyet)	2.002.500.000.000
Jumlah RIDI Geothermal	2.003.000.000.000
Jumlah Dana Kelolaan PIP	9.302.552.213.906

- b. Dana Kelolaan pada BLU Bidang Pendanaan Sekretariat BPJT sebesar Rp4.414.566.036.705. Rincian penempatan dana kelolaan pada BLU Bidang

Pendanaan Sekretariat BPJT adalah:

(dalam rupiah)

Nama Bank	Saldo
1. Giro Bank Mandiri Acc. Nomor 126-00-0 481 9396	2.964.198.629
2. Giro BRI Acc. Nomor 00000193-01-000751-30-3	11.829.626.551
3. Giro BNI Acc. Nomor 5522522235	8.772.211.525
4. Deposito Bank Mandiri	1.600.000.000.000
5. Deposito BNI	125.000.000.000
6. Deposito BRI	2.666.000.000.000
Jumlah	4.414.566.036.705

- c. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp4.712.847.105.540 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Nama Bank	Saldo
1. BTN	847.345.508
2. MANDIRI	1.879.935
3. BTN SYARIAH	2.807.226
4. BUKOPIN	2.065.830
5. BANK RIAU KEPRI	1.732.600
6. BANK RIAU KEPRI SYARIAH	1.000.000
7. BANK SUMUT	1.375.886
8. BANK SUMUT Syariah	2.239.283
9. BANK Kaltim	32.293.427
10. BANK Sumsel Babel	2.777.376
11. BANK NTT	1.123.766
12. BANK DIY	1.018.144
13. BRI	2.136.636
14. BNI	1.065.999.401
15. BRI SYARIAH	990.079.782
16. BTN	19.264.000.000
17. BTN	1.000.000.000.000
18. BTN	1.393.369.000.000
19. BTN SYARIAH	1.107.000.000
20. BTN SYARIAH	175.763.000.000
21. Mandiri	752.796.000.000
22. Mandiri	237.518.000.000
23. BRI SYARIAH	39.339.000.000
24. BRI	998.853.000.000
25. BUKOPIN	93.091.000.000
26. Pendapatan dari pengelolaan kas rekening Dana Kelolaan	(1.208.903.258)
Total*)	4.712.846.971.540

*) Rincian dana kelolaan tersebut diatas belum termasuk piutang operasional BLU sebesar Rp134.000, yang merupakan kesalahan pembebanan dan pembukuan oleh Bank, yang akan dikembalikan oleh Bank pelaksana, sehingga jumlah dana kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Perumahan adalah sebesar Rp4.712.847.105.540.

- d. Dana Kelolaan pada BLU Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan sebesar Rp2.007.290.034.196 yang terdiri dari:
- Rp7.290.034.196 ditempatkan pada Rekening Pengelolaan Pokok Dana Bergulir, pada rekening BRI Cabang Kebayoran Baru;
 - Rp100.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito BRI berjangka tiga bulan; dan
 - Rp1.900.000.000.000 ditempatkan dalam Deposito BRI berjangka enam bulan.
- e. Dana Kelolaan pada BLU Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM sebesar Rp742.344.617.544. Dana ini terdapat pada 32 rekening giro sebanyak Rp392.344.617.544 dan 7 rekening deposito sebanyak Rp350.000.000.000.

6. Dana Penjaminan

*Dana Penjaminan
Rp68,31 miliar*

Dana Penjaminan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp68.309.705.830 dan Rp75.371.634.076 merupakan dana penjaminan yang berada pada Kementerian Negara Koperasi dan UKM yang digunakan sebagai penjaminan dari setiap kredit dan pembiayaan yang disalurkan penerima jaminan kepada KUKM terjamin. Dana penjaminan tersebut dikelola oleh perusahaan penjamin, yaitu Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)/Jaminan Kredit Indonesia.

7. Aset Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)

*Aset KKKS Rp143,98
triliun*

Aset KKKS per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp143.976.028.336.922 dan Rp150.508.980.296.216. Nilai Aset KKKS per 31 Desember 2012 tersebut berupa tanah dengan luas 667.919.254 m² sebesar Rp14.362.284.169.984 yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS sebagai hasil inventarisasi terhadap 44 KKKS, dan aset lain non tanah sebesar Rp129.613.744.166.938 berdasarkan hasil inventarisasi dan penilaian pada 76 KKKS.

Rincian Nilai Aset KKKS Migas per 31 Desember 2012 disajikan pada **Daftar 28**.

Terdapat aset KKKS yang telah dilakukan inventarisasi dan penilaian, namun tidak disajikan dalam Neraca LKPP Tahun 2012, yaitu:

1. Aset Non Tanah sebanyak 3.866 item pada 18 KKKS dengan nilai Rp0 (Nol Rupiah);
2. Aset sumur yang tidak digunakan sebanyak 623 sumur pada 19 KKKS dengan nilai sebesar Rp1.184.222.605.157;
3. Aset *Subsequent Expenditure* sebanyak 13.897 item pada 34 KKKS dengan nilai sebesar Rp44.345.555.350.377;
4. Aset Kondisi Rusak Berat 11.820 item pada 48 KKKS dengan nilai sebesar Rp356.816.206.196;
5. Aset yang dalam proses penghapusan sebanyak 19 item pada KKKS Pertamina Hulu Energi West Madura *Offshore* (d.h. Kodeco Energy) senilai Rp927.406.395; dan
6. Aset dengan nilai wajar negatif sejumlah 209 item pada 4 KKKS dengan nilai perolehan negatif sebesar USD24,019,980 yang merupakan koreksi atas nilai perolehan aset.

8. Aset Eks BPPN

*Aset Eks BPPN Rp3,97
triliun*

Aset Eks BPPN (Aset Tim Koordinasi) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp3.972.872.786.807 dan Rp67.543.984.466.405 merupakan aset Pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah, sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero).

Nilai Aset Eks BPPN yang disajikan per 31 Desember 2012 merupakan hasil inventarisasi dan penilaian dengan rincian sebagai berikut.

Jenis Aset	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)		31 Desember 2011 (<i>audited</i>)	
	Jumlah Aset	Nilai (Rp)	Jumlah Aset	Nilai (Rp)
Pinjaman yang Diberikan	-	-	7.585	35.465.120.460.776
Tagihan PKPS	-	-	23	29.606.876.725.368
Aset Non Inti-Properti	1.685	2.667.168.467.007	1.643	1.981.229.805.153
Aset Non Inti-Inventaris	36.978	13.865.663.622	36.985	12.135.475.108
Penempatan Antar Bank dan	n.a	478.622.000.000	n.a.	478.622.000.000

Nostro				
Surat Berharga Eks BPPN		284.497.391.925		
Saham Eks BPPN		528.719.264.253		
Jumlah		3.972.872.786.807		67.543.984.466.405

Pada LKPP Tahun 2012, Aset Kredit Eks BPPN dan Tagihan PKPS dicatat sebagai Piutang Bukan Pajak.

Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 29**.

*Aset Lainnya dari Unit
Pemerintah Lainnya
Rp2,43triliun*

9. Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya

Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp2.430.048.955.900 dan Rp14.762.445.010.365. Rincian Aset Lainnya dari Unit Pemerintah Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Otorita Batam	-	13.922.723.215.421
2. Taman Mini Indonesia Indah	110.139.650.009	42.277.377.168
3. Otorita Asahan	540.080.422.400	746.947.319.389
4. BP Gedung Manggala Wanabhakti *	-	21.352.989.643
5. Yayasan Gedung Veteran	11.480.805.908	11.120.585.877
6. Badan Amil Zakat	21.940.090.649	16.313.704.645
7. Badan Wakaf Indonesia	1.514.520.243	1.709.818.222
8. BP Dana Abadi Umat **	2.239.100.173.266	-
9. SKK MIGAS***	(494.206.706.575)	-
Jumlah	2.430.048.955.900	14.762.445.010.365

* Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan (Gedung Manggala Wanabhakti), dinyatakan bahwa pengelolaan Gedung Manggala Wanabhakti dilaksanakan oleh Kementerian Kehutanan RI, sehingga pada LKPP Tahun 2012 tidak disajikan lagi sebagai aset lainnya.

** Dalam LKPP Tahun 2011 ekuitas bersih dari BP DAU belum disajikan dalam neraca LK Badan Lainnya tetapi dilaporkan dalam LK Kementerian Agama.

*** Nilai Aset Lainnya sebesar minus Rp494.206.706.575 yang berasal dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS) merupakan total ekuitas bersih yang diperoleh dari aset dan kewajiban SKK MIGAS mulai 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012. Pelaporan BP MIGAS (sekarang SKK MIGAS) dalam LKPP Tahun 2011 dan untuk periode 1 Januari 2012 sampai dengan 13 November 2012 disajikan pada LK BA 999.03 sebagai Investasi Permanen PMN sebesar Ekuitas Bersih.

10. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain Rp103,54
triliun*

Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp103.540.902.717.960 dan Rp105.992.977.283.250 merupakan aset selain yang telah dikelompokkan sebagai jenis Aset Lainnya di atas. Nilai Aset Lain-lain per 31 Desember 2012 berdasarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp83.859.559.535.404, yang berasal dari nilai bruto sebesar Rp103.540.902.717.960 dikurangi penyisihan sebesar Rp19.681.343.182.556. Rincian Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. K/L	40.698.557.511.367	36.908.907.616.802
2. BA BUN 999.03	42.346.855.319	142.127.657.545
3. BA BUN 999.04	19.719.281.153.339	19.419.108.122.985
4. BA BUN 999.08	-	46.701.991.689
5. BA BUN 999.99	43.080.717.197.935	49.476.131.894.229
Nilai Bruto	103.540.902.717.960	105.992.977.283.250
Penyisihan	(19.681.343.182.556)	(19.184.237.469.134)
Nilai Bersih	83.859.559.535.404	86.808.739.814.116

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut.

1. Aset Lain-lain yang berada di KL sebesar Rp40.698.557.511.367. Rincian Aset Lain-lain di masing-masing KL disajikan pada **Daftar 27**;
2. Aset lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp42.346.855.319, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp24.620.718.895 berasal dari nilai bruto sebesar Rp42.346.855.319 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp17.726.136.424. Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.03 adalah sebagai berikut.

- a. Reklasifikasi dari dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan sebesar Rp12.206.756.931.

Dana bergulir pada Kementerian Kelautan dan Perikanan merupakan bagian dari Program Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Skala Kecil (PUPTSK) yang dilaksanakan sejak tahun 2004. Program PUPTSK tersebut adalah Optimasi Penangkapan Ikan (OPTIKAPI), Optimasi Pelelangan Ikan (OPTILANPI), Optimasi Pengolahan dan Distribusi Ikan (OPTIHANDIS), dan Optimasi Kelompok Usaha Bersama (OPTIKUB).

- b. Aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian sebesar Rp30.140.098.388.

Piutang pada Kementerian Perindustrian merupakan piutang atas program dana bergulir yang pengelolaannya dilakukan oleh LPT Indak. Sampai dengan 31 Desember 2012, piutang pada LPT Indak yang telah diserahkan kepada KPKNL adalah sebesar Rp5.312.174.460 dan yang belum diserahkan ke KPKNL adalah sebesar Rp24.827.923.928.

3. Aset Lain-lain BA BUN 999.04 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp19.719.281.153.339, sedangkan nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah sebesar Rp55.664.107.207 berasal dari nilai bruto sebesar Rp19.719.281.153.339 dikurangi dengan penyisihan sebesar Rp19.663.617.046.132. Rincian Aset Lain-lain pada BA 999.04 adalah sebagai berikut.

- Aset Lainnya RDI sebesar Rp18.990.468.082.758 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. Tunggakan yang akan diselesaikan melalui restrukturisasi dan piutang yang tertunggak lebih dari satu tahun	16.619.053.674.168
2. Tunggakan macet dari tunggakan BBO/BBKU/BDL	2.260.096.312.554
3. Tunggakan Eks Timor Timur	128.340.000
4. Tunggakan koperasi/proyek	111.189.756.036
Nilai Bruto	18.990.468.082.758
Penyisihan	(18.934.803.975.551)
Nilai Bersih	55.664.107.207

- Aset Lainnya Kredit Program Non Subsidi sebesar Rp728.813.070.581, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
1. PIR Perkebunan	319.809.586.344
2. UPP Perkebunan	304.388.014.802
3. Peternakan	97.278.652.435
4. Kredit Listrik Pedesaan	2.066.512.000
5. Pengembangan Pendidikan Akuntansi	5.270.305.000
Nilai Bruto	728.813.070.581
Penyisihan	(728.813.070.581)
Nilai Bersih	-

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Bagian Anggaran 999.08 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0 sedangkan per 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp46.701.991.689. Aset Lain-lain sebesar Rp0 dikarenakan LPP TVRI, LPP RRI, dan Otorita Batam telah menjadi Bagian Anggaran tersendiri, sehingga Aset Lain-lain yang berasal dari ketiga institusi tersebut dialihkan dari BA 999.08. Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP yang berasal dari Kementerian Luar Negeri yang dilaporkan pada BA 999.08 telah dialihkan ke Kementerian Luar Negeri (BA 011). Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2011 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. LPP TVRI	-	4.129.603.585
2. LPP RRI	-	26.767.898.211
3. Otorita Batam	-	15.766.812.350
4. Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	-	37.677.543
Jumlah	-	46.701.991.689

5. Aset Lain-lain pada BA 999.99 (Transaksi Khusus) sebesar Rp43.080.717.197.935 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. PT PPA (Persero)	83.761.065.882	2.644.490.527.174
2. Aset PT PPA yang sudah dikembalikan ke Menteri Keuangan	1.158.800.710.887	1.484.449.098.120
3. Aset eks Pertamina	41.837.639.104.563	43.984.876.106.228
4. Piutang Migas	-	1.362.316.162.707
5. Aset Lain-Lain DJKN selaku Pengelola Barang	516.316.603	-
Jumlah	43.080.717.197.935	49.476.131.894.229

- 1). Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp83.761.065.882 merupakan aset saham yang diserahkan kepada PT PPA yang terdiri dari saham bank dan saham non bank.
- 2). Aset Lain-lain eks PT PPA sebesar Rp1.158.800.710.887 merupakan aset eks PT PPA yang masih berada di Kementerian Keuangan setelah perjanjian PT PPA tahap pertama diselesaikan. Mutasi aset tersebut selama tahun 2012 sebagai berikut.

No	Jenis Aset	Saldo Awal		Mutasi Tambah (Kurang)		Saldo Akhir	
		Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)	Unit	Jumlah (Rp)
1	Aset Kredit	287	183.051.274.291	(287)	(183.051.274.291)	-	-
2	Aset Properti	3.152	1.262.250.532.556	(1.252)	(142.097.112.942)	1.900	1.120.153.419.614
3	Surat Berharga	9	16.657.242.209	-	-	9	16.657.242.209
4	Aset Saham Non Bank	21	22.490.049.064	(1)	(500.000.000)	20	21.990.049.064
	Jumlah	3.469	1.484.449.098.120	(1.540)	(325.648.387.233)	1.929	1.158.800.710.887

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012, Aset Kredit eks PT PPA disajikan dalam neraca sebagai piutang lain-lain bersama dengan Aset Kredit eks BPPN dalam hal Aset Kredit tersebut telah ditandatangani Pernyataan Bersama/diterbitkan Penetapan Jumlah Piutang Negara.

Pemerintah akan menelusuri sisa aset properti eks BPPN sesuai temuan BPK.

- 3). Aset eks Pertamina sebesar Rp41.837.639.104.563 merupakan nilai aset sebagai akibat penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset eks Pertamina per 31 Desember 2012 tersebut terdiri atas:

- a. Aktiva Tetap LNG BADAQ-Bontang Rp16.302.963.578.041 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp11.029.729.944.488.

Perolehan aset LNG Arun dan LNG Badak berasal dari pinjaman sindikasi bank yang tertuang dalam *PSC Agreement* antara Pertamina (saat itu bertindak selaku Pemerintah) dengan PSC untuk pembangunan LNG Arun dan LNG Badak.

Aset kilang LNG Arun dan LNG Badak dioperasikan oleh PT Arun NGL dan PT Badak NGL di bawah pengawasan PT Pertamina (Persero) yang ditunjuk sebagai penanggung jawab sementara atas kedua aset LNG dimaksud sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92/KMK.06/2008.

Nilai aset kilang LNG Badak per 31 Desember 2012 sebesar Rp16.302.963.578.041 berasal dari hasil penilaian DJKN per 12 Nopember 2010 sebesar Rp16.302.447.401.562, ditambah hasil penilaian DJKN per 20 April 2012 sebesar Rp3.725.430.479, dikurangi penghapusan terhadap penilaian aset per 12 Nopember 2010 pada 21 September 2012 sebesar Rp3.209.254.000.

Nilai aset kilang LNG Arun berdasarkan hasil penilaian DJKN per 17 Maret 2011. Inventarisasi dan penilaian terhadap aktiva kilang LNG Arun dilakukan oleh PT Arun NGL, Kanwil I DJKN Banda Aceh dan KPKNL Lhokseumawe sejak tanggal 15 Desember 2010, sedangkan terhadap aktiva kilang LNG Badak dilakukan oleh PT Badak NGL, Kanwil XIII DJKN Samarinda dan KPKNL Bontang sejak tanggal 1 Nopember 2010. Saat ini Laporan Inventarisasi dan Penilaian aktiva kilang LNG Arun dan LNG Badak sedang dalam tahap penyelesaian oleh masing-masing Tim Pelaksana.

- b. Aset eks PT Pertamina yang digunakan oleh Pertamina EP sebesar Rp12.824.018.245.034.

Terhadap BMN berupa aset eks Kontrak Kerja Sama yang dipergunakan oleh PT Pertamina EP dengan nilai perolehan per 17 September 2003 sebesar Rp16.242.092.564.001 telah dilakukan inventarisasi dan penilaian oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bersama dengan PT Pertamina EP, dengan hasil pelaksanaan inventarisasi dan penilaian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian DJKN	Nilai
Target IP (Nilai Perolehan aset per 17 Sept 2003)	16.242.092.564.001
Hasil Inventarisasi	13.692.173.347.220
Aset Tidak Ditemukan, Aset di Luar WKP, Aset FUPP, dan Lainnya	2.549.919.216.781
Nilai Wajar Hasil Penilaian DJKN	12.824.018.245.034

- c. Aset eks PT Pertamina berupa delapan Aset Tetap sebesar Rp1.680.927.337.000.

Tim Penilai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara telah melakukan penilaian wajar atas delapan aset tetap eks Pertamina pada tahun 2012, dengan nilai wajar BMN sebagai berikut.

No	Lokasi Aset	Tanah (m2)	Bangunan (m2)	Nilai Perolehan (KMK 92/2008)	Penilaian DJKN (ribuan Rp)	Tanggal Penilaian
1	Jl. Agus Salim 108 & 108A	1.057	837	9.293.188.000	35.037.558	17-9-2012
2	Jl. Surabaya 60 & 60Pav	1.468	357	9.410.537.000	36.505.456	17-9-2012
3	Jl. Brawijaya VIII/30	665	401	6.486.717.000	14.490.489	6-9-2012
4	Jl. Terogong 33	105.557	N/A	207.375.000.000	1.233.433.545	10-8-2012
5	Jl. Tanjung 34	1.076	337	1	15.379.053	21-10-2012
6	Jl. Dipati Ukur 31	751	N/A	2.131.297.000	2.991.056	31-10-2012
7	Jl. Abdul Muis 68	22.305	N/A	121.275.536.000	265.899.043	12-12-2012
8	Jl. Kapten Tendean	46.280	N/A	15.505.583.177	77.191.137	26-9-2012
Jumlah				371.477.858.178	1.680.927.337	

- 4) Aset Lain-lain berupa Piutang Migas per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp0 dan Rp1.362.316.162.707. Pada TA 2012, Aset Lain-lain berupa piutang migas dikelompokkan dalam akun Piutang Jangka Panjang.
- 5) Aset Lain-lain yang dikelola oleh DJKN selaku Pengelola Barang sebesar Rp516.316.603 terdiri dari aset Eks USAID, aset eks Indonesian *Debt Restructuring Agency* (INDRA), aset eks GIZ-Profi, aset eks GIZ-GGPAS, dan Gratifikasi KPK.

C.2.31 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Aset Lainnya Rp19,90 triliun

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp19.901.414.612.944 dan Rp19.416.938.848.980 terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. Penerusan Pinjaman	220.071.430.388	232.701.379.846
2. Aset Lain-lain	19.681.343.182.556	19.184.237.469.134
Jumlah	19.901.414.612.944	19.416.938.848.980

Nilai Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lainnya tersebut diakui sebagai pengurang nilai Piutang yang disajikan pada Aset Lainnya.

- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Penerusan Pinjaman sebesar Rp220.071.430.388 merupakan Penyisihan Penerusan Pinjaman pada BA 999.04.
- Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Aset Lain-lain sebesar Rp19.681.343.182.556 terdiri dari Penyisihan Aset Lain-lain pada BA 999.03 sebesar Rp17.726.136.424 berupa aset eks dana bergulir pada Kementerian Perindustrian dan Piutang PNPB berupa Dividen, dan pada BA 999.04 sebesar Rp19.663.617.046.132.

Utang PFK Rp451,86 miliar

C.2.32 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang PFK per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp451.860.600.337 dan Rp1.755.574.696.265 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2011	Transaksi Tahun 2012		31 Desember 2012
		Penerimaan	Pengeluaran	
PFK 10% Gaji PNS	1.389.849.005.229	17.887.641.206.166	19.069.405.998.184	208.084.213.211
PFK 2% Gaji Terusan	(2.278.871.544)	3.042.006.448	6.586.462.845	(5.823.327.941)
PFK 2% Iuran Kes. Pemda	318.355.798.664	2.459.691.162.754	2.556.196.353.521	221.850.607.897
PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	4.921.120.354	12.479.957.504	18.929.544.822	(1.528.466.964)
PFK 2% Askes TNI/Polri	(353.961.532)	1.080.347.216	0	726.385.684
PFK Lain-Lain	28.023.085.835	378.878.255.234	401.940.793.696	4.960.547.373
PFK Bulog	17.058.519.259	246.883.384.696	240.351.262.878	23.590.641.077
JUMLAH	1.755.574.696.265	20.989.696.320.018	22.293.410.415.946	451.860.600.337

C.2.33 Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang Kepada Pihak Ketiga Rp29,74 triliun

Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp29.738.138.976.562 dan Rp31.780.634.369.020 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
K/L	12.391.780.077.862	8.854.090.097.568
BUN	17.346.358.898.700	22.926.544.271.452
Jumlah	29.738.138.976.562	31.780.634.369.020

- Utang kepada Pihak Ketiga yang berada di K/L sebesar Rp12.391.780.077.862 antara lain berupa dana pihak ketiga yang dikelola/dikuasai oleh K/L, dana yang masih harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, honor yang belum dibayarkan kepada pegawai, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 30**.
- Utang kepada pihak ketiga yang berada di BUN sebesar Rp17.346.358.898.700, terdiri dari:

(dalam rupiah)

Utang Kepada Pihak Ketiga	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
BA 999.05	16.039.742.327.165	18.292.725.677.411
BA 999.08	186.675.433.374	3.495.984.368.048
Utang terkait Retur SP2D	1.119.941.138.161	1.137.834.225.993
Jumlah	17.346.358.898.700	22.926.544.271.452

- Utang pada BA 999.05 (Utang Transfer ke Daerah) merupakan utang kekurangan Transfer ke Daerah Dana Bagi Hasil yang belum dibayarkan kepada pemda penerima. Rincian Utang Transfer ke Daerah dan kekurangan dana bagi hasil yang belum dibayarkan sebesar Rp16.039.742.327.165, adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No	Jenis Kewajiban	Jumlah
1.	Kewajiban Diestimasi DBH Pajak TA 2012	1.576.880.155.457
2.	Dana Cadangan TA 2012	12.660.342.993.887
3.	Kurang Bayar DBH PPh Perorangan	877.896.330.191
4.	Kurang Bayar DBH BP PBB	7.210.980.531
5.	Kurang Bayar DBH PBB	252.648.869.223
6.	Kurang Bayar Cukai Hasil Tembakau TA 2011	91.584.683.712
7.	Kurang Bayar DBH Minyak Bumi TA 2012	357.460.669.187
8.	Kurang Bayar DBH Pertambangan Umum TA 2008-2012	188.755.284.278
9.	Kurang Bayar DBH Kehutanan TA 2006-2011	26.962.360.699
	Total	16.039.742.327.165

b. Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga pada BA 999.08 (Belanja Lain-lain) per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp186.675.433.374 terdiri dari:

- (1) kewajiban atas ongkos angkut beras PNS tahun 2012 yang belum dibayarkan berdasarkan Audit BPK sebesar Rp4.840.753.374; dan
- (2) utang Kepada Pihak Ketiga pada Kementerian Sekretariat Negara berupa pembayaran termin IV-VII (TA 2013) pengadaan *Completion Center* Pesawat Kepresidenan. Nilai sebesar Rp181.834.680.000 dihitung berdasarkan nilai Utang sebesar USD18.804.000 dengan kurs tengah Bank Indonesia pada hari kerja terakhir tanggal 28 Desember 2012 sebesar USD1 = Rp9.670.

c. Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan utang yang timbul kepada pihak ketiga karena terjadinya Penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening yaitu retur SP2D sebesar Rp1.119.941.138.161. Jumlah ini berasal dari Utang Tahun 2011 sebesar Rp1.137.834.225.993 ditambah penerimaan Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening tahun berjalan sebesar Rp3.765.941.982.780 dikurangi pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga karena kesalahan rekening sebesar Rp3.802.066.475.202 serta Koreksi Pemindahbukuan sebesar Rp18.231.404.590.

C.2.34 Utang Biaya Pinjaman

Utang Biaya Pinjaman
Rp23,10 triliun

Jumlah Utang Biaya Pinjaman per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp23.099.285.717.583 dan Rp21.924.038.335.465 merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman DN	20.613.072.214.139	19.275.822.333.294
Utang Bunga Pinjaman LN	2.486.213.503.444	2.648.216.002.171
Jumlah	23.099.285.717.583	21.924.038.335.465

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut.

Utang Bunga Obligasi
dan pinjaman dalam
negeri

1. Utang Bunga Obligasi dan Bunga Pinjaman Dalam Negeri (DN) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp20.613.072.214.139 dan Rp19.275.822.333.294 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Fixed Rate Bonds	13.473.294.459.092	13.328.508.988.302
ORI	115.220.237.595	180.003.432.785
SBSN	1.187.093.504.560	796.615.939.740

Variable Rate Bonds	562.986.830.700	723.777.587.150
SUP kepada BI	80.992.417.836	82.027.721.892
SBN Valas	5.183.426.483.222	4.163.545.829.445
Pinjaman Dalam Negeri	10.058.281.134	1.342.833.980
Jumlah	20.613.072.214.139	19.275.822.333.294

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 31**.

*Utang Bunga Pinjaman
Luar Negeri*

- Utang Bunga Pinjaman Luar Negeri per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp2.486.213.503.444 dan Rp2.648.216.002.171 dapat dirinci sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Bilateral	1.064.654.480.636	1.233.987.416.238
Kredit Komersial	50.834.612.223	59.850.881.093
Kredit Ekspor	310.100.183.979	394.040.640.947
Multilateral	1.060.624.226.606	960.337.063.893
Jumlah	2.486.213.503.444	2.648.216.002.171

C.2.35 Utang Subsidi

*Utang Subsidi Rp54,68
triliun*

Jumlah Utang Subsidi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp54.678.143.480.247 dan Rp29.767.908.989.742, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Subsidi PSO yang Belum Disalurkan (BULOG, PT Pelni, PT KAI, PT Pos)	583.490.497.867	4.221.221.930.818
Utang Subsidi Listrik	20.565.784.091.867	12.101.668.180.781
Utang Subsidi BBM dan LPG	23.394.896.413.838	8.966.000.950.449
Utang Subsidi Pupuk dan Benih	9.538.562.164.164	4.077.250.619.191
Utang Subsidi Bunga Kredit Program KLBI	595.410.312.511	401.767.308.503
Jumlah	54.678.143.480.247	29.767.908.989.742

Penjelasan masing-masing Utang Subsidi adalah sebagai berikut.

- Utang Subsidi pada Perum BULOG sebesar Rp187.928.634.424 merupakan utang subsidi pangan kepada Perum BULOG yang akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening dana cadangan subsidi/PSO atas nama Menteri Keuangan.
- Utang Subsidi pada Kementerian Perhubungan sebesar Rp333.899.363.443 merupakan Utang Subsidi/PSO kepada PT PELNI sebesar Rp197.631.980.000 dan Utang Subsidi/PSO kepada PT KAI sebesar Rp136.267.383.443. Utang Subsidi sebesar Rp333.899.363.443 akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening Dana Cadangan subsidi/PSO atas nama Menteri Keuangan.
- Utang Subsidi pada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp61.662.500.000 merupakan Utang subsidi/PSO kepada PT POS yang akan diselesaikan dengan menggunakan dana yang telah ditempatkan di rekening dana cadangan subsidi/PSO atas nama Menteri Keuangan.
- Utang Subsidi pada Kementerian Keuangan sebesar Rp44.556.090.818.216 terdiri dari:
 - Utang Subsidi Listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp20.565.784.091.867 merupakan kekurangan subsidi listrik tahun 2011 dan 2012. Saldo utang tersebut berasal dari saldo per 31 Desember 2011 sebesar Rp12.101.668.180.781, dikurangi pembayaran pada tahun 2012 sebesar Rp4.506.797.782.554 atas kekurangan

subsidi tahun 2010, dan sebesar Rp284.141.726.597 berasal dari rekening dana cadangan tahun 2011, serta ditambah dengan kekurangan subsidi listrik hasil audit BPK tahun 2012 sebesar Rp13.255.055.420.237; dan

- b. Utang Subsidi BBM dan LPG kepada pihak ketiga sebesar Rp23.394.896.413.838 yang berasal dari kekurangan subsidi BBM TA 2010 dan TA 2011 hasil audit BPK RI serta kekurangan subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg TA 2012. Adapun rincian utang tersebut adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Kekurangan Subsidi BBM Jenis Minyak Solar Hasil Audit BPK TA 2010	32.195.316
Kekurangan Subsidi BBM Jenis Premium Hasil Audit BPK TA 2011	3.462.711.086.047
Kekurangan Subsidi BBM dan LPG Tabung 3 Kg TA 2012	19.932.153.132.475
Jumlah	23.394.896.413.838

- c. Utang Subsidi Bunga sebesar Rp595.410.312.511 yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
Subsidi Bunga KKP-E	55.091.911.784
Subsidi Bunga KPEN-RP	74.540.394.082
Subsidi Bunga KP eks KLBI	4.177.033.785
Subsidi IJP KUR	456.174.919.839
Subsidi Bunga KPP NAD-Nias	188.743.149
Subsidi Bunga KUPS	4.936.963.449
Subsidi Bunga S-SRG	300.346.423
Jumlah	595.410.312.511

5. Utang Subsidi pada Kementerian Pertanian sebesar Rp9.538.562.164.164 merupakan Utang Pemerintah kepada BUMN Operator Subsidi Pupuk yang terdiri dari:

- a. Dana *escrow account* senilai Rp1.113.308.948.177;
- b. Kekurangan bayar subsidi pupuk kepada PT Pupuk Kalimantan Timur berdasarkan hasil audit BPK Nomor 18/AUDITAMA/VII/PDPT/07/2011 sebesar Rp84.228.013.923;
- c. Kekurangan pembayaran subsidi pupuk tahun 2011 senilai Rp1.703.897.504.130 berdasarkan hasil audit BPK TA 2011 kepada produsen:

(dalam rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Pupuk Sriwijaya Palembang	18.132.316.193
PT Pupuk Kaltim	811.832.392.822
PT Pupuk Iskandar Muda	155.436.631.292
PT Petrokimia Gresik	718.496.163.823
Jumlah	1.703.897.504.130

- d. Kekurangan Pembayaran Subsidi Pupuk sebesar Rp6.637.127.697.934 berdasarkan hasil audit BPK RI atas belanja Subsidi Pupuk TA 2012.

C.2.36 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

*Bagian Lancar Utang
Jangka Panjang
Rp118,22 triliun*

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp118.216.112.940.270 dan Rp106.777.089.696.825 merupakan utang Pemerintah yang akan dibayar atau jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Bagian Lancar Utang Luar Negeri:		
BA 999.01	55.318.357.096.676	48.296.753.806.497
Subtotal	55.318.357.096.676	48.296.753.806.497
Bagian Lancar Utang Dalam Negeri:		
BA 999.01 - Surat Berharga Negara (SBN)	62.755.785.789.452	58.344.607.418.456
BA 999.01 - Pinjaman Dalam Negeri	141.256.054.142	135.658.235.872
Utang pada POLRI	-	70.236.000
Utang pada Kemendikbud	714.000.000	-
Subtotal	62.897.755.843.594	58.480.335.890.328
Jumlah	118.216.112.940.270	106.777.089.696.825

Bagian Lancar SBN yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun adalah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
I. Fixed Rate Bonds		
Nominal	33.013.173.000.000	27.683.468.000.000
Unamortized Premium (<i>Discount</i>)	(71.468.618.000)	(67.374.007.000)
Nilai bersih (nilai buku)	32.941.704.382.000	27.616.093.993.000
II. Variable Rate		
Nominal	-	4.368.483.000.000
Unamortized Premium (<i>Discount</i>)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	-	4.368.483.000.000
III. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
Nominal yg harus diamortisasi	5.274.926.878.452	4.184.803.289.456
Accrued Indexation	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	5.274.926.878.452	4.184.803.289.456
IV. ORI		
Nominal	10.475.875.000.000	21.026.495.000.000
Unamortized Premium (<i>Discount</i>)	-	-
Nilai bersih (nilai buku)	10.475.875.000.000	21.026.495.000.000
V. ZERO COUPON		
Nominal	1.263.000.000.000	1.249.000.000.000
Unamortized Premium (<i>Discount</i>)	(32.112.311.000)	(100.267.864.000)
Nilai bersih (nilai buku)	1.230.887.689.000	1.148.732.136.000
VI. SBSN		
Nominal	12.833.860.000.000	-
Unamortized Premium (<i>Discount</i>)	(1.468.160.000)	-
Nilai bersih (nilai buku)	12.832.391.840.000	-
Total SBN (I + II + III + IV + V)	62.755.785.789.452	58.344.607.418.456

Catatan:

- Fixed Rate Bond terdiri dari 4 seri Fixed Rate Bond;
- ORI terdiri dari 2 seri, yaitu ORI005 dan ORI007;
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI terdiri dari SU-002, SU-004, SU-007, dan SRBI-01;
- Zero Coupon seri ZC005

C.2.37. Utang SBN Jangka Pendek

Utang SBN Jangka
Pendek Rp22,69 triliun

Jumlah SBN Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp22.689.283.544.000 dan Rp39.408.181.897.000, merupakan instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan dengan diskonto yang akan jatuh tempo kurang dari satu tahun. SBN Jangka Pendek ini terdiri dari utang Surat Perbendaharaan Negara (SPN) sebesar

Rp22.496.764.023.000 dan SPN Syariah Rupiah sebesar Rp192.519.521.000. Rincian SBN Jangka Pendek dapat dilihat dalam **Daftar 31**.

C.2.38. Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan

*Utang Kelebihan
Pembayaran Pendapatan
Rp812,93 miliar*

Jumlah Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp812.930.306.639 dan Rp704.437.258.982 merupakan kewajiban Pemerintah atas kelebihan pembayaran pendapatan yang dilakukan oleh penyetor namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar oleh Pemerintah dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
SPM-KP yang belum diterbitkan SP2D-nya dan pengembalian pungutan ekspor yang belum direalisasikan oleh eksportir pada Kementerian Keuangan	753.033.696.543	704.320.653.776
Kelebihan atas pembayaran Jasa Kenavigasian oleh PT Admiral Lines pada Kementerian Perhubungan	-	116.103.388
Utang kelebihan pembayaran pendapatan pada Kementerian ESDM	59.896.610.096	501.818
Jumlah	812.930.306.639	704.437.258.982

C.2.39. Pendapatan Diterima di Muka

*Pendapatan Diterima
Dimuka Rp6,72 triliun*

Jumlah Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp6.721.668.089.201 dan Rp8.639.914.082.680 merupakan pendapatan yang sudah masuk ke Kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga. Sebagian besar saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2012 berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sebesar Rp6.187.962.032.241 yang merupakan pendapatan terkait izin spektrum/frekuensi. Rincian Pendapatan Diterima di Muka adalah sebagaimana pada **Daftar 30**.

C.2.40. Utang Jangka Pendek Lainnya

*Utang Jangka Pendek
Lainnya Rp9,73 triliun*

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp9.728.965.176.829 dan Rp5.687.100.837.136, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
1. MA	5.000.000	3.000.000
2. Kementerian Pertahanan	69.911.720.814	35.170.771.795
3. Kementerian Hukum dan HAM	-	9.578.250
4. Kementerian Keuangan	-	4.155.000
5. Kementerian Pertanian	86.969.611	16.000.000
6. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	78.639.309.319	33.980.928.430
7. Kementerian Kesehatan	78.814.543	580.449.931
8. Kementerian Agama	249.772.045	36.373.668
9. Kementerian Pekerjaan Umum	-	14.766.663.694
10. Dewan Ketahanan Nasional	-	107.425.414
11. BKKBN	-	10.456.764
12. Komnas HAM	1.322.008.000	-

13. KPU	-	6.699.168
14. Kementerian Perumahan Rakyat	-	1.333.290
15. LPP TVRI	43.651.814.893	-
16. BPLS	-	29.321.813.475
17. BA 999.03	-	39.174.191.965
18. BA 999.99	1.879.198.705.596	212.347.602.839
19. Kewajiban terkait Rekening Migas	7.655.821.062.008	5.321.563.393.453
Jumlah	9.728.965.176.829	5.687.100.837.136

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.03 merupakan Utang *promissory notes* yang terkait dengan penyertaan Pemerintah pada lembaga-lembaga keuangan internasional yang belum dibayar dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun setelah tanggal neraca.

Nilai kewajiban jangka pendek berupa *promissory notes* pada BA 999.03 Tahun 2012 menjadi Rp0 (nol) karena *promissory notes* tahun 2011 telah dibayarkan pada tahun 2012 dan *promissory notes* yang akan dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Internasional pada TA 2013 tidak ada.

Utang Jangka Pendek Lainnya pada BA 999.99 per 31 Desember 2012 sebesar Rp1.879.198.705.596 terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Kekurangan dropping belanja pensiun ke PT Taspen, Desember 2012	1.729.138.664.566
2. Kekurangan dropping belanja pensiun ke PT ASABRI, Desember 2012	112.159.778.030
3. Saldo Utang atas imbalan jasa/fee bank/pos yang belum dibayarkan sampai dengan Tahun 2012	37.900.263.000
Jumlah	1.879.198.705.596

Kewajiban terkait Rekening Migas (Nomor 600.000411.980) 31 Desember 2012 sebesar Rp7.655.821.062.008 merupakan estimasi kewajiban kontraktual Pemerintah yang harus dibayarkan dalam rangka pelaksanaan kontrak kerjasama dengan KKKS berupa *DMO fee*, dan pengembalian (*reimbursement*) PPN dan PBB. Total saldo penerimaan migas yang berada di rekening 600.000411.980 per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp13.005.460.815.909. Berdasarkan hasil verifikasi, jumlah yang diestimasi akan dibayarkan kepada KKKS adalah sebesar Rp7.655.821.062.008 dan sisanya sebesar Rp5.349.639.753.901 yang sudah dapat diperhitungkan menjadi hak Negara disajikan sebagai Pendapatan yang Ditangguhkan. Rincian kewajiban Pemerintah kepada KKKS adalah:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Fee Penjualan PT Pertamina (Persero)	2.582.277.176.647	2.311.460.414.904
<i>DMO Fee</i> dan <i>Fee</i> lainnya	2.115.017.241.152	1.049.837.098.783
<i>DMO Fee</i> PT Pertamina EP	-	811.426.338.364
<i>Underlifting</i> KKKS	-	574.361.770
<i>Reimbursement</i> PPN	2.782.449.544.114	957.364.561.751
PDRD	31.478.590.219	3.911.179.881
PBB Migas	144.598.509.876	186.989.438.000
Jumlah	7.655.821.062.008	5.321.563.393.453

C.2.41. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan

*Utang Jangka Panjang
DN Perbankan Rp1,66
triliun*

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp1.658.364.752.248 dan Rp877.330.765.232. Utang tersebut merupakan utang dalam negeri perbankan (BUMN) yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca.

Utang Jangka Panjang
SBN Dalam Negeri
Rp1.279,85 triliun

C.2.42. Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri

Jumlah Utang Jangka Panjang Surat Berharga Negara Dalam Negeri per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.279.847.990.292.207 dan Rp1.085.324.545.750.551 merupakan posisi utang dalam bentuk SBN yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN per 31 Desember 2012 ini terdiri dari SBN Berdenominasi dalam rupiah sebesar Rp1.014.361.035.001.200 dan SBN Internasional (valas) sebesar Rp265.486.955.291.000.

Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SBN adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis SBN	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
I. Fixed Rate Bonds		
<i>Principle Outstanding</i>	543.227.588.000.000	446.842.288.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	4.460.562.331.500	(4.169.639.225.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)	547.688.150.331.500	442.672.648.775.000
II. ORI		
<i>Principle Outstanding</i>	23.676.745.000.000	21.589.875.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	23.676.745.000.000	21.589.875.000.000
III. Zero Coupon Bonds		
<i>Principle Outstanding</i>		1.263.000.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>		(104.765.143.000)
Nilai Bersih (Nilai Buku)		1.158.234.857.000
IV. Variable Rate Bonds		
<i>Principle Outstanding</i>	122.754.933.000.000	130.694.933.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	122.754.933.000.000	130.694.933.000.000
V. Surat Utang Pemerintah kepada BI		
<i>Principle Outstanding</i>	234.869.538.205.700	240.451.634.074.551
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	-	-
Nilai Bersih (Nilai Buku)	234.869.538.205.700	240.451.634.074.551
VI. SBSN		
<i>Principle Outstanding</i>	85.788.915.000.000	52.552.970.000.000
<i>Unamortized Premium (Discount)</i>	(417.246.536.000)	300.326.346.000
Nilai Bersih (Nilai Buku)	85.371.668.464.000	52.853.296.346.000
Subtotal SBN Denominasi Rupiah	1.014.361.035.001.200	889.420.622.052.551
VII. Obligasi Negara dalam Valas		
<i>Principles Outstanding</i>	262.935.339.353.573	207.278.012.102.053
<i>Accrued Indexation</i>	1.972.010.646.427	(11.648.212.102.053)
<i>Net Unamortized Premium (Discount)</i>	579.605.291.000	274.123.698.000
Subtotal Obligasi Negara dalam (Valas)	265.486.955.291.000	195.903.923.698.000
Total SBN Jangka Panjang*)	1.279.847.990.292.200	1.085.324.545.750.551

*) selisih antara data neraca dengan rincian utang sebesar Rp7 karena pembulatan

Catatan:

- *Fixed Rate Bonds* terdiri dari 37 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2042.
- ORI terdiri dari 2 seri dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2015.
- *Variable Rate Bonds* terdiri dari 13 seri, dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2020.
- *Fixed Rate Bonds*, ORI, dan *Variable Rate Bonds* diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada Bank Indonesia (BI) terdiri dari SU002, SU004, SU007, dan SRBI01, dengan masa jatuh tempo tahun 2025 – 2033. SUP tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*).

- SBSN terdiri dari 8 seri *fixed rate* dengan masa jatuh tempo tahun 2015-2036, 14 seri SDHI dengan masa jatuh tempo 2014-2022, 2 seri Sukuk Ritel (SR-003 dan SR-004) dengan masa jatuh tempo tahun 2014 -2015, dan 4 seri PBS dengan masa jatuh tempo tahun 2018-2037.
- Obligasi Negara dalam Valas terdiri dari 14 seri berdenominasi USD dengan masa jatuh tempo tahun 2014 – 2038, 3 seri berdenominasi JPY yang jatuh tempo tahun 2019-2022, dan 3 seri SBSN berdenominasi USD yang jatuh tempo tahun 2014-2022.

Dalam rangka penerapan *Asset Liability Management* (ALM) Neraca Republik Indonesia yang bermanfaat antara lain untuk memperkuat permodalan Bank Indonesia, IMF dan Bank Dunia merekomendasikan konversi Surat Utang Pemerintah (SUP) menjadi SUN *tradable*. Sampai dengan saat ini, belum ada kesepakatan final antara Pemerintah dan Bank Indonesia mengenai konversi SUP menjadi SBN *tradable*. Pemerintah akan mempelajari konversi SUP menjadi SBN *tradable*, menyusun “buku putih” mengenai kebijakan BLBI dan Rekapitalisasi Perbankan dan selanjutnya akan melakukan pembahasan dengan BI. Apabila kesepakatan mengenai konversi tersebut telah dicapai, implementasi konversi baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari DPR.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 32**.

C.2.43. Utang Kepada Dana Pensiun dan THT

*Utang Kepada Dana
Pensiun dan THT
Rp18,16 triliun*

Utang Kepada Dana Pensiun dan Tabungan Hari Tua (THT) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp18.161.745.000.000 dan Rp11.822.231.724.875 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program Dana Pensiun dan THT akibat kenaikan gaji PNS tahun 2007, 2008, 2009, 2010, dan 2011 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Jumlah (Rp)
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 9 Tahun 2007	1.638.443.906.070
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 14 Tahun 2008	2.450.505.392.359
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 8 Tahun 2009	3.024.845.340.493
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 25 Tahun 2010	1.275.570.232.079
<i>Unfunded Liability</i> akibat PP Nomor 11 Tahun 2011	3.432.866.853.874
Jumlah	11.822.231.724.875
Penetapan <i>Unfunded PSL</i> tahun 2007 s.d 2011	19.161.745.000.000
Pembayaran Tahun 2012	1.000.000.000.000
Jumlah	18.161.745.000.000

Nilai *unfunded liability* atas Program THT sebesar Rp11.822.231.724.875 merupakan nilai yang ditetapkan PT Taspen per 31 Desember 2012. Pembayaran *unfunded liability* akan dilakukan Pemerintah berdasarkan kemampuan keuangan negara.

Berdasarkan surat Menteri Keuangan kepada PT Taspen Nomor S-160/MK.02/2013 tanggal 4 Maret 2013, Pemerintah menetapkan nilai *unfunded liability* atas program THT adalah sebesar Rp19.161.745.000.000, berdasarkan hasil *due diligence* yang dilakukan BPKP bahwa *unfunded PSL* PT Taspen Tahun 2007 s.d 2011. Jumlah nilai Rp19.161.745.000.000 termasuk jumlah PSL sebesar Rp11.822.231.724.875 yang telah dicatat dalam Tahun 2011. Atas penetapan tersebut, PT Taspen diminta untuk melakukan penyesuaian penggunaan asumsi perhitungan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

*Utang Jangka Panjang
DN Lainnya Rp5,02triliun*

C.2.44. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp5.024.283.525.498 dan Rp5.033.082.825.744, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional	2.826.956.396.636	2.826.956.396.636
Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program Kredit Usaha Tani (KUT) Tahun Penyediaan (TP) 1998/1999	1.911.927.727.159	1.911.927.727.159
Utang Jangka Panjang dalam Negeri Lainnya pada K/L	285.399.401.703	294.198.701.949
Jumlah	5.024.283.525.498	5.033.082.825.744

- Utang Pemerintah Indonesia kepada BI dalam rangka Penyertaan pada Lembaga Keuangan Internasional

Dalam rangka penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional, sejak tahun 1972 s.d. 1999, Bank Indonesia (BI) atas nama Pemerintah juga telah melakukan pembayaran secara tunai atas penyertaan Pemerintah pada lembaga keuangan internasional. Jumlah yang telah dibayarkan oleh BI adalah sebesar Rp2.826.956.396.636, termasuk di antaranya Rp2.764.860.843.170 kepada IMF. Pembayaran oleh BI dilakukan sebelum terbit UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang BI. BI mencatat pembayaran tersebut sebagai dana talangan/piutang kepada Pemerintah. Pemerintah belum menyepakati nilai dan status dana talangan/piutang tersebut. Pemerintah mengusulkan kepada BI, agar dana talangan/piutang tersebut dihapuskan dan tidak ditagihkan kepada Pemerintah. Terkait dengan itu, Menteri Keuangan telah mengirim surat kepada BI beberapa kali, terakhir dengan surat Nomor S-08/MK.11/2010 tanggal 9 Maret 2010 untuk meminta jawaban mengenai penyelesaian status dana talangan sesuai dengan usulan Pemerintah agar dapat dihapuskan. Kementerian Keuangan telah melakukan pertemuan dengan BI pada tanggal 7 Mei 2010, dan sesuai kesepakatan dilakukan beberapa langkah berikut: (1) Pemerintah dan BI melakukan verifikasi atas seluruh data dan transaksi dan talangan tersebut untuk memastikan jumlah dan status klaim BI; (2) Bila status dan jumlah dana talangan tersebut telah disepakati bersama, maka Pemerintah dan BI akan segera melakukan langkah penyelesaian status dana talangan.

Pemerintah dan BI telah melakukan verifikasi atas dana talangan tersebut, dan disepakati bahwa jumlah sebesar Rp2.780.599.599.504 telah didukung dengan data dan dokumen yang memadai yaitu Rekening Koran, Warkat transaksi, Surat dari BI ke Kementerian Keuangan dan sebaliknya, faksimili, SWIFT, dan Teleks. Sementara untuk jumlah Rp46.356.797.132 hanya didukung rekening koran. Pemerintah dan Bank Indonesia hingga saat ini terus melakukan pembahasan terkait nilai dana talangan tersebut dan opsi penyelesaian yang akan diambil atas permasalahan dana talangan tersebut.

- Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999

Kredit Usaha Tani (KUT) adalah salah satu skim Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) berupa pemberian kredit modal kerja yang diberikan BI kepada bank pelaksana untuk disalurkan kepada petani yang tergabung dalam kelompok tani melalui koperasi primer/LSM guna membiayai usaha taninya dalam rangka intensifikasi padi, palawija, dan hortikultura. Terdapat 2 (dua) pola dalam penyaluran KUT, yaitu pola *executing* dan pola *channeling*. Penyaluran KUT TP 1998/1999 dilakukan dengan pola *channeling* yakni bank pelaksana terbatas hanya sebagai penyalur (agen *channeling*) ke Koperasi/LSM.

Sedangkan Koperasi/LSM bertindak sebagai *executing* yang bertanggung jawab atas penyaluran dan pelunasan KUT kepada dan dari kelompok tani.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-628/MK.017/1998 tanggal 7 Desember 1998, pembagian *risk sharing* atas tunggakan KUT tersebut yaitu sebesar 52,25% ditanggung Pemerintah, sebesar 42,75% ditanggung Bank Indonesia, dan sebesar 5,00% ditanggung Perum Jamkrindo.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 091/LHP/XV/12/2010 tanggal 31 Desember 2010 diketahui bahwa realisasi penyaluran KUT TP 1999/1998 adalah sebesar Rp7.677.429.744.359,79, terdapat pelunasan (BI mendebet rekening giro bank pelaksana di BI) sebesar Rp1.968.960.319.699,61, sehingga masih terdapat tunggakan sebesar Rp5.708.469.424.660,18. Dari tunggakan tersebut terdapat nilai yang belum disepakati berupa penyaluran tidak didukung dokumen lengkap sebesar Rp1.539.052.034.110,09 dan tunggakan yang tidak didukung Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) sebesar Rp510.225.568.235,53. Dengan demikian, estimasi tunggakan yang dapat diperhitungkan untuk *risk sharing* adalah sebesar RpRp3.659.191.822.314,56. *Risk sharing* yang ditanggung Pemerintah adalah sebesar 52,25%, sehingga Pemerintah mengakui adanya Kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program KUT TP 1998/1999 sebesar Rp1.911.927.727.159,36 (52,25% x Rp3.659.191.822.314,56).

Pemerintah dapat menyesuaikan nilai kewajiban atas *Risk Sharing* Kredit Program. Dalam rangka penyelesaian kewajiban *risk sharing* program KUT, dan sesuai dengan hasil rapat konsultasi Pemerintah dengan DPR pada tahun 2004, besaran kewajiban *risk sharing* KUT tersebut perlu mendapat persetujuan DPR.

- Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L

Utang Jangka Panjang dalam Negeri lainnya pada K/L sebesar Rp285.399.401.703 adalah utang pada Kementerian Luar Negeri sebesar Rp69.746.264.634, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp58.154.612.073, Kementerian Kehutanan sebesar Rp118.153.090.986, dan Lembaga Penyiaran Publik TVRI Rp39.345.434.010.

C.2.45. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

*Utang Jangka Panjang
LN Perbankan Rp559,49
triliun*

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp559.487.514.862.710 dan Rp571.982.048.619.444 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Bilateral	287.829.439.030.809	306.805.893.874.544
Multilateral	211.246.670.138.695	197.266.978.813.746
Kredit Ekspor	56.756.172.056.900	63.382.838.534.316
Kredit Komersial	3.655.233.636.306	4.526.337.396.838
Jumlah	559.487.514.862.710	571.982.048.619.444

*Utang Jangka Panjang
Luar Negeri Lainnya
Rp26,57 triliun*

C.2.46. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp26.569.686.370.533 dan Rp25.889.179.304.040, dengan rincian:

(dalam rupiah)

	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
International Monetary Fund	26.550.675.238.721	25.871.090.740.489
International Development Association	5.173.139.668	5.173.139.668
Multilateral Investment Guarantee Agency	10.975.624.060	10.292.343.224
Common Fund for Commodities	2.862.368.084	2.623.080.659
Total Utang Jangka Panjang Lainnya	26.569.686.370.533	25.889.179.304.040

Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya adalah dalam bentuk *Promissory Notes* terkait dengan Penyertaan Pemerintah Lembaga Keuangan Internasional yang jatuh tempo/dibayar lebih dari satu tahun sejak tanggal laporan, sedangkan yang akan jatuh tempo satu tahun setelah tanggal neraca disajikan sebagai Utang Jangka Pendek Lainnya.

Rekapitulasi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

*Posisi Utang Luar negeri,
SBN, dan PN*

Kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri, SBN, dan *promissory notes* dalam mata uang Rupiah, serta kenaikan dan penurunan saldo Utang Luar Negeri (tidak termasuk utang bunga) dalam valuta asing secara keseluruhan disajikan pada Tabel 16 dan Tabel 17.

Tabel 16 Posisi Utang Luar Negeri, SBN, dan Promissory Notes

(Dalam juta rupiah)

Jenis Utang	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (LN):			
Utang LN – Bagian Lancar	55.453.404,89	48.296.753,81	7.156.651,08
Utang LN – Jangka Panjang	557.069.708,32	571.982.048,62	(14.912.340,30)
Utang Bunga LN	2.478.994,40	2.648.216,00	(169.221,60)
Total Utang LN	615.002.107,61	622.927.018,43	(7.924.910,82)
Surat Berharga Negara (SBN):			
Bagian Lancar SBN-Rupiah	49.262.212,70	58.344.607,42	(9.082.394,72)
SPN	22.689.283,54	30.509.891,90	(7.820.608,36)
SBSN Jangka Pendek-Rupiah	12.832.391,84	8.898.290,00	3.934.101,84
SBN Jangka Panjang-Rupiah	929.668.359,82	836.567.325,71	93.101.034,11
SBN Jangka Panjang-Valas	239.861.455,29	180.667.600,00	59.193.855,29
SBSN Jangka Panjang-Rupiah	85.371.668,46	52.853.296,35	32.518.372,11
SBSN Jangka Panjang-Valas	25.625.500,00	14.962.200,00	10.663.300,00
Utang Bunga SBN	20.602.879,90	19.275.822,33	1.327.057,57
Total SBN dan Bunga	1.385.913.751,55	1.202.079.033,71	183.834.717,84
Promissory Notes (PN):			
PN Jangka Pendek	-	39.174,19	(39.174,19)
PN Jangka Panjang	26.569.686,37	25.889.179,30	680.507,07
Total PN	26.569.686,37	25.928.353,49	641.332,88

Tabel 17 Posisi Utang Luar Negeri Menurut Valuta Asing

Posisi Utang Luar negeri
Menurut Valuta Asing

Valuta	31 Desember 2012	31 Desember 2011	Kenaikan (Penurunan)
ACU	305,669,131	279,847,434	25,821,697
ADB	89,346,229	109,582,229	(20,236,000)
AUD	387,464,928	351,410,728	36,054,200
CAD	128,975,789	138,742,057	(9,766,268)
CHF	204,679,671	240,740,150	(36,060,479)
CNY	1,472,579,306	1,550,083,480	(77,504,174)
DKK	37,254,435	42,745,717	(5,491,282)
EUR	3,942,045,410	4,429,525,292	(487,479,882)
GBP	307,954,978	363,492,315	(55,537,337)
JPY	2,138,377,756,015	2,307,420,817,502	(169,043,061,487)
KRW	197,039,877,460	189,956,918,440	7,082,959,020
KWD	7,366,200	8,756,800	(1,390,600)
SAR	87,368,653	100,075,674	(12,707,021)
SDR	2,060,307,886	2,144,885,272	(84,577,386)
USD	22,064,404,139	21,811,471,753	252,932,386
WBD	100,800,448	206,130,040	(105,329,592)

C.2.47. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Setelah Penyesuaian

SAL Setelah
Penyesuaian Rp49,24
triliun

Saldo Anggaran Lebih (SAL) setelah penyesuaian Tahun Anggaran (TA) 2012 dan TA 2011 adalah sebesar Rp49.242.263.157.735 dan Rp58.656.722.496.062. SAL TA 2012 setelah penyesuaian tersebut berasal dari saldo awal SAL TA 2012 sebesar Rp105.089.371.724.754, ditambah selisih lebih kas tahun lalu Rp17.425.252.112, dan ditambah penyesuaian lainnya sebesar minus Rp55.864.533.819.131. Pada TA 2012 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) setelah penyesuaian sebesar Rp21.020.562.086.738, sehingga SAL per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp70.262.825.244.473. Sementara itu, SAL menurut fisik setelah penyesuaian adalah sebesar Rp70.270.975.012.453, sehingga terdapat selisih lebih fisik SAL dibandingkan catatannya sebesar Rp8.149.767.980. Rincian penghitungan SAL sebagaimana disajikan pada Tabel 18.

Tabel 18 Saldo Anggaran Lebih TA 2012 dan TA 2011

Uraian	TA 2012 (Rp)	TA 2011 (Rp)
Saldo Awal SAL	105.089.371.724.754	98.909.703.335.446
Penambahan dari Selisih Lebih Kas Tahun Lalu	17.425.252.112	39.873.345.073
Penggunaan SAL	(56.170.000.000.000)	(40.319.043.049.000)
Koreksi Saldo Awal Kas KPPN	16.492.481	(205.049.095)
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	185.511.299.379	26.554.437.138
Koreksi Saldo Awal Kas Hibah di K/L	119.938.389.009	(160.523.500)
SAL setelah Penyesuaian	49.242.263.157.735	58.656.722.496.062
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	21.857.572.902.339	46.549.376.508.811
Penyesuaian SiLPA (SiKPA):		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(305.501.981.845)	(102.364.746.513)
Penyesuaian Pendapatan/Belanja dari Transaksi Uang Persediaan	-	(551.052.742)
Penyesuaian Rekening Retur	(552.249)	(216.316.651)
Penyesuaian Pendapatan Anggaran lain-lain	-	(52.302)
Penyesuaian Kas Hibah Langsung	(1.336.463.035)	(372.860.700)
Penyesuaian Kas KPPN	(30.893.583.426)	212.666.914
Penyesuaian Transfer	-	4.176.986
Penyesuaian Kas pada BLU	-	(375.080.500)
Penyesuaian Kas di BUN	-	(13.064.014.611)
Selisih Kurs (unrealized) ¹⁾	(499.278.235.046)	-
Total Penyesuaian SiLPA	(837.010.815.601)	(116.727.280.119)
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	21.020.562.086.738	46.432.649.228.692

Saldo Akhir SAL	70.262.825.244.473	105.089.371.724.754
Selisih Kurs		
Selisih Kurs s.d. periode sebelumnya	-	(1.169.106.908.608)
Selisih Kurs Kas di BUN	-	1.374.844.061.456
Selisih Kurs Rekening Khusus Pinjaman dan Hibah	-	29.340.930.289
Selisih Kurs	-	235.078.083.137
Saldo Akhir SAL dan Selisih Kurs (A)	70.262.825.244.473	105.324.449.807.891
Fisik Kas SAL:		
Rekening SAL di BI	25.755.966.698.308	48.505.945.197.525
Rekening BUN di BI	9.719.516.234.122	31.557.956.553.828
Rekening KPPN	16.207.882.323.813	11.870.556.947.661
Rekening Khusus	1.907.213.434.609	2.390.016.547.054
Kas di Bendahara Pengeluaran	213.458.829.221	292.791.782.959
Kas pada BLU yang telah Disahkan ²⁾	17.331.515.069.465	13.089.016.578.965
Kas Hibah Langsung K/L yang telah Disahkan ³⁾	656.246.733.463	429.120.562.354
Total Fisik Kas	71.791.799.323.001	108.135.404.170.346
Penyesuaian Fisik Kas		
Uang Persediaan di Kementerian LN sebagai Aset Lainnya	50.977.427.950	99.879.811.915
Utang PFK	(451.860.600.337)	(1.755.574.696.265)
Utang Kepada Pihak Ketiga (SP2D Retur)	(1.119.941.138.161)	(1.137.834.225.993)
Total Penyesuaian Fisik Kas	(1.520.824.310.548)	(2.793.529.110.343)
Fisik Kas setelah Penyesuaian (B)	70.270.975.012.453	105.341.875.060.003
Selisih Kas (Lebih) Kurang (A-B)	(8.149.767.980)	(17.425.252.112)

Catatan:

- 1). Sejak tahun 2012 selisih kurs (unrealized) atas kas BUN yang merupakan bagian dari SAL merupakan penambah (pengurang) SiLPA.
- 2). Kas BLU sebesar Rp17.331.515.069.465 merupakan Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN melalui SP2D Pengesahan dan koreksi saldo awal.
- 3). Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan berdasarkan laporan KPPN yang melakukan pengesahan pendapatan hibah langsung K/L dan belanja yang dilakukan atas pendapatan hibah tersebut.

C.2.48. SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian

SiLPA setelah
Penyesuaian Rp21,02
triliun

Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp21.020.562.086.738 dan Rp46.432.649.228.692 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan dan pengeluaran anggaran selama TA 2012 setelah dilakukan penyesuaian-penyesuaian, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pendapatan Negara dan Hibah	1.338.109.629.172.958	1.210.599.653.359.415
Belanja Negara	1.491.410.224.590.994	1.294.999.146.475.024
Surplus (Defisit)	(153.300.595.418.036)	(84.399.493.115.609)
Pembiayaan Neto	175.158.168.320.375	130.948.869.624.420
SiLPA (SiKPA) Sebelum Penyesuaian	21.857.572.902.339	46.549.376.508.811
Penyesuaian SiLPA:		
Penyesuaian Pengembalian Pendapatan Tahun Lalu	(305.501.981.845)	(102.364.746.513)
Penyesuaian Uang Persediaan	-	(551.052.742)
Penyesuaian Rekening Retur	(552.249)	(216.316.651)
Pendapatan Anggaran Lain-lain	-	(52.302)
Penyesuaian Hibah Langsung	(1.336.463.035)	(372.860.700)
Penyesuaian Kas KPPN	(30.893.583.426)	212.666.914
Penyesuaian Transfer	-	4.176.986
Penyesuaian Kas pada BLU	-	(375.080.500)
Penyesuaian Kas di BUN	-	(13.064.014.611)
Selisih Kurs (unrealized)	(499.278.235.046)	-
Total Penyesuaian SiLPA	(837.010.815.601)	(116.727.280.119)
SiLPA (SiKPA) Setelah Penyesuaian	21.020.562.086.738	46.432.649.228.692

Sejak Tahun 2012, Selisih Kurs Kas BUN di BI (unrealized) merupakan penambah/pengurang perhitungan SiLPA.

*Cadangan Piutang
Rp86,26 triliun***C.2.49. Cadangan Piutang**

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp86.265.604.108.265 dan Rp84.574.619.543.073. Jumlah Cadangan Piutang merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	Jumlah
Piutang (Bersih)	85.607.018.863.494
Belanja Dibayar di Muka berupa Persekot Gaji	4.173.047.877
Uang Muka dari Rekening BUN	787.370.392.558
Selisih kurs atas Bagian Lancar Penerusan Pinjaman dalam valas	(132.958.195.664)
Jumlah	86.265.604.108.265

*Cadangan Persediaan
Rp62,02 triliun***C.2.50. Cadangan Persediaan**

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp62.016.561.796.415 dan Rp59.214.846.453.160 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan K/L dan instansi terkait lainnya, termasuk persediaan pada BLU.

*Pendapatan yang
Ditangguhkan Rp9,04 triliun***C.2.51. Pendapatan yang Ditangguhkan**

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp9.043.802.422.858 dan Rp3.810.469.839.673 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) K/L yang belum disetorkan ke Kas Negara, serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai. Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan merupakan akun lawan (pasangan) atas:

(dalam rupiah)

Akun Lawan	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Kas di Bendahara Penerimaan	196.150.458.978	252.900.321.124
Kas Lainnya dan Setara Kas ¹⁾	3.150.019.488.674	2.367.515.283.864
Rek. Migas Nomor 600.000411.980	-	915.575.358.774
Rek. Penerimaan Panas Bumi	347.992.721.305	197.960.188.008
Aset Lainnya ²⁾	-	75.156.978.014
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS - PNBP	5.349.639.753.901	-
Setoran dividen PT Sarinah ³⁾	-	1.361.709.889
Jumlah	9.043.802.422.858	3.810.469.839.673

Catatan:

- 1). Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan dana yang berasal dari penerimaan hibah yang belum disahkan, pengembalian belanja, pungutan pajak dan bunga jasa giro yang belum disetor yang berada pada Bendahara Pengeluaran. (lihat Catatan C.2.6)
- 2). Merupakan aset lain-lain BLU PIP Kementerian Keuangan berupa bunga deposito 12 bulanan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional Rp1 triliun sebesar Rp70.000.000.000 dan bunga diterima dimuka dari deposito 1 bulanan Rp70 miliar sebesar Rp5.156.978.014.
- 3). Pada tahun 2011 setoran dividen PT Sarinah dicatat sebagai pendapatan yang ditangguhkan, karena setoran dividen tersebut salah setor ke Rekening Pemerintah Lainnya (RPL), yaitu Rekening BUN untuk Obligasi 502.000.002, bukan ke Rekening Kas Umum Negara. Pada Tahun 2012, dana tersebut sudah dialihkan ke ke RKUN 502.000.000.980, sehingga setoran dividen PT Sarinah tersebut telah dapat diakui sebagai penerimaan dividen

*Dana yang Harus
Disediakan untuk
Pembayaran Utang
Jangka Pendek minus
Rp241,95 triliun*

C.2.52. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Jumlah Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp241.956.232.377.965 dan minus Rp204.483.884.343.763. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Utang Jangka Pendek dikurangi Utang PFK.

Rincian penghitungan Dana yang harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Total Utang Jangka Pendek	266.363.759.102.680	246.444.880.163.115
Dikurangi:		
Utang PFK	(451.860.600.337)	(1.755.574.696.265)
Utang karena Kesalahan Pemindahbukuan Rekening BUN dan Rekening Retur	(1.119.941.138.161)	(1.137.834.225.993)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Kas Lainnya dan Setara Kas	(2.470.915.669.777)	(3.943.053.699.201)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan RPL (Rek. Migas)	(7.883.177.122.538)	(5.321.563.393.453)
Utang Subsidi yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Subsidi	-	(7.523.846.941.346)
Utang kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	-	(9.505.740.673.161)
Pendapatan Diterima di Muka yang merupakan akun Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan	(6.721.668.089.201)	(6.321.674.677.095)
Selisih Kurs Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	(4.575.971.265.178)	(3.207.294.640.602)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH	(1.183.992.839.523)	(1.166.815.572.907)
Utang Kepada Pihak Ketiga yang merupakan akun lawan Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada DAU	-	(2.077.597.299.329)
Jumlah	241.956.232.377.965	204.483.884.343.763

C.2.53. Selisih Kurs Bagian Lancar

*Selisih Kurs Bagian
Lancar minus Rp4,44
triliun*

Selisih Kurs Bagian Lancar per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp4.443.013.069.514 dan minus Rp2.798.692.210.245 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih kurs terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Selisih kurs atas Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang terkait dengan utang luar negeri dan dalam negeri	(4.575.971.265.178)	(3.207.294.640.602)
Selisih kurs atas Rekening BUN di BI dalam valas *)	-	235.078.083.137
Selisih kurs pada aset Bagian Lancar Penerusan Pinjaman	132.958.195.664	173.524.347.220
Jumlah	(4.443.013.069.514)	(2.798.692.210.245)

Catatan:

*) Sejak Tahun 2012, Selisih Kurs Kas BUN di BI (unrealized) merupakan penambah/pengurang perhitungan SiLPA

C.2.54. Dana Lancar Lainnya

*Dana Lancar Lainnya
Rp56,47 miliar*

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp56.475.093.646 dan Rp451.833.601.148, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (<i>audited</i>)	31 Desember 2011 (<i>audited</i>)
Rekening Pemerintah Lainnya (Rek. Penerimaan Pertambangan dan perikanan, dan RPL pada BA 999.04)	142.211.961.233	180.453.779.979
Investasi Jangka Pendek pada Kementerian Dikbud	-	135.839.486.878
Kas lainnya setara kas pada Kementerian Koperasi dan UKM	-	2.650.797.179
Kas BLU yang Belum Disahkan sebagai SiLPA	80.029.529.762	100.924.694.157
Kas Hibah Langsung yang belum disahkan *)	-	12.626.616.173
Selisih Pencatatan Kas Hibah Langsung K/L dengan Pencatatan di KPPN	(175.345.833.082)	-
Kas Lainnya dan Setara Kas pada BA 999.03	1.429.667.753	1.912.974.670
Selisih Kas Lebih (Kurang) Tahun ini	8.149.767.980	17.425.252.112
Jumlah	56.475.093.646	451.833.601.148

Catatan:

*) Kas Hibah Langsung yang belum disahkan merupakan selisih antara Kas Hibah Langsung pada neraca dengan kas hibah langsung yang disahkan KPPN.

C.2.55. Barang/Jasa yang Harus Diterima

*Barang/Jasa yang Masih
Harus Diterima Rp1,89
triliun*

Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.889.360.514.088 dan Rp1.276.453.004.389. Barang/Jasa yang Harus Diterima per 31 Desember 2012 merupakan akun lawan dari Belanja Dibayar Dimuka dan Uang Muka Belanja sebesar Rp1.893.533.561.965 dikurangi Persekot Gaji pada Mahkamah Agung sebesar Rp2.361.550.268, Kejaksaan Agung sebesar Rp7.694.940, Kementerian Keuangan sebesar Rp1.801.187.869 dan pada Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika sebesar Rp2.614.800.

C.2.56. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan

*Barang/Jasa yang Masih
Harus Diserahkan minus
Rp6,72 triliun*

Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp6.721.668.089.201 dan minus Rp6.321.674.677.095. Barang/Jasa yang Masih Harus Diserahkan per 31 Desember 2012 merupakan akun lawan dari total Pendapatan Diterima di Muka yang sebesar Rp6.721.668.089.201.

C.2.57. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

*Diinvestasikan dalam
Investasi Jangka
Panjang Rp932,40 triliun*

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp932.406.392.642.504 dan Rp750.030.794.479.804 merupakan dana Pemerintah Pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.58. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

*Diinvestasikan dalam
Aset Tetap Rp1,89
triliun*

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp1.895.501.446.206.083 dan Rp1.567.974.174.587.750 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Tetap.

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp362,40 triliun

C.2.59. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar Rp362.406.005.769.186 dan Rp417.130.365.123.476 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh Pemerintah Pusat dalam bentuk Aset Lainnya.

Rincian penghitungan Diinvestasikan dalam Aset Lainnya adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)
Piutang Jangka Panjang (bersih)	4.673.590.581.803
Aset Lainnya (bersih)	359.086.269.747.713
Jumlah Piutang Jangka Panjang dan Aset lainnya	363.759.860.329.516
Dikurangi:	
Dana yang Dibatasi Penggunaannya pada BPIH yang merupakan akun lawan Utang Kepada Pihak Ketiga	(1.183.992.839.523)
Aset Lainnya dari Reklasifikasi UP/TUP	(50.977.427.950)
Selisih kurs atas Penerusan Pinjaman dalam valas	(118.884.292.857)
Jumlah	362.406.005.769.186

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang minus Rp1.850,35 triliun

C.2.60. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp1.850.355.668.169.689 dan minus Rp1.679.033.615.946.059 merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs utang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2012 (audited)	31 Desember 2011 (audited)
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri	1.304.692.383.569.946	1.103.057.191.066.402
Utang Jangka Panjang Luar Negeri	586.057.201.233.243	597.871.227.923.484
Selisih Kurs Utang Jangka Panjang	(40.393.916.633.507)	(21.894.803.043.827)
Jumlah*)	1.850.355.668.169.682	1.679.033.615.946.059

*) selisih antara data neraca dengan rincian sebesar Rp6 karena pembulatan

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang minus Rp40,27 triliun

C.2.61. Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang

Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 sebesar minus Rp40.275.032.340.650 dan minus Rp20.841.184.232.370 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI). Selisih Kurs Bagian Jangka Panjang terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas *)	(40.393.916.633.507)
Selisih kurs pada aset atas Aset lainnya RDI dan Aset Lainnya dalam Penerusan Pinjaman	118.884.292.857
Jumlah	(40.275.032.340.650)

*) Selisih kurs atas Utang Jangka Panjang dalam valas terdiri dari selisih kurs Utang Jangka Panjang Luar Negeri sebesar minus Rp38.421.905.987.080 dan selisih kurs Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Valas sebesar minus Rp1.972.010.646.427.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Rekening Pemerintah Lainnya

Dalam LKPP Tahun 2012, Rekening Pemerintah Lainnya terdiri dari tiga rekening pada Bank Indonesia dan 17 rekening pada Bank Umum. Adapun tujuan dari pembukaan Rekening Pemerintah Lainnya tersebut adalah sebagai berikut.

a. Rekening SDA Migas: nomor 600.000411.980 Depkeu k/hasil minyak perjanjian karya *product sharing*

Sesuai PMK Nomor 113/PMK.02/2009 tentang Rekening Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa rekening minyak dan gas bumi adalah rekening dalam valuta USD untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar pengeluaran terkait kegiatan hulu migas. Penerimaan yang ditampung pada rekening tersebut masih mengandung hak pihak ketiga yang harus diperhitungkan dari rekening tersebut. Bagian pemerintah dari penerimaan Minyak dan Gas Bumi adalah sebesar 85%, yang terdiri dari 71,153% hak pihak lain dan 13,8462% merupakan Pendapatan Pajak.

b. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000084.980 Rekening Penerimaan Panas Bumi

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.02/2009 tentang Rekening Panas Bumi dijelaskan bahwa Rekening Penerimaan Panas Bumi pada BI digunakan untuk menampung penerimaan setoran bagian Pemerintah dan untuk membayar pengeluaran kewajiban pemerintah terkait usaha panas bumi. Pada rekening panas bumi terdapat pengeluaran berupa *reimbursement* PPN, PBB dan lainnya.

c. Rekening SDA Non Migas, Nomor 508.000071.980 Rekening Pertambangan dan Perikanan

Penerimaan pada rekening pertambangan dan perikanan berasal dari PT Inalum dan perusahaan KKKS.

Pemindahbukuan dari rekening 508.000071.980 ke Pemda/Persepsi/RKUN didasarkan pada surat permintaan DJA. Sebelum melakukan permintaan pemindahbukuan, sesuai peraturan, DJA terlebih dulu melakukan perhitungan atas besaran yang bisa dipindahbukukan dan jenis pemindahbukuan.

d. Rekening Kredit Program

Rekening Kredit Program dipergunakan untuk menampung pengembalian pinjaman dari debitur.

2. Rekening Migas

Saldo Rekening Hasil Minyak Perjanjian KPS per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp40.096.411.940.515. Dana tersebut merupakan Kas BUN dalam bentuk valuta asing pada Rekening Nomor 600.000.411980, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Berikut adalah mutasi Rekening Migas selama Tahun 2012.

Tabel 19 Laporan Rekening Nomor 600.000.411980 Tahun 2012 dan 2011

URAIAN	31 Desember 2012 (audited)		31 Desember 2011 (audited)	
	USD	Rp Juta	USD	Rp Juta
I. Saldo Awal	687,818,565.53	6.237.138,75	812,867,134.11	7.308.488,40
II. Penerimaan:				
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah	19,408,690,667.00	182.028.575,50	19,181,932,011.17	168.160.986,59
2. Pengembalian Dana Talangan	-	-	-	-
3. Koreksi Pembukuan	-	-	-	-
4. Penerimaan lain-lain	164,394,244.00	1.594.436,36	273,105,490.19	2.363.895,36
5. Selisih Kurs Pembukuan Kredit (d)	-	8.549.237,79	-	8.556.944,39
Total Penerimaan	19,573,084,911.00	192.172.249,65	19,455,037,501.36	179.081.826,34
III. Pengeluaran:				
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/ APBD:				
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III	2,049,888,164.00	19.614.118,12	2,311,753,634.64	20.276.871,77
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda	5,255,471.00	48.929,83	9,359,470.35	82.349,55
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN Nomor 600.502411980				
• PPh Migas	8,852,903,719.00	83.460.732,12	8,344,256,944.84	73.095.496,75
• Pendapatan Migas	5,192,878,640.00	49.238.284,64	6,095,306,293.73	53.448.818,23
• Pendapatan Migas lainnya (423139)	105,757.70	972,55	5,271,780.82	46.102,47
• PPh Pasal 25 (411126)				
<i>Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD</i>	<i>16,101,031,751.70</i>	<i>152.363.037,26</i>	<i>16,765,948,124.38</i>	<i>146.949.638,77</i>
2. Pengeluaran non APBN/APBD:				
a. <i>Reimbursement</i> PPN ke Kontraktor	612,808,143.00	5.741.666,36	865,595,050.75	7.593.672,55
b. Pembayaran DMO Fee KKKS(e)	1,482,403,524.00	14.096.138,50	1,356,737,746.19	11.985.167,64
c. Pembayaran Fee Penjualan Migas Tahun 2007 & 2008 kepada PT Pertamina (Persero)				
d. Pembayaran Fee / Anggaran BPMIGAS	138,907,356.03	1.309.188,32	156,721,823.43	1.365.624,92
e. Pembayaran <i>Underlifting</i> KKKS	191,028,581.00	1.847.280,36	161,345,921.45	1.455.529,62
f. Pembayaran Fee penjualan PT Pertamina (Persero)	162,526,342.00	1.567.566,57	-	-
g. Pengembalian Sisa Dana <i>White & Case</i> kepada PT Pertamina (Persero)				
<i>Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD</i>	<i>2,587,673,946.03</i>	<i>24.561.840,11</i>	<i>2,540,400,541.82</i>	<i>22.399.994,73</i>
3. Koreksi Pembukuan Debit (f)	163,685,347.00	1.587.768,90	269,772,216.00	2.324.516,07
4. Koreksi Kurs Pembukuan Debit	-	6.275.715,20	-	8.443.925,17
5. Pengeluaran lainnya (g)	63,516,847.00	614.923,22	631,784.04	5.689,22
6. Administrasi Bank (h)	-	-	129.50	2,25
7. Retur/Pengembalian karena salah rekening	66,856.00	641,88	3,333,274.19	29.409,77
Total Pengeluaran	18,915,974,747.73	185.403.926,57	19,580,086,069.93	180.153.175,98
IV. Kenaikan/Penurunan (II - III)	657,110,163.27	6.768.323,08	(125,048,568.57)	(1.071.349,64)
V. Saldo Akhir (I + IV) i)	1,344,928,728.80	13.005.461,83	687,818,565.54	6.237.138,76

Penjelasan:**a) Rekening Migas Nomor 600.000411980**

Merupakan rekening yang digunakan sebagai perantara untuk menampung seluruh Penerimaan Negara dalam valuta asing yang berasal dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan untuk membayar kewajiban kontraktual migas Pemerintah serta membayar kewajiban-kewajiban Pemerintah lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas.

b) Penerimaan SDA Migas

Merupakan penerimaan Negara dari hasil penjualan *lifting* minyak bumi dan gas alam bagian Negara, penyelesaian/penyetoran dari KKKS atau pihak ketiga terkait penjualan *lifting* bagian Negara.

c) PPh Migas

Merupakan penerimaan atas pembayaran kewajiban PPh migas kontraktor yang disetor ke rekening migas Nomor 600.000411980 sesuai dengan kontrak kerja sama dan berdasarkan ketentuan perpajakan.

d) Bonus

Merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil yang menjadi kewajiban KKKS setelah mencapai akumulasi dan tingkat produksi tertentu.

e) Transfer Material

Merupakan setoran KKKS diluar skema bagi hasil dalam rangka pemanfaatan aset KKKS

berdasarkan persetujuan BPMIGAS dan dapat diperhitungkan sebagai *cost recovery*.

- f) Koreksi Pembukuan Kredit/Debit oleh Bank Indonesia
Merupakan koreksi-koreksi kredit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan dobel yang dilakukan oleh Bank Indonesia.
Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD163,685,347 atau setara dengan Rp1.587.722.539.531. Rincian sebagai berikut.
 - Koreksi atas pembukuan ganda/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran SDA migas bulan Desember 2012 sebesar USD145,955,201 atau setara dengan Rp1.416.715.277.117
 - Koreksi atas pembukuan ganda/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada pembayaran PPh dan PPN atas *fee* penjualan migas tahun 2010 sebesar USD17,730,146 atau setara dengan Rp171.007.262.414
- g) Retur/Pengembalian Kredit/ Debit karena Salah Rekening
Retur/pengembalian karena Salah Rekening sebesar USD73,897 atau setara dengan Rp706.715.950 merupakan koreksi kredit yang diakibatkan adanya retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas karena pergantian rekening atau kesalahan rekening tujuan pihak ketiga. Rincian sebagai berikut.
 - Pembayaran DMO *Fee* tahun 2011 yang diterima kembali di rekening migas Nomor 600.000411980 karena salah rekening KKKS sebesar USD7,041 atau setara dengan Rp64.833.436. Transaksi ini sudah dibayarkan kembali sebagai pembayaran DMO *Fee* tahun 2012.
 - Pembayaran *reimbursement* PPN KKKS yang diterima kembali di rekening migas Nomor 600.000411980 karena salah rekening KKKS sebesar USD66,856 atau setara dengan Rp641.882.514.
- h) Biaya Adminstrasi Bank (*Bank Charges*)
Merupakan potongan yang dilakukan oleh Bank koresponden KKKS karena adanya retur atau pengembalian akibat salah rekening ketika pemerintah melakukan pembayaran atas kewajiban kontraktual. Potongan tersebut dapat diketahui dengan berkurangnya jumlah nominal antara pembayaran aktual dengan jumlah nominal yang diretur.
- i) Penerimaan Lainnya
Penerimaan lainnya sebesar USD635,000 atau setara dengan Rp6.007.100.000 merupakan penerimaan di luar kegiatan usaha hulu migas yang disebabkan karena terjadinya kesalahan penyetoran oleh GS Energy Co. Terhadap setoran ini telah dipindahbukukan ke rekening KUN 600.502411980 sebagai PPh di luar migas berdasarkan permintaan Ditjen Pajak.
- j) Selisih Kurs Pembukuan Kredit/ Debit
Merupakan selisih kurs pada pembukuan Bank Indonesia akibat dari perubahan kurs transaksi harian dengan kurs neraca yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Selisih kurs ini terjadi karena transaksi di rekening migas Nomor 600.000411980 dalam satuan mata uang US Dollar sedangkan pembukuan harian Bank Indonesia dalam Rupiah. Koreksi selisih kurs ini tidak berpengaruh pada saldo penerimaan migas.
- k) Pembayaran kepada pihak ketiga
Merupakan penyelesaian kewajiban-kewajiban pemerintah kepada kontraktor dalam rangka pelaksanaan kontrak kerja sama migas baik yang diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan maupun yang telah diatur dalam *Production Sharing Contract* (PSC). Kewajiban pemerintah tersebut meliputi pembayaran PBB migas ke daerah, *reimbursement* PPN ke kontraktor, Pajak Penerangan Jalan Non PLN dan Pajak Air Bawah tanah (PDRD), pembayaran DMO *Fee* KKKS, pembayaran *underlifting* KKKS, pembayaran *fee* penjualan PT Pertamina (Persero), dan pembayaran anggaran BPMIGAS.
- l) Pemindahbukuan ke Rekening KUN
Terdiri atas pemindahbukuan sebagai berikut.
 - Pemindahbukuan PNPB SDA Migas, merupakan proses pemindahbukuan penerimaan SDA migas dari rekening migas Nomor 600.000411980 ke Rekening Kas Umum Negara Nomor 600.502411980 yang dilakukan setiap akhir bulan setelah diperhitungkan/dicadangkan dengan kewajiban-kewajiban kontraktual pemerintah dalam rangka pelaksanaan kontrak

kerja sama migas. Proses pemindahbukuan ini merupakan tahapan akhir agar penerimaan SDA migas untuk dapat diakui sebagai realisasi pendapatan Negara.

- Pemindahbukuan PPh Migas, merupakan proses pemindahbukuan atas PPh migas kontraktor yang diterima di rekening migas Nomor 600.000411980 setelah dokumen pelaporan kontraktor diterima.
- Pemindahbukuan PNPB Lainnya, merupakan pemindahbukuan atas penerimaan bonus dan transfer material yang disetor KKKS ke rekening migas Nomor 600.000411980.

m) Pembayaran DMO *Fee* KKKS

Dalam pembayaran DMO *Fee* KKKS sebesar USD1,482,403,524 atau setara dengan Rp14.096.138.500.129 termasuk didalamnya pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina EP dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD188,874,334 dengan rincian sebagai berikut.

- Pembayaran DMO *Fee* kepada PT Pertamina EP untuk periode bulan Oktober s.d. November 2012 sebesar USD141,920,842 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD141,920,842, dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam USD141,920,842 atau setara Rp1.374.503.350.702 (Kode Akun 421211).
- Pembayaran DMO *Fee* kepada PT PHE untuk periode bulan Agustus s.d. November 2012 sebesar USD46,953,492 yang diperhitungkan dengan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD46,953,492, dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Valas Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD46,953,492 atau setara Rp454.744.575.541.

n) Pembayaran *Underlifting* KKKS

Dalam pembayaran *underlifting* KKKS sebesar USD191,028,581 atau setara dengan Rp1.847.280.365.728 termasuk didalamnya pembayaran *underlifting* kepada PT PHE yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT PHE sebesar USD23,565,842 dan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) sebesar USD48,453,959 (total kewajiban valas Pertamina yang diperhitungkan adalah sebesar USD72,019,801. Pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD72,019,801 atau setara Rp697.511.775.397.

o) Koreksi Pembukuan Debit oleh Bank Indonesia

Koreksi pembukuan kredit oleh Bank Indonesia sebesar USD163,685,347 atau setara dengan Rp1.587.768.899.731 merupakan koreksi-koreksi debit yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan ganda, atau pembukuan ganda yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Rincian sebagai berikut.

- Koreksi atas pembukuan ganda/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada setoran SDA migas bulan Desember 2012 sebesar USD145,955,201 atau setara dengan Rp1.416.761.637.317.
- Koreksi atas pembukuan ganda/dua kali jurnal penerimaan oleh Bank Indonesia pada pembayaran PPh dan PPN atas *fee* penjualan migas tahun 2010 sebesar USD17,730,146 atau setara dengan Rp171.007.262.414.

p) Retur/Pengembalian Debit karena Salah Rekening

Retur/pengembalian karena salah rekening sebesar USD66,856 atau setara dengan Rp641.882.514 merupakan koreksi debit yang diakibatkan adanya retur pembayaran reimbursement PPN KKKS (yang diterima kembali di rekening migas Nomor 600.000411980) karena salah rekening KKKS.

q) Pengeluaran Lainnya

Pengeluaran lain-lain sebesar USD63,516,847 atau setara dengan Rp614.923.221.829 merupakan pengeluaran atau pemindahbukuan yang peruntukannya dapat dirinci sebagai berikut.

- Pemindahbukuan atas PPh *uplift* KKKS Golden Spike Energy sebesar USD200,000 atau setara dengan Rp1.817.000.000 ke Rekening Giro Kas Negara Nomor 600.500411980 yang peruntukannya bukan sebagai pendapatan migas melainkan PPh *uplift* (PPh umum).

- Pemindahbukuan ke rekening KUN valas Nomor 600.502411980 sebesar USD635,000 atau setara dengan USD6,126,480,000 sebagai PPh di luar migas (PPh umum) yang berasal dari kesalahan penyetoran GS Energy Co sesuai permintaan Ditjen Pajak.
- Pengembalian kelebihan pembayaran PNPB Hulu Pertamina tahun 2003 s.d. 2007 sebesar USD56,418,898 atau setara dengan Rp546.417.024.999 yang diperhitungkan kembali dengan kewajiban valas PT Pertamina (Persero) kepada pemerintah sebesar USD56,418,898 dan pada saat yang sama disetorkan kembali ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 sebagai: Pendapatan SDA Gas Alam (Kode Akun 421211) USD56,418,898 atau setara Rp546.417.024.999.
- Pengembalian kelebihan pembayaran *overlifting* KKKS migas sebesar USD6,262,949 atau setara dengan Rp60.562.716.830 disebabkan karena adanya koreksi *Financial Quarterly Report* (FQR) oleh BPMIGAS (sekarang SKMIGAS) yang menjadi dasar perhitungan *over/underlifting*.

r) Saldo Akhir

Dari total saldo akhir sebesar USD1,344,928,730 atau setara dengan Rp13.005.460.815.909 (ekuivalen menggunakan kurs tengah BI tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp9.670/USD), di dalamnya termasuk cadangan untuk pembayaran kewajiban kontraktual dan kewajiban lainnya terkait dengan kegiatan usaha hulu migas tahun 2012 yang belum dapat diselesaikan sampai akhir Desember 2012 sebesar USD815,219,971 atau setara dengan Rp7.883.177.122.538. Sedangkan sisanya sebesar USD529,708,758 atau setara dengan Rp5.122.283.693.371 merupakan pendapatan tahun 2012 (pendapatan yang ditunda) dan akan dipindahbukukan pada tahun 2013 apabila telah lengkap dokumen pendukungnya.

3. Rekening Panas Bumi (Rek. 508.000.084980)

Pada Catatan C.2.3 (Rekening Pemerintah Lainnya) disajikan bahwa saldo Rekening Panas Bumi per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 adalah sebesar Rp347.992.721.305 dan Rp197.960.188.008. Rekening Panas Bumi (Nomor 508.000084980) adalah Rekening Penerimaan Panas Bumi Kementerian Keuangan di Bank Indonesia yang digunakan untuk menampung penerimaan negara yang berasal dari kegiatan panas bumi di Indonesia serta menyelesaikan kewajiban pemerintah di bidang perpajakan (pembayaran kembali PPN, Pembayaran PBB) terkait dengan kegiatan usaha panas bumi. Berikut adalah mutasi Rekening Panas Bumi:

	URAIAN	31 Desember 2012	31 Desember 2011
I.	Saldo Awal ¹⁾	197.960.188.008	208.604.971.388
II.	Penerimaan:		
	1. Setoran Bagian Pemerintah dari Kegiatan Usaha Panas Bumi	1.140.282.607.387	898.462.528.861
	2. Koreksi Pembukuan Kredit		-
	Total Penerimaan	1.140.282.607.387	898.462.528.861
III.	Pengeluaran:		
	1. Pembayaran PBB Pertambangan Panas Bumi	179.196.585.210	200.894.853.819
	2. Pembayaran Kembali PPN kepada Pengusaha Panas Bumi ²⁾	72.113.825.482	145.510.184.676
	3. Pemindahbukuan PNPB Pertambangan Panas Bumi ke Rek. KUN ³⁾	738.939.663.398	562.702.273.747
	4. Pinjaman untuk Dana Talangan		-
	5. Koreksi Pembukuan debit		-
	Total Pengeluaran	990.250.074.090	909.107.312.242
IV.	Kenaikan/Penurunan (II - III)	150.032.533.297	(10.644.783.381)
V.	Saldo Akhir (I + IV) ⁴⁾	347.992.721.305	197.960.188.007

Penjelasan:

- Saldo rekening panas bumi per 31 Desember 2012 sebesar Rp347.992.721.305 di atas merupakan cadangan untuk pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi dan cadangan pembayaran PBB PT Geodipa Energi dengan rincian:

- a. Cadangan pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN panas bumi sebesar Rp333.739.185.010 kepada (Rp):
 1. PT Pertamina (Persero) 48.413.274.586
 2. Chevron Geothermal Salak, Ltd 123.673.808.537
 3. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd 108.225.074.158
 4. Star Energy Geothermal (Wayang Windu), Ltd 53.427.027.728
- b. Cadangan Pembayaran PBB pertambangan panas bumi untuk Wilayah Kerja Panas Bumi PT Geodipa Energy yang belum dapat dibayarkan sebesar Rp14.253.536.295 karena masih diperlukan klarifikasi landasan hukum atas pembayaran PBB untuk badan usaha tersebut dengan rincian:
 1. PBB pertambangan panas bumi Tahun 2010 sebesar Rp3.772.271.558
 2. PBB pertambangan panas bumi Tahun 2011 sebesar Rp4.312.924.397
 3. PBB pertambangan panas bumi Tahun 2012 sebesar Rp6.168.340.340
- Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN kepada Pengusaha panas bumi sebesar Rp72.113.825.482 adalah Pembayaran kembali (*reimbursement*) PPN yang pengajuannya pada Tahun 2010, 2011, dan 2012 dengan perincian sebagai berikut:
 1. Pembayaran Kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2010 299.793.234
 2. Pembayaran Kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2011 55.344.406.069
 3. Pembayaran Kembali PPN yang pengajuannya Tahun 2012 16.469.626.179
- Pemindahbukuan PNBPT Pertambangan Panas Bumi ke Rekening Kas Umum Negara sebesar Rp738.939.663.398 terdiri dari :
 1. PNBPT Pertambangan Panas Bumi Triwulan I tahun 2011 Rp174.102.786.339
 2. PNBPT Pertambangan Panas Bumi Triwulan II tahun 2012 Rp181.087.075.445
 3. PNBPT Pertambangan Panas Bumi Triwulan III tahun 2012 Rp233.687.729.600
 4. PNBPT Pertambangan Panas Bumi Triwulan IV tahun 2012 Rp150.062.072.014

4. Uang Persediaan Pada Kementerian Luar Negeri

Mekanisme permintaan UP

Mekanisme pencairan dana untuk seluruh jenis belanja pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri menggunakan mekanisme UP. Permintaan UP untuk Satker Perwakilan RI di Luar Negeri ke KPPN diajukan oleh Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan dalam mata uang Rupiah. Selanjutnya UP tersebut dikonversi ke dalam mata uang USD untuk dikirimkan ke masing-masing Satker Perwakilan RI di Luar Negeri.

Mekanisme pertanggungjawaban penggunaan UP (*revolving*)

Satker Perwakilan RI di Luar Negeri mengirimkan bukti-bukti dalam mata uang USD dan/atau mata uang asing ke Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan. Selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonversi ke mata uang Rupiah dan dimintakan penggantian ke KPPN. Atas dasar penggantian UP dari KPPN, Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan mengkonversi ke mata uang USD dan dikirimkan kembali ke Satker Perwakilan RI di Luar Negeri.

Mekanisme Penyetoran Sisa UP

Mekanisme penyetoran sisa UP pada akhir tahun anggaran Satker Perwakilan RI di Luar Negeri berbeda dengan satker pada umumnya yang berlokasi di dalam negeri. Mekanisme penyetoran sisa UP dimaksud adalah sebagai berikut.

- a. Satker Perwakilan RI di Luar Negeri mengirimkan sisa UP dalam mata uang USD dan/atau mata uang asing ke Rekening Perantara (sisa UP Perwakilan) di Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri;
- b. Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan mengkonversi nilai USD dan/atau mata uang asing ke Rupiah dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi penyetoran tersebut; dan
- c. Setelah dikonversi, Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri c.q. Biro Keuangan kemudian menyetorkan sisa UP ke rekening Kas Negara pada Bank/Pos Persepsi di

Jakarta.

Pada akhir tahun anggaran, mekanisme tersebut dapat mengakibatkan terjadinya Deposit in Transit, yaitu setoran sisa UP telah dicatat oleh Satker Perwakilan RI di Luar Negeri, namun belum tercatat pada Rekening Perantara (sisa UP Perwakilan) di Kantor Pusat Setjen Kementerian Luar Negeri hingga melewati tahun anggaran. Kejadian tersebut akibat adanya perbedaan waktu dan mekanisme perbankan internasional seperti proses kliring. Selain permasalahan *Deposit in Transit* tersebut, pada Satker Perwakilan RI di Luar Negeri, terdapat juga 'Saldo UP Minus' yang timbul dari penggunaan UP Satker Perwakilan RI Luar Negeri untuk keperluan mendesak yang tidak dianggarkan termasuk untuk keperluan atase (kementerian negara/lembaga lain). Dalam hal penggunaan UP tersebut tidak mendapat penggantian, maka untuk menutup penggunaan UP tersebut digunakan saldo kas besi. Hal ini akan mengakibatkan catatan UP masih ada, sementara dana UP (fisik kas) sendiri sudah tidak ada. Jika sampai akhir tahun UP tersebut tidak mendapat penggantian maka akan direklasifikasi menjadi aset lainnya dan terus muncul di Neraca Kementerian Luar Negeri.

5. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (iv) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2007 jo. Keppres 13 Tahun 2009 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara. Penertiban BMN dilaksanakan melalui inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel baik secara administratif, fisik, maupun hukum.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan dalam temuan BPK. Pelaksanaan penertiban BMN dilakukan mulai Oktober 2007 s.d. 31 Maret 2011 terhadap 74 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA. Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004.

Hasil inventarisasi dan penilaian sampai dengan 31 Desember 2012 telah dibukukan pada LKKL sebesar Rp344.165.765.095.672. Rincian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN disajikan pada **Daftar 33**.

6. Laporan Barang Milik Negara

Berdasarkan hasil rekonsiliasi aset tetap per 31 Desember 2012, antara data Neraca LKKL dan data Laporan BMN, terdapat selisih sebesar Rp3.164.930.838.335, dengan rincian:

(dalam rupiah)

Jenis Aset Tetap	Data Neraca LKKL *)	Data LBMN *)	SELISIH
(1)	(2)	(3)	(4) = (2) - (3)
Tanah	996.115.889.800.342	996.368.391.905.900	(252.502.105.558)
Peralatan dan Mesin	237.601.786.166.188	237.544.686.089.852	57.100.076.336
Gedung dan Bangunan	169.803.672.984.021	171.246.493.163.438	(1.442.820.179.417)
Jalan, Irigasi dan Jaringan	378.555.390.169.172	379.842.084.113.874	(1.286.693.944.702)
Aset Tetap Lainnya	14.551.641.381.726	14.787.265.352.205	(235.623.970.479)
Konstruksi Dalam Pengerjaan	95.665.282.220.406	95.669.672.934.921	(4.390.714.515)
Jumlah	1.892.293.662.721.855	1.895.458.593.560.190	(3.164.930.838.335)

*) tidak termasuk aset tetap yang ada di BRR NAD-Nias

Penjelasan selisih:

1. Selisih pada Tanah, antara lain:

- Tanah pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp124.896.641.732 direklasifikasi menjadi aset lain-lain pada Neraca karena merupakan aset tetap yang perolehannya berasal dari dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang akan diserahkan ke Pemda.
- Tanah pada LBMN Bappenas sebesar Rp83.647.500.000 direklasifikasi sebagai Aset Lainnya pada Neraca karena merupakan aset kemitraan.

2. Selisih pada Peralatan dan Mesin, antara lain:

- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebesar Rp2.512.960.120 direklasifikasikan sebagai Aset Tetap Lainnya pada Neraca.
- Peralatan dan Mesin pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp172.549.935.743 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.

3. Gedung dan Bangunan, antara lain:

- Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.317.400.371.177 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
- Gedung dan Bangunan pada LBMN Kementerian Pertanian sebesar Rp2.760.991.277 karena adanya pencatatan ganda pada satker inaktif.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, antara lain:

- Jalan Irigasi dan Jaringan pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp1.275.622.807.328 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
- Jalan Irigasi dan Jaringan pada Neraca Kementerian Kesehatan sebesar Rp979.550.000 merupakan pengembangan jaringan intranet tahap dua yang pembayaran per termin dan selesai pada TA 2013 sehingga belum dapat dicatat pada LBMN.

5. Aset Tetap Lainnya, antara lain:

- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Nakertrans sebesar Rp140.608.220.991 direklasifikasi sebagai Aset Lain-lain pada Neraca karena merupakan aset dari DK/TP yang akan diserahkan ke pemda.
- Aset Tetap Lainnya pada LBMN Kementerian Agama sebesar Rp7.250.212.970 sedang dilakukan penelusuran secara internal oleh Kementerian Agama.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan, antara lain:

- KDP sebesar Rp62.691.080.363 pada Neraca Kementerian Agama sedang dilakukan penelusuran secara internal oleh Kementerian Agama.
- KDP sebesar Rp29.925.004.639 pada Neraca Kementerian Kesehatan berupa pekerjaan yang akan diselesaikan pada TA 2013 sehingga belum dapat dicatat pada LBMN dan jurnal koreksi BPK yang akan ditindaklanjuti pada semester satu Tahun 2013.

7. Aset Bersejarah (*Heritage Assets*)

Aset Bersejarah pada K/L antara lain:

- a. Badan Pemeriksa Keuangan, aset tersebut berlokasi di Gedung Museum BPK, Magelang. Barang bersejarah tersebut saat ini masih tercatat di kantor BPK Perwakilan Provinsi DI Yogyakarta.
- b. Kementerian Perhubungan berupa dua Tugu Peringatan dan Bangunan Bersejarah.
- c. Kementerian Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah. Berdasarkan buku barang bersejarah Museum KAA Bandung Aset bersejarah di museum tersebut dikelompokkan menjadi enam kelompok:
 - koleksi dengan bahan dasar logam sebanyak 17 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar kayu sebanyak 64 unit;

- koleksi dengan bahan dasar tekstil sebanyak 498 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar kertas sebanyak 207 unit;
 - koleksi dengan bahan dasar audio visual sebanyak 139 unit; dan
 - koleksi dengan bahan dasar lain-lain sebanyak 16 unit.
- d. Arsip Nasional Republik Indonesia, berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
- Arsip Tekstual/Kertas sebanyak 29.120 meter linier.
 - Arsip Kartografi/Peta sebanyak 97.425 lembar.
 - Arsip Film sebanyak 55.869 reel.
 - Arsip Mikrofilm sebanyak 9.932 roll (negatif) dan 4.732 roll (positif), Arsip *Microfische* sebanyak 7200 *fische*.
 - Arsip Video sebanyak 27.350 kaset.
 - Arsip Rekaman Suara sebanyak 43.276 kaset dan arsip *reel to reel sound* sebanyak 871 *reel*.
 - Arsip *Optical Disc* sebanyak 2.120 keping.
 - Arsip foto sebanyak 1.663.000 lembar (negatif dan cetak).
 - Arsip foto belum terdata sebanyak 221 boks dan 282 album.
- e. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mempunyai empat unit aset bersejarah yang terdiri dari Tugu Peringatan, Tugu Raffles, Makam Belanda (Santiong), dan Patung Kepala Sapi.
- f. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Pusat Survei Geologi berupa Gedung Museum yang terletak di Jalan Diponegoro 57 Bandung beserta berbagai koleksi yang ada di dalamnya.
- g. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata telah menetapkan 598 Benda Cagar Budaya (BCB), yang dikelompokkan menjadi:
- Benda cagar budaya seperti: bangunan cagar budaya (candi, situs, tugu, gedung, dsb); dan
 - Benda sejarah lainnya seperti: benda sejarah dalam klasifikasi peralatan dan mesin dan aset tetap lainnya, seperti: benda kuno, benda antik, benda seni, pusaka, fosil, dsb.
- Aset Bersejarah yang dikelola Kementerian Budpar sebanyak 27.031 unit yang tergolong dalam Candi, Tugu Peringatan, Bangunan Bersejarah, tanah peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan jembatan, irigasi serta aset tetap lainnya.
- Terdapat 5 unit rumah peninggalan sejarah dan dua unit masjid bersejarah dari hasil pengadaan belanja modal MAK 53 TA 2008. Setelah diteliti kembali melalui dokumen SPM dan SP2D aset tersebut berupa tiga rumah peninggalan bersejarah dan satu unit masjid bersejarah merupakan aset milik Pemda Tk. I Sumatera Barat. Berdasarkan SK.12/PL.402/Sekjen/KPEK/II/2012 sudah dihibahkan pada tanggal 21 Februari 2012.
- h. Perpustakaan Nasional RI, berupa koleksi manuskrip/naskah kuno berjumlah 10.056 eksemplar naskah kuno.
- i. Kementerian Hukum dan HAM menguasai aset bersejarah sebanyak 18 unit dengan rincian:
- tugu peringatan prasasti sebanyak satu unit;
 - alat kantor dan rumah tangga sebanyak empat unit; dan
 - eksakta sebanyak 13 unit.
- j. Kementerian Sosial RI menguasai aset bersejarah berupa Tugu Peringatan sebanyak lima unit serta satu Unit Makam Bersejarah.
- k. Kementerian Kehutanan, berupa Tugu Peringatan sebanyak satu unit dan Eksakta sebanyak 96 Buah.
- l. Kementerian Pekerjaan Umum menguasai aset sejarah yang terdiri dari:
- tugu peringatan sebanyak 14 unit;
 - bangunan bersejarah sebanyak empat unit;
 - aset eksakta sebanyak dua unit; dan
 - aset non-eksakta sebanyak tujuh unit.

8. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN. Perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU per 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011 berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) disajikan dalam grafik di bawah ini.



Grafik 41 Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Badan Layanan Umum Tahun 2010, 2011, dan 2012

Ikhtisar Laporan Keuangan BLU disajikan pada Daftar 34.

9. Penerapan Penyusutan Aset Tetap pada Badan Layanan Umum

Sesuai dengan amanat PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, seluruh Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Untuk penerapan penyusutan Aset Tetap telah ditetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 04/KMK.06/2013. Sebagai pedoman bagi entitas Pemerintah Pusat dalam melakukan penyusutan, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Adapun tabel masa manfaat diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.6/2013 tentang Tabel Masa Manfaat dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk Tahun 2012 yang diwajibkan untuk menerapkan penyusutan Aset Tetap adalah Satuan Kerja dengan pola pengelolaan keuangan BLU yang telah mengimplementasikan Sistem Akuntansi Keuangan. Penyusutan Aset Tetap Saker BLU tersebut diungkapkan pada CaLK masing-masing LKKL. Perhitungan Penyusutan Aset Tetap pada 105 Satuan Kerja Badan Layanan Umum disajikan pada Daftar 35.

10. Neraca Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara (BRR-NAD-Nias)

BRR-NAD Nias dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 tanggal 16 April 2005 tentang Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi yang selanjutnya menjadi UU dengan diterbitkannya UU Nomor 10 Tahun 2005 tanggal 25 Oktober 2005.

Masa tugas BRR berlaku empat tahun dan pengakhiran masa Tugas BRR NAD-Nias diatur dalam PP Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan

Rekonstruksi (BRR) Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara, yaitu pada tanggal 16 April 2009.

Dalam rangka penyelesaian Aset-aset BRR NAD-Nias yang berakhir tanggal 16 April 2009, Pemerintah membentuk Tim Likuidasi BRR-NAD-Nias. Tugas Tim Likuidasi antara lain menyusun Laporan Keuangan Likuidasi Bagian Anggaran 094 (BRR NAD-Nias). Sampai dengan penyusunan LKPP Tahun 2012, LK Likuidasi belum diterbitkan, sehingga Neraca BRR NAD-Nias yang disajikan dalam LKPP Tahun 2012 adalah Neraca per 31 Desember 2011 dikurangi Mutasi Likuidasi sampai dengan 31 Desember 2012. Berikut ini adalah Neraca per 31 Desember 2008 (audited) dan Neraca per 31 Desember 2012.

**NERACA
BRR NAD-NIAS**

(dalam rupiah)

Uraian	31 Desember 2008 (audited)	31 Desember 2012 (audited)
Aset		
Aset Lancar		
Piutang Kepada Pihak Ketiga	516.968.200	-
Uang Muka Belanja	24.546.204.400	-
Belanja Dibayar Di Muka	2.149.584.510	-
Persediaan	78.951.123.713	76.642.906.311
Jumlah Aset Lancar	106.163.880.823	76.642.906.311
Aset Tetap		
Tanah	572.821.719.812	452.520.454.538
Peralatan Dan Mesin	1.538.503.845.802	526.645.377.630
Gedung Dan Bangunan	3.351.099.589.510	439.593.970.307
Jalan Irigasi Dan Jaringan	4.771.805.420.047	672.892.764.152
Aset Tetap Lainnya	27.483.007.111	15.021.199.484
Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.049.831.238.560	329.112.111.638
Jumlah Aset Tetap	11.311.544.820.842	2.435.785.877.749
Aset Lainnya		
Aset Lain-Lain	661.364.926.291	516.936.124.188
Jumlah Aset Lainnya	661.364.926.291	516.936.124.188
Jumlah Aset	12.079.073.627.956	3.029.364.908.248
Kewajiban	-	-
Ekuitas Dana		
Ekuitas Dana Lancar		
Cadangan Piutang	27.212.757.110	-
Cadangan Persediaan	78.951.123.713	76.642.906.311
Jumlah Ekuitas Dana Lancar	106.163.880.823	76.642.906.311
Ekuitas Dana Investasi		
Diinvestasikan Dalam Aset Tetap	11.311.544.820.842	2.435.785.877.749
Diinvestasikan Dalam Aset Lainnya	661.364.926.291	516.936.124.188
Jumlah Ekuitas Dana Investasi	11.972.909.747.133	2.952.722.001.937
Jumlah Ekuitas Dana	12.079.073.627.956	3.029.364.908.248
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	12.079.073.627.956	3.029.364.908.248

Perubahan nilai aset tetap dan aset lainnya dari Neraca per 31 Desember 2008 (audited) menjadi Neraca per 31 Desember 2012 adalah karena adanya koreksi dan penghapusbukuan.

11. Badan Lainnya

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 (107 unit), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 200/PMK.05/2012, terdapat 105 unit Badan Lainnya.

terdapat beberapa Unit Badan Lainnya yang ditetapkan sebagai Bagian Anggaran tahun 2012, yaitu:

- a. Badan Pengawas Pemilu;
- b. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI);
- c. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI);
- d. Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
- e. Badan Pengelola Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
- f. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT); dan
- g. Badan Informasi Geospasial/Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional.

Pada tahun 2012 Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI), Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP TVRI), Badan Pengelola Kawasan Batam (BPK Batam) dan Badan Pengelola Kawasan Sabang (BPK Sabang) yang sebelumnya merupakan Unit Akuntansi Pembantu Anggaran Bendahara Umum Negara untuk Belanja Lain-Lain (BA. 999.08) telah mendapatkan alokasi Bagian Anggaran sendiri berdasarkan Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor S-714/MK.02/2011 tanggal 17 November 2011 Tentang Penerbitan Bagian Anggaran. Kodifikasi Bagian Anggaran untuk masing-masing unit adalah:

No	Bagian anggaran	Kode BA
1	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (LPP RRI)	116
2	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI)	117
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang Batam (BPK Batam)	112
4	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPK Sabang)	118

Sedang untuk Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti (Yayasan Sarana Wana Jaya), sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tanggal 16 Januari 2012 tentang Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan, menyatakan bahwa Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1983 mengenai penunjukan Yayasan Sarana Wana Jaya selaku pengelola Gedung Pusat Kehutanan/Taman Hutan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Sebagai tindak lanjutnya, telah diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pengelolaan Gedung Pusat Kehutanan dan Taman Hutan Beserta Bangunan Pelengkapannya dari ketua Umum Pengurus Yayasan Sarana Wana Jaya kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan pada tanggal 5 Juli 2012.

Selain itu, berdasarkan hasil sementara dari Inventarisasi Unit Badan Lainnya sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-10207/PB/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya, terdapat beberapa Unit Badan Lainnya yang tidak aktif, belum aktif, atau dilikuidasi. UBL tersebut adalah:

- a. Badan Kebijakan Nasional dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKP4N);
- b. Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN);
- c. Dewan Buku Nasional (DBN);
- d. Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional);
- e. Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI);
- f. Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI);
- g. Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA);
- h. Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN);
- i. Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca);
- j. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK);
- k. Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan;
- l. Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N);
- m. Kawasan Ekonomi Khusus Sei Menkei;
- n. Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung; dan
- o. Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda.

Terhadap beberapa Lembaga Non Struktural yang ditetapkan sebagai Unit Badan Lainnya, terdapat empat LNS yang sedang dalam proses rekomendasi penghapusan pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, yaitu: Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan, Dewan Buku Nasional, Badan Kebijakan dan Pengendalian Perumahan dan Permukiman Nasional, dan Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat.

Selanjutnya sesuai surat Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Kesehatan Nomor OT.01.01/I/041/2013 tanggal 7 Januari 2013 hal Hasil Inventarisasi Eksistensi UBL di lingkungan Kementerian Kesehatan, dinyatakan terdapat tiga UBL dan dua UBL yang tidak aktif, yaitu Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN) dan Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK).

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Nomor S-03/SES.M.EKON/01/2013 tanggal 08 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya bahwa untuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilikuidasi dan diganti nama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus. Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor SJ/B.IV/47/2012 tanggal 11 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya dinyatakan bahwa dalam lingkup Kementerian Agama terdapat lima Unit Badan Lainnya dan terdapat satu UBL Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) yang belum aktif.

Berdasarkan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi nomor B.102/SJ-PR/I/2013 tanggal 23 Januari 2013 hal Penyampaian Unit Badan Lainnya di Lingkungan Kemnakertrans terdapat empat UBL, dan tidak termasuk Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA).

Untuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional, dijelaskan bahwa KPRBN merupakan unit organisasi yang dibentuk dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi yang bertugas menetapkan kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Sejak pembentukannya, KPRBN tidak mengelola APBN serta tidak mempunyai sekretariat.

Berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian Nomor S-03/SES.M.EKON/01/2013 tanggal 08 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya bahwa untuk Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dilikuidasi dan diganti nama dengan Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus.

Berdasarkan surat Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor B-103/Kemensos/RS-Set RS/KS.01.01/01/2013 Januari 2013 hal Inventarisasi Eksistensi Unit Badan Lainnya, bahwa UBL yang ada di bawah Kementerian Sosial hanya satu, yaitu Komisi Nasional Lanjut Usia. Selanjutnya sesuai surat Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor B.73/Kemensos/RS.Set-RS/KU.02.01/01/2013 tanggal 28 Januari 2013 hal Permintaan Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural dan Yayasan Tahun 2012 (*unaudited*) bahwa Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca) belum pernah terbentuk sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1999.

Untuk Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda, berdasarkan informasi dari Kementerian Pekerjaan Umum Ditjen Bina Marga, sampai saat ini Badan tersebut belum terbentuk sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2011.

Untuk Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mankei dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung berada di bawah Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (Menko Perekonomian), bahwa belum mendapat alokasi dana APBN pada tahun 2012.

Nomenklatur UBL ini bermacam-macam, antara lain akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, majelis, otorita, dan unit kerja. Kesekretariatan LNS/I biasanya berada di Kementerian atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari Kementerian/Lembaga. Gaji pegawai sekretariat LNS sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tetap dibayar oleh instansi asal, sedangkan dari LNS biasanya mereka mendapat tunjangan tambahan.

UBL dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pembentukan ini ada yang bersifat jangka pendek, namun ada pula yang bersifat jangka panjang mengingat pembentukan UBL tergantung dari kebutuhan Presiden selaku kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan guna menciptakan kesejahteraan bagi rakyat. Apabila Presiden membutuhkan unit baru guna mendukung tupoksi kementerian negara/lembaga maka Presiden membentuk UBL dengan melalui penetapan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang digunakan untuk membentuk Unit Badan Lainnya dapat berupa:

1. Undang-undang;
2. Peraturan Pemerintah;
3. Peraturan Presiden; dan
4. Keputusan Presiden.

Dari 105 lembaga tersebut, lebih dari sepertiganya (35 lembaga) merupakan amanat yang tertulis dalam Undang-Undang. Menilik legalitas pembentukannya, sebanyak 20% dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah. Sedangkan yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden sebanyak 60% dan 20% berdasarkan peraturan presiden.

Unit Badan Lainnya yang dibiayai dari APBN murni, akuntansi atas transaksi keuangan dan laporan keuangannya sudah dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga maupun dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. UBL yang menjadi satuan kerja atau entitas akuntansi tersendiri, pengurusan administrasi keuangannya ditangani oleh Sekretariat yang dipimpin oleh Kepala Sekretariat atau pejabat struktural K/L yang menaungi dan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran.

UBL sebagai entitas akuntansi tunduk pada ketentuan pasal 27 ayat (1) PP 8/2006 bahwa Kepala Satuan Kerja sebagai Kuasa Pengguna Anggaran di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga menyampaikan Laporan Keuangan dan Kinerja interim sekurang-kurangnya setiap triwulan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga. Selanjutnya, Menteri/Pimpinan Lembaga menyusun Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kementerian Negara/Lembaga berdasarkan Laporan Keuangan dan Kinerja interim Kuasa Pengguna Anggaran dan menyampaikannya kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.

Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 pasal 2 memasukkan yayasan di lingkungan Kementerian Negara/Lembaga dalam ruang lingkup keuangan negara. Terdapat kata "pihak lain" pada butir g dan l yaitu:

- "Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/daerah".
- "Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah".

Dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa kekayaan pihak lain sebagaimana dimaksud pasal 2 butir l UU 17/2003 meliputi kekayaan yang dikelola oleh orang atau badan lain berdasarkan kebijakan pemerintah, yayasan-yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga, atau perusahaan negara/daerah.

Berdasarkan ruang lingkup keuangan negara di atas, yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga adalah yayasan yang terafiliasi dengan kementerian negara/lembaga, yang menurut Akta Notaris dan Anggaran Dasarnya didirikan atau dipimpin oleh pejabat pemerintah aktif di kementerian negara/lembaga tertentu atau yayasan yang menerima dan memanfaatkan aset negara dalam melaksanakan kegiatannya. Identifikasi atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga ini diperlukan untuk kemajuan tata kelola pemerintahan melalui transparansi dan akuntabilitas sektor publik.

Identifikasi lebih lanjut atas yayasan di lingkungan kementerian negara/lembaga dipisahkan dari yayasan-yayasan yang bernaung dibawah institusi TNI. Hal ini karena karena pasal 76 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI telah mengamanatkan bahwa dalam jangka waktu lima tahun sejak berlakunya Undang-undang Nomor 34 tahun 2004, Pemerintah harus mengambil alih seluruh aktifitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung

maupun tidak langsung. Saat ini ada 900-an unit bisnis baik berupa yayasan maupun koperasi di bawah naungan TNI yang telah teridentifikasi oleh Badan Pengelola Transformasi Bisnis TNI yang diketuai oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN untuk diserahkan kepada Presiden. Selanjutnya yayasan maupun koperasi tersebut ditransformasikan dalam korporasi atau dimasukkan dalam mekanisme APBN, sehingga TNI bisa berkonsentrasi mengembangkan profesionalitas tentara dan meninggalkan bisnis.

Dalam Laporan Keuangan UAP BUN-PBL tahun 2012, menyajikan ekuitas bersih atas beberapa Unit Badan Lainnya sebagai berikut.

1. Otorita Asahan;
2. Taman Mini Indonesia Indah;
3. Yayasan Gedung Veteran RI;
4. Badan Amil Zakat Nasional; dan
5. Badan Wakaf Indonesia.

Ikhtisar laporan keuangan Badan Lainnya (Lembaga Non Struktural dan Yayasan Pemerintah) disajikan dalam **Daftar 36**.

12. Aset Bekas Milik Asing/Cina

Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C) merupakan Aset yang dikuasai Negara yang berasal dari bekas adalah sebagai berikut.

1. Milik perkumpulan-perkumpulan Cina yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan dengan peraturan Penguasa Perang Pusat melalui Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor Prt/032/PEPERPU/1958 jo. Keputusan Penguasa Perang Pusat Nomor Kpts/Peperpu/0439/1958 jo. Undang-Undang Nomor 50 Prp. Tahun 1960;
2. Perkumpulan/aliran kepercayaan asing yang tidak sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia yang dinyatakan terlarang dan dibubarkan sesuai Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1962;
3. Perkumpulan-perkumpulan yang menjadi sasaran aksi massa/kesatuan-kesatuan aksi tahun 1965/1966 sebagai akibat keterlibatan Republik Rakyat Tjina (RRT) dalam pemberontakan G.30.S/PKI yang tertibkan dan dikuasai oleh Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah sehingga asetnya dikuasai Negara melalui Instruksi Radiogram Kaskogam Nomor T-0403/G-5/5/66; dan
4. Organisasi yang didirikan oleh dan/atau untuk orang Tionghoa perantauan (Hoa Kiauw) yang bukan Warga Negara Asing yang telah mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Republik Indonesia dan/atau memperoleh pengakuan dari Negara Republik Indonesia, beserta cabang-cabang dan bagian-bagiannya.

Dalam rangka optimalisasi penyelesaian masalah Aset Bekas Milik Asing/Cina (ABMA/C), dibentuklah dua tim, yaitu Tim Penyelesaian ABMA/C Tingkat Pusat dan Tim Asistensi Penyelesaian ABMA/C Tingkat Wilayah.

Penyelesaian ABMA/C diatur dalam PMK Nomor 188/PMK.06/2008 tentang Penyelesaian Aset Bekas Milik Asing/Cina, yang sebelumnya diatur dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-394/MK.03/1989 tanggal 12 April 1989 perihal Tanah dan Bangunan Gedung Bekas Sekolah Asing/Cina. Sesuai dengan PMK Nomor 188/PMK.06/2008 sebagaimana telah diubah dengan PMK 154/PMK.06/2011, penyelesaian ABMA/C dapat dilaksanakan dengan beberapa cara sebagai berikut.

1. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Negara;
2. Dimantapkan status hukumnya menjadi Barang Milik Daerah;
3. Dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara pembayaran kompensasi kepada Pemerintah dengan menyetorkannya ke Kas Negara;
4. Dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah; atau
5. Dikeluarkan dari daftar Aset Bekas Milik Asing/Cina.

Pada tahun 2012, terdapat pelunasan pembayaran kompensasi ke kas negara atas ABMA/C

Hotel Makmur (dh. BAKOM PKB Kab. Belitung) yang dilepaskan kepada pihak ketiga sejumlah Rp2.544.330.000,00 (dua miliar lima ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Sampai dengan 31 Desember 2012, dari total 1.010, telah diselesaikan sebanyak 174 aset dengan rincian sebagai berikut.

1. Tahun 2009: 2 aset menjadi BMN dan 3 aset dilepaskan ke pihak ketiga/swasta (total 5 aset);
2. Tahun 2010: 6 aset menjadi BMN dan 14 aset menjadi BMD (total 20 aset);
3. Tahun 2011: 7 aset menjadi BMN, 28 aset menjadi BMD, dan 1 aset dilepas ke pihak ketiga (total 36 aset); dan
4. Tahun 2012: 23 aset menjadi BMN, 86 aset menjadi BMD, dan 3 aset BMN dan BMD Sebagian (total 112 aset).

Rincian Capaian Kinerja Penyelesaian ABMA/C s.d Tahun 2012 dapat dilihat pada **Daftar 37**.

13. Kewajiban Kontinjensi

- Untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah memberikan jaminan pada Program Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara yang dilaksanakan oleh PT. PLN (Persero) dan Program Percepatan Penyediaan Air Minum yang dilaksanakan oleh PDAM. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan atas risiko/kemungkinan PT. PLN (Persero) dan PDAM tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditur. Jaminan Pemerintah dimaksud diberikan melalui Perpres Nomor 91/2007 dan Perpres Nomor 29/2009.
- Sesuai Perpres Nomor 91/2007, dalam rangka mendukung percepatan pembangunan pembangkit listrik berbahan bakar batubara oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PT PLN), Pemerintah memberikan jaminan penuh atas kewajiban pembayaran pinjaman PT. PLN (Persero) kepada kreditur perbankan.
- Dalam rangka mendukung percepatan penyediaan air minum, melalui Perpres Nomor 29/2009 Pemerintah memberikan jaminan sebesar 70% atas pembayaran kembali kredit investasi PDAM kepada perbankan, sedangkan 30% sisanya menjadi risiko bank pemberi kredit. Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen), dan Pemerintah Daerah menanggung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari seluruh kewajiban PDAM yang gagal bayar.
- Kewajiban Pemerintah untuk membayar kepada kreditur baru akan timbul jika pihak yang dijamin (PT PLN (Persero) dan PDAM) tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada kreditur (gagal bayar), sehingga terdapat unsur ketidakpastian atas timbulnya kewajiban Pemerintah. Terjadinya gagal bayar dimaksud sangat tergantung dengan kondisi keuangan dari PT PLN (Persero) dan PDAM. Selain itu, jumlah kewajiban yang mungkin timbul atas jaminan yang diberikan tidak dapat diukur secara pasti. Jumlah pastinya baru akan diketahui pada masa yang akan datang. Oleh karena itu, perhitungan alokasi anggaran dalam APBN didasarkan pada estimasi besaran jumlah kewajiban PT PLN (Persero) dan PDAM kepada kreditur pada tahun berjalan dikalikan dengan probabilitas gagal bayar dari kewajiban tersebut. Untuk memperkirakan terjadinya gagal bayar, digunakan rasio CICR (*Consolidated Interest Coverage Ratio*) dan DSCR (*Debt Service Coverage Ratio*).
- Sampai dengan semester II TA 2012 Surat Jaminan Pemerintah yang telah diterbitkan dalam rangka:
 - program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara adalah sebanyak 30 surat jaminan Pemerintah untuk proyek pembangkit dan 4 surat jaminan Pemerintah untuk proyek transmisi. Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar Rp36,216,962,894,355 dan USD 3,958,718,574.
 - program percepatan penyediaan air minum, telah diterbitkan sebanyak 4 Surat Jaminan Pemerintah Pusat untuk 4 PDAM (Kab. Bogor, Kab. Ciamis, Kab. Lombok Timur dan Kota Malang). Nilai total jaminan Pemerintah tersebut adalah sebesar

Rp160.187.000.000 (seratus enam puluh miliar seratus delapan puluh tujuh juta rupiah).

- Alokasi Anggaran kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah TA 2012 sebagai berikut.

Program	Exposure	x	Probability Default	x	(100 %	-	Recovery Rate	=	Expected Loss
Penjaminan PT PLN	Rp54.679 miliar	x	1.14%	x	(100 %	-	0 %) =	623 miliar
Penjaminan PDAM	Rp28 miliar	x	16.98 %	x	(100 %	-	0 %) =	4.7 miliar

- *Exposure* pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara pada tahun 2012 diperkirakan mencapai Rp54.679 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 1,14% dan *recovery rate* sebesar 0% maka *expected loss* kewajiban kontinjensi penjaminan Pemerintah yang mungkin timbul di tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp623 miliar. Sehingga anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk PT. PLN (Persero) yang dialokasikan dalam APBN TA2012 adalah sebesar Rp623 miliar (enam ratus dua puluh tiga miliar rupiah).
- *Exposure* pembayaran kewajiban penjaminan Pemerintah kepada kreditur pada program percepatan penyediaan air minum untuk tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp28 miliar. Dengan probabilitas gagal bayar 16,98% dan *recovery rate* sebesar 0% serta pertimbangan risiko lainnya, maka *expected loss* kewajiban kontinjensi yang mungkin timbul di tahun 2012 diperkirakan sebesar Rp4,7 miliar, namun untuk meningkatkan kepercayaan perbankan atas penjaminan Pemerintah untuk PDAM, maka alokasi anggaran kontinjensi penjaminan Pemerintah untuk program percepatan penyediaan air minum dalam APBN 2012 ditetapkan sebesar Rp10 miliar (sepuluh miliar rupiah).
- Kemungkinan Penggantian Oleh Pihak Ketiga
 - 1) Kontinjensi untuk PT. PLN (Persero)

Sesuai dengan PMK Nomor 44/PMK.01/2008 Tentang Persyaratan Dan Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Batubara, apabila PT PLN (Persero) tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, Pemerintah sebagai penjamin akan membayar kewajiban kepada kreditur PT PLN (Persero) sejumlah utang yang jatuh tempo. Kewajiban yang dibayarkan Pemerintah tersebut akan diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PT PLN (Persero).
 - 2) Kontinjensi untuk PDAM

Berdasarkan PMK Nomor 229/PMK.01/2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum dan PMK Nomor 91/PMK.011/2011 Tentang Perubahan atas PMK Nomor 229/PMK.01/2009, Pemerintah Pusat menanggung sebesar 70% dari pokok kredit investasi PDAM yang jatuh tempo dalam hal PDAM tidak mampu memenuhi kewajibannya (*payment default*). Dari 70% jaminan tersebut selanjutnya dilakukan pembagian pembebanan, dimana Pemerintah Pusat menanggung sebesar 40% (empat puluh persen), yang diperhitungkan sebagai pinjaman dari Pemerintah Pusat kepada PDAM, sedangkan 30% (tiga puluh persen) menjadi pinjaman Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat. Apabila Pemerintah Daerah tidak membayar pinjaman kepada Pemerintah Pusat, maka akan dilakukan pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH).
- Terdapat Tuntutan Hukum kepada Pemerintah yang telah *inkracht* pada Kementerian Pertanian sebesar Rp1.900.000.000 berupa tuntutan pembayaran PT. Andihema Perdana atas pengadaan pupuk *Rock Phospate* kepada Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian.
- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial

dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya kepentingan Peserta. Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011, terdapat dua bentuk BPJS, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan menyelenggarakan program jaminan kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. BPJS tersebut merupakan transformasi kelembagaan PT Askes (Persero), PT Jamsostek (Persero), PT TASPEN (Persero), dan PT ASABRI (Persero). Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.

Sesuai dengan UU Nomor 24 Tahun 2011, aset BPJS bersumber dari modal awal dari Pemerintah, yang merupakan kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Modal awal dimaksud untuk BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan ditetapkan masing-masing paling banyak sebesar Rp2.000.000.000.000 yang bersumber dari APBN. BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2014. Terkait dengan alokasi anggaran TA 2013 untuk penyertaan modal pada BPJS masih dibahas antara pemerintah dengan DPR.

Sesuai dengan Pasal 56 ayat (2) dan (3) UU Nomor 24 Tahun 2011, dalam hal terdapat kebijakan fiskal dan moneter yang mempengaruhi tingkat solvabilitas BPJS, Pemerintah dapat mengambil kebijakan khusus untuk menjamin kelangsungan program Jaminan Sosial, dan dalam hal terjadi krisis keuangan dan kondisi tertentu yang memberatkan perekonomian, Pemerintah dapat melakukan tindakan khusus untuk menjaga kesehatan keuangan dan kesinambungan penyelenggaraan program Jaminan Sosial.

14. **BMN *Idle* (*Idle Asset*) TA 2012**

BMN *idle* (*idle asset*) merupakan bagian dari BMN sehingga seluruh *idle asset* dapat diakui sebagai BMN, sedangkan BMN *idle* yang dilaporkan dan disajikan dalam Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Transaksi Khusus adalah BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang.

Karena sampai dengan Laporan ini disusun belum ada BMN *idle* yang diserahkan kepada Pengelola Barang, maka Neraca BUN TK, BMN *idle* yang sudah diserahkan ke Pengelola Barang per 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp0,- (nihil).

Guna menindaklanjuti amanat Pasal 4 dan Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.06/2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menunjang Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga, Direktorat BMN telah menerbitkan kebijakan sebagai berikut.

- 1) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/KM.6/2012 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga Kepada Pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Untuk Dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat Dan/Atau Keputusan Menteri Keuangan; dan
- 2) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor Per- 05/KN/2012 tentang Prosedur Kerja dan Bentuk Surat Dalam Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Tidak Digunakan Untuk Menyelenggarakan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga.

Dua peraturan di atas menjadi pedoman KPKNL, Kanwil DJKN, dan Kantor Pusat DJKN dalam melakukan prosedur penetapan dan pengelolaan BMN *idle*. Dari hasil monitoring terdapat beberapa KPKNL yang sudah melakukan klarifikasi tertulis kepada satker-satker (UAKPB) pengguna BMN yang terindikasi sebagai BMN *idle*. Penatausahaan BMN *idle* diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, yaitu:

Pasal 10 ayat (2):

Pelaksana Penatausahaan pada Pengelola Barang masing-masing dalam pembukuannya harus:

- a. KPKNL membuat Daftar Barang Milik Negara Kantor Daerah berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* (DBMN-KD-T/B) yang berada di wilayah kerjanya;

- b. Kanwil DJKN membuat Daftar Barang Milik Negara Kantor Wilayah berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* (DBMN-KW-T/B), yang berupa gabungan DBMN-KD-T/B yang berada di wilayah kerjanya; dan
- c. DJKN membuat Daftar Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* (DBMN-T/B), yang berupa gabungan DBMN-KW-T/B.

Pasal 23 ayat (1):

KPKNL menyusun Laporan BMN Kantor Daerah (LBMN-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, yang terdiri dari:

- a. LBMN-KD Semesteran (LBMNS-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN;
- b. LBMN-KD Tahunan (LBMNT-KD) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, dan menyampaikannya kepada Kanwil DJKN.

Pasal 24 ayat (1)

Kanwil DJKN menyusun Laporan BMN Kantor Wilayah (LBMN-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, terdiri dari:

- a. LBMN-KW Semesteran (LBMNS-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* pada awal dan akhir suatu semester serta mutasi yang terjadi selama semester tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNS-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, dan menyampaikannya kepada DJKN; dan
- b. LBMN-W Tahunan (LBMNT-KW) berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, menyajikan posisi BMN berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle* pada awal dan akhir tahun serta mutasi yang terjadi selama tahun tersebut, yang datanya dihimpun dari LBMNT-KD berupa Tanah dan/atau Bangunan *idle*, dan menyampaikannya kepada DJKN.

Rencana Strategis:

Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Umum Negara (UAKPA BUN TK) Pengelola BMN *idle* yang sudah diserahkan kepada Pengelola Barang harus mengoptimalkan pengelolaan BMN *idle* yang berada pada pengelolaannya melalui:

- Penetapan status penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang membutuhkan BMN tersebut; dan
- Pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN *idle*.

Pendapatan:

Pendapatan diperoleh dari pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN *idle* yang berada di Pengelola Barang. Selama periode Tahun 2012, tidak terdapat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diperoleh dari pemanfaatan dan/atau pemindahtanganan BMN *idle* (nihil).

Belanja:

Untuk periode Tahun 2012 tidak terdapat realisasi belanja (nihil) karena belum ada BMN *idle* yang harus dilakukan pemeliharaan dan pengamanan.

15. Pemanfaatan BMN eks KKKS Pertamina

Melalui surat Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nomor 1105/C00000/2008-SO tanggal 15 Agustus 2008 perihal Usulan Penyelesaian Isu-Isu Neraca Pembuka PT Pertamina (Persero) Tindak Lanjut Rapat Bali 28 dan 29 Juli 2008, dalam rangka koreksi laporan keuangan PT Pertamina (Persero) untuk membebaskan biaya atas penggunaan BMN eks KKS Pertamina senilai Rp16,2 triliun oleh PT Pertamina EP, telah disampaikan usulan sewa dengan pola "*fixed payment and fixed term*", dengan klausul antara lain bahwa beban sewa dan pemeliharaan (*operating and maintenance*) menjadi unsur *cost recovery*. Selanjutnya dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-23/MK.6/2009 tanggal 21 Januari 2009, disampaikan persetujuan atas usulan sewa pemanfaatan aset eks KKS Pertamina Rp16,2 triliun.

Dalam perkembangannya, mengacu kesepakatan antara DJKN dan PT Pertamina (Persero) pada

tanggal 23 Januari 2009 bahwa objek sewa adalah atas aset berupa Bangunan, Fasilitas Produksi, Harta Benda Modal Bergerak, dan Aset Lainnya dengan nilai total Rp9,472 triliun, PT Pertamina (Persero) melakukan pembebanan Sewa Aset dalam Laporan Keuangan Tahun 2003-2012 senilai total Rp2.738.233.545.596. Beban sewa BMN tersebut dibukukan sebagai Hutang Kepada Pemerintah karena belum dilakukan pembayaran sewa oleh PT Pertamina.

Penyetoran uang sewa ke Rekening Kas Umum Negara belum dapat dilakukan karena belum ditandatangani Perjanjian Sewa, saat ini terkendala menunggu kesepahaman dengan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengenai kepastian objek sewa dan besaran *cost recovery*. Untuk itu, telah beberapa kali dilakukan pembahasan antara Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian ESDM, SKK Migas & PT Pertamina, terakhir pada tanggal 28 Januari 2013, namun belum didapatkan kesepakatan.

a. Pemanfaatan Kilang LNG Arun Untuk Terminal Regasifikasi

Dalam rangka revitalisasi industri di Aceh, PT Pertamina (Persero) telah menyampaikan surat Nomor 225/L00000/2011-SO tanggal 23 Mei 2011 hal Kajian Ekonomi Pemanfaatan Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek Revitalisasi Industri Aceh, yang pada pokoknya menyampaikan permohonan sewa aktiva kilang LNG Arun yang meliputi tanah, bangunan, sarana pelengkap lainnya serta mesin dan peralatan lainnya, untuk digunakan sebagai Terminal Regasifikasi LNG. Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-314/MK.6/2011 tanggal 9 September 2011 hal Persetujuan Sewa Barang Milik Negara Berupa Aset Kilang LNG Arun Untuk Proyek LNG *Receiving and Regasification Terminal* dan surat Nomor S-554/MK.6/2011 tanggal 30 Desember 2011, telah disampaikan persetujuan Pemerintah atas rencana pelaksanaan sewa aktiva kilang LNG Arun untuk Terminal Regasifikasi LNG oleh PT Pertamina, dengan nilai sewa (tidak termasuk pajak) sebesar Rp188.700.000.000 untuk jangka waktu lima tahun. Penandatanganan Naskah Perjanjian Sewa saat ini belum dapat dilakukan karena menunggu kepastian Kementerian ESDM mengenai alokasi dan distribusi pasokan gas untuk kebutuhan industri di Aceh dan Sumatera Utara.

b. Pemanfaatan Aset oleh Jakarta International School

Head of Jakarta International School (JIS) dalam suratnya tanggal 12 Februari 2010 menyampaikan permohonan sewa tanah di Jalan Terogong Raya Nomor 33, Cilandak dengan usulan tarif untuk 5 tahun sebesar Rp23.655.056.765. Selanjutnya, dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-341/MK.06/2010 tanggal 27 September 2010 hal Sewa Menyewa Antara Menteri Keuangan Dan Jakarta International School, disampaikan bahwa sesuai ketentuan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, nilai sewa minimum tanah per tahun adalah sebesar Rp23.655.056.765, sehingga permohonan JIS tersebut belum dapat disetujui. Setelah itu, melalui surat Head of JIS tanggal 4 Oktober 2011 hal Penindaklanjutan dari Notulen Rapat pada Hari Rabu Tanggal 14 September 2011 Di Jakarta International School, menyampaikan permohonan sewa dengan usulan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perkembangannya, melalui surat Head of JIS tanggal 22 Mei 2012 hal Lease of the Cilandak Campus menyampaikan kesediaan untuk membayar sewa sebesar 100% (seratus persen) dari nilai yang ditentukan dalam peraturan perundangundangan untuk periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 dan untuk periode sewa mulai 1 Maret 2012 sampai dengan 29 Februari 2017, akan dilakukan secara tahunan dengan mengacu ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Dengan surat Menteri Keuangan Nomor S-533/MK.6/2012 tanggal 2 Oktober 2012 hal Tindak Lanjut Permasalahan Sewa Tanah oleh Jakarta International School, telah disampaikan persetujuan sewa tanah oleh JIS periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 (46 bulan) dengan nilai sewa sebesar Rp90.677.717.599. Untuk itu, pihak Jakarta International School telah melakukan penyetoran uang sewa periode 1 Mei 2008 sampai dengan 29 Februari 2012 (46 bulan) sebesar Rp45.338.858.800 ke Rekening Kas Umum Negara. Untuk sewa periode 1 Maret 2012 sampai dengan 30 April 2013, telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilai DJKN pada tanggal 24 September 2012. Saat ini dalam proses penelaahan persetujuan sewa.

Selanjutnya DJKN akan menindaklanjuti dengan persetujuan sewa dan penandatanganan kontrak sewa dengan pihak Jakarta International School.

16. *Past Service Liabilities Program Pensiun*

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program THT, iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *pay as you go*, yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh Pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN-P TA 2011 pembayaran pensiun 100% beban APBN. Sejak tahun 1994 sampai dengan tahun 2008, Pemerintah meminta PT TASPEN melakukan *sharing* terhadap pembayaran manfaat pensiun seperti pada tabel 20.

Tabel 20 *Sharing* Pembayaran Manfaat Pensiun

No.	Periode	Sharing (%)		Sharing (Rp)	
		APBN	TASPEN	APBN	TASPEN
1	Januari - Maret 1994	0%	100%	-	684.484.404.672
2	April 1994 - Maret 1997	77,50%	22,50%	10.320.490.467.535	3.251.694.491.666
3	April 1997 - Desember 1998	77%	23%	4.166.973.000.000	1.443.702.023.854
4	Januari 1999 - Desember 2002	75%	25%	38.808.429.790.889	10.629.716.358.793
5	Januari 2003 - Desember 2005	79%	21%	45.267.251.395.247	10.369.704.931.390
6	Januari - Desember 2006	82,50%	17,50%	18.983.960.941.237	3.772.133.279.016
7	Januari - Desember 2007	85,50%	14,50%	23.342.832.127.554	3.476.843.628.139
8	Januari - Desember 2008	91%	9%	30.715.182.682.604	2.630.389.180.583
Total				171.605.120.405.066	36.258.668.298.113

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT. Berdasarkan hasil valuasi aktuarial independen per 31 Desember 2010 terdapat kewajiban Aktuarial Program Dana Pensiun sebesar Rp1.809,42 triliun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2010 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp1.879,64 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2011.

Sesuai dengan data dalam Laporan Keuangan PT Taspen (Persero) Tahun 2012 *Audited* diketahui bahwa jumlah dana titipan atas iuran program pensiun sampai dengan 31 Desember 2012 adalah sebesar Rp56,25 triliun. Rincian Dana Program pensiun per 31 Desember 2012 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

A. Saldo per 31 Desember 2011	42.193.509.260.318
B. Penerimaan:	
Penerimaan Iuran Peserta	7.319.498.093.894
Penerimaan Dana dari Pemerintah	59.448.074.789.969
Hasil Investasi	3.510.707.849.075
Kenaikan Nilai Investasi	2.724.229.297.163
Pendapatan Lain-lain	25.865.387.231
Total Penerimaan	73.028.375.417.332
C. Pengeluaran:	
Pembayaran Manfaat Pensiun	57.980.238.401.792
Pengembalian Dana dari Pemerintah	204.550.424.167
Beban Operasional	674.259.769.679
Total Pengeluaran	58.859.048.595.638

D. Perubahan Dana (B-C)	14.169.326.821.694
E. Koreksi Dana Bersih	(111.607.884.228)
F. Saldo per 31 Desember 2011 (A+D+E)	56.251.228.197.784

17. Dana Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (PKBL BUMN) (Peraturan Menteri BUMN bahwa 30% sudah diserahkan)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri, dan Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN. Dana Program Kemitraan BUMN bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%, jasa administrasi pinjaman/margin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana Program Kemitraan setelah dikurangi beban operasional, dan dari pelimpahan dana Program Kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Untuk Dana Program Bina Lingkungan bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% dan hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL.

Pelaksanaan dan Pengelolaan dana tersebut berada di BUMN Pembina (BUMN yang melaksanakan Program Kemitraan dan Program BL), Koordinator BUMN Pembina (BUMN yang ditunjuk oleh Menteri BUMN untuk mengkoordinasikan BUMN Pembina di dalam suatu provinsi tertentu), BUMN Penyalur (BUMN Pembina yang menyalurkan Dana Program Kemitraan milik BUMN Pembina lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran), atau Lembaga Penyalur (badan usaha selain BUMN atau lembaga bukan badan usaha yang melakukan kerjasama dengan BUMN Pembina dalam menyalurkan pinjaman Dana Program Kemitraan berdasarkan Perjanjian Kerjasama Penyaluran) namun otoritas penggunaannya berada pada Kementerian BUMN.

Sampai dengan 31 Desember 2012 saldo dana PKBL BUMN Peduli berjumlah Rp329.376.738.406 yang terdiri dari saldo BL Peduli sebesar Rp150.223.875.146 dan Saldo BL Peduli lainnya atau BUMN Koordinator Sektor sesuai dengan Surat Menteri BUMN Nomor S-648/MBU/2012 tanggal 14 November 2012 sebesar Rp179.152.863.260.

Selain dana PKBL BUMN juga terdapat Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli, yaitu Dana yang dikumpulkan dari dana BL BUMN Peduli dan merupakan bagian dari Dana Program Bina Lingkungan pada BUMN Pembina. Saldo Dana Bantuan Tunai BUMN Peduli 31 Desember 2012 dan 31 Desember 2011, adalah sebesar Rp.14.531.641.813 dan Rp14.180.502.976.

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-20/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, bahwa ketentuan atas setiap tahun berjalan sebesar 70% dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina dan 30% dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli telah dihapuskan. Ketentuan tersebut mulai berlaku untuk tahun buku 2013.

18. Peralihan BP MIGAS menjadi SKK MIGAS

Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tanggal 13 November 2012, BP MIGAS dibatalkan status hukumnya, sehingga BP MIGAS secara hukum tidak ada lagi.

Untuk melaksanakan Putusan MK dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha hulu migas diterbitkanlah Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 Tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 K/08/MEM/2012 dan 3136 K/73/MEM/2012 tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi Dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hulu migas dialihkan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang migas sampai diterbitkannya peraturan yang baru.

Terkait dengan pendanaan SKSP Migas, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 95

tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Migas tersebut, Menteri Keuangan sesuai dengan surat Nomor S-834/MK.02/2012 tanggal 23 November 2012 hal Pendanaan Anggaran Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi telah menyetujui penggunaan sisa anggaran belanja BPMIGAS tahun 2012 untuk mendanai anggaran operasional SKSP Migas untuk periode pasca pembubaran BPMIGAS sampai dengan akhir TA 2012.

Untuk lebih lanjut mengatur penyelenggaraan pengelolaan kegiatan usaha hulu migas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2013 tanggal 10 Januari 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi, antara lain diputuskan bahwa biaya operasional yang diperlukan dalam kegiatan usaha hulu migas untuk tahun 2012 menggunakan sisa anggaran eks BPMIGAS tahun 2012.

Berdasarkan hal-hal tersebut, selama periode antara 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, SKSP Migas sebagai unit yang melaksanakan fungsi BPMIGAS setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi, melakukan pengelolaan dana dan memperoleh dana operasional menggunakan mekanisme yang sama dengan BPMIGAS sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi.

Terkait dengan pelaporan BPMIGAS pada LKPP Tahun 2012, telah diambil kebijakan sebagai berikut.

- a. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas BPMIGAS per 13 November 2012 dilaporkan pada BA 999.03 dan LKPP Tahun 2012 sebagai Investasi Permanen sebesar *net equity*; dan
- b. Untuk aset, kewajiban, dan ekuitas SKSP Migas yang diperoleh mulai 14 November 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dilaporkan pada LK Badan Lainnya dan LKPP Tahun 2012 sebagai Aset Lainnya sebesar *net equity*;

Ikhtisar Laporan Keuangan BP Migas dapat dilihat pada **Daftar 38**.

19. Penjelasan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. OJK mempunyai fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan.

Tujuan dibentuknya OJK adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan:

- a) terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel;
- b) mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil; dan
- c) mampu melindungi kepentingan Konsumen dan masyarakat.

Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan.

Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, sejak tanggal 31 Desember 2012, beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK. Demikian juga fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, Sejak tanggal 31 Desember 2013, beralih dari Bank Indonesia ke OJK.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pembiayaan yang bersumber dari APBN tetap diperlukan untuk memenuhi kebutuhan OJK pada saat pungutan dari pihak industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional secara mandiri antara lain pada masa awal pembentukan OJK. Pada TA 2012, persiapan pendirian OJK dialokasikan pada APBN sebesar Rp212.031.418.000.

20. Rencana Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP Tahun 2012

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012, sesuai dengan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Pemerintah telah menyusun rencana tindak lanjut terhadap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2012 dan menyampaikannya kepada BPK. Rencana tindak lanjut dimaksud dapat dilihat pada **Daftar 39**.

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN**1. Pergantian Menteri Keuangan**

Sesuai dengan ketentuan, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) *unaudited* kepada BPK RI 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Anggaran berakhir. Untuk LKPP Tahun 2012, Menteri Keuangan Agus Martowardojo atas nama Pemerintah telah menyampaikannya kepada BPK pada tanggal 26 Maret 2013.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/M Tahun 2013, Presiden memberhentikan Agus Martowardojo sebagai Menteri Keuangan karena akan ditetapkan menjadi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 2013, Presiden RI menunjuk Menteri Koordinator Bidang Perekonomian M. Hatta Rajasa sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Keuangan pada tanggal 19 April 2013.

Dalam rangka penyelesaian LKPP Tahun 2012, Plt. Menteri Perekonomian telah menyampaikan LKPP Tahun 2012 (*audited*) kepada BPK pada tanggal 20 Mei 2013. LKPP *audited* tersebut disampaikan kepada BPK sesudah disesuaikan dengan koreksi-koreksi temuan audit BPK.

2. Pencairan Dana Cadangan Subsidi/PSO dan Dana Cadangan DBH

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2013, dari total dana cadangan subsidi/PSO dan dana cadangan DBH sebesar Rp16.763.046.139.314 yang telah disalurkan kepada pihak ketiga sebesar Rp15.442.632.882.226 dan disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp1.320.413.257.088 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

No.	Jenis Cadangan	Jumlah Yang Telah Dicairkan Kepada Pihak Ke-3	Dana Cadangan yang Disetor ke Kas Negara	Sisa Dana Cadangan	Jumlah Cadangan
1	Subsidi POS	61.662.500.000	0		61.662.500.000
2	Subsidi PT PELNI	197.631.980.000	0		197.631.980.000
3	Subsidi PERUM BULOG	187.928.634.424	0		187.928.634.424
4	Subsidi PT KERETA API	136.267.383.443	56.264.863.557		192.532.247.000
5	Subsidi Energi Premium	2.566.317.591	685.876.449		3.252.194.040
6	Subsidi Energi LPG	1.082.924.124.704	475.862.022.995		1.558.786.147.699
7	Subsidi Pupuk	1.099.268.374.258	0		1.099.268.374.258
8	Subsidi Benih	14.040.573.919	18.739.232.941		32.779.806.860
	Sub Total	2.782.289.888.339	551.551.995.942		3.333.841.884.281
9	DBH Perikanan	22.887.486.080	1.264.566.720		24.152.052.800
10	DBH Pertambangan Umum	1.994.016.270.562	352.543.541.343		2.346.559.811.905
11	DBH Kehutanan	259.312.729.180	78.400.218.823		337.712.948.003
12	DBH SDA Pertambangan Gas Bumi	4.448.499.593.791	336.652.934.260		4.785.152.528.051
13	DBH SDA Pertambangan Minyak	5.935.626.914.274	0		5.935.626.914.274
	Sub Total	12.660.342.993.887	768.861.261.146	0	13.429.204.255.033
	Jumlah	15.442.632.882.226	1.320.413.257.088		16.763.046.139.314

Terkait dengan Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2012, dimana di dalamnya termasuk piutang yang berasal dari transfer material sebesar USD3,759,819, terdapat penyelesaian dari KKKS sebesar USD199,061.15 yang telah dilakukan melalui mekanisme *cost recovery*, namun demikian informasi dan dokumen terkait penyelesaian tersebut baru diperoleh setelah tanggal neraca, yaitu melalui surat SKK Migas kepada Direktorat Jenderal Anggaran Nomor 0730/SKK2000/2013/S4 tanggal 3 Mei 2013.

Saldo Rekening Migas Nomor 600.000411980 per 31 Desember 2012 yang berasal dari pendapatan yang ditunda atas PNBPD SDA Migas sebesar USD245,695,522.90 telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 pada tanggal 1 Februari 2013 bersamaan dengan pemindahbukuan saldo PNBPD SDA Migas bulan Januari 2013 yang dicatat sebagai Pendapatan Gas Bumi.

Saldo Rekening Migas Nomor 600.000411980 per 31 Desember 2012 yang berasal dari pendapatan yang ditunda atas PNBPD Migas lainnya sebesar USD7,341,564.87 telah dipindahbukukan ke Rekening KUN Nomor 600.502411980 pada tanggal 15 April 2013 dan dicatat sebagai Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

D.1.1. SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1
Januari 2012 sebesar
Rp108,15 triliun

Saldo Awal Kas BUN, KPPN, dan BLU per 1 Januari 2012 adalah sebesar Rp108.148.066.032.256 yang merupakan saldo akhir Kas BUN, KPPN, dan BLU per 31 Desember 2011 setelah disesuaikan dengan koreksi saldo awal kas pada TA 2012. Rincian saldo awal Kas BUN, KPPN, dan BLU adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU:		
Kas BUN di BI	82.453.918.298.407	79.606.375.358.793
Kas di KPPN	11.870.556.947.661	9.218.612.887.732
Kas Rekening Khusus	-	2.824.334.833.970
Kas pada BLU	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Kas Hibah Langsung K/L yang telah disahkan	429.120.562.354	48.185.913.485
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Sebelum Penyesuaian	107.842.612.387.387	98.985.089.736.159
Penyesuaian Saldo Awal		
Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU *)	185.511.299.379	26.554.437.138
Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah **)	119.938.389.009	
Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN ***)	3.956.481	(365.572.595)
Total Penyesuaian Saldo Awal	305.453.644.869	26.188.864.543
Saldo Awal Kas BUN, KPPN & BLU Setelah Koreksi	108.148.066.032.256	99.011.278.600.702

Keterangan:

*) Penyesuaian Saldo Awal Kas pada BLU sebesar Rp185.511.299.379 merupakan penyesuaian atas Kas pada BLU berdasarkan data dari KPPN setempat, yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Bengkulu	888.886.424
KPPN Jakarta 1	317.283.916.774
KPPN Serang	(200.000.000)
KPPN Bandung I	5.913.966.948
KPPN Surakarta	9.466.338.423
KPPN Yogyakarta	(104.088.910.415)
KPPN Denpasar	20.155.679.392
KPPN Surabaya I	(50.000.000.000)
KPPN Mataram	18.897.799.404
KPPN Gorontalo	(582.888.577)
KPPN Jakarta 3	(32.839.943.940)
KPPN Medan 2	378.987.770
KPPN Sukabumi	237.467.176
Total	185.511.299.379

**) Penyesuaian Saldo Awal Kas Hibah sebesar Rp119.938.389.009 merupakan penyesuaian atas Kas Hibah Langsung pada Satker K/L yang berada di wilayah kerja KPPN yaitu:

KPPN	Jumlah (Rp)
KPPN Jakarta I	120.000.000.000
KPPN Khusus Jakarta VI	(50.319.544)
KPPN Tasikmalaya	(11.291.447)
Total	119.938.389.009

***) Penyesuaian Saldo Awal Kas KPPN sebesar Rp3.956.481 merupakan penyesuaian atas Kas KPPN Waingapu, Balikpapan, Pekalongan, Jakarta Khusus VI dan BUN.

D.1.2. PERUBAHAN KAS

*Kenaikan Kas pada
TA 2012 sebesar
minus Rp36,57 triliun*

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2012 dan TA 2011 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Operasi	(8.874.066.987.571)	32.781.696.488.577
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(144.426.528.430.465)	(117.624.715.204.186)
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Pembiayaan	175.158.168.320.375	131.392.395.224.420
Kenaikan (Penurunan) Kas dari Aktivitas Non Anggaran	(1.501.462.900.166)	1.313.542.615.553
Koreksi Pembukuan:		
Penggunaan SAL *)	(56.170.000.000.000)	(40.319.043.049.000)
Penyesuaian Pembukuan **)	(755.835.540.649)	1.287.457.711.323
Kenaikan (Penurunan) Kas	(36.569.725.538.476)	8.831.333.786.686

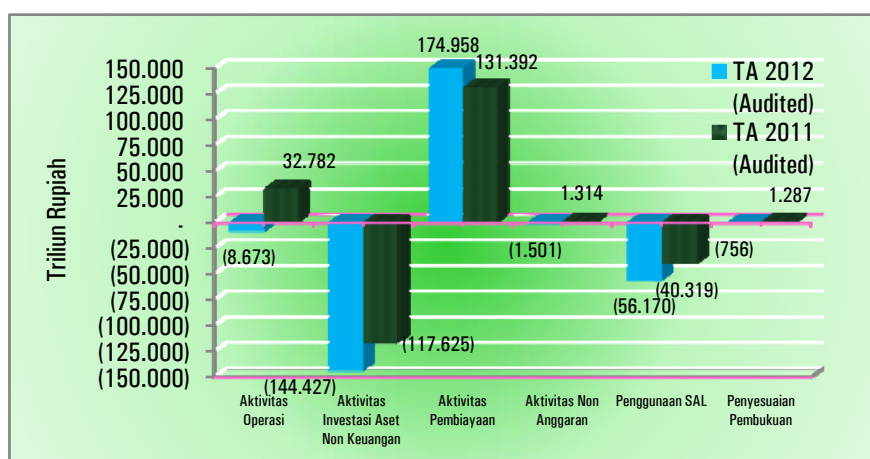
*) Penggunaan SAL pada saat yang bersamaan diakui juga sebagai Penerimaan Pembiayaan yang disajikan pada aktivitas pembiayaan.

**) Penyesuaian Pembukuan terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pengembalian Pendapatan TA yang lalu	(305.501.981.845)	(102.364.746.513)
Koreksi Uang Persediaan	(17.579.432.172)	(551.052.742)
Koreksi Rekening 'rr'	(552.249)	(216.316.651)
Selisih Kurs Kas BUN	(734.356.401.681)	1.404.184.991.745
Pendapatan Anggaran Lain-lain		(52.302)
Koreksi Kas Hibah Langsung	(1.336.463.035)	(372.860.700)
Koreksi Kas pada BLU		(375.080.500)
Koreksi Transfer		4.176.986
Koreksi Kas KPPN	(30.893.583.426)	212.666.534
Koreksi Pembulatan	(144)	77
Koreksi Kas di BUN	333.832.873.903	(13.064.014.611)
Jumlah Penyesuaian Pembukuan	(755.835.540.649)	1.287.457.711.323

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 42.



Grafik 42 Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

*Saldo Akhir Kas per
31 Desember 2012
sebesar Rp90,24
triliun*

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2012 sebesar Rp90.242.524.455.636 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Kas BUN, KPPN, BLU & Hibah Langsung*)	71.578.340.493.780	107.842.612.387.387
Rekening Pemerintah Lainnya	13.495.665.498.448	6.615.552.720.213
Kas di Bendahara Pengeluaran	213.458.829.221	292.795.937.959
Kas di Bendahara Penerimaan	196.150.458.978	252.900.321.124
Kas Lainnya dan Setara Kas**)	5.447.004.782.640	6.327.755.216.087
Kas pada BLU yang Belum Disahkan ***)	80.029.529.762	100.924.694.157
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	(768.125.137.193)	(170.553.016.059)
Jumlah Saldo Akhir Kas	90.242.524.455.636	121.261.988.260.868

*) Saldo Akhir Kas BUN, KPPN, BLU, dan Hibah Langsung terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Rekening Kas BUN di BI	37.382.696.367.039	82.453.918.298.407
Rekening Kas di KPPN	16.207.882.323.813	11.870.556.947.661
Kas di BLU yang Sudah Disahkan	17.331.515.069.465	13.089.016.578.965
Hibah Kas Langsung K/L yang Sudah Disahkan	656.246.733.463	429.120.562.354
Jumlah	71.578.340.493.780	107.842.612.387.387

Kas di BLU yang sudah disahkan TA 2012 sebesar Rp17.331.515.069.465 termasuk Kas yang didepositokan (investasi jangka pendek) sebesar Rp768.125.137.193 oleh Satker BLU.

**) Kas Lainnya dan Setara Kas sebesar Rp5.444.975.396.497 berasal dari saldo menurut neraca sebesar Rp6.103.251.516.103 dikurangi dengan Kas dari hibah langsung K/L yang sudah disahkan sebesar Rp656.246.733.463.

***) Kas pada BLU sebesar Rp80.029.529.762 merupakan Kas pada BLU yang belum disahkan oleh KPPN dan beberapa koreksi, dengan perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Total Kas pada BLU menurut K/L	16.643.419.462.034	13.019.388.257.063
Kas pada BLU yang telah Didepositokan (Investasi Jangka Pendek)	768.125.137.193	170.553.016.059
	17.411.544.599.227	13.189.941.273.122
Dikurangi:		
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	17.331.515.069.465	13.089.016.578.965
Total Kas pada BLU yang belum disahkan	80.029.529.762	100.924.694.157

Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN sebesar Rp17.331.515.069.465 berasal dari perhitungan sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Saldo awal BLU	13.089.016.578.965	7.287.580.742.179
Koreksi Saldo Awal Kas pada BLU	235.511.299.379	26.554.437.138
Pendapatan BLU	21.704.295.961.034	20.103.995.586.771
Belanja BLU	(17.647.308.769.913)	(14.328.739.106.623)
Koreksi Pembukuan Kas pada BLU	(50.000.000.000)	(375.080.500)
Kas pada BLU yang telah disahkan KPPN	17.331.515.069.465	13.089.016.578.965

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat Tahun 2012 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

*Arus Kas Bersih dari
Aktivitas Operasi
sebesar minus Rp8,87
triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional Pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2012. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar minus Rp8.874.066.987.571, dengan rincian sebagai berikut .

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Arus Kas Masuk	1.336.338.396.928.787	1.209.469.558.508.448
Dikurangi Arus Kas Keluar	1.345.212.463.916.358	1.176.687.862.019.861
Arus Kas Bersih	(8.874.066.987.571)	32.781.696.488.577

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi menunjukkan bahwa pendapatan operasional Pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai seluruh kegiatan operasional Pemerintah. Jika dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2011, terdapat penurunan arus kas bersih sebesar Rp41.655.763.476.147.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

*Penerimaan
Perpajakan
Rp980,52 triliun*

Penerimaan Perpajakan pada TA 2012 sebesar Rp980.518.133.319.319 terdiri dari Penerimaan Pajak Dalam Negeri sebesar Rp930.861.839.509.438 dan Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp49.656.293.809.881. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2012 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2012 dan 2011 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pajak Dalam Negeri		
Pajak Penghasilan (PPh)	465.069.641.549.059	431.121.712.728.316
Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM)	337.584.577.488.285	277.800.076.679.384
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	28.968.862.702.282	29.893.164.324.396
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	(730.151.679)
Cukai	95.027.881.221.457	77.010.010.613.795
Pajak Lainnya	4.210.876.548.355	3.928.192.148.211
Jumlah Penerimaan Pajak DN	930.861.839.509.438	819.752.426.342.423
Pajak Perdagangan Internasional		
Bea Masuk	28.418.359.044.419	25.265.863.309.375
Bea Keluar	21.237.934.765.462	28.855.602.747.583
Jumlah Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional	49.656.293.809.881	54.121.466.056.958
Penerimaan Perpajakan	980.518.133.319.319	873.873.892.399.381

Dengan demikian, Penerimaan Perpajakan dalam TA 2012 lebih besar Rp106.644.240.919.938 atau 12,20 persen dari Penerimaan Perpajakan dalam TA 2011.

D.2.1.1. Pajak Penghasilan

*Pajak Penghasilan
sebesar Rp465,07
triliun*

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2012 adalah sebesar Rp465.069.641.549.059 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2012 dan TA 2011 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	32.976.020.386.273	25.941.792.126.888
PPh Gas Alam	50.484.720.419.499	47.153.704.628.050
PPh Migas Lainnya	127.195.529	-
Jumlah PPh Migas	83.460.868.001.301	58.872.731.112.808
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	79.599.440.782.334	66.751.563.274.222
PPh Pasal 22	5.506.854.819.126	4.946.488.944.246
PPh Pasal 22 Impor	31.610.164.408.871	28.291.747.589.939
PPh Pasal 23	20.302.691.144.663	18.702.757.359.018
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	3.763.462.234.949	3.287.028.613.473
PPh Pasal 25/29 Badan	152.131.951.580.030	154.609.563.560.736
PPh Pasal 26	24.610.565.469.335	27.239.272.558.180
PPh Final dan Fiskal LN	60.387.050.055.016	50.818.584.952.948
PPh Non Migas Lainnya	31.332.640.165	40.572.806.616
Pendapatan PPh Ditanggung Pemerintah	3.665.260.413.269	3.338.636.314.000
Jumlah PPh Non Migas	381.608.773.547.758	358.026.215.973.378
Jumlah Pajak Penghasilan	465.069.641.549.059	431.121.712.728.316

Dengan demikian, penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2012 lebih besar Rp33.947.928.820.743 atau 7,87 persen dari penerimaan TA 2011.

D.2.1.2. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

*PPN dan PPnBM
sebesar Rp337,58
triliun*

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2012 adalah sebesar Rp337.584.577.488.285. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	202.365.564.710.548	165.218.964.383.262
PPN dan PPnBM Impor	135.032.893.134.371	112.374.211.359.301
PPN dan PPnBM lainnya	186.119.643.366	206.900.936.821
Jumlah PPN dan PPnBM	337.584.577.488.285	277.800.076.679.384

Dengan demikian, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2012 lebih besar Rp59.784.500.808.901 atau 21,52 persen dari TA 2011.

D.2.1.3. Pajak Bumi dan Bangunan

*Penerimaan PBB
sebesar Rp28,97
triliun*

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2012 adalah sebesar Rp28.968.862.702.282. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
PBB Pedesaan	1.144.421.183.966	1.177.346.608.822
PBB Perkotaan	6.104.099.730.681	6.603.174.032.018
PBB Perkebunan	1.107.246.997.455	985.954.945.312
PBB Kehutanan	254.533.056.441	251.302.697.483
PBB Pertambangan	565.247.025.160	397.619.412.898
PBB Migas	19.793.314.708.579	20.477.766.627.863
Jumlah PBB (Neto)	28.968.862.702.282	29.893.164.324.396

Dengan demikian, penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan pada TA 2012 lebih kecil Rp924.301.622.114 atau 3,09 persen dari TA 2011.

D.2.1.4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Tidak ada penerimaan BPHTB

Pada TA 2012, Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) tidak dicatat lagi karena telah diserahkan ke pemerintah daerah. Sedang pada TA 2011 masih ada realisasi Penerimaan BPHTB sebesar minus Rp730.151.679. Realisasi Penerimaan BPHTB pada TA 2011 ini merupakan pengembalian BPHTB.

D.2.1.5. Cukai

Penerimaan cukai sebesar Rp95,03 triliun

Penerimaan Cukai pada TA 2012 adalah sebesar Rp95.027.881.221.457, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Cukai Hasil Tembakau	90.553.638.824.974	73.251.428.868.906
Cukai Ethyl Alkohol	155.581.715.856	152.953.431.380
Cukai Minuman mengandung Ethyl Alkohol	4.292.843.125.012	3.583.211.248.830
Denda Administrasi Cukai	17.154.851.382	11.381.400.196
Cukai Lainnya	8.662.704.233	11.035.664.483
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	95.027.881.221.457	77.010.010.613.795

Dengan demikian, Penerimaan Cukai pada TA 2012 lebih besar Rp18.017.870.607.662 atau 23,40 persen dari Penerimaan Cukai TA 2011.

D.2.1.6. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya sebesar Rp4,21 triliun

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2012 adalah sebesar Rp4.210.876.548.355 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penjualan Benda dan Bea Materai	3.876.648.878.412	3.609.605.363.070
Pendapatan PPn Batubara	769.733	61.093.244
Pajak Tidak Langsung	3.100.248.029	1.826.035.698
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	184.769.886.516	84.726.712.822
- Bunga Penagihan PPN	143.785.207.687	224.199.680.642
- Bunga Penagihan PPnBM	1.698.098.995	204.067.285
- Bunga Penagihan PTLL	873.458.983	7.569.195.450
Jumlah Pajak Lainnya	4.210.876.548.355	3.928.192.148.211

Dengan demikian, Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2012 lebih besar Rp282.684.400.144 atau 7,20 persen dari TA 2011.

D.2.1.7. Pajak Perdagangan Internasional

Pajak Perdagangan Internasional sebesar Rp49,66 triliun

Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional pada TA 2012 adalah sebesar Rp49.656.293.809.881, yang terdiri dari Penerimaan Bea Masuk sebesar Rp28.418.359.044.419 dan Penerimaan Bea Keluar sebesar Rp21.237.934.765.462 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Bea Masuk		
Bea Masuk	26.708.523.995.738	23.783.424.990.710
Bea Masuk DTP atas Hibah (SPM Nihil)	25.634.038	3.173.020.085
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	465.920.844.465	391.846.604.781
Bea Masuk dalam rangka KITE	1.076.608.593.685	946.668.042.226
Denda atas sanksi administrasi	(16.070.653)	15.000.000
Bea Masuk – Ditanggung Pemerintah	99.813.751.137	73.310.676.000
Pabean Lainnya	67.482.296.009	67.424.975.573
Jumlah Bea Masuk	28.418.359.044.419	25.265.863.309.375
Bea Keluar	21.237.934.765.462	28.855.602.747.583
Jumlah Pajak Perdagangan Internasional	49.656.293.809.881	54.121.466.056.958

Dengan demikian, penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2012 lebih kecil Rp4.465.172.247.077 atau 8,25 persen dari TA 2011.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

*Penerimaan PNBP
sebesar Rp351,69
triliun*

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2012 adalah sebesar Rp351.678.561.790.489, yang berarti lebih besar Rp20.341.113.218.306 atau 6,14 persen dari TA 2011 sebesar Rp331.337.448.572.183.

PNBP tersebut berasal dari penerimaan dari Sumber Daya Alam, Bagian Pemerintah atas Laba BUMN, PNBP Lainnya, dan Pendapatan BLU.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut.

D.2.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

*Penerimaan SDA
sebesar Rp225,84
triliun*

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2012 adalah sebesar Rp225.843.973.463.751. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pendapatan Minyak Bumi	144.717.087.022.468	141.303.493.452.283
Pendapatan Gas Alam	61.106.427.615.761	52.187.085.923.633
Pendapatan Pertambangan Umum	15.877.387.816.604	16.369.789.735.678
Pendapatan Kehutanan	3.188.338.362.520	3.216.476.006.406
Pendapatan Perikanan	215.766.602.000	183.802.161.080
Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	738.966.044.398	562.702.273.747
Jumlah Penerimaan SDA	225.843.973.463.751	213.823.349.552.827

Dengan demikian, Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2012 lebih besar Rp12.020.523.910.925 atau 5,62 persen dari TA 2011.

D.2.2.2. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

*Penerimaan Bagian
Pemerintah atas Laba
BUMN sebesar
Rp30,80 triliun*

Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2012 adalah sebesar Rp30.797.972.717.670, yang berarti lebih besar Rp2.613.999.591.070 atau 9,27 persen dari TA 2011 sebesar Rp28.183.973.126.600. Penerimaan tersebut merupakan penerimaan yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, yakni kekayaan negara yang ditempatkan sebagai penyertaan modal pada Perusahaan Negara.

D.2.2.3. Penerimaan PNBP Lainnya

*Penerimaan PNBP
Lainnya sebesar
Rp73,53 triliun*

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2012 adalah sebesar Rp73.332.319.648.034 .
Penerimaan ini terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	9.792.221.299.572	9.525.540.319.958
Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	13.063.747.762.645	11.803.490.967.212
Pendapatan Sewa	271.221.959.766	186.810.775.728
Pendapatan Jasa I	16.145.943.608.009	16.222.029.858.308
Pendapatan Jasa II	1.356.307.953.239	1.371.622.057.319
Pendapatan Jasa Luar Negeri	505.878.388.074	454.063.043.127
Pendapatan Jasa Perbankan	294.417.442	698.213.800
Pendapatan atas Pengelolaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang Negara	4.417.901.930.174	4.935.359.321.429
Pendapatan Jasa Kepolisian	3.378.471.363.288	3.295.511.200.017
Pendapatan Jasa Pelayanan Tol	193.326.847.706	-
Pendapatan Jasa Kepolisian II	122.939.850.129	95.921.998.922
Pendapatan Jasa Lainnya	86.888.365.688	259.310.892.000
Pendapatan Bunga	3.370.659.392.659	2.169.804.446.254
Pendapatan Gain On Bond Redemption	-	760.000.000
Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	8.297.301.019.952	2.722.674.065.500
Pendapatan Kejaksaaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	251.243.211.606	240.761.503.805
Pendapatan Pendidikan	2.375.603.736.186	2.965.915.235.801
Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	158.144.829.032	92.848.578.390
Pendapatan Iuran dan Denda	1.459.529.823.727	1.319.106.624.583
Pendapatan dari Penerimaan Kembali TAYL	4.661.015.950.737	7.986.615.365.380
Pendapatan Pelunasan Piutang	54.165.965.036	26.715.895.818
Pendapatan dari Penutupan Rekening	56.455.641.949	628.093.309.285
Pendapatan Selisih Kurs	2.091.891.225.681	2.713.540.544.637
Pendapatan Lain-lain	1.221.165.105.737	208.936.088.712
Jumlah PNBP Lainnya	73.332.319.648.034	69.226.130.305.985

Dengan demikian, Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2012 lebih besar Rp4.106.189.342.051 atau 5,93 persen dari TA 2011.

D.2.2.4. Penerimaan Badan Layanan Umum

*Penerimaan BLU
sebesar Rp21,70
triliun*

Penerimaan Badan Layanan Umum (BLU) pada TA 2012 adalah sebesar Rp21.704.295.961.034, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pendapatan Jasa Layanan Umum	19.471.851.778.837	17.821.832.190.696
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	83.863.755.868	167.462.819.227
Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.081.392.058.923	647.563.491.201
Pendapatan BLU Lainnya	1.067.188.367.406	1.467.137.085.647
Jumlah Penerimaan BLU	21.704.295.961.034	20.103.995.586.771

Dengan demikian, penerimaan BLU pada TA 2012 lebih besar Rp1.600.300.374.263 atau 7,96 persen dari TA 2011.

D.2.3. Penerimaan Hibah

*Penerimaan Hibah
sebesar Rp4,14 triliun*

Penerimaan Hibah pada TA 2012 adalah sebesar Rp4.141.701.818.979. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan dalam negeri perorangan, lembaga/badan usaha dan hibah dalam negeri lainnya. Selain itu, penerimaan hibah juga berasal dari luar negeri perorangan, bilateral, multilateral dan hibah luar negeri lainnya.

Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	-	34.102.500
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Perorangan	2.639.167.850	-
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang - Lembaga/Badan Usaha	137.005.740.382	166.310.915.813
Hibah Dalam negeri Langsung Bentuk Uang - Pemerintah daerah	394.172.180.379	287.158.580.076
Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang Lainnya	-	10.000.000.000
Jumlah Hibah Dalam Negeri	533.817.088.611	463.503.598.389
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	143.794.500	-
Hibah Luar Negeri – Bilateral	816.147.401.739	323.935.838.288
Hibah Luar Negeri – Multilateral	1.943.618.224.054	2.389.885.678.488
Hibah Luar Negeri Lainnya	16.459.947.530	7.198.973.228
Hibah Luar Negeri Langsung - Bilateral	88.737.200.479	112.795.828.856
Hibah Luar Negeri Langsung - Multilateral	708.306.049.484	918.255.266.945
Hibah Luar Negeri Langsung Lainnya	34.472.112.582	42.642.352.680
Jumlah Hibah Luar Negeri	3.607.884.730.368	3.794.713.938.485
Jumlah Hibah	4.141.701.818.979	4.258.217.536.874

Dengan demikian, penerimaan Hibah pada TA 2012 lebih kecil Rp116.515.717.895 atau 2,74 persen dari TA 2011.

D.2.4. Belanja Pegawai

*Belanja Pegawai
sebesar Rp197,86
triliun*

Belanja Pegawai pada TA 2012 adalah sebesar Rp197.859.657.528.774, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	55.875.093.305.816	49.438.707.054.822
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	44.484.734.109.218	40.253.949.624.738
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	724.259.524.906	819.040.106.833
Belanja Gaji Dokter PTT	822.268.259.230	771.007.436.015
Belanja Gaji dan Tunjangan Pegawai Non PNS	264.003.728.588	248.984.377.220
Belanja Honorarium	1.388.355.153.950	1.368.820.236.166
Belanja Lembur	652.171.223.179	501.557.316.855
Belanja Vakasi	231.246.787.842	217.977.946.087
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	23.491.121.774.105	20.363.825.257.336
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	67.280.131.264.944	59.470.665.084.274
Belanja Asuransi Kesehatan	2.482.037.544.996	2.141.251.233.920
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	164.234.852.000	150.576.864.996
Belanja Cadangan Perubahan <i>Sharing</i>	-	(374.730.220)
Belanja Kontribusi APBN Pembayaran Pensiun Eks PNS Dephub pada PT KAI	-	(40.668.838)
Total Belanja Pegawai	197.859.657.528.774	175.745.947.140.204

Dengan demikian, Belanja Pegawai pada TA 2012 lebih besar Rp22.113.710.388.570 atau 12,58 persen dari TA 2011.

D.2.5. Belanja Barang

*Belanja Barang
sebesar Rp140,02
triliun*

Belanja Barang pada TA 2012 adalah sebesar Rp140.020.870.803.375 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Belanja Barang	68.038.279.672.480	66.807.696.651.991
Belanja Jasa	17.708.110.520.974	15.888.779.363.493
Belanja Pemeliharaan	10.964.286.080.027	9.284.459.416.087
Belanja Perjalanan	19.682.831.758.052	19.635.213.116.970
Belanja Barang BLU	15.564.506.260.345	12.543.014.843.575
Belanja Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	8.062.856.511.497	-
Jumlah Belanja Barang	140.020.870.803.375	124.159.163.392.116

Dengan demikian, Belanja Barang TA 2012 ini lebih besar Rp15.861.707.411.259 atau 12,78 persen dari TA 2011.

D.2.6. Belanja Pembayaran Bunga Utang

*Belanja Pembayaran
Bunga Utang sebesar
Rp100,52 triliun*

Belanja Pembayaran Bunga Utang pada TA 2012 sebesar Rp100.515.994.274.160 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman, dan pembayaran denda berupa imbalan bunga. Belanja Pembayaran Bunga Utang mengalami kenaikan Rp7.255.732.809.814 atau 7,78 persen dari Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2011 sebesar Rp93.260.261.464.346.

Rincian Belanja Pembayaran Bunga Utang tersebut terdiri dari Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri (DN) dan Luar Negeri (LN) masing-masing sebesar Rp86.151.574.166.955 dan Rp14.364.420.107.205 dengan rincian sebagai berikut.

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp86.151.574.166.955 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas Surat Berharga Negara baik mata uang rupiah maupun valas, serta pembayaran denda berupa imbalan bunga, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri	60.768.101.697.587	57.210.627.839.839
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Dalam Negeri	6.297.744.208.100	4.768.589.586.200
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	1.456.999.522.900	3.236.157.597.300
Belanja Pembayaran Loss On Bond Redemption	158.467.625.000	310.612.680.000
Belanja Pembayaran Discount SBSN Dalam Negeri	913.801.227.200	51.466.619.000
Belanja Pembayaran Bunga Obligasi Negara Valas	14.560.113.598.067	11.900.654.889.691
Belanja Pembayaran Imbalan SBSN Valas	930.763.140.850	514.676.089.450
Belanja Pembayaran Discount Obligasi Negara Valas	449.948.400.000	373.905.900.000
Belanja Pembayaran Denda	615.634.747.251	1.247.399.871.387
Belanja Terkait Pendapatan Hibah	-	1.235.358.882
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	86.151.574.166.955	79.615.326.431.749

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri

Belanja Pembayaran Bunga atas Utang Luar Negeri sebesar Rp14.364.420.107.205 merupakan pembayaran bunga dan kewajiban lain atas pinjaman program dan pinjaman proyek, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Belanja Bunga Pinjaman Program	3.843.842.340.796	3.540.016.135.917
Belanja Bunga Pinjaman Proyek	10.520.577.766.409	10.104.918.896.680
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	14.364.420.107.205	13.644.935.032.597

D.2.7. Subsidi

*Belanja Subsidi
sebesar Rp346,42
triliun*

Belanja Subsidi pada TA 2012 sebesar Rp346.420.404.182.332 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Subsidi Perusahaan Negara		
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	211.895.707.483.639	165.161.338.980.975
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM:		
Subsidi Non BBM - Harga/biaya	127.718.796.755.656	123.428.269.621.815
Subsidi Non BBM – Pajak	3.763.173.751.137	3.411.946.990.000
Subtotal	131.481.970.506.793	126.840.216.611.815
Subsidi dalam Rangka PSO	1.932.350.172.340	1.833.928.069.279
Jumlah Subsidi Perusahaan Negara	345.310.028.162.772	293.835.483.662.069
Subsidi Perusahaan Swasta		
Belanja Subsidi Lembaga Keuangan	1.110.376.019.560	1.522.939.254.255
Jumlah Subsidi Perusahaan Swasta	1.110.376.019.560	1.522.939.254.255
Jumlah Belanja Subsidi	346.420.404.182.332	295.358.422.916.324

Dengan demikian, Subsidi TA 2012 ini lebih besar Rp51.061.981.266.008 atau 17,29 persen dari Subsidi TA 2011.

D.2.8. Belanja Hibah

*Belanja Hibah sebesar
Rp75,08 miliar*

Belanja Hibah merupakan transfer uang atau barang oleh Pemerintah Pusat kepada negara lain, organisasi internasional, dan pemerintah daerah yang sifatnya tidak wajib. Pada TA 2012 terdapat belanja hibah negara kepada pemerintah daerah sebesar Rp75.079.945.754. Belanja hibah TA 2012 lebih kecil Rp225.028.852.601 atau turun 74,98 persen dari TA 2011 sebesar Rp300.108.798.355.

D.2. 9. Bantuan Sosial

*Bantuan Sosial
sebesar Rp75,60
triliun*

Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp75.602.528.863.964 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Bantuan Kompensasi Kenaikan Harga BBM	424.170.718.781	6.244.225.314.365
Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial dlm bentuk barang/jasa	51.956.964.988	-
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/ Guru	17.510.231.505.695	32.069.345.814.817
Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga	7.116.168.297.550	3.830.500.000
Bantuan Beasiswa	-	4.684.535.971.423
Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	-	146.686.993.700
Bantuan Sosial Untuk Pemberdayaan Sosial	35.772.440.166.735	27.927.665.638.863
Bantuan Sosial Untuk Perlindungan Sosial	1.992.433.852.977	-
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Kemiskinan	11.684.596.488.228	-
Bantuan Sosial Untuk Penanggulangan Bencana	1.050.530.869.010	-
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	75.602.528.863.964	71.076.290.233.168

Dengan demikian, Belanja Bantuan Sosial TA 2012 ini lebih besar Rp4.526.238.630.796 atau 6,37 persen dari TA 2011.

D.2.10. Belanja Lain-lain

*Belanja Lain-lain
sebesar Rp4,07 triliun*

Belanja Lain-lain pada TA 2012 adalah sebesar Rp4.072.855.812.156, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Kerjasama Teknis Internasional	-	10.000.000.000
Cadangan Kenaikan Harga Tanah (Land Capping)	310.062.000.000	-
Cadangan Beras Pemerintah	2.000.000.000.000	-
Belanja Cadangan Benih Nasional	342.764.387.131	-
Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	-	9.778.482.000
Belanja DBH Biaya/Upah Pungut PBB untuk DJP	-	(10.650.875)
Belanja Non Modal-Otorita Batam	-	557.785.893
Belanja karena rugi selisih kurs Dalam Pengelolaan Rekening BUN	282.390.817.867	360.991.025.539
Jasa Perbendaharaan	199.994.423.436	199.847.380.770
Belanja Pembayaran Selisih Harga Beras Bulog	18.255.217.000	-
Belanja untuk LPP TVRI	-	685.547.340.402
Belanja untuk LPP RRI	-	677.107.093.980
Dana Cadangan Resiko Kenaikan Harga Tanah	-	406.145.000.000
Belanja lain-lain	-	3.114.270.595.883
Belanja lain-lain BUN	93.457.470.427	-
Belanja Lain-lain Tanggap Darurat	(244.999.000)	-
Belanja Lain-lain Lainnya	826.176.495.295	-
Jumlah Belanja Lain-lain	4.072.855.812.156	5.464.234.053.592

Dengan demikian, Belanja Lain-lain TA 2012 mengalami penurunan sebesar Rp1.391.378.241.436 atau 25,46 persen dari TA 2011.

D.2.11. Dana Bagi Hasil Pajak

*DBH Pajak sebesar
Rp47,21 triliun*

Bagi Hasil Pajak merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan pajak yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Pajak pada TA 2012 adalah sebesar Rp47.214.136.030.788, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	19.378.280.456.694	13.237.326.489.261
Bagi Hasil Sumber Daya Alam	27.597.042.553.038	-
Bagi Hasil BPHTB	238.813.021.056	6.747.876.892
Bagi Hasil PBB	-	28.281.486.730.011
Jumlah Bagi Hasil Pajak	47.214.136.030.788	41.525.561.096.164

Dengan demikian, Bagi Hasil Pajak TA 2012 lebih besar Rp5.688.574.934.624 atau 13,70 persen dari TA 2011.

D.2.12. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

*DBH SDA sebesar
Rp62,60 triliun*

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada pemerintah daerah atas bagi hasil penerimaan sumber daya alam yang merupakan bagian pendapatan pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil SDA dalam TA 2012 adalah sebesar Rp62.600.285.617.315, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Bagi Hasil Minyak Bumi	26.165.822.138.467	20.634.080.735.284
Bagi Hasil Gas Alam	21.231.675.084.265	16.672.249.758.993

Bagi Hasil Pertambangan Umum	12.860.854.426.197	14.498.126.522.475
Bagi Hasil Pertambangan Panas Bumi	626.278.978.409	519.987.115.194
Bagi Hasil Kehutanan	1.535.890.432.615	1.512.465.063.891
Bagi Hasil Perikanan	179.764.557.362	138.077.102.117
Jumlah Bagi Hasil SDA	62.600.285.617.315	53.974.986.297.954

Dengan demikian, DBH SDA TA 2012 lebih besar Rp8.625.299.319.361 atau 15,98 persen dari TA 2011.

D.2.13. Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau

*DBH Cukai Tembakau
sebesar Rp1,72 triliun*

Bagi Hasil Cukai Tembakau merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atas bagi hasil penerimaan cukai yang merupakan bagian pendapatan Pemerintah daerah. Transfer Bagi Hasil Cukai Tembakau pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.722.781.272.658, sedangkan pada TA 2011 sebesar Rp1.408.448.764.184. Dengan demikian DBH Cukai Tembakau TA 2012 lebih besar Rp314.332.508.474 atau 22,32 persen dibandingkan DBH Cukai Tembakau TA 2011.

D.2.14. Dana Alokasi Umum

*DAU sebesar
Rp273,81 triliun*

Dana Alokasi Umum merupakan transfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer Dana Alokasi Umum pada TA 2012 sebesar Rp273.814.438.203.000, jumlah tersebut lebih besar Rp48.280.726.155.000 atau 21,41 persen dari TA 2011 sebesar Rp225.533.712.048.000.

D.2.15. Dana Alokasi Khusus

*DAK sebesar Rp25,94
triliun*

Dana Alokasi Khusus adalah alokasi dari APBN kepada provinsi/kabupaten/kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Transfer Dana Alokasi Khusus pada TA 2012 sebesar Rp25.941.483.856.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.139.254.103.020 atau 4,59 persen dari TA 2011 sebesar Rp24.802.229.752.980.

D.2.16. Dana Otonomi Khusus

*Dana Otonomi Khusus
sebesar Rp11,95
triliun*

Dana Otonomi Khusus adalah dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Transfer Dana Otonomi Khusus pada TA 2012 sebesar Rp11.952.577.528.000, jumlah tersebut lebih besar Rp1.531.264.535.000 atau 14,69 persen dari TA 2011 sebesar Rp10.421.312.993.000.

D.2.17. Dana Penyesuaian

*Dana Penyesuaian
sebesar Rp57,40 triliun*

Dana Penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam melaksanakan kebijakan Pemerintah Pusat. Transfer Dana Penyesuaian pada TA 2012 adalah sebesar Rp57.399.369.998.082, lebih besar Rp3.742.186.928.608 atau 6,97 persen dari TA 2011 sebesar Rp53.657.183.069.474.

*Arus Kas Keluar
Bersih dari Aktivitas
Investasi Aset Non
keuangan sebesar
Rp144,43 triliun*

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan menjelaskan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan Pemerintah kepada masyarakat. Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2012 menunjukkan arus kas keluar bersih sebesar Rp144.426.528.430.465, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Arus Masuk	126.184.876.373	134.372.526.547
Dikurangi Arus Keluar	144.552.713.306.838	117.759.087.730.733
Arus Kas Bersih	(144.426.528.430.465)	(117.624.715.204.186)

Dengan demikian, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan pada TA 2012 lebih besar Rp26.801.813.226.279 atau 22,79 persen dari TA 2011.

D.2.18. Penjualan Aset

*Penjualan Aset
sebesar Rp126,18
miliar*

Pendapatan Penjualan Aset merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan Aset Tetap baik berupa rumah, gedung, bangunan dan tanah, kendaraan bermotor, dan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2012 adalah sebesar Rp126.184.876.373, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	12.444.700.247	2.725.200.373
Penjualan Peralatan dan Mesin	7.228.982.579	1.807.702.673
Penjualan Sewa Beli	36.661.280.535	40.584.546.231
Penjualan Aset Bekas Milik Asing/Cina	2.546.469.402	898.345.500
Tukar menukar Peralatan dan Mesin	519.000	
Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan	558.000	-
Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.000.000	-
Pemindahtanganan BMN Lainnya	67.301.366.610	88.356.731.770
Jumlah Penjualan Aset	126.184.876.373	134.372.526.547

Dengan demikian, Pendapatan ini pada TA 2012 lebih kecil Rp8.122.770.174 atau 6,04 persen dari TA 2011.

D.2.19. Belanja Modal

*Belanja Modal
sebesar Rp144,55
triliun*

Belanja Modal pada TA 2012 adalah sebesar Rp144.552.713.306.838 dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Belanja Modal Tanah	3.423.209.272.506	3.174.518.573.375
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	43.141.239.156.922	38.589.152.098.168
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	19.552.846.208.260	21.296.677.877.838
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	72.263.462.515.428	49.570.778.106.938
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.089.153.644.154	3.342.236.811.366
Belanja Modal BLU	2.082.802.509.568	1.785.724.263.048
Jumlah Belanja Modal	144.552.713.306.838	117.759.087.730.733

Belanja Modal ini pada TA 2012 lebih besar Rp26.793.625.576.105 atau 22,75 persen dari TA 2011.

Dengan Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp8.874.066.987.571 dan Arus

Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp144.426.528.430.465 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp153.300.595.418.036. Defisit anggaran tersebut ditutup dari sumber-sumber pembiayaan sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp174,96 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas Pemerintah dan klaim Pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2012 adalah sebesar Rp175.158.168.320.375, yang berasal dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Arus Masuk	379.194.954.291.694	292.028.544.623.338
Dikurangi Arus Keluar	204.036.785.971.319	160.636.149.398.918
Arus Kas Bersih	175.158.168.320.375	131.392.395.224.420

Dengan demikian, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2012 lebih besar Rp43.765.773.095.955 atau 33,31 persen dari TA 2011.

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan DN sebesar Rp341,26 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2012 adalah sebesar Rp341.258.374.433.800, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pembiayaan Perbankan	56.170.000.000.000	40.319.043.049.000
Pembiayaan Non Perbankan	1.051.381.840.798	1.044.426.787.500
Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)	282.897.267.989.790	207.136.113.196.150
Penjualan Aset Program Restrukturisasi	1.139.724.603.212	1.172.937.371.311
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN	341.258.374.433.800	249.672.520.403.961

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2012 lebih besar Rp91.585.854.029.839 atau 36,68 persen dibandingkan dengan TA 2011.

a. Pembiayaan Perbankan

Penerimaan pembiayaan perbankan pada TA 2012 sebesar Rp56.170.000.000.000 merupakan penerimaan pembiayaan karena penggunaan SAL, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan dari Rekening SAL	56.170.000.000.000	40.319.043.049.000
Total Penerimaan dari Pembiayaan Perbankan	56.170.000.000.000	40.319.043.049.000

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2012 lebih besar Rp15.850.956.951.000 atau 39,31 persen dari TA 2011.

b. Pembiayaan Non Perbankan

Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan pada TA 2012 adalah sebesar Rp1.051.381.840.798, berarti lebih besar Rp6.955.053.298 atau 0,67 persen dari penerimaan pada TA 2011 sebesar Rp1.044.426.787.500. Penerimaan ini berasal dari privatisasi dan pinjaman dalam negeri. Rincian Penerimaan Pembiayaan Non Perbankan adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Hasil Privatisasi	138.269.961.371	425.044.145.867
Pinjaman Dalam Negeri	913.111.879.427	619.382.641.633
Total Penerimaan Non Perbankan	1.051.381.840.798	1.044.426.787.500

c. Penerimaan Surat Berharga Negara (SBN)

Penerimaan pembiayaan SBN merupakan penerimaan pembiayaan dari penjualan Surat Perbendaharaan Negara (SPN), Obligasi Negara, dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), baik dalam mata uang rupiah maupun valas.

Penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2012 sebesar Rp282.897.267.989.790, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan/Penjualan SPN	30.520.000.000.000	40.000.000.000.000
Penerimaan/Penjualan Obligasi Negara DN	146.780.745.000.000	110.514.000.000.000
Utang Bunga Obligasi Negara DN	2.251.726.240.000	1.817.637.491.000
Penerbitan/Penjualan SBSN	46.069.805.000.000	22.951.410.000.000
Imbalan dibayar di muka SBSN	171.346.293.000	56.028.850.000
Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN	1.380.000.000.000	1.320.000.000.000
Penerbitan/Penjualan SBSN - Valas	55.723.645.456.790	30.477.036.855.150
Total Penerimaan SBN	282.897.267.989.790	207.136.113.196.150

Dengan demikian, penerimaan pembiayaan SBN pada TA 2012 lebih besar Rp75.761.154.793.640 atau 36,58 persen dibanding TA 2011.

d. Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2012 sebesar Rp1.139.724.603.212, lebih kecil Rp33.212.768.099 atau 2,83 persen dari TA 2011 sebesar Rp1.172.937.371.311.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012(audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	-	330.323.053
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian aset eks BPPN	876.202.056.673	801.228.042.527
Penerimaan Hasil Penjualan/Penyelesaian Aset Bekas Milik Eks Bank Dalam Likuidasi (BDL)	263.522.546.539	371.379.005.731
Total Penerimaan Aset Program Restrukturisasi	1.139.724.603.212	1.172.937.371.311

D.2.21. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan
Pembiayaan LN
sebesar Rp31,40
triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2012 sebesar Rp31.403.481.754.448 merupakan seluruh penerimaan Pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pinjaman Program	15.003.476.180.432	15.266.144.513.219
Pinjaman Proyek	16.400.005.574.016	18.481.034.210.702
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	31.403.481.754.448	33.747.178.723.921

Dengan demikian, Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2012 lebih kecil Rp2.343.696.969.473 atau 6,94 persen dari TA 2011.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2012 adalah sebesar Rp15.003.476.180.432, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Program Bilateral	-	873.396.325.700
Program Multilateral	15.003.476.180.432	14.392.748.187.519
Jumlah Pinjaman Program	15.003.476.180.432	15.266.144.513.219

Dengan demikian, Pinjaman Program TA 2012 lebih kecil Rp262.668.332.787 atau 1,72 persen dari TA 2011.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2012 adalah sebesar Rp16.400.005.574.016, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	8.020.242.160.124	9.046.106.089.582
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.870.256.474.519	5.246.144.127.735
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	2.451.886.647.371	4.188.783.993.385
Pinjaman Proyek Komersial	57.562.877.025	-
Pinjaman Proyek Lainnya	57.414.977	-
Jumlah Pinjaman Proyek	16.400.005.574.016	18.481.034.210.702

Dengan demikian, Pinjaman Proyek TA 2012 lebih kecil Rp2.081.028.636.686 atau 11,26 persen dibandingkan TA 2011.

D.2.22. Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman

Penerimaan
Pengembalian
Penerusan Pinjaman
sebesar Rp6,53 triliun

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman pada TA 2012 sebesar Rp6.332.435.748.457 merupakan penerimaan Pemerintah atas cicilan pengembalian Pinjaman *Subsidiary Loan Agreement* (SLA) yang terdiri dari penerimaan cicilan pengembalian penerusan pinjaman dalam dan luar negeri kepada Pemda, BUMD dan BUMN. Rincian Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman DN	951.071.477.279	1.334.486.195.806
Penerimaan Cicilan Pengembalian Penerusan Pinjaman LN	5.582.026.626.167	7.274.359.299.650
Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman	6.533.098.103.446	8.608.845.495.456

Penerimaan Pengembalian Penerusan Pinjaman dalam TA 2012 lebih kecil Rp2.075.747.392.010 atau 24,11 persen dari TA 2011.

D.2.23. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran
Pembiayaan DN
sebesar Rp130,31
triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2012 adalah sebesar Rp130.306.379.872.182 yang digunakan untuk pembiayaan pengembangan pendidikan nasional, pelunasan SPN, Obligasi Negara, dan SBSN, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pembiayaan Pengembangan Pendidikan Nasional	7.000.000.000.000	2.617.700.000.000
Pembiayaan Cicilan Pokok Pinjaman Dalam Negeri dari BUMN	113.435.519.488	-
Pengeluaran untuk Pelunasan Surat Berharga Negara	67.699.621.842	-
Pelunasan Surat Perbendaharaan Negara	37.600.000.000.000	38.045.000.000.000
Pelunasan Obligasi Negara Rupiah	73.963.054.019.852	49.174.159.351.085
Pelunasan SBSN	9.057.190.711.000	52.588.386.000
Pelunasan Obligasi Internasional	2.505.000.000.000	-
Jumlah Pembiayaan Dalam Negeri	130.306.379.872.182	89.889.447.737.085

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri TA 2012 lebih besar Rp40.416.932.135.097 atau 44,96 persen dibandingkan TA 2011.

D.2.24. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

*Pengeluaran
Pembiayaan LN
sebesar Rp51,11
triliun*

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2012 sebesar Rp51.114.817.369.327 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Pinjaman Program	10.862.794.957.111	9.429.608.883.864
Pinjaman Proyek	40.252.022.412.216	37.892.893.594.407
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	51.114.817.369.327	47.322.502.478.271

Dengan demikian, Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri TA 2012 lebih besar Rp3.792.314.891.056 atau 8,01 persen dibandingkan dengan TA 2011.

D.2.25. Penyertaan Modal Negara/Investasi Pemerintah

*PMN/Investasi
Pemerintah sebesar
Rp18,86 triliun*

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN)/Investasi Pemerintah merupakan penyertaan modal Pemerintah Pusat dalam rangka pendirian, pengembangan, dan peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara/Daerah, serta investasi dalam bentuk dana bergulir. PMN/Investasi Pemerintah dalam TA 2012 adalah sebesar Rp18.862.557.487.419, yang terdiri dari:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penyertaan Modal Negara pada BUMN	7.600.000.000.000	8.240.874.519.422
Penyertaan Modal Negara pada Badan Internasional	541.150.086.050	611.283.192.842
Penyertaan Modal Negara Lainnya	378.394.401.369	100.000.000
Investasi Pemerintah untuk BLU PIP	4.176.100.000.000	2.676.500.000.000
Dana Bergulir	6.166.913.000.000	7.671.600.000.000
Jumlah PMN/Investasi Pemerintah	18.862.557.487.419	19.200.357.712.264

Dengan demikian, PMN/Investasi Pemerintah TA 2012 lebih kecil Rp337.800.224.845 atau 1,76 persen dari TA 2011.

D.2.26. Penerusan Pinjaman (RDI/RPD)

*Penerusan Pinjaman
sebesar Rp3,75 triliun*

Penerusan Pinjaman RDI/RPD merupakan pengeluaran Pemerintah atas pemberian pinjaman dan penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan untuk pemerintah daerah, dan BUMN/BUMD. Penerusan pinjaman luar negeri pada TA 2012 adalah sebesar Rp3.753.031.242.391. Jumlah tersebut lebih kecil Rp470.810.228.907 atau 11,15 persen dibandingkan dengan TA 2011 sebesar Rp4.223.841.471.298.

Berdasarkan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp175.158.168.320.375 dan defisit anggaran sebesar Rp153.300.595.418.035, terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) TA 2012 sebesar Rp21.857.572.902.340.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

*Kas Keluar Bersih
dari Aktivitas
Nonanggaran sebesar
minus Rp1,50 triliun*

Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2012, Arus Kas Keluar Bersih dari Aktivitas Non Anggaran adalah sebesar Rp1.501.462.900.166, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)	(1.303.714.095.928)	171.690.576.787
Kiriman Uang (Neto)	(279.648.621.588)	12.521.440.111
Transito (Neto)	99.792.905.182	219.674.491.857
Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening (Neto)	(17.893.087.832)	909.656.106.798
Arus Kas Bersih	(1.501.462.900.166)	1.313.542.615.553

Dengan demikian, Arus Keluar Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran TA 2012 lebih kecil Rp2.815.005.515.719 atau 214,31 persen dari TA 2011.

D.2.27. Perhitungan Pihak Ketiga (Neto)

*PFK (Neto) sebesar
minus Rp1,30 triliun*

Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2012 sebesar minus Rp1.303.714.095.928 berasal dari penerimaan pemerintah yang berasal dari sejumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada pihak ketiga yang berhak menerimanya. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2012 adalah sebagai berikut:

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
PFK terkait Pengakuan Utang PFK		
Penerimaan		
Penerimaan PFK 10% Gaji	17.887.641.206.166	16.206.213.609.950
Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	3.042.006.448	4.188.354.646
Penerimaan PFK Beras BULOG	246.883.384.696	221.858.477.499
Penerimaan PFK 2% Pemda	2.473.251.467.474	2.188.134.244.756
Penerimaan PFK Lain-lain	378.878.255.234	382.182.686.930
Jumlah Penerimaan PFK	20.989.696.320.018	19.002.577.373.781
Pengeluaran		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(19.069.405.998.184)	(16.122.009.531.270)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Gaji Terusan	(6.586.462.845)	(3.131.896.112)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(240.351.262.878)	(202.664.878.214)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pemda	(2.575.125.898.343)	(2.112.551.113.844)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(401.940.793.696)	(390.529.377.554)
Jumlah Pengeluaran PFK	(22.293.410.415.946)	(18.830.886.796.994)
Jumlah PFK terkait Pengakuan Utang PFK (Neto)	(1.303.714.095.928)	171.690.576.787

Dengan demikian, Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dalam TA 2012 lebih kecil Rp1,339,838,588,350 atau 780,38 persen dari TA 2011. Adanya saldo PFK (Neto) TA 2012 tersebut mengakibatkan saldo utang PFK per 31 Desember 2012 menurun menjadi Rp451.860.600.337 dari Rp1.755.574.696.265 pada tanggal 31 Desember 2011.

D.2.28. Kiriman Uang

*Kiriman Uang sebesar
minus Rp279,65
miliar*

Kiriman Uang (KU) Neto TA 2012 sebesar minus Rp279.648.621.588 antara lain merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN

sebagai Kuasa BUN di daerah ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Kementerian Keuangan sebagai Kuasa BUN dan sebaliknya, pemindahbukuan intern rekening BUN, dan pemindahbukuan intern KPPN.

Dalam transaksi KU TA 2012 dan TA 2011 masih terdapat selisih antara penerimaan dengan pengeluaran KU yang disebabkan belum sepenuhnya seluruh transaksi atas rekening yang saling terkait dengan transaksi kas belum dibukukan dalam Sistem Akuntansi Pusat, adanya *time lag* antara saat pengiriman dan saat penerimaan kiriman uang serta ketidaktepatan dalam penggunaan akun. Rincian KU TA 2012 dan TA 2011 adalah sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Penerimaan Kiriman Uang	1.834.076.472.402.377	1.614.190.734.757.420
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	3.301.447.640.409.840	2.610.402.584.608.160
Penerimaan Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	6.689.356.520.899	7.707.811.003.417
Penerimaan Pemindahbukuan	1.326.460.559.905.517	1.220.031.858.891.484
Penerimaan Pemindahbukuan Penutupan Rekening	2.169.647.956	-
Penerimaan Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	4.052.818.451.020.209	3.194.663.329.067.827
Jumlah Penerimaan KU	10.521.494.649.906.798	8.646.996.318.328.308
Pengeluaran Kiriman Uang dan Pemindahbukuan		
Pengeluaran Kiriman Uang	(1.834.076.212.342.641)	(1.614.187.503.062.300)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka TSA	(3.301.700.077.607.338)	(2.610.420.628.968.610)
Pengeluaran Kiriman Uang Dalam Rangka Reksus	(6.722.591.420.868)	(7.674.627.347.317)
Pengeluaran Pemindahbukuan	(1.326.454.796.489.374)	(1.220.037.708.442.150)
Pengeluaran Pemindahbukuan Penutupan Rekening	(2.169.647.956)	-
Pengeluaran Pemindahbukuan Dalam Rangka Penempatan	(4.052.818.451.020.209)	(3.194.663.329.067.820)
Jumlah Pengeluaran KU	(10.521.774.298.528.386)	(8.646.983.796.888.197)
Jumlah KU (Neto)	(279.648.621.588)	12.521.440.111

Selisih Kiriman uang sebesar (Rp279.648.621.588) disebabkan oleh transaksi pengeluaran kiriman uang dari RPKBUN Pusat yang dilimpahkan pada tanggal 28 Desember 2012 dan baru diterima di RKUN pada tanggal 2 Januari 2013 sebesar Rp300.338.121.000 serta transaksi pengeluaran dan penerimaan kiriman uang antar Rekening Khusus sebesar Rp 33.494.752.903.

Dengan demikian, KU masuk neto dalam TA 2012 lebih kecil Rp292.170.061.699 dari TA 2011.

D.2.29. Transito

Transito Rp99,79 miliar

Transito (Neto) TA 2012 sebesar Rp99.792.905.182 merupakan transaksi BUN yang terkait dengan Pengeluaran Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) tahun berjalan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Penerimaan atas Pengembalian UP tersebut. Pengembalian UP dari Kuasa Pengguna Anggaran dapat berupa UP yang diterima tahun berjalan maupun tahun yang lalu, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 (audited)	TA 2011 (audited)
Penerimaan Transito		
Penerimaan Pengembalian UP Dana Rupiah	18.572.705.257.284	16.851.328.468.000
Penerimaan Pengembalian UP Dana PHLN	107.006.869.093	191.628.475.989

Penerimaan Pengembalian UP Pengguna PNB (Swadana)	1.268.151.087.109	1.088.585.569.046
Penerimaan Pengembalian UP TAYL	337.193.550.526	530.588.235.864
Penerimaan Pengembalian UP Pengembalian (Restitusi) Pajak	328.009.196	490.558.929
Jumlah Penerimaan Transito	20.285.384.773.208	18.662.621.307.828
Pengeluaran Transito		
Pengeluaran UP Dana Rupiah	(18.770.109.917.107)	(17.109.390.321.510)
Pengeluaran UP Dana PHLN	(112.284.762.859)	(190.367.646.485)
Pengeluaran UP Pengguna PNB (Swadana)	(1.308.872.103.226)	(1.164.453.438.445)
Pengeluaran Pengembalian Kelebihan Setoran Sisa UP/TUP TAYL	6.849.915.166	21.774.590.470
Pengeluaran Uang Persediaan Pengembalian (Restitusi) Pajak	(1.175.000.000)	(510.000.000)
Jumlah Pengeluaran Transito	(20.185.591.868.026)	(18.442.946.815.970)
Jumlah Transito (Neto)	99.792.905.182	219.674.491.858

Dengan demikian, Transito (Neto) dalam TA 2012 lebih kecil Rp119.881.586.676 atau 54,57 persen dari TA 2011.

D.2.30. Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening

*Penerimaan
Pengeluaran Non
Anggaran Pihak
Ketiga minus Rp17,89
milyar*

Dalam TA 2012 dan TA 2011 Penerimaan Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening merupakan utang kepada pihak ketiga yang timbul karena retur SP2D, dengan rincian sebagai berikut.

(dalam rupiah)

Uraian	TA 2012 <i>(audited)</i>	TA 2011 <i>(audited)</i>
Penerimaan Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	3.765.941.982.780	5.156.956.594.762
Pengeluaran Non Anggaran PFK karena Kesalahan Rekening	(3.802.066.475.202)	(4.247.596.582.982)
Jumlah PFK terkait Kesalahan Rekening dan SP2D Retur (Neto)	(36.124.492.422)	909.360.011.780
Koreksi Pemindahbukuan		
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	264.670.566.350	78.142.922.443
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(246.439.161.760)	(77.846.827.425)
Jumlah Koreksi Pemindahbukuan	18.231.404.590	296.095.018
Jumlah Penerimaan/Pengeluaran Non Anggaran Pihak Ketiga Karena Kesalahan Rekening	(17.893.087.832)	909.656.106.798



REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN PEMERINTAH PUSAT
TAHUN ANGGARAN 2012 DAN 2011
(dalam rupiah)

KODE MA	URAIAN MA	ANGGARAN	TAHUN ANGGARAN 2012	%	TAHUN ANGGARAN 2011	KENAIKAN/ PENURUNAN	% KENAIKAN/ PENURUNAN
1	2	3	5		6	4	5 = 4 - 3
4	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.358.205.043.200.000	1.338.109.629.172.960	98,52%	1.210.599.653.359.410	127.509.975.813.543	10,53%
41	Penerimaan Perpajakan	1.016.237.341.511.000	980.518.133.319.318	96,49%	873.873.892.399.381	106.644.240.919.938	12,20%
411	Pendapatan Pajak Dalam Negeri	968.293.241.511.000	930.861.839.509.437	96,13%	819.752.426.342.423	111.109.413.167.015	13,55%
4111	Pendapatan Pajak Penghasilan	513.650.160.000.000	465.069.641.549.058	90,54%	431.121.712.728.316	33.621.304.721.474	7,80%
41111	Pendapatan Pajak PPh Migas	67.916.730.000.000	83.460.868.001.301	122,89%	73.095.496.754.938	10.365.371.246.363	14,18%
411111	Pendapatan PPh Minyak Bumi	27.550.390.000.000	32.976.020.386.273	119,69%	25.941.792.126.888	7.034.228.259.385	27,12%
411112	Pendapatan PPh Gas Alam	40.366.340.000.000	50.484.720.419.499	125,07%	47.153.704.628.050	3.331.015.791.449	7,06%
411119	Pendapatan PPh Migas Lainnya		127.195.529	-		127.195.529	
41112	Pendapatan PPh Non-Migas	445.733.430.000.000	377.942.175.058.445	84,79%	354.683.553.082.514	23.258.621.975.931	6,56%
411121	Pendapatan PPh Pasal 21	89.195.190.000.000	79.599.440.782.334	89,24%	66.751.563.274.222	12.847.877.508.112	19,25%
411122	Pendapatan PPh Pasal 22	7.917.680.000.000	5.506.854.819.126	69,55%	4.946.488.944.246	560.365.874.880	11,33%
411123	Pendapatan PPh Pasal 22 Impor	38.185.630.000.000	31.610.164.408.871	82,78%	28.291.747.589.939	3.318.416.818.932	11,73%
411124	Pendapatan PPh Pasal 23	28.485.960.000.000	20.302.691.144.663	71,27%	18.702.757.359.018	1.599.933.785.645	8,55%
411125	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	5.615.840.000.000	3.763.462.234.949	67,02%	3.287.028.613.473	476.433.621.476	14,49%
411126	Pendapatan PPh Pasal 25/29 Badan	191.131.540.000.000	152.131.951.580.030	79,60%	154.609.563.560.736	(2.477.611.980.706)	-1,60%
411127	Pendapatan PPh Pasal 26	29.793.110.000.000	24.610.565.469.335	82,60%	27.239.272.558.180	(2.628.707.088.845)	-9,65%
411128	Pendapatan PPh Final	55.365.550.000.000	60.385.711.978.972	109,07%	50.814.558.376.084	9.571.153.602.888	18,84%
411129	Pendapatan PPh Nonmigas Lainnya	42.930.000.000	31.332.640.165		40.572.806.616	(9.240.166.451)	-22,77%
41113	Pendapatan PPh Fiskal		1.338.076.044	-	4.026.576.864	(2.688.500.820)	-66,77%
411131	Pendapatan PPh Fiskal Luar Negeri		1.338.076.044	-	4.026.576.864	(2.688.500.820)	-66,77%
41114	Pendapatan PPh ditanggung Pemerintah		3.665.260.413.269	-	3.338.636.314.000	326.624.099.269	9,78%
411141	Pendapatan PPh ps1 21 ditanggung Pemerintah		1.900.413.269	-		1.900.413.269	
411142	Pendapatan PPh ps1 22 ditanggung Pemerintah			-			
411144	Pendapatan PPh ps1 23 ditanggung Pemerintah			-			
411146	Pendapatan PPh ps1 25/29 ditanggung Pemerintah		815.400.000.000	-	898.462.528.000	(83.062.528.000)	-9,24%
411147	Pendapatan PPh ps1 26 ditanggung Pemerintah		2.847.960.000.000	-	2.440.173.786.000	407.786.214.000	16,71%
411148	Pendapatan PPh Final ditanggung Pemerintah			-			
4112	Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah	336.056.979.511.000	337.584.577.488.285	100,45%	277.800.076.679.384	59.784.500.808.901	21,52%
41121	Pendapatan PPN		318.709.170.377.790	-	264.377.821.470.207	54.331.348.907.583	20,55%
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri		191.936.827.053.476	-	157.178.437.931.519	34.758.389.121.957	22,11%
411212	Pendapatan PPN Impor		126.610.119.566.338	-	107.000.114.903.086	19.610.004.663.252	18,33%
411219	Pendapatan PPN Lainnya		162.223.757.976	-	199.268.635.602	(37.044.877.626)	-18,59%
41122	Pendapatan PPnBM		18.875.407.110.495	-	13.422.255.209.177	5.453.151.901.318	40,63%

411221	Pendapatan PPNBM Dalam Negeri		10.428.737.657.072	-	8.040.526.451.743	2.388.211.205.329	29,70%
411222	Pendapatan PPNBM Impor		8.422.773.568.033	-	5.374.096.456.215	3.048.677.111.818	56,73%
411229	Pendapatan PPNBM Lainnya		23.895.885.390	-	7.632.301.219	16.263.584.171	213,09%
4113	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	29.687.507.000.000	28.968.862.702.282	97,58%	29.893.164.324.396	(924.301.622.114)	-3,09%
41131	Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan		28.968.862.702.282	-	29.893.164.324.396	(924.301.622.114)	-3,09%
411311	Pendapatan PBB Pedesaan		1.144.421.183.966	-	1.177.346.608.822	(32.925.424.856)	-2,80%
411312	Pendapatan PBB Perkotaan		6.104.099.730.681	-	6.603.174.032.018	(499.074.301.337)	-7,56%
411313	Pendapatan PBB Perkebunan		1.107.246.997.455	-	985.954.945.312	121.292.052.143	12,30%
411314	Pendapatan PBB Kehutanan		254.533.056.441	-	251.302.697.483	3.230.358.958	1,29%
411315	Pendapatan PBB Pertambangan		565.247.025.160	-	397.619.412.898	167.627.612.262	42,16%
411316	Pendapatan PBB Migas		19.793.314.708.579	-	20.477.766.627.863	(684.451.919.284)	-3,34%
4114	Pendapatan BPHTB			-	(730.151.679)	730.151.679	
41141	Pendapatan BPHTB			-	(730.151.679)	730.151.679	
411411	Pendapatan BPHTB			-	(730.151.679)	730.151.679	
4115	Pendapatan Cukai	83.266.625.000.000	95.027.881.221.457	114,12%	77.010.010.613.795	18.017.870.607.662	23,40%
41151	Pendapatan Cukai	83.266.625.000.000	95.027.881.221.457	114,12%	77.010.010.613.795	18.017.870.607.662	23,40%
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau	79.858.130.000.000	90.553.638.824.974	113,39%	73.251.428.868.906	17.302.209.956.068	23,62%
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol	124.135.000.000	155.581.715.856	125,33%	152.953.431.380	2.628.284.476	1,72%
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	3.284.360.000.000	4.292.843.125.012	130,71%	3.583.211.248.830	709.631.876.182	19,80%
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai		17.154.851.382		11.381.400.196	5.773.451.186	50,73%
411519	Pendapatan Cukai Lainnya		8.662.704.233		11.035.664.483	(2.372.960.250)	-21,50%
4116	Pendapatan Pajak Lainnya	5.631.970.000.000	4.210.876.548.355	74,77%	3.928.192.148.211	282.684.400.144	7,20%
41161	Pendapatan Pajak Lainnya		3.879.749.896.174	-	3.611.492.492.012	268.257.404.162	7,43%
411611	Pendapatan Bea Meterai		1.104.415.931.742	-	1.060.800.868.721	43.615.063.021	4,11%
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai		2.772.232.946.670	-	2.548.804.494.349	223.428.452.321	8,77%
411613	Pendapatan PPN Batubara		769.733	-	61.093.244	(60.323.511)	-98,74%
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya		3.100.248.029	-	1.826.035.698	1.274.212.331	69,78%
41162	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak		331.126.652.181	-	316.699.656.199	14.426.995.982	4,56%
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh		184.769.886.516	-	84.726.712.822	100.043.173.694	118,08%
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN		143.785.207.687	-	224.199.680.642	(80.414.472.955)	-35,87%
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM		1.698.098.995	-	204.067.285	1.494.031.710	732,13%
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL		873.458.983	-	7.569.195.450	(6.695.736.467)	-88,46%
41163	Pendapatan Bunga Penagihan Pajak Ditanggung Pemerintah			-			
411631	Pendapatan Bunga Penagihan PPh Ditanggung Pemerintah			-			
				-			
412	Pajak Perdagangan Internasional	47.944.100.000.000	49.656.293.809.881	103,57%	54.121.466.056.958	(4.465.172.247.077)	-8,25%
4121	Pendapatan Bea Masuk	24.737.900.000.000	28.418.359.044.419	114,88%	25.265.863.309.375	3.152.495.735.044	12,48%
41211	Pendapatan Bea Masuk		28.418.359.044.419	-	25.265.863.309.375	3.152.495.735.044	12,48%
412111	Pendapatan Bea Masuk		26.708.523.995.738		23.783.424.990.710	2.925.099.005.028	12,30%
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah		25.634.038		3.173.020.085	(3.147.386.047)	-99,19%
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		465.920.844.465		391.846.604.781	74.074.239.684	18,90%

412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		1.076.608.593.685		946.668.042.226	129.940.551.459	13,73%
412115	Denda atas sanksi administrasi dari pelaksanaan pengawasan terhadap barang tertentu yang pengangkutannya Di Dalam Daerah Pabean (Antar Pulau)		(16.070.653)		15.000.000	(31.070.653)	-207,14%
412116	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM-DPT)		99.813.751.137		73.310.676.000	26.503.075.137	36,15%
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		67.482.296.009		67.424.975.573	57.320.436	0,09%
4122	Pendapatan Bea Keluar	23.206.200.000.000	21.237.934.765.462	91,52%	28.855.602.747.583	(7.617.667.982.121)	-26,40%
41221	Pendapatan Bea Keluar		21.237.934.765.462	-	28.855.602.747.583	(7.617.667.982.121)	-26,40%
412211	Pendapatan Bea Keluar		21.212.623.814.884		28.839.607.612.305	(7.626.983.797.421)	-26,45%
412212	Pendapatan Denda Administrasi Bea Keluar		22.318.787.523		12.094.053.103	10.224.734.420	84,54%
412213	Pendapatan Bunga Bea Keluar		2.992.163.055		3.901.082.175	(908.919.120)	-23,30%
42	Penerimaan Negara Bukan Pajak	341.142.610.103.000	351.804.746.666.862	103,13%	331.471.821.098.730	20.332.925.568.133	6,13%
421	Penerimaan Sumber Daya Alam	217.158.876.693.000	225.843.973.463.751	104,00%	213.823.349.552.827	12.020.623.910.925	5,62%
4211	Pendapatan Minyak Bumi	150.847.210.000.000	144.717.087.022.468	95,94%	141.303.493.452.283	3.413.593.570.185	2,42%
421111	Pendapatan Minyak Bumi	150.847.210.000.000	144.717.087.022.468	95,94%	141.303.493.452.283	3.413.593.570.185	2,42%
4212	Pendapatan Gas Bumi	47.463.850.000.000	61.106.427.615.761	128,74%	52.187.085.923.633	8.919.341.692.128	17,09%
421211	Pendapatan Gas Bumi	47.463.850.000.000	61.106.427.615.761	128,74%	52.187.085.923.633	8.919.341.692.128	17,09%
4213	Pendapatan Pertambangan Umum	15.274.120.402.000	15.877.387.816.604	103,95%	16.369.789.735.678	(492.401.919.074)	-3,01%
421311	Pendapatan Iuran Tetap	702.807.228.000	358.768.454.661	51,05%	261.174.194.719	97.594.259.942	37,37%
421312	Pendapatan Royalti	14.571.313.174.000	15.518.619.361.943	106,50%	16.108.615.540.959	(589.996.179.017)	-3,66%
4214	Pendapatan Kehutanan	3.074.886.191.000	3.188.338.362.520	103,69%	3.216.476.006.406	(28.137.643.886)	-0,87%
42141	Pendapatan Dana Reboisasi	1.504.623.550.000	1.627.099.143.958	108,14%	1.796.009.923.150	(168.910.779.192)	-9,40%
421411	Pendapatan Dana Reboisasi	1.504.623.550.000	1.627.099.143.958	108,14%	1.796.009.923.150	(168.910.779.192)	-9,40%
42142	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.304.885.756.000	986.272.637.355	75,58%	868.650.766.502	117.621.870.853	13,54%
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan	1.304.885.756.000	986.272.637.355	75,58%	868.650.766.502	117.621.870.853	13,54%
42143	Pendapatan IIUPH (IHPH)	38.083.295.000	102.560.156.090	269,30%	119.264.958.237	(16.704.802.147)	-14,01%
421431	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Industri	85.696.000	398.640	0,47%		398.640	
421432	Pendapatan IIUPH (IHPH) Bambu			-			
421433	Pendapatan IIUPH (IHPH) Tanaman Rotan		2.664.000	-		2.664.000	
421434	Pendapatan IIUPH (IHPH) Hutan Alam	37.997.599.000	102.557.093.450	269,90%	119.264.958.237	(16.707.864.787)	-14,01%
42144	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan	227.293.590.000	472.406.425.117	207,84%	432.550.358.517	39.856.066.600	9,21%
421441	Pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan	227.293.590.000	472.406.425.117	207,84%	432.550.358.517	39.856.066.600	9,21%
4215	Pendapatan Perikanan	150.000.100.000	215.766.602.000	143,84%	183.802.161.080	31.964.440.920	17,39%
42151	Pendapatan Perikanan	150.000.100.000	215.766.602.000	143,84%	183.802.161.080	31.964.440.920	17,39%
421511	Pendapatan Perikanan	150.000.100.000	215.766.602.000	143,84%	183.802.161.080	31.964.440.920	17,39%
4216	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	348.810.000.000	738.966.044.398	211,85%	562.702.273.747	176.263.770.652	31,32%
42161	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	348.810.000.000	738.966.044.398	211,85%	562.702.273.747	176.263.770.652	31,32%
421611	Pendapatan Pertambangan Panas Bumi	348.810.000.000	738.966.044.398	211,85%	562.702.273.747	176.263.770.652	31,32%
422	Pendapatan Bagian Laba BUMN	30.776.336.250.000	30.797.972.717.670	100,07%	28.183.973.126.600	2.613.999.591.070	9,27%

4221	Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	30.776.336.250.000	30.797.972.717.670	100,07%	28.183.973.126.600	2.613.999.591.070	9,27%
42211	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	5.000.000.000.000	4.070.293.177.056	81,41%	3.627.944.571.970	442.348.605.086	12,19%
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan	5.000.000.000.000	4.070.293.177.056	81,41%	3.627.944.571.970	442.348.605.086	12,19%
42212	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	25.776.336.250.000	26.727.679.540.615	103,69%	24.556.028.554.630	2.171.650.985.985	8,84%
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan	25.776.336.250.000	26.727.679.540.615	103,69%	24.556.028.554.630	2.171.650.985.985	8,84%
423	Pendapatan PNPB Lainnya	72.799.374.473.000	73.458.504.524.407	100,91%	69.360.502.832.532	4.098.001.691.875	5,91%
4231	Pendapatan Penjualan dan Sewa	25.769.214.556.000	23.253.375.898.356	90,24%	21.650.214.589.444	1.603.161.308.912	7,40%
42311	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	13.830.123.278.000	9.792.221.299.572	70,80%	9.525.540.319.958	266.680.979.614	2,80%
423111	Pendapatan Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	3.475.448.000	12.405.392.079	356,94%	8.852.552.173	3.552.839.906	40,13%
423112	Pendapatan Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	17.099.101.000	25.092.857.789	146,75%	18.054.793.335	7.038.064.454	38,98%
423113	Pendapatan Penjualan Hasil Tambang	13.699.882.571.000	8.136.063.530.890	59,39%	7.874.419.017.285	261.644.513.605	3,32%
423114	Pendapatan Penjualan Hasil Sitaaan/Rampasan dan Harta	40.000.000.000	309.451.289.769	773,63%	229.776.103.763	79.675.186.006	34,68%
423115	Pendapatan Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya		31.057.345	-	277.289.024	(246.231.679)	-88,80%
423116	Pendapatan Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, Survey, Pemetaan dan Hasil Cetakan Lainnya	65.835.026.000	63.253.293.144	96,08%	56.696.904.982	6.556.388.162	11,56%
423117	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	208.316.000	239.757.944	115,09%	286.085.900	(46.327.956)	-16,19%
423118	Pendapatan Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		1.241.170.700.122		1.330.536.272.413	(89.365.572.291)	-6,72%
423119	Pendapatan Penjualan Lainnya	3.622.816.000	4.513.420.490	124,58%	6.641.301.083	(2.127.880.593)	-32,04%
42312	Pendapatan Penjualan Aset	5.193.011.000	126.184.876.373	2429,90%	134.372.526.547	(8.187.650.174)	-6,09%
423121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	52.039.000	12.444.700.247	23914,18%	2.725.200.373	9.719.499.874	356,65%
423122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	1.595.978.000	7.228.982.579	452,95%	1.807.702.673	5.421.279.906	299,90%
423123	Pendapatan Penjualan Sewa Beli		36.661.280.535	-	40.584.546.231	(3.923.265.696)	-9,67%
423124	Pendapatan Penjualan Aset Bekas Milik Asing/ Cina		2.546.469.402	-	898.345.500	1.648.123.902	183,46%
423125	Pendapatan dari Tukar Menukar Tanah, Gedung dan Bangunan		558.000	-		558.000	
423126	Pendapatan dari Tukar Menukar Peralatan dan Mesin		519.000	-		519.000	
423127	Pendapatan dari Tukar Menukar Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.000.000	-		1.000.000	
423129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN lainnya	3.544.994.000	67.301.366.610	1898,49%	88.356.731.770	(21.055.365.160)	-23,83%
42313	Pendapatan Penjualan dari Kegiatan Hulu Migas	11.792.750.000.000	13.063.747.762.645	110,78%	11.803.490.967.212	1.260.256.795.433	10,68%
423131	Pendapatan Bersih Hasil Penjualan Bahan Bakar Minyak				1.375.672	(1.375.672)	-100,00%
423132	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	11.792.750.000.000	12.339.481.343.731	104,64%	11.757.359.720.968	582.121.622.763	4,95%
423139	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		724.266.418.914		46.129.870.572	678.136.548.342	1470,06%
42314	Pendapatan Sewa	141.148.267.000	271.221.959.766	192,15%	186.810.775.728	84.411.184.038	45,19%
423141	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	121.731.693.000	199.768.666.357	164,11%	45.451.619.659	154.317.046.698	339,52%
423142	Pendapatan Sewa Peralatan, dan Mesin	4.302.150.000	41.261.940.524	959,10%	100.928.367.267	(59.666.426.743)	-59,12%
423143	Pendapatan Sewa Jalan, Irigasi, dan Jaringan		1.491.636.660	-	4.032.068.912	(2.540.432.252)	-63,01%
423144	Pendapatan dari KSP Tanah, Gedung, dan Bangunan		245.943.085	-		245.943.085	
423145	Pendapatan dari KSP Peralatan dan Mesin		43.000	-		43.000	

423146	Pendapatan dari KSP Jalan, Irigasi dan Jaringan		23.606.250	-		23.606.250	
423147	Pendapatan dari Bangun, Guna, Serah (BGS)		36.210.000	-		36.210.000	
423148	Pendapatan dari Bangun, Serah, Guna (BSG)			-			
423149	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN lainnya	15.114.424.000	28.393.913.890	187,86%	36.398.719.890	(8.004.806.000)	-21,99%
4232	Pendapatan Jasa	27.099.595.145.000	26.207.952.723.750	96,71%	26.634.516.584.922	(646.908.560.085)	-2,43%
42321	Pendapatan Jasa I	15.811.540.207.000	16.145.943.608.009	102,11%	16.222.029.858.308	(76.086.250.299)	-0,47%
423211	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	14.899.250.000	16.463.326.144	110,50%	23.088.984.569	(6.625.658.425)	-28,70%
423212	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	15.282.066.000	17.398.110.910	113,85%	18.435.005.544	(1.036.894.634)	-5,62%
423213	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor	1.812.364.040.000	1.883.037.417.182	103,90%	1.728.221.763.186	154.815.653.996	8,96%
423214	Pendapatan Hak dan Perijinan	10.452.874.455.000	10.534.658.683.147	100,78%	10.079.440.234.990	455.218.448.157	4,52%
423215	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	114.182.502.000	172.275.214.737	150,88%	141.487.021.280	30.788.193.457	21,76%
423216	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, dan Teknologi sesuai Dengan Tugas Dan Fungsi Masing-masing Kementerian dan Pendapatan DJBC	963.726.001.000	946.106.871.167	98,17%	1.730.985.001.598	(784.878.130.431)	-45,34%
423217	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	75.033.300.000	68.255.730.088	90,97%	69.425.648.122	(1.169.918.034)	-1,69%
423218	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	670.238.143.000	996.728.925.691	148,71%	1.176.013.919.573	(179.284.993.882)	-15,25%
423219	Pendapatan pelayanan pertanahan	1.692.940.450.000	1.511.019.328.943		1.254.932.279.446		0,00%
42322	Pendapatan Jasa II	1.061.461.089.000	1.356.307.953.239	127,78%	1.371.622.057.319	(15.314.104.079)	-1,12%
423221	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	357.998.336.000	437.833.534.430	122,30%	559.885.378.409	(122.051.843.978)	-21,80%
423222	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	602.960.948.000	671.407.530.450	111,35%	608.899.747.166	62.507.783.284	10,27%
423223	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin		166.666		6.466.867	(6.300.201)	-97,42%
423224	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		15.592			15.592	
423225	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa	4.026.275.000	935.564.387	23,24%	988.174.444	(52.610.057)	-5,32%
423226	Pendapatan Uang Pewarganegaraan		290.720.908	-	1.106.880.702	(816.159.794)	-73,74%
423227	Pendapatan Bea Lelang	41.826.176.000	145.027.344.278	346,74%	111.461.806.567	33.565.537.711	30,11%
423228	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang dan Lelang Negara	44.649.354.000	94.507.923.026	211,67%	77.259.612.769	17.248.310.257	22,33%
423229	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	10.000.000.000	6.305.153.502	63,05%	12.013.990.395	(5.708.836.893)	-47,52%
42323	Pendapatan Jasa Luar Negeri	492.989.729.000	505.878.388.074	102,61%	454.063.043.127	51.815.344.947	11,41%
423231	Pendapatan dari Pemberian Surat Perjalanan RI	396.972.535.000	338.973.863.978	85,39%	324.666.971.475	14.306.892.503	4,41%
423232	Pendapatan dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	85.641.724.000	68.612.019.061	80,12%	63.057.780.745	5.554.238.316	8,81%
423239	Pendapatan Rutin Lainnya dari Luar Negeri	10.375.470.000	98.292.505.035	947,35%	66.338.290.907	31.954.214.128	48,17%
42324	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	12.000.000	294.417.442	2453,48%	698.213.800	(403.796.358)	-57,83%
423241	Pendapatan Layanan Jasa Perbankan	12.000.000	294.417.442	2453,48%	698.213.800	(403.796.358)	-57,83%
42325	Pendapatan atas Pengelolaan Rekening Tunggal Perbendaharaan (TSA) dan/atau atas Penempatan Uang	5.172.801.839.000	4.417.901.930.174	85,41%	4.935.359.321.429	(517.457.391.255)	-10,48%
423251	Pendapatan Atas Penertiban SP2D Dalam Rangka TSA	86.812.097.000	84.144.709.181	96,93%	74.666.280.250	9.478.428.931	12,69%
423252	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Umum			-	3.528.360	(3.528.360)	-100,00%
423253	Pendapatan dari Pelaksanaan Treasury Notional Pooling	125.000.000.000	176.885.967.432	141,51%	193.977.521.312	(17.091.553.881)	-8,81%

423254	Pendapatan Atas Penempatan Uang Negara pada Bank Indonesia	4.960.989.742.000	4.156.871.253.562	83,79%	4.666.711.991.507	(509.840.737.945)	-10,93%
42326	Pendapatan Jasa Kepolisian	4.232.362.910.000	3.378.471.363.288	79,82%	3.295.511.200.017	82.960.163.271	2,52%
423261	Pendapatan Surat Ijin Mengemudi (SIM)	997.071.000.000	915.366.777.713	91,81%	956.633.348.681	(41.266.570.968)	-4,31%
423262	Pendapatan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)	961.147.985.000	905.654.397.575	94,23%	882.208.725.500	23.445.672.075	2,66%
423263	Pendapatan Surat Tanda Coba Kendaraan (STCK)	151.117.000.000	58.890.605.000	38,97%	4.328.630.000	54.561.975.000	1260,49%
423264	Pendapatan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKP)	1.033.646.500.000	884.776.925.000	85,60%	896.525.547.151	(11.748.622.151)	-1,31%
423265	Pendapatan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)	815.772.000.000	582.548.043.000	71,41%	522.356.460.000	60.191.583.000	11,52%
423266	Pendapatan Ujian Keterampilan Mengemudi Melalui Simulator	271.000.000.000	29.067.365.000	10,73%	31.081.543.685	(2.014.178.685)	-6,48%
423267	Pendapatan Penerbitan Surat Ijin Senjata Api dan Bahan Peledak	2.608.425.000	2.167.250.000	83,09%	2.376.945.000	(209.695.000)	-8,82%
42327	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol		193.326.847.706	-		193.326.847.706	
423271	Pendapatan Jasa Pelayanan Tol Suramadu		193.326.847.706	-		193.326.847.706	
42328	Pendapatan Jasa Kepolisian II	288.029.500.000	122.939.850.129	42,68%	95.921.998.922	27.017.851.207	28,17%
423281	Pendapatan Penerbitan Surat Mutasi Kendaraan Ke Luar Daerah	188.250.000.000	56.544.395.000	30,04%	47.653.063.281	8.891.331.719	18,66%
423282	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian	36.364.500.000	53.895.772.000	148,21%	36.189.833.800	17.705.938.200	48,93%
423283	Pendapatan Penerbitan Surat Keterangan Lapor Diri	8.515.000.000	11.609.850.000	136,35%	10.211.880.000	1.397.970.000	13,69%
423284	Pendapatan Penerbitan Karti Sidik Jari (Inafis Card)	52.500.000.000	50.430.000	0,10%	20.885.000	29.545.000	141,47%
423285	Pendapatan Denda Pelanggaran Lalu Lintas	2.400.000.000	839.403.129	34,98%	1.846.336.841	(1.006.933.712)	-54,54%
42329	Pendapatan Jasa Lainnya	40.397.871.000	86.888.365.688	215,08%	259.310.892.000	(172.422.526.312)	-66,49%
423291	Pendapatan Jasa Lainnya	40.397.871.000	86.888.365.688	215,08%	259.310.892.000	(172.422.526.312)	-66,49%
4233	Pendapatan Bunga	4.421.769.852.000	11.667.960.412.611	263,88%	4.893.238.511.754	6.774.721.900.857	138,45%
42331	Pendapatan Bunga	1.843.587.667.000	3.370.659.392.659	182,83%	2.169.804.446.254	1.200.854.946.405	55,34%
423311	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi			-	740	(740)	-100,00%
423312	Pendapatan PPA (eks BPPN) atas Bunga Obligasi			-	59.100	(59.100)	-100,00%
423313	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman	1.843.587.667.000	1.889.554.108.681	102,49%	1.870.775.465.826	18.778.642.855	1,00%
423314	Pengembalian Pendapatan Bunga dari Pemberian Kredit Pemerintah		141.139.610.618	-	7.200	141.139.603.418	1960272270%
423315	Pendapatan Bunga dari Rekening Pembangunan Hutan		327.852.371.933	-	296.540.178.998	31.312.192.935	10,56%
423319	Pendapatan Bunga Lainnya		1.012.113.301.427	-	2.488.734.390	1.009.624.567.037	40567,79%
42332	Pendapatan Gain On Bond Redemption			-	760.000.000	(760.000.000)	-100,00%
423321	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang			-	760.000.000	(760.000.000)	-100,00%
42333	Pendapatan Premium atas Obligasi Negara	2.578.182.185.000	8.297.301.019.952	321,83%	2.722.674.065.500	5.574.626.954.452	204,75%
423331	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah	2.291.309.428.000	7.929.964.713.100	346,09%	2.435.801.308.500	5.494.163.404.600	225,56%
423332	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		213.100.688.852	-		213.100.688.852	
423333	Pendapatan Premium atas Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam negeri/rupee	286.872.757.000	154.235.618.000	53,76%	286.872.757.000		0,00%
42334	Pendapatan Fee Lainnya atas Surat Berharga Negara			-			

423341	Pendapatan Fee Lainnya atas Transaksi Securities lending SUN			-			
4234	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	98.724.105.000	251.243.211.606	254,49%	240.761.503.805	10.481.707.801	4,35%
42341	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan dan Hasil Tindak Pidana Korupsi	98.724.105.000	251.243.211.606	254,49%	240.761.503.805	10.481.707.801	4,35%
423411	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	825.000.000	3.634.086.227	440,50%	2.398.961.316	1.235.124.911	51,49%
423412	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	250.000.000	658.727.059	263,49%	329.737.000	328.990.059	99,77%
423413	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	210.000.000	6.328.338.471	3013,49%	6.554.804.355	(226.465.884)	-3,45%
423414	Pendapatan Hasil Denda dan Sebagainya	6.050.000.000	183.316.515.295	3030,03%	191.196.684.305	(7.880.169.010)	-4,12%
423415	Pendapatan Ongkos Perkara	25.750.605.000	22.144.284.459	86,00%	15.554.504.145	6.589.780.314	42,37%
423416	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Tindak Pidana Korupsi	2.000.000.000	1.296.954.660	64,85%	6.767.713.500	(5.470.758.840)	-80,84%
423417	Pendapatan Penjualan Hasil Lelang Gratifikasi	63.638.500.000	2.115.000	0,00%	48.955.000	(46.840.000)	-95,68%
423419	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya		33.862.190.435	-	17.910.144.184	15.952.046.251	89,07%
4235	Pendapatan Pendidikan	2.365.735.509.000	2.375.603.736.186	100,42%	2.965.915.235.801	(590.311.499.615)	-19,90%
42351	Pendapatan Pendidikan	2.365.735.509.000	2.375.603.736.186	100,42%	2.965.915.235.801	(590.311.499.615)	-19,90%
423511	Pendapatan Uang Pendidikan	1.612.958.071.000	1.683.616.183.253	104,38%	2.335.962.221.221	(652.346.037.968)	-27,93%
423512	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir	84.753.136.000	71.608.700.610	84,49%	65.785.580.265	5.823.120.345	8,85%
423513	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	137.573.950.000	59.850.019.750	43,50%	50.851.274.636	8.998.745.114	17,70%
423519	Pendapatan Pendidikan Lainnya	530.450.352.000	560.528.832.573	105,67%	513.316.159.679	47.212.672.894	9,20%
4236	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	62.250.000.000	158.144.829.032	254,05%	92.848.578.390	65.296.250.642	70,33%
42361	Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi	62.250.000.000	158.144.829.032	254,05%	92.848.578.390	65.296.250.642	70,33%
423611	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan	18.150.000.000	88.535.075.359	487,80%	19.288.796.467	69.246.278.892	359,00%
423612	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	19.900.000.000	2.546.845.878	12,80%	3.183.654.370	(636.808.492)	-20,00%
423613	Pendapatan dari Pengembalian Penyalahgunaan		338.979.472	-	145.460.900	193.518.572	133,04%
423614	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang Ditetapkan di Pengadilan	24.200.000.000	66.325.599.603	274,07%	70.114.738.636	(3.789.139.033)	-5,40%
423615	Pendapatan Hasil Pengembalian Uang Negara		398.328.720	-	115.928.017	282.400.703	243,60%
4237	Pendapatan Iuran dan Denda	474.350.972.000	1.459.529.823.727	307,69%	1.319.106.624.583	140.423.199.144	10,65%
42371	Pendapatan Iuran Badan Usaha	437.502.302.000	1.059.505.758.801	242,17%	861.670.014.154	197.835.744.647	22,96%
423711	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM	359.252.302.000	810.911.080.858	225,72%	632.396.034.868	178.515.045.990	28,23%
423712	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa	78.250.000.000	179.194.147.167	229,00%	151.050.193.216	28.143.953.951	18,63%
423713	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		69.400.530.776	-	78.223.786.070	(8.823.255.294)	-11,28%
42372	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		1.840.358.875	-	733.007.131	1.107.351.744	151,07%
423721	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		1.840.358.875	-	733.007.131	1.107.351.744	151,07%
42373	Pendapatan dari Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam	31.825.200.000	184.307.131.642	579,12%	140.713.701.218	43.593.430.424	30,98%

423731	Pendapatan Iuran Menangkap/Mengambil/Mengangkut Satwa Liar/Mengambil/Mengangkut Tumbuhan Alam Hidup atau Mati	6.571.833.000	6.430.980.457	97,86%	6.215.444.231	215.536.226	3,47%
423732	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)	3.019.901.000	358.418.000	11,87%	102.922.500	255.495.500	248,24%
423733	Pungutan Izin Pengusahaan Taman Buru (PIPTB)			-			
423734	Pungutan Izin Berburu di Taman Buru dan Areal Buru (PIB)			-	300.000	(300.000)	-100,00%
423735	Pungutan masuk Obyek Wisata Alam	22.138.066.000	20.039.871.992	90,52%	36.984.234.576	(16.944.362.584)	-45,82%
423736	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)	95.400.000	188.262.278	197,34%	118.212.233	70.050.045	59,26%
423737	Iuran Hasil Usaha Perburuan di Taman Buru (IHUPTB)		750.000	-	175.000	575.000	328,57%
423738	Pendapatan Penggantian Nilai Tegakan		157.288.848.915	-	97.292.412.678	59.996.436.237	61,67%
42374	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan			-			
423741	Pendapatan Penerimaan dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan			-			
42375	Pendapatan Denda I	5.023.470.000	213.856.984.631	4257,16%	315.818.319.492	(101.961.334.861)	-32,28%
423751	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi Hutan		13.438.646.875	-	4.281.304.178	9.157.342.697	213,89%
423752	Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	4.923.470.000	170.053.946.851	3453,95%	140.752.619.522	29.301.327.329	20,82%
423753	Pendapatan Denda Administrasi BPHTB		44.097.349	-	239.219.700	(195.122.351)	-81,57%
423754	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal		18.759.228.018	-	16.082.817.184	2.676.410.834	16,64%
423755	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha	100.000.000	8.409.191.060	8409,19%	150.962.722.445	(142.553.531.385)	-94,43%
423756	Pendapatan Denda Pelaksanaan Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil dalam Rangka TSA		419.944.000	-	517.649.929	(97.705.929)	-18,87%
423757	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Penempatan Uang Negara di Bank Umum dan Bank Indonesia		23.067.950	-		23.067.950	
423758	Pendapatan Denda atas Pelaksanaan Treasury Notional Pooling		140.162	-	1.554.710	(1.414.548)	-90,98%
423759	Pendapatan Denda Atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Penerimaan Negara oleh Bank/Pos Persepsi		2.708.722.366	-	2.980.431.824	(271.709.458)	-9,12%
42376	Pendapatan Denda II		19.589.778	-	171.582.588	(151.992.810)	-88,58%
423761	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pelimpahan Saldo BO II ke BO I		500.035	-	5.934.346	(5.434.311)	-91,57%
423762	Pendapatan Denda atas Kekurangan/Keterlambatan Pembagian PBB oleh BO III PBB		19.089.743	-	165.648.242	(146.558.499)	-88,48%
4239	Pendapatan Lain-Lain	12.507.734.334.000	8.084.693.889.140	64,64%	11.563.901.203.833	(3.479.207.314.693)	-30,09%
42391	Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu	12.483.162.936.000	4.661.015.950.737	37,34%	7.986.615.365.380	(3.325.599.414.643)	-41,64%
423911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	6.700.280.000	95.836.858.451	1430,34%	184.534.308.201	(88.697.449.751)	-48,07%
423912	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun TAYL	6.900.000	124.260.810.847	1800881,32%	74.070.662.833	50.190.148.014	67,76%
423913	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	1.702.081.711.000	3.582.793.634.341	210,49%	1.353.153.920.438	2.229.639.713.903	164,77%
423914	Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman LN TAYL	29.746.888.000	22.693.035.784	76,29%	44.901.246.343	(22.208.210.559)	-49,46%
423915	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah TAYL	732.624.000	15.015.061.686	2049,49%	8.219.282.585	6.795.779.101	82,68%
423916	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		2.546.831.730	-	1.291.921.495	1.254.910.235	97,14%

423917	Penerimaan Kembali Belanja Transfer ke Daerah TAYL	1.027.517.225.000	817.869.717.898	79,60%	1.744.388.203.373	(926.518.485.475	-53,11%
423919	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya TAYL	9.716.377.308.000	-	0,00%	4.576.055.820.112	(4.576.055.820.112	-100,00%
42392	Pendapatan Pelunasan Piutang	3.482.977.000	54.165.965.036	1555,16%	26.715.895.818	27.450.069.218	102,75%
423921	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	25.000.000	2.192.153.211	8768,61%	1.500.847.472	691.305.739	46,06%
423922	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	3.457.977.000	51.973.811.825	1503,01%	25.215.048.346	26.758.763.479	106,12%
42393	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	56.455.641.949	-	628.093.309.285	(571.637.667.336)	-91,01%
423931	Pendapatan dari Penutupan Rekening	-	56.455.641.949	-	628.093.309.285	(571.637.667.336	-91,01%
42394	Pendapatan dari Selisih Kurs	-	2.091.891.225.681	-	2.713.540.544.637	(621.649.318.956)	-22,91%
423941	Pendapatan dari Selisih Kurs dalam pengelolaan Rekening Milik	-	2.088.401.826.505	-	2.710.010.534.060	(621.608.707.555	-22,94%
423942	Pendapatan dari Untung Selisih Kurs Uang Persediaan Satker	-	3.489.399.176	-	3.530.010.577	(40.611.401)	-1,15%
42399	Pendapatan Lain-Lain	21.088.421.000	1.221.165.105.736	5790,69%	208.936.088.712	1.012.229.017.024	484,47%
423991	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	19.717.562.000	11.157.163.911	56,58%	10.792.715.501	364.448.410	3,38%
423992	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional	-	7.712.609.129	-	311.181.400	7.401.427.729	2378,49%
423993	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan	-	-	-	195.600.000	(195.600.000)	-100,00%
423994	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah	-	-	-	838.000	(838.000)	-100,00%
423995	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	-	-	-	-	-	-
423996	Pendapatan Jasa Perbendaharaan	-	-	-	-	-	-
423997	Pendapatan Kelebihan Pelimpahan Pajak/PNBP dari bank/pos	-	140.853.710	-	1.575	140.852.135	8942992,70%
423998	Pendapatan Penyetoran Kelebihan Hasil Bersih lelang yang tidak diambil oleh yang berhak	-	2.660.275.000	-	-	2.660.275.000	-
423999	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	1.370.859.000	1.199.494.203.986	87499,46%	197.635.752.236	1.001.858.451.750	506,92%
		-	-	-	-	-	-
424	Pendapatan Badan Layanan Umum	20.408.022.687.000	21.704.295.961.034	106,35%	20.103.995.586.771	1.600.300.374.263	7,96%
4241	Pendapatan Jasa Layanan Umum	18.753.700.334.000	19.471.851.778.837	103,83%	17.821.832.190.696	1.650.019.588.141	9,26%
42411	Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Kepada	16.592.833.006.000	17.237.212.849.937	103,88%	17.215.810.979.582	21.401.870.355	0,12%
424111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	5.037.908.978.000	5.719.217.633.192	113,52%	4.911.963.939.356	807.253.693.836	16,43%
424112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	9.546.933.008.000	9.324.580.999.440	97,67%	9.483.689.653.299	(159.108.653.859	-1,68%
424113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	199.374.791.000	162.582.735.402	81,55%	155.212.582.826	7.370.152.576	4,75%
424114	Pendapatan Jasa Pencetakan	1.024.475.000	82.347.368	8,04%	91.120.980	(8.773.612	-9,63%
424115	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	-	-	-	-	-	-
424116	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	1.406.777.248.000	1.557.810.037.540	110,74%	1.423.253.556.524	134.556.481.016	9,45%
424117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	2.700.000.000	864.139.254	32,01%	785.289.559	78.849.695	10,04%
424118	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang	-	6.007.373.560	-	8.862.033.195	(2.854.659.635	-32,21%
424119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	398.114.506.000	466.067.584.181	117,07%	1.231.952.803.843	(765.885.219.662	-62,17%
42412	Pendapatan dari Pengelolaan Wilayah/Kawasan Tertentu	755.116.047.000	742.623.094.171	98,35%	102.760.116.486	639.862.977.685	622,68%
424121	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Otorita	595.338.350.000	621.871.377.002	104,46%	-	621.871.377.002	-

424122	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Terpadu Pengembangan Ekonomi Terpadu			-			
424123	Pendapatan Pengelolaan Fasilitas Umum Milik Pemerintah		165.000.000	-		165.000.000	
424129	Pendapatan Pengelolaan Kawasan Lainnya	159.777.697.000	120.586.717.169	75,47%	102.760.116.486	17.826.600.683	17,35%
42413	Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat	1.405.751.281.000	1.492.015.834.729	106,14%	503.261.094.628	988.754.740.101	196,47%
424131	Pendapatan Program Dana Penjaminan			-			
424132	Pendapatan Program Dana Penjaminan Syariah			-			
424133	Pendapatan Program Modal Ventura	2.721.000.000	3.533.385.415	129,86%	6.854.420.592	(3.321.035.177)	-48,45%
424134	Pendapatan Program Dana Bergulir Sektoral	474.300.011.000	420.322.358.013	88,62%	233.121.199.136	187.201.158.877	80,30%
424135	Pendapatan Program Dana Bergulir Syariah	6.676.600.000	24.478.804.283	366,64%	14.356.562.257	10.122.242.026	70,51%
424136	Pendapatan Investasi	670.766.666.000	615.220.144.470	91,72%	248.303.299.963	366.916.844.507	147,77%
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	251.287.004.000	428.461.142.548	170,51%	625.612.680	427.835.529.868	68386,65%
4242	Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	58.698.456.000	83.863.755.868	142,87%	167.462.819.227	(83.599.063.359)	-49,92%
42421	Pendapatan Hibah Terkait	48.790.714.000	45.711.363.265	93,69%	55.720.275.237	(10.008.911.972)	-17,96%
424211	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Perorangan	300.000.000	5.269.437.781	1756,48%	98.005.000	5.171.432.781	5276,70%
424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha	46.990.714.000	16.454.981.800	35,02%	11.161.892.904	5.293.088.896	47,42%
424213	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Pemda	1.500.000.000	22.235.603.933	1482,37%	43.878.108.803	(21.642.504.870)	-49,32%
424214	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Perorangan			-			
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha		1.751.339.751	-	582.268.530	1.169.071.221	200,78%
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri - Negara			-			
424219	Pendapatan Hibah Terikat Lainnya			-			
42422	Pendapatan Hibah Tidak Terikat	9.907.742.000	38.152.392.603	385,08%	111.742.543.990	(73.590.151.387)	-65,86%
424221	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Perorangan		15.000.950.000	-		15.000.950.000	
424222	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		5.932.273.152	-	2.936.983.000	2.995.290.152	101,99%
424223	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri - Pemda	9.907.742.000	9.998.612.070	100,92%	108.550.000.000	(98.551.387.930)	-90,79%
424224	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Perorangan			-			
424225	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Lembaga/Badan Usaha			-	215.560.990	(215.560.990)	-100,00%
424226	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Luar Negeri - Negara			-			
424229	Pendapatan Hibah Tidak Terikat - Lainnya		7.220.557.381	-	40.000.000	7.180.557.381	17951,39%
4243	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.195.859.085.000	1.081.392.058.923	90,43%	647.563.491.201	433.828.567.722	66,99%
42431	Pendapatan Hasil Kerja Sama BLU	1.195.859.085.000	1.081.392.058.923	90,43%	647.563.491.201	433.828.567.722	66,99%
424311	Pendapatan Hasil Kerjasama Perorangan		42.256.194.636	-	13.794.581.510	28.461.613.126	206,32%
424312	Pendapatan Hasil Kerjasama Lembaga/Badan Usaha	1.194.384.085.000	996.179.627.837	83,41%	605.800.871.861	390.378.755.976	64,44%
424313	Pendapatan Hasil Kerjasama Pemerintah Daerah	1.475.000.000	42.956.236.450	2912,29%	27.968.037.830	14.988.198.620	53,59%
4249	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000	1.067.188.367.406	266,95%	1.467.137.085.647	(399.948.718.241)	-27,26%
42491	Pendapatan BLU Lainnya	399.764.812.000	1.067.188.367.406	266,95%	1.467.137.085.647	(399.948.718.241)	-27,26%
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	399.764.812.000	1.067.188.367.406	266,95%	1.467.137.085.647	(399.948.718.241)	-27,26%
				-			
43	Penerimaan Hibah	825.091.586.000	5.786.749.186.777	701,35%	5.253.939.861.304	532.809.325.473	10,14%
431	Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri		5.786.749.186.777	-	5.253.939.861.304	532.809.325.473	10,14%
4311	Pendapatan Hibah Dalam Negeri		948.005.796.311	-	960.021.567.110	(17.522.413.649)	-1,83%

43111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri			-	34.102.500	(34.102.500)	-100,00%
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Terencana Perorangan			-	34.102.500	(34.102.500)	-100,00%
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri -Terencana Lembaga/Badan Usaha			-			
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana Lainnya			-			
43112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Non Kas	414.188.707.700		-	496.517.968.721	(85.196.736.021)	-17,16%
431121	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Barang	411.321.232.700		-	52.992.368.721	358.328.863.979	676,19%
431122	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Jasa	2.867.475.000		-		2.867.475.000	
431123	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung - Bentuk Surat Berharga			-	443.525.600.000	(443.525.600.000)	-100,00%
43113	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung	533.817.088.611		-	463.469.495.889	67.708.424.872	14,61%
431131	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-	2.639.167.850		-		2.639.167.850	
431132	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Lembaga/Badan Usaha	137.005.740.382		-	166.310.915.813	(29.305.175.431)	-17,62%
431133	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Pemerintah Daerah	394.172.180.379		-	287.158.580.076	107.013.600.303	37,27%
431139	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang-Lainnya			-	10.000.000.000	(10.000.000.000)	-100,00%
4312	Pendapatan Hibah Luar Negeri	4.838.743.390.466		-	4.293.918.294.194	544.825.096.272	12,69%
43121	Pendapatan Hibah Luar Negeri	2.776.369.367.823		-	2.721.020.490.004	55.348.877.819	2,03%
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Perorangan	143.794.500		-		143.794.500	
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Bilateral	816.147.401.739		-	323.935.838.288	492.211.563.451	151,95%
431213	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana Multilateral	1.943.618.224.054		-	2.389.885.678.488	(446.267.454.434)	-18,67%
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Terencana Lainnya	16.459.947.530		-	7.198.973.228	9.260.974.302	128,64%
43122	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Non Kas	1.230.858.660.098		-	499.204.355.709	731.654.304.389	146,56%
431221	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Barang	355.406.477.276		-	31.458.714.430	323.947.762.846	1029,76%
431222	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Jasa	875.452.182.822		-	467.745.641.279	407.706.541.543	87,16%
431223	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Langsung Bentuk Surat Berharga	831.515.362.545		-	1.073.693.448.481	(242.178.085.936)	-22,56%
431231	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung --Langsung Bentuk Uang Perorangan			-			
431232	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Bilateral	88.737.200.479		-	112.795.828.856	(24.058.628.377)	-21,33%
431233	Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung -Langsung Bentuk Uang Multilateral	708.306.049.484		-	918.255.266.945	(209.949.217.461)	-22,86%
431239	Pendapatan Hibah Luar Negeri -Langsung Bentuk Uang Lainnya	34.472.112.582		-	42.642.352.680	(8.170.240.098)	-19,16%
Jumlah Penerimaan		1.358.205.043.200.000	1.338.109.629.172.960	98,52%	1.210.599.653.359.410	127.509.975.813.543	10,53%

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
A	BUMN Perbankan	
1	Bank BRI	1.711.944.248.000,00
2	Bank Mandiri	1.469.525.260.000,00
3	Bank BNI	699.100.833.310,00
4	Bank BTN	160.840.962.360,00
5	Bank Bukopin	28.881.873.385,72
JUMLAH DIVIDEN BUMN PERBANKAN		4.070.293.177.055,72
B	BUMN NON PERBANKAN	
6	PT Pertamina	7.257.043.000.000,00
7	PT Telkom	3.832.434.555.606,00
8	PT PLN	3.500.000.000.000,00
9	PT Pupuk Indonesia	2.042.313.500.701,00
10	PT Perusahaan Gas Negara	1.708.868.546.055,00
11	PT Bukit Asam	1.049.380.332.000,00
12	PT Semen Gresik	1.001.076.591.340,00
13	PT Asuransi Jasa Rahardja	596.983.093.256,00
14	PT Aneka Tambang	564.137.157.008,00
15	PT Perkebunan Nusantara III	534.165.759.728,00
16	PT Pelindo II	448.655.000.000,00
17	PT Angkasa Pura II	458.921.316.239,00
18	PT Pegadaian	429.776.468.000,00
19	PT Perkebunan Nusantara IV	378.718.251.100,00
20	PT Jasa Marga	375.461.184.000,00
21	PT Timah	291.453.500.000,00
22	PT Pelindo III	287.465.000.000,00
23	PT Inalum	260.983.070.509,50
24	PT Krakatau Steel	189.300.000.000,00
25	PT Angkasa Pura I	182.316.105.970,00
26	PT Perkebunan Nusantara V	137.002.055.557,00
27	PT Perkebunan Nusantara IX	98.776.000.000,00
28	PT Perkebunan Nusantara VI	78.544.104.898,00
29	PT Wijaya Karya	70.232.000.000,00
30	PT Pelindo IV	67.352.000.000,00
31	PT Indosat	59.668.098.750,00
32	PT Perkebunan Nusantara VIII	57.458.660.000,00
33	Perum Jamkrindo	55.774.249.686,00
34	PT Pelindo I	52.834.000.000,00
35	PT Perkebunan Nusantara X	51.039.000.000,00
36	PT Semen Baturaja	50.328.000.000,00

RINCIAN BAGIAN PEMERINTAH ATAS LABA BUMN
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)

NO	NAMA BUMN	JUMLAH PEMBAYARAN (Rp)
37	PT Socfin Indonesia	97.039.088.300,00
38	PT Perkebunan Nusantara XIII	47.642.000.000,00
39	PT Perkebunan Nusantara VII	46.023.001.200,00
40	PT Bio Farma	45.362.829.086,00
41	PT Pembangunan Perumahan	36.748.284.268,80
42	PT Asuransi Jasindo	36.317.000.000,00
43	PT Perkebunan Nusantara XII	33.801.000.000,00
44	PT Kimia Farma	30.926.447.148,00
45	Perum Peruri	30.000.000.000,00
46	PT Perusahaan Pengelola Aset	28.643.687.279,00
47	PT Adhi Karya	27.864.000.000,00
48	PT Sang Hyang Seri	9.950.000.000,00
49	PT Kawasan Berikat Nusantara	9.148.940.488,46
50	PT Kliring Berjangka Indonesia	9.032.000.000,00
51	PT ASEI	8.269.000.000,00
52	PT Biro Klasifikasi Indonesia	7.704.022.000,00
53	PT Surveyor Indonesia	7.364.898.200,00
54	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung	7.102.675.680,00
55	PT Sucofindo	6.107.744.750,00
56	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	5.594.003.820,00
57	PT Pertani	3.946.000.000,00
58	PT LEN Industri	3.934.475.802,00
59	PT Bhanda Ghara Rekso	3.764.000.000,00
60	PT Permodalan Nasional Madani	3.114.000.000,00
61	PT Sarinah	2.925.909.888,90
62	PT Bali Tourism Development Corp.	2.289.000.000,00
63	PT Kawasan Industri Medan	2.058.569.867,00
64	PT Perkebunan Nusantara IX	1.450.120.379,00
65	PT Industri Telekomunikasi Indonesia	1.022.660.692,00
66	PT Perkebunan Nusantara II	900.000.000,00
67	Perum Perumnas	750.000.000,00
68	Kawasan Industri Makassar	710.985.364,00
69	PT Kawasan Industri Wijayakusuma	373.994.396,00
70	PT Inhutani I	300.000.000,00
71	PT Balai Pustaka	200.000.000,00
72	PT Persero Batam	85.865.000,00
73	PT Inhutani V	90.000.000,00
74	PT Dahana	1.105.000,00
75	PT ASDP Persero	27.602,00
75	Dividen Lainnya	661.604.000,00
JUMLAH DIVIDEN BUMN NON PERBANKAN		26.727.679.540.614,70
JUMLAH SELURUHNYA		30.797.972.717.670,40

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BA DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)**

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	623.155.509.002	522.410.287.701	199.181.423	522.211.106.278	(100.944.402.724)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	76.552.443.947	64.263.069.133	54.502.787	64.208.566.346	(12.343.877.601)
02	MAJELIS	546.603.065.055	458.147.218.568	144.678.636	458.002.539.932	(88.600.525.123)
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.706.550.930.000	2.033.804.478.239	17.417.909.550	2.016.386.568.689	(690.164.361.311)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	722.039.991.000	503.666.094.147	278.098.094	503.387.996.053	(218.651.994.947)
02	DEWAN	1.984.510.939.000	1.530.138.384.092	17.139.811.456	1.512.998.572.636	(471.512.366.364)
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.674.785.807.000	2.271.649.048.259	23.374.535.903	2.248.274.512.356	(426.511.294.644)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.909.463.828.000	1.679.253.841.286	8.628.717.093	1.670.625.124.193	(238.838.703.807)
02	B.P.K. PUSAT	765.321.979.000	592.395.206.973	14.745.818.810	577.649.388.163	(187.672.590.837)
005	MAHKAMAH AGUNG	5.055.615.846.384	4.803.563.836.570	5.500.342.875	4.798.063.493.695	(257.552.352.689)
01	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	4.674.178.607.524	4.468.050.728.276	4.426.909.834	4.463.623.818.442	(210.554.789.082)
02	KEPANITERAAN	71.944.900.088	67.246.251.198	119.122.102	67.127.129.096	(4.817.770.992)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	124.627.784.089	97.362.389.093	577.490.131	96.784.898.962	(27.842.885.127)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	63.559.545.099	61.401.959.849	159.809.376	61.242.150.473	(2.317.394.626)
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA	20.291.905.234	18.430.268.496	115.966.879	18.314.301.617	(1.977.603.617)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN P	77.442.906.858	68.550.147.473	2.934.115	68.547.213.358	(8.895.693.500)
07	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	23.570.197.492	22.522.092.185	98.110.438	22.423.981.747	(1.146.215.745)
006	KEJAKSAAN AGUNG	3.789.369.646.586	3.526.055.872.629	1.256.427.873	3.524.799.444.756	(264.570.201.830)
01	KEJAKSAAN AGUNG	3.789.369.646.586	3.526.055.872.629	1.256.427.873	3.524.799.444.756	(264.570.201.830)
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.977.196.018.973	1.624.098.782.334	1.420.953.968	1.622.677.828.366	(354.518.190.607)
01	SEKRETARIAT NEGARA	1.086.790.276.267	839.357.703.385	280.414.154	839.077.289.231	(247.712.987.036)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	417.737.223.118	408.386.887.894	138.570.999	408.248.316.895	(9.488.906.223)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	250.293.735.955	179.852.229.834	59.710.500	179.792.519.334	(70.501.216.621)
05	SEKRETARIAT MILITER	35.726.601.082	34.203.779.527	38.550.078	34.165.229.449	(1.561.371.633)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	31.924.161.446	33.458.416.254		33.458.416.254	1.534.254.808
07	DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN	40.668.470.331	35.334.771.380		35.334.771.380	(5.333.698.951)
08	UNIT KERJA PRESIDEN BD.PENGAWASAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN (UKP-PPP)	63.606.403.559	53.755.231.187	122.265.256	53.632.965.931	(9.973.437.628)
09	LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK)	50.449.147.215	39.749.762.873	781.442.981	38.968.319.892	(11.480.827.323)
010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	16.722.076.178.563	16.771.865.517.234	4.663.984.628	16.767.201.532.606	45.125.354.043
01	SEKRETARIAT JENDERAL	791.002.105.859	772.264.457.030	566.738.401	771.697.718.629	(19.304.387.230)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	45.241.000.379	43.620.618.532	101.555.544	43.519.062.988	(1.721.937.391)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	164.654.801.175	162.557.801.617	70.905.628	162.486.895.989	(2.167.905.186)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	401.135.475.237	346.399.397.781	936.393.780	345.463.004.001	(55.672.471.236)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	10.690.997.668.875	10.875.440.752.161	1.189.202.847	10.874.251.549.314	183.253.880.439
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	501.153.852.186	440.881.021.575	1.196.449.332	439.684.572.243	(61.469.279.943)
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	97.716.161.695	109.161.564.031	310.331.772	108.851.232.259	11.135.070.564
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	3.753.811.755.006	3.763.313.566.357	86.936.366	3.763.226.629.991	9.414.874.985
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	57.222.687.692	53.620.286.727	181.468.592	53.438.818.135	(3.783.869.557)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	48.853.321.014	40.848.619.386	2.236.561	40.846.382.825	(8.006.938.189)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	170.287.349.445	163.757.432.037	21.765.805	163.735.666.232	(6.551.683.213)
011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	4.996.826.397.938	4.122.815.262.521	4.974.615.348	4.117.840.647.173	(878.985.750.765)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.392.563.929.230	3.534.624.579.534	3.177.739.603	3.531.446.839.931	(861.117.089.299)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	31.895.358.757	33.348.432.384	334.754.675	33.013.677.709	1.118.318.952
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	34.902.182.382	34.570.352.083	153.022.986	34.417.329.097	(484.853.285)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	37.331.787.899	32.889.143.756	255.391.505	32.633.752.251	(4.698.035.648)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	299.893.143.662	302.844.814.548	196.277.010	302.648.537.538	2.755.393.876
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	50.008.138.302	46.575.691.495	118.767.849	46.456.923.646	(3.551.214.656)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	25.150.320.770	24.690.410.634	112.973.616	24.577.437.018	(572.883.752)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	77.876.321.850	74.991.108.973	365.200.978	74.625.907.995	(3.250.413.855)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	17.978.986.469	15.632.443.877	152.823.917	15.479.619.960	(2.499.366.509)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	29.226.228.617	22.648.285.237	107.663.209	22.540.622.028	(6.685.606.589)
012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	72.935.487.180.928	64.644.131.408.795	3.338.781.783.233	61.305.349.625.562	(11.630.137.555.366)
01	KEMENTERIAN PERTAHANAN	19.405.857.961.032	12.465.499.914.207	3.245.370.568.098	9.220.129.346.109	(10.185.728.614.923)
21	MARKAS BESAR TNI	6.614.815.859.445	6.309.845.479.581	5.730.146.209	6.304.115.333.372	(310.700.526.073)
22	MARKAS BESAR TNI AD	29.678.465.105.870	28.806.453.927.036	37.925.794.706	28.768.528.132.330	(909.936.973.540)
23	MARKAS BESAR TNI AL	9.257.107.786.636	9.002.626.202.802	4.987.284.883	8.997.638.917.919	(259.468.868.717)
24	MARKAS BESAR TNI AU	7.979.240.467.945	8.059.705.885.169	44.767.989.337	8.014.937.895.832	35.697.427.887
013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	6.949.522.691.394	6.262.512.345.898	35.262.905.889	6.227.249.440.009	(722.273.251.385)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	5.476.412.347.049	5.058.760.649.535	27.077.591.132	5.031.683.058.403	(444.729.288.646)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.761.425.285	28.409.034.581	348.578.229	28.060.456.352	(700.968.933)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	170.572.197.261	159.533.740.075	364.794.352	159.168.945.723	(11.403.251.538)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	77.178.407.598	78.863.024.500	164.927.688	78.698.096.812	1.519.689.214
06	DITJEN IMIGRASI	878.620.075.320	659.685.747.535	5.601.451.494	654.084.296.041	(224.535.779.279)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	89.128.299.670	78.116.524.926	309.869.785	77.806.655.141	(11.321.644.529)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	52.901.452.091	35.470.477.590	159.767.588	35.310.710.002	(17.590.742.089)
09	DITJEN HAK ASASI MANUSIA	27.468.600.528	26.131.055.542	566.228	26.130.489.314	(1.338.111.214)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	46.638.093.461	40.435.528.642	69.971.461	40.365.557.181	(6.272.536.280)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN HAM	22.014.091.391	21.254.504.201	55.049.842	21.199.454.359	(814.637.032)
12	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	79.827.701.740	75.852.058.771	1.110.338.090	74.741.720.681	(5.085.981.059)
015	KEMENTERIAN KEUANGAN	16.913.651.514.479	16.350.636.678.743	25.188.635.572	16.325.448.043.171	(588.203.471.308)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	6.566.826.063.274	6.064.064.989.816	15.742.387.823	6.048.322.601.993	(518.503.461.281)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	92.347.805.516	88.873.285.659	430.175.462	88.443.110.197	(3.904.695.319)
03	DITJEN ANGGARAN	135.853.125.734	126.019.645.030	442.929.815	125.576.715.215	(10.276.410.519)
04	DITJEN PAJAK	4.871.170.268.027	5.224.198.081.849	1.755.704.419	5.222.442.377.430	351.272.109.403
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.076.733.528.625	1.984.344.041.674	1.207.745.730	1.983.136.295.944	(93.597.232.681)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	114.495.294.429	113.380.175.841	821.193.066	112.558.982.775	(1.936.311.654)
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	68.962.318.695	68.153.789.249	201.230.190	67.952.559.059	(1.009.759.636)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.495.695.356.257	1.415.197.849.226	1.250.910.848	1.413.946.938.378	(81.748.417.879)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	586.068.480.246	554.225.778.601	1.089.238.243	553.136.540.358	(32.931.939.888)
10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	351.975.373.778	183.956.179.724	633.709.709	183.322.470.015	(168.652.903.763)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	411.223.011.229	396.654.114.466	1.444.739.651	395.209.374.815	(16.013.636.414)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	142.300.888.669	131.568.747.608	168.670.616	131.400.076.992	(10.900.811.677)
018	KEMENTERIAN PERTANIAN	17.097.814.290.726	18.261.722.196.018	14.667.948.167	18.247.054.247.851	1.149.239.957.125
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.164.743.418.224	1.271.121.816.757	2.001.925.352	1.269.119.891.405	104.376.473.181
02	INSPEKTORAT JENDERAL	58.511.892.496	62.045.127.289	18.812.049	62.026.315.240	3.514.422.744
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	3.935.740.822.339	4.062.016.252.095	1.048.179.036	4.060.968.073.059	125.227.250.720
04	DITJEN HORTIKULTURA	492.137.258.207	535.572.857.691	150.272.919	535.422.584.772	43.285.326.565
05	DITJEN PERKEBUNAN	1.274.414.725.685	1.386.129.497.156	551.781.523	1.385.577.715.633	111.162.989.948
06	DITJEN PETERNAKAN	2.243.483.675.436	2.905.973.413.306	1.336.778.970	2.904.636.634.336	661.152.958.900
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	437.797.694.951	466.999.737.436	33.539.448	466.966.197.988	29.168.503.037
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	3.892.768.111.314	3.784.518.162.212	5.221.804.948	3.779.296.357.264	(113.471.754.050)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	1.106.025.737.833	1.201.233.563.815	1.403.192.739	1.199.830.371.076	93.804.633.243
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	1.254.841.785.420	1.339.394.003.252	2.422.408.993	1.336.971.594.259	82.129.808.839
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	598.329.910.564	622.572.983.367	145.120.108	622.427.863.259	24.097.952.695
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	639.019.258.257	624.144.781.642	334.132.082	623.810.649.560	(15.208.608.697)
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	2.443.004.080.755	2.694.965.515.467	1.790.862.128	2.693.174.653.339	250.170.572.584
01	SEKRETARIAT JENDERAL	771.769.963.506	783.669.890.375	558.572.024	783.111.318.351	11.341.354.845
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO	300.375.210.550	309.577.837.178	382.540.241	309.195.296.937	8.820.086.387
03	DIREKTORAT JENDERAL BASIS INDUSTRI MANUFAKTUR	355.515.272.656	556.193.099.867	39.720.625	556.153.379.242	200.638.106.586

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI UNGGULAN BERBASIS TEKNOLOGI TINGGI	151.927.065.349	143.427.068.134	229.130.585	143.197.937.549	(8.729.127.800)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	274.861.611.147	275.134.584.997	158.584.783	274.976.000.214	114.389.067
06	INSPEKTORAT JENDERAL	38.805.531.136	41.556.099.579	120.487.934	41.435.611.645	2.630.080.509
07	BADAN PENGKAJIAN KEBIJAKAN, IKLIM DAN MUTU INDUSTRI	412.114.026.192	442.958.570.996	171.133.310	442.787.437.686	30.673.411.494
08	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI	92.848.175.409	98.535.687.163	42.654.696	98.493.032.467	5.644.857.058
09	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA INDUSTRI INTERNATIONAL	44.787.224.810	43.912.677.178	88.037.930	43.824.639.248	(962.585.562)
020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	16.286.288.627.154	9.891.413.138.502	4.440.630.919	9.886.972.507.583	(6.399.316.119.571)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	832.511.262.138	754.358.143.533	222.122.984	754.136.020.549	(78.375.241.589)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	103.340.211.098	87.621.692.498	879.380.299	86.742.312.199	(16.597.898.899)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	2.360.936.059.709	1.007.699.404.265	45.849.212	1.007.653.555.053	(1.353.282.504.656)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	9.070.002.207.911	5.308.507.581.477	332.326.562	5.308.175.254.915	(3.761.826.952.996)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	351.767.248.343	227.433.818.927	284.564.969	227.149.253.958	(124.617.994.385)
07	DEWAN ENERGI NASIONAL	55.277.650.087	51.525.788.405	195.258.951	51.330.529.454	(3.947.120.633)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	565.230.794.525	467.878.265.850	908.454.679	466.969.811.171	(98.260.983.354)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	620.738.182.178	554.283.694.174	251.839.454	554.031.854.720	(66.706.327.458)
13	BADAN GEOLOGI	877.127.308.224	708.909.800.742	1.248.430.482	707.661.370.260	(169.465.937.964)
14	BPH MIGAS	264.471.373.813	129.704.914.338	-	129.704.914.338	(134.766.459.475)
15	DITJEN ENERGI BARU TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI	1.184.886.329.128	593.490.034.293	72.403.327	593.417.630.966	(591.468.698.162)
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	38.147.088.985.000	30.090.915.860.516	7.300.852.582	30.083.615.007.934	(8.063.473.977.066)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	462.851.552.000	411.951.883.282	433.354.853	411.518.528.429	(51.333.023.571)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	69.099.045.000	59.178.343.209	56.807.230	59.121.535.979	(9.977.509.021)
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	7.113.918.503.000	2.589.876.427.144	262.499.030	2.589.613.928.114	(4.524.304.574.886)
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	11.550.550.774.000	10.002.428.236.889	3.289.421.133	9.999.138.815.756	(1.551.411.958.244)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	6.903.288.654.000	6.052.100.745.403	1.867.575.362	6.050.233.170.041	(853.055.483.959)
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	9.252.127.787.000	8.533.765.070.592	349.636.525	8.533.415.434.067	(718.712.352.933)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	194.878.759.000	183.340.977.006	4.510.231	183.336.466.775	(11.542.292.225)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	2.600.373.911.000	2.258.274.176.991	1.037.048.218	2.257.237.128.773	(343.136.782.227)
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL	77.179.792.706.747	67.854.802.031.958	269.387.018.138	67.585.415.013.820	(9.594.377.692.927)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.319.817.196.779	1.005.639.243.335	2.000.581.902	1.003.638.661.433	(316.178.535.346)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
02	INSPEKTORAT JENDERAL	183.234.643.122	134.584.375.964	12.162.439.062	122.421.936.902	(60.812.706.220)
03	DITJEN PENDIDIKAN DASAR	19.501.637.900.617	18.273.202.247.375	146.220.040.009	18.126.982.207.366	(1.374.655.693.251)
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	38.776.263.339.389	32.910.511.566.658	16.975.451.267	32.893.536.115.391	(5.882.727.223.998)
05	DITJEN PAUDNI	2.914.537.018.899	2.767.716.934.904	27.725.540.290	2.739.991.394.614	(174.545.624.285)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	1.278.073.376.498	1.155.107.431.896	10.456.623.994	1.144.650.807.902	(133.422.568.596)
12	DITJEN PENDIDIKAN MENENGAH	8.992.076.275.656	8.120.619.103.364	25.663.603.669	8.094.955.499.695	(897.120.775.961)
13	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA	255.693.065.735	165.841.935.446	168.064.007	165.673.871.439	(90.019.194.296)
14	BADAN PSDMPK DAN PMP	2.840.393.639.437	2.678.634.101.135	27.943.918.938	2.650.690.182.197	(189.703.457.240)
15	DITJEN KEBUDAYAAN	1.118.066.250.615	642.945.091.881	70.755.000	642.874.336.881	(475.191.913.734)
024	KEMENTERIAN KESEHATAN	31.204.540.915.888	30.656.595.245.606	80.968.894.126	30.575.626.351.480	(628.914.564.408)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.422.314.516.597	2.376.727.324.948	4.249.051.118	2.372.478.273.830	(49.836.242.767)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	81.912.951.275	68.033.061.655	234.703.508	67.798.358.147	(14.114.593.128)
03	DITJEN BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK	1.989.297.579.307	1.841.431.811.741	14.833.669.071	1.826.598.142.670	(162.699.436.637)
04	DITJEN BINA UPAYA KESEHATAN	20.556.419.882.153	20.489.221.346.980	39.733.830.403	20.449.487.516.577	(106.932.365.576)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.233.048.144.965	1.507.680.544.010	1.349.992.442	1.506.330.551.568	273.282.406.603
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	1.665.538.705.654	1.538.272.479.940	5.528.228.641	1.532.744.251.299	(132.794.454.355)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	423.553.711.972	365.540.396.155	3.592.662.022	361.947.734.133	(61.605.977.839)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	2.832.455.423.965	2.469.688.280.177	11.446.756.921	2.458.241.523.256	(374.213.900.709)
025	KEMENTERIAN AGAMA	39.375.794.465.087	36.937.168.310.194	40.340.765.954	36.896.827.544.240	(2.478.966.920.847)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	2.036.272.804.367	1.802.744.980.293	7.225.907.369	1.795.519.072.924	(240.753.731.443)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	131.493.160.398	110.235.843.105	5.627.415.472	104.608.427.633	(26.884.732.765)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	2.670.132.928.345	2.652.653.631.034	6.503.923.405	2.646.149.707.629	(23.983.220.716)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	31.498.757.218.212	29.554.743.041.006	16.568.911.875	29.538.174.129.131	(1.960.583.089.081)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	941.126.659.654	885.701.287.126	446.228.575	885.255.058.551	(55.871.601.103)
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	527.904.309.220	527.695.663.248	82.447.300	527.613.215.948	(291.093.272)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	423.139.747.103	419.780.404.658	567.898.791	419.212.505.867	(3.927.241.236)
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	174.593.019.150	150.097.444.642	970.349.714	149.127.094.928	(25.465.924.222)
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	472.557.975.935	402.220.806.502	1.078.245.874	401.142.560.628	(71.415.415.307)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	499.816.642.703	431.295.208.580	1.269.437.579	430.025.771.001	(69.790.871.702)
026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.101.391.413.578	3.788.827.685.844	4.777.699.445	3.784.049.986.399	(317.341.427.179)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	368.483.262.699	351.333.344.848	564.150.067	350.769.194.781	(17.714.067.918)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	42.915.539.312	41.126.865.933	50.185.409	41.076.680.524	(1.838.858.788)
04	DITJEN PEMBINAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA	687.472.526.758	629.775.130.357	1.957.435.700	627.817.694.657	(59.654.832.101)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	183.305.783.414	162.746.258.823	713.432.759	162.032.826.064	(21.272.957.350)
06	DITJEN PEMBINAAN PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	796.150.131.054	724.779.043.422	961.389.599	723.817.653.823	(72.332.477.231)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	725.277.905.087	678.956.371.202	208.413.370	678.747.957.832	(46.529.947.255)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	349.653.714.368	335.724.638.634	33.127.913	335.691.510.721	(13.962.203.647)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	61.920.307.839	58.898.122.108	36.190.016	58.861.932.092	(3.058.375.747)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	886.212.243.047	805.487.910.517	253.374.612	805.234.535.905	(80.977.707.142)
027	KEMENTERIAN SOSIAL	4.549.943.266.966	4.433.305.023.777	10.817.476.179	4.422.487.547.598	(127.455.719.368)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	166.658.686.868	159.603.215.395	997.573.364	158.605.642.031	(8.053.044.837)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	24.595.553.241	20.541.997.096	210.701.230	20.331.295.866	(4.264.257.375)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	700.786.042.936	676.993.125.364	2.799.883.870	674.193.241.494	(26.592.801.442)
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	898.813.468.854	887.624.288.177	2.919.941.616	884.704.346.561	(14.109.122.293)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	2.564.870.573.290	2.498.925.642.723	3.162.890.728	2.495.762.751.995	(69.107.821.295)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	194.218.941.777	189.616.755.022	726.485.371	188.890.269.651	(5.328.672.126)
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	5.686.750.890.216	5.242.618.467.299	11.884.934.613	5.230.733.532.686	(456.017.357.530)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	397.171.478.802	436.551.329.072	1.375.654.785	435.175.674.287	38.004.195.485
02	INSPEKTORAT JENDERAL	53.370.911.756	52.510.182.805	942.359.326	51.567.823.479	(1.803.088.277)
03	DITJEN BINA USAHA KEHUTANAN	268.225.815.188	328.220.273.603	345.102.492	327.875.171.111	59.649.355.923
04	DITJEN BINA PENGELOLAAN DAS DAN PERHUTANAN SOSIAL	2.422.719.640.907	2.114.193.600.620	1.709.465.333	2.112.484.135.287	(310.235.505.620)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	1.460.856.539.517	1.300.245.848.050	3.473.874.159	1.296.771.973.891	(164.084.565.626)
06	DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN	622.486.193.917	560.156.760.205	2.695.733.024	557.461.027.181	(65.025.166.736)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	248.009.383.747	246.568.095.370	1.115.968.146	245.452.127.224	(2.557.256.523)
08	BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KEHUTANAN	213.910.926.382	204.172.377.574	226.777.348	203.945.600.226	(9.965.326.156)
032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	6.014.096.394.130	5.956.740.606.907	2.280.215.028	5.954.460.391.879	(59.636.002.251)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	370.071.833.081	374.268.294.494	309.400.071	373.958.894.423	3.887.061.342
02	INSPEKTORAT JENDERAL	56.221.651.592	60.190.485.277	1.370.556	60.189.114.721	3.967.463.129
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	1.393.424.419.295	1.380.834.767.388	184.410.987	1.380.650.356.401	(12.774.062.894)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	1.366.921.483.196	1.300.546.300.527	285.099.173	1.300.261.201.354	(66.660.281.842)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	475.227.659.694	498.698.899.247	279.801.534	498.419.097.713	23.191.438.019

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	515.221.555.288	529.681.843.684	377.280.488	529.304.563.196	14.083.007.908
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	542.797.277.247	558.065.261.389	169.076.584	557.896.184.805	15.098.907.558
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	488.287.706.712	395.612.169.277	140.336.961	395.471.832.316	(92.815.874.396)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	556.238.993.211	587.264.980.445	412.591.333	586.852.389.112	30.613.395.901
13	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN	249.683.814.814	271.577.605.179	120.847.341	271.456.757.838	21.772.943.024
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	74.977.141.416.592	68.034.160.447.120	52.583.066.975	67.981.577.380.145	(6.995.564.036.447)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	688.367.106.522	557.839.704.669	478.805.817	557.360.898.852	(131.006.207.670)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	120.648.104.455	71.501.272.767	1.093.767.060	70.407.505.707	(50.240.598.748)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	744.769.332.347	679.146.714.018	320.709.254	678.826.004.764	(65.943.327.583)
04	DITJEN BINA MARGA	40.058.230.143.377	36.656.416.154.840	36.654.994.603	36.619.761.160.237	(3.438.468.983.140)
05	DITJEN CIPTA KARYA	13.747.060.702.399	12.947.261.222.434	9.266.649.574	12.937.994.572.860	(809.066.129.539)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	18.951.644.870.972	16.509.790.989.755	3.648.987.917	16.506.142.001.838	(2.445.502.869.134)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	414.129.346.424	384.689.530.401	437.083.864	384.252.446.537	(29.876.899.887)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI	252.291.810.096	227.514.858.236	682.068.886	226.832.789.350	(25.459.020.746)
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	405.074.186.965	360.216.190.683	184.461.794	360.031.728.889	(45.042.458.076)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN	405.074.186.965	360.216.190.683	184.461.794	360.031.728.889	(45.042.458.076)
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	212.011.128.000	193.337.958.802	1.682.378.236	191.655.580.566	(20.355.547.434)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	212.011.128.000	193.337.958.802	1.682.378.236	191.655.580.566	(20.355.547.434)
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	222.316.596.002	221.120.483.624	455.239.303	220.665.244.321	(1.651.351.681)
01	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	222.316.596.002	221.120.483.624	455.239.303	220.665.244.321	(1.651.351.681)
040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	2.671.985.845.658	2.229.128.655.652	1.953.990.977	2.227.174.664.675	(444.811.180.983)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	186.794.409.253	173.039.802.222	127.199.509	172.912.602.713	(13.881.806.540)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	28.141.855.368	26.590.040.193	56.889.319	26.533.150.874	(1.608.704.494)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	262.158.253.012	228.246.444.632	541.266.146	227.705.178.486	(34.453.074.526)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	404.359.579.316	304.498.809.198	188.047.969	304.310.761.229	(100.048.818.087)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	337.310.587.686	306.538.728.561	295.488.914	306.243.239.647	(31.067.348.039)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	823.973.664.528	761.806.107.809	182.225.483	761.623.882.326	(62.349.782.202)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	326.567.739.545	286.289.071.510	111.637.047	286.177.434.463	(40.390.305.082)
11	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS SENI DAN BUDAYA	185.551.969.776	89.828.254.015	357.604.050	89.470.649.965	(96.081.319.811)
12	DITJEN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF BERBASIS MEDIA, DESAIN DAN IPTEK	117.127.787.174	52.291.397.512	93.632.540	52.197.764.972	(64.930.022.202)
041	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	111.264.511.000	94.254.976.479	898.700.948	93.356.275.531	(17.908.235.469)
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	111.264.511.000	94.254.976.479	898.700.948	93.356.275.531	(17.908.235.469)
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	639.772.648.041	652.511.450.468	2.991.147.022	649.520.303.446	9.747.655.405
01	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI	639.772.648.041	652.511.450.468	2.991.147.022	649.520.303.446	9.747.655.405
043	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	738.575.898.790	676.340.227.683	977.628.501	675.362.599.182	(63.213.299.608)
01	KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP	738.575.898.790	676.340.227.683	977.628.501	675.362.599.182	(63.213.299.608)
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.387.497.635.008	1.230.288.119.554	173.808.269	1.230.114.311.285	(157.383.323.723)
01	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM	1.387.497.635.008	1.230.288.119.554	173.808.269	1.230.114.311.285	(157.383.323.723)
047	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.942.141.967	156.461.293.260	1.264.777.360	155.196.515.900	4.254.373.933
01	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	150.942.141.967	156.461.293.260	1.264.777.360	155.196.515.900	4.254.373.933
048	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	131.432.479.979	110.738.030.717	877.410.100	109.860.620.617	(21.571.859.362)
01	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI	131.432.479.979	110.738.030.717	877.410.100	109.860.620.617	(21.571.859.362)
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.484.905.945.003	1.476.395.777.773	158.587.350	1.476.237.190.423	(8.668.754.580)
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.484.905.945.003	1.476.395.777.773	158.587.350	1.476.237.190.423	(8.668.754.580)
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.758.367.352.022	1.737.160.524.028	4.313.576.871	1.732.846.947.157	(25.520.404.865)
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	1.758.367.352.022	1.737.160.524.028	4.313.576.871	1.732.846.947.157	(25.520.404.865)
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	31.083.294.000	30.050.527.127	18.500.004	30.032.027.123	(1.051.266.877)
01	SETJEN DEWAN KETAHANAN NASIONAL	31.083.294.000	30.050.527.127	18.500.004	30.032.027.123	(1.051.266.877)
054	BADAN PUSAT STATISTIK	2.272.642.818.892	2.655.416.920.710	716.692.117	2.654.700.228.593	382.057.409.701
01	BADAN PUSAT STATISTIK	2.272.642.818.892	2.655.416.920.710	716.692.117	2.654.700.228.593	382.057.409.701
055	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	755.548.970.008	662.938.257.737	816.125.807	662.122.131.930	(93.426.838.078)
01	KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS	755.548.970.008	662.938.257.737	816.125.807	662.122.131.930	(93.426.838.078)
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.881.165.536.668	2.994.801.628.032	8.924.315.451	2.985.877.312.581	(895.288.224.087)
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	3.881.165.536.668	2.994.801.628.032	8.924.315.451	2.985.877.312.581	(895.288.224.087)
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	348.034.528.995	324.328.835.869	236.400.513	324.092.435.356	(23.942.093.639)
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	348.034.528.995	324.328.835.869	236.400.513	324.092.435.356	(23.942.093.639)
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.090.774.087.017	2.695.254.665.261	4.694.753.467	2.690.559.911.794	(400.214.175.223)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	SEKRETARIAT JENDERAL	200.218.694.108	186.622.509.917	99.671.354	186.522.838.563	(13.695.855.545)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	22.517.250.773	21.426.614.644	14.529.352	21.412.085.292	(1.105.165.481)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	714.154.839.762	645.842.098.863	2.128.501.267	643.713.597.596	(70.441.242.166)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	150.278.462.018	148.368.864.853	307.023.736	148.061.841.117	(2.216.620.901)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	1.722.597.407.425	1.419.365.945.060	1.521.439.599	1.417.844.505.461	(304.752.901.964)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	138.396.325.805	136.092.758.268	597.699.648	135.495.058.620	(2.901.267.185)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	142.611.107.126	137.535.873.656	25.888.511	137.509.985.145	(5.101.121.981)
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.892.864.760.463	39.522.186.057.385	14.189.638.026	39.507.996.419.359	(2.384.868.341.104)
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	41.892.864.760.463	39.522.186.057.385	14.189.638.026	39.507.996.419.359	(2.384.868.341.104)
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.079.662.936.031	1.115.407.250.703	7.314.303.652	1.108.092.947.051	28.430.011.020
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	1.079.662.936.031	1.115.407.250.703	7.314.303.652	1.108.092.947.051	28.430.011.020
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	174.236.482.994	227.729.953.963	137.204.880	227.592.749.083	53.356.266.089
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	174.236.482.994	227.729.953.963	137.204.880	227.592.749.083	53.356.266.089
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	650.695.975.998	572.233.803.769	3.778.244.751	568.455.559.018	(82.240.416.980)
01	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	650.695.975.998	572.233.803.769	3.778.244.751	568.455.559.018	(82.240.416.980)
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	841.045.305.304	861.661.421.971	2.658.629.646	859.002.792.325	17.957.487.021
01	PELAKSANA HARIAN BNN	841.045.305.304	861.661.421.971	2.658.629.646	859.002.792.325	17.957.487.021
067	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.153.826.455.011	1.150.276.431.820	357.257.300	1.149.919.174.520	(3.907.280.491)
01	KEMENTERIAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.153.826.455.011	1.150.276.431.820	357.257.300	1.149.919.174.520	(3.907.280.491)
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.110.109.878.368	2.215.737.660.387	2.053.978.267	2.213.683.682.120	103.573.803.752
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	2.110.109.878.368	2.215.737.660.387	2.053.978.267	2.213.683.682.120	103.573.803.752
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53.655.792.988	58.119.623.758	196.393.432	57.923.230.326	4.267.437.338
01	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53.655.792.988	58.119.623.758	196.393.432	57.923.230.326	4.267.437.338
075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.283.960.282.079	1.135.189.946.483	233.554.406	1.134.956.392.077	(149.003.890.002)
01	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA	1.283.960.282.079	1.135.189.946.483	233.554.406	1.134.956.392.077	(149.003.890.002)
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.625.211.541.000	1.114.826.046.094	1.902.931.733	1.112.923.114.361	(512.288.426.639)
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	1.625.211.541.000	1.114.826.046.094	1.902.931.733	1.112.923.114.361	(512.288.426.639)
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	221.821.484.999	220.413.004.538	111.945.001	220.301.059.537	(1.520.425.462)
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	221.821.484.999	220.413.004.538	111.945.001	220.301.059.537	(1.520.425.462)
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	73.079.235.996	56.401.804.173	281.280.285	56.120.523.888	(16.958.712.108)
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	73.079.235.996	56.401.804.173	281.280.285	56.120.523.888	(16.958.712.108)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	761.721.510.026	975.731.274.505	712.586.708	975.018.687.797	213.297.177.771
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	761.721.510.026	975.731.274.505	712.586.708	975.018.687.797	213.297.177.771
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	637.120.187.015	731.087.996.357	903.521.749	730.184.474.608	93.064.287.593
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	637.120.187.015	731.087.996.357	903.521.749	730.184.474.608	93.064.287.593
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	808.565.170.962	896.869.445.813	865.600.316	896.003.845.497	87.438.674.535
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	808.565.170.962	896.869.445.813	865.600.316	896.003.845.497	87.438.674.535
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	491.863.242.009	455.281.524.234	194.715.545	455.086.808.689	(36.776.433.320)
01	L A P A N	491.863.242.009	455.281.524.234	194.715.545	455.086.808.689	(36.776.433.320)
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	535.855.833.022	494.269.193.174	1.056.694.262	493.212.498.912	(42.643.334.110)
01	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	535.855.833.022	494.269.193.174	1.056.694.262	493.212.498.912	(42.643.334.110)
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	74.225.720.004	72.598.306.074	321.909.342	72.276.396.732	(1.949.323.272)
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	74.225.720.004	72.598.306.074	321.909.342	72.276.396.732	(1.949.323.272)
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	72.033.796.003	71.413.170.260	340.414.255	71.072.756.005	(961.039.998)
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	72.033.796.003	71.413.170.260	340.414.255	71.072.756.005	(961.039.998)
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	243.628.823.030	239.862.616.700	202.548.873	239.660.067.827	(3.968.755.203)
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	243.628.823.030	239.862.616.700	202.548.873	239.660.067.827	(3.968.755.203)
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	130.253.531.998	123.087.305.572	914.877.932	122.172.427.640	(8.081.104.358)
01	ARSIP NASIONAL	130.253.531.998	123.087.305.572	914.877.932	122.172.427.640	(8.081.104.358)
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	486.857.204.904	493.380.630.272	3.723.071.373	489.657.558.899	2.800.353.995
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	486.857.204.904	493.380.630.272	3.723.071.373	489.657.558.899	2.800.353.995
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.050.465.880.974	1.006.703.734.087	4.611.412.076	1.002.092.322.011	(48.373.558.963)
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.050.465.880.974	1.006.703.734.087	4.611.412.076	1.002.092.322.011	(48.373.558.963)
090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	2.441.533.073.178	2.180.074.856.476	3.748.136.229	2.176.326.720.247	(265.206.352.931)
01	SEKRETARIAT JENDERAL	489.444.321.955	404.394.435.376	959.424.476	403.435.010.900	(86.009.311.055)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	943.493.873.618	912.015.754.022	551.989.113	911.463.764.909	(32.030.108.709)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	175.545.579.235	158.311.659.154	240.863.656	158.070.795.498	(17.474.783.737)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	108.997.513.738	87.394.188.654	42.511.971	87.351.676.683	(21.645.837.055)
05	INSPEKTORAT JENDERAL	35.519.880.078	31.574.096.161	43.640.785	31.530.455.376	(3.989.424.702)
06	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	316.028.894.163	257.323.613.959	70.704.094	257.252.909.865	(58.775.984.298)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	115.230.796.254	100.901.255.006	575.529	100.900.679.477	(14.330.116.777)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	65.810.624.832	62.727.645.933	190.922.442	62.536.723.491	(3.273.901.341)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
09	DIREKTORAT JENDERAL STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	191.461.589.305	165.432.208.211	1.647.504.163	163.784.704.048	(27.676.885.257)
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	5.928.455.012.998	4.002.254.786.092	2.395.603.653	3.999.859.182.439	(1.928.595.830.559)
01	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	5.928.455.012.998	4.002.254.786.092	2.395.603.653	3.999.859.182.439	(1.928.595.830.559)
092	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.757.949.581.017	954.843.091.590	143.118.227	954.699.973.363	(803.249.607.654)
01	KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAH RAGA	1.757.949.581.017	954.843.091.590	143.118.227	954.699.973.363	(803.249.607.654)
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	634.537.942.995	337.025.581.434	1.450.693.911	335.574.887.523	(298.963.055.472)
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	634.537.942.995	337.025.581.434	1.450.693.911	335.574.887.523	(298.963.055.472)
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	589.847.420.000	523.451.412.163	5.619.302.986	517.832.109.177	(72.015.310.823)
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	383.290.420.000	330.185.119.007	177.491.544	330.007.627.463	(53.282.792.537)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	206.557.000.000	193.266.293.156	5.441.811.442	187.824.481.714	(18.732.518.286)
100	KOMISI YUDISIAL RI	77.446.170.003	75.873.971.639	144.476.671	75.729.494.968	(1.716.675.035)
01	KOMISI YUDISIAL RI	77.446.170.003	75.873.971.639	144.476.671	75.729.494.968	(1.716.675.035)
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.128.245.351.988	1.360.111.505.577	17.176.792.196	1.342.934.713.381	214.689.361.393
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	1.128.245.351.988	1.360.111.505.577	17.176.792.196	1.342.934.713.381	214.689.361.393
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	265.850.617.539	248.215.534.254	731.418.767	247.484.115.487	(18.366.502.052)
01	SEKRETARIAT UTAMA BNP2TKI	265.850.617.539	248.215.534.254	731.418.767	247.484.115.487	(18.366.502.052)
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.533.349.012.002	1.066.252.811.140	5.187.700	1.066.247.623.440	(467.101.388.562)
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	1.533.349.012.002	1.066.252.811.140	5.187.700	1.066.247.623.440	(467.101.388.562)
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	183.410.797.001	150.951.244.112	1.357.583.850	149.593.660.262	(33.817.136.739)
01	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	183.410.797.001	150.951.244.112	1.357.583.850	149.593.660.262	(33.817.136.739)
107	BADAN SAR NASIONAL	992.107.725.008	970.423.798.058	178.419.304	970.245.378.754	(21.862.346.254)
01	BADAN SAR NASIONAL	992.107.725.008	970.423.798.058	178.419.304	970.245.378.754	(21.862.346.254)
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113.509.824.995	99.335.166.022	1.253.469.907	98.081.696.115	(15.428.128.880)
01	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	113.509.824.995	99.335.166.022	1.253.469.907	98.081.696.115	(15.428.128.880)
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	268.176.234.000	100.493.262.353	510.822.660	99.982.439.693	(168.193.794.307)
01	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	268.176.234.000	100.493.262.353	510.822.660	99.982.439.693	(168.193.794.307)
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	58.754.884.000	52.597.146.961	-	52.597.146.961	(6.157.737.039)
01	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	58.754.884.000	52.597.146.961	-	52.597.146.961	(6.157.737.039)
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	197.741.693.000	141.248.675.577	2.129.992.224	139.118.683.353	(58.623.009.647)
01	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	197.741.693.000	141.248.675.577	2.129.992.224	139.118.683.353	(58.623.009.647)
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	735.338.350.000	704.255.425.538	-	704.255.425.538	(31.082.924.462)
01	BPKPB BATAM	735.338.350.000	704.255.425.538	-	704.255.425.538	(31.082.924.462)
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	92.767.667.002	89.690.271.043	117.224.538	89.573.046.505	(3.194.620.497)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	92.767.667.002	89.690.271.043	117.224.538	89.573.046.505	(3.194.620.497)
114	SEKRETARIAT KABINET	197.199.119.000	138.221.656.856	567.824.827	137.653.832.029	(59.545.286.971)
01	SEKRETARIAT KABINET	197.199.119.000	138.221.656.856	567.824.827	137.653.832.029	(59.545.286.971)
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	53.088.318.995	125.176.710.067	1.171.630.583	124.005.079.484	70.916.760.489
01	SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	53.088.318.995	125.176.710.067	1.171.630.583	124.005.079.484	70.916.760.489
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	768.987.633.000	676.925.430.073	405.997.568	676.519.432.505	(92.468.200.495)
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	768.987.633.000	676.925.430.073	405.997.568	676.519.432.505	(92.468.200.495)
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	753.207.879.000	717.070.898.087	401.098.754	716.669.799.333	(36.538.079.667)
01	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	753.207.879.000	717.070.898.087	401.098.754	716.669.799.333	(36.538.079.667)
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	392.200.000.000	341.507.084.915	34.063.839	341.473.021.076	(50.726.978.924)
01	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	392.200.000.000	341.507.084.915	34.063.839	341.473.021.076	(50.726.978.924)
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	521.216.698.831.000	520.756.850.868.219	265.379.723.304	520.491.471.144.915	(725.227.686.085)
01	PENGELOLA UTANG PEMERINTAH	117.785.423.800.000	99.900.359.527.593		99.900.359.527.593	(17.885.064.272.407)
02	PENGELOLA HIBAH	1.790.936.805.000	75.913.809.154	834.515.600	75.079.293.554	(1.715.857.511.446)
07	PENGELOLA BELANJA SUBSIDI	245.076.318.862.000	346.420.404.182.332		346.420.404.182.332	101.344.085.320.332
08	PENGELOLA BELANJA LAINNYA	156.564.019.364.000	3.600.734.516.076	11.692.364.098	3.589.042.151.978	(152.974.977.212.022)
99	TRANSAKSI KHUSUS		70.759.438.833.064	252.852.843.606	70.506.585.989.458	70.506.585.989.458
		1.069.534.444.947.000	1.014.900.841.961.928	4.342.605.430.114	1.010.558.236.531.814	(58.976.208.415.186)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Lain-lain	Total Belanja
		51	52	53	54	55	56	57	58	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	21.334.376.879	490.553.547.036	10.323.182.363	-	-	-	-	-	522.211.106.278
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	484.260.746.152	1.488.968.825.938	43.156.996.599	-	-	-	-	-	2.016.386.568.689
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	705.421.456.402	1.055.419.843.825	487.433.212.129	-	-	-	-	-	2.248.274.512.356
005	MAHKAMAH AGUNG	3.043.287.571.306	864.451.535.160	890.324.387.229	-	-	-	-	-	4.798.063.493.695
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.728.904.964.392	1.182.055.069.838	613.839.410.526	-	-	-	-	-	3.524.799.444.756
007	SEKRETARIAT NEGARA	297.814.711.220	1.111.338.743.158	213.524.373.988	-	-	-	-	-	1.622.677.828.366
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	337.544.033.605	4.944.979.407.981	2.184.091.883.109	-	-	-	9.300.586.207.911	-	16.767.201.532.606
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	1.851.100.396.774	2.067.827.308.059	198.912.942.340	-	-	-	-	-	4.117.840.647.173
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	33.304.770.948.454	11.268.154.671.820	16.732.424.005.288	-	-	-	-	-	61.305.349.625.562
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.109.062.289.598	2.272.856.757.806	845.330.392.605	-	-	-	-	-	6.227.249.440.009
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	7.976.346.217.823	6.097.847.421.003	1.635.619.657.094	615.634.747.251	-	-	-	-	16.325.448.043.171
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	1.834.934.179.103	6.930.444.964.931	844.481.985.364	-	-	-	8.637.193.118.453	-	18.247.054.247.851
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	525.526.414.439	1.477.005.402.629	690.642.836.271	-	-	-	-	-	2.693.174.653.339
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	522.830.845.259	3.328.089.386.151	6.036.052.276.173	-	-	-	-	-	9.886.972.507.583
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.441.874.025.790	5.365.872.795.980	23.275.868.186.164	-	-	-	-	-	30.083.615.007.934
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	8.960.543.020.777	19.436.013.693.494	8.992.288.656.106	-	-	-	30.196.569.643.443	-	67.585.415.013.820
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	4.022.360.273.490	12.710.114.947.894	6.717.151.919.445	-	-	-	7.125.999.210.651	-	30.575.626.351.480
025	DEPARTEMEN AGAMA	18.313.168.924.920	7.087.724.850.172	2.682.712.800.889	-	-	-	8.813.220.968.259	-	36.896.827.544.240
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	259.772.856.168	2.756.025.811.418	742.508.492.013	-	-	-	25.742.826.800	-	3.784.049.986.399
027	DEPARTEMEN SOSIAL	226.594.074.088	1.273.217.575.369	208.770.736.019	-	-	-	2.713.905.162.122	-	4.422.487.547.598
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	862.388.582.937	3.808.151.311.264	460.241.988.485	-	-	-	99.951.650.000	-	5.230.733.532.686
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	514.177.428.079	3.543.717.580.649	1.112.173.129.236	-	-	-	784.392.253.915	-	5.954.460.391.879
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.189.835.121.091	8.245.876.122.103	54.337.834.591.006	-	-	-	4.202.812.593.352	5.218.952.593	67.981.577.380.145
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	38.634.424.533	191.218.698.956	130.178.605.400	-	-	-	-	-	360.031.728.889
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	33.254.145.143	152.055.432.088	6.346.003.335	-	-	-	-	-	191.655.580.566
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	30.702.406.662	133.698.862.788	56.263.974.871	-	-	-	-	-	220.665.244.321
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	300.272.652.762	1.673.735.320.065	168.146.691.848	-	-	-	85.020.000.000	-	2.227.174.664.675
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	17.196.445.568	71.895.823.960	4.264.006.003	-	-	-	-	-	93.356.275.531
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	65.678.546.899	271.759.611.555	312.082.144.992	-	-	-	-	-	649.520.303.446
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	53.384.996.518	598.876.664.446	23.100.938.218	-	-	-	-	-	675.362.599.182
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	48.767.946.623	855.261.181.616	155.179.896.864	-	-	-	170.905.286.182	-	1.230.114.311.285
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	30.893.626.112	120.854.602.683	2.078.667.105	-	-	-	1.369.620.000	-	155.196.515.900
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	34.136.621.282	62.002.360.307	13.721.639.028	-	-	-	-	-	109.860.620.617
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	77.252.577.476	1.189.585.599.734	209.399.013.213	-	-	-	-	-	1.476.237.190.423
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	71.071.473.061	109.607.007.400	1.552.168.466.696	-	-	-	-	-	1.732.846.947.157
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	6.516.778.630	21.158.202.503	2.357.045.990	-	-	-	-	-	30.032.027.123
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.257.261.701.512	973.857.023.405	423.581.503.676	-	-	-	-	-	2.654.700.228.593
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	94.618.413.943	537.330.195.028	30.173.522.959	-	-	-	-	-	662.122.131.930
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.072.707.488.560	1.660.861.900.977	252.307.923.044	-	-	-	-	-	2.985.877.312.581
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	40.819.615.090	267.122.459.226	16.150.361.040	-	-	-	-	-	324.092.435.356
059	KEMENTERIAN KOMINFO	194.671.428.808	2.265.099.225.286	230.789.257.700	-	-	-	-	-	2.690.559.911.794
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	27.725.615.631.782	7.223.139.986.214	4.559.240.801.363	-	-	-	-	-	39.507.996.419.359
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	321.843.140.264	465.039.772.471	321.210.034.316	-	-	-	-	-	1.108.092.947.051

KODE BA	URAIAN BA	Belanja Pegawai 51	Belanja Barang 52	Belanja Modal 53	Bunga Utang 54	Belanja Subsidi 55	Belanja Hibah 56	Belanja Bansos 57	Lain-lain 58	Total Belanja
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	52.943.808.511	81.401.149.249	93.247.791.323	-	-	-	-	-	227.592.749.083
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	60.916.374.615	432.536.071.300	75.003.113.103	-	-	-	-	-	568.455.559.018
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	105.318.745.327	524.876.308.117	228.807.738.881	-	-	-	-	-	859.002.792.325
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	17.734.597.609	386.007.259.556	2.314.444.500	-	-	-	743.862.872.855	-	1.149.919.174.520
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	333.162.648.174	1.806.774.668.733	73.746.365.213	-	-	-	-	-	2.213.683.682.120
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	19.462.644.082	36.139.433.124	2.321.153.120	-	-	-	-	-	57.923.230.326
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	207.188.061.754	487.128.822.441	440.639.507.882	-	-	-	-	-	1.134.956.392.077
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	345.085.290.237	583.403.821.580	184.434.002.544	-	-	-	-	-	1.112.923.114.361
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	12.323.083.840	158.396.121.781	49.581.853.916	-	-	-	-	-	220.301.059.537
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	21.063.416.396	25.156.647.793	9.900.459.699	-	-	-	-	-	56.120.523.888
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	434.348.550.289	300.845.880.346	239.824.257.162	-	-	-	-	-	975.018.687.797
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	334.037.753.986	207.179.822.268	188.966.898.354	-	-	-	-	-	730.184.474.608
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	288.676.267.461	325.239.517.309	282.088.060.727	-	-	-	-	-	896.003.845.497
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	68.435.569.975	181.791.421.417	204.859.817.297	-	-	-	-	-	455.086.808.689
083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	34.972.328.992	147.947.649.379	310.292.520.541	-	-	-	-	-	493.212.498.912
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	13.065.563.589	57.946.184.643	1.264.648.500	-	-	-	-	-	72.276.396.732
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	25.811.179.701	35.740.156.429	9.521.419.875	-	-	-	-	-	71.072.756.005
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	72.578.066.860	139.566.658.335	27.515.342.632	-	-	-	-	-	239.660.067.827
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	50.065.592.333	62.624.676.422	9.482.158.885	-	-	-	-	-	122.172.427.640
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	255.357.879.202	165.265.807.654	69.033.872.043	-	-	-	-	-	489.657.558.899
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	554.985.712.146	403.701.289.599	43.405.320.266	-	-	-	-	-	1.002.092.322.011
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	198.765.211.821	1.308.671.024.350	668.890.484.076	-	-	-	-	-	2.176.326.720.247
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	48.123.028.781	1.054.747.238.939	1.101.649.346.218	-	-	-	1.795.339.568.501	-	3.999.859.182.439
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	33.711.074.611	561.137.373.241	9.777.281.100	-	-	-	350.074.244.411	-	954.699.973.363
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	192.409.373.009	115.747.817.201	27.417.697.313	-	-	-	-	-	335.574.887.523
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	247.673.062.646	264.698.020.130	5.461.026.401	-	-	-	-	-	517.832.109.177
100	KOMISI YUDISIAL RI	8.742.781.026	63.773.494.771	3.213.219.171	-	-	-	-	-	75.729.494.968
103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	14.175.417.809	816.916.520.270	73.266.498.681	-	-	-	438.576.276.621	-	1.342.934.713.381
104	BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI	42.003.645.987	190.268.570.240	15.211.899.260	-	-	-	-	-	247.484.115.487
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	12.882.949.300	87.576.736.336	929.259.957.804	-	-	-	36.527.980.000	-	1.066.247.623.440
106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	14.648.547.369	83.982.700.786	50.962.412.107	-	-	-	-	-	149.593.660.262
107	BADAN SAR NASIONAL	133.349.628.245	306.565.020.457	530.330.730.052	-	-	-	-	-	970.245.378.754
108	KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA	21.682.495.000	69.950.997.742	6.448.203.373	-	-	-	-	-	98.081.696.115
109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU (BPWS)	5.760.450.000	56.753.585.538	37.468.404.155	-	-	-	-	-	99.982.439.693
110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	8.607.429.095	31.740.558.959	12.249.158.907	-	-	-	-	-	52.597.146.961
111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	4.593.179.320	88.804.872.713	45.720.631.320	-	-	-	-	-	139.118.683.353
112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	546.525.998.524	157.729.427.014	-	-	-	-	-	704.255.425.538
113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	5.212.363.591	78.175.527.193	6.185.155.721	-	-	-	-	-	89.573.046.505
114	SEKRETARIAT KABINET	67.278.420.314	65.858.023.895	4.517.387.820	-	-	-	-	-	137.653.832.029
115	BADAN PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM	1.002.343.400	111.987.675.200	11.015.060.884	-	-	-	-	-	124.005.079.484
116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	307.675.435.402	323.510.985.299	45.333.011.804	-	-	-	-	-	676.519.432.505
117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	209.854.821.186	441.337.685.114	65.477.293.033	-	-	-	-	-	716.669.799.333
118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	-	15.608.099.002	325.864.922.074	-	-	-	-	-	341.473.021.076
999	BENDAHARA UMUM NEGARA	69.928.727.503.270	-	-	99.900.359.527.593	346.420.404.182.332	75.079.293.554	99.007.655.519	4.067.892.982.647	520.491.471.144.915
	JUMLAH	197.863.565.816.235	140.884.875.397.761	145.104.148.492.853	100.515.994.274.844	346.420.404.182.332	75.079.293.554	75.621.057.138.995	4.073.111.935.240	1.010.558.236.531.814

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2012
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	PELAYANAN UMUM	656.824.991.747.365	648.159.206.908.002	480.073.220.737	647.679.133.687.265	(9.145.858.060.100)
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN	110.866.113.072.647	105.145.485.103.424	161.165.647.972	104.984.319.455.452	(5.881.793.617.195)
01.03	PELAYANAN UMUM	13.514.357.989.932	12.524.849.167.786	39.451.092.489	12.485.398.075.297	(1.028.959.914.635)
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	2.349.227.437.416	2.536.278.471.061	5.594.170.696	2.530.684.300.365	181.456.862.949
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	117.871.285.807.778	99.978.645.539.520	208.750.812	99.978.436.788.708	(17.892.849.019.070)
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	1.872.698.775.673	1.790.464.734.292	2.563.191.091	1.787.901.543.201	(84.797.232.472)
01.07	LITBANG PELAYANANAN UMUM	178.589.953.790	168.542.832.110	518.966.397	168.023.865.713	(10.566.088.077)
01.90	PELAYANAN UMUM LAINNYA	410.172.718.710.129	425.978.453.366.338	270.560.191.280	425.707.893.175.058	15.535.174.464.929
01.08	SUBFUNGSI TIDAK ADA		36.475.665.571	11.210.000	36.464.455.571	36.464.455.571
01.09	SUBFUNGSI TIDAK ADA		12.027.900	-	12.027.900	12.027.900
02	PERTAHANAN	72.858.578.721.584	64.565.572.448.162	3.338.715.986.312	61.226.856.461.850	(11.631.722.259.734)
02.01	PERTAHANAN NEGARA	52.328.077.332.233	50.970.744.649.321	93.719.283.655	50.877.025.365.666	(1.451.051.966.567)
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	20.368.819.102.477	13.428.936.052.118	3.240.243.876.410	10.188.692.175.708	(10.180.126.926.769)
02.04	LITBANG PERTAHANAN	161.682.286.874	165.891.746.723	4.752.826.247	161.138.920.476	(543.366.398)
03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN	33.102.022.813.087	29.140.780.780.541	44.299.554.317	29.096.481.226.224	(4.005.541.586.863)
03.01	KEPOLISIAN	20.357.941.349.895	17.006.924.012.370	9.927.730.931	16.996.996.281.439	(3.360.945.068.456)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	1.128.245.351.988	1.360.111.505.577	17.186.393.596	1.342.925.111.981	214.679.759.993
03.03	PEMBINAAN HUKUM	2.990.075.058.107	2.457.400.304.650	7.221.590.052	2.450.178.714.598	(539.896.343.509)
03.04	PERADILAN	5.115.475.918.828	4.863.281.923.393	5.511.650.825	4.857.770.272.568	(257.705.646.260)
03.06	LITBANG KETERTIBAN DAN KEAMANAN	16.605.069.190	16.355.398.886	23.902.574	16.331.496.312	(273.572.878)
03.90	KETERTIBAN DAN KEAMANAN LAINNYA	3.493.680.065.079	3.436.707.635.665	4.428.286.339	3.432.279.349.326	(61.400.715.753)
04	EKONOMI	122.206.005.613.147	105.651.016.957.031	76.469.805.021	105.574.547.152.010	(16.631.458.461.137)
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI DAN UKM	2.921.226.319.186	2.668.914.901.217	3.546.404.540	2.665.368.496.677	(255.857.822.509)
04.02	TENAGA KERJA	1.759.436.727.852	1.627.762.100.378	3.388.856.907	1.624.373.243.471	(135.063.484.381)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	18.251.380.734.442	19.405.486.970.394	13.693.773.607	19.391.793.196.787	1.140.412.462.345
04.04	PENGAIRAN	892.848.700.472	681.083.546.485	163.218.200	680.920.328.285	(211.928.372.187)
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	11.957.200.841.149	6.547.400.744.822	549.891.078	6.546.850.853.744	(5.410.349.987.405)
04.06	PERTAMBANGAN	1.746.782.301.469	1.096.683.600.462	1.453.276.626	1.095.230.323.836	(651.551.977.633)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	1.964.152.091.744	2.170.780.847.656	1.925.116.090	2.168.855.731.566	204.703.639.822
04.08	TRANSPORTASI	73.518.909.529.214	62.618.039.774.690	41.254.679.935	62.576.785.094.755	(10.942.124.434.459)
04.09	TELEKOMUNIKASI	2.000.000.000	231.021.183.934	41.541.870	230.979.642.064	228.979.642.064
04.10	LITBANG EKONOMI	3.064.760.042.529	3.254.030.199.597	4.151.555.730	3.249.878.643.867	185.118.601.338
04.90	EKONOMI LAINNYA	6.127.308.325.090	5.349.813.087.396	6.301.490.438	5.343.511.596.958	(783.796.728.132)
05	LINGKUNGAN HIDUP	10.673.674.261.208	8.826.520.156.781	12.388.303.619	8.814.131.853.162	(1.859.542.408.046)
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	2.764.536.632.886	2.155.954.726.365	147.535.800	2.155.807.190.565	(608.729.442.321)
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	163.298.014.770	144.526.992.633	85.693.609	144.441.299.024	(18.856.715.746)
05.04	KONSERVASI SUMBERDAYA ALAM	4.009.977.211.733	3.564.863.848.751	4.285.981.518	3.560.577.867.233	(449.399.344.500)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	3.216.374.736.020	2.541.640.566.539	6.725.601.649	2.534.914.964.890	(681.459.771.130)
05.90	LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	519.487.665.799	419.534.022.493	1.143.491.043	418.390.531.450	(101.097.134.349)
06	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM	28.464.614.157.650	26.454.914.558.307	14.024.602.693	26.440.889.955.614	(2.023.724.202.036)
06.01	PEMBANGUNAN PERUMAHAN	4.434.977.008.201	3.051.072.569.662	2.252.432.165	3.048.820.137.497	(1.386.156.870.704)
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERMUKIMAN	4.049.467.001.858	3.458.703.675.049	149.995.644	3.458.553.679.405	(590.913.322.453)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	3.729.634.720.387	3.692.150.659.406	191.440.046	3.691.959.219.360	(37.675.501.027)
06.90	PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM LAINNYA	16.250.535.427.204	16.252.987.654.190	11.430.734.838	16.241.556.919.352	(8.978.507.852)
07	KESEHATAN	15.210.936.596.791	15.237.085.202.620	55.382.511.626	15.181.702.690.994	(29.233.905.797)
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	2.695.453.531.884	2.606.924.954.614	11.069.181.626	2.595.855.772.988	(99.597.758.896)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	8.650.610.704.781	8.476.593.158.299	30.310.998.138	8.446.282.160.161	(204.328.544.620)
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	1.188.246.167.001	1.471.595.170.762	3.480.331.306	1.468.114.839.456	279.868.672.455
07.04	KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA	2.110.109.878.368	2.215.737.660.387	2.053.978.267	2.213.683.682.120	103.573.803.752
07.05	LITBANG KESEHATAN	319.874.939.125	280.445.696.824	2.521.650.518	277.924.046.306	(41.950.892.819)
07.90	KESEHATAN LAINNYA	246.641.375.632	185.788.561.734	5.946.371.771	179.842.189.963	(66.799.185.669)
08	PARIWISATA DAN BUDAYA	3.106.944.475.517	2.518.217.242.613	1.891.278.617	2.516.325.963.996	(590.618.511.521)
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA	1.566.268.331.474	1.536.353.064.210	1.514.721.361	1.534.838.342.849	(31.429.988.625)
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	7.432.895.531	6.991.985.653	-	6.991.985.653	(440.909.878)
08.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PARIWISATA	78.694.185.743	62.749.239.491	37.595.009	62.711.644.482	(15.982.541.261)
08.05	PEMBINAAN OLAHRAGA PRESTASI	640.491.417.159	483.966.691.478	4.612.350	483.962.079.128	(156.529.338.031)
08.90	PARIWISATA LAINNYA	814.057.645.610	428.156.261.781	334.349.897	427.821.911.884	(386.235.733.726)
09	AGAMA	3.537.620.481.125	3.428.569.671.820	8.893.632.573	3.419.676.039.247	(117.944.441.878)
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	916.957.951.483	822.107.926.228	2.967.367.525	819.140.558.703	(97.817.392.780)
09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	62.145.255.420	58.686.626.774	872.330.290	57.814.296.484	(4.330.958.936)
09.03	LITBANG AGAMA	1.658.136.128.392	1.800.406.732.111	2.095.593.218	1.798.311.138.893	140.175.010.501
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	900.381.145.830	719.554.034.015	2.902.572.040	716.651.461.975	(183.729.683.855)
09.08			27.814.352.692	55.769.500	27.758.583.192	27.758.583.192

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
10	PENDIDIKAN	118.015.850.517.446	105.500.034.096.167	292.486.571.354	105.207.547.524.813	(12.808.302.992.633)
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	261.627.280.480	244.697.399.217	1.738.450.695	242.958.948.522	(18.668.331.958)
10.02	PENDIDIKAN DASAR	32.144.560.985.559	28.959.027.786.152	148.612.471.015	28.810.415.315.137	(3.334.145.670.422)
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	9.171.847.151.539	8.312.822.356.189	25.910.773.382	8.286.911.582.807	(884.935.568.732)
10.04	PENDIDIKAN NON-FORMAL DAN INFORMAL	3.671.158.758.884	3.463.824.113.255	26.244.487.422	3.437.579.625.833	(233.579.133.051)
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	602.236.655.830	587.037.483.713	498.946.222	586.538.537.491	(15.698.118.339)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	45.667.797.724.369	38.734.891.543.538	21.935.985.442	38.712.955.558.096	(6.954.842.166.273)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	4.527.904.043.443	3.968.614.259.095	42.273.271.709	3.926.340.987.386	(601.563.056.057)
10.08	PENDIDIKAN KEAGAMAAN	3.282.203.241.613	3.053.730.249.710	4.146.714.441	3.049.583.535.269	(232.619.706.344)
10.09	LITBANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	1.278.073.376.498	1.151.456.936.196	10.456.623.994	1.141.000.312.202	(137.073.064.296)
10.10	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	929.110.281.020	304.261.215.849	32.715.800	304.228.500.049	(624.881.780.971)
10.90	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN LAINNYA	16.479.331.018.211	16.076.725.661.372	10.565.376.232	16.066.160.285.140	(413.170.733.071)
10.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA		642.945.091.881	70.755.000	642.874.336.881	642.874.336.881
11	PERLINDUNGAN SOSIAL	5.533.205.562.080	5.091.543.452.917	10.029.191.840	5.081.514.261.077	(451.691.301.003)
11.01	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ORANG SAKIT DAN CACAT	304.404.328.385	301.244.450.204	1.484.334.490	299.760.115.714	(4.644.212.671)
11.02	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL LANSIA	137.158.398.899	135.567.154.303	37.635.471	135.529.518.832	(1.628.880.067)
11.04	PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN SOSIAL ANAK-ANAK DAN KELUARGA	475.194.905.559	472.127.017.395	1.559.870.131	470.567.147.264	(4.627.758.295)
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	116.083.795.118	118.121.200.872	1.204.795.560	116.916.405.312	832.610.194
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	31.644.698.979	27.877.350.110	33.261.400	27.844.088.710	(3.800.610.269)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	226.627.125.964	225.262.481.355	253.588.752	225.008.892.603	(1.618.233.361)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	4.242.092.309.176	3.811.343.798.678	5.455.706.036	3.805.888.092.642	(436.204.216.534)
00.00	Fungsi Subfungsi Tidak Ada		327.380.486.967	7.950.771.405	319.429.715.562	319.429.715.562
JUMLAH		1.069.534.444.947.000	1.014.900.841.961.928	4.342.605.430.114	1.010.558.236.531.814	(58.976.208.415.186)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)

No.	Wilayah	Dana Bagi Hasil				DAU	DAK	Total Dana Perimbangan
		Pajak	SDA	Cukai	Jumlah			
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5	7	8	9 = 6 + 7 + 8
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	1.172.109.772.061	1.656.492.219.314	6.955.960.332	2.835.557.951.707	10.257.062.953.000	932.016.550.000	14.024.637.454.707
2	Provinsi Sumatera Utara	1.794.936.433.289	74.202.872.206	14.525.881.833	1.883.665.187.328	16.408.691.459.000	1.535.920.128.000	19.828.276.774.328
3	Provinsi Sumatera Barat	705.854.372.249	67.391.195.809	8.257.962.252	781.503.530.310	9.226.584.083.000	820.249.293.000	10.828.336.906.310
4	Provinsi Riau	2.163.416.511.993	14.035.559.332.572	-	16.198.975.844.565	5.316.669.142.000	380.450.955.000	21.896.095.941.565
5	Provinsi Kepulauan Riau	864.682.142.365	4.265.676.063.695	-	5.130.358.206.060	2.158.221.170.000	166.924.085.000	7.455.503.461.060
6	Provinsi Jambi	1.020.527.259.178	1.919.657.887.859	4.565.956.144	2.944.751.103.181	5.382.345.989.000	432.658.485.000	8.759.755.577.181
7	Provinsi Sumatera Selatan	2.198.313.042.631	6.018.375.184.526	4.012.747.489	8.220.700.974.646	8.020.830.106.000	737.077.240.000	16.978.608.320.646
8	Provinsi Bangka Belitung	295.392.606.192	408.907.687.535	-	704.300.293.727	2.991.371.486.000	276.503.310.000	3.972.175.089.727
9	Provinsi Bengkulu	305.697.167.741	97.928.682.479	-	403.625.850.220	4.433.207.693.000	429.280.910.000	5.266.114.453.220
10	Provinsi Lampung	693.635.730.605	549.382.057.433	4.534.629.213	1.247.552.417.251	8.517.087.668.000	1.070.149.930.000	10.834.790.015.251
11	Provinsi DKI Jakarta	10.984.787.699.665	303.331.951.754	-	11.288.119.651.419	275.327.857.000	-	11.563.447.508.419
12	Provinsi Jawa Barat	4.290.311.713.547	1.472.248.735.277	152.860.849.861	5.915.421.298.685	25.366.474.052.000	1.972.986.423.000	33.254.881.773.685
13	Provinsi Banten	1.611.313.546.019	23.470.873.660	-	1.634.784.419.679	6.087.268.420.000	453.881.040.000	8.175.933.879.679
14	Provinsi Jawa Tengah	2.381.715.314.194	60.723.861.327	437.599.951.010	2.880.039.126.531	26.384.459.831.000	2.448.507.600.000	31.713.006.557.531
15	Provinsi DI Yogyakarta	387.652.774.821	1.820.996.505	19.128.612.640	408.602.383.966	4.076.315.166.000	257.020.870.000	4.741.938.419.966
16	Provinsi Jawa Timur	3.474.934.770.437	1.799.333.710.600	843.629.720.083	6.117.898.201.120	28.970.769.844.000	2.223.596.265.000	37.312.264.310.120
17	Provinsi Kalimantan Barat	670.816.634.072	178.747.727.743	-	849.564.361.815	8.122.410.318.000	964.858.240.000	9.936.832.919.815
18	Provinsi Kalimantan Tengah	763.537.495.558	734.467.280.111	4.355.718.021	1.502.360.493.690	7.353.898.102.000	515.368.160.000	9.371.626.755.690
19	Provinsi Kalimantan Selatan	815.841.666.286	3.177.116.650.918	-	3.992.958.317.204	5.867.836.400.000	447.768.060.000	10.308.562.777.204
20	Provinsi Kalimantan Timur	3.037.644.403.982	21.981.958.897.380	-	25.019.603.301.362	4.536.156.684.000	269.209.269.000	29.824.969.254.362
21	Provinsi Sulawesi Utara	435.325.268.890	35.591.248.360	-	470.916.517.250	5.947.146.273.000	688.993.380.000	7.107.056.170.250
22	Provinsi Gorontalo	152.836.928.624	3.445.349.806	-	156.282.278.430	2.623.208.646.000	269.211.450.000	3.048.702.374.430
23	Provinsi Sulawesi Tengah	393.568.259.542	108.119.333.815	3.255.920.453	504.943.513.810	6.023.223.674.000	638.622.650.000	7.166.789.837.810
24	Provinsi Sulawesi Selatan	1.272.712.137.404	55.732.568.492	11.955.854.680	1.340.400.560.576	12.033.560.759.000	1.227.933.070.000	14.601.894.389.576
25	Provinsi Sulawesi Barat	227.287.892.191	4.346.629.541	-	231.634.521.732	2.591.449.802.000	342.063.350.000	3.165.147.673.732
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	367.321.318.870	299.442.676.943	-	666.763.995.813	5.977.703.717.000	649.099.490.000	7.293.567.202.813
27	Provinsi Bali	676.775.656.028	3.232.394.181	11.125.437.810	691.133.488.019	5.038.814.658.000	340.255.143.000	6.070.203.289.019
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	430.219.417.069	69.867.404.983	191.867.760.358	691.954.582.410	5.831.380.610.000	599.277.990.000	7.122.613.182.410
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	492.601.764.190	10.913.297.518	4.148.310.479	507.663.372.187	8.906.209.191.000	1.292.666.810.000	10.706.539.373.187
30	Provinsi Maluku	411.972.204.253	59.466.917.516	-	471.439.121.769	4.922.808.988.000	483.833.420.000	5.878.081.529.769
31	Provinsi Maluku Utara	372.965.868.200	279.958.781.426	-	652.924.649.626	4.544.724.652.000	615.084.530.000	5.812.733.831.626
32	Provinsi Papua	1.339.125.087.882	683.865.502.029	-	2.022.990.589.911	14.320.547.756.000	1.854.886.690.000	18.198.425.035.911
33	Provinsi Papua Barat	1.008.303.170.760	1.390.648.382.856	-	2.398.951.553.616	5.300.671.054.000	605.129.070.000	8.304.751.677.616
	Dana Cadangan	-	-	-	-	-	-	0
	Kembali ke RKUN	-	768.861.261.146	-	768.861.261.146	-	-	768.861.261.146
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-	-	0
JUMLAH		47.214.136.030.788	62.600.285.617.315	1.722.781.272.658	111.537.202.920.761	273.814.438.203.000	25.941.483.856.000	411.293.124.979.761

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	251.142.652.419	80.624.297.647	170.518.354.772	-	251.142.652.419
2	Kab. Aceh Barat	23.567.923.332	6.909.501.124	16.176.952.977	481.469.231	23.567.923.332
3	Kab. Aceh Besar	28.028.235.666	7.407.298.000	20.139.468.435	481.469.231	28.028.235.666
4	Kab. Aceh Selatan	21.444.277.650	2.683.946.091	18.278.862.328	481.469.231	21.444.277.650
5	Kab. Aceh Singkil	22.488.588.690	3.358.992.337	18.648.127.122	481.469.231	22.488.588.690
6	Kab. Aceh Tengah	23.664.403.504	3.591.047.860	19.591.886.413	481.469.231	23.664.403.504
7	Kab. Aceh Tenggara	19.599.666.912	2.855.164.666	16.263.033.015	481.469.231	19.599.666.912
8	Kab. Aceh Timur	86.901.682.284	2.967.592.794	83.452.620.259	481.469.231	86.901.682.284
9	Kab. Aceh Utara	246.700.533.218	7.939.879.961	238.279.184.026	481.469.231	246.700.533.218
10	Kab. Bireun	34.079.455.252	4.368.359.867	29.229.626.154	481.469.231	34.079.455.252
11	Kab. Pidie	23.383.316.590	4.911.774.346	17.990.073.013	481.469.231	23.383.316.590
12	Kab. Simeulue	18.283.653.214	2.664.720.812	15.137.463.171	481.469.231	18.283.653.214
13	Kota Banda Aceh	38.259.993.451	21.545.644.620	16.232.879.600	481.469.231	38.259.993.451
14	Kota Sabang	19.746.748.021	2.475.437.768	16.789.841.022	481.469.231	19.746.748.021
15	Kota Langsa	23.319.737.943	5.869.255.536	16.969.013.176	481.469.231	23.319.737.943
16	Kota Lhokseumawe	66.823.988.659	13.837.862.812	52.504.656.616	481.469.231	66.823.988.659
17	Kab. Nagan Raya	28.957.024.451	5.288.750.455	23.186.804.765	481.469.231	28.957.024.451
18	Kab. Aceh Jaya	21.801.338.599	4.075.175.879	17.244.693.489	481.469.231	21.801.338.599
19	Kab. Pidie Jaya	19.021.329.733	2.312.811.454	16.227.049.048	481.469.231	19.021.329.733
20	Kab. Aceh Barat Daya	20.621.402.932	3.943.998.168	16.195.935.533	481.469.231	20.621.402.932
21	Kab. Gayo Lues	26.672.102.195	2.267.554.228	23.923.078.736	481.469.231	26.672.102.195
22	Kab. Aceh Tamiang	70.525.540.162	4.648.529.381	65.395.541.550	481.469.231	70.525.540.162
23	Kab. Bener Meriah	21.461.182.364	2.574.567.080	18.405.146.053	481.469.231	21.461.182.364
24	Kota Subulussalam	15.614.994.820	2.486.609.253	12.646.916.336	481.469.231	15.614.994.820
25	Provinsi Sumatera Utara	447.290.810.174	267.453.204.459	179.837.605.715	-	447.290.810.174
26	Kab. Asahan	57.186.816.980	10.405.603.906	46.299.743.843	481.469.231	57.186.816.980
27	Kab. Dairi	25.046.612.591	4.840.635.904	19.724.507.456	481.469.231	25.046.612.591
28	Kab. Deli Serdang	72.293.176.414	17.909.178.472	53.902.528.711	481.469.231	72.293.176.414
29	Kab. Tanah Karo	28.306.144.312	5.824.090.608	22.000.584.473	481.469.231	28.306.144.312
30	Kab. Labuhan Batu	53.308.143.497	11.158.320.280	41.668.353.986	481.469.231	53.308.143.497
31	Kab. Langkat	151.807.807.144	11.430.859.106	139.895.478.807	481.469.231	151.807.807.144
32	Kab. Mandailing Natal	37.878.156.210	8.654.633.235	28.742.053.744	481.469.231	37.878.156.210
33	Kab. Nias	12.514.594.954	4.021.435.368	8.011.690.355	481.469.231	12.514.594.954
34	Kab. Simalungun	62.145.670.667	10.326.715.254	51.337.486.182	481.469.231	62.145.670.667
35	Kab. Tapanuli Selatan	35.655.180.170	9.360.674.873	25.813.036.066	481.469.231	35.655.180.170
36	Kab. Tapanuli Tengah	34.714.302.623	5.188.791.677	29.044.041.715	481.469.231	34.714.302.623
37	Kab. Tapanuli Utara	27.874.410.149	6.526.574.922	20.866.365.996	481.469.231	27.874.410.149
38	Kab. Toba Samosir	22.832.183.366	7.215.752.746	15.134.961.389	481.469.231	22.832.183.366
39	Kota Binjai	40.550.550.811	7.579.528.485	32.489.553.095	481.469.231	40.550.550.811
40	Kota Medan	196.391.372.528	159.812.619.935	36.097.283.362	481.469.231	196.391.372.528
41	Kota Pematang Siantar	34.190.159.289	18.491.554.105	15.217.135.953	481.469.231	34.190.159.289
42	Kota Sibolga	20.307.129.499	5.229.513.875	14.596.146.393	481.469.231	20.307.129.499
43	Kota Tanjung Balai	17.845.187.301	5.281.964.670	12.081.753.400	481.469.231	17.845.187.301
44	Kab. Batu Bara	27.636.641.810	9.766.766.525	17.388.406.054	481.469.231	27.636.641.810
45	Kab. Labuhan Batu Utara	36.887.009.187	6.133.594.905	30.271.945.051	481.469.231	36.887.009.187
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	51.927.033.347	7.211.985.815	44.233.578.301	481.469.231	51.927.033.347
47	Kab. Padang Lawas Utara	30.371.045.511	4.950.619.021	24.938.957.259	481.469.231	30.371.045.511
48	Kab. Padang Lawas	28.074.750.020	4.999.350.068	22.593.930.721	481.469.231	28.074.750.020
49	Kab. Nias Utara	13.848.921.954	3.589.359.595	9.778.093.128	481.469.231	13.848.921.954
50	Kab. Nias Barat	12.763.148.707	3.475.767.345	8.805.912.131	481.469.231	12.763.148.707
51	Kota Tebing Tinggi	24.402.300.264	6.862.985.009	17.057.846.024	481.469.231	24.402.300.264
52	Kota Padang Sidempuan	32.341.248.784	13.929.327.417	17.930.452.136	481.469.231	32.341.248.784
53	Kab. Pakpak Bharat	23.003.217.822	3.867.744.702	18.654.003.889	481.469.231	23.003.217.822
54	Kab. Nias Selatan	23.998.041.620	3.935.147.658	19.581.424.731	481.469.231	23.998.041.620
55	Kab. Humbang Hasundutan	27.310.381.672	4.338.432.251	22.490.480.190	481.469.231	27.310.381.672
56	Kab. Serdang Bedagai	51.345.752.945	10.263.135.400	40.601.148.314	481.469.231	51.345.752.945
57	Kab. Samosir	18.453.102.744	3.976.102.235	13.995.531.278	481.469.231	18.453.102.744
58	Kota Gunung Sitoli	14.435.428.223	4.621.041.331	9.332.917.661	481.469.231	14.435.428.223
59	Provinsi Sumatera Barat	180.525.464.328	121.046.656.429	59.478.807.899	-	180.525.464.328
60	Kab. Limapuluh Kota	25.352.794.839	5.360.623.083	19.510.702.525	481.469.231	25.352.794.839
61	Kab. Agam	25.612.807.185	8.474.511.501	16.656.826.453	481.469.231	25.612.807.185
62	Kab. Kepulauan Mentawai	22.862.513.371	3.723.612.995	18.657.431.145	481.469.231	22.862.513.371
63	Kab. Padang Pariaman	24.549.787.179	6.702.431.521	17.365.886.427	481.469.231	24.549.787.179
64	Kab. Pasaman	24.627.456.725	5.541.251.975	18.604.735.519	481.469.231	24.627.456.725
65	Kab. Pesisir Selatan	30.319.530.933	6.892.034.844	22.946.026.858	481.469.231	30.319.530.933
66	Kab. Sijunjung	24.235.571.192	4.623.031.572	19.131.070.389	481.469.231	24.235.571.192
67	Kab. Solok	22.166.209.347	5.199.354.899	16.485.385.217	481.469.231	22.166.209.347
68	Kab. Tanah Datar	20.109.688.530	6.233.502.932	13.394.716.367	481.469.231	20.109.688.530
69	Kota Bukit Tinggi	23.143.429.107	11.220.963.439	11.440.996.437	481.469.231	23.143.429.107

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
70	Kota Padang Panjang	19.157.382.806	4.757.195.446	13.918.718.129	481.469.231	19.157.382.806
71	Kota Padang	107.079.825.186	73.711.733.048	32.886.622.907	481.469.231	107.079.825.186
72	Kota Payakumbuh	17.995.394.934	5.504.790.715	12.009.134.988	481.469.231	17.995.394.934
73	Kota Sawahlunto	18.455.909.207	4.965.031.474	13.009.408.502	481.469.231	18.455.909.207
74	Kota Solok	18.826.955.013	5.278.875.012	13.066.610.770	481.469.231	18.826.955.013
75	Kota Pariaman	23.542.521.249	7.165.452.401	15.895.599.617	481.469.231	23.542.521.249
76	Kab. Pasaman Barat	28.511.389.949	6.824.941.451	21.204.979.267	481.469.231	28.511.389.949
77	Kab. Dharmasraya	25.408.426.744	5.100.619.583	19.826.337.930	481.469.231	25.408.426.744
78	Kab. Solok Selatan	23.371.314.425	4.298.437.628	18.591.407.566	481.469.231	23.371.314.425
79	Provinsi Riau	502.497.680.044	204.861.885.696	297.635.794.348	-	502.497.680.044
80	Kab. Bengkalis	238.942.928.516	52.505.789.309	185.955.669.976	481.469.231	238.942.928.516
81	Kab. Indragiri Hilir	67.157.862.543	14.035.731.896	52.640.661.416	481.469.231	67.157.862.543
82	Kab. Indragiri Hulu	112.565.229.167	14.057.390.625	98.026.369.311	481.469.231	112.565.229.167
83	Kab. Kampar	141.798.059.906	14.496.242.717	126.820.347.958	481.469.231	141.798.059.906
84	Kab. Kuantan Singingi	46.325.727.443	12.114.952.487	33.729.305.725	481.469.231	46.325.727.443
85	Kab. Pelalawan	162.842.248.744	20.168.746.166	142.192.033.347	481.469.231	162.842.248.744
86	Kab. Rokan Hilir	219.614.423.583	17.586.571.749	201.546.382.603	481.469.231	219.614.423.583
87	Kab. Rokan Hulu	125.201.031.153	11.769.113.710	112.950.448.212	481.469.231	125.201.031.153
88	Kab. Siak	236.494.129.678	25.622.031.785	210.390.628.662	481.469.231	236.494.129.678
89	Kota Dumai	98.729.228.777	50.026.669.922	48.221.089.624	481.469.231	98.729.228.777
90	Kota Pekanbaru	125.860.555.878	83.418.150.316	41.960.936.331	481.469.231	125.860.555.878
91	Kab. Kepulauan Meranti	85.387.406.561	8.568.220.969	76.337.716.361	481.469.231	85.387.406.561
92	Provinsi Kepulauan Riau	199.536.363.562	80.959.079.312	118.577.284.250	-	199.536.363.562
93	Kab. Bintan	75.752.109.733	10.080.586.654	65.190.053.848	481.469.231	75.752.109.733
94	Kab. Natuna	180.742.532.265	9.213.304.387	171.047.758.647	481.469.231	180.742.532.265
95	Kab. Karimun	65.571.485.126	13.478.632.084	51.611.383.811	481.469.231	65.571.485.126
96	Kota Batam	176.905.033.052	67.439.523.436	108.984.040.385	481.469.231	176.905.033.052
97	Kab. Kepulauan Anambas	68.098.143.246	12.613.831.190	55.002.842.825	481.469.231	68.098.143.246
98	Kota Tanjung Pinang	48.509.730.938	7.164.268.300	40.863.993.407	481.469.231	48.509.730.938
99	Kab. Lingga	49.566.744.443	6.035.596.854	43.049.678.358	481.469.231	49.566.744.443
100	Provinsi Jambi	224.691.647.899	60.692.547.656	163.999.100.243	-	224.691.647.899
101	Kab. Batanghari	159.674.435.218	7.040.032.862	152.152.933.125	481.469.231	159.674.435.218
102	Kab. Bungo	33.577.196.957	8.401.085.352	24.694.642.374	481.469.231	33.577.196.957
103	Kab. Kerinci	19.391.340.941	2.930.435.569	15.979.436.141	481.469.231	19.391.340.941
104	Kab. Merangin	40.958.890.536	5.423.465.927	35.053.955.378	481.469.231	40.958.890.536
105	Kab. Muaro Jambi	131.326.232.435	7.062.079.429	123.782.683.775	481.469.231	131.326.232.435
106	Kab. Sarolangun	79.443.931.783	3.645.471.319	75.316.991.233	481.469.231	79.443.931.783
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	78.707.718.713	6.102.741.872	72.123.507.610	481.469.231	78.707.718.713
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	100.977.628.781	7.009.787.761	93.486.371.789	481.469.231	100.977.628.781
109	Kab. Tebo	52.537.481.292	4.704.670.639	47.351.341.422	481.469.231	52.537.481.292
110	Kota Jambi	83.179.721.965	33.373.608.885	49.324.643.849	481.469.231	83.179.721.965
111	Kota Sungai Penuh	16.061.032.658	5.345.441.869	10.234.121.558	481.469.231	16.061.032.658
112	Provinsi Sumatera Selatan	488.990.018.629	145.460.936.576	343.529.082.053	-	488.990.018.629
113	Kab. Lahat	115.694.039.965	10.174.248.412	105.038.322.322	481.469.231	115.694.039.965
114	Kab. Musi Banyuasin	367.037.053.052	13.247.769.698	353.307.814.123	481.469.231	367.037.053.052
115	Kab. Musi Rawas	188.693.806.415	6.699.832.340	181.512.504.844	481.469.231	188.693.806.415
116	Kab. Muara Enim	334.190.169.942	20.469.496.024	313.239.204.687	481.469.231	334.190.169.942
117	Kab. Ogan Komering Ilir	62.987.297.661	7.258.530.084	55.247.298.346	481.469.231	62.987.297.661
118	Kab. Ogan Komering Ulu	86.057.253.778	13.403.670.990	72.172.113.557	481.469.231	86.057.253.778
119	Kota Palembang	113.180.712.944	90.556.917.167	22.142.326.546	481.469.231	113.180.712.944
120	Kota Pagar Alam	28.682.584.827	5.336.191.788	22.864.923.808	481.469.231	28.682.584.827
121	Kota Lubuk Linggau	35.126.822.031	11.962.871.009	22.682.481.791	481.469.231	35.126.822.031
122	Kota Prabumulih	58.865.779.422	13.123.105.110	45.261.205.081	481.469.231	58.865.779.422
123	Kab. Empat Lawang	28.587.045.902	5.047.191.649	23.058.385.022	481.469.231	28.587.045.902
124	Kab. Banyuasin	151.386.182.937	7.988.044.987	142.916.668.719	481.469.231	151.386.182.937
125	Kab. Ogan Ilir	71.965.058.766	5.975.812.463	65.507.777.072	481.469.231	71.965.058.766
126	Kab. OKU Timur	35.879.126.708	7.571.238.895	27.826.418.582	481.469.231	35.879.126.708
127	Kab. OKU Selatan	30.990.089.652	6.366.917.184	24.141.703.237	481.469.231	30.990.089.652
128	Provinsi Bangka Belitung	63.606.665.272	26.533.033.506	37.073.631.766	-	63.606.665.272
129	Kab. Bangka	36.306.434.134	4.317.388.940	31.507.575.963	481.469.231	36.306.434.134
130	Kab. Belitung	31.545.342.037	4.095.980.088	26.967.892.718	481.469.231	31.545.342.037
131	Kota Pangkal Pinang	39.094.858.550	15.486.313.429	23.127.075.890	481.469.231	39.094.858.550
132	Kab. Bangka Selatan	30.241.175.853	2.439.201.456	27.320.505.166	481.469.231	30.241.175.853
133	Kab. Bangka Tengah	29.968.642.787	3.596.046.835	25.891.126.721	481.469.231	29.968.642.787
134	Kab. Bangka Barat	33.008.903.482	5.390.053.760	27.137.380.491	481.469.231	33.008.903.482
135	Kab. Belitung Timur	31.620.584.077	4.953.179.808	26.185.935.038	481.469.231	31.620.584.077
136	Provinsi Bengkulu	61.839.720.508	25.491.139.891	36.348.580.617	-	61.839.720.508
137	Kab. Bengkulu Selatan	19.982.624.829	3.092.683.935	16.408.471.663	481.469.231	19.982.624.829
138	Kab. Bengkulu Utara	29.283.564.355	3.194.764.249	25.607.330.875	481.469.231	29.283.564.355
139	Kab. Rejang Lebong	22.578.888.845	3.056.071.552	19.041.348.062	481.469.231	22.578.888.845
140	Kota Bengkulu	34.786.419.046	16.287.657.127	18.017.292.688	481.469.231	34.786.419.046
141	Kab. Kaur	23.645.883.162	2.030.323.335	21.134.090.596	481.469.231	23.645.883.162
142	Kab. Seluma	23.684.510.228	2.481.179.581	20.721.861.416	481.469.231	23.684.510.228
143	Kab. Mukomuko	28.165.007.258	2.333.119.560	25.350.418.467	481.469.231	28.165.007.258
144	Kab. Lebong	26.735.258.721	1.773.276.333	24.480.513.157	481.469.231	26.735.258.721

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
145	Kab. Bengkulu Tengah	13.667.328.594	2.055.891.116	11.129.968.247	481.469.231	13.667.328.594
146	Kab. Kepahiang	21.327.962.195	1.931.743.060	18.914.749.904	481.469.231	21.327.962.195
147	Provinsi Lampung	165.062.626.606	85.139.229.154	79.923.397.452	-	165.062.626.606
148	Kab. Lampung Barat	30.911.057.902	4.388.646.357	26.040.942.314	481.469.231	30.911.057.902
149	Kab. Lampung Selatan	34.432.428.642	7.137.148.497	26.813.810.914	481.469.231	34.432.428.642
150	Kab. Lampung Tengah	65.923.653.745	13.783.799.072	51.658.385.442	481.469.231	65.923.653.745
151	Kab. Lampung Utara	35.633.082.715	6.418.122.936	28.733.490.548	481.469.231	35.633.082.715
152	Kab. Lampung Timur	82.662.420.863	9.460.888.873	72.720.062.759	481.469.231	82.662.420.863
153	Kab. Tanggamus	25.569.528.177	5.000.756.305	20.087.302.641	481.469.231	25.569.528.177
154	Kab. Tulang Bawang	45.112.209.809	6.459.371.020	38.171.369.558	481.469.231	45.112.209.809
155	Kab. Way Kanan	37.358.166.216	4.332.009.122	32.544.687.863	481.469.231	37.358.166.216
156	Kab. Pesawaran	19.460.385.297	4.899.499.730	14.079.416.336	481.469.231	19.460.385.297
157	Kab. Pringsewu	15.889.142.295	4.298.017.339	11.109.655.725	481.469.231	15.889.142.295
158	Kab. Mesuji	20.371.923.222	2.414.890.461	17.475.563.530	481.469.231	20.371.923.222
159	Kab. Tulang Bawang Barat	20.045.409.875	2.560.920.980	17.003.019.664	481.469.231	20.045.409.875
160	Kota Bandar Lampung	67.248.196.471	48.783.398.811	17.983.328.429	481.469.231	67.248.196.471
161	Kota Metro	27.955.498.770	8.035.789.068	19.438.240.471	481.469.231	27.955.498.770
162	Provinsi DKI Jakarta	10.984.787.699.665	8.197.974.477.075	2.784.405.876.435	2.407.346.155	10.984.787.699.665
163	Provinsi Jawa Barat	1.150.340.432.595	720.610.185.659	429.730.246.936	-	1.150.340.432.595
164	Kab. Bandung	143.913.023.260	35.109.991.427	108.321.562.602	481.469.231	143.913.023.260
165	Kab. Bekasi	379.616.887.224	156.428.275.223	222.707.142.770	481.469.231	379.616.887.224
166	Kab. Bogor	132.441.654.461	71.490.065.641	60.470.119.589	481.469.231	132.441.654.461
167	Kab. Ciamis	68.990.442.239	20.962.195.966	47.546.777.042	481.469.231	68.990.442.239
168	Kab. Cianjur	83.406.222.265	23.470.735.181	59.454.017.853	481.469.231	83.406.222.265
169	Kab. Cirebon	78.782.340.022	25.607.022.329	52.693.848.462	481.469.231	78.782.340.022
170	Kab. Garut	91.760.415.147	23.299.138.434	67.979.807.482	481.469.231	91.760.415.147
171	Kab. Indramayu	173.874.128.892	29.750.680.074	143.641.979.587	481.469.231	173.874.128.892
172	Kab. Karawang	273.057.181.848	77.168.555.020	195.407.157.597	481.469.231	273.057.181.848
173	Kab. Kuningan	52.449.010.845	17.437.900.440	34.529.641.174	481.469.231	52.449.010.845
174	Kab. Majalengka	81.835.545.355	16.836.179.627	64.517.896.497	481.469.231	81.835.545.355
175	Kab. Purwakarta	86.021.983.504	32.111.845.935	53.428.668.338	481.469.231	86.021.983.504
176	Kab. Subang	159.854.192.937	20.761.248.498	138.611.475.208	481.469.231	159.854.192.937
177	Kab. Sukabumi	91.496.453.120	18.770.193.831	72.244.790.058	481.469.231	91.496.453.120
178	Kab. Sumedang	62.194.041.054	24.033.845.938	37.678.725.885	481.469.231	62.194.041.054
179	Kab. Tasikmalaya	61.113.369.744	18.399.639.149	42.232.261.364	481.469.231	61.113.369.744
180	Kab. Bandung Barat	73.979.811.646	25.916.739.103	47.581.603.312	481.469.231	73.979.811.646
181	Kota Bandung	418.502.492.080	184.297.052.713	233.723.970.136	481.469.231	418.502.492.080
182	Kota Bekasi	232.610.772.954	104.092.329.668	128.036.974.055	481.469.231	232.610.772.954
183	Kota Bogor	106.986.822.055	44.046.154.332	62.459.198.492	481.469.231	106.986.822.055
184	Kota Cirebon	54.110.887.088	25.024.838.395	28.604.579.462	481.469.231	54.110.887.088
185	Kota Depok	61.962.150.330	42.214.493.770	19.266.187.329	481.469.231	61.962.150.330
186	Kota Sukabumi	38.210.347.383	23.420.287.460	14.308.590.692	481.469.231	38.210.347.383
187	Kota Cimahi	48.270.630.456	18.783.633.485	29.005.527.740	481.469.231	48.270.630.456
188	Kota Tasikmalaya	45.429.673.614	23.804.996.265	21.143.208.118	481.469.231	45.429.673.614
189	Kota Banjar	39.100.801.429	14.704.550.423	23.914.781.775	481.469.231	39.100.801.429
190	Provinsi Banten	451.137.609.766	304.388.166.675	146.749.443.091	-	451.137.609.766
191	Kab. Lebak	68.146.203.455	22.290.637.849	45.374.096.375	481.469.231	68.146.203.455
192	Kab. Pandeglang	64.606.977.790	23.431.575.498	40.693.933.061	481.469.231	64.606.977.790
193	Kab. Serang	94.441.217.311	46.724.122.752	47.235.625.328	481.469.231	94.441.217.311
194	Kab. Tangerang	275.228.900.474	90.594.798.764	184.152.632.479	481.469.231	275.228.900.474
195	Kota Cilegon	109.682.480.028	52.950.806.982	56.250.203.815	481.469.231	109.682.480.028
196	Kota Tangerang	313.856.062.722	130.197.307.894	183.177.285.597	481.469.231	313.856.062.722
197	Kota Serang	45.484.746.421	25.252.106.439	19.751.170.751	481.469.231	45.484.746.421
198	Kota Tangerang Selatan	188.729.348.052	65.574.938.922	122.672.939.899	481.469.231	188.729.348.052
199	Provinsi Jawa Tengah	610.215.374.714	378.066.207.437	232.149.167.277	-	610.215.374.714
200	Kab. Banjarnegara	40.549.819.413	8.326.204.070	31.742.146.112	481.469.231	40.549.819.413
201	Kab. Banyumas	82.364.693.013	23.584.041.892	58.299.181.890	481.469.231	82.364.693.013
202	Kab. Batang	38.781.980.095	9.198.793.644	29.101.717.220	481.469.231	38.781.980.095
203	Kab. Blora	74.248.121.221	11.780.501.703	61.986.150.287	481.469.231	74.248.121.221
204	Kab. Boyolali	42.156.093.850	11.130.016.255	30.544.608.364	481.469.231	42.156.093.850
205	Kab. Brebes	56.402.797.095	10.353.149.476	45.568.178.388	481.469.231	56.402.797.095
206	Kab. Cilacap	100.897.084.899	26.676.073.282	73.739.542.386	481.469.231	100.897.084.899
207	Kab. Demak	46.234.483.910	9.353.357.744	36.399.656.935	481.469.231	46.234.483.910
208	Kab. Grobogan	59.327.096.774	10.684.720.441	48.160.907.102	481.469.231	59.327.096.774
209	Kab. Jepara	52.208.462.922	13.604.173.843	38.122.819.848	481.469.231	52.208.462.922
210	Kab. Karanganyar	47.296.050.458	12.968.606.640	33.845.974.587	481.469.231	47.296.050.458
211	Kab. Kebumen	49.029.790.037	11.144.426.593	37.403.894.213	481.469.231	49.029.790.037
212	Kab. Kendal	52.679.906.856	10.967.403.330	41.231.034.295	481.469.231	52.679.906.856
213	Kab. Klaten	44.156.809.044	13.841.010.214	29.834.329.599	481.469.231	44.156.809.044
214	Kab. Kudus	76.097.097.025	32.318.069.384	43.297.558.410	481.469.231	76.097.097.025
215	Kab. Magelang	47.769.346.018	11.782.345.534	35.505.531.253	481.469.231	47.769.346.018
216	Kab. Pati	54.076.645.705	12.825.897.431	40.769.279.043	481.469.231	54.076.645.705
217	Kab. Pekalongan	34.666.816.513	7.983.560.284	26.201.786.998	481.469.231	34.666.816.513
218	Kab. Pemalang	43.667.707.891	9.787.212.994	33.399.025.666	481.469.231	43.667.707.891
219	Kab. Purbalingga	36.702.936.824	7.699.810.906	28.521.656.687	481.469.231	36.702.936.824

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
220	Kab. Purworejo	41.344.640.726	10.747.785.641	30.115.385.854	481.469.231	41.344.640.726
221	Kab. Rembang	41.438.403.299	8.940.700.573	32.016.233.495	481.469.231	41.438.403.299
222	Kab. Semarang	43.723.859.538	13.615.072.405	29.627.317.902	481.469.231	43.723.859.538
223	Kab. Sragen	41.759.488.687	11.845.037.809	29.432.981.647	481.469.231	41.759.488.687
224	Kab. Sukoharjo	31.848.436.410	15.377.095.185	15.989.871.994	481.469.231	31.848.436.410
225	Kab. Tegal	47.754.850.652	11.321.127.427	35.952.253.994	481.469.231	47.754.850.652
226	Kab. Temanggung	35.301.430.249	9.214.460.638	25.605.500.380	481.469.231	35.301.430.249
227	Kab. Wonogiri	40.201.111.926	9.156.335.192	30.563.307.503	481.469.231	40.201.111.926
228	Kab. Wonosobo	36.045.889.183	8.594.644.096	26.969.775.856	481.469.231	36.045.889.183
229	Kota Magelang	23.793.796.093	11.124.128.166	12.188.198.696	481.469.231	23.793.796.093
230	Kota Pekalongan	26.964.406.553	11.903.828.657	14.579.108.665	481.469.231	26.964.406.553
231	Kota Salatiga	22.337.986.668	8.292.950.593	13.563.566.844	481.469.231	22.337.986.668
232	Kota Semarang	149.896.280.364	127.637.478.869	21.777.332.264	481.469.231	149.896.280.364
233	Kota Surakarta	81.302.477.390	31.468.362.870	49.352.645.289	481.469.231	81.302.477.390
234	Kota Tegal	28.473.142.179	12.433.212.306	15.558.460.642	481.469.231	28.473.142.179
235	Provinsi DI Yogyakarta	112.691.591.066	86.086.015.246	26.605.575.820	-	112.691.591.066
236	Kab. Bantul	49.864.791.011	18.220.756.151	31.162.565.629	481.469.231	49.864.791.011
237	Kab. Gunung Kidul	39.140.930.847	12.967.871.904	25.691.589.712	481.469.231	39.140.930.847
238	Kab. Kulon Progo	33.195.570.704	12.316.952.596	20.397.148.877	481.469.231	33.195.570.704
239	Kab. Sleman	95.851.408.966	39.176.943.979	56.192.995.756	481.469.231	95.851.408.966
240	Kota Yogyakarta	56.908.482.227	46.600.370.530	9.826.642.466	481.469.231	56.908.482.227
241	Provinsi Jawa Timur	933.488.022.058	601.956.055.373	331.531.966.685	-	933.488.022.058
242	Kab. Bangkalan	78.930.815.228	11.282.298.649	67.167.047.348	481.469.231	78.930.815.228
243	Kab. Banyuwangi	71.752.154.023	17.265.747.047	54.004.937.745	481.469.231	71.752.154.023
244	Kab. Blitar	47.469.805.445	11.637.466.674	35.350.869.540	481.469.231	47.469.805.445
245	Kab. Bojonegoro	100.026.850.639	16.138.582.390	83.406.799.018	481.469.231	100.026.850.639
246	Kab. Bondowoso	32.917.078.225	11.587.624.036	20.847.984.958	481.469.231	32.917.078.225
247	Kab. Gresik	107.473.559.939	62.150.945.044	44.841.145.664	481.469.231	107.473.559.939
248	Kab. Jember	72.079.484.585	23.601.858.079	47.996.157.275	481.469.231	72.079.484.585
249	Kab. Jombang	62.891.933.781	14.571.926.771	47.838.537.779	481.469.231	62.891.933.781
250	Kab. Kediri	76.595.431.553	14.808.576.443	61.305.385.879	481.469.231	76.595.431.553
251	Kab. Lamongan	72.489.014.426	14.868.206.732	57.139.338.463	481.469.231	72.489.014.426
252	Kab. Lumajang	38.241.198.598	11.750.740.971	26.008.988.396	481.469.231	38.241.198.598
253	Kab. Madiun	38.964.894.917	11.280.011.707	27.203.413.979	481.469.231	38.964.894.917
254	Kab. Magetan	39.897.392.541	14.003.829.000	25.412.094.310	481.469.231	39.897.392.541
255	Kab. Malang	91.800.006.780	22.304.453.364	69.014.084.185	481.469.231	91.800.006.780
256	Kab. Mojokerto	76.906.685.469	17.112.098.337	59.313.117.901	481.469.231	76.906.685.469
257	Kab. Nganjuk	54.093.565.629	13.215.491.467	40.396.604.931	481.469.231	54.093.565.629
258	Kab. Ngawi	47.780.818.704	13.726.620.602	33.572.728.871	481.469.231	47.780.818.704
259	Kab. Pacitan	35.959.472.951	10.631.772.240	24.846.231.480	481.469.231	35.959.472.951
260	Kab. Pamekasan	55.749.204.813	12.421.972.434	42.845.763.148	481.469.231	55.749.204.813
261	Kab. Pasuruan	79.281.808.687	18.974.011.613	59.826.327.843	481.469.231	79.281.808.687
262	Kab. Ponorogo	50.438.990.675	12.375.080.226	37.582.441.218	481.469.231	50.438.990.675
263	Kab. Probolinggo	57.617.024.079	17.555.399.024	39.580.155.824	481.469.231	57.617.024.079
264	Kab. Sampang	63.005.418.296	10.684.661.193	51.839.287.872	481.469.231	63.005.418.296
265	Kab. Sidoarjo	128.385.459.966	62.516.844.085	65.387.146.650	481.469.231	128.385.459.966
266	Kab. Situbondo	37.673.692.601	11.707.335.099	25.484.888.271	481.469.231	37.673.692.601
267	Kab. Sumenep	141.370.171.126	14.967.961.794	125.920.740.101	481.469.231	141.370.171.126
268	Kab. Trenggalek	37.672.572.753	11.513.961.851	25.677.141.671	481.469.231	37.672.572.753
269	Kab. Tuban	105.158.483.198	22.863.329.082	81.813.684.885	481.469.231	105.158.483.198
270	Kab. Tulungagung	51.689.982.045	13.822.352.568	37.386.160.246	481.469.231	51.689.982.045
271	Kota Blitar	26.148.720.727	10.134.936.314	15.532.315.182	481.469.231	26.148.720.727
272	Kota Kediri	45.506.307.434	22.279.624.557	22.745.213.646	481.469.231	45.506.307.434
273	Kota Madiun	35.380.456.158	16.516.582.024	18.382.404.903	481.469.231	35.380.456.158
274	Kota Malang	86.767.525.190	38.274.047.073	48.012.008.886	481.469.231	86.767.525.190
275	Kota Mojokerto	28.585.904.223	11.726.649.695	16.377.785.297	481.469.231	28.585.904.223
276	Kota Pasuruan	25.907.933.069	12.796.488.011	12.629.975.827	481.469.231	25.907.933.069
277	Kota Probolinggo	33.101.404.457	11.081.029.282	21.538.905.944	481.469.231	33.101.404.457
278	Kota Surabaya	278.196.657.733	252.390.887.869	25.324.300.633	481.469.231	278.196.657.733
279	Kota Batu	27.538.867.716	9.308.719.993	17.748.678.492	481.469.231	27.538.867.716
280	Provinsi Kalimantan Barat	152.230.868.148	70.582.938.573	81.647.929.575	-	152.230.868.148
281	Kab. Bengkayang	30.245.683.111	5.662.114.337	24.102.099.543	481.469.231	30.245.683.111
282	Kab. Landak	35.342.989.090	3.293.042.579	31.568.477.280	481.469.231	35.342.989.090
283	Kab. Kapuas Hulu	46.364.166.275	3.726.871.453	42.155.825.591	481.469.231	46.364.166.275
284	Kab. Ketapang	65.985.113.171	6.605.245.613	58.898.398.327	481.469.231	65.985.113.171
285	Kab. Pontianak	17.015.431.794	3.702.826.522	12.831.136.041	481.469.231	17.015.431.794
286	Kab. Sambas	33.993.196.878	6.972.618.696	26.539.108.951	481.469.231	33.993.196.878
287	Kab. Sanggau	43.671.289.593	6.094.235.176	37.095.585.186	481.469.231	43.671.289.593
288	Kab. Sintang	43.616.777.435	4.626.015.987	38.509.292.217	481.469.231	43.616.777.435
289	Kota Pontianak	61.166.199.456	43.154.016.880	17.530.713.345	481.469.231	61.166.199.456
290	Kota Singkawang	24.590.072.433	7.135.176.767	16.973.426.435	481.469.231	24.590.072.433
291	Kab. Kayong Utara	22.929.207.494	2.535.721.206	19.912.017.057	481.469.231	22.929.207.494
292	Kab. Kubu Raya	32.461.827.315	7.001.496.519	24.978.861.565	481.469.231	32.461.827.315
293	Kab. Sekadau	29.183.562.503	3.275.466.814	25.426.626.458	481.469.231	29.183.562.503
294	Kab. Melawi	32.020.249.376	3.235.410.421	28.303.369.724	481.469.231	32.020.249.376

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
295	Provinsi Kalimantan Tengah	162.116.425.301	52.703.333.032	109.413.092.269	-	162.116.425.301
296	Kab. Barito Selatan	51.634.491.227	3.078.796.130	48.074.225.866	481.469.231	51.634.491.227
297	Kab. Barito Utara	55.729.819.167	3.679.511.206	51.568.838.730	481.469.231	55.729.819.167
298	Kab. Kapuas	48.381.768.652	4.577.397.452	43.322.901.969	481.469.231	48.381.768.652
299	Kab. Kotawaringin Barat	44.157.757.654	7.920.515.429	35.755.772.994	481.469.231	44.157.757.654
300	Kab. Kotawaringin Timur	58.327.703.913	11.344.881.931	46.501.352.751	481.469.231	58.327.703.913
301	Kota Palangkaraya	42.051.380.941	22.311.171.013	19.258.740.697	481.469.231	42.051.380.941
302	Kab. Barito Timur	42.118.662.164	4.489.470.468	37.147.722.465	481.469.231	42.118.662.164
303	Kab. Murung Raya	48.297.874.283	5.132.682.842	42.683.722.210	481.469.231	48.297.874.283
304	Kab. Pulang Pisau	25.670.821.608	3.292.130.989	21.897.221.388	481.469.231	25.670.821.608
305	Kab. Gunung Mas	30.316.592.955	3.520.356.591	26.314.767.133	481.469.231	30.316.592.955
306	Kab. Lamandau	35.271.625.929	2.064.469.086	32.725.687.612	481.469.231	35.271.625.929
307	Kab. Sukamara	31.445.162.172	1.935.164.950	29.028.527.991	481.469.231	31.445.162.172
308	Kab. Katingan	33.912.173.393	2.953.466.951	30.477.237.211	481.469.231	33.912.173.393
309	Kab. Seruyan	54.105.236.199	4.818.004.531	48.805.762.437	481.469.231	54.105.236.199
310	Provinsi Kalimantan Selatan	196.746.088.337	98.566.671.170	98.179.417.167	-	196.746.088.337
311	Kab. Banjar	55.604.411.220	13.080.919.743	42.042.022.246	481.469.231	55.604.411.220
312	Kab. Barito Kuala	28.341.228.400	6.112.565.077	21.747.194.092	481.469.231	28.341.228.400
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	38.616.507.447	5.473.975.242	32.661.062.974	481.469.231	38.616.507.447
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	27.870.538.540	5.991.288.372	21.397.780.937	481.469.231	27.870.538.540
315	Kab. Hulu Sungai Utara	34.890.578.749	4.438.811.557	29.970.297.961	481.469.231	34.890.578.749
316	Kab. Kotabaru	66.800.333.768	16.583.056.302	49.735.808.235	481.469.231	66.800.333.768
317	Kab. Tabalong	85.852.645.078	10.662.335.568	74.708.840.279	481.469.231	85.852.645.078
318	Kab. Tanah Laut	36.888.629.989	12.798.851.526	23.608.309.232	481.469.231	36.888.629.989
319	Kab. Tapin	40.701.917.472	5.494.935.369	34.725.512.872	481.469.231	40.701.917.472
320	Kota Banjarbaru	39.478.174.759	18.616.823.200	20.379.882.328	481.469.231	39.478.174.759
321	Kota Banjarmasin	62.231.729.530	38.835.285.145	22.914.975.154	481.469.231	62.231.729.530
322	Kab. Balangan	50.755.720.856	6.099.839.552	44.174.412.073	481.469.231	50.755.720.856
323	Kab. Tanah Bumbu	51.063.162.141	8.913.247.495	41.668.445.415	481.469.231	51.063.162.141
324	Provinsi Kalimantan Timur	715.864.462.861	269.218.324.135	446.646.138.726	-	715.864.462.861
325	Kab. Berau	69.187.478.528	14.525.450.636	54.180.558.661	481.469.231	69.187.478.528
326	Kab. Bulungan	218.404.704.212	12.074.817.041	205.848.417.940	481.469.231	218.404.704.212
327	Kab. Kutai Kartanegara	553.459.657.131	34.358.437.197	518.619.750.703	481.469.231	553.459.657.131
328	Kab. Kutai Barat	96.885.401.646	25.205.252.800	71.198.679.615	481.469.231	96.885.401.646
329	Kab. Kutai Timur	217.900.129.058	38.719.785.816	178.698.874.011	481.469.231	217.900.129.058
330	Kab. Malinau	68.074.025.794	10.249.189.160	57.343.367.403	481.469.231	68.074.025.794
331	Kab. Nunukan	146.555.486.765	10.959.482.954	135.114.534.580	481.469.231	146.555.486.765
332	Kab. Pasir	118.348.360.976	18.984.424.553	98.882.467.192	481.469.231	118.348.360.976
333	Kota Balikpapan	156.983.346.963	103.264.883.456	53.236.994.276	481.469.231	156.983.346.963
334	Kota Bontang	169.592.584.072	51.507.856.916	117.603.257.925	481.469.231	169.592.584.072
335	Kab. Tana Tidung	45.031.047.693	9.253.409.821	35.296.168.641	481.469.231	45.031.047.693
336	Kota Samarinda	165.535.227.833	69.656.838.889	95.396.919.713	481.469.231	165.535.227.833
337	Kota Tarakan	153.105.519.863	18.941.466.501	133.682.584.131	481.469.231	153.105.519.863
338	Kab. Penajam Paser Utara	142.716.970.587	11.105.448.124	131.130.053.232	481.469.231	142.716.970.587
339	Provinsi Sulawesi Utara	92.018.714.575	48.267.535.102	43.751.179.473	-	92.018.714.575
340	Kab. Bolaang Mongondow	20.473.884.698	1.861.590.869	18.130.824.598	481.469.231	20.473.884.698
341	Kab. Minahasa	28.568.526.486	3.883.569.187	24.203.488.068	481.469.231	28.568.526.486
342	Kab. Sangihe	15.996.542.737	3.625.163.961	11.889.909.545	481.469.231	15.996.542.737
343	Kota Bitung	25.678.421.284	3.918.573.998	21.278.378.055	481.469.231	25.678.421.284
344	Kota Manado	65.135.898.711	33.824.502.383	30.829.927.097	481.469.231	65.135.898.711
345	Kab. Kepulauan Talaud	19.303.800.705	2.206.157.618	16.616.173.856	481.469.231	19.303.800.705
346	Kab. Minahasa Selatan	19.934.554.078	2.144.143.697	17.308.941.150	481.469.231	19.934.554.078
347	Kab. Minahasa Tenggara	17.330.786.362	1.835.726.320	15.013.590.811	481.469.231	17.330.786.362
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16.157.007.063	2.676.449.798	12.999.088.034	481.469.231	16.157.007.063
349	Kota Kotamabagu	15.478.986.825	2.809.212.213	12.188.305.381	481.469.231	15.478.986.825
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	17.686.857.228	2.037.410.485	15.167.977.512	481.469.231	17.686.857.228
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	13.472.295.500	1.726.022.385	11.264.803.884	481.469.231	13.472.295.500
352	Kota Tomohon	25.120.109.931	3.329.558.109	21.309.082.591	481.469.231	25.120.109.931
353	Kab. Minahasa Utara	25.536.800.143	5.411.316.210	19.644.014.702	481.469.231	25.536.800.143
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	17.432.082.564	1.579.847.551	15.370.765.782	481.469.231	17.432.082.564
355	Provinsi Gorontalo	30.667.268.269	15.772.154.692	14.895.113.577	-	30.667.268.269
356	Kab. Boalemo	20.121.041.037	2.029.172.806	17.610.399.000	481.469.231	20.121.041.037
357	Kab. Gorontalo	19.194.040.300	4.910.898.582	13.801.672.487	481.469.231	19.194.040.300
358	Kota Gorontalo	19.478.367.317	9.896.030.650	9.100.867.436	481.469.231	19.478.367.317
359	Kab. Pohuwato	21.721.563.863	2.281.670.476	18.958.424.156	481.469.231	21.721.563.863
360	Kab. Gorontalo Utara	17.881.978.191	1.831.721.901	15.568.787.059	481.469.231	17.881.978.191
361	Kab. Bone Bolango	23.772.669.647	2.708.737.630	20.582.462.786	481.469.231	23.772.669.647
362	Provinsi Sulawesi Tengah	82.194.669.472	33.046.748.492	49.147.920.980	-	82.194.669.472
363	Kab. Banggai	36.829.299.881	6.946.827.040	29.401.003.610	481.469.231	36.829.299.881
364	Kab. Banggai Kepulauan	25.657.528.506	3.008.449.827	22.167.609.448	481.469.231	25.657.528.506
365	Kab. Buol	21.072.214.668	2.073.120.944	18.517.624.493	481.469.231	21.072.214.668
366	Kab. Toli-Toli	19.835.386.287	2.510.276.809	16.843.640.247	481.469.231	19.835.386.287
367	Kab. Donggala	28.353.338.272	2.645.218.675	25.226.650.366	481.469.231	28.353.338.272
368	Kab. Morowali	48.929.260.828	2.729.841.600	45.717.949.997	481.469.231	48.929.260.828
369	Kab. Poso	31.372.302.952	3.406.224.548	27.484.609.173	481.469.231	31.372.302.952

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
370	Kota Palu	27.709.585.791	18.549.826.138	8.678.290.422	481.469.231	27.709.585.791
371	Kab. Parigi Moutong	28.940.434.474	3.554.368.818	24.904.596.425	481.469.231	28.940.434.474
372	Kab. Sigi	16.732.012.827	2.227.519.200	14.023.024.396	481.469.231	16.732.012.827
373	Kab. Tojo Una Una	25.942.225.584	2.419.562.837	23.041.193.516	481.469.231	25.942.225.584
374	Provinsi Sulawesi Selatan	296.257.886.953	154.848.109.452	141.409.777.501	-	296.257.886.953
375	Kab. Bantaeng	26.522.764.491	4.404.142.003	21.637.153.257	481.469.231	26.522.764.491
376	Kab. Barru	26.404.979.971	4.871.501.468	21.052.009.272	481.469.231	26.404.979.971
377	Kab. Bone	68.067.846.472	9.675.104.691	57.911.272.550	481.469.231	68.067.846.472
378	Kab. Bulukumba	31.780.422.611	6.825.605.848	24.473.347.532	481.469.231	31.780.422.611
379	Kab. Enrekang	31.163.697.242	4.521.639.178	26.160.588.833	481.469.231	31.163.697.242
380	Kab. Gowa	38.101.135.833	8.137.646.164	29.482.020.438	481.469.231	38.101.135.833
381	Kab. Jeneponto	28.681.591.423	5.738.679.246	22.461.442.946	481.469.231	28.681.591.423
382	Kab. Luwu	24.414.479.667	3.852.774.154	20.080.236.282	481.469.231	24.414.479.667
383	Kab. Luwu Utara	35.274.164.976	4.525.666.331	30.267.029.414	481.469.231	35.274.164.976
384	Kab. Maros	33.302.958.266	7.718.817.383	25.102.671.652	481.469.231	33.302.958.266
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	36.499.147.060	12.808.422.418	23.209.255.411	481.469.231	36.499.147.060
386	Kab. Pinrang	30.179.417.426	5.745.428.078	23.952.520.117	481.469.231	30.179.417.426
387	Kab. Selayar	23.402.629.096	4.040.002.376	18.881.157.489	481.469.231	23.402.629.096
388	Kab. Sidenreng Rappang	38.144.314.889	5.871.311.402	31.791.534.256	481.469.231	38.144.314.889
389	Kab. Sinjai	25.255.772.329	4.765.438.327	20.008.864.771	481.469.231	25.255.772.329
390	Kab. Soppeng	28.746.315.025	5.461.796.349	22.803.049.445	481.469.231	28.746.315.025
391	Kab. Takalar	24.971.584.467	5.473.454.253	19.016.660.983	481.469.231	24.971.584.467
392	Kab. Tana Toraja	21.195.574.851	5.168.335.167	15.545.770.453	481.469.231	21.195.574.851
393	Kab. Wajo	115.759.495.770	6.927.718.062	108.350.308.477	481.469.231	115.759.495.770
394	Kota Pare-pare	27.313.899.750	8.265.093.219	18.567.337.300	481.469.231	27.313.899.750
395	Kab. Toraja Utara	18.660.825.185	3.251.714.463	14.927.641.491	481.469.231	18.660.825.185
396	Kota Makassar	160.990.133.884	74.761.787.613	85.746.877.040	481.469.231	160.990.133.884
397	Kota Palopo	21.110.172.102	6.028.044.215	14.600.658.656	481.469.231	21.110.172.102
398	Kab. Luwu Timur	60.510.927.665	23.447.428.618	36.582.029.816	481.469.231	60.510.927.665
399	Provinsi Sulawesi Barat	43.615.302.708	11.683.404.150	31.931.898.558	-	43.615.302.708
400	Kab. Majene	28.990.808.359	2.521.309.644	25.988.029.484	481.469.231	28.990.808.359
401	Kab. Mamuju	55.923.427.495	6.974.134.355	48.467.823.909	481.469.231	55.923.427.495
402	Kab. Polewali Mandar	27.979.989.877	3.206.087.387	24.292.433.259	481.469.231	27.979.989.877
403	Kab. Mamasa	23.663.915.488	1.775.747.485	21.406.698.772	481.469.231	23.663.915.488
404	Kab. Mamuju Utara	47.114.448.264	3.047.827.359	43.585.151.674	481.469.231	47.114.448.264
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	69.691.161.460	26.878.789.050	42.812.372.410	-	69.691.161.460
406	Kab. Buton	28.371.717.650	2.849.312.015	25.040.936.404	481.469.231	28.371.717.650
407	Kab. Konawe	21.235.649.571	2.611.058.667	18.143.121.673	481.469.231	21.235.649.571
408	Kab. Kolaka	38.229.608.857	3.944.060.860	33.804.078.766	481.469.231	38.229.608.857
409	Kab. Muna	21.071.929.446	3.399.472.152	17.190.988.063	481.469.231	21.071.929.446
410	Kota Kendari	33.656.234.707	13.361.996.924	19.812.768.552	481.469.231	33.656.234.707
411	Kota Bau-bau	24.721.237.439	4.166.497.182	20.073.271.026	481.469.231	24.721.237.439
412	Kab. Konawe Selatan	27.760.678.725	3.127.888.727	24.151.320.767	481.469.231	27.760.678.725
413	Kab. Bombana	23.049.077.557	1.481.800.345	21.085.807.981	481.469.231	23.049.077.557
414	Kab. Konawe Utara	21.685.456.566	1.362.598.162	19.841.389.173	481.469.231	21.685.456.566
415	Kab. Buton Utara	14.291.011.780	1.248.267.120	12.561.275.429	481.469.231	14.291.011.780
416	Kab. Wakatobi	19.846.548.301	1.849.723.963	17.515.355.107	481.469.231	19.846.548.301
417	Kab. Kolaka Utara	23.711.006.811	1.269.165.132	21.960.372.448	481.469.231	23.711.006.811
418	Provinsi Bali	176.928.525.925	114.887.946.924	62.040.579.001	-	176.928.525.925
419	Kab. Badung	160.033.099.164	38.656.303.826	120.895.326.107	481.469.231	160.033.099.164
420	Kab. Bangli	23.469.880.434	7.237.117.466	15.751.293.737	481.469.231	23.469.880.434
421	Kab. Buleleng	38.539.533.236	14.642.588.201	23.415.475.804	481.469.231	38.539.533.236
422	Kab. Gianyar	34.943.553.022	14.079.843.942	20.382.239.849	481.469.231	34.943.553.022
423	Kab. Jembrana	26.677.026.060	8.807.029.248	17.388.527.581	481.469.231	26.677.026.060
424	Kab. Karangasem	28.414.146.225	9.843.442.916	18.089.234.078	481.469.231	28.414.146.225
425	Kab. Klungkung	19.255.555.862	8.115.551.966	10.658.534.665	481.469.231	19.255.555.862
426	Kab. Tabanan	34.554.311.546	11.232.236.495	22.840.605.820	481.469.231	34.554.311.546
427	Kota Denpasar	133.960.024.554	59.717.806.326	73.760.748.997	481.469.231	133.960.024.554
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	111.653.413.171	76.257.660.211	35.395.752.960	-	111.653.413.171
429	Kab. Bima	23.129.884.282	4.418.267.676	18.230.147.375	481.469.231	23.129.884.282
430	Kab. Dompu	20.379.185.601	5.536.735.343	14.360.981.027	481.469.231	20.379.185.601
431	Kab. Lombok Barat	24.046.955.651	4.481.865.783	19.083.620.637	481.469.231	24.046.955.651
432	Kab. Lombok Tengah	33.215.870.740	6.941.236.885	25.793.164.624	481.469.231	33.215.870.740
433	Kab. Lombok Timur	33.666.664.581	8.059.906.590	25.125.288.760	481.469.231	33.666.664.581
434	Kab. Sumbawa	30.409.567.449	6.209.515.190	23.718.583.028	481.469.231	30.409.567.449
435	Kota Mataram	58.297.670.230	34.231.881.787	23.584.319.212	481.469.231	58.297.670.230
436	Kab. Lombok Utara	18.932.728.898	4.550.816.050	13.900.443.617	481.469.231	18.932.728.898
437	Kota Bima	22.438.632.328	8.158.417.466	13.798.745.631	481.469.231	22.438.632.328
438	Kab. Sumbawa Barat	54.048.844.138	32.645.811.182	20.921.563.725	481.469.231	54.048.844.138
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	99.337.626.039	45.870.568.569	53.467.057.470	-	99.337.626.039
440	Kab. Alor	16.031.542.233	1.738.559.152	13.811.513.850	481.469.231	16.031.542.233
441	Kab. Belu	20.711.987.912	2.405.070.573	17.825.448.108	481.469.231	20.711.987.912
442	Kab. Ende	17.713.992.208	3.131.856.343	14.100.666.634	481.469.231	17.713.992.208
443	Kab. Flores Timur	22.166.555.993	3.395.809.864	18.289.276.898	481.469.231	22.166.555.993
444	Kab. Kupang	20.756.649.773	3.220.106.696	17.055.073.846	481.469.231	20.756.649.773

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPH Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
445	Kab. Lembata	17.474.855.263	2.360.561.206	14.632.824.826	481.469.231	17.474.855.263
446	Kab. Manggarai	15.362.379.893	3.167.997.727	11.712.912.935	481.469.231	15.362.379.893
447	Kab. Ngada	14.316.994.938	1.751.636.065	12.083.889.642	481.469.231	14.316.994.938
448	Kab. Sikka	18.783.250.512	3.845.085.996	14.456.695.285	481.469.231	18.783.250.512
449	Kab. Sumba Barat	14.364.627.401	2.111.767.463	11.771.390.707	481.469.231	14.364.627.401
450	Kab. Sumba Timur	25.014.338.207	2.536.095.350	21.996.773.626	481.469.231	25.014.338.207
451	Kab. Timor Tengah Selatan	24.061.263.478	2.329.989.580	21.249.804.667	481.469.231	24.061.263.478
452	Kab. Timor Tengah Utara	18.125.876.165	1.690.031.090	15.954.375.844	481.469.231	18.125.876.165
453	Kota Kupang	40.163.269.347	25.378.676.864	14.303.123.252	481.469.231	40.163.269.347
454	Kab. Rote Ndao	19.356.205.436	2.158.149.264	16.716.586.941	481.469.231	19.356.205.436
455	Kab. Nagekeo	16.282.845.337	1.439.157.922	14.362.218.184	481.469.231	16.282.845.337
456	Kab. Sumba Tengah	13.827.491.999	1.296.113.456	12.049.909.312	481.469.231	13.827.491.999
457	Kab. Sumba Barat Daya	17.429.614.232	1.139.561.802	15.808.583.199	481.469.231	17.429.614.232
458	Kab. Manggarai Timur	13.373.476.388	1.143.175.731	11.748.831.426	481.469.231	13.373.476.388
459	Kab. Sabu Raijua	8.655.794.312	1.020.326.651	7.153.998.430	481.469.231	8.655.794.312
460	Kab. Manggarai Barat	19.291.127.124	2.139.608.715	16.670.049.178	481.469.231	19.291.127.124
461	Provinsi Maluku	83.097.585.825	25.618.448.370	57.479.137.455	-	83.097.585.825
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	25.867.161.094	1.502.233.032	23.883.458.831	481.469.231	25.867.161.094
463	Kab. Maluku Tengah	39.766.277.242	3.485.264.357	35.799.543.654	481.469.231	39.766.277.242
464	Kab. Maluku Tenggara	27.410.956.194	2.922.165.196	24.007.321.767	481.469.231	27.410.956.194
465	Kab. Pulau Buru	18.571.466.721	1.578.822.586	16.511.174.904	481.469.231	18.571.466.721
466	Kota Ambon	42.589.321.677	19.235.667.382	22.872.185.064	481.469.231	42.589.321.677
467	Kab. Seram Bagian Barat	24.001.661.456	1.889.396.221	21.630.796.004	481.469.231	24.001.661.456
468	Kab. Seram Bagian Timur	69.122.070.267	1.496.787.398	67.143.813.638	481.469.231	69.122.070.267
469	Kab. Maluku Barat Daya	22.630.631.634	2.124.941.776	20.024.220.627	481.469.231	22.630.631.634
470	Kab. Buru Selatan	17.047.229.164	1.458.919.671	15.106.840.262	481.469.231	17.047.229.164
471	Kab. Kepulauan Aru	27.204.617.156	1.633.644.945	25.089.502.980	481.469.231	27.204.617.156
472	Kota Tual	14.663.225.823	1.099.830.000	13.081.926.592	481.469.231	14.663.225.823
473	Provinsi Maluku Utara	68.138.545.719	20.859.240.421	47.277.371.298	1.934.000	68.138.545.719
474	Kab. Halmahera Tengah	30.734.671.752	2.033.324.790	28.219.877.731	481.469.231	30.734.671.752
475	Kab. Halmahera Barat	25.820.243.405	1.946.808.409	23.391.965.765	481.469.231	25.820.243.405
476	Kota Ternate	36.056.721.267	5.236.530.401	30.338.721.635	481.469.231	36.056.721.267
477	Kab. Halmahera Timur	39.869.945.059	2.216.936.269	37.171.539.559	481.469.231	39.869.945.059
478	Kota Tidore Kepulauan	27.268.157.781	3.894.052.987	22.892.635.563	481.469.231	27.268.157.781
479	Kab. Kepulauan Sula	29.068.691.675	2.047.247.347	26.539.975.097	481.469.231	29.068.691.675
480	Kab. Pulau Morotai	15.354.158.183	1.223.385.460	13.649.303.492	481.469.231	15.354.158.183
481	Kab. Halmahera Selatan	38.885.486.609	2.270.252.216	36.133.765.162	481.469.231	38.885.486.609
482	Kab. Halmahera Utara	34.785.744.240	10.420.322.744	23.883.952.265	481.469.231	34.785.744.240
483	Kab. Yalimo	12.828.370.436	2.458.297.627	9.888.603.578	481.469.231	12.828.370.436
484	Kab. Lanny Jaya	14.155.132.074	2.466.396.489	11.207.266.354	481.469.231	14.155.132.074
485	Provinsi Papua	311.801.544.793	144.855.058.395	166.944.137.918	2.348.480	311.801.544.793
486	Kab. Biak Numfor	25.745.180.355	5.232.374.968	20.031.336.156	481.469.231	25.745.180.355
487	Kab. Jayapura	36.532.704.754	4.190.830.306	31.860.405.217	481.469.231	36.532.704.754
488	Kab. Jayawijaya	28.679.352.399	6.205.614.657	21.992.268.511	481.469.231	28.679.352.399
489	Kab. Merauke	42.329.577.782	5.517.377.073	36.330.731.478	481.469.231	42.329.577.782
490	Kab. Mimika	190.079.805.963	93.030.620.402	96.567.716.330	481.469.231	190.079.805.963
491	Kab. Nabire	29.944.546.672	3.779.226.045	25.683.851.396	481.469.231	29.944.546.672
492	Kab. Paniai	21.060.157.904	3.926.748.727	16.651.939.946	481.469.231	21.060.157.904
493	Kab. Puncak Jaya	28.417.112.176	3.315.103.719	24.620.539.226	481.469.231	28.417.112.176
494	Kab. Kepulauan Yapen	33.643.528.367	3.656.294.963	29.505.764.173	481.469.231	33.643.528.367
495	Kota Jayapura	56.144.503.755	37.525.381.515	18.137.653.009	481.469.231	56.144.503.755
496	Kab. Sarmi	31.482.556.376	3.026.459.939	27.974.627.206	481.469.231	31.482.556.376
497	Kab. Keerom	31.066.013.449	3.321.184.010	27.263.360.208	481.469.231	31.066.013.449
498	Kab. Yahukimo	37.812.427.692	2.592.838.009	34.738.120.452	481.469.231	37.812.427.692
499	Kab. Pegunungan Bintang	40.806.221.930	4.002.264.071	36.322.488.628	481.469.231	40.806.221.930
500	Kab. Tolikara	29.487.960.817	2.672.458.213	26.334.033.373	481.469.231	29.487.960.817
501	Kab. Boven Digoel	45.548.226.740	4.812.104.102	40.254.653.407	481.469.231	45.548.226.740
502	Kab. Mappi	41.129.128.038	3.737.107.845	36.910.550.962	481.469.231	41.129.128.038
503	Kab. Asmat	38.598.986.566	3.359.575.522	34.757.941.813	481.469.231	38.598.986.566
504	Kab. Waropen	43.618.121.662	2.569.701.918	40.566.950.513	481.469.231	43.618.121.662
505	Kab. Mamberamo Raya	78.133.335.919	2.371.579.294	75.280.287.394	481.469.231	78.133.335.919
506	Kab. Mamberamo Tengah	12.334.505.285	2.288.545.095	9.564.490.959	481.469.231	12.334.505.285
507	Kab. Nduga	13.320.077.290	2.404.296.067	10.434.311.992	481.469.231	13.320.077.290
508	Kab. Dogiyai	19.784.691.030	2.291.023.902	17.012.197.897	481.469.231	19.784.691.030
509	Kab. Intan Jaya	18.135.149.066	2.809.349.640	14.844.330.195	481.469.231	18.135.149.066
510	Kab. Puncak	19.817.115.587	2.841.051.852	16.494.594.504	481.469.231	19.817.115.587
511	Kab. Deiyai	14.381.530.653	2.657.421.176	11.242.640.246	481.469.231	14.381.530.653
512	Kab. Supiori	19.291.024.862	2.443.405.979	16.366.149.652	481.469.231	19.291.024.862
513	Provinsi Papua Barat	198.508.632.667	25.396.243.942	173.112.388.725	-	198.508.632.667
514	Kab. Sorong	157.784.896.183	5.710.515.568	151.592.911.384	481.469.231	157.784.896.183
515	Kab. Manokwari	93.573.706.165	6.527.232.101	86.565.004.833	481.469.231	93.573.706.165
516	Kab. Fak Fak	72.710.276.431	2.216.221.647	70.012.585.553	481.469.231	72.710.276.431
517	Kota Sorong	51.930.826.427	8.938.376.019	42.510.981.177	481.469.231	51.930.826.427
518	Kab. Sorong Selatan	64.145.243.735	2.302.013.092	61.361.761.412	481.469.231	64.145.243.735
519	Kab. Raja Ampat	72.928.733.274	1.920.361.098	70.526.902.945	481.469.231	72.928.733.274

No.	Daerah	Pagu	Realisasi			
			PPh Perorangan	PBB	BPHTB	Total
1	2	3	4	5	6	7 = 4+5+6
520	Kab. Teluk Bintuni	157.202.096.792	11.076.897.859	145.643.729.702	481.469.231	157.202.096.792
521	Kab. Teluk Wondama	41.145.779.180	2.711.112.559	37.953.197.390	481.469.231	41.145.779.180
522	Kab. Tambrau	24.612.409.763	1.066.615.583	23.064.324.949	481.469.231	24.612.409.763
523	Kab. Maybrat	27.426.526.131	1.059.467.748	25.885.589.152	481.469.231	27.426.526.131
524	Kab. Kaimana	46.334.044.012	2.157.983.170	43.694.591.611	481.469.231	46.334.044.012
	Dana cadangan	-	-	-	-	-
	Nilai belum teridentifikasi daerah penerima	-	-	-	-	-
JUMLAH		47.214.136.030.788	19.378.280.456.694	27.597.042.553.038	238.813.021.056	47.214.136.030.788

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	879.729.635.431	452.325.614.300	719.339.775.717	1.452.522.717	-	157.970.756	-	1.173.275.883.490
2	Kab. Aceh Barat	9.262.153.522	2.126.922.951	8.529.720.661	1.080.817.249	-	5.273.262	359.154.909	12.101.889.032
3	Kab. Aceh Besar	8.604.587.281	2.126.922.951	8.529.720.661	185.001.462	-	14.846.488	359.154.909	11.215.646.471
4	Kab. Aceh Selatan	8.815.662.440	2.126.922.951	8.529.720.661	441.362.110	-	44.440.523	359.154.909	11.501.601.154
5	Kab. Aceh Singkil	8.705.533.500	2.126.922.951	8.529.720.661	286.653.699	-	37.208.246	359.154.909	11.339.660.466
6	Kab. Aceh Tengah	8.936.967.811	2.126.922.951	8.529.720.661	518.088.010	-	22.414.657	359.154.909	11.556.301.188
7	Kab. Aceh Tenggara	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633
8	Kab. Aceh Timur	8.113.420.642	2.169.178.995	8.159.443.254	35.403.850	-	64.069.313	359.154.909	10.787.250.321
9	Kab. Aceh Utara	169.193.306.438	34.669.129.053	187.438.397.628	32.715.850	-	24.048.637	359.154.909	222.523.446.077
10	Kab. Bireun	8.585.716.099	2.126.922.951	8.529.720.661	166.836.298	-	7.602.119	359.154.909	11.190.236.938
11	Kab. Pidie	8.504.209.363	2.126.922.951	8.529.720.661	204.587.424	-	10.657.192	359.154.909	11.231.043.137
12	Kab. Simeulue	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633
13	Kota Banda Aceh	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633
14	Kota Sabang	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633
15	Kota Langsa	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	66.109.770	359.154.909	11.114.624.141
16	Kota Lhokseumawe	8.451.595.651	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633
17	Kab. Nagan Raya	8.486.717.865	2.126.922.951	8.529.720.661	673.854.864	-	12.911.447	359.154.909	11.702.564.832
18	Kab. Aceh Jaya	8.828.993.554	2.126.922.951	8.529.720.661	485.828.823	-	417.145.594	359.154.909	11.918.772.938
19	Kab. Pidie Jaya	8.452.043.651	2.126.922.951	8.529.720.661	33.163.850	-	5.273.262	359.154.909	11.054.235.633
20	Kab. Aceh Barat Daya	8.692.009.051	2.126.922.951	8.529.720.661	285.240.610	-	7.319.380	359.154.909	11.308.358.511
21	Kab. Gayo Lues	8.951.508.470	2.126.922.951	8.529.720.661	1.084.341.782	-	5.273.262	359.154.909	12.105.413.565
22	Kab. Aceh Tamiang	17.860.757.929	14.207.842.781	8.529.720.661	35.045.450	-	20.091.174	359.154.909	23.151.854.975
23	Kab. Bener Meriah	8.453.428.789	2.126.922.951	8.529.720.661	32.715.850	-	5.273.262	359.154.909	11.053.787.633
24	Kota Subulussalam	8.467.324.192	2.126.922.951	8.529.720.661	48.444.391	-	26.467.735	359.154.909	11.090.710.647
25	Provinsi Sumatera Utara	7.654.753.582	1.412.940.716	1.795.876.446	769.036.216	-	4.817.433.039	-	8.795.286.417
26	Kab. Asahan	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	489.215.508	359.154.909	1.048.921.486
27	Kab. Dairi	1.657.201.831	88.308.792	112.242.277	238.928.524	-	971.345.790	359.154.909	1.769.980.292
28	Kab. Deli Serdang	760.041.749	90.083.745	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	862.570.495
29	Kab. Tanah Karo	761.952.622	88.308.792	112.242.277	100.874.833	-	301.656.055	359.154.909	962.236.866
30	Kab. Labuhan Batu	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
31	Kab. Langkat	5.176.074.152	2.254.150.519	3.284.550.929	-	-	301.089.564	359.154.909	6.198.945.921
32	Kab. Mandailing Natal	3.335.598.319	88.308.792	112.242.277	539.514.595	-	2.425.865.086	359.154.909	3.525.085.659
33	Kab. Nias	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
34	Kab. Simalungun	3.011.966.111	88.308.792	112.242.277	-	-	2.658.508.596	359.154.909	3.218.214.574
35	Kab. Tapanuli Selatan	3.789.443.800	88.308.792	112.242.277	279.392.884	-	3.955.651.161	359.154.909	4.794.750.023
36	Kab. Tapanuli Tengah	835.955.789	88.308.792	112.242.277	77.665.987	-	301.089.564	359.154.909	938.461.529
37	Kab. Tapanuli Utara	1.522.574.491	88.308.792	112.242.277	1.598.341.008	-	324.212.973	359.154.909	2.482.259.959
38	Kab. Toba Samosir	945.945.764	88.308.792	112.242.277	187.464.601	-	314.313.739	359.154.909	1.061.484.318
39	Kota Binjai	1.189.025.313	298.769.783	419.444.242	-	-	301.089.564	359.154.909	1.378.458.498
40	Kota Medan	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
41	Kota Pematang Siantar	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
42	Kota Sibolga	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
43	Kota Tanjung Balai	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
44	Kab. Batu Bara	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
45	Kab. Labuhan Batu Utara	890.865.369	88.308.792	112.242.277	-	-	434.145.093	359.154.909	993.851.071
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	1.216.072.483	88.308.792	112.242.277	-	-	810.615.074	359.154.909	1.370.321.052
47	Kab. Padang Lawas Utara	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
48	Kab. Padang Lawas	6.802.841.813	447.803.762	112.242.277	-	-	6.086.148.513	359.154.909	7.005.349.461
49	Kab. Nias Utara	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
50	Kab. Nias Barat	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
51	Kota Tebing Tinggi	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
52	Kota Padang Sidempuan	871.685.322	88.308.792	112.242.277	113.395.520	-	301.089.564	359.154.909	974.191.062
53	Kab. Pakpak Bharat	774.078.554	88.308.792	112.242.277	6.225.245	-	311.708.439	359.154.909	877.639.662
54	Kab. Nias Selatan	3.949.871.062	88.308.792	112.242.277	-	-	3.492.670.824	359.154.909	4.052.376.802
55	Kab. Humbang Hasundutan	5.011.451.585	88.308.792	112.242.277	448.000	-	5.613.620.676	359.154.909	6.173.774.654
56	Kab. Serdang Bedagai	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
57	Kab. Samosir	3.185.603.037	88.308.792	112.242.277	-	-	3.968.664.381	359.154.909	4.528.370.359
58	Kota Gunung sitoli	758.289.802	88.308.792	112.242.277	-	-	301.089.564	359.154.909	860.795.542
59	Provinsi Sumatera Barat	8.874.164.862	-	-	7.370.160.397	-	2.160.613.823	-	9.530.774.220
60	Kab. Limapuluh Kota	1.288.194.932	-	-	833.139.195	-	228.034.989	359.154.909	1.420.329.093
61	Kab. Agam	1.270.655.390	-	-	783.071.357	-	274.892.583	359.154.909	1.417.118.849
62	Kab. Kepulauan Mentawai	4.948.597.739	-	-	779.935.357	-	3.935.358.587	359.154.909	5.074.448.853
63	Kab. Padang Pariaman	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
64	Kab. Pasaman	1.716.813.078	-	-	1.239.913.327	-	237.434.528	359.154.909	1.836.502.764
65	Kab. Pesisir Selatan	1.648.460.686	-	-	1.310.318.277	-	250.679.570	359.154.909	1.920.152.756
66	Kab. Sijunjung	3.427.929.593	-	-	2.445.627.035	-	755.975.967	359.154.909	3.560.757.911
67	Kab. Solok	1.513.478.483	-	-	1.066.938.014	-	240.048.607	359.154.909	1.666.141.530
68	Kab. Tanah Datar	1.298.985.600	-	-	825.806.541	-	231.290.697	359.154.909	1.416.252.147
69	Kota Bukit Tinggi	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
70	Kota Padang Panjang	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
71	Kota Padang	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
72	Kota Payakumbuh	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
73	Kota Sawahlunto	9.393.303.365	-	-	8.923.945.422	-	227.205.475	359.154.909	9.510.305.806
74	Kota Solok	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
75	Kota Pariaman	1.248.003.234	-	-	779.935.357	-	225.506.394	359.154.909	1.364.596.660
76	Kab. Pasaman Barat	1.422.914.109	-	-	786.291.037	-	504.563.901	359.154.909	1.650.009.847
77	Kab. Dharmasraya	4.461.517.370	-	-	3.470.770.616	-	1.689.895.927	359.154.909	5.519.821.452
78	Kab. Solok Selatan	11.235.165.687	-	-	1.559.847.875	-	11.397.401.177	359.154.909	13.316.403.961
79	Provinsi Riau	2.238.604.221.624	2.754.298.723.502	319.775.673	5.299.509.034	-	29.762.375.142	-	2.789.680.383.351
80	Kab. Bengkalis	2.463.692.335.398	3.040.014.461.009	58.141.029	793.539.531	-	26.733.056.151	359.154.909	3.067.958.352.629
81	Kab. Indragiri Hilir	456.530.213.714	500.781.586.090	58.141.029	2.304.138.751	-	60.515.409.206	359.154.909	564.018.429.985
82	Kab. Indragiri Hulu	426.719.334.892	511.395.713.977	58.141.029	8.962.182.973	-	9.253.733.412	359.154.909	530.028.926.300
83	Kab. Kampar	890.694.401.003	1.099.172.621.575	58.141.029	882.884.756	-	8.267.843.678	359.154.909	1.108.740.645.947
84	Kab. Kuantan Singingi	410.543.729.523	500.781.586.090	58.141.029	3.297.469.532	-	6.625.593.257	359.154.909	511.121.944.817
85	Kab. Pelalawan	444.408.667.892	513.125.106.379	639.551.349	800.920.331	-	32.442.201.316	359.154.909	547.366.934.284
86	Kab. Rokan Hilir	1.051.409.001.481	1.306.896.085.522	58.141.029	793.539.531	-	6.470.703.173	359.154.909	1.314.577.624.164
87	Kab. Rokan Hulu	422.450.110.187	517.253.203.997	58.141.029	1.024.788.551	-	6.109.570.813	359.154.909	524.804.859.299
88	Kab. Siak	1.170.296.036.220	1.443.199.353.718	58.141.029	825.586.250	-	13.772.701.642	359.154.909	1.458.214.937.548
89	Kota Dumai	413.133.919.656	500.781.586.090	58.141.029	793.539.531	-	13.394.625.403	359.154.909	515.387.046.962
90	Kota Pekanbaru	407.192.174.487	500.781.586.090	58.141.029	793.539.531	-	5.411.340.934	359.154.909	507.403.762.493
91	Kab. Kepulauan Meranti	475.338.275.855	583.012.003.463	58.141.029	885.086.790	-	11.941.098.602	359.154.909	596.255.484.793
92	Provinsi Kepulauan Riau	786.874.998.084	374.888.724.631	619.438.174.875	27.113.618.412	-	74.137.124	-	1.021.514.655.042
93	Kab. Bintan	264.098.305.318	123.648.266.965	187.891.996.000	26.340.462.404	-	24.712.374	359.154.909	338.264.592.652

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
94	Kab. Natuna	736.642.805.354	500.042.177.017	437.330.483.810	8.364.240.534	-	24.712.374	359.154.909	946.120.768.644
95	Kab. Karimun	257.206.425.991	123.648.266.965	187.891.996.000	20.399.133.107	-	34.994.098	359.154.909	332.333.545.079
96	Kota Batam	247.228.491.499	123.648.266.965	187.891.996.000	8.364.240.534	-	121.120.607	359.154.909	320.384.779.015
97	Kab. Kepulauan Anambas	510.718.005.448	326.321.910.838	322.205.027.899	8.364.240.534	-	24.712.374	359.154.909	657.275.046.554
98	Kota Tanjung Pinang	251.964.082.792	123.648.266.965	187.891.996.000	13.374.170.424	-	24.712.374	359.154.909	325.298.300.672
99	Kab. Lingga	251.115.894.752	123.648.266.965	187.891.996.000	12.331.733.714	-	253.224.449	359.154.909	324.484.376.037
100	Provinsi Jambi	297.534.261.257	144.785.474.050	215.082.170.106	16.230.456.777	-	4.526.113.094	-	380.624.214.027
101	Kab. Batanghari	66.224.215.156	30.744.661.525	43.016.434.020	7.153.858.317	-	2.758.082.182	359.154.909	84.032.190.953
102	Kab. Bungo	76.883.786.444	28.957.094.809	43.016.434.020	19.859.691.671	-	2.241.836.635	359.154.909	94.434.212.044
103	Kab. Kerinci	59.477.340.650	28.957.094.809	43.016.434.020	2.875.502.938	-	906.742.188	359.154.909	76.114.928.864
104	Kab. Merangin	61.027.377.436	28.957.094.809	43.016.434.020	4.331.034.531	-	1.114.614.562	359.154.909	77.778.332.831
105	Kab. Muaro Jambi	70.406.321.401	40.073.255.131	43.726.816.158	3.325.189.661	-	2.875.146.630	359.154.909	90.359.562.489
106	Kab. Sarolangun	81.419.050.374	44.298.149.985	43.016.434.020	11.482.831.441	-	3.224.901.832	359.154.909	102.381.472.187
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	388.542.637.844	191.228.139.489	298.757.263.924	3.264.435.341	-	3.474.048.065	359.154.909	497.083.041.728
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	208.661.904.262	93.681.530.998	173.713.128.173	2.875.502.938	-	2.062.297.596	359.154.909	272.691.614.614
109	Kab. Tebo	68.792.058.990	28.957.094.809	43.016.434.020	4.002.774.375	-	10.221.836.941	359.154.909	86.557.295.054
110	Kota Jambi	63.615.240.790	34.330.685.020	43.016.434.020	2.875.502.938	-	905.836.887	359.154.909	81.487.613.774
111	Kota Sungai Penuh	59.476.475.590	28.957.094.809	43.016.434.020	2.875.502.938	-	905.222.618	359.154.909	76.113.409.294
112	Provinsi Sumatera Selatan	917.703.927.329	310.940.676.375	740.078.613.051	140.868.855.185	-	6.416.618.893	-	1.198.304.763.504
113	Kab. Lahat	226.378.897.265	51.439.523.105	123.456.158.320	106.578.774.807	-	1.560.791.666	359.154.909	283.394.402.807
114	Kab. Musi Banyuasin	1.276.613.708.958	403.587.622.752	1.250.404.048.940	24.662.514.536	-	7.468.619.455	359.154.909	1.686.481.960.592
115	Kab. Musi Rawas	310.102.473.844	89.134.274.857	285.039.959.946	25.205.514.887	-	1.778.220.038	359.154.909	401.517.124.637
116	Kab. Muara Enim	353.866.509.159	130.309.413.181	134.141.832.306	186.789.242.480	-	2.479.682.150	359.154.909	454.079.325.026
117	Kab. Ogan Komering Ilir	131.979.456.478	44.420.096.623	105.725.516.149	19.547.007.918	-	2.063.879.829	359.154.909	172.115.655.428
118	Kab. Ogan Komering Ulu	152.809.095.893	71.735.438.260	108.721.119.278	21.393.863.299	-	942.581.822	359.154.909	203.152.157.568
119	Kota Palembang	130.799.741.306	44.420.096.623	105.725.516.149	19.414.639.578	-	916.659.841	359.154.909	170.836.067.100
120	Kota Pagar Alam	130.799.741.306	44.420.096.623	105.725.516.149	19.414.639.578	-	916.659.841	359.154.909	170.836.067.100
121	Kota Lubuk Linggau	130.799.741.306	44.420.096.623	105.725.516.149	19.414.639.578	-	916.659.841	359.154.909	170.836.067.100
122	Kota Prabumulih	138.455.274.033	52.382.767.754	107.021.688.054	19.779.686.226	-	922.169.099	359.154.909	180.465.466.042
123	Kab. Empat Lawang	131.250.491.732	44.420.096.623	105.725.516.149	19.865.390.004	-	916.659.841	359.154.909	171.286.817.526
124	Kab. Banyuasin	178.697.281.469	79.857.862.236	105.725.516.149	22.950.478.119	-	23.248.785.754	359.154.909	232.141.797.167
125	Kab. Ogan Ilir	138.422.432.650	54.375.126.962	105.725.516.149	19.643.125.978	-	916.659.841	359.154.909	181.019.583.839
126	Kab. OKU Timur	130.909.631.391	44.420.096.623	105.725.516.149	19.517.591.752	-	925.163.184	359.154.909	170.947.522.617
127	Kab. OKU Selatan	130.900.622.876	44.420.096.623	105.725.516.149	19.515.521.148	-	940.117.644	359.154.909	170.960.406.473
128	Provinsi Bangka Belitung	83.938.317.192	9.079.641.414	-	77.353.590.519	-	19.959.052	-	86.453.190.985
129	Kab. Bangka	73.678.085.895	2.591.674.378	-	72.427.128.222	-	26.789.672	359.154.909	75.404.747.181
130	Kab. Belitung	35.616.532.515	2.591.674.378	-	33.329.908.361	-	52.352.591	359.154.909	36.333.090.239
131	Kota Pangkal Pinang	26.723.141.935	2.591.674.378	-	24.457.956.082	-	6.653.017	359.154.909	27.415.438.386
132	Kab. Bangka Selatan	40.732.700.961	2.591.674.378	-	39.069.312.169	-	6.653.017	359.154.909	42.026.794.473
133	Kab. Bangka Tengah	40.732.851.112	2.591.674.378	-	39.412.681.241	-	6.676.697	359.154.909	42.370.187.225
134	Kab. Bangka Barat	58.976.898.065	2.591.674.378	-	57.180.479.869	-	30.258.850	359.154.909	60.161.568.006
135	Kab. Belitung Timur	38.172.895.195	2.591.674.378	-	35.785.188.736	-	6.653.017	359.154.909	38.742.671.040
136	Provinsi Bengkulu	16.275.097.292	-	-	18.719.547.207	-	83.421.970	-	18.802.969.177
137	Kab. Bengkulu Selatan	3.858.103.573	-	-	4.061.522.361	-	18.538.215	359.154.909	4.439.215.485
138	Kab. Bengkulu Utara	19.758.292.337	-	-	21.277.322.742	-	445.702.872	359.154.909	22.082.180.523
139	Kab. Rejang Lebong	3.840.463.573	-	-	4.043.882.361	-	18.538.215	359.154.909	4.421.575.485
140	Kota Bengkulu	3.840.463.573	-	-	4.043.882.361	-	18.538.215	359.154.909	4.421.575.485
141	Kab. Kaur	3.943.853.018	-	-	4.146.838.200	-	18.971.821	359.154.909	4.524.964.930
142	Kab. Seluma	4.089.761.664	-	-	4.656.490.865	-	18.976.461	359.154.909	5.034.622.235

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
143	Kab. Mukomuko	3.863.892.707	-	-	4.143.254.972	-	28.136.130	359.154.909	4.530.546.011
144	Kab. Lebong	4.065.965.084	-	-	4.269.383.872	-	18.538.215	359.154.909	4.647.076.996
145	Kab. Bengkulu Tengah	17.437.135.055	-	-	20.209.368.719	-	18.538.215	359.154.909	20.587.061.843
146	Kab. Kepahiang	3.855.782.397	-	-	4.046.794.361	-	30.945.039	359.154.909	4.436.894.309
147	Provinsi Lampung	129.073.553.648	129.169.101.254	22.930.713.045	2.492.682.246	-	723.694.024	-	155.316.190.569
148	Kab. Lampung Barat	19.075.599.472	18.836.302.076	3.274.205.620	333.364.972	-	111.337.542	359.154.909	22.914.365.119
149	Kab. Lampung Selatan	19.074.281.982	18.836.302.076	3.274.205.620	332.047.482	-	111.337.542	359.154.909	22.913.047.629
150	Kab. Lampung Tengah	19.080.146.462	18.836.302.076	3.274.205.620	337.911.962	-	111.337.542	359.154.909	22.918.912.109
151	Kab. Lampung Utara	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
152	Kab. Lampung Timur	75.325.836.494	85.437.399.043	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	89.505.741.396
153	Kab. Tanggamus	22.968.884.280	18.836.302.076	3.274.205.620	4.562.193.882	-	111.337.542	359.154.909	27.143.194.029
154	Kab. Tulang Bawang	19.097.952.921	18.836.302.076	3.274.205.620	355.718.421	-	111.337.542	359.154.909	22.936.718.568
155	Kab. Way Kanan	19.455.573.093	18.836.302.076	3.274.205.620	350.128.698	-	479.654.294	359.154.909	23.299.445.597
156	Kab. Pesawaran	19.097.114.847	18.836.302.076	3.274.205.620	564.813.793	-	111.337.542	359.154.909	23.145.813.940
157	Kab. Pringsewu	19.093.467.706	18.836.302.076	3.274.205.620	351.233.206	-	111.337.542	359.154.909	22.932.233.353
158	Kab. Mesuji	20.662.824.528	18.836.302.076	3.274.205.620	1.189.083.505	-	1.079.071.298	359.154.909	24.737.817.408
159	Kab. Tulang Bawang Barat	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
160	Kota Bandar Lampung	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
161	Kota Metro	19.065.878.782	18.836.302.076	3.274.205.620	323.644.282	-	111.337.542	359.154.909	22.904.644.429
162	Provinsi DKI Jakarta	262.934.562.203	232.407.429.700	68.769.591.731	-	-	-	2.154.930.323	303.331.951.754
163	Provinsi Jawa Barat	288.900.551.224	146.635.202.802	63.459.271.232	7.648.488.372	125.255.795.686	2.232.650.808	-	345.231.408.900
164	Kab. Bandung	118.862.075.275	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	105.778.754.949	182.561.175	359.154.909	123.285.875.844
165	Kab. Bekasi	59.768.186.771	41.020.170.364	22.119.267.272	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	74.274.224.523
166	Kab. Bogor	81.147.349.860	11.370.597.845	5.018.250.706	12.839.318.452	58.508.359.948	247.888.195	359.154.909	88.343.570.055
167	Kab. Ciamis	24.726.344.708	11.370.597.845	5.018.250.706	701.888.401	10.020.463.654	2.120.571.269	359.154.909	29.590.926.784
168	Kab. Cianjur	24.550.413.710	11.370.597.845	5.018.250.706	1.530.881.036	10.020.463.654	1.312.395.599	359.154.909	29.611.743.749
169	Kab. Cirebon	23.104.606.719	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	183.200.612	359.154.909	27.528.223.986
170	Kab. Garut	79.200.507.315	11.370.597.845	5.018.250.706	965.807.139	65.964.300.513	204.236.740	359.154.909	83.882.347.852
171	Kab. Indramayu	47.668.360.998	30.575.855.459	17.500.694.938	576.556.260	10.020.463.654	360.223.426	359.154.909	59.392.948.646
172	Kab. Karawang	48.147.902.415	22.052.644.119	26.661.070.707	576.556.260	10.020.463.654	187.210.282	359.154.909	59.857.099.931
173	Kab. Kuningan	23.153.867.232	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	235.779.989	359.154.909	27.580.803.363
174	Kab. Majalengka	24.475.416.292	12.401.223.862	5.979.089.773	576.556.260	10.020.463.654	199.782.607	359.154.909	29.536.271.065
175	Kab. Purwakarta	23.278.388.749	11.370.597.845	5.018.250.706	593.905.060	10.020.463.654	343.396.789	359.154.909	27.705.768.963
176	Kab. Subang	53.066.214.382	12.872.748.948	41.755.464.936	576.556.260	10.020.463.654	221.147.912	359.154.909	65.805.536.619
177	Kab. Sukabumi	63.762.468.296	11.370.597.845	5.018.250.706	667.581.085	50.321.566.925	481.003.743	359.154.909	68.218.155.213
178	Kab. Sumedang	23.173.957.023	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	258.065.711	359.154.909	27.603.089.085
179	Kab. Tasikmalaya	24.873.759.582	11.370.597.845	5.018.250.706	2.367.512.740	10.020.463.654	256.211.884	359.154.909	29.392.191.738
180	Kab. Bandung Barat	23.142.173.015	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	224.502.786	359.154.909	27.569.526.160
181	Kota Bandung	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
182	Kota Bekasi	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
183	Kota Bogor	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
184	Kota Cirebon	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
185	Kota Depok	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
186	Kota Sukabumi	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
187	Kota Cimahi	23.100.135.432	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	178.612.064	359.154.909	27.523.635.438
188	Kota Tasikmalaya	23.130.718.418	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	209.197.311	359.154.909	27.554.220.685
189	Kota Banjar	23.195.854.044	11.370.597.845	5.018.250.706	576.556.260	10.020.463.654	274.330.676	359.154.909	27.619.354.050
190	Provinsi Banten	2.809.441.055	-	-	3.695.803.519	-	423.723.359	-	4.119.526.878
191	Kab. Lebak	1.371.634.484	-	-	1.233.838.973	-	205.094.199	359.154.909	1.798.088.081

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
192	Kab. Pandeglang	5.766.962.730	-	-	7.330.952.564	-	763.416.336	359.154.909	8.453.523.809
193	Kab. Serang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	359.154.909	1.516.622.482
194	Kab. Tangerang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	359.154.909	1.516.622.482
195	Kota Cilegon	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	359.154.909	1.516.622.482
196	Kota Tangerang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	359.154.909	1.516.622.482
197	Kota Serang	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	359.154.909	1.516.622.482
198	Kota Tangerang Selatan	1.101.916.674	-	-	1.036.403.757	-	121.063.816	359.154.909	1.516.622.482
199	Provinsi Jawa Tengah	8.488.890.663	1.632.525.850	459.888.229	1.133.068.814	-	6.402.991.902	-	9.628.474.795
200	Kab. Banjarnegara	925.742.520	96.030.933	27.052.248	66.473.823	-	524.784.212	359.154.909	1.073.496.125
201	Kab. Banyumas	922.548.409	96.030.933	27.052.248	68.851.583	-	508.729.794	359.154.909	1.059.819.467
202	Kab. Batang	1.374.339.503	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.000.813.944	359.154.909	1.546.754.977
203	Kab. Blora	8.663.431.832	3.265.051.697	53.852.509	63.702.943	-	5.938.891.646	359.154.909	9.680.653.704
204	Kab. Boyolali	987.110.168	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	615.981.150	359.154.909	1.161.922.183
205	Kab. Brebes	1.259.084.995	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	854.589.395	359.154.909	1.400.530.428
206	Kab. Cilacap	2.687.806.886	96.030.933	27.052.248	2.159.509.229	-	614.134.958	359.154.909	3.255.882.277
207	Kab. Demak	809.756.227	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.976.776	359.154.909	922.917.809
208	Kab. Grobogan	1.531.019.529	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.139.396.998	359.154.909	1.685.338.031
209	Kab. Jepara	983.917.717	96.030.933	27.052.248	111.332.010	-	515.534.678	359.154.909	1.109.104.778
210	Kab. Karanganyar	810.527.800	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	377.743.759	359.154.909	923.684.792
211	Kab. Kebumen	849.009.471	96.030.933	27.052.248	82.760.674	-	458.867.531	359.154.909	1.023.866.295
212	Kab. Kendal	1.415.465.330	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.054.593.520	359.154.909	1.600.534.553
213	Kab. Klaten	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
214	Kab. Kudus	810.082.313	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	378.403.471	359.154.909	924.344.504
215	Kab. Magelang	821.800.803	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	390.229.720	359.154.909	936.170.753
216	Kab. Pati	1.172.511.576	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	762.667.318	359.154.909	1.308.608.351
217	Kab. Pekalongan	861.912.790	96.030.933	27.052.248	66.849.023	-	434.088.906	359.154.909	983.176.019
218	Kab. Pemalang	1.741.360.841	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.321.393.005	359.154.909	1.867.334.038
219	Kab. Purbalingga	839.095.925	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	406.508.108	359.154.909	952.449.141
220	Kab. Purworejo	823.505.537	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	439.592.458	359.154.909	985.533.491
221	Kab. Rembang	1.901.807.434	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	1.520.447.712	359.154.909	2.066.388.745
222	Kab. Semarang	865.604.148	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	443.103.550	359.154.909	989.044.583
223	Kab. Sragen	810.765.095	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	378.402.077	359.154.909	924.343.110
224	Kab. Sukoharjo	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
225	Kab. Tegal	1.260.635.402	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	843.310.389	359.154.909	1.389.251.422
226	Kab. Temanggung	828.601.366	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	420.033.641	359.154.909	965.974.674
227	Kab. Wonogiri	975.864.134	96.030.933	27.052.248	203.882.067	-	409.970.709	359.154.909	1.096.090.866
228	Kab. Wonosobo	846.066.646	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	462.686.935	359.154.909	1.008.627.968
229	Kota Magelang	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
230	Kota Pekalongan	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
231	Kota Salatiga	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
232	Kota Semarang	1.479.019.565	96.030.933	892.976.198	63.702.943	-	383.565.160	359.154.909	1.795.430.143
233	Kota Surakarta	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
234	Kota Tegal	809.551.604	96.030.933	27.052.248	63.702.943	-	376.646.582	359.154.909	922.587.615
235	Provinsi DI Yogyakarta	3.836.072	-	-	1.731.600	-	3.312.792	-	5.044.392
236	Kab. Bantul	314.385.306	-	-	-	-	2.076.876	359.154.909	361.231.785
237	Kab. Gunung Kidul	316.865.934	-	-	-	-	5.985.744	359.154.909	365.140.653
238	Kab. Kulon Progo	321.299.466	-	-	6.926.400	-	1.875.756	359.154.909	367.957.065
239	Kab. Sleman	314.155.866	-	-	-	-	1.656.396	359.154.909	360.811.305
240	Kota Yogyakarta	314.155.866	-	-	-	-	1.656.396	359.154.909	360.811.305

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
241	Provinsi Jawa Timur	306.203.069.556	324.380.649.124	55.938.403.466	231.501.936	-	6.545.932.599	-	387.096.487.125
242	Kab. Bangkalan	30.150.728.292	28.078.766.446	5.515.066.998	4.724.552	-	390.992.466	359.154.909	34.348.705.371
243	Kab. Banyuwangi	19.461.233.565	17.491.894.976	3.061.095.205	103.161.564	-	3.100.847.521	359.154.909	24.116.154.175
244	Kab. Blitar	17.062.593.354	17.491.894.976	3.061.095.205	46.113.267	-	624.698.155	359.154.909	21.582.956.512
245	Kab. Bojonegoro	423.526.452.540	551.081.627.816	3.465.113.033	4.724.552	-	1.240.479.769	359.154.909	556.151.100.079
246	Kab. Bondowoso	16.850.726.117	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	457.937.302	359.154.909	21.374.806.944
247	Kab. Gresik	39.623.670.799	39.976.994.076	11.744.174.132	4.724.552	-	437.537.071	359.154.909	52.522.584.740
248	Kab. Jember	18.179.616.185	17.491.894.976	3.061.095.205	26.633.907	-	1.956.339.944	359.154.909	22.895.118.941
249	Kab. Jombang	16.962.340.474	17.491.894.976	3.061.095.205	51.684.332	-	546.899.659	359.154.909	21.510.729.081
250	Kab. Kediri	17.493.672.875	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	1.099.298.855	359.154.909	22.016.168.497
251	Kab. Lamongan	17.176.888.262	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	792.249.404	359.154.909	21.709.119.046
252	Kab. Lumajang	17.479.391.375	17.491.894.976	3.061.095.205	154.463.307	-	962.285.556	359.154.909	22.028.893.953
253	Kab. Madiun	18.419.544.285	17.491.894.976	3.061.095.205	5.844.552	-	2.088.712.314	359.154.909	23.006.701.956
254	Kab. Magetan	16.788.731.287	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	387.678.586	359.154.909	21.304.548.228
255	Kab. Malang	17.037.612.653	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	767.115.118	359.154.909	21.683.984.760
256	Kab. Mojokerto	16.862.121.658	17.491.894.976	3.061.095.205	6.784.162	-	471.886.537	359.154.909	21.390.815.789
257	Kab. Nganjuk	17.164.775.190	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	815.118.453	359.154.909	21.731.988.095
258	Kab. Ngawi	17.316.594.592	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	920.493.305	359.154.909	21.837.362.947
259	Kab. Pacitan	16.815.080.662	17.491.894.976	3.061.095.205	87.372.680	-	356.429.732	359.154.909	21.355.947.502
260	Kab. Pamekasan	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
261	Kab. Pasuruan	16.802.337.550	17.491.894.976	3.061.095.205	26.820.332	-	381.163.661	359.154.909	21.320.129.083
262	Kab. Ponorogo	16.942.066.039	17.491.894.976	3.061.095.205	5.620.552	-	553.494.518	359.154.909	21.471.260.160
263	Kab. Probolinggo	16.832.631.887	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	432.786.311	359.154.909	21.349.655.953
264	Kab. Sampang	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
265	Kab. Sidoarjo	16.766.169.911	17.502.966.259	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.281.775.118
266	Kab. Situbondo	16.829.940.252	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	470.037.217	359.154.909	21.386.906.859
267	Kab. Sumenep	16.867.247.506	18.486.081.937	5.767.049.195	4.724.552	-	479.971.475	359.154.909	25.096.982.068
268	Kab. Trenggalek	17.279.142.044	17.491.894.976	3.061.095.205	334.758.237	-	560.695.174	359.154.909	21.807.598.501
269	Kab. Tuban	21.128.907.374	25.986.259.951	3.061.095.205	4.724.552	-	1.127.870.298	359.154.909	30.539.104.915
270	Kab. Tulungagung	16.902.444.802	17.491.894.976	3.061.095.205	9.063.766	-	505.536.823	359.154.909	21.426.745.679
271	Kota Blitar	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
272	Kota Kediri	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
273	Kota Madiun	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
274	Kota Malang	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
275	Kota Mojokerto	16.757.570.153	17.491.894.976	3.061.095.205	7.196.077	-	353.834.193	359.154.909	21.273.175.360
276	Kota Pasuruan	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
277	Kota Probolinggo	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
278	Kota Surabaya	16.755.098.628	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	353.834.193	359.154.909	21.270.703.835
279	Kota Batu	16.763.921.185	17.491.894.976	3.061.095.205	4.724.552	-	362.999.006	359.154.909	21.279.868.648
280	Provinsi Kalimantan Barat	21.159.407.557	-	-	21.369.936.030	-	7.601.998.622	-	28.971.934.652
281	Kab. Bengkayang	3.233.441.252	-	-	2.944.171.744	-	951.093.099	359.154.909	4.254.419.752
282	Kab. Landak	6.160.477.538	-	-	4.741.467.041	-	2.751.462.735	359.154.909	7.852.084.685
283	Kab. Kapuas Hulu	5.529.559.062	-	-	2.957.052.280	-	6.079.709.627	359.154.909	9.395.916.816
284	Kab. Ketapang	37.873.838.813	-	-	36.236.903.948	-	16.512.971.073	359.154.909	53.109.029.930
285	Kab. Pontianak	3.474.226.402	-	-	3.493.269.877	-	1.026.874.613	359.154.909	4.879.299.399
286	Kab. Sambas	3.113.374.740	-	-	2.813.431.982	-	964.422.920	359.154.909	4.137.009.811
287	Kab. Sanggau	12.251.339.941	-	-	11.471.012.953	-	4.577.959.856	359.154.909	16.408.127.718
288	Kab. Sintang	10.399.479.298	-	-	3.387.840.555	-	9.344.687.159	359.154.909	13.091.682.623
289	Kota Pontianak	3.005.405.951	-	-	2.717.575.262	-	949.654.280	359.154.909	4.026.384.451

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
290	Kota Singkawang	3.082.845.566	-	-	2.795.014.877	-	949.654.280	359.154.909	4.103.824.066
291	Kab. Kayong Utara	3.739.159.789	-	-	3.450.797.407	-	950.185.972	359.154.909	4.760.138.288
292	Kab. Kubu Raya	5.734.693.891	-	-	2.929.389.326	-	6.222.077.134	359.154.909	9.510.621.369
293	Kab. Sekadau	3.045.059.103	-	-	2.730.358.622	-	978.783.592	359.154.909	4.068.297.123
294	Kab. Melawi	7.939.282.291	-	-	2.889.698.373	-	6.930.103.778	359.154.909	10.178.957.060
295	Provinsi Kalimantan Tengah	99.160.162.564	-	-	93.838.979.151	-	25.853.887.567	-	119.692.866.718
296	Kab. Barito Selatan	22.293.317.904	-	-	20.562.628.593	-	4.443.795.335	359.154.909	25.365.578.837
297	Kab. Barito Utara	54.640.800.121	-	-	44.716.645.435	-	25.195.745.689	359.154.909	70.271.546.033
298	Kab. Kapuas	65.092.116.972	-	-	67.374.745.667	-	14.815.791.264	359.154.909	82.549.691.840
299	Kab. Kotawaringin Barat	18.867.094.476	-	-	13.761.433.433	-	9.220.642.192	359.154.909	23.341.230.534
300	Kab. Kotawaringin Timur	22.587.669.274	-	-	14.946.127.676	-	13.336.278.845	359.154.909	28.641.561.430
301	Kota Palangkaraya	14.899.975.903	-	-	13.741.310.696	-	3.770.087.771	359.154.909	17.870.553.376
302	Kab. Barito Timur	35.915.346.689	-	-	38.666.321.469	-	4.361.087.679	359.154.909	43.386.564.057
303	Kab. Murung Raya	87.063.474.979	-	-	73.695.354.286	-	25.097.385.198	359.154.909	99.151.894.393
304	Kab. Pulang Pisau	14.863.720.698	-	-	13.644.797.397	-	3.884.851.282	359.154.909	17.888.803.588
305	Kab. Gunung Mas	29.318.367.148	-	-	14.985.962.737	-	21.371.955.398	359.154.909	36.717.073.044
306	Kab. Lamandau	25.338.643.226	-	-	16.539.044.984	-	16.268.485.468	359.154.909	33.166.685.361
307	Kab. Sukamara	15.176.069.256	-	-	14.017.110.217	-	3.783.446.625	359.154.909	18.159.711.751
308	Kab. Katingan	44.275.313.364	-	-	14.971.149.876	-	37.419.121.174	359.154.909	52.749.425.959
309	Kab. Seruyan	55.876.836.433	-	-	13.747.174.054	-	51.407.764.227	359.154.909	65.514.093.190
310	Provinsi Kalimantan Selatan	544.703.029.159	9.240.552.831	-	623.868.604.221	-	782.951.175	-	633.892.108.227
311	Kab. Banjar	176.302.370.198	1.540.092.138	-	201.834.482.511	-	181.328.415	359.154.909	203.915.057.973
312	Kab. Barito Kuala	90.745.179.420	1.540.092.138	-	103.553.327.832	-	201.502.750	359.154.909	105.654.077.629
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	110.940.468.453	1.540.092.138	-	125.428.569.057	-	93.841.311	359.154.909	127.421.657.415
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	90.678.405.406	1.540.092.138	-	103.588.485.091	-	93.841.311	359.154.909	105.581.573.449
315	Kab. Hulu Sungai Utara	90.644.652.929	1.540.092.138	-	103.549.967.832	-	98.606.093	359.154.909	105.547.820.972
316	Kab. Kotabaru	171.452.021.111	1.540.092.138	-	209.740.166.561	-	516.442.259	359.154.909	212.155.855.867
317	Kab. Tabalong	311.828.662.965	17.831.100.101	-	310.349.969.785	-	2.025.692.727	359.154.909	330.565.917.522
318	Kab. Tanah Laut	268.790.933.921	1.540.092.138	-	351.643.727.659	-	110.474.975	359.154.909	353.653.449.681
319	Kab. Tapin	171.547.620.320	1.540.092.138	-	198.540.382.781	-	93.841.311	359.154.909	200.533.471.139
320	Kota Banjarbaru	90.698.556.608	1.540.092.138	-	103.608.636.293	-	93.841.311	359.154.909	105.601.724.651
321	Kota Banjarmasin	90.646.555.735	1.540.092.138	-	103.549.967.832	-	103.123.196	359.154.909	105.552.338.075
322	Kab. Balangan	252.773.408.423	2.190.097.702	-	265.191.515.880	-	93.841.311	359.154.909	267.834.609.802
323	Kab. Tanah Bumbu	268.265.673.503	1.540.092.138	-	314.963.947.798	-	2.343.793.671	359.154.909	319.206.988.516
324	Provinsi Kalimantan Timur	4.309.037.434.282	972.614.699.002	3.090.979.827.046	1.186.740.411.546	-	37.013.913.273	-	5.287.348.850.867
325	Kab. Berau	760.564.811.547	143.736.871.320	455.700.748.304	254.219.737.596	-	64.498.297.910	359.154.909	918.514.810.039
326	Kab. Bulungan	697.084.143.792	173.389.902.165	456.106.089.430	194.022.035.767	-	35.047.562.799	359.154.909	858.924.745.070
327	Kab. Kutai Kartanegara	3.621.535.475.682	797.701.886.019	2.788.365.669.696	945.934.646.035	-	16.981.067.877	359.154.909	4.549.342.424.536
328	Kab. Kutai Barat	922.014.844.856	143.736.871.320	455.700.748.304	464.563.219.866	-	62.126.478.875	359.154.909	1.126.486.473.274
329	Kab. Kutai Timur	1.253.272.527.748	151.986.037.910	455.700.748.304	861.679.135.449	-	38.895.522.851	359.154.909	1.508.620.599.423
330	Kab. Malinau	683.788.291.031	143.736.871.320	455.700.748.304	218.948.242.230	-	27.839.677.717	359.154.909	846.584.694.480
331	Kab. Nunukan	702.988.711.470	153.620.939.142	455.700.748.304	229.925.066.547	-	28.037.370.672	359.154.909	867.643.279.574
332	Kab. Pasir	866.279.128.040	143.736.871.320	455.700.748.304	401.237.730.525	-	15.022.081.004	359.154.909	1.016.056.586.062
333	Kota Balikpapan	640.698.782.106	143.736.871.320	455.700.748.304	181.498.346.026	-	5.073.302.075	359.154.909	786.368.422.634
334	Kota Bontang	685.192.921.305	159.966.573.595	493.562.989.843	181.699.169.816	-	5.062.676.155	359.154.909	840.650.564.318
335	Kab. Tana Tidung	657.940.635.496	144.167.688.579	455.700.748.304	186.968.354.545	-	20.912.587.761	359.154.909	808.108.534.098
336	Kota Samarinda	719.531.263.967	150.313.015.490	461.124.427.910	260.573.841.350	-	5.062.676.155	359.154.909	877.433.115.814
337	Kota Tarakan	678.992.227.901	188.071.711.843	457.334.399.269	181.295.310.663	-	5.062.699.691	359.154.909	832.123.276.375
338	Kab. Penajam Paser Utara	697.847.895.647	191.754.844.893	473.082.864.857	184.819.986.782	-	7.735.669.375	359.154.909	857.752.520.816

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
339	Provinsi Sulawesi Utara	5.877.507.095	-	-	5.769.469.018	-	127.036.035	-	5.896.505.053
340	Kab. Bolaang Mongondow	1.502.279.076	-	-	1.173.562.734	-	18.148.005	359.154.909	1.550.865.648
341	Kab. Minahasa	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
342	Kab. Sangihe	1.134.096.078	-	-	805.379.736	-	18.148.005	359.154.909	1.182.682.650
343	Kota Bitung	1.905.433.491	-	-	1.576.717.149	-	18.148.005	359.154.909	1.954.020.063
344	Kota Manado	1.068.550.643	-	-	739.834.301	-	18.148.005	359.154.909	1.117.137.215
345	Kab. Kepulauan Talaud	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
346	Kab. Minahasa Selatan	1.329.787.574	-	-	1.001.071.232	-	18.148.005	359.154.909	1.378.374.146
347	Kab. Minahasa Tenggara	1.126.506.160	-	-	797.789.818	-	18.148.005	359.154.909	1.175.092.732
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
349	Kota Kotamubagu	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	3.014.593.255	-	-	2.684.625.080	-	22.796.984	359.154.909	3.066.576.973
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	1.428.270.266	-	-	1.095.249.780	-	22.452.149	359.154.909	1.476.856.838
352	Kota Tomohon	1.068.283.291	-	-	739.566.949	-	18.148.005	359.154.909	1.116.869.863
353	Kab. Minahasa Utara	8.940.329.961	-	-	8.611.613.619	-	18.148.005	359.154.909	8.988.916.533
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	2.030.715.341	-	-	908.219.620	-	952.496.665	359.154.909	2.219.871.194
355	Provinsi Gorontalo	152.503.660	-	-	131.843.688	-	88.693.528	-	220.537.216
356	Kab. Boalemo	439.650.411	-	-	6.272.000	-	141.713.308	359.154.909	507.140.217
357	Kab. Gorontalo	390.797.047	-	-	214.682.192	-	105.068.157	359.154.909	678.905.258
358	Kota Gorontalo	337.164.163	-	-	4.032.000	-	27.944.959	359.154.909	391.131.868
359	Kab. Pohuwato	457.769.248	-	-	72.700.856	-	84.713.422	359.154.909	516.569.187
360	Kab. Gorontalo Utara	609.004.976	-	-	199.735.910	-	112.437.312	359.154.909	671.328.131
361	Kab. Bone Bolango	405.251.163	-	-	59.679.907	-	40.903.113	359.154.909	459.737.929
362	Provinsi Sulawesi Tengah	12.706.861.575	7.589.238.680	-	12.032.007.228	-	664.071.673	-	20.285.317.581
363	Kab. Banggai	6.284.538.406	1.517.847.699	-	5.259.483.181	-	803.718.393	359.154.909	7.940.204.182
364	Kab. Banggai Kepulauan	2.608.359.411	1.517.847.699	-	2.110.885.879	-	132.726.974	359.154.909	4.120.615.461
365	Kab. Buol	2.805.802.903	1.517.847.699	-	2.214.520.780	-	270.095.293	359.154.909	4.361.618.681
366	Kab. Toli-Toli	3.091.574.955	1.517.847.699	-	2.467.506.469	-	448.936.777	359.154.909	4.793.445.854
367	Kab. Donggala	2.974.472.116	1.517.847.699	-	2.345.442.806	-	298.437.641	359.154.909	4.520.883.055
368	Kab. Morowali	23.072.380.449	15.178.477.382	-	21.740.245.148	-	705.978.606	359.154.909	37.983.856.045
369	Kab. Poso	3.290.009.627	1.517.847.699	-	2.245.302.295	-	1.391.523.640	359.154.909	5.513.828.543
370	Kota Palu	2.688.187.549	1.517.847.699	-	2.188.651.235	-	137.563.022	359.154.909	4.203.216.865
371	Kab. Parigi Moutong	3.296.668.420	1.517.847.699	-	2.444.840.950	-	523.664.205	359.154.909	4.845.507.763
372	Kab. Sigi	2.641.609.388	1.517.847.699	-	2.124.350.624	-	157.514.077	359.154.909	4.158.867.309
373	Kab. Tojo Una Una	3.313.999.359	1.517.847.699	-	3.000.264.281	-	514.705.587	359.154.909	5.391.972.476
374	Provinsi Sulawesi Selatan	9.329.963.350	-	480.784.007	8.896.048.613	-	7.263.718	-	9.384.096.338
375	Kab. Bantaeng	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
376	Kab. Barru	1.091.064.455	-	41.806.590	739.017.207	-	631.627	359.154.909	1.140.610.333
377	Kab. Bone	1.137.362.320	-	41.806.590	785.315.072	-	631.627	359.154.909	1.186.908.198
378	Kab. Bulukumba	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
379	Kab. Enrekang	1.096.325.213	-	41.806.590	742.050.249	-	2.859.343	359.154.909	1.145.871.091
380	Kab. Gowa	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
381	Kab. Jeneponto	1.084.877.995	-	41.806.590	732.830.747	-	631.627	359.154.909	1.134.423.873
382	Kab. Luwu	1.244.319.704	-	41.806.590	889.701.325	-	3.202.758	359.154.909	1.293.865.582
383	Kab. Luwu Utara	1.265.991.077	-	41.806.590	912.147.343	-	2.428.113	359.154.909	1.315.536.955
384	Kab. Maros	1.102.053.790	-	41.806.590	750.006.542	-	631.627	359.154.909	1.151.599.668
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.135.939.019	-	41.806.590	783.891.771	-	631.627	359.154.909	1.185.484.897
386	Kab. Pinrang	1.083.929.697	-	41.806.590	731.625.207	-	888.869	359.154.909	1.133.475.575
387	Kab. Selayar	1.106.584.455	-	41.806.590	754.537.207	-	631.627	359.154.909	1.156.130.333

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
388	Kab. Sidenreng Rappang	1.113.387.037	-	41.806.590	759.044.137	-	2.927.279	359.154.909	1.162.932.915
389	Kab. Sinjai	1.086.801.490	-	41.806.590	734.754.242	-	631.627	359.154.909	1.136.347.368
390	Kab. Soppeng	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
391	Kab. Takalar	1.087.112.080	-	41.806.590	735.064.832	-	631.627	359.154.909	1.136.657.958
392	Kab. Tana Toraja	1.173.823.114	-	41.806.590	818.015.767	-	4.391.726	359.154.909	1.223.368.992
393	Kab. Wajo	2.005.352.875	-	961.568.415	733.543.802	-	631.627	359.154.909	2.054.898.753
394	Kota Pare-pare	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
395	Kab. Toraja Utara	1.119.877.147	-	41.806.590	844.622.274	-	720.440	359.154.909	1.246.304.213
396	Kota Makassar	1.083.672.455	-	41.806.590	731.625.207	-	631.627	359.154.909	1.133.218.333
397	Kota Palopo	1.167.539.840	-	41.806.590	815.492.592	-	631.627	359.154.909	1.217.085.718
398	Kab. Luwu Timur	18.422.333.476	-	41.806.590	18.125.167.937	-	1.530.298	359.154.909	18.527.659.734
399	Provinsi Sulawesi Barat	195.110.929	-	-	114.517.392	-	151.492.520	-	266.009.912
400	Kab. Majene	359.301.596	-	-	3.617.198	-	75.746.260	359.154.909	438.518.367
401	Kab. Mamuju	1.609.951.567	-	-	402.506.363	-	1.476.222.651	359.154.909	2.237.883.923
402	Kab. Polewali Mandar	359.301.596	-	-	21.889.198	-	75.746.260	359.154.909	456.790.367
403	Kab. Mamasa	384.935.726	-	-	26.439.612	-	90.093.059	359.154.909	475.687.580
404	Kab. Mamuju Utara	392.522.621	-	-	5.857.198	-	106.727.285	359.154.909	471.739.392
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	40.035.965.311	-	-	58.412.478.995	-	258.483.153	-	58.670.962.148
406	Kab. Buton	10.782.105.133	-	-	13.753.174.265	-	52.108.442	359.154.909	14.164.437.616
407	Kab. Konawe	9.893.409.090	-	-	12.726.093.857	-	279.087.653	359.154.909	13.364.336.419
408	Kab. Kolaka	38.292.046.226	-	-	51.005.730.716	-	305.009.002	359.154.909	51.669.894.627
409	Kab. Muna	7.599.866.763	-	-	10.327.510.294	-	399.510.917	359.154.909	11.086.176.120
410	Kota Kendari	7.277.532.648	-	-	10.251.543.686	-	46.996.937	359.154.909	10.657.695.532
411	Kota Bau-bau	7.333.971.636	-	-	10.307.982.674	-	49.856.640	359.154.909	10.716.994.223
412	Kab. Konawe Selatan	15.068.679.235	-	-	26.090.309.938	-	126.879.798	359.154.909	26.576.344.645
413	Kab. Bombana	17.076.559.041	-	-	25.264.581.983	-	60.742.294	359.154.909	25.684.479.186
414	Kab. Konawe Utara	21.498.649.711	-	-	33.552.282.189	-	707.186.926	359.154.909	34.618.624.024
415	Kab. Buton Utara	7.824.394.225	-	-	10.337.504.835	-	564.125.672	359.154.909	11.260.785.416
416	Kab. Wakatobi	7.277.532.648	-	-	10.251.543.686	-	46.996.937	359.154.909	10.657.695.532
417	Kab. Kolaka Utara	15.207.001.242	-	-	19.781.657.839	-	173.438.707	359.154.909	20.314.251.455
418	Provinsi Bali	0	-	-	-	-	-	-	0
419	Kab. Badung	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
420	Kab. Bangli	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
421	Kab. Buleleng	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
422	Kab. Gianyar	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
423	Kab. Jembrana	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
424	Kab. Karangasem	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
425	Kab. Klungkung	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
426	Kab. Tabanan	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
427	Kota Denpasar	313.103.630	-	-	-	-	-	359.154.909	359.154.909
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	12.747.649.700	-	-	12.930.050.626	-	135.647.649	-	13.065.698.275
429	Kab. Bima	3.579.228.758	-	-	3.288.620.481	-	30.143.922	359.154.909	3.677.919.312
430	Kab. Dompu	3.050.486.346	-	-	2.819.460.305	-	38.280.830	359.154.909	3.216.896.044
431	Kab. Lombok Barat	2.982.793.885	-	-	2.806.825.433	-	30.433.531	359.154.909	3.196.413.873
432	Kab. Lombok Tengah	2.959.198.655	-	-	2.625.067.178	-	73.032.149	359.154.909	3.057.254.236
433	Kab. Lombok Timur	2.966.609.005	-	-	2.632.477.528	-	30.143.922	359.154.909	3.021.776.359
434	Kab. Sumbawa	4.674.765.689	-	-	4.994.267.647	-	202.859.125	359.154.909	5.556.281.681
435	Kota Mataram	2.957.124.205	-	-	2.622.992.728	-	30.143.922	359.154.909	3.012.291.559
436	Kab. Lombok Utara	2.957.124.205	-	-	2.622.992.728	-	30.143.922	359.154.909	3.012.291.559

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
437	Kota Bima	2.957.124.205	-	-	2.622.992.728	-	30.143.922	359.154.909	3.012.291.559
438	Kab. Sumbawa Barat	25.713.344.310	-	-	24.686.580.199	-	992.555.418	359.154.909	26.038.290.526
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	613.782.171	-	-	601.755.974	-	57.511.801	-	659.267.775
440	Kab. Alor	513.668.668	-	-	210.599.485	-	49.023.542	359.154.909	618.777.936
441	Kab. Belu	814.290.994	-	-	495.615.991	-	5.751.180	359.154.909	860.522.080
442	Kab. Ende	387.812.947	-	-	44.145.943	-	30.743.181	359.154.909	434.044.033
443	Kab. Flores Timur	356.674.627	-	-	29.225.303	-	14.525.501	359.154.909	402.905.713
444	Kab. Kupang	371.261.981	-	-	52.586.978	-	5.751.180	359.154.909	417.493.067
445	Kab. Lembata	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
446	Kab. Manggarai	360.718.706	-	-	42.043.703	-	5.751.180	359.154.909	406.949.792
447	Kab. Ngada	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
448	Kab. Sikka	380.134.043	-	-	29.225.303	-	37.984.917	359.154.909	426.365.129
449	Kab. Sumba Barat	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
450	Kab. Sumba Timur	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
451	Kab. Timor Tengah Selatan	756.575.321	-	-	437.900.318	-	5.751.180	359.154.909	802.806.407
452	Kab. Timor Tengah Utara	697.324.651	-	-	483.305.156	-	5.751.180	359.154.909	848.211.245
453	Kota Kupang	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
454	Kab. Rote Ndao	365.602.116	-	-	46.927.113	-	5.751.180	359.154.909	411.833.202
455	Kab. Nagekeo	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
456	Kab. Sumba Tengah	491.857.106	-	-	173.182.103	-	5.751.180	359.154.909	538.088.192
457	Kab. Sumba Barat Daya	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
458	Kab. Manggarai Timur	452.883.525	-	-	141.717.450	-	5.751.180	359.154.909	506.623.539
459	Kab. Sabu Raijua	347.900.306	-	-	29.225.303	-	5.751.180	359.154.909	394.131.392
460	Kab. Manggarai Barat	380.127.186	-	-	61.452.183	-	5.751.180	359.154.909	426.358.272
461	Provinsi Maluku	7.518.274.065	419.568.888	-	3.981.892.008	-	3.966.584.921	-	8.368.045.817
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.922.050.790	83.913.775	-	918.816.384	-	1.801.878.313	359.154.909	3.163.763.381
463	Kab. Maluku Tengah	3.489.317.795	83.913.775	-	776.166.320	-	3.165.232.242	359.154.909	4.384.467.246
464	Kab. Maluku Tenggara	1.498.614.458	83.913.775	-	766.370.240	-	490.750.209	359.154.909	1.700.189.133
465	Kab. Pulau Buru	12.501.903.989	83.913.775	-	766.370.240	-	12.984.893.292	359.154.909	14.194.332.216
466	Kota Ambon	1.496.114.388	83.913.775	-	766.370.240	-	487.759.318	359.154.909	1.697.198.242
467	Kab. Seram Bagian Barat	1.905.803.853	83.913.775	-	787.757.440	-	877.939.341	359.154.909	2.108.765.465
468	Kab. Seram Bagian Timur	3.164.676.868	839.137.778	-	771.134.656	-	1.624.968.030	359.154.909	3.594.395.373
469	Kab. Maluku Barat Daya	8.512.952.172	83.913.775	-	7.862.125.464	-	487.759.318	359.154.909	8.792.953.466
470	Kab. Buru Selatan	5.652.665.484	83.913.775	-	989.512.640	-	6.498.473.426	359.154.909	7.931.054.750
471	Kab. Kepulauan Aru	1.496.660.021	83.913.775	-	766.370.240	-	625.115.261	359.154.909	1.834.554.185
472	Kota Tual	1.496.114.388	83.913.775	-	766.370.240	-	487.759.318	359.154.909	1.697.198.242
473	Provinsi Maluku Utara	39.450.686.744	-	-	47.044.756.272	-	2.003.906.404	-	49.048.662.676
474	Kab. Halmahera Tengah	13.466.050.882	-	-	15.263.620.137	-	1.459.888.758	359.154.909	17.082.663.804
475	Kab. Halmahera Barat	9.875.586.938	-	-	11.201.280.550	-	439.856.531	359.154.909	12.000.291.990
476	Kota Ternate	9.847.658.618	-	-	11.173.352.230	-	439.856.531	359.154.909	11.972.363.670
477	Kab. Halmahera Timur	47.130.291.654	-	-	55.130.255.521	-	2.256.439.076	359.154.909	57.745.849.506
478	Kota Tidore Kepulauan	10.318.044.918	-	-	11.180.520.230	-	903.074.830	359.154.909	12.442.749.969
479	Kab. Kepulauan Sula	15.330.204.755	-	-	14.785.162.647	-	5.668.067.748	359.154.909	20.812.385.304
480	Kab. Pulau Morotai	9.901.984.529	-	-	11.186.676.870	-	480.857.802	359.154.909	12.026.689.581
481	Kab. Halmahera Selatan	36.147.958.284	-	-	35.478.631.758	-	8.371.821.434	359.154.909	44.209.608.101
482	Kab. Halmahera Utara	19.604.276.978	-	-	22.827.946.097	-	656.489.083	359.154.909	23.843.590.089
483	Kab. Yalimo	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
484	Kab. Lanny Jaya	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
485	Provinsi Papua	127.681.018.345	-	-	117.135.237.626	-	13.395.682.687	-	130.530.920.313

No.	Daerah	Pagu	Realisasi						
			Minyak Bumi	Gas Bumi	Pertambangan Umum	Panas Bumi	Hasil Kehutanan	Hasil Perikanan	Total
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
486	Kab. Biak Numfor	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	806.262.052	359.154.909	9.403.670.804
487	Kab. Jayapura	10.531.543.204	-	-	8.271.084.403	-	2.104.438.655	359.154.909	10.734.677.967
488	Kab. Jayawijaya	9.256.037.743	-	-	8.293.755.545	-	789.554.616	359.154.909	9.442.465.070
489	Kab. Merauke	20.196.718.597	-	-	8.238.253.843	-	16.785.816.652	359.154.909	25.383.225.404
490	Kab. Mimika	234.608.655.672	-	-	231.670.484.463	-	3.518.388.615	359.154.909	235.548.027.987
491	Kab. Nabire	10.280.879.034	-	-	8.601.634.258	-	1.626.950.730	359.154.909	10.587.739.897
492	Kab. Paniai	9.911.635.895	-	-	9.917.735.473	-	789.554.616	359.154.909	11.066.444.998
493	Kab. Puncak Jaya	9.290.909.730	-	-	8.328.627.532	-	789.554.616	359.154.909	9.477.337.057
494	Kab. Kepulauan Yapen	9.217.325.961	-	-	8.255.043.763	-	789.554.616	359.154.909	9.403.753.288
495	Kota Jayapura	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
496	Kab. Sarmi	26.353.163.997	-	-	8.740.025.335	-	19.593.154.681	359.154.909	28.692.334.925
497	Kab. Keerom	13.167.058.062	-	-	8.444.230.732	-	5.214.707.718	359.154.909	14.018.093.359
498	Kab. Yahukimo	9.279.416.617	-	-	8.317.134.419	-	789.554.616	359.154.909	9.465.843.944
499	Kab. Pegunungan Bintang	9.321.702.083	-	-	10.777.538.233	-	789.554.616	359.154.909	11.926.247.758
500	Kab. Tolikara	9.273.293.083	-	-	8.311.010.885	-	789.554.616	359.154.909	9.459.720.410
501	Kab. Boven Digoel	20.434.941.906	-	-	8.238.253.843	-	13.709.941.545	359.154.909	22.307.350.297
502	Kab. Mappi	9.314.579.152	-	-	8.238.253.843	-	955.895.863	359.154.909	9.553.304.615
503	Kab. Asmat	10.043.762.769	-	-	8.238.253.843	-	2.188.607.186	359.154.909	10.786.015.938
504	Kab. Waropen	9.482.444.271	-	-	8.515.823.343	-	810.600.782	359.154.909	9.685.579.034
505	Kab. Mamberamo Raya	21.110.614.693	-	-	8.604.199.396	-	12.333.687.715	359.154.909	21.297.042.020
506	Kab. Mamberamo Tengah	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
507	Kab. Nduga	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
508	Kab. Dogiyai	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
509	Kab. Intan Jaya	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
510	Kab. Puncak	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
511	Kab. Deiyai	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
512	Kab. Supiori	9.200.536.041	-	-	8.238.253.843	-	789.554.616	359.154.909	9.386.963.368
513	Provinsi Papua Barat	286.500.221.783	877.314.232.512	143.503.312.588	1.637.552.466	-	15.035.915.897	-	1.037.491.013.463
514	Kab. Sorong	38.130.409.915	83.653.232.096	5.834.820.598	281.836.592	-	13.119.086.411	359.154.909	103.248.130.606
515	Kab. Manokwari	6.754.534.551	9.075.664.458	3.743.564.676	293.906.399	-	3.822.440.922	359.154.909	17.294.731.364
516	Kab. Fak Fak	9.202.430.166	9.075.664.458	3.743.564.676	223.505.549	-	6.465.399.102	359.154.909	19.867.288.694
517	Kota Sorong	5.203.234.425	9.075.664.458	3.743.564.676	215.357.549	-	2.349.689.646	359.154.909	15.743.431.238
518	Kab. Sorong Selatan	5.250.142.685	9.075.664.458	3.743.564.676	262.265.809	-	3.547.491.563	359.154.909	16.988.141.415
519	Kab. Raja Ampat	7.916.985.636	9.114.218.619	3.743.564.676	2.695.651.427	-	2.358.329.646	359.154.909	18.270.919.277
520	Kab. Teluk Bintuni	21.525.143.046	15.179.004.723	35.344.390.840	1.664.106.593	-	26.257.771.683	359.154.909	78.804.428.748
521	Kab. Teluk Wondama	11.213.948.655	9.075.664.458	3.743.564.676	215.357.549	-	8.360.403.876	359.154.909	21.754.145.468
522	Kab. Tambrauw	5.277.504.724	9.075.664.458	3.743.564.676	215.357.549	-	2.423.959.945	359.154.909	15.817.701.537
523	Kab. Maybrat	5.330.752.172	9.075.664.458	3.743.564.676	215.357.549	-	2.477.207.393	359.154.909	15.870.948.985
524	Kab. Kaimana	13.613.488.802	9.075.664.458	3.743.564.676	359.675.066	-	15.959.442.952	359.154.909	29.497.502.061
	Dana Cadangan	13.429.204.255.033	-	-	-	-	-	-	-
	Kembali ke RKUN	Rp -	-	336.652.934.260	352.543.541.343	-	78.400.218.823	1.264.566.720	768.861.261.146
JUMLAH		62.600.285.617.315	26.165.822.138.467	21.231.675.084.265	12.860.854.426.197	626.278.978.409	1.535.890.432.615	179.764.557.362	62.600.285.617.315

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA BAGI HASIL CUKAI
UNAUDITED TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	2.119.808.156	2.119.808.156
2	Kab. Aceh Barat	117.767.119	117.767.119
3	Kab. Aceh Besar	117.767.119	117.767.119
4	Kab. Aceh Selatan	117.767.119	117.767.119
5	Kab. Aceh Singkil	117.767.119	117.767.119
6	Kab. Aceh Tengah	565.282.175	565.282.175
7	Kab. Aceh Tenggara	117.767.119	81.078.172
8	Kab. Aceh Timur	117.767.119	117.767.119
9	Kab. Aceh Utara	117.767.119	117.767.119
10	Kab. Bireun	117.767.119	81.078.172
11	Kab. Pidie	565.282.175	565.282.175
12	Kab. Simeulue	117.767.119	81.078.172
13	Kota Banda Aceh	117.767.119	117.767.119
14	Kota Sabang	117.767.119	117.767.119
15	Kota Langsa	117.767.119	117.767.119
16	Kota Lhokseumawe	117.767.119	117.767.119
17	Kab. Nagan Raya	117.767.119	117.767.119
18	Kab. Aceh Jaya	117.767.119	117.767.119
19	Kab. Pidie Jaya	565.282.175	565.282.175
20	Kab. Aceh Barat Daya	117.767.119	117.767.119
21	Kab. Gayo Lues	565.282.175	565.282.175
22	Kab. Aceh Tamiang	117.767.119	117.767.119
23	Kab. Bener Meriah	565.282.175	565.282.175
24	Kota Subulussalam	117.767.119	117.767.119
25	Provinsi Sumatera Utara	4.518.774.286	4.518.774.286
26	Kab. Asahan	197.789.218	197.789.218
27	Kab. Dairi	545.538.924	545.538.924
28	Kab. Deli Serdang	320.633.579	320.633.579
29	Kab. Tanah Karo	1.270.868.184	1.270.868.184
30	Kab. Labuhan Batu	169.388.545	121.258.699
31	Kab. Langkat	229.950.859	164.919.145
32	Kab. Mandailing Natal	159.534.384	114.621.457
33	Kab. Nias	131.896.915	131.896.915
34	Kab. Simalungun	1.370.371.927	1.370.371.927
35	Kab. Tapanuli Selatan	151.045.856	108.653.522
36	Kab. Tapanuli Tengah	156.967.519	156.967.519
37	Kab. Tapanuli Utara	829.080.551	829.080.551
38	Kab. Toba Samosir	145.809.125	145.809.125
39	Kota Binjai	156.688.414	112.492.033
40	Kota Medan	360.094.800	360.094.800
41	Kota Pematang Siantar	1.428.212.266	1.428.212.266
42	Kota Sibolga	135.973.696	135.973.696
43	Kota Tanjung Balai	144.041.939	144.041.939
44	Kab. Batu Bara	163.736.068	117.212.515
45	Kab. Labuhan Batu Utara	157.045.957	157.045.957
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	156.332.561	112.202.567
47	Kab. Padang Lawas Utara	144.212.776	144.212.776
48	Kab. Padang Lawas	145.783.506	145.783.506

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
49	Kab. Nias Utara	130.914.896	130.914.896
50	Kab. Nias Barat	126.456.412	88.645.583
51	Kota Tebing Tinggi	144.997.904	144.997.904
52	Kota Padang Sidempuan	146.713.052	105.307.732
53	Kab. Pakpak Bharat	135.303.976	97.051.392
54	Kab. Nias Selatan	147.553.876	103.054.524
55	Kab. Humbang Hasundutan	580.960.527	580.960.527
56	Kab. Serdang Bedagai	189.887.836	189.887.836
57	Kab. Samosir	138.506.494	138.506.494
58	Kota Gunung sitoli	131.514.107	92.099.839
59	Provinsi Sumatera Barat	2.539.464.303	2.539.464.303
60	Kab. Limapuluh Kota	2.103.961.424	2.103.961.424
61	Kab. Agam	347.460.187	347.460.187
62	Kab. Kepulauan Mentawai	133.656.016	133.656.016
63	Kab. Padang Pariaman	133.656.016	92.272.266
64	Kab. Pasaman	327.612.686	327.612.686
65	Kab. Pesisir Selatan	133.656.016	133.656.016
66	Kab. Sijunjung	133.656.016	133.656.016
67	Kab. Solok	391.125.100	391.125.100
68	Kab. Tanah Datar	379.072.885	379.072.885
69	Kota Bukit Tinggi	133.656.016	133.656.016
70	Kota Padang Panjang	133.656.016	92.272.266
71	Kota Padang	133.656.016	92.272.266
72	Kota Payakumbuh	396.534.345	396.534.345
73	Kota Sawahlunto	375.777.880	375.777.880
74	Kota Solok	133.656.016	92.272.266
75	Kota Pariaman	133.656.016	133.656.016
76	Kab. Pasaman Barat	133.656.016	92.272.266
77	Kab. Dharmasraya	133.656.016	133.656.016
78	Kab. Solok Selatan	133.656.016	133.656.016
79	Provinsi Riau	-	-
80	Kab. Bengkalis	-	-
81	Kab. Indragiri Hilir	-	-
82	Kab. Indragiri Hulu	-	-
83	Kab. Kampar	-	-
84	Kab. Kuantan Singingi	-	-
85	Kab. Pelalawan	-	-
86	Kab. Rokan Hilir	-	-
87	Kab. Rokan Hulu	-	-
88	Kab. Siak	-	-
89	Kota Dumai	-	-
90	Kota Pekanbaru	-	-
91	Kab. Kepulauan Meranti	-	-
92	Provinsi Kepulauan Riau	-	-
93	Kab. Bintan	-	-
94	Kab. Natuna	-	-
95	Kab. Karimun	-	-
96	Kota Batam	-	-
97	Kab. Kepulauan Anambas	-	-
98	Kota Tanjung Pinang	-	-
99	Kab. Lingga	-	-
100	Provinsi Jambi	1.409.186.744	1.409.186.744
101	Kab. Batanghari	140.918.674	140.918.674

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
102	Kab. Bungo	140.918.674	140.918.674
103	Kab. Kerinci	1.878.915.658	1.878.915.658
104	Kab. Merangin	140.918.674	140.918.674
105	Kab. Muaro Jambi	140.918.674	140.918.674
106	Kab. Sarolangun	140.918.674	97.141.008
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	140.918.674	140.918.674
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	140.918.674	97.141.008
109	Kab. Tebo	140.918.674	97.141.008
110	Kota Jambi	140.918.674	140.918.674
111	Kota Sungai Penuh	140.918.674	140.918.674
112	Provinsi Sumatera Selatan	1.226.705.651	1.226.705.651
113	Kab. Lahat	402.555.064	402.555.064
114	Kab. Musi Banyuasin	81.780.376	81.780.376
115	Kab. Musi Rawas	81.780.376	81.780.376
116	Kab. Muara Enim	81.780.376	81.780.376
117	Kab. Ogan Komering Ilir	88.127.195	88.127.195
118	Kab. Ogan Komering Ulu	81.780.376	56.356.597
119	Kota Palembang	81.780.376	56.356.597
120	Kota Pagar Alam	402.555.064	402.555.064
121	Kota Lubuk Linggau	408.901.883	408.901.883
122	Kota Prabumulih	81.780.376	81.780.376
123	Kab. Empat Lawang	81.780.376	56.356.597
124	Kab. Banyuasin	81.780.376	81.780.376
125	Kab. Ogan Ilir	88.127.195	88.127.195
126	Kab. OKU Timur	402.555.064	402.555.064
127	Kab. OKU Selatan	415.248.702	415.248.702
128	Provinsi Bangka Belitung	-	-
129	Kab. Bangka	-	-
130	Kab. Belitung	-	-
131	Kota Pangkal Pinang	-	-
132	Kab. Bangka Selatan	-	-
133	Kab. Bangka Tengah	-	-
134	Kab. Bangka Barat	-	-
135	Kab. Belitung Timur	-	-
136	Provinsi Bengkulu	-	-
137	Kab. Bengkulu Selatan	-	-
138	Kab. Bengkulu Utara	-	-
139	Kab. Rejang Lebong	-	-
140	Kota Bengkulu	-	-
141	Kab. Kaur	-	-
142	Kab. Seluma	-	-
143	Kab. Mukomuko	-	-
144	Kab. Lebong	-	-
145	Kab. Bengkulu Tengah	-	-
146	Kab. Kepahiang	-	-
147	Provinsi Lampung	1.365.731.060	1.365.731.060
148	Kab. Lampung Barat	126.346.390	126.346.390
149	Kab. Lampung Selatan	183.249.115	183.249.115
150	Kab. Lampung Tengah	439.753.674	439.753.674
151	Kab. Lampung Utara	252.334.262	252.334.262
152	Kab. Lampung Timur	939.260.955	939.260.955
153	Kab. Tanggamus	214.399.694	214.399.694
154	Kab. Tulang Bawang	99.255.001	99.255.001

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
155	Kab. Way Kanan	101.328.295	83.520.632
156	Kab. Pesawaran	198.510.783	198.510.783
157	Kab. Pringsewu	208.156.254	208.156.254
158	Kab. Mesuji	99.255.001	99.255.001
159	Kab. Tulang Bawang Barat	99.255.001	99.255.001
160	Kota Bandar Lampung	99.255.001	99.255.001
161	Kota Metro	126.346.390	126.346.390
162	Provinsi DKI Jakarta	-	-
163	Provinsi Jawa Barat	49.051.153.377	49.051.153.377
164	Kab. Bandung	4.029.149.925	4.029.149.925
165	Kab. Bekasi	17.996.111.743	12.414.584.701
166	Kab. Bogor	2.057.512.706	2.057.512.706
167	Kab. Ciamis	3.106.237.802	3.106.237.802
168	Kab. Cianjur	3.205.836.013	3.205.836.013
169	Kab. Cirebon	2.889.441.277	2.323.596.323
170	Kab. Garut	10.397.994.107	10.397.994.107
171	Kab. Indramayu	1.108.934.367	1.108.934.367
172	Kab. Karawang	12.196.651.588	12.196.651.588
173	Kab. Kuningan	3.277.186.787	3.277.186.787
174	Kab. Majalengka	8.210.334.415	8.210.334.415
175	Kab. Purwakarta	2.865.237.556	1.967.291.768
176	Kab. Subang	2.623.578.750	2.623.578.750
177	Kab. Sukabumi	3.091.371.895	3.091.371.895
178	Kab. Sumedang	9.499.352.859	9.499.352.859
179	Kab. Tasikmalaya	2.868.854.206	2.868.854.206
180	Kab. Bandung Barat	2.381.459.003	1.636.211.551
181	Kota Bandung	2.707.834.715	2.707.834.715
182	Kota Bekasi	2.223.033.499	1.528.685.491
183	Kota Bogor	2.060.545.988	1.417.097.426
184	Kota Cirebon	2.764.567.128	2.764.567.128
185	Kota Depok	2.706.910.937	2.706.910.937
186	Kota Sukabumi	2.539.568.617	2.539.568.617
187	Kota Cimahi	2.218.063.721	1.523.715.713
188	Kota Tasikmalaya	2.803.708.681	2.803.708.681
189	Kota Banjar	2.623.212.917	1.802.928.013
190	Provinsi Banten	-	-
191	Kab. Lebak	-	-
192	Kab. Pandeglang	-	-
193	Kab. Serang	-	-
194	Kab. Tangerang	-	-
195	Kota Cilegon	-	-
196	Kota Tangerang	-	-
197	Kota Serang	-	-
198	Kota Tangerang Selatan	-	-
199	Provinsi Jawa Tengah	131.279.985.308	131.279.985.308
200	Kab. Banjarnegara	4.507.352.327	4.507.352.327
201	Kab. Banyumas	4.071.027.750	4.071.027.750
202	Kab. Batang	5.481.002.875	5.481.002.875
203	Kab. Blora	6.439.773.711	6.439.773.711
204	Kab. Boyolali	9.638.880.677	9.638.880.677
205	Kab. Brebes	4.015.907.617	4.015.907.617
206	Kab. Cilacap	4.050.927.925	4.050.927.925
207	Kab. Demak	9.784.870.848	9.784.870.848

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
208	Kab. Grobogan	6.059.023.689	6.059.023.689
209	Kab. Jepara	10.866.882.760	10.866.882.760
210	Kab. Karanganyar	12.432.232.547	12.432.232.547
211	Kab. Kebumen	6.079.634.061	6.079.634.061
212	Kab. Kendal	25.479.865.908	25.479.865.908
213	Kab. Klaten	11.784.544.263	11.784.544.263
214	Kab. Kudus	52.579.441.278	52.579.441.278
215	Kab. Magelang	10.085.564.726	10.085.564.726
216	Kab. Pati	11.844.259.170	11.844.259.170
217	Kab. Pekalongan	4.001.753.976	4.001.753.976
218	Kab. Pemalang	4.148.095.257	4.148.095.257
219	Kab. Purbalingga	4.179.594.505	4.179.594.505
220	Kab. Purworejo	4.615.958.666	4.615.958.666
221	Kab. Rembang	4.187.366.982	4.187.366.982
222	Kab. Semarang	6.083.563.460	6.083.563.460
223	Kab. Sragen	4.253.596.053	4.253.596.053
224	Kab. Sukoharjo	4.861.081.951	4.861.081.951
225	Kab. Tegal	6.586.617.997	6.586.617.997
226	Kab. Temanggung	19.050.563.680	19.050.563.680
227	Kab. Wonogiri	4.299.898.753	4.299.898.753
228	Kab. Wonosobo	7.248.659.123	7.248.659.123
229	Kota Magelang	4.026.332.110	4.026.332.110
230	Kota Pekalongan	7.648.545.333	7.648.545.333
231	Kota Salatiga	10.915.325.741	10.915.325.741
232	Kota Semarang	6.668.686.768	6.668.686.768
233	Kota Surakarta	4.337.810.039	4.337.810.039
234	Kota Tegal	4.005.323.176	4.005.323.176
235	Provinsi DI Yogyakarta	5.738.583.793	5.738.583.793
236	Kab. Bantul	3.825.722.528	3.825.722.528
237	Kab. Gunung Kidul	1.912.861.264	1.912.861.264
238	Kab. Kulon Progo	2.869.291.896	2.869.291.896
239	Kab. Sleman	2.678.005.769	2.678.005.769
240	Kota Yogyakarta	2.104.147.390	2.104.147.390
241	Provinsi Jawa Timur	253.088.916.030	253.088.916.030
242	Kab. Bangkalan	7.309.728.459	7.309.728.459
243	Kab. Banyuwangi	7.951.117.766	7.951.117.766
244	Kab. Blitar	9.789.459.387	9.789.459.387
245	Kab. Bojonegoro	23.001.012.504	23.001.012.504
246	Kab. Bondowoso	13.305.608.923	13.305.608.923
247	Kab. Gresik	7.308.890.695	7.308.890.695
248	Kab. Jember	17.404.020.142	17.404.020.142
249	Kab. Jombang	13.349.489.264	13.349.489.264
250	Kab. Kediri	28.374.830.649	28.374.830.649
251	Kab. Lamongan	12.851.207.302	12.851.207.302
252	Kab. Lumajang	8.986.138.746	8.986.138.746
253	Kab. Madiun	7.937.327.275	7.937.327.275
254	Kab. Magetan	7.592.368.794	7.592.368.794
255	Kab. Malang	36.972.176.254	36.972.176.254
256	Kab. Mojokerto	9.325.557.961	9.325.557.961
257	Kab. Nganjuk	12.173.431.740	12.173.431.740
258	Kab. Ngawi	10.608.705.243	10.608.705.243
259	Kab. Pacitan	7.924.446.745	7.924.446.745
260	Kab. Pamekasan	31.908.564.763	31.908.564.763

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
261	Kab. Pasuruan	47.309.142.509	47.309.142.509
262	Kab. Ponorogo	7.867.892.962	7.867.892.962
263	Kab. Probolinggo	23.505.083.618	23.505.083.618
264	Kab. Sampang	9.995.482.397	9.995.482.397
265	Kab. Sidoarjo	16.616.267.262	16.616.267.262
266	Kab. Situbondo	8.386.393.104	8.386.393.104
267	Kab. Sumenep	21.679.939.006	21.679.939.006
268	Kab. Trenggalek	8.790.742.612	8.790.742.612
269	Kab. Tuban	9.153.952.196	9.153.952.196
270	Kab. Tulungagung	16.928.960.181	16.928.960.181
271	Kota Blitar	8.282.253.211	8.282.253.211
272	Kota Kediri	55.049.048.336	55.049.048.336
273	Kota Madiun	7.452.887.767	7.452.887.767
274	Kota Malang	24.877.405.499	24.877.405.499
275	Kota Mojokerto	7.846.812.162	7.846.812.162
276	Kota Pasuruan	7.179.205.008	7.179.205.008
277	Kota Probolinggo	6.882.206.180	6.882.206.180
278	Kota Surabaya	21.550.172.347	21.550.172.347
279	Kota Batu	7.112.875.084	7.112.875.084
280	Provinsi Kalimantan Barat	-	-
281	Kab. Bengkayang	-	-
282	Kab. Landak	-	-
283	Kab. Kapuas Hulu	-	-
284	Kab. Ketapang	-	-
285	Kab. Pontianak	-	-
286	Kab. Sambas	-	-
287	Kab. Sanggau	-	-
288	Kab. Sintang	-	-
289	Kota Pontianak	-	-
290	Kota Singkawang	-	-
291	Kab. Kayong Utara	-	-
292	Kab. Kubu Raya	-	-
293	Kab. Sekadau	-	-
294	Kab. Melawi	-	-
295	Provinsi Kalimantan Tengah	1.362.266.285	1.362.266.285
296	Kab. Barito Selatan	104.789.714	73.928.115
297	Kab. Barito Utara	104.789.714	104.789.714
298	Kab. Kapuas	104.789.714	73.928.115
299	Kab. Kotawaringin Barat	104.789.714	104.789.714
300	Kab. Kotawaringin Timur	104.789.714	104.789.714
301	Kota Palangkaraya	104.789.714	104.789.714
302	Kab. Barito Timur	104.789.714	73.928.115
303	Kab. Murung Raya	104.789.714	73.928.115
304	Kab. Pulang Pisau	1.816.355.048	1.816.355.048
305	Kab. Gunung Mas	104.789.714	73.928.115
306	Kab. Lamandau	104.789.714	104.789.714
307	Kab. Sukamara	104.789.714	73.928.115
308	Kab. Katingan	104.789.714	104.789.714
309	Kab. Seruyan	104.789.714	104.789.714
310	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-
311	Kab. Banjar	-	-
312	Kab. Barito Kuala	-	-
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-
315	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-
316	Kab. Kotabaru	-	-
317	Kab. Tabalong	-	-
318	Kab. Tanah Laut	-	-
319	Kab. Tapin	-	-
320	Kota Banjarbaru	-	-
321	Kota Banjarmasin	-	-
322	Kab. Balangan	-	-
323	Kab. Tanah Bumbu	-	-
324	Provinsi Kalimantan Timur	-	-
325	Kab. Berau	-	-
326	Kab. Bulungan	-	-
327	Kab. Kutai Kartanegara	-	-
328	Kab. Kutai Barat	-	-
329	Kab. Kutai Timur	-	-
330	Kab. Malinau	-	-
331	Kab. Nunukan	-	-
332	Kab. Pasir	-	-
333	Kota Balikpapan	-	-
334	Kota Bontang	-	-
335	Kab. Tana Tidung	-	-
336	Kota Samarinda	-	-
337	Kota Tarakan	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	-	-
339	Provinsi Sulawesi Utara	-	-
340	Kab. Bolaang Mongondow	-	-
341	Kab. Minahasa	-	-
342	Kab. Sangihe	-	-
343	Kota Bitung	-	-
344	Kota Manado	-	-
345	Kab. Kepulauan Talaud	-	-
346	Kab. Minahasa Selatan	-	-
347	Kab. Minahasa Tenggara	-	-
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	-	-
349	Kota Kotamubagu	-	-
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	-	-
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	-	-
352	Kota Tomohon	-	-
353	Kab. Minahasa Utara	-	-
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	-	-
355	Provinsi Gorontalo	-	-
356	Kab. Boalemo	-	-
357	Kab. Gorontalo	-	-
358	Kota Gorontalo	-	-
359	Kab. Pohuwato	-	-
360	Kab. Gorontalo Utara	-	-
361	Kab. Bone Bolango	-	-
362	Provinsi Sulawesi Tengah	976.776.136	976.776.136
363	Kab. Banggai	122.097.017	122.097.017
364	Kab. Banggai Kepulauan	122.097.017	122.097.017
365	Kab. Buol	434.122.727	434.122.727
366	Kab. Toli-Toli	434.122.727	434.122.727

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
367	Kab. Donggala	122.097.017	122.097.017
368	Kab. Morowali	122.097.017	122.097.017
369	Kab. Poso	122.097.017	122.097.017
370	Kota Palu	434.122.727	434.122.727
371	Kab. Parigi Moutong	122.097.017	122.097.017
372	Kab. Sigi	122.097.017	122.097.017
373	Kab. Tojo Una Una	122.097.017	122.097.017
374	Provinsi Sulawesi Selatan	3.600.637.372	3.600.637.372
375	Kab. Bantaeng	159.176.945	159.176.945
376	Kab. Barru	163.043.568	163.043.568
377	Kab. Bone	907.042.345	907.042.345
378	Kab. Bulukumba	232.718.714	232.718.714
379	Kab. Enrekang	156.298.835	156.298.835
380	Kab. Gowa	150.026.557	150.026.557
381	Kab. Jeneponto	150.026.557	150.026.557
382	Kab. Luwu	151.281.012	151.281.012
383	Kab. Luwu Utara	150.026.557	150.026.557
384	Kab. Maros	150.026.557	150.026.557
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	151.335.898	151.335.898
386	Kab. Pinrang	150.026.557	150.026.557
387	Kab. Selayar	150.026.557	150.026.557
388	Kab. Sidenreng Rappang	150.026.557	150.026.557
389	Kab. Sinjai	991.691.287	991.691.287
390	Kab. Soppeng	3.195.451.890	3.195.451.890
391	Kab. Takalar	150.026.557	150.026.557
392	Kab. Tana Toraja	163.323.788	163.323.788
393	Kab. Wajo	168.273.376	168.273.376
394	Kota Pare-pare	150.026.557	150.026.557
395	Kab. Toraja Utara	151.304.533	151.304.533
396	Kota Makassar	160.252.875	160.252.875
397	Kota Palopo	150.026.557	150.026.557
398	Kab. Luwu Timur	150.026.557	103.756.672
399	Provinsi Sulawesi Barat	-	-
400	Kab. Majene	-	-
401	Kab. Mamuju	-	-
402	Kab. Polewali Mandar	-	-
403	Kab. Mamasa	-	-
404	Kab. Mamuju Utara	-	-
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-
406	Kab. Buton	-	-
407	Kab. Konawe	-	-
408	Kab. Kolaka	-	-
409	Kab. Muna	-	-
410	Kota Kendari	-	-
411	Kota Bau-bau	-	-
412	Kab. Konawe Selatan	-	-
413	Kab. Bombana	-	-
414	Kab. Konawe Utara	-	-
415	Kab. Buton Utara	-	-
416	Kab. Wakatobi	-	-
417	Kab. Kolaka Utara	-	-
418	Provinsi Bali	3.337.631.344	3.337.631.344
419	Kab. Badung	370.847.927	370.847.927

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
420	Kab. Bangli	397.938.956	397.938.956
421	Kab. Buleleng	4.371.229.480	4.371.229.480
422	Kab. Gianyar	778.419.873	778.419.873
423	Kab. Jembrana	370.847.927	370.847.927
424	Kab. Karangasem	385.978.522	385.978.522
425	Kab. Klungkung	370.847.927	370.847.927
426	Kab. Tabanan	370.847.927	370.847.927
427	Kota Denpasar	370.847.927	370.847.927
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	57.560.328.110	57.560.328.110
429	Kab. Bima	8.457.952.275	8.457.952.275
430	Kab. Dompu	5.146.007.237	5.146.007.237
431	Kab. Lombok Barat	13.642.023.415	13.642.023.415
432	Kab. Lombok Tengah	25.231.196.306	25.231.196.306
433	Kab. Lombok Timur	51.515.907.840	51.515.907.840
434	Kab. Sumbawa	8.966.273.818	8.966.273.818
435	Kota Mataram	6.297.805.637	6.297.805.637
436	Kab. Lombok Utara	6.110.117.339	6.110.117.339
437	Kota Bima	4.286.790.096	4.286.790.096
438	Kab. Sumbawa Barat	4.653.358.285	4.653.358.285
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.541.166.954	1.541.166.954
440	Kab. Alor	88.180.188	60.728.519
441	Kab. Belu	276.375.543	276.375.543
442	Kab. Ende	1.077.457.298	736.375.370
443	Kab. Flores Timur	73.540.329	50.729.930
444	Kab. Kupang	114.161.560	78.473.023
445	Kab. Lembata	86.090.457	59.301.295
446	Kab. Manggarai	88.637.103	61.040.578
447	Kab. Ngada	73.540.329	50.729.930
448	Kab. Sikka	210.927.235	156.188.387
449	Kab. Sumba Barat	219.426.138	150.365.599
450	Kab. Sumba Timur	94.451.100	65.011.365
451	Kab. Timor Tengah Selatan	83.088.965	57.251.364
452	Kab. Timor Tengah Utara	73.540.329	50.729.930
453	Kota Kupang	73.540.329	50.729.930
454	Kab. Rote Ndao	73.540.329	50.729.930

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
455	Kab. Nagekeo	128.238.347	88.087.050
456	Kab. Sumba Tengah	73.540.329	50.729.930
457	Kab. Sumba Barat Daya	399.434.710	273.306.103
458	Kab. Manggarai Timur	73.540.329	50.729.930
459	Kab. Sabu Raijua	81.315.769	56.040.324
460	Kab. Manggarai Barat	133.489.495	133.489.495
461	Provinsi Maluku	-	-
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-
463	Kab. Maluku Tengah	-	-
464	Kab. Maluku Tenggara	-	-
465	Kab. Pulau Buru	-	-
466	Kota Ambon	-	-
467	Kab. Seram Bagian Barat	-	-
468	Kab. Seram Bagian Timur	-	-
469	Kab. Maluku Barat Daya	-	-
470	Kab. Buru Selatan	-	-
471	Kab. Kepulauan Aru	-	-
472	Kota Tual	-	-
473	Provinsi Maluku Utara	-	-
474	Kab. Halmahera Tengah	-	-
475	Kab. Halmahera Barat	-	-
476	Kota Ternate	-	-
477	Kab. Halmahera Timur	-	-
478	Kota Tidore Kepulauan	-	-
479	Kab. Kepulauan Sula	-	-
480	Kab. Pulau Morotai	-	-
481	Kab. Halmahera Selatan	-	-
482	Kab. Halmahera Utara	-	-
483	Kab. Yalimo	-	-
484	Kab. Lanny Jaya	-	-
485	Provinsi Papua	-	-
486	Kab. Biak Numfor	-	-
487	Kab. Jayapura	-	-
488	Kab. Jayawijaya	-	-
489	Kab. Merauke	-	-
490	Kab. Mimika	-	-
491	Kab. Nabire	-	-
492	Kab. Paniai	-	-
493	Kab. Puncak Jaya	-	-
494	Kab. Kepulauan Yapen	-	-
495	Kota Jayapura	-	-
496	Kab. Sarmi	-	-
497	Kab. Keerom	-	-
498	Kab. Yahukimo	-	-
499	Kab. Pegunungan Bintang	-	-
500	Kab. Tolikara	-	-
501	Kab. Boven Digoel	-	-
502	Kab. Mappi	-	-
503	Kab. Asmat	-	-
504	Kab. Waropen	-	-
505	Kab. Mamberamo Raya	-	-
506	Kab. Mamberamo Tengah	-	-
507	Kab. Nduga	-	-

No.	Daerah	Pagu	Realisasi
1	2	3	4
508	Kab. Dogiyai	-	-
509	Kab. Intan Jaya	-	-
510	Kab. Puncak	-	-
511	Kab. Deiyai	-	-
512	Kab. Supiori	-	-
513	Provinsi Papua Barat	-	-
514	Kab. Sorong	-	-
515	Kab. Manokwari	-	-
516	Kab. Fak Fak	-	-
517	Kota Sorong	-	-
518	Kab. Sorong Selatan	-	-
519	Kab. Raja Ampat	-	-
520	Kab. Teluk Bintuni	-	-
521	Kab. Teluk Wondama	-	-
522	Kab. Tambrau	-	-
523	Kab. Maybrat	-	-
524	Kab. Kaimana	-	-
	Dana Cadangan	-	-
JUMLAH		1.735.723.716.232	1.722.781.272.658

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS
UNAUDITED TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)**

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	911.080.707.000	911.080.707.000	50.413.710.000	50.413.710.000
2	Kab. Aceh Barat	440.584.427.000	440.584.427.000	38.695.880.000	38.695.880.000
3	Kab. Aceh Besar	549.069.553.000	549.069.553.000	52.573.120.000	52.573.120.000
4	Kab. Aceh Selatan	465.287.229.000	465.287.229.000	48.698.160.000	48.698.160.000
5	Kab. Aceh Singkil	298.293.644.000	298.293.644.000	37.510.770.000	37.510.770.000
6	Kab. Aceh Tengah	449.223.044.000	449.223.044.000	46.747.210.000	46.747.210.000
7	Kab. Aceh Tenggara	415.200.033.000	415.200.033.000	35.997.420.000	35.997.420.000
8	Kab. Aceh Timur	541.297.184.000	541.297.184.000	62.738.870.000	62.738.870.000
9	Kab. Aceh Utara	585.406.402.000	585.406.402.000	28.543.240.000	28.543.240.000
10	Kab. Bireun	612.599.162.000	612.599.162.000	51.102.390.000	51.102.390.000
11	Kab. Pidie	598.795.484.000	598.795.484.000	51.134.130.000	51.134.130.000
12	Kab. Simeulue	309.799.056.000	309.799.056.000	42.234.930.000	42.234.930.000
13	Kota Banda Aceh	491.593.554.000	491.593.554.000	26.893.570.000	26.893.570.000
14	Kota Sabang	273.672.391.000	273.672.391.000	17.773.910.000	17.773.910.000
15	Kota Langsa	337.337.339.000	337.337.339.000	23.604.620.000	23.604.620.000
16	Kota Lhokseumawe	394.259.998.000	394.259.998.000	26.014.670.000	26.014.670.000
17	Kab. Nagan Raya	387.243.580.000	387.243.580.000	27.478.100.000	27.478.100.000
18	Kab. Aceh Jaya	303.438.672.000	303.438.672.000	30.218.660.000	30.218.660.000
19	Kab. Pidie Jaya	307.809.690.000	307.809.690.000	35.525.310.000	35.525.310.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	327.572.527.000	327.572.527.000	46.517.310.000	46.517.310.000
21	Kab. Gayo Lues	329.446.951.000	329.446.951.000	44.339.270.000	44.339.270.000
22	Kab. Aceh Tamiang	370.319.962.000	370.319.962.000	42.395.070.000	42.395.070.000
23	Kab. Bener Meriah	332.475.834.000	332.475.834.000	33.009.850.000	33.009.850.000
24	Kota Subulussalam	225.256.530.000	225.256.530.000	31.856.380.000	31.856.380.000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.103.389.237.000	1.103.389.237.000	41.628.390.000	41.628.390.000
26	Kab. Asahan	628.974.980.000	628.974.980.000	65.206.660.000	65.206.660.000
27	Kab. Dairi	451.176.116.000	451.176.116.000	43.357.200.000	43.357.200.000
28	Kab. Deli Serdang	1.100.013.616.000	1.100.013.616.000	65.478.160.000	65.478.160.000
29	Kab. Tanah Karo	546.294.802.000	546.294.802.000	38.426.590.000	38.426.590.000
30	Kab. Labuhan Batu	461.644.282.000	461.644.282.000	75.496.690.000	75.496.690.000
31	Kab. Langkat	847.503.037.000	847.503.037.000	56.056.730.000	56.056.730.000
32	Kab. Mandailing Natal	541.106.638.000	541.106.638.000	41.555.830.000	41.555.830.000
33	Kab. Nias	289.608.144.000	289.608.144.000	48.137.260.000	48.137.260.000
34	Kab. Simalungun	865.405.855.000	865.405.855.000	90.868.630.000	90.868.630.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	454.322.254.000	454.322.254.000	53.366.970.000	53.366.970.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	422.611.672.000	422.611.672.000	48.644.240.000	48.644.240.000
37	Kab. Tapanuli Utara	487.345.532.000	487.345.532.000	50.220.620.000	50.220.620.000
38	Kab. Toba Samosir	387.623.169.000	387.623.169.000	52.119.770.000	52.119.770.000
39	Kota Binjai	416.965.216.000	416.965.216.000	23.777.970.000	23.777.970.000
40	Kota Medan	1.153.789.320.000	1.153.789.320.000	66.298.270.000	66.298.270.000
41	Kota Pematang Siantar	429.632.177.000	429.632.177.000	28.447.080.000	28.447.080.000
42	Kota Sibolga	292.873.107.000	292.873.107.000	19.290.260.000	19.290.260.000
43	Kota Tanjung Balai	313.729.707.000	313.729.707.000	17.955.740.000	17.955.740.000
44	Kab. Batu Bara	452.227.480.000	452.227.480.000	44.148.640.000	44.148.640.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	400.601.985.000	400.601.985.000	42.495.140.000	42.495.140.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	334.512.284.000	334.512.284.000	34.218.000.000	25.663.500.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	348.056.278.000	348.056.278.000	36.733.240.000	36.733.240.000
48	Kab. Padang Lawas	331.754.392.000	331.754.392.000	42.520.850.000	42.520.850.000
49	Kab. Nias Utara	267.283.187.000	267.283.187.000	36.405.150.000	36.405.150.000
50	Kab. Nias Barat	227.860.916.000	227.860.916.000	63.754.580.000	63.754.580.000
51	Kota Tebing Tinggi	307.635.669.000	307.635.669.000	25.323.480.000	25.323.480.000
52	Kota Padang Sidempuan	364.923.284.000	364.923.284.000	23.986.600.000	23.986.600.000
53	Kab. Pakpak Bharat	232.990.274.000	232.990.274.000	25.460.900.000	25.460.900.000
54	Kab. Nias Selatan	378.605.613.000	378.605.613.000	64.679.170.000	64.679.170.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	376.847.178.000	376.847.178.000	28.968.140.000	28.968.140.000
56	Kab. Serdang Bedagai	554.245.457.000	554.245.457.000	64.704.900.000	64.704.900.000
57	Kab. Samosir	331.412.601.000	331.412.601.000	37.126.130.000	27.844.598.000
58	Kota Gunung sitoli	305.726.000.000	305.726.000.000	56.898.180.000	56.898.180.000
59	Provinsi Sumatera Barat	918.560.365.000	918.560.365.000	32.500.720.000	32.500.720.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
60	Kab. Limapuluh Kota	550.759.741.000	550.759.741.000	44.415.300.000	44.415.300.000
61	Kab. Agam	595.713.049.000	595.713.049.000	74.202.750.000	74.202.750.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	371.174.681.000	371.174.681.000	35.584.400.000	26.688.300.000
63	Kab. Padang Pariaman	558.234.576.000	558.234.576.000	63.917.200.000	63.917.200.000
64	Kab. Pasaman	426.264.647.000	426.264.647.000	43.939.030.000	43.939.030.000
65	Kab. Pesisir Selatan	609.139.244.000	609.139.244.000	70.443.330.000	70.443.330.000
66	Kab. Sijunjung	389.425.714.000	389.425.714.000	42.992.150.000	42.992.150.000
67	Kab. Solok	521.759.479.000	521.759.479.000	54.762.570.000	54.762.570.000
68	Kab. Tanah Datar	520.092.334.000	520.092.334.000	47.980.030.000	47.980.030.000
69	Kota Bukit Tinggi	326.224.306.000	326.224.306.000	20.577.270.000	15.432.953.000
70	Kota Padang Panjang	269.610.492.000	269.610.492.000	18.629.610.000	18.629.610.000
71	Kota Padang	871.875.666.000	871.875.666.000	64.122.760.000	64.122.760.000
72	Kota Payakumbuh	325.023.247.000	325.023.247.000	25.559.910.000	25.559.910.000
73	Kota Sawahlunto	268.961.519.000	268.961.519.000	20.236.910.000	20.236.910.000
74	Kota Solok	280.495.627.000	280.495.627.000	23.908.660.000	23.908.660.000
75	Kota Pariaman	299.255.003.000	299.255.003.000	27.022.440.000	27.022.440.000
76	Kab. Pasaman Barat	457.694.684.000	457.694.684.000	52.908.300.000	52.908.300.000
77	Kab. Dharmasraya	351.295.616.000	351.295.616.000	36.555.460.000	36.555.460.000
78	Kab. Solok Selatan	315.024.093.000	315.024.093.000	34.030.910.000	34.030.910.000
79	Provinsi Riau	489.179.914.000	489.179.914.000	62.491.370.000	62.491.370.000
80	Kab. Bengkalis	84.768.625.000	84.768.625.000	40.874.260.000	40.874.260.000
81	Kab. Indragiri Hilir	651.878.979.000	651.878.979.000	73.370.340.000	55.027.755.000
82	Kab. Indragiri Hulu	487.476.121.000	487.476.121.000	46.461.410.000	46.461.410.000
83	Kab. Kampar	569.782.157.000	569.782.157.000	29.224.290.000	29.224.290.000
84	Kab. Kuantan Singingi	496.776.188.000	496.776.188.000	27.412.740.000	27.412.740.000
85	Kab. Pelalawan	421.047.701.000	421.047.701.000	26.777.240.000	26.777.240.000
86	Kab. Rokan Hilir	282.513.158.000	282.513.158.000	30.451.230.000	30.451.230.000
87	Kab. Rokan Hulu	442.557.164.000	442.557.164.000	17.192.010.000	17.192.010.000
88	Kab. Siak	167.312.486.000	167.312.486.000	15.713.630.000	15.713.630.000
89	Kota Dumai	299.081.335.000	299.081.335.000	-	-
90	Kota Pekanbaru	622.184.684.000	622.184.684.000	23.933.910.000	23.933.910.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	302.110.630.000	302.110.630.000	4.891.110.000	4.891.110.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	460.857.807.000	460.857.807.000	23.165.600.000	23.165.600.000
93	Kab. Bintan	232.884.448.000	232.884.448.000	15.782.440.000	15.782.440.000
94	Kab. Natuna	85.322.702.000	85.322.702.000	35.584.610.000	35.584.610.000
95	Kab. Karimun	246.833.306.000	246.833.306.000	4.352.100.000	4.352.100.000
96	Kota Batam	429.672.271.000	429.672.271.000	46.462.200.000	46.462.200.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	169.458.624.000	169.458.624.000	29.241.460.000	21.931.095.000
98	Kota Tanjung Pinang	292.026.588.000	292.026.588.000	1.444.580.000	1.444.580.000
99	Kab. Lingga	241.165.424.000	241.165.424.000	18.201.460.000	18.201.460.000
100	Provinsi Jambi	731.952.242.000	731.952.242.000	32.673.320.000	32.673.320.000
101	Kab. Batanghari	427.893.466.000	427.893.466.000	32.010.910.000	32.010.910.000
102	Kab. Bungo	456.372.466.000	456.372.466.000	40.226.240.000	40.226.240.000
103	Kab. Kerinci	442.627.808.000	442.627.808.000	56.523.520.000	56.523.520.000
104	Kab. Merangin	509.653.986.000	509.653.986.000	46.655.450.000	46.655.450.000
105	Kab. Muaro Jambi	458.269.264.000	458.269.264.000	57.738.360.000	57.738.360.000
106	Kab. Sarolangun	419.840.650.000	419.840.650.000	51.688.990.000	51.688.990.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	329.458.507.000	329.458.507.000	3.750.500.000	3.750.500.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	356.323.443.000	356.323.443.000	18.469.260.000	18.469.260.000
109	Kab. Tebo	410.846.427.000	410.846.427.000	34.161.960.000	34.161.960.000
110	Kota Jambi	543.578.287.000	543.578.287.000	40.010.140.000	40.010.140.000
111	Kota Sungai Penuh	295.529.443.000	295.529.443.000	24.999.780.000	18.749.835.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	716.153.261.000	716.153.261.000	45.401.430.000	45.401.430.000
113	Kab. Lahat	516.937.290.000	516.937.290.000	58.371.130.000	58.371.130.000
114	Kab. Musi Banyuasin	327.550.951.000	327.550.951.000	37.402.280.000	37.402.280.000
115	Kab. Musi Rawas	537.624.294.000	537.624.294.000	59.287.760.000	59.287.760.000
116	Kab. Muara Enim	580.314.469.000	580.314.469.000	45.218.580.000	45.218.580.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	743.452.601.000	743.452.601.000	82.721.570.000	82.721.570.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	456.823.059.000	456.823.059.000	15.199.060.000	15.199.060.000
119	Kota Palembang	934.084.157.000	934.084.157.000	36.498.530.000	36.498.530.000
120	Kota Pagar Alam	268.911.890.000	268.911.890.000	25.474.480.000	25.474.480.000
121	Kota Lubuk Linggau	328.281.811.000	328.281.811.000	31.059.990.000	31.059.990.000
122	Kota Prabumulih	299.641.875.000	299.641.875.000	20.886.170.000	20.886.170.000
123	Kab. Empat Lawang	274.671.065.000	274.671.065.000	42.325.010.000	42.325.010.000
124	Kab. Banyuasin	651.357.692.000	651.357.692.000	97.453.050.000	97.453.050.000
125	Kab. Ogan Ilir	446.518.667.000	446.518.667.000	49.789.140.000	49.789.140.000
126	Kab. OKU Timur	541.448.924.000	541.448.924.000	48.171.470.000	48.171.470.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
127	Kab. OKU Selatan	397.058.100.000	397.058.100.000	41.817.590.000	41.817.590.000
128	Provinsi Bangka Belitung	634.087.815.000	634.087.815.000	25.135.650.000	25.135.650.000
129	Kab. Bangka	403.295.027.000	403.295.027.000	52.578.660.000	52.578.660.000
130	Kab. Belitung	341.680.009.000	341.680.009.000	39.066.180.000	39.066.180.000
131	Kota Pangkal Pinang	336.693.583.000	336.693.583.000	26.987.120.000	20.240.340.000
132	Kab. Bangka Selatan	330.111.851.000	330.111.851.000	37.588.990.000	37.588.990.000
133	Kab. Bangka Tengah	303.044.784.000	303.044.784.000	35.892.070.000	35.892.070.000
134	Kab. Bangka Barat	322.887.366.000	322.887.366.000	32.131.060.000	32.131.060.000
135	Kab. Belitung Timur	319.571.051.000	319.571.051.000	33.870.360.000	33.870.360.000
136	Provinsi Bengkulu	775.311.166.000	775.311.166.000	28.620.610.000	28.620.610.000
137	Kab. Bengkulu Selatan	396.665.102.000	396.665.102.000	44.194.530.000	44.194.530.000
138	Kab. Bengkulu Utara	448.065.642.000	448.065.642.000	42.453.810.000	42.453.810.000
139	Kab. Rejang Lebong	448.469.185.000	448.469.185.000	48.953.470.000	48.953.470.000
140	Kota Bengkulu	475.745.500.000	475.745.500.000	32.144.200.000	32.144.200.000
141	Kab. Kaur	301.076.661.000	301.076.661.000	38.412.510.000	38.412.510.000
142	Kab. Seluma	349.783.377.000	349.783.377.000	50.280.530.000	50.280.530.000
143	Kab. Mukomuko	338.203.452.000	338.203.452.000	39.952.210.000	39.952.210.000
144	Kab. Lebong	293.909.631.000	293.909.631.000	37.743.780.000	37.743.780.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	288.875.390.000	288.875.390.000	36.763.590.000	36.763.590.000
146	Kab. Kepahiang	317.102.587.000	317.102.587.000	29.761.670.000	29.761.670.000
147	Provinsi Lampung	939.139.287.000	939.139.287.000	31.087.640.000	31.087.640.000
148	Kab. Lampung Barat	486.998.706.000	486.998.706.000	64.868.770.000	64.868.770.000
149	Kab. Lampung Selatan	686.434.133.000	686.434.133.000	115.550.690.000	115.550.690.000
150	Kab. Lampung Tengah	954.226.843.000	954.226.843.000	126.573.510.000	126.573.510.000
151	Kab. Lampung Utara	661.427.439.000	661.427.439.000	80.961.800.000	80.961.800.000
152	Kab. Lampung Timur	763.748.797.000	763.748.797.000	73.476.890.000	73.476.890.000
153	Kab. Tanggamus	530.838.460.000	530.838.460.000	91.286.390.000	91.286.390.000
154	Kab. Tulang Bawang	412.608.587.000	412.608.587.000	66.123.880.000	66.123.880.000
155	Kab. Way Kanan	450.615.498.000	450.615.498.000	69.624.180.000	69.624.180.000
156	Kab. Pesawaran	476.870.845.000	476.870.845.000	57.108.820.000	57.108.820.000
157	Kab. Pringsewu	443.529.040.000	443.529.040.000	91.917.180.000	91.917.180.000
158	Kab. Mesuji	294.053.217.000	294.053.217.000	56.212.090.000	56.212.090.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	323.773.746.000	323.773.746.000	68.267.740.000	68.267.740.000
160	Kota Bandar Lampung	762.664.927.000	762.664.927.000	50.491.130.000	50.491.130.000
161	Kota Metro	330.158.143.000	330.158.143.000	26.599.220.000	26.599.220.000
162	Provinsi DKI Jakarta	275.327.857.000	275.327.857.000	-	-
163	Provinsi Jawa Barat	1.269.960.760.000	1.269.960.760.000	48.356.280.000	48.356.280.000
164	Kab. Bandung	1.518.230.253.000	1.518.230.253.000	167.510.030.000	167.510.030.000
165	Kab. Bekasi	962.996.327.000	962.996.327.000	43.257.860.000	43.257.860.000
166	Kab. Bogor	1.672.614.142.000	1.672.614.142.000	158.027.770.000	158.027.770.000
167	Kab. Ciamis	1.165.043.374.000	1.165.043.374.000	89.651.290.000	89.651.290.000
168	Kab. Cianjur	1.168.372.143.000	1.168.372.143.000	148.885.720.000	148.885.720.000
169	Kab. Cirebon	1.135.758.785.000	1.135.758.785.000	86.034.470.000	86.034.470.000
170	Kab. Garut	1.385.441.117.000	1.385.441.117.000	142.605.490.000	142.605.490.000
171	Kab. Indramayu	1.017.639.195.000	1.017.639.195.000	97.712.970.000	97.712.970.000
172	Kab. Karawang	1.004.178.461.000	1.004.178.461.000	76.834.550.000	76.834.550.000
173	Kab. Kuningan	892.633.054.000	892.633.054.000	68.155.840.000	68.155.840.000
174	Kab. Majalengka	885.922.026.000	885.922.026.000	129.748.250.000	129.748.250.000
175	Kab. Purwakarta	635.154.048.000	635.154.048.000	44.084.300.000	44.084.300.000
176	Kab. Subang	917.181.913.000	917.181.913.000	57.339.020.000	57.339.020.000
177	Kab. Sukabumi	1.193.642.550.000	1.193.642.550.000	128.266.790.000	128.266.790.000
178	Kab. Sumedang	923.623.866.000	923.623.866.000	77.202.460.000	77.202.460.000
179	Kab. Tasikmalaya	1.083.660.482.000	1.083.660.482.000	106.110.250.000	106.110.250.000
180	Kab. Bandung Barat	804.973.413.000	804.973.413.000	72.168.590.000	72.168.590.000
181	Kota Bandung	1.323.681.042.000	1.323.681.042.000	37.047.460.000	37.047.460.000
182	Kota Bekasi	935.205.053.000	935.205.053.000	32.974.450.000	24.730.838.000
183	Kota Bogor	603.531.550.000	603.531.550.000	15.235.050.000	4.570.515.000
184	Kota Cirebon	487.039.012.000	487.039.012.000	20.172.180.000	20.172.180.000
185	Kota Depok	674.052.719.000	674.052.719.000	52.061.510.000	52.061.510.000
186	Kota Sukabumi	401.102.986.000	401.102.986.000	18.138.860.000	18.138.860.000
187	Kota Cimahi	440.860.307.000	440.860.307.000	26.916.070.000	26.916.070.000
188	Kota Tasikmalaya	582.124.220.000	582.124.220.000	30.936.990.000	30.936.990.000
189	Kota Banjar	281.851.254.000	281.851.254.000	16.460.070.000	16.460.070.000
190	Provinsi Banten	530.833.378.000	530.833.378.000	29.687.200.000	29.687.200.000
191	Kab. Lebak	804.122.393.000	804.122.393.000	66.461.250.000	66.461.250.000
192	Kab. Pandeglang	880.790.323.000	880.790.323.000	104.862.670.000	104.862.670.000
193	Kab. Serang	785.474.329.000	785.474.329.000	64.713.250.000	64.713.250.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
194	Kab. Tangerang	1.016.902.729.000	1.016.902.729.000	84.826.250.000	84.826.250.000
195	Kota Cilegon	405.584.438.000	405.584.438.000	328.820.000	328.820.000
196	Kota Tangerang	747.696.465.000	747.696.465.000	6.850.760.000	6.850.760.000
197	Kota Serang	442.554.608.000	442.554.608.000	49.457.830.000	49.457.830.000
198	Kota Tangerang Selatan	473.309.757.000	473.309.757.000	46.693.010.000	46.693.010.000
199	Provinsi Jawa Tengah	1.516.892.951.000	1.516.892.951.000	50.630.450.000	50.630.450.000
200	Kab. Banjarnegara	681.395.924.000	681.395.924.000	67.730.850.000	67.730.850.000
201	Kab. Banyumas	991.945.010.000	991.945.010.000	118.901.780.000	118.901.780.000
202	Kab. Batang	577.238.039.000	577.238.039.000	54.673.900.000	54.673.900.000
203	Kab. Blora	673.180.530.000	673.180.530.000	53.989.760.000	53.989.760.000
204	Kab. Boyolali	780.301.856.000	780.301.856.000	60.360.690.000	60.360.690.000
205	Kab. Brebes	981.051.188.000	981.051.188.000	84.451.160.000	84.451.160.000
206	Kab. Cilacap	1.057.808.013.000	1.057.808.013.000	87.652.460.000	87.652.460.000
207	Kab. Demak	658.971.337.000	658.971.337.000	81.553.310.000	81.553.310.000
208	Kab. Grobogan	812.990.740.000	812.990.740.000	97.055.020.000	97.055.020.000
209	Kab. Jepara	712.740.462.000	712.740.462.000	76.460.530.000	76.460.530.000
210	Kab. Karanganyar	720.918.512.000	720.918.512.000	55.514.410.000	55.514.410.000
211	Kab. Kebumen	906.222.007.000	906.222.007.000	100.103.330.000	100.103.330.000
212	Kab. Kendal	702.708.128.000	702.708.128.000	63.884.980.000	63.884.980.000
213	Kab. Klaten	967.284.829.000	967.284.829.000	74.501.530.000	74.501.530.000
214	Kab. Kudus	637.615.372.000	637.615.372.000	58.346.760.000	58.346.760.000
215	Kab. Magelang	816.732.604.000	816.732.604.000	103.595.180.000	103.595.180.000
216	Kab. Pati	850.377.211.000	850.377.211.000	80.449.020.000	80.449.020.000
217	Kab. Pekalongan	678.713.899.000	678.713.899.000	77.029.380.000	77.029.380.000
218	Kab. Pemalang	827.163.222.000	827.163.222.000	92.869.030.000	92.869.030.000
219	Kab. Purbalingga	640.265.476.000	640.265.476.000	75.989.640.000	75.989.640.000
220	Kab. Purworejo	711.741.839.000	711.741.839.000	69.568.400.000	69.568.400.000
221	Kab. Rembang	570.454.948.000	570.454.948.000	78.350.660.000	78.350.660.000
222	Kab. Semarang	691.271.583.000	691.271.583.000	67.737.200.000	67.737.200.000
223	Kab. Sragen	778.668.035.000	778.668.035.000	69.378.280.000	69.378.280.000
224	Kab. Sukoharjo	680.235.009.000	680.235.009.000	47.616.310.000	47.616.310.000
225	Kab. Tegal	860.568.434.000	860.568.434.000	74.555.350.000	74.555.350.000
226	Kab. Temanggung	584.158.278.000	584.158.278.000	87.303.720.000	87.303.720.000
227	Kab. Wonogiri	828.479.528.000	828.479.528.000	75.052.100.000	75.052.100.000
228	Kab. Wonosobo	597.858.484.000	597.858.484.000	55.970.270.000	55.970.270.000
229	Kota Magelang	348.498.193.000	348.498.193.000	20.667.810.000	20.667.810.000
230	Kota Pekalongan	347.390.356.000	347.390.356.000	27.126.720.000	27.126.720.000
231	Kota Salatiga	325.710.016.000	325.710.016.000	27.639.760.000	27.639.760.000
232	Kota Semarang	936.865.926.000	936.865.926.000	72.270.900.000	72.270.900.000
233	Kota Surakarta	595.222.827.000	595.222.827.000	28.972.180.000	28.972.180.000
234	Kota Tegal	334.819.065.000	334.819.065.000	30.554.770.000	30.554.770.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	757.056.696.000	757.056.696.000	19.052.740.000	19.052.740.000
236	Kab. Bantul	768.034.584.000	768.034.584.000	63.281.450.000	63.281.450.000
237	Kab. Gunung Kidul	687.944.489.000	687.944.489.000	70.584.420.000	70.584.420.000
238	Kab. Kulon Progo	531.104.016.000	531.104.016.000	45.379.520.000	45.379.520.000
239	Kab. Sleman	795.708.767.000	795.708.767.000	52.237.390.000	52.237.390.000
240	Kota Yogyakarta	536.466.614.000	536.466.614.000	6.485.350.000	6.485.350.000
241	Provinsi Jawa Timur	1.491.561.136.000	1.491.561.136.000	52.787.680.000	52.787.680.000
242	Kab. Bangkalan	700.513.200.000	700.513.200.000	71.355.490.000	71.355.490.000
243	Kab. Banyuwangi	1.030.217.037.000	1.030.217.037.000	67.656.190.000	67.656.190.000
244	Kab. Blitar	845.117.933.000	845.117.933.000	68.085.940.000	51.064.455.000
245	Kab. Bojonegoro	785.584.826.000	785.584.826.000	68.347.170.000	68.347.170.000
246	Kab. Bondowoso	666.857.212.000	666.857.212.000	65.417.780.000	65.417.780.000
247	Kab. Gresik	711.868.321.000	711.868.321.000	82.505.060.000	82.505.060.000
248	Kab. Jember	1.279.295.764.000	1.279.295.764.000	95.364.740.000	95.364.740.000
249	Kab. Jombang	809.295.635.000	809.295.635.000	94.467.880.000	94.467.880.000
250	Kab. Kediri	925.532.895.000	925.532.895.000	102.056.870.000	102.056.870.000
251	Kab. Lamongan	832.015.926.000	832.015.926.000	70.832.240.000	70.832.240.000
252	Kab. Lumajang	736.273.179.000	736.273.179.000	48.874.360.000	48.874.360.000
253	Kab. Madiun	645.865.489.000	645.865.489.000	49.168.360.000	49.168.360.000
254	Kab. Magetan	677.454.353.000	677.454.353.000	54.252.590.000	54.252.590.000
255	Kab. Malang	1.281.612.867.000	1.281.612.867.000	118.237.360.000	118.237.360.000
256	Kab. Mojokerto	733.782.205.000	733.782.205.000	50.645.610.000	50.645.610.000
257	Kab. Nganjuk	827.298.802.000	827.298.802.000	58.366.860.000	58.366.860.000
258	Kab. Ngawi	796.833.553.000	796.833.553.000	63.804.470.000	63.804.470.000
259	Kab. Pacitan	589.829.914.000	589.829.914.000	51.724.730.000	51.724.730.000
260	Kab. Pamekasan	625.872.640.000	625.872.640.000	61.093.880.000	61.093.880.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
261	Kab. Pasuruan	876.731.942.000	876.731.942.000	66.236.310.000	66.236.310.000
262	Kab. Ponorogo	779.077.679.000	779.077.679.000	62.386.740.000	62.386.740.000
263	Kab. Probolinggo	761.569.639.000	761.569.639.000	76.672.760.000	76.672.760.000
264	Kab. Sampang	603.996.470.000	603.996.470.000	72.170.450.000	72.170.450.000
265	Kab. Sidoarjo	974.570.533.000	974.570.533.000	63.877.470.000	63.877.470.000
266	Kab. Situbondo	616.093.730.000	616.093.730.000	66.718.400.000	66.718.400.000
267	Kab. Sumenep	807.976.168.000	807.976.168.000	67.924.850.000	67.924.850.000
268	Kab. Trenggalek	654.342.618.000	654.342.618.000	53.829.880.000	53.829.880.000
269	Kab. Tuban	757.906.831.000	757.906.831.000	49.806.830.000	49.806.830.000
270	Kab. Tulungagung	878.221.208.000	878.221.208.000	68.674.420.000	68.674.420.000
271	Kota Blitar	315.773.358.000	315.773.358.000	17.527.970.000	17.527.970.000
272	Kota Kediri	490.371.763.000	490.371.763.000	424.100.000	424.100.000
273	Kota Madiun	413.003.782.000	413.003.782.000	20.273.450.000	20.273.450.000
274	Kota Malang	665.927.808.000	665.927.808.000	21.897.310.000	21.897.310.000
275	Kota Mojokerto	309.102.871.000	309.102.871.000	15.463.900.000	15.463.900.000
276	Kota Pasuruan	319.424.821.000	319.424.821.000	19.058.200.000	19.058.200.000
277	Kota Probolinggo	367.601.263.000	367.601.263.000	32.816.170.000	32.816.170.000
278	Kota Surabaya	1.061.625.528.000	1.061.625.528.000	53.227.560.000	53.227.560.000
279	Kota Batu	324.768.945.000	324.768.945.000	18.244.590.000	16.585.720.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	1.023.229.807.000	1.023.229.807.000	43.913.040.000	43.913.040.000
281	Kab. Bengkayang	399.692.985.000	399.692.985.000	60.067.270.000	60.067.270.000
282	Kab. Landak	477.731.189.000	477.731.189.000	69.150.130.000	69.150.130.000
283	Kab. Kapuas Hulu	686.858.835.000	686.858.835.000	77.479.360.000	77.479.360.000
284	Kab. Ketapang	776.577.558.000	776.577.558.000	83.972.790.000	83.972.790.000
285	Kab. Pontianak	410.336.243.000	410.336.243.000	42.225.110.000	42.225.110.000
286	Kab. Sambas	622.612.006.000	622.612.006.000	89.094.070.000	89.094.070.000
287	Kab. Sanggau	589.206.205.000	589.206.205.000	88.950.480.000	88.950.480.000
288	Kab. Sintang	646.998.388.000	646.998.388.000	77.023.840.000	77.023.840.000
289	Kota Pontianak	549.629.456.000	549.629.456.000	44.753.630.000	44.753.630.000
290	Kota Singkawang	373.908.313.000	373.908.313.000	33.813.860.000	33.813.860.000
291	Kab. Kayong Utara	303.211.589.000	303.211.589.000	47.840.070.000	47.840.070.000
292	Kab. Kubu Raya	535.464.386.000	535.464.386.000	80.856.050.000	80.856.050.000
293	Kab. Sekadau	339.546.757.000	339.546.757.000	75.269.950.000	75.269.950.000
294	Kab. Melawi	387.406.601.000	387.406.601.000	50.448.590.000	50.448.590.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	951.256.068.000	951.256.068.000	50.184.280.000	50.184.280.000
296	Kab. Barito Selatan	450.692.235.000	450.692.235.000	40.146.160.000	40.146.160.000
297	Kab. Barito Utara	408.492.300.000	408.492.300.000	34.275.740.000	34.275.740.000
298	Kab. Kapuas	660.647.985.000	660.647.985.000	72.816.160.000	72.816.160.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	486.941.691.000	486.941.691.000	27.939.150.000	27.939.150.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	618.026.440.000	618.026.440.000	30.820.440.000	30.820.440.000
301	Kota Palangkaraya	459.782.814.000	459.782.814.000	31.305.370.000	31.305.370.000
302	Kab. Barito Timur	373.203.206.000	373.203.206.000	32.042.290.000	32.042.290.000
303	Kab. Murung Raya	508.288.176.000	508.288.176.000	1.423.410.000	1.423.410.000
304	Kab. Pulang Pisau	397.465.989.000	397.465.989.000	43.643.540.000	43.643.540.000
305	Kab. Gunung Mas	414.880.214.000	414.880.214.000	36.717.700.000	36.717.700.000
306	Kab. Lamandau	339.309.471.000	339.309.471.000	34.181.250.000	34.181.250.000
307	Kab. Sukamara	321.274.401.000	321.274.401.000	24.436.800.000	24.436.800.000
308	Kab. Katingan	513.410.125.000	513.410.125.000	6.780.340.000	6.780.340.000
309	Kab. Seruyan	450.226.987.000	450.226.987.000	48.655.530.000	48.655.530.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	652.535.312.000	652.535.312.000	38.848.250.000	38.848.250.000
311	Kab. Banjar	535.602.032.000	535.602.032.000	54.071.920.000	54.071.920.000
312	Kab. Barito Kuala	423.209.928.000	423.209.928.000	62.669.730.000	62.669.730.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	404.135.723.000	404.135.723.000	40.288.580.000	40.288.580.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	393.267.166.000	393.267.166.000	31.467.530.000	31.467.530.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	356.539.892.000	356.539.892.000	47.627.950.000	47.627.950.000
316	Kab. Kotabaru	509.000.078.000	509.000.078.000	24.265.740.000	24.265.740.000
317	Kab. Tabalong	356.660.993.000	356.660.993.000	4.938.870.000	4.938.870.000
318	Kab. Tanah Laut	398.795.857.000	398.795.857.000	20.372.950.000	20.372.950.000
319	Kab. Tapin	349.786.888.000	349.786.888.000	29.263.390.000	29.263.390.000
320	Kota Banjarbaru	308.618.984.000	308.618.984.000	26.927.460.000	26.927.460.000
321	Kota Banjarmasin	547.024.778.000	547.024.778.000	41.844.160.000	41.844.160.000
322	Kab. Balangan	258.116.917.000	258.116.917.000	3.207.280.000	3.207.280.000
323	Kab. Tanah Bumbu	374.541.852.000	374.541.852.000	21.974.250.000	21.974.250.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	52.637.761.000	52.637.761.000	34.616.130.000	34.616.130.000
325	Kab. Berau	444.693.316.000	444.693.316.000	5.519.870.000	4.139.903.000
326	Kab. Bulungan	289.927.621.000	289.927.621.000	7.645.380.000	7.645.380.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	59.091.547.000	59.091.547.000	50.178.150.000	15.053.445.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
328	Kab. Kutai Barat	535.530.298.000	535.530.298.000	72.611.450.000	72.611.450.000
329	Kab. Kutai Timur	452.003.282.000	452.003.282.000	14.289.630.000	14.289.630.000
330	Kab. Malinau	557.697.933.000	557.697.933.000	49.468.020.000	49.468.020.000
331	Kab. Nunukan	296.210.334.000	296.210.334.000	57.435.080.000	43.076.310.000
332	Kab. Pasir	280.966.870.000	280.966.870.000	7.397.640.000	7.397.640.000
333	Kota Balikpapan	385.085.246.000	385.085.246.000	13.459.300.000	13.459.300.000
334	Kota Bontang	134.543.724.000	134.543.724.000	-	-
335	Kab. Tana Tidung	143.330.129.000	143.330.129.000	6.166.530.000	1.849.959.000
336	Kota Samarinda	518.878.304.000	518.878.304.000	4.361.080.000	4.361.080.000
337	Kota Tarakan	216.526.490.000	216.526.490.000	-	-
338	Kab. Penajam Paser Utara	169.033.829.000	169.033.829.000	4.136.740.000	1.241.022.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	790.534.491.000	790.534.491.000	43.539.930.000	43.539.930.000
340	Kab. Bolaang Mongondow	388.968.883.000	388.968.883.000	68.308.140.000	68.308.140.000
341	Kab. Minahasa	488.909.611.000	488.909.611.000	46.571.080.000	46.571.080.000
342	Kab. Sangihe	388.071.349.000	388.071.349.000	60.509.760.000	60.509.760.000
343	Kota Bitung	379.300.339.000	379.300.339.000	33.009.510.000	33.009.510.000
344	Kota Manado	576.989.312.000	576.989.312.000	44.229.500.000	44.229.500.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	349.375.894.000	349.375.894.000	54.114.180.000	54.114.180.000
346	Kab. Minahasa Selatan	388.510.062.000	388.510.062.000	51.611.620.000	51.611.620.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	288.810.442.000	288.810.442.000	49.305.400.000	49.305.400.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	294.321.073.000	294.321.073.000	39.022.590.000	39.022.590.000
349	Kota Kotamubagu	270.246.978.000	270.246.978.000	24.267.000.000	24.267.000.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	210.942.873.000	210.942.873.000	28.884.600.000	28.884.600.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	229.324.941.000	229.324.941.000	24.212.220.000	24.212.220.000
352	Kota Tomohon	287.651.390.000	287.651.390.000	26.955.150.000	26.955.150.000
353	Kab. Minahasa Utara	354.982.999.000	354.982.999.000	60.593.370.000	60.593.370.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	260.205.636.000	260.205.636.000	33.859.330.000	33.859.330.000
355	Provinsi Gorontalo	582.140.302.000	582.140.302.000	24.008.330.000	24.008.330.000
356	Kab. Boalemo	299.140.794.000	299.140.794.000	36.230.470.000	36.230.470.000
357	Kab. Gorontalo	462.746.446.000	462.746.446.000	57.518.820.000	57.518.820.000
358	Kota Gorontalo	366.463.719.000	366.463.719.000	34.949.900.000	34.949.900.000
359	Kab. Pohuwato	342.707.301.000	342.707.301.000	41.065.680.000	41.065.680.000
360	Kab. Gorontalo Utara	251.595.704.000	251.595.704.000	41.547.480.000	41.547.480.000
361	Kab. Bone Bolango	318.414.380.000	318.414.380.000	33.890.770.000	33.890.770.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	902.087.729.000	902.087.729.000	43.237.070.000	43.237.070.000
363	Kab. Banggai	580.225.459.000	580.225.459.000	61.530.080.000	61.530.080.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	371.918.157.000	371.918.157.000	57.895.180.000	57.895.180.000
365	Kab. Buol	359.941.565.000	359.941.565.000	40.479.640.000	40.479.640.000
366	Kab. Toli-Toli	436.210.238.000	436.210.238.000	39.289.060.000	39.289.060.000
367	Kab. Donggala	464.885.380.000	464.885.380.000	69.147.080.000	69.147.080.000
368	Kab. Morowali	548.247.835.000	548.247.835.000	55.359.110.000	55.359.110.000
369	Kab. Poso	509.604.879.000	509.604.879.000	58.877.580.000	58.877.580.000
370	Kota Palu	512.824.174.000	512.824.174.000	42.362.300.000	42.362.300.000
371	Kab. Parigi Moutong	520.677.901.000	520.677.901.000	67.427.780.000	67.427.780.000
372	Kab. Sigi	442.899.906.000	442.899.906.000	51.218.610.000	51.218.610.000
373	Kab. Tojo Una Una	373.700.451.000	373.700.451.000	51.799.160.000	51.799.160.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	996.939.584.000	996.939.584.000	42.774.470.000	42.774.470.000
375	Kab. Bantaeng	325.057.232.000	325.057.232.000	39.504.550.000	39.504.550.000
376	Kab. Barru	358.904.488.000	358.904.488.000	42.032.280.000	42.032.280.000
377	Kab. Bone	754.025.482.000	754.025.482.000	89.442.570.000	89.442.570.000
378	Kab. Bulukumba	520.529.199.000	520.529.199.000	51.722.710.000	51.722.710.000
379	Kab. Enrekang	384.422.103.000	384.422.103.000	42.116.080.000	42.116.080.000
380	Kab. Gowa	586.415.307.000	586.415.307.000	54.785.160.000	54.785.160.000
381	Kab. Jeneponto	437.703.926.000	437.703.926.000	61.885.780.000	61.885.780.000
382	Kab. Luwu	475.295.053.000	475.295.053.000	54.806.460.000	54.806.460.000
383	Kab. Luwu Utara	457.250.496.000	457.250.496.000	43.516.120.000	43.516.120.000
384	Kab. Maros	455.829.227.000	455.829.227.000	49.906.540.000	49.906.540.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	485.962.003.000	485.962.003.000	46.460.490.000	46.460.490.000
386	Kab. Pinrang	502.508.309.000	502.508.309.000	44.568.230.000	44.568.230.000
387	Kab. Selayar	365.634.515.000	365.634.515.000	46.580.000.000	46.580.000.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	432.894.860.000	432.894.860.000	41.347.480.000	41.347.480.000
389	Kab. Sinjai	416.771.464.000	416.771.464.000	38.021.790.000	38.021.790.000
390	Kab. Soppeng	446.410.179.000	446.410.179.000	33.832.040.000	33.832.040.000
391	Kab. Takalar	409.280.603.000	409.280.603.000	46.835.800.000	46.835.800.000
392	Kab. Tana Toraja	389.286.812.000	389.286.812.000	64.649.650.000	64.649.650.000
393	Kab. Wajo	513.517.208.000	513.517.208.000	74.835.020.000	74.835.020.000
394	Kota Pare-pare	332.459.112.000	332.459.112.000	50.362.700.000	50.362.700.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
395	Kab. Toraja Utara	348.127.616.000	348.127.616.000	52.577.990.000	52.577.990.000
396	Kota Makassar	911.122.797.000	911.122.797.000	32.644.320.000	32.644.320.000
397	Kota Palopo	361.383.685.000	361.383.685.000	38.000.330.000	38.000.330.000
398	Kab. Luwu Timur	365.829.499.000	365.829.499.000	44.724.510.000	44.724.510.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	590.680.361.000	590.680.361.000	36.786.280.000	36.786.280.000
400	Kab. Majene	361.181.229.000	361.181.229.000	52.919.230.000	52.919.230.000
401	Kab. Mamuju	504.353.363.000	504.353.363.000	60.403.920.000	60.403.920.000
402	Kab. Polewali Mandar	484.998.228.000	484.998.228.000	71.437.140.000	71.437.140.000
403	Kab. Mamasa	350.648.047.000	350.648.047.000	72.822.860.000	72.822.860.000
404	Kab. Mamuju Utara	299.588.574.000	299.588.574.000	47.693.920.000	47.693.920.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	869.882.871.000	869.882.871.000	34.659.800.000	34.659.800.000
406	Kab. Buton	468.956.933.000	468.956.933.000	59.419.250.000	59.419.250.000
407	Kab. Konawe	568.010.624.000	568.010.624.000	59.187.530.000	59.187.530.000
408	Kab. Kolaka	535.098.526.000	535.098.526.000	52.618.840.000	52.618.840.000
409	Kab. Muna	561.580.535.000	561.580.535.000	80.745.000.000	80.745.000.000
410	Kota Kendari	478.763.604.000	478.763.604.000	42.248.220.000	42.248.220.000
411	Kota Bau-bau	370.653.915.000	370.653.915.000	34.663.270.000	34.663.270.000
412	Kab. Konawe Selatan	481.737.617.000	481.737.617.000	66.988.470.000	66.988.470.000
413	Kab. Bombana	328.634.006.000	328.634.006.000	49.693.380.000	49.693.380.000
414	Kab. Konawe Utara	377.863.760.000	377.863.760.000	43.398.480.000	43.398.480.000
415	Kab. Buton Utara	291.312.065.000	291.312.065.000	40.562.700.000	40.562.700.000
416	Kab. Wakatobi	308.676.985.000	308.676.985.000	44.851.260.000	44.851.260.000
417	Kab. Kolaka Utara	336.532.276.000	336.532.276.000	40.063.290.000	40.063.290.000
418	Provinsi Bali	694.079.080.000	694.079.080.000	34.025.910.000	34.025.910.000
419	Kab. Badung	353.067.906.000	353.067.906.000	1.838.320.000	1.838.320.000
420	Kab. Bangli	396.942.913.000	396.942.913.000	38.259.250.000	38.259.250.000
421	Kab. Buleleng	687.697.696.000	687.697.696.000	62.589.200.000	62.589.200.000
422	Kab. Gianyar	532.883.001.000	532.883.001.000	35.930.200.000	35.930.200.000
423	Kab. Jembrana	396.762.339.000	396.762.339.000	40.170.350.000	40.170.350.000
424	Kab. Karangasem	503.028.930.000	503.028.930.000	46.764.660.000	46.764.660.000
425	Kab. Klungkung	387.340.103.000	387.340.103.000	33.095.150.000	24.821.363.000
426	Kab. Tabanan	574.346.244.000	574.346.244.000	47.366.540.000	47.366.540.000
427	Kota Denpasar	512.666.446.000	512.666.446.000	8.489.350.000	8.489.350.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	809.617.715.000	809.617.715.000	53.326.340.000	53.326.340.000
429	Kab. Bima	618.722.430.000	618.722.430.000	63.393.380.000	63.393.380.000
430	Kab. Dompu	419.778.267.000	419.778.267.000	44.901.700.000	44.901.700.000
431	Kab. Lombok Barat	553.918.195.000	553.918.195.000	60.378.910.000	60.378.910.000
432	Kab. Lombok Tengah	702.814.863.000	702.814.863.000	74.433.270.000	74.433.270.000
433	Kab. Lombok Timur	830.534.456.000	830.534.456.000	101.450.730.000	101.450.730.000
434	Kab. Sumbawa	586.148.017.000	586.148.017.000	63.238.890.000	63.238.890.000
435	Kota Mataram	445.894.174.000	445.894.174.000	29.436.680.000	29.436.680.000
436	Kab. Lombok Utara	275.520.014.000	275.520.014.000	39.153.120.000	39.153.120.000
437	Kota Bima	329.098.457.000	329.098.457.000	40.913.200.000	40.913.200.000
438	Kab. Sumbawa Barat	259.334.022.000	259.334.022.000	28.651.770.000	28.651.770.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	940.646.764.000	940.646.764.000	57.088.950.000	57.088.950.000
440	Kab. Alor	414.227.641.000	414.227.641.000	66.290.940.000	66.290.940.000
441	Kab. Belu	514.663.089.000	514.663.089.000	107.588.230.000	107.588.230.000
442	Kab. Ende	459.254.657.000	459.254.657.000	75.508.650.000	75.508.650.000
443	Kab. Flores Timur	420.202.192.000	420.202.192.000	57.338.430.000	57.338.430.000
444	Kab. Kupang	475.616.705.000	475.616.705.000	77.887.130.000	77.887.130.000
445	Kab. Lembata	314.176.964.000	314.176.964.000	50.477.450.000	50.477.450.000
446	Kab. Manggarai	394.658.221.000	394.658.221.000	53.719.440.000	53.719.440.000
447	Kab. Ngada	336.875.056.000	336.875.056.000	47.824.850.000	47.824.850.000
448	Kab. Sikka	440.354.186.000	440.354.186.000	48.043.690.000	48.043.690.000
449	Kab. Sumba Barat	278.593.998.000	278.593.998.000	37.752.660.000	37.752.660.000
450	Kab. Sumba Timur	462.689.930.000	462.689.930.000	64.087.080.000	64.087.080.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	544.431.464.000	544.431.464.000	58.765.960.000	58.765.960.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	403.508.769.000	403.508.769.000	69.333.940.000	69.333.940.000
453	Kota Kupang	453.986.555.000	453.986.555.000	31.257.790.000	31.257.790.000
454	Kab. Rote Ndao	284.550.454.000	284.550.454.000	36.178.540.000	36.178.540.000
455	Kab. Nagekeo	303.787.471.000	303.787.471.000	58.979.870.000	58.979.870.000
456	Kab. Sumba Tengah	239.756.523.000	239.756.523.000	41.537.240.000	41.537.240.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	321.654.137.000	321.654.137.000	56.064.310.000	56.064.310.000
458	Kab. Manggarai Timur	339.700.544.000	339.700.544.000	97.018.550.000	97.018.550.000
459	Kab. Sabu Raijua	220.235.150.000	220.235.150.000	52.864.240.000	52.864.240.000
460	Kab. Manggarai Barat	342.638.721.000	342.638.721.000	47.058.870.000	47.058.870.000
461	Provinsi Maluku	829.491.474.000	829.491.474.000	38.062.680.000	38.062.680.000

No.	Daerah	DAU		DAK	
		Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
1	2	3	4	5	6
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	367.501.323.000	367.501.323.000	45.273.750.000	45.273.750.000
463	Kab. Maluku Tengah	672.609.497.000	672.609.497.000	59.515.870.000	59.515.870.000
464	Kab. Maluku Tenggara	310.533.609.000	310.533.609.000	41.235.810.000	41.235.810.000
465	Kab. Pulau Buru	329.533.510.000	329.533.510.000	41.429.330.000	41.429.330.000
466	Kota Ambon	497.388.862.000	497.388.862.000	29.219.550.000	29.219.550.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	400.089.555.000	400.089.555.000	37.905.470.000	37.905.470.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	328.796.339.000	328.796.339.000	42.842.540.000	42.842.540.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	353.270.635.000	353.270.635.000	40.115.000.000	40.115.000.000
470	Kab. Buru Selatan	259.458.763.000	259.458.763.000	34.703.870.000	34.703.870.000
471	Kab. Kepulauan Aru	356.469.535.000	356.469.535.000	46.574.580.000	46.574.580.000
472	Kota Tual	217.665.886.000	217.665.886.000	26.954.970.000	26.954.970.000
473	Provinsi Maluku Utara	703.159.025.000	703.159.025.000	37.858.020.000	37.858.020.000
474	Kab. Halmahera Tengah	301.838.254.000	301.838.254.000	43.787.980.000	43.787.980.000
475	Kab. Halmahera Barat	325.327.678.000	325.327.678.000	49.836.490.000	49.836.490.000
476	Kota Ternate	404.588.285.000	404.588.285.000	43.365.800.000	43.365.800.000
477	Kab. Halmahera Timur	295.108.028.000	295.108.028.000	40.408.360.000	40.408.360.000
478	Kota Tidore Kepulauan	399.531.966.000	399.531.966.000	43.485.170.000	43.485.170.000
479	Kab. Kepulauan Sula	361.491.540.000	361.491.540.000	38.389.310.000	38.389.310.000
480	Kab. Pulau Morotai	241.796.020.000	241.796.020.000	66.920.400.000	66.920.400.000
481	Kab. Halmahera Selatan	445.160.136.000	445.160.136.000	52.612.940.000	52.612.940.000
482	Kab. Halmahera Utara	324.875.231.000	324.875.231.000	50.694.990.000	50.694.990.000
483	Kab. Yalimo	361.840.282.000	361.840.282.000	61.904.020.000	61.904.020.000
484	Kab. Lanny Jaya	380.008.207.000	380.008.207.000	85.821.050.000	85.821.050.000
485	Provinsi Papua	1.569.782.444.000	1.569.782.444.000	106.191.170.000	106.191.170.000
486	Kab. Biak Numfor	435.356.830.000	435.356.830.000	71.582.310.000	71.582.310.000
487	Kab. Jayapura	493.852.754.000	493.852.754.000	55.842.600.000	55.842.600.000
488	Kab. Jayawijaya	473.277.942.000	473.277.942.000	56.194.030.000	56.194.030.000
489	Kab. Merauke	865.521.774.000	865.521.774.000	102.708.750.000	102.708.750.000
490	Kab. Mimika	412.267.021.000	412.267.021.000	49.423.900.000	49.423.900.000
491	Kab. Nabire	503.018.656.000	503.018.656.000	67.983.710.000	67.983.710.000
492	Kab. Paniai	430.773.393.000	430.773.393.000	89.942.900.000	89.942.900.000
493	Kab. Puncak Jaya	472.759.854.000	472.759.854.000	84.366.620.000	84.366.620.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	369.738.713.000	369.738.713.000	44.799.510.000	44.799.510.000
495	Kota Jayapura	496.265.717.000	496.265.717.000	44.263.240.000	44.263.240.000
496	Kab. Sarmi	487.193.343.000	487.193.343.000	37.321.220.000	37.321.220.000
497	Kab. Keerom	389.707.566.000	389.707.566.000	57.232.200.000	57.232.200.000
498	Kab. Yahukimo	492.738.286.000	492.738.286.000	85.313.140.000	85.313.140.000
499	Kab. Pegunungan Bintang	568.820.555.000	568.820.555.000	91.527.140.000	91.527.140.000
500	Kab. Tolikara	437.518.633.000	437.518.633.000	83.498.270.000	83.498.270.000
501	Kab. Boven Digoel	597.915.419.000	597.915.419.000	52.299.320.000	52.299.320.000
502	Kab. Mappi	581.299.652.000	581.299.652.000	73.187.330.000	73.187.330.000
503	Kab. Asmat	659.271.747.000	659.271.747.000	62.256.800.000	62.256.800.000
504	Kab. Waropen	383.124.701.000	383.124.701.000	39.703.100.000	39.703.100.000
505	Kab. Mamberamo Raya	503.646.862.000	503.646.862.000	38.710.380.000	38.710.380.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	341.507.690.000	341.507.690.000	48.933.200.000	48.933.200.000
507	Kab. Nduga	399.825.178.000	399.825.178.000	58.461.420.000	58.461.420.000
508	Kab. Dogiyai	332.993.509.000	332.993.509.000	54.101.270.000	54.101.270.000
509	Kab. Intan Jaya	447.947.741.000	447.947.741.000	88.770.570.000	88.770.570.000
510	Kab. Puncak	506.929.154.000	506.929.154.000	84.723.710.000	84.723.710.000
511	Kab. Deiyai	350.625.782.000	350.625.782.000	86.868.360.000	86.868.360.000
512	Kab. Supiori	316.866.840.000	316.866.840.000	38.680.520.000	38.680.520.000
513	Provinsi Papua Barat	901.398.453.000	901.398.453.000	38.633.110.000	38.633.110.000
514	Kab. Sorong	414.440.517.000	414.440.517.000	79.710.210.000	79.710.210.000
515	Kab. Manokwari	557.019.915.000	557.019.915.000	54.513.970.000	54.513.970.000
516	Kab. Fak Fak	479.791.765.000	479.791.765.000	40.743.400.000	40.743.400.000
517	Kota Sorong	350.959.919.000	350.959.919.000	34.991.880.000	34.991.880.000
518	Kab. Sorong Selatan	312.712.933.000	312.712.933.000	66.007.670.000	66.007.670.000
519	Kab. Raja Ampat	454.890.889.000	454.890.889.000	54.806.590.000	54.806.590.000
520	Kab. Teluk Bintuni	472.543.967.000	472.543.967.000	43.298.340.000	43.298.340.000
521	Kab. Teluk Wondama	318.112.538.000	318.112.538.000	46.918.690.000	46.918.690.000
522	Kab. Tambrauw	316.168.211.000	316.168.211.000	70.042.220.000	70.042.220.000
523	Kab. Maybrat	277.798.391.000	277.798.391.000	38.200.060.000	38.200.060.000
524	Kab. Kaimana	444.833.556.000	444.833.556.000	37.262.930.000	37.262.930.000
	Dana Cadangan	-	-	-	-
	JUMLAH	273.814.438.203.000	273.814.438.203.000	26.115.948.000.000	25.941.483.856.000

LAPORAN REALISASI ANGGARAN TRANSFER DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
UNAUDITED TAHUN ANGGARAN 2012
(Dalam Rupiah)

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.938.284.934.000	5.476.288.764.000	442.349.581.000	5.918.638.345.000
2	Kab. Aceh Barat	30.363.562.000	-	30.363.562.000	30.363.562.000
3	Kab. Aceh Besar	58.904.866.000	-	58.904.866.000	58.904.866.000
4	Kab. Aceh Selatan	46.126.568.000	-	46.126.568.000	46.126.568.000
5	Kab. Aceh Singkil	12.582.483.000	-	12.582.483.000	12.582.483.000
6	Kab. Aceh Tengah	64.636.899.000	-	64.636.899.000	64.636.899.000
7	Kab. Aceh Tenggara	29.416.657.000	-	29.416.657.000	29.416.657.000
8	Kab. Aceh Timur	42.541.238.000	-	42.541.238.000	42.541.238.000
9	Kab. Aceh Utara	80.428.694.000	-	80.428.694.000	80.428.694.000
10	Kab. Bireun	76.455.870.000	-	76.455.870.000	76.455.870.000
11	Kab. Pidie	76.722.948.000	-	76.722.948.000	76.722.948.000
12	Kab. Simeulue	12.315.860.000	-	12.315.860.000	12.315.860.000
13	Kota Banda Aceh	99.906.360.000	-	99.906.360.000	99.906.360.000
14	Kota Sabang	11.360.454.000	-	11.360.454.000	11.360.454.000
15	Kota Langsa	33.738.477.000	-	33.738.477.000	33.738.477.000
16	Kota Lhokseumawe	34.133.708.000	-	34.133.708.000	34.133.708.000
17	Kab. Nagan Raya	16.264.671.000	-	16.264.671.000	16.264.671.000
18	Kab. Aceh Jaya	17.353.962.000	-	17.353.962.000	17.353.962.000
19	Kab. Pidie Jaya	18.662.683.000	-	18.662.683.000	18.662.683.000
20	Kab. Aceh Barat Daya	27.372.335.000	-	27.372.335.000	27.372.335.000
21	Kab. Gayo Lues	11.154.993.000	-	11.154.993.000	11.154.993.000
22	Kab. Aceh Tamiang	37.922.576.000	-	37.922.576.000	37.922.576.000
23	Kab. Bener Meriah	23.200.856.000	-	23.200.856.000	23.200.856.000
24	Kota Subulussalam	10.737.772.000	-	10.737.772.000	10.737.772.000
25	Provinsi Sumatera Utara	1.592.683.614.000	-	1.518.973.689.250	1.518.973.689.250
26	Kab. Asahan	81.336.742.000	-	81.336.742.000	81.336.742.000
27	Kab. Dairi	45.929.603.000	-	45.929.603.000	45.929.603.000
28	Kab. Deli Serdang	170.965.159.000	-	170.965.159.000	170.965.159.000
29	Kab. Tanah Karo	60.038.468.000	-	60.038.468.000	60.038.468.000
30	Kab. Labuhan Batu	48.454.928.000	-	48.454.928.000	48.454.928.000
31	Kab. Langkat	116.777.995.000	-	116.777.995.000	116.777.995.000
32	Kab. Mandailing Natal	78.436.816.000	-	78.436.816.000	78.436.816.000
33	Kab. Nias	15.837.320.000	-	15.837.320.000	15.837.320.000
34	Kab. Simalungun	121.481.848.000	-	121.481.848.000	121.481.848.000
35	Kab. Tapanuli Selatan	40.550.539.000	-	40.550.539.000	40.550.539.000
36	Kab. Tapanuli Tengah	51.768.382.000	-	51.768.382.000	51.768.382.000
37	Kab. Tapanuli Utara	65.514.039.000	-	65.514.039.000	65.514.039.000
38	Kab. Toba Samosir	48.240.349.000	-	48.240.349.000	48.240.349.000
39	Kota Binjai	55.690.016.000	-	55.690.016.000	55.690.016.000
40	Kota Medan	253.041.880.000	-	251.397.130.000	251.397.130.000
41	Kota Pematang Siantar	62.146.267.000	-	62.146.267.000	62.146.267.000
42	Kota Sibolga	19.347.420.000	-	19.347.420.000	19.347.420.000
43	Kota Tanjung Balai	18.835.927.000	-	18.835.927.000	18.835.927.000
44	Kab. Batu Bara	48.118.977.000	-	48.118.977.000	48.118.977.000
45	Kab. Labuhan Batu Utara	37.337.382.000	-	37.337.382.000	37.337.382.000
46	Kab. Labuhan Batu Selatan	24.458.744.000	-	24.458.744.000	24.458.744.000
47	Kab. Padang Lawas Utara	22.560.460.000	-	22.560.460.000	22.560.460.000
48	Kab. Padang Lawas	19.304.303.000	-	19.304.303.000	19.304.303.000
49	Kab. Nias Utara	12.928.449.000	-	12.928.449.000	12.928.449.000
50	Kab. Nias Barat	8.018.367.000	-	8.018.367.000	8.018.367.000
51	Kota Tebing Tinggi	34.208.331.000	-	34.208.331.000	34.208.331.000
52	Kota Padang Sidempuan	48.972.403.000	-	48.972.403.000	48.972.403.000
53	Kab. Pakpak Bharat	10.071.199.000	-	10.071.199.000	10.071.199.000
54	Kab. Nias Selatan	16.147.599.000	-	16.147.599.000	16.147.599.000
55	Kab. Humbang Hasundutan	46.951.544.000	-	46.951.544.000	46.951.544.000
56	Kab. Serdang Bedagai	75.324.124.000	-	75.324.124.000	75.324.124.000
57	Kab. Samosir	27.475.806.000	-	27.475.806.000	27.475.806.000
58	Kota Gunung sitoli	31.973.979.000	-	31.973.979.000	31.973.979.000
59	Provinsi Sumatera Barat	569.435.210.000	-	544.675.915.000	544.675.915.000
60	Kab. Limapuluh Kota	79.937.742.000	-	79.937.742.000	79.937.742.000
61	Kab. Agam	111.969.415.000	-	111.969.415.000	111.969.415.000
62	Kab. Kepulauan Mentawai	22.400.517.000	-	22.400.517.000	22.400.517.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
63	Kab. Padang Pariaman	87.367.036.000	-	87.367.036.000	87.367.036.000
64	Kab. Pasaman	80.266.094.000	-	80.266.094.000	80.266.094.000
65	Kab. Pesisir Selatan	91.719.323.000	-	91.719.323.000	91.719.323.000
66	Kab. Sijunjung	39.239.323.000	-	39.239.323.000	39.239.323.000
67	Kab. Solok	76.720.541.000	-	76.720.541.000	76.720.541.000
68	Kab. Tanah Datar	96.102.078.000	-	96.102.078.000	96.102.078.000
69	Kota Bukit Tinggi	39.039.923.000	-	39.039.923.000	39.039.923.000
70	Kota Padang Panjang	22.296.642.000	-	22.296.642.000	22.296.642.000
71	Kota Padang	174.082.662.000	-	174.082.662.000	174.082.662.000
72	Kota Payakumbuh	41.407.063.000	-	41.407.063.000	41.407.063.000
73	Kota Sawahlunto	24.086.724.000	-	24.086.724.000	24.086.724.000
74	Kota Solok	27.874.286.000	-	27.874.286.000	27.874.286.000
75	Kota Pariaman	34.872.888.000	-	34.872.888.000	34.872.888.000
76	Kab. Pasaman Barat	37.878.104.000	-	37.878.104.000	37.878.104.000
77	Kab. Dharmasraya	34.304.754.000	-	34.304.754.000	34.304.754.000
78	Kab. Solok Selatan	25.743.313.000	-	25.743.313.000	25.743.313.000
79	Provinsi Riau	664.651.709.000	-	639.784.644.000	639.784.644.000
80	Kab. Bengkalis	76.721.242.000	-	76.721.242.000	76.721.242.000
81	Kab. Indragiri Hilir	59.893.183.000	-	59.893.183.000	59.893.183.000
82	Kab. Indragiri Hulu	53.766.598.000	-	53.766.598.000	53.766.598.000
83	Kab. Kampar	96.857.157.000	-	96.857.157.000	96.857.157.000
84	Kab. Kuantan Singingi	57.640.860.000	-	57.640.860.000	57.640.860.000
85	Kab. Pelalawan	58.160.635.000	-	58.160.635.000	58.160.635.000
86	Kab. Rokan Hilir	44.244.104.000	-	44.244.104.000	44.244.104.000
87	Kab. Rokan Hulu	49.415.930.000	-	49.415.930.000	49.415.930.000
88	Kab. Siak	48.202.403.000	-	48.202.403.000	48.202.403.000
89	Kota Dumai	35.538.792.000	-	35.538.792.000	35.538.792.000
90	Kota Pekanbaru	125.977.654.000	-	125.977.654.000	125.977.654.000
91	Kab. Kepulauan Meranti	24.391.067.000	-	24.391.067.000	24.391.067.000
92	Provinsi Kepulauan Riau	163.364.580.000	-	155.910.740.000	155.910.740.000
93	Kab. Bintan	22.055.574.000	-	22.055.574.000	22.055.574.000
94	Kab. Natuna	12.475.919.000	-	12.475.919.000	12.475.919.000
95	Kab. Karimun	32.244.654.000	-	32.244.654.000	32.244.654.000
96	Kota Batam	34.310.112.000	-	34.310.112.000	34.310.112.000
97	Kab. Kepulauan Anambas	4.155.163.000	-	4.155.163.000	4.155.163.000
98	Kota Tanjung Pinang	30.647.055.000	-	30.647.055.000	30.647.055.000
99	Kab. Lingga	16.264.331.000	-	13.447.331.000	13.447.331.000
100	Provinsi Jambi	341.463.908.000	-	324.820.708.000	324.820.708.000
101	Kab. Batanghari	43.043.750.000	-	43.043.750.000	43.043.750.000
102	Kab. Bungo	54.146.650.000	-	54.146.650.000	54.146.650.000
103	Kab. Kerinci	58.380.474.000	-	58.380.474.000	58.380.474.000
104	Kab. Merangin	46.859.789.000	-	46.859.789.000	46.859.789.000
105	Kab. Muaro Jambi	48.860.583.000	-	48.860.583.000	48.860.583.000
106	Kab. Sarolangun	45.844.245.000	-	45.844.245.000	45.844.245.000
107	Kab. Tanjung Jabung Barat	36.816.367.000	-	36.816.367.000	36.816.367.000
108	Kab. Tanjung Jabung Timur	33.248.391.000	-	33.248.391.000	33.248.391.000
109	Kab. Tebo	45.337.041.000	-	45.337.041.000	45.337.041.000
110	Kota Jambi	116.602.188.000	-	116.602.188.000	116.602.188.000
111	Kota Sungai Penuh	31.508.717.000	-	31.508.717.000	31.508.717.000
112	Provinsi Sumatera Selatan	814.754.820.000	-	777.775.050.000	777.775.050.000
113	Kab. Lahat	67.119.933.000	-	67.119.933.000	67.119.933.000
114	Kab. Musi Banyuasin	55.685.859.000	-	55.685.859.000	55.685.859.000
115	Kab. Musi Rawas	50.890.985.000	-	50.890.985.000	50.890.985.000
116	Kab. Muara Enim	79.326.550.000	-	79.326.550.000	79.326.550.000
117	Kab. Ogan Komering Ilir	70.082.265.000	-	70.082.265.000	70.082.265.000
118	Kab. Ogan Komering Ulu	53.258.952.000	-	53.258.952.000	53.258.952.000
119	Kota Palembang	259.279.204.000	-	259.279.204.000	259.279.204.000
120	Kota Pagar Alam	22.423.593.000	-	22.423.593.000	22.423.593.000
121	Kota Lubuk Linggau	39.862.301.000	-	39.862.301.000	39.862.301.000
122	Kota Prabumulih	30.031.678.000	-	30.031.678.000	30.031.678.000
123	Kab. Empat Lawang	18.837.078.000	-	18.837.078.000	18.837.078.000
124	Kab. Banyuasin	72.447.486.000	-	72.447.486.000	72.447.486.000
125	Kab. Ogan Ilir	56.797.002.000	-	56.797.002.000	56.797.002.000
126	Kab. OKU Timur	67.505.712.000	-	67.505.712.000	67.505.712.000
127	Kab. OKU Selatan	28.533.257.000	-	28.533.257.000	28.533.257.000
128	Provinsi Bangka Belitung	129.132.080.000	-	124.799.697.500	124.799.697.500
129	Kab. Bangka	34.335.918.000	-	34.335.918.000	34.335.918.000
130	Kab. Belitung	25.030.271.000	-	25.030.271.000	25.030.271.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
131	Kota Pangkal Pinang	30.052.643.000	-	30.052.643.000	30.052.643.000
132	Kab. Bangka Selatan	14.089.515.000	-	14.089.515.000	14.089.515.000
133	Kab. Bangka Tengah	15.654.044.000	-	15.654.044.000	15.654.044.000
134	Kab. Bangka Barat	18.194.157.000	-	18.194.157.000	18.194.157.000
135	Kab. Belitung Timur	16.806.491.000	-	16.806.491.000	16.806.491.000
136	Provinsi Bengkulu	203.519.360.000	-	193.083.392.500	193.083.392.500
137	Kab. Bengkulu Selatan	62.582.279.000	-	62.582.279.000	62.582.279.000
138	Kab. Bengkulu Utara	49.271.497.000	-	49.271.497.000	49.271.497.000
139	Kab. Rejang Lebong	43.934.979.000	-	43.934.979.000	43.934.979.000
140	Kota Bengkulu	57.933.321.000	-	57.933.321.000	57.933.321.000
141	Kab. Kaur	44.410.219.000	-	44.410.219.000	44.410.219.000
142	Kab. Seluma	28.919.750.000	-	28.919.750.000	28.919.750.000
143	Kab. Mukomuko	24.163.052.000	-	24.163.052.000	24.163.052.000
144	Kab. Lebong	21.478.137.000	-	21.478.137.000	21.478.137.000
145	Kab. Bengkulu Tengah	22.037.814.000	-	22.037.814.000	22.037.814.000
146	Kab. Kepahiang	27.534.617.000	-	27.534.617.000	27.534.617.000
147	Provinsi Lampung	785.229.380.000	-	750.856.896.000	750.856.896.000
148	Kab. Lampung Barat	78.783.947.000	-	78.783.947.000	78.783.947.000
149	Kab. Lampung Selatan	100.158.800.000	-	100.158.800.000	100.158.800.000
150	Kab. Lampung Tengah	182.660.030.000	-	182.660.030.000	182.660.030.000
151	Kab. Lampung Utara	97.473.403.000	-	97.473.403.000	97.473.403.000
152	Kab. Lampung Timur	134.926.995.000	-	134.926.995.000	134.926.995.000
153	Kab. Tanggamus	75.158.684.000	-	75.158.684.000	75.158.684.000
154	Kab. Tulang Bawang	37.709.998.000	-	37.709.998.000	37.709.998.000
155	Kab. Way Kanan	54.967.011.000	-	54.967.011.000	54.967.011.000
156	Kab. Pesawaran	62.342.248.000	-	62.342.248.000	62.342.248.000
157	Kab. Pringsewu	80.547.613.000	-	80.547.613.000	80.547.613.000
158	Kab. Mesuji	15.777.198.000	-	15.777.198.000	15.777.198.000
159	Kab. Tulang Bawang Barat	36.330.492.000	-	36.330.492.000	36.330.492.000
160	Kota Bandar Lampung	168.206.757.000	-	168.206.757.000	168.206.757.000
161	Kota Metro	56.212.967.000	-	56.212.967.000	56.212.967.000
162	Provinsi DKI Jakarta	1.816.564.063.000	-	1.779.682.463.000	1.779.682.463.000
163	Provinsi Jawa Barat	4.205.668.978.000	-	4.046.052.947.500	4.046.052.947.500
164	Kab. Bandung	318.054.232.000	-	318.054.232.000	318.054.232.000
165	Kab. Bekasi	177.623.968.000	-	177.623.968.000	177.623.968.000
166	Kab. Bogor	263.590.831.000	-	263.590.831.000	263.590.831.000
167	Kab. Ciamis	247.286.806.000	-	247.286.806.000	247.286.806.000
168	Kab. Cianjur	221.006.291.000	-	221.006.291.000	221.006.291.000
169	Kab. Cirebon	194.676.765.000	-	194.676.765.000	194.676.765.000
170	Kab. Garut	266.801.526.000	-	266.801.526.000	266.801.526.000
171	Kab. Indramayu	166.244.941.000	-	166.244.941.000	166.244.941.000
172	Kab. Karawang	164.132.014.000	-	164.132.014.000	164.132.014.000
173	Kab. Kuningan	147.605.926.000	-	147.605.926.000	147.605.926.000
174	Kab. Majalengka	155.879.569.000	-	155.879.569.000	155.879.569.000
175	Kab. Purwakarta	113.145.574.000	-	113.145.574.000	113.145.574.000
176	Kab. Subang	158.933.948.000	-	158.933.948.000	158.933.948.000
177	Kab. Sukabumi	190.464.509.000	-	190.464.509.000	190.464.509.000
178	Kab. Sumedang	153.087.296.000	-	153.087.296.000	153.087.296.000
179	Kab. Tasikmalaya	232.477.213.000	-	232.477.213.000	232.477.213.000
180	Kab. Bandung Barat	145.329.274.000	-	145.329.274.000	145.329.274.000
181	Kota Bandung	293.695.361.000	-	293.695.361.000	293.695.361.000
182	Kota Bekasi	174.552.873.000	-	174.552.873.000	174.552.873.000
183	Kota Bogor	125.745.495.000	-	125.745.495.000	125.745.495.000
184	Kota Cirebon	64.268.689.000	-	64.268.689.000	64.268.689.000
185	Kota Depok	109.629.910.000	-	109.629.910.000	109.629.910.000
186	Kota Sukabumi	55.214.998.000	-	55.214.998.000	55.214.998.000
187	Kota Cimahi	81.110.429.000	-	81.110.429.000	81.110.429.000
188	Kota Tasikmalaya	122.975.025.000	-	122.975.025.000	122.975.025.000
189	Kota Banjar	35.205.659.000	-	35.205.659.000	35.205.659.000
190	Provinsi Banten	1.047.296.690.000	-	998.737.325.000	998.737.325.000
191	Kab. Lebak	133.704.907.000	-	133.704.907.000	133.704.907.000
192	Kab. Pandeglang	155.073.997.000	-	155.073.997.000	155.073.997.000
193	Kab. Serang	119.629.024.000	-	119.629.024.000	119.629.024.000
194	Kab. Tangerang	164.709.098.000	-	164.709.098.000	164.709.098.000
195	Kota Cilegon	58.707.284.000	-	58.707.284.000	58.707.284.000
196	Kota Tangerang	182.398.549.000	-	182.398.549.000	182.398.549.000
197	Kota Serang	68.626.820.000	-	68.626.820.000	68.626.820.000
198	Kota Tangerang Selatan	83.889.123.000	-	83.889.123.000	83.889.123.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
199	Provinsi Jawa Tengah	2.852.581.621.000	-	2.710.569.135.000	2.710.569.135.000
200	Kab. Banjarnegara	168.674.789.000	-	168.674.789.000	168.674.789.000
201	Kab. Banyumas	236.964.107.000	-	236.964.107.000	236.964.107.000
202	Kab. Batang	111.875.303.000	-	111.875.303.000	111.875.303.000
203	Kab. Blora	105.770.570.000	-	105.770.570.000	105.770.570.000
204	Kab. Boyolali	167.626.904.000	-	167.626.904.000	167.626.904.000
205	Kab. Brebes	202.690.706.000	-	202.690.706.000	202.690.706.000
206	Kab. Cilacap	213.682.172.000	-	213.682.172.000	213.682.172.000
207	Kab. Demak	123.222.625.000	-	123.222.625.000	123.222.625.000
208	Kab. Grobogan	131.494.643.000	-	131.494.643.000	131.494.643.000
209	Kab. Jepara	116.288.445.000	-	116.288.445.000	116.288.445.000
210	Kab. Karanganyar	181.233.186.000	-	181.233.186.000	181.233.186.000
211	Kab. Kebumen	163.270.232.000	-	163.270.232.000	163.270.232.000
212	Kab. Kendal	128.304.737.000	-	128.304.737.000	128.304.737.000
213	Kab. Klaten	207.721.763.000	-	207.721.763.000	207.721.763.000
214	Kab. Kudus	88.545.748.000	-	88.545.748.000	88.545.748.000
215	Kab. Magelang	118.609.866.000	-	118.609.866.000	118.609.866.000
216	Kab. Pati	174.374.050.000	-	174.374.050.000	174.374.050.000
217	Kab. Pekalongan	129.909.032.000	-	129.909.032.000	129.909.032.000
218	Kab. Pemalang	179.101.037.000	-	179.101.037.000	179.101.037.000
219	Kab. Purbalingga	142.624.281.000	-	142.624.281.000	142.624.281.000
220	Kab. Purworejo	155.803.538.000	-	155.803.538.000	155.803.538.000
221	Kab. Rembang	96.417.785.000	-	96.417.785.000	96.417.785.000
222	Kab. Semarang	153.333.191.000	-	153.333.191.000	153.333.191.000
223	Kab. Sragen	167.308.769.000	-	167.308.769.000	167.308.769.000
224	Kab. Sukoharjo	121.525.711.000	-	121.525.711.000	121.525.711.000
225	Kab. Tegal	129.114.524.000	-	129.114.524.000	129.114.524.000
226	Kab. Temanggung	99.581.821.000	-	99.581.821.000	99.581.821.000
227	Kab. Wonogiri	183.826.480.000	-	183.826.480.000	183.826.480.000
228	Kab. Wonosobo	106.366.965.000	-	106.366.965.000	106.366.965.000
229	Kota Magelang	46.539.535.000	-	46.539.535.000	46.539.535.000
230	Kota Pekalongan	68.645.794.000	-	68.645.794.000	68.645.794.000
231	Kota Salatiga	46.948.716.000	-	46.948.716.000	46.948.716.000
232	Kota Semarang	191.552.502.000	-	191.552.502.000	191.552.502.000
233	Kota Surakarta	175.527.411.000	-	175.527.411.000	175.527.411.000
234	Kota Tegal	54.384.462.000	-	54.384.462.000	54.384.462.000
235	Provinsi DI Yogyakarta	280.790.940.000	-	266.557.880.000	266.557.880.000
236	Kab. Bantul	205.719.691.000	-	205.719.691.000	205.719.691.000
237	Kab. Gunung Kidul	159.563.905.000	-	159.563.905.000	159.563.905.000
238	Kab. Kulon Progo	143.945.745.000	-	143.945.745.000	143.945.745.000
239	Kab. Sleman	208.486.544.000	-	208.486.544.000	208.486.544.000
240	Kota Yogyakarta	139.337.979.000	-	139.337.979.000	139.337.979.000
241	Provinsi Jawa Timur	2.851.753.720.000	-	2.714.857.737.500	2.714.857.737.500
242	Kab. Bangkalan	106.002.433.000	-	106.002.433.000	106.002.433.000
243	Kab. Banyuwangi	210.000.496.000	-	210.000.496.000	210.000.496.000
244	Kab. Blitar	204.003.305.000	-	204.003.305.000	204.003.305.000
245	Kab. Bojonegoro	181.097.658.000	-	181.097.658.000	181.097.658.000
246	Kab. Bondowoso	105.507.694.000	-	105.507.694.000	105.507.694.000
247	Kab. Gresik	132.647.614.000	-	132.647.614.000	132.647.614.000
248	Kab. Jember	267.865.152.000	-	267.865.152.000	267.865.152.000
249	Kab. Jombang	175.386.824.000	-	175.386.824.000	175.386.824.000
250	Kab. Kediri	223.566.464.000	-	223.566.464.000	223.566.464.000
251	Kab. Lamongan	219.647.068.000	-	219.647.068.000	219.647.068.000
252	Kab. Lumajang	129.048.307.000	-	129.048.307.000	129.048.307.000
253	Kab. Madiun	127.675.703.000	-	127.675.703.000	127.675.703.000
254	Kab. Magetan	151.578.678.000	-	151.578.678.000	151.578.678.000
255	Kab. Malang	295.633.435.000	-	295.633.435.000	295.633.435.000
256	Kab. Mojokerto	134.133.167.000	-	134.133.167.000	134.133.167.000
257	Kab. Nganjuk	208.437.498.000	-	208.437.498.000	208.437.498.000
258	Kab. Ngawi	153.929.459.000	-	153.929.459.000	153.929.459.000
259	Kab. Pacitan	145.874.996.000	-	145.874.996.000	145.874.996.000
260	Kab. Pamekasan	86.043.555.000	-	86.043.555.000	86.043.555.000
261	Kab. Pasuruan	174.680.109.000	-	174.680.109.000	174.680.109.000
262	Kab. Ponorogo	157.237.213.000	-	157.237.213.000	157.237.213.000
263	Kab. Probolinggo	154.913.927.000	-	154.913.927.000	154.913.927.000
264	Kab. Sampang	70.975.210.000	-	70.975.210.000	70.975.210.000
265	Kab. Sidoarjo	205.691.537.000	-	205.691.537.000	205.691.537.000
266	Kab. Situbondo	85.800.354.000	-	85.800.354.000	85.800.354.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
267	Kab. Sumenep	108.225.273.000	-	108.225.273.000	108.225.273.000
268	Kab. Trenggalek	147.647.104.000	-	147.647.104.000	147.647.104.000
269	Kab. Tuban	151.941.147.000	-	151.941.147.000	151.941.147.000
270	Kab. Tulungagung	217.666.843.000	-	217.666.843.000	217.666.843.000
271	Kota Blitar	45.450.355.000	-	45.450.355.000	45.450.355.000
272	Kota Kediri	71.136.871.000	-	71.136.871.000	71.136.871.000
273	Kota Madiun	81.339.127.000	-	81.093.627.000	81.093.627.000
274	Kota Malang	154.326.955.000	-	154.326.955.000	154.326.955.000
275	Kota Mojokerto	27.922.735.000	-	27.922.735.000	27.922.735.000
276	Kota Pasuruan	36.125.875.000	-	36.125.875.000	36.125.875.000
277	Kota Probolinggo	43.709.951.000	-	43.709.951.000	43.709.951.000
278	Kota Surabaya	309.836.593.000	-	309.836.593.000	309.836.593.000
279	Kota Batu	30.195.147.000	-	30.195.147.000	30.195.147.000
280	Provinsi Kalimantan Barat	537.402.930.000	-	512.118.727.500	512.118.727.500
281	Kab. Bengkayang	29.702.434.000	-	29.702.434.000	29.702.434.000
282	Kab. Landak	39.331.476.000	-	39.331.476.000	39.331.476.000
283	Kab. Kapuas Hulu	37.844.041.000	-	37.844.041.000	37.844.041.000
284	Kab. Ketapang	45.841.722.000	-	45.841.722.000	45.841.722.000
285	Kab. Pontianak	42.371.695.000	-	42.371.695.000	42.371.695.000
286	Kab. Sambas	71.939.253.000	-	71.939.253.000	71.939.253.000
287	Kab. Sanggau	48.746.077.000	-	48.746.077.000	48.746.077.000
288	Kab. Sintang	40.382.966.000	-	40.382.966.000	40.382.966.000
289	Kota Pontianak	85.150.713.000	-	85.150.713.000	85.150.713.000
290	Kota Singkawang	34.055.986.000	-	34.055.986.000	34.055.986.000
291	Kab. Kayong Utara	9.443.367.000	-	9.443.367.000	9.443.367.000
292	Kab. Kubu Raya	47.732.752.000	-	47.732.752.000	47.732.752.000
293	Kab. Sekadau	16.882.678.000	-	16.882.678.000	16.882.678.000
294	Kab. Melawi	24.343.968.000	-	24.343.968.000	24.343.968.000
295	Provinsi Kalimantan Tengah	248.809.029.000	-	241.156.464.000	241.156.464.000
296	Kab. Barito Selatan	28.567.964.000	-	28.567.964.000	28.567.964.000
297	Kab. Barito Utara	25.818.023.000	-	25.818.023.000	25.818.023.000
298	Kab. Kapuas	64.233.435.000	-	64.233.435.000	64.233.435.000
299	Kab. Kotawaringin Barat	49.754.499.000	-	49.754.499.000	49.754.499.000
300	Kab. Kotawaringin Timur	41.395.584.000	-	41.395.584.000	41.395.584.000
301	Kota Palangkaraya	65.451.732.000	-	65.451.732.000	65.451.732.000
302	Kab. Barito Timur	21.622.933.000	-	21.622.933.000	21.622.933.000
303	Kab. Murung Raya	15.334.713.000	-	15.334.713.000	15.334.713.000
304	Kab. Pulang Pisau	19.014.953.000	-	19.014.953.000	19.014.953.000
305	Kab. Gunung Mas	20.296.789.000	-	20.296.789.000	20.296.789.000
306	Kab. Lamandau	12.174.768.000	-	12.174.768.000	12.174.768.000
307	Kab. Sukamara	13.983.532.000	-	13.983.532.000	13.983.532.000
308	Kab. Katingan	27.184.842.000	-	27.184.842.000	27.184.842.000
309	Kab. Seruyan	16.130.908.000	-	16.130.908.000	16.130.908.000
310	Provinsi Kalimantan Selatan	324.701.520.000	-	310.998.815.000	310.998.815.000
311	Kab. Banjar	69.895.459.000	-	69.895.459.000	69.895.459.000
312	Kab. Barito Kuala	76.492.582.000	-	76.492.582.000	76.492.582.000
313	Kab. Hulu Sungai Selatan	50.280.210.000	-	50.280.210.000	50.280.210.000
314	Kab. Hulu Sungai Tengah	58.001.523.000	-	58.001.523.000	58.001.523.000
315	Kab. Hulu Sungai Utara	40.890.665.000	-	40.890.665.000	40.890.665.000
316	Kab. Kotabaru	38.005.461.000	-	38.005.461.000	38.005.461.000
317	Kab. Tabalong	57.314.038.000	-	57.314.038.000	57.314.038.000
318	Kab. Tanah Laut	53.951.948.000	-	53.951.948.000	53.951.948.000
319	Kab. Tapin	39.740.040.000	-	39.740.040.000	39.740.040.000
320	Kota Banjarbaru	43.948.799.000	-	43.948.799.000	43.948.799.000
321	Kota Banjarmasin	115.558.694.000	-	115.558.694.000	115.558.694.000
322	Kab. Balangan	29.398.998.000	-	29.398.998.000	29.398.998.000
323	Kab. Tanah Bumbu	31.434.648.000	-	31.434.648.000	31.434.648.000
324	Provinsi Kalimantan Timur	420.887.864.000	-	407.917.670.000	407.917.670.000
325	Kab. Berau	51.267.274.000	-	51.267.274.000	51.267.274.000
326	Kab. Bulungan	22.503.730.000	-	22.503.730.000	22.503.730.000
327	Kab. Kutai Kartanegara	136.737.704.000	-	136.737.704.000	136.737.704.000
328	Kab. Kutai Barat	31.231.634.000	-	31.231.634.000	31.231.634.000
329	Kab. Kutai Timur	33.284.458.000	-	33.284.458.000	33.284.458.000
330	Kab. Malinau	10.262.415.000	-	10.262.415.000	10.262.415.000
331	Kab. Nunukan	20.033.133.000	-	20.033.133.000	20.033.133.000
332	Kab. Paser	36.500.837.000	-	36.500.837.000	36.500.837.000
333	Kota Balikpapan	63.214.153.000	-	63.214.153.000	63.214.153.000
334	Kota Bontang	21.445.333.000	-	21.445.333.000	21.445.333.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
335	Kab. Tana Tidung	2.622.341.000	-	2.622.341.000	2.622.341.000
336	Kota Samarinda	98.941.846.000	-	98.941.846.000	98.941.846.000
337	Kota Tarakan	42.947.482.000	-	42.947.482.000	42.947.482.000
338	Kab. Penajam Paser Utara	22.448.419.000	-	22.448.419.000	22.448.419.000
339	Provinsi Sulawesi Utara	278.695.044.000	-	267.389.841.500	267.389.841.500
340	Kab. Bolaang Mongondow	33.152.041.000	-	33.152.041.000	33.152.041.000
341	Kab. Minahasa	109.815.346.000	-	109.815.346.000	109.815.346.000
342	Kab. Sangihe	33.372.079.000	-	33.372.079.000	33.372.079.000
343	Kota Bitung	57.842.609.000	-	57.842.609.000	57.842.609.000
344	Kota Manado	100.446.551.000	-	100.446.551.000	100.446.551.000
345	Kab. Kepulauan Talaud	25.420.299.000	-	25.420.299.000	25.420.299.000
346	Kab. Minahasa Selatan	55.810.686.000	-	55.810.686.000	55.810.686.000
347	Kab. Minahasa Tenggara	12.111.938.000	-	12.111.938.000	12.111.938.000
348	Kab. Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	16.018.326.000	-	16.018.326.000	16.018.326.000
349	Kota Kotamubagu	33.193.943.000	-	33.193.943.000	33.193.943.000
350	Kab. Bolaang Mongondow Timur	6.824.459.000	-	6.824.459.000	6.824.459.000
351	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	3.586.549.000	-	3.586.549.000	3.586.549.000
352	Kota Tomohon	26.800.900.000	-	26.800.900.000	26.800.900.000
353	Kab. Minahasa Utara	50.192.084.000	-	50.192.084.000	50.192.084.000
354	Kab. Bolaang Mongondow Utara	10.995.483.000	-	10.995.483.000	10.995.483.000
355	Provinsi Gorontalo	121.630.890.000	-	116.123.470.000	116.123.470.000
356	Kab. Boalemo	21.052.571.000	-	21.052.571.000	21.052.571.000
357	Kab. Gorontalo	101.219.424.000	-	101.219.424.000	101.219.424.000
358	Kota Gorontalo	58.247.609.000	-	58.247.609.000	58.247.609.000
359	Kab. Pohuwato	18.770.895.000	-	18.770.895.000	18.770.895.000
360	Kab. Gorontalo Utara	15.619.905.000	-	15.619.905.000	15.619.905.000
361	Kab. Bone Bolango	37.288.508.000	-	37.288.508.000	37.288.508.000
362	Provinsi Sulawesi Tengah	323.079.150.000	-	308.504.693.000	308.504.693.000
363	Kab. Banggai	95.546.431.000	-	95.546.431.000	95.546.431.000
364	Kab. Banggai Kepulauan	53.735.706.000	-	53.735.706.000	53.735.706.000
365	Kab. Buol	23.060.581.000	-	23.060.581.000	23.060.581.000
366	Kab. Toli-Toli	31.748.453.000	-	31.748.453.000	31.748.453.000
367	Kab. Donggala	48.558.453.000	-	48.558.453.000	48.558.453.000
368	Kab. Morowali	39.698.517.000	-	39.698.517.000	39.698.517.000
369	Kab. Poso	73.455.481.000	-	73.455.481.000	73.455.481.000
370	Kota Palu	111.147.949.000	-	111.147.949.000	111.147.949.000
371	Kab. Parigi Moutong	47.716.339.000	-	47.716.339.000	47.716.339.000
372	Kab. Sigi	41.169.086.000	-	41.169.086.000	41.169.086.000
373	Kab. Tojo Una Una	23.663.517.000	-	23.663.517.000	23.663.517.000
374	Provinsi Sulawesi Selatan	928.800.890.000	-	884.352.647.500	884.352.647.500
375	Kab. Bantaeng	40.820.067.000	-	40.820.067.000	40.820.067.000
376	Kab. Barru	46.466.624.000	-	46.466.624.000	46.466.624.000
377	Kab. Bone	175.430.662.000	-	175.430.662.000	175.430.662.000
378	Kab. Bulukumba	82.699.467.000	-	82.699.467.000	82.699.467.000
379	Kab. Enrekang	52.270.992.000	-	52.270.992.000	52.270.992.000
380	Kab. Gowa	95.865.273.000	-	95.865.273.000	95.865.273.000
381	Kab. Jeneponto	54.459.862.000	-	54.459.862.000	54.459.862.000
382	Kab. Luwu	65.139.570.000	-	65.139.570.000	65.139.570.000
383	Kab. Luwu Utara	74.209.006.000	-	74.209.006.000	74.209.006.000
384	Kab. Maros	84.136.806.000	-	84.136.806.000	84.136.806.000
385	Kab. Pangkajene Kepulauan	61.779.343.000	-	61.779.343.000	61.779.343.000
386	Kab. Pinrang	85.508.242.000	-	85.508.242.000	85.508.242.000
387	Kab. Selayar	33.182.041.000	-	33.182.041.000	33.182.041.000
388	Kab. Sidenreng Rappang	59.854.189.000	-	59.854.189.000	59.854.189.000
389	Kab. Sinjai	56.570.368.000	-	56.570.368.000	56.570.368.000
390	Kab. Soppeng	68.502.486.000	-	68.502.486.000	68.502.486.000
391	Kab. Takalar	59.479.153.000	-	59.479.153.000	59.479.153.000
392	Kab. Tana Toraja	50.478.933.000	-	50.478.933.000	50.478.933.000
393	Kab. Wajo	82.502.476.000	-	82.502.476.000	82.502.476.000
394	Kota Pare-pare	37.379.685.000	-	37.379.685.000	37.379.685.000
395	Kab. Toraja Utara	42.297.040.000	-	42.297.040.000	42.297.040.000
396	Kota Makassar	211.436.166.000	-	211.436.166.000	211.436.166.000
397	Kota Palopo	39.581.860.000	-	39.581.860.000	39.581.860.000
398	Kab. Luwu Timur	36.681.273.000	-	36.681.273.000	36.681.273.000
399	Provinsi Sulawesi Barat	154.686.420.000	-	147.486.011.500	147.486.011.500
400	Kab. Majene	42.193.653.000	-	42.193.653.000	42.193.653.000
401	Kab. Mamuju	46.279.654.000	-	46.279.654.000	46.279.654.000
402	Kab. Polewali Mandar	73.700.427.000	-	73.700.427.000	73.700.427.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
403	Kab. Mamasa	24.529.653.000	-	24.529.653.000	24.529.653.000
404	Kab. Mamuju Utara	10.955.534.000	-	10.955.534.000	10.955.534.000
405	Provinsi Sulawesi Tenggara	303.244.350.000	-	289.391.927.500	289.391.927.500
406	Kab. Buton	81.398.484.000	-	81.398.484.000	81.398.484.000
407	Kab. Konawe	57.152.582.000	-	57.152.582.000	57.152.582.000
408	Kab. Kolaka	80.551.449.000	-	80.551.449.000	80.551.449.000
409	Kab. Muna	77.812.598.000	-	77.812.598.000	77.812.598.000
410	Kota Kendari	71.949.779.000	-	71.949.779.000	71.949.779.000
411	Kota Bau-bau	48.419.518.000	-	48.419.518.000	48.419.518.000
412	Kab. Konawe Selatan	44.475.787.000	-	44.475.787.000	44.475.787.000
413	Kab. Bombana	26.131.240.000	-	26.131.240.000	26.131.240.000
414	Kab. Konawe Utara	10.126.945.000	-	10.126.945.000	10.126.945.000
415	Kab. Buton Utara	11.374.201.000	-	11.374.201.000	11.374.201.000
416	Kab. Wakatobi	22.516.593.000	-	22.516.593.000	22.516.593.000
417	Kab. Kolaka Utara	15.696.767.000	-	15.696.767.000	15.696.767.000
418	Provinsi Bali	389.632.310.000	-	371.909.282.500	371.909.282.500
419	Kab. Badung	99.717.322.000	-	99.717.322.000	99.717.322.000
420	Kab. Bangli	39.289.956.000	-	39.289.956.000	39.289.956.000
421	Kab. Buleleng	125.049.808.000	-	125.049.808.000	125.049.808.000
422	Kab. Gianyar	110.035.955.000	-	110.035.955.000	110.035.955.000
423	Kab. Jembrana	51.680.144.000	-	51.680.144.000	51.680.144.000
424	Kab. Karangasem	75.744.040.000	-	75.744.040.000	75.744.040.000
425	Kab. Klungkung	43.179.357.000	-	43.179.357.000	43.179.357.000
426	Kab. Tabanan	118.390.170.000	-	118.390.170.000	118.390.170.000
427	Kota Denpasar	89.705.986.000	-	89.705.986.000	89.705.986.000
428	Provinsi Nusa Tenggara Barat	461.894.400.000	-	440.267.110.000	440.267.110.000
429	Kab. Bima	96.317.124.000	-	96.317.124.000	96.317.124.000
430	Kab. Dompu	42.790.728.000	-	42.790.728.000	42.790.728.000
431	Kab. Lombok Barat	75.524.183.000	-	75.524.183.000	75.524.183.000
432	Kab. Lombok Tengah	101.120.804.000	-	101.120.804.000	101.120.804.000
433	Kab. Lombok Timur	121.546.115.000	-	121.546.115.000	121.546.115.000
434	Kab. Sumbawa	72.093.187.000	-	72.093.187.000	72.093.187.000
435	Kota Mataram	63.662.999.000	-	63.662.999.000	63.662.999.000
436	Kab. Lombok Utara	20.818.150.000	-	20.818.150.000	20.818.150.000
437	Kota Bima	47.049.024.000	-	47.049.024.000	47.049.024.000
438	Kab. Sumbawa Barat	21.170.645.000	-	21.170.645.000	21.170.645.000
439	Provinsi Nusa Tenggara Timur	714.538.400.000	-	683.264.995.000	683.264.995.000
440	Kab. Alor	29.679.619.000	-	29.679.619.000	29.679.619.000
441	Kab. Belu	44.704.930.000	-	44.704.930.000	44.704.930.000
442	Kab. Ende	48.926.795.000	-	48.926.795.000	48.926.795.000
443	Kab. Flores Timur	37.258.458.000	-	37.258.458.000	37.258.458.000
444	Kab. Kupang	54.152.276.000	-	54.152.276.000	54.152.276.000
445	Kab. Lembata	19.605.455.000	-	19.605.455.000	19.605.455.000
446	Kab. Manggarai	33.357.399.000	-	33.357.399.000	33.357.399.000
447	Kab. Ngada	22.487.289.000	-	22.487.289.000	22.487.289.000
448	Kab. Sikka	35.483.133.000	-	35.483.133.000	35.483.133.000
449	Kab. Sumba Barat	14.900.716.000	-	14.900.716.000	14.900.716.000
450	Kab. Sumba Timur	31.232.944.000	-	31.232.944.000	31.232.944.000
451	Kab. Timor Tengah Selatan	50.943.689.000	-	50.943.689.000	50.943.689.000
452	Kab. Timor Tengah Utara	30.597.346.000	-	30.597.346.000	30.597.346.000
453	Kota Kupang	73.496.398.000	-	73.496.398.000	73.496.398.000
454	Kab. Rote Ndao	18.396.832.000	-	18.396.832.000	18.396.832.000
455	Kab. Nagekeo	22.964.176.000	-	22.964.176.000	22.964.176.000
456	Kab. Sumba Tengah	33.106.322.000	-	33.106.322.000	33.106.322.000
457	Kab. Sumba Barat Daya	17.565.149.000	-	17.565.149.000	17.565.149.000
458	Kab. Manggarai Timur	21.436.673.000	-	21.436.673.000	21.436.673.000
459	Kab. Sabu Raijua	9.174.640.000	-	9.174.640.000	9.174.640.000
460	Kab. Manggarai Barat	24.741.019.000	-	24.741.019.000	24.741.019.000
461	Provinsi Maluku	218.698.870.000	-	209.562.135.000	209.562.135.000
462	Kab. Maluku Tenggara Barat	26.680.653.000	-	26.680.653.000	26.680.653.000
463	Kab. Maluku Tengah	66.682.807.000	-	66.682.807.000	66.682.807.000
464	Kab. Maluku Tenggara	23.278.969.000	-	23.278.969.000	23.278.969.000
465	Kab. Pulau Buru	19.995.946.000	-	19.995.946.000	19.995.946.000
466	Kota Ambon	91.752.437.000	-	91.752.437.000	91.752.437.000
467	Kab. Seram Bagian Barat	31.766.240.000	-	31.766.240.000	31.766.240.000
468	Kab. Seram Bagian Timur	11.825.218.000	-	8.661.718.000	8.661.718.000
469	Kab. Maluku Barat Daya	11.981.651.000	-	11.981.651.000	11.981.651.000
470	Kab. Buru Selatan	6.338.118.000	-	6.338.118.000	6.338.118.000

No.	Daerah	Pagu	Realisasi		
			Otonomi Khusus	Dana Penyesuaian	Realisasi
1	2	3	4	5	6 = 4 + 5
471	Kab. Kepulauan Aru	12.193.563.000	-	12.193.563.000	12.193.563.000
472	Kota Tual	12.753.073.000	-	12.753.073.000	12.753.073.000
473	Provinsi Maluku Utara	153.077.010.000	-	146.423.577.500	146.423.577.500
474	Kab. Halmahera Tengah	8.018.459.000	-	8.018.459.000	8.018.459.000
475	Kab. Halmahera Barat	15.520.681.000	-	15.520.681.000	15.520.681.000
476	Kota Ternate	37.174.412.000	-	37.174.412.000	37.174.412.000
477	Kab. Halmahera Timur	8.843.478.000	-	8.843.478.000	8.843.478.000
478	Kota Tidore Kepulauan	24.113.384.000	-	24.113.384.000	24.113.384.000
479	Kab. Kepulauan Sula	10.418.687.000	-	10.418.687.000	10.418.687.000
480	Kab. Pulau Morotai	5.182.229.000	-	5.182.229.000	5.182.229.000
481	Kab. Halmahera Selatan	17.343.616.000	-	17.343.616.000	17.343.616.000
482	Kab. Halmahera Utara	19.140.782.000	-	19.140.782.000	19.140.782.000
483	Kab. Yalimo	585.000.000	-	585.000.000	585.000.000
484	Kab. Lanny Jaya	1.587.000.000	-	396.750.000	396.750.000
485	Provinsi Papua	4.736.663.156.000	4.404.830.706.000	315.601.510.000	4.720.432.216.000
486	Kab. Biak Numfor	16.312.599.000	-	16.312.599.000	16.312.599.000
487	Kab. Jayapura	24.363.782.000	-	24.363.782.000	24.363.782.000
488	Kab. Jayawijaya	10.620.803.000	-	10.620.803.000	10.620.803.000
489	Kab. Merauke	35.565.963.000	-	35.565.963.000	35.565.963.000
490	Kab. Mimika	9.260.140.000	-	9.260.140.000	9.260.140.000
491	Kab. Nabire	14.402.093.000	-	14.402.093.000	14.402.093.000
492	Kab. Paniai	8.383.820.000	-	8.383.820.000	8.383.820.000
493	Kab. Puncak Jaya	2.736.194.000	-	2.736.194.000	2.736.194.000
494	Kab. Kepulauan Yapen	14.423.399.000	-	14.423.399.000	14.423.399.000
495	Kota Jayapura	67.792.384.000	-	67.792.384.000	67.792.384.000
496	Kab. Sarmi	2.867.907.000	-	2.867.907.000	2.867.907.000
497	Kab. Keerom	7.800.291.000	-	7.800.291.000	7.800.291.000
498	Kab. Yahukimo	3.965.701.000	-	2.161.425.250	2.161.425.250
499	Kab. Pegunungan Bintang	3.382.210.000	-	3.382.210.000	3.382.210.000
500	Kab. Tolikara	1.842.547.000	-	1.842.547.000	1.842.547.000
501	Kab. Boven Digoel	5.382.099.000	-	5.382.099.000	5.382.099.000
502	Kab. Mappi	6.470.737.000	-	6.470.737.000	6.470.737.000
503	Kab. Asmat	4.383.568.000	-	4.383.568.000	4.383.568.000
504	Kab. Waropen	3.828.888.000	-	3.828.888.000	3.828.888.000
505	Kab. Mamberamo Raya	2.545.528.000	-	709.528.000	709.528.000
506	Kab. Mamberamo Tengah	1.209.000.000	-	302.250.000	302.250.000
507	Kab. Nduga	1.329.000.000	-	1.329.000.000	1.329.000.000
508	Kab. Dogiyai	2.119.037.000	-	2.119.037.000	2.119.037.000
509	Kab. Intan Jaya	1.130.566.000	-	453.316.000	453.316.000
510	Kab. Puncak	2.243.018.000	-	609.518.000	609.518.000
511	Kab. Deiyai	1.689.000.000	-	1.689.000.000	1.689.000.000
512	Kab. Supiori	3.017.907.000	-	3.017.907.000	3.017.907.000
513	Provinsi Papua Barat	2.187.249.388.000	2.071.458.058.000	110.323.525.000	2.181.781.583.000
514	Kab. Sorong	16.584.368.000	-	16.584.368.000	16.584.368.000
515	Kab. Manokwari	24.633.434.000	-	24.633.434.000	24.633.434.000
516	Kab. Fak Fak	13.665.768.000	-	13.665.768.000	13.665.768.000
517	Kota Sorong	24.927.861.000	-	24.927.861.000	24.927.861.000
518	Kab. Sorong Selatan	5.715.590.000	-	5.715.590.000	5.715.590.000
519	Kab. Raja Ampat	3.562.926.000	-	3.562.926.000	3.562.926.000
520	Kab. Teluk Bintuni	3.882.682.000	-	3.882.682.000	3.882.682.000
521	Kab. Teluk Wondama	2.278.869.000	-	2.278.869.000	2.278.869.000
522	Kab. Tambrauw	550.528.000	-	550.528.000	550.528.000
523	Kab. Maybrat	1.658.566.000	-	1.658.566.000	1.658.566.000
524	Kab. Kaimana	6.310.741.000	-	6.310.741.000	6.310.741.000
525	Dana Cadangan	-	-	-	-
JUMLAH		70.423.877.528.000	11.952.577.528.000	57.399.371.728.000	69.351.949.256.000

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JASINONSI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012

URAIAN	31 DESEMBER 2012
Pendapatan Operasional	
Pendapatan Iuran Penyiaran	-
Pendapatan Jasa Siaran	23.195.424.854
Pendapatan Jasa Non Siaran	13.316.815.101
Pendapatan Operasional Lainnya	2.306.587.020
Jumlah Pendapatan Operasional	38.818.826.975
Beban Operasional	(39.079.049.558)
Surplus (Defisit) Operasional	(260.222.583)
Pendapatan Non Operasional	-
Beban Non Operasional	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Non Operasional	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Bersih	(350.085.098)

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JASINONSI
 Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012

URAIAN	TVRI
Pendapatan Operasional	
Kerjasama dengan Pihak III	104.205.066.700
Hasil Iklan	33.649.036.997
Liputan Berita/Coverage	1.964.274.643
Penerimaan Operasional Lainnya	25.311.608.121
Jumlah Pendapatan Operasional	165.129.986.461
Beban Operasional	(151.744.532.461)
Surplus (Defisit) Operasional	13.385.454.000
Pendapatan Non Operasional	12.338.394.521
Beban Non Operasional	(10.433.864.261)
Surplus (Defisit) Non Operasional	1.904.530.260
Surplus (Defisit) Bersih	15.289.984.260

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN DANA JASINONSI
Untuk Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2012

URAIAN	TVRI	RRI
Pendapatan Operasional		
Kerjasama dengan Pihak III	104.205.066.700	-
Hasil Iklan	33.649.036.997	-
Liputan Berita/Coverage	1.964.274.643	-
Penerimaan Operasional Lainnya	25.311.608.121	2.306.587.020
Pendapatan Iuran Penyiaran	-	-
Pendapatan Jasa Siaran	-	23.195.424.854
Pendapatan Jasa Non Siaran	-	13.316.815.101
Jumlah Pendapatan Operasional	165.129.986.461	38.818.826.975
Beban Operasional	(151.744.532.461)	(39.079.049.558)
Surplus (Defisit) Operasional	13.385.454.000	(260.222.583)
Pendapatan Non Operasional	12.338.394.521	-
Beban Non Operasional	(10.433.864.261)	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Non Operasional	1.904.530.260	(89.862.515)
Surplus (Defisit) Bersih	15.289.984.260	(350.085.098)

**REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Uraian	Jumlah	
1	Reksus Dalam Valuta Rupiah	Rp	338.495.260.131
2	Reksus Dalam Valuta AUD	Rp	523.015.088.320
3	Reksus Dalam Valuta EUR	Rp	515.156.462
4	Reksus Dalam Valuta JPY	Rp	133.472.243.181
5	Reksus Dalam Valuta USD	Rp	911.715.686.515
6	Rekening Dana Talangan No. 500.000001980	Rp	0
7	Rekening Sub BUN Dana Talangan IBRD No. 561.000001980	Rp	0
8	Rekening Sub BUN Dana Talangan ADB No. 561.000002980	Rp	0
9	Rekening Sub BUN Dana Talangan OECF/JBIC No. 561.000003980	Rp	0
10	Rekening Sub BUN Dana Talangan Lainnya No. 561.000005980	Rp	0
11	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Rupiah No. 609.000000980	Rp	0
12	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta USD No. 609.100411980	Rp	0
13	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Yen No. 609.002111980	Rp	0
14	Rekening Penerimaan Pinjaman/Hibah Luar Negeri Dalam Rangka Reksus Dalam Valuta Asing Selain USD dan Yen USD No. 519.000120980	Rp	0
TOTAL		Rp	1.907.213.434.609

**REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

Dalam Rupiah

NO	NO -- NAMA REKENING		31/12/2012	31/12/2011
1	600000411980	Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	13.005.460.815.909	6.237.138.752.226
2	508000071980	Penerimaan Pertambangan dan perikanan	126.612.654.459	123.745.646.379
3	508000084980	Penerimaan Panas Bumi	347.992.721.305	197.960.188.008
		JUMLAH I	13.480.066.191.673	6.558.844.586.613

MONITORING HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2012

No.	KKKS	Tagihan Lifting Pemerintah ^{a)}						Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2012 ke Rek. 600.000411980					Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2012 ke Rek. 600.502411980 b)				
		Minyak Mentah			Total	Gas Alam	Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overliftin g KKKS	Total	
		Ekspor	Inter Area														
		US\$	US\$	Ekuv Rp	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$
A. REGION I																	
1	BOB PERTAMINA - BUMI SIAK PUSAKO	CPP BLOCK	-	435.427.806	4.060.181.272.383	435.427.806	-	-	435.427.806	-	-	-	-	-	-	-	-
2	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	MFK BLOCK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	SIAK BLOCK	-	62.519.616	583.000.509.890	62.519.616	-	-	62.519.616	-	-	-	-	-	-	-	-
4	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN BLOCK	277.673.208	8.872.489.942	82.714.018.619.446	9.150.173.150	-	105.572.076	9.256.745.225	256.179.037	-	288.194.156	-	-	-	-	-
5	CONOCOPHILLIPS IND	SOUTH NATUNA SEA - BLOCK B	304.735.011	934.659.062	8.691.869.540.927	1.239.394.074	378.195.439	-	1.617.589.513	284.740.811	310.044.843	584.785.654	-	13.840.706	-	-	13.840.706
6	EXXONMOBIL OIL IND INC	"B" BLOCK	84.883.326	-	-	84.883.326	190.814.082	-	275.697.408	71.453.042	188.007.698	259.460.740	-	-	-	-	-
7	MOBIL EXPLORATION IND	NORTH SUMATERA OFFSHORE	22.434.173	-	-	22.434.173	284.964.694.32	-	307.398.868	17.900.351	279.775.670	297.676.021	-	-	-	-	-
8	TRIANGLE PASE	PASE BLOCK	6.651	-	-	6.651	2.780.836	-	2.787.487	-	2.728.012	2.728.012	-	-	-	-	-
9	KALILIA / EMP (KORINCI BARU)	KORINCI	-	-	-	-	170.110	-	170.110	-	163.405	163.405	-	-	-	-	-
10	KONDUR / EMP MALACCA STRAIT	MALACCA STRAIT	4.255.061	171.095.874	1.597.122.086.129	175.350.935	-	-	175.350.935	-	-	-	-	-	-	-	-
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PEARL OIL/ MONTO'OR OIL TUNGKAL	TUNGKAL	-	4.004.533	37.182.654.077	4.004.533	-	-	4.004.533	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	JABUNG	207.887.979	212.377.017	1.984.139.479.470	420.264.996	362.975.958	-	783.240.954	176.467.342	297.017.724	473.475.066	-	14.533.237	-	-	14.533.237
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG	-	1.234.692	11.479.716.227	1.234.692	-	-	1.234.692	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	NATUNA SEA "A"	173.216	55.713.575	521.588.660.557	55.886.791	416.963.635	-	472.850.426	-	350.478.440	350.478.440	-	-	-	-	-
16	STAR ENERGY (KAKAPITD.	KAKAP	-	73.056.243	688.347.398.527	73.056.243	65.712.786	-	138.769.030	-	55.290.223	55.290.223	-	-	-	-	-
17	JOB (PSC) COSTA IGL / EMP GEBANG	GEBANG	-	92.277	869.143.796	92.277	65.752	-	158.030	-	22.543	22.543	-	-	-	-	-
18	PHE EMP - JOB P EMP GEBANG	GEBANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	2.269	-	2.269	-	2.152	2.152	-	-	-	-	-
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN BLOCK	-	3.818.204	35.652.681.507	3.818.204	-	-	3.818.204	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT SPR LANGGAK	SLC / MFK	-	10.144.672	95.484.654.112	10.144.672	-	-	10.144.672	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR	-	1.951.577	18.053.630.068	1.951.577	-	-	1.951.577	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT MOESA PETROLEUM/ EMP TONGAN	TONGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	KALILIA BENTU/ EMP BENTU	BENTU	-	-	-	-	2.211.069	-	2.211.069	-	1.718.762	1.718.762	-	-	-	-	-
TOTAL REGION I			902.048.626	10.838.595.091	101.038.990.047.116	11.740.643.717	1.704.856.632	105.572.076	13.551.072.424	806.730.583	1.485.250.472	32.015.120	2.323.996.175	-	28.373.943	-	28.373.943
B. REGION II																	
1	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ	NORTH WEST JAVA	-	669.455.194	6.262.392.261.026	669.455.194	82.086.256	-	751.541.451	-	48.880.481	48.880.481	-	-	-	-	-
2	CAMAR RESOURCES CANADA	BAWEAN	8.670.239	-	-	8.670.239	-	-	8.670.239	-	-	-	-	-	-	-	-
3	CNOOC SES LTD.	SOUTH EAST SUMATRA	-	651.682.654	6.067.470.006.761	651.682.654	44.770.544	-	696.453.198	-	38.994.050	38.994.050	-	-	-	-	-
4	CONOCOPHILLIPS (GRISISSI)	CORRIDOR - PSC	116.860.727	106.117.415	967.650.598.796	222.978.142	1.169.941.371	-	1.392.919.513	94.457.172	1.004.746.913	1.099.204.084	-	-	-	-	-
5	KANGKANG ENERGY INDONESIA	KANGKANG	3.514	-	-	3.514	33.606.238	-	33.606.752	-	24.743.820	24.743.820	-	-	-	-	-
6	HESS SINDONESIA-PANGKAH LTD.	PANGKAH	-	58.104.590	544.240.124.600	58.104.590	8.791.779	-	66.896.369	-	7.909.993	7.909.993	-	272.687	-	-	272.687
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS	-	-	-	-	1.160.174	-	1.160.174	-	909.766	909.766	-	-	-	-	-
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMAITANG	-	-	-	-	3.915.872	-	3.915.872	-	3.028.135	3.028.135	-	-	-	-	-
9	MEDCO E&P INDONESIA	RIMAU	-	308.415.065	2.868.533.357.519	308.415.065	945.842	-	308.361.008	-	806.274	806.274	-	62.056	-	-	62.056
10	MEDCO E&P INDONESIA	SAC SUMATRA	-	297.074.827	2.763.651.540.812	297.074.827	36.924.678	-	333.999.505	-	32.999.504	32.999.504	-	-	-	-	-
11	PETROCHINA INT'L BANGKO LTD.	BANGKO	-	165.268	1.578.637.261	165.268	-	-	165.268	-	-	-	-	-	-	-	-
12	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY.LTD.	MADURA	-	-	-	-	29.596.189	-	29.596.189	-	28.541.881	28.541.881	-	-	-	-	-
13	SANTOS (SAMPANGI) PTY.LTD.	SAMPANG	1.551.189	26.059.806	237.483.012.078	27.610.995	9.360.600	-	36.971.595	657.929	8.455.432	9.113.361	-	-	-	-	-
14	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI MERANG	56.529.303	136.261	1.241.287.242	56.665.564	51.664.418	-	108.329.982	55.518.683	47.614.167	103.132.849	-	-	-	-	-
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P TALISMAN	JAMBI MERANG	-	94.643	662.787.822	94.643	44.310.861	-	44.405.504	-	28.243.318	28.243.318	-	11.908.515	-	-	11.908.515
16	JOB PERTAMINA GSIL	RAJA PENDOP	-	4.650.937	43.355.382.908	4.650.937	176.985	-	4.827.923	-	48.278	48.278	-	81.237	-	-	81.237
17	PHE RAJA TEMPAIRAL - JOB P GSIL	RAJA BLOCK	-	3.252.614	30.507.125.290	3.252.614	137.099	-	3.389.713	-	75.026	75.026	-	39.405	-	-	39.405
18	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN	-	143.414.584	1.340.453.250.725	143.414.584	1.259.324	-	144.673.908	-	999.387	999.387	-	-	-	-	-
19	PHE TUBAN E.JAVA - JOB P PEJ	TUBAN	-	87.934.958	822.321.359.847	87.934.958	1.043.660	-	88.978.618	-	569.015	569.015	-	308.055	-	-	308.055
20	JOB PERTAMINA TALISMAN - OK	OGAN KOMERING	-	38.325.302	355.550.809.411	38.325.302	1.508.656	-	38.833.958	-	628.834	628.834	-	508.695	-	-	508.695
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING	-	28.786.354	266.994.683.448	28.786.354	1.526.891	-	30.313.245	-	777.133	777.133	-	240.046	-	-	240.046
22	JDA KODECO	WEST MADURA	-	51.068.128	473.650.691.504	51.068.128	24.657.214	-	75.725.341	-	18.758.421	18.758.421	-	-	-	-	-
23	PHE WEST MADURA OFFSHORE	WEST MADURA	43.905.607	158.969.548	1.481.554.230.779	202.875.155	71.194.455	-	274.069.610	23.510.964	60.965.777	84.476.741	6.009.496	-	-	-	6.009.496
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK	561.319.840	-	-	561.319.840	-	-	403.019.604	403.019.604	106.104.772	106.104.772	-	-	-	-	106.104.772
TOTAL REGION II			788.840.418	2.633.708.147	24.529.491.142.717	3.422.548.565	1.618.579.208	-	5.041.127.773	577.164.352	1.358.095.606	1.935.259.958	112.114.268	13.420.696	-	-	125.534.964
C. REGION III																	
1	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST KALIMANTAN	10.466.748	591.799.057	5.510.284.377.579	802.265.805	170.872.265	-	773.138.070	11.808.020	152.243.282	164.051.302	-	5.072.769	-	-	5.072.769
2	CHEVRON MAKASSAR LTD	MAKASSAR STRAIT	-	12.581.000	115.040.664.000	12.581.000	13.968.412	-	26.568.412	-	8.818.106	8.818.106	-	1.868.043	-	-	1.868.043
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA	4.926.438	-	-	4.926.438	-	-	4.926.438	3.608.355	-	3.608.355	-	-	-	-	-
4	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG	-	-	-	-	10.052.808	-	10.052.808	-	8.128.766	8.128.766	-	-	-	-	-
5	INPEX	ATTACKA	228.795.061	670.874.619	6.262.254.575.245	899.769.681	1.428.734.667	-	2.328.504.348	199.018.150	1.390.691.947	1.589.710.097	-	1.373.251	-	-	1.373.251
6	KALIREZ PETROLEUM (SERAM) LTD	BULA SERAM	-	1.592.274	14.930.141.993	1.592.274	-	-	1.592.274	-	-	-	-	-	-	-	-
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN	-	75.713.260	706.023.947.747	75.713.260	218.786	-	-								

MONITORING HASIL KEGIATAN USAHA HULU MIGAS TAHUN 2012

No.		KKKS	Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2010 ke Rek. 502.000000980 dari Pemakaian Minyak Mentah Dalam Negeri	Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2012 lain-lain (Offseting)				Pembayaran Kewajiban Pemerintah Sektor Migas Tahun 2012 Melalui Rek. 600.000411980							
				Setoran atas Ekspor Minyak Mentah US\$	Setoran atas Penjualan Gas US\$	Setoran Overlifting KKKS US\$	Total US\$	PPN Migas Rp	PBB Migas Rp	PORD Migas Rp	Anggaran BPMIGAS Rp	Fee Penjualan Migas US\$	DMD Fee US\$	Underlifting KKKS US\$	
		Rp													
A. REGION I															
1	BOB PERTAMINA - BUMI SIAK PUSAKO	CPP BLOCK				-	31.097.463.053	315.190.535.576	2.415.595.256				5.613.002	-	
2	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	MFK BLOCK				-	-	-	-				-	-	
3	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	SIK BLOCK				-	-	20.716.431.706					10.385	-	
4	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN BLOCK			1	1	586.642.176.233	2.164.215.380.247	29.307.327.129				176.656.477	14.830.979	
5	CONOCOPHILLIPS IND	SOUTH NATUNA SEA - BLOCK B				-	-	843.722.871.080	3.310.509.476				-	-	
6	EXXONMOBIL OIL IND INC	"B" BLOCK				-	16.118.901.365	205.650.654.723	1.085.602.668				427.745	-	
7	MOBIL EXPLORATION IND	NORTH SUMATERA OFFSHORE				-	11.695.179.329	201.083.224.878	1.537.479.962				-	-	
8	TRIANGLE PASE	PASE BLOCK				-	7.357.063.971	26.553.807.500	190.073.956				-	-	
9	KALILA / EMP (KORINCI BARU)	KORINCI				-	1.755.930.107	5.309.765.006	79.075				-	-	
10	KONDUR / EMP MALACCA STRAIT	MALACCA STRAIT				-	10.754.682.066	58.975.818.711	201.397.228				274.191	-	
11	MEDCO E&P MALAKA	AREA "A" NORTH SUMATRA				-	-	-	-				-	-	
12	PEARL OIL/ MONTO'DOR OIL TUNGKAL	TUNGKAL				-	8.116.425.300	42.100.373.113	-				-	-	
13	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD.	JABUNG				-	149.549.037.918	78.935.183.573	158.722.080				7.009.741	-	
14	PETROSELAT LTD.	SELAT PANJANG				-	5.603.962.087	20.276.755.243	532.953				-	-	
15	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	NATUNA SEA "A"				-	89.000.746.751	243.064.889.200	248.666.675				1.020.929	-	
16	STAR ENERGY KAKAPILTD.	KAKAP				-	30.163.788.892	91.801.832.864	301.482.276				1.206.300	-	
17	JOB (PSC) COSTA IGL / EMP GEBANG	GEBANG				-	195.691.322	43.035.500.360	-				-	-	
18	PHE EMP - JOB P EMP GEBANG	GEBANG				-	195.691.322	-	-				-	-	
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI	SOUTH JAMBI				-	2.327.340.415	83.720.019.200	-				-	-	
20	PHE SOUTH JAMBI - JOB P COPHI	SOUTH JAMBI				-	2.327.340.415	-	-				-	-	
21	PT SELE RAYA MERANGIN DUA	MERANGIN BLOCK				-	15.059.373.764	6.048.616.152	-				-	-	
22	PT SPR LANGGAK	SLC / MFK				-	684.151.971	4.340.372.129	96.459.901				478.209	-	
23	PT SUMATERA PERSADA ENERGI	WEST KAMPAR				-	-	720.372.738	4.642.815				-	-	
24	PT MOSESA PETROLEUM/ EMP TONGAN	TONGA				-	-	595.762.910	-				-	-	
25	KALILA BENTU/ EMP BENTU	BENTU				-	1.266.465.055	13.042.327.415	907.390				-	-	
TOTAL REGION I			-	-	-	1	1	969.911.411.334	4.469.100.594.304	38.859.478.840			192.696.977	14.830.979	
B. REGION II															
1	PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ	NORTH WEST JAVA				-	364.982.606.860	497.408.114.658	-				1.871.099	-	
2	CAMAR RESOURCES CANADA	BAWEAN				-	-	54.135.475.460	-				-	-	
3	CNOOC SES LTD.	SOUTH EAST SUMATRA				-	184.049.557.371	364.218.399.499	-				3.985.496	-	
4	CONOCOPHILLIPS (GRISIK)	CORRIDOR - PSC				-	-	1.170.323.662.612	550.633.846				-	-	
5	KANGKANG ENERGY INDONESIA	KANGKANG				-	219.820.447.372	101.467.674.973	-				-	-	
6	HESS INDONESIA-PANGKAH LTD.	PANGKAH				-	100.870.156.731	91.878.899.682	273.815.295				-	-	
7	LAPINDO BRANTAS,INC.	BRANTAS				-	233.234.317	45.760.195.730	-				-	-	
8	MEDCO E&P INDONESIA	LEMATANG				-	21.280.339.562	33.748.087.984	-				-	-	
9	MEDCO E&P INDONESIA	RIMAU				-	62.009.641.705	143.308.873.018	-				6.642.441	-	
10	MEDCO E&P INDONESIA	S&C SUMATRA				-	75.449.209.418	283.879.498.566	723.088.493				1.931.122	-	
11	PETROCHINA INT'L BANGKO LTD.	BANGKO				-	-	23.046.314.797	-				-	-	
12	SANTOS (MADURA OFFSHORE) PTY.LTD.	MADURA				-	7.224.811.666	122.091.665.110	-				-	-	
13	SANTOS (SAMPANG) PTY.LTD.	SAMPANG				-	9.042.216.649	70.826.559.012	-				8.564.957	-	
14	JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG	JAMBI MERANG				-	951.856.033	73.274.969.930	76.452.850				8.948.362	-	
15	PHE JAMBI MERANG - JOB P TALISMAN	JAMBI MERANG				-	951.856.033	-	-				21.883.875	-	
16	JOB PERTAMINA GSIL	RAJA PENDOPO				-	-	37.815.077.950	798.104				23.555	-	
17	PHE RAJA TEMPIRAI - JOB P GSIL	RAJA BLOCK				-	-	-	-				-	-	
18	JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN				-	34.134.841.970	292.126.538.425	-				22.234	-	
19	PHE TUBAN E.JAVA - JOB P PEJ	TUBAN				-	34.134.841.970	-	-				61.861.653	-	
20	JOB PERTAMINA TALISMAN - OK	OGAN KOMERING				-	10.528.139.233	33.282.245.252	927.000				597.363	-	
21	PHE OGAN KOMERING - JOB P TOKL	OGAN KOMERING				-	10.528.139.233	-	-				25.523.688	-	
22	JOA KODECO	WEST MADURA				-	-	289.138.874.945	-				1.248.757	-	
23	PHE WEST MADURA OFFSHORE	WEST MADURA				-	-	-	-				66.183.822	-	
24	MOBIL CEPU LTD.	CEPU BLOCK				-	104.865.949.072	125.155.776.049	-				11.960.171	-	
TOTAL REGION II			-	-	-	-	1.241.057.845.194	3.852.886.903.572	1.625.715.588				221.248.594	-	
C. REGION III															
1	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST KALIMANTAN				-	195.321.801.600	312.591.749.088	481.539.746				1.991.048	-	
2	CHEVRON MAKASSAR LTD	MAKASSAR STRAIT				-	22.784.426.384	60.744.185.655	9.975.696				3.412.547	-	
3	CITIC SERAM ENERGY LTD.	SERAM NON BULA				-	19.924.813.896	35.137.944.480	-				-	-	
4	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG				-	4.958.754.448	141.184.555.751	-				-	-	
5	INPEX	ATTACKA				-	-	6.138.023.428	1.609.218.590				19.382.748	-	
6	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD	BULA SERAM				-	3.252.100.366	3.587.576.600	-				-	-	
7	MEDCO E&P INDONESIA	TARAKAN				-	4.820.408.961	23.359.984.800	-				1.217.514	-	
8	PETROCHINA INT'L (BERMUDA) LTD.	SALAWATI BASIN, PAPUA				-	42.362.112.215	32.694.497.600	949.601.494				2.065.892	-	
9	TOTAL E&P INDONESIA	MAHAKAM				-	934.822.510.138	1.457.529.942.787	3.077.978.099				19.369.677	-	
10	VIRGINIA INDONESIA COMPANY (VICO)	SANGA SANGA				-	183.189.623.850	409.957.417.226	949.137.286				660.196	-	
11	JOB PERTAMINA MEDCO TOMORI	SENORO TOLIL, SULAWESI				-	17.869.612.231	12.040.948.535	-				902.648	-	
12	PHE MEDCO TOMORI - JOB P MEDCO	SENORO TOLIL, SULAWESI				-	-	-	-				4.465.597	-	
13	JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI	KEPALA BURUNG, PAPUA				-	1.282.540.674	51.038.106.191	109.162.177				249.609	-	
14	PHE SALAWATI - JOB P PS	KEPALA BURUNG, PAPUA				-	1.282.540.674	-	-				20.148.635	-	
15	JOB PERTAMINA TOTAL-TENGAH	TENGAH				-	-	-	-				-	-	
16	PHE TENGAH K - JOB P TENGAH	TENGAH				-	-	-	-				-	-	
17	PT PERTAMINA EP	INDONESIA				-	1.059.734.992.205	1.690.841.622.944	1.258.023.675				879.038.914	-	
18	PERUSDA BENUO TAKA	WAILAWI BLOCK				-	-	-	-				-	-	
19	BP BERAU LTD	TANGGUH				-	371.034.883.997	692.100.398.543	-				-	-	
20	BP MUTURI HOLDINGS BV	TANGGUH				-	-	91.823.654.558	-				-	-	
21	BP WIRIAGAR LTD	TANGGUH				-	-	190.911.976.000	-				-	-	
22	PEARL OIL SEBUKU	SEBUKU				-	-	-	-				-	-	
TOTAL REGION III			-	-	-	-	2.880.470.733.868	5.211.682.584.186	8.444.636.764				952.905.023	-	
TOTAL REGION I, II, III			-	-	-	1	1	5.091.439.990.396	13.533.670.082.082	48.929.831.192			1.366.850.595	14.830.979	
KKKS NON LIFTING & PRODUCING			-	-	-	-	-	5.893.458.603.307	-				-	-	
TOTAL REGION I, II, III + KKKS NON LIFTING & PRODUCING			166.080.427.951.915	-	-	1	1	5.091.439.990.396	19.427.126.685.369	48.929.831.192	1.309.188.317.908		1.366.850.595	14.830.979	

Catatan :

a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGA

b) Setoran ke Rekening Migas No. 600.502411980 merupakan penyelesaian kewajiban valas PT Pertamina (Persero) pada :

No.	KKKS	Tagihan Lifting Pemerintah ^{a)}										Setoran atas Tagihan Lifting Tahun 2011 ke Rek. 600.000411980																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Minyak Mentah				Gas Alam	Overlifting KKKS	Total	Periode Januari s.d. Desember 2011				Periode Januari s.d. Desember 2012				Total (Periode Januari 2011 s.d. Desember 2012)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
		Ekspor	Inter Area		Total				Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total	Setoran atas Ekspor Minyak Mentah	Setoran atas Penjualan Gas	Setoran Overlifting KKKS	Total																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
			US\$	US\$																	Ekur Rp	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$	US\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
A. REGION I																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS

a) Sumber data dari Laporan A-01, A-02, A-03, dan A-04 dari BPMIGAS

**DANA REKENING MIGAS No.600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS**

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekivalen RP	
A Pembayaran kewajiban Pemerintah		532.703.689,64	5.151.244.678.786,93	
PBB Migas	- Kontrak PSC	14.953.310,23	144.598.509.876,53	Perkiraan cadangan pembayaran PBB Migas tahun 2011 untuk Energy Equity Epic (Sengkang) dan BP Wiriagar Ltd. total sebesar Rp74,5 miliar (berdasarkan hasil Audit BPK) (S-139/PJ/2012 tanggal 10 Juli 2012)
	- UU No. 8 tahun 1971			Perkiraan sementara pembayaran PBB migas tahun 2012 untuk KKKS Petrochina
	- PMK No.451/KMK.04/1997			Bermuda sebesar 70 miliar yang belum dapat diselesaikan pada tahun 2012 disebabkan karena dispute perhitungan
Reimbursement PPN	- Kontrak PSC	31.761.964,49	307.138.196.603,00	Tagihan reimbursment PPN bulan September s.d. Oktober 2012, serta Tagihan reimbursment PPN Conocophlips Grissik dan Conocophlips Indonesia s.d. bulan Agustus 2012 yang ditunda penyelesaiannya karena dikaitkan dengan penyelesaian kewajiban overlifting KKKS yang belum diselesaikan sesuai usulan BPMIGAS
	- UU No. 8 tahun 1971		107.349.806.608,00	
	- PMK No.64/PMK.02/2005		146.936.426.533,00	
			52.851.963.462,00	
PDRD	- Undang-undang No.8 tahun 1971	3.255.283,37	31.478.590.218,90	Tagihan yang sudah diterima pada 2012 namun belum diselesaikan berkenaan dengan kelengkapan dokumen
a. PPJ Non PLN	- Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1982		21.780.640.292,71	
	- Undang-undang No.34 tahun 2000			
b. Pajak ABT&AP	- Peraturan Pemerintah No.65 tahun 2001		9.697.949.926,19	
	- Keputusan Mendagri No.12 tahun 2002			
Fee Penjual	- Peraturan Pemerintah No.22 tahun 2001	325.052.684,74	3.143.259.461.435,80	a. Perkiraan tagihan Fee Penjualan tahun 2011 yang diperkirakan sama dengan tahun 2010
	- Peraturan pemerintah No.42 tahun 2002			b. Perkiraan tagihan Fee Penjualan tahun 2012 yang diperkirakan sama dengan tahun 2010
	- Peraturan pemerintah No.35 tahun 2004			
DMO Fee KKKS	- Kontrak PSC	157.680.446,81	1.524.769.920.652,70	a. Tagihan DMO Fee Conocophlips Indonesia dan Conocophlips Grissik yang ditunda penyelesaiannya karena dikaitkan dengan penyelesaian overlifting KKKS bersangkutan yang belum diselesaikan, sesuai usulan BPMIGAS periode bulan Agustus 2010 s.d. bulan Nop 2011
	- UU No. 8 tahun 1971			b. Tagihan Conocophilip bulan Desember 2011 sesuai surat BPMIGAS No.0195/BPC2000/2012/S4 sebesar USD17.91 juta
	- PMK No.56/PMK.02/2005	3.407.487,46		c. Tagihan Conocophilip bulan Jan 2012 sesuai surat BPMIGAS No.0353/BPC2000/2012/S4 sebesar USD8.76 juta
		85.587.742,13		d. Tagihan Conocophilip bulan Feb 2012 sesuai surat BPMIGAS No.0521/BPC2000/2012/S4 sebesar USD12.01 juta
		503.486,00		e. Tagihan Conocophilip bulan Mar 2012 sesuai surat BPMIGAS No.0716/BPC2000/2012/S4 sebesar USD9.06 juta
		17.909.001,61		f. Tagihan Conocophilip bulan Mei 2012 sesuai surat BPMIGAS No.1097/BPC2000/2012/S4 sebesar USD7.75 juta
		8.763.516,80		g. Tagihan Conocophilip bulan Juni 2012 sesuai surat BPMIGAS No.1327/BPC2000/2012/S4 sebesar USD6.97 juta
		12.006.666,01		h. Tagihan Conocophilip bulan Juni 2012 sesuai surat BPMIGAS No.1492/BPC2000/2012/S4 sebesar USD5.72 juta
		9.063.563,41		i. Tagihan Conocophilip bulan Oktober 2012 sesuai surat SKKMIGAS No.0569/BPC2000/2012/S4 sebesar USD22.98 juta
		7.747.936,67		j. Insentif DMO Fee Talisman OK sesuai surat BPMIGAS No.0360/BPC2000/2012/S4 sebesar USD3.55 jt
		6.970.760,11		
		5.720.286,61		

**DANA REKENING MIGAS No.600.000411980 YANG DICADANGKAN PER 31 DESEMBER 2012
DALAM RANGKA MEMENUHI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN PEMERINTAH SEKTOR MIGAS**

URAIAN	LANDASAN HUKUM	JUMLAH		KETERANGAN
		USD	Ekivalen RP	
B Pendapatan yang ditunda	Pendapat Komite Standar Akuntansi Pemerintah melalui surat No.S-80/KSAP/IV/2007 tgl 30 April 2007	529.708.758,36	5.122.283.693.371,07	
Perkiraan PPh migas yang belum lengkap dokumen pendukungnya	- Undang-undang No.8 tahun 1971 - Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1982 - Kontrak PSC - Laporan PSC 7.1 & 7.2	300.183.155,65	2.902.771.115.135,50	Perkiraan Penerimaan PPh Migas yang ditangguhkan berkenaan dengan belum lengkapnya dokumen pendukung sehingga belum dapat diidentifikasi jenis dan wajib pajaknya.
PNBP Lainnya dari Kegiatan Usaha Hulu Migas		7.341.564,87	70.992.932.292,90	Penerimaan bonus produksi dan transfer material yang sedang dalam proses penyelesaian
Perkiraan PNBP SDA Migas yang di tangguhkan		222.184.037,84	2.148.519.645.942,67	Penerimaan SDA Migas per tanggal 20 s.d. 28 Desember 2012
TOTAL CADANGAN		1.062.412.448,00	10.273.528.372.158,00	

Catatan:

Perhitungan menggunakan kurs tengah BI per 28 Desember 2012 (Rp9,670/USD)

9.670,00

Saldo akhir per tanggal 28 Desember 2012

1.344.928.729,67
13.005.460.815.908,90

Rp 2.731.932.443.750,90

**SALDO PEMERINTAH LAINNYA DI BANK UMUM
PER 31 DESEMBER 2011**

No.	Nama Rekening	Valuta	Saldo 1 Jan 2011 (Rupiah) (Valas)	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo 31 Des 2011 (Rupiah) (Valas)	Dasar Hukum	Tujuan
1	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penampungan dana cadangan resiko KUT TP 1999/2000	RP	10.757.981,98	22.596.188,00	23.354.083,00	10.000.086,98	a. Pembukaan Rekening: KMK No. 486/KMK.017/1999 tgl.13 Oktober 1999 dan surat Dirjen Lembaga Keuangan No. S-5776/LK/2000 tgl.17 November 2000. b. Pengelolaan Rekening: KMK No. 486/KMK.017/1999 tgl.13 Oktober 1999 dan surat Dirjen Lembaga Keuangan No. S-5776/LK/2000 tgl. 17 November 2000	Untuk menampung Recovery dan Dana Cadangan KUT Tahun Pengadaan (TP) 1999/2000. Merupakan rekening sementara (rekening transit) guna keperluan penatausahaan sebelum secara periodik disetorkan ke Rekening Kas Negara
2	Penampungan recovery risiko KUT TP 1999/2000	RP	12.016.152,28	569.720.419,27	568.089.839,00	13.646.732,55		
3	Rekening penampungan pencairan dana surat utang pemerintah	RP	720.199.682.098,43	186.529.532.459,90	185.924.031.605,00	720.805.182.953,33	a. Pembukaan Rekening: PMK No. 12/PMK.06/2005 tgl. 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil. b. Pengelolaan Rekening: PMK No. 12/PMK.06/2005 tgl. 14 Februari 2005 tentang Pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil.	Untuk menampung pencairan dana Surat Utang Negara No. 005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dari Bank Indonesia untuk kemudian disalurkan dalam rangka pendanaan kredit program. Juga berfungsi sebagai rekening penatausahaan/penampungan pengembalian pokok dan bunga KUMK dari BUMN pengelola/Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP)
4	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP (5%)	RP	77.480.249,10	1.175.904.165,33	996.371.641,00	257.012.773,43		Untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP Perkebunan dari angsuran pinjaman petani.
5	Dirjen Perbendaharaan untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	RP	1.306.280.284,43	21.979.008.759,34	18.727.554.417,53	4.557.734.626,24		
6	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	RP	68.209.227,91	810.782.873,19	677.346.490,00	201.645.611,10		
7	Dirjen perbendaharaan untuk pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	RP	37.644.971,61	723.745.498,40	596.615.246,71	164.775.223,30		Menampung pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP perkebunan sebesar 5 % dari angsuran pinjaman petani.
8	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	RP	12.698.226,94	39.320.367,07	33.695.668,36	18.322.925,65		
9	Dirjen perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP/Perkebunan	RP	453.049.354,19	1.688.487.170,58	1.779.925.475,04	361.611.049,73		
10	Cadangan pembayaran fee konversi dan collecting fee proyek PIR/UPP	RP	34.999.545,15	117.630.925,39	88.211.075,69	64.419.394,85		
11	Rekening kredit listrik pedesaan (KLP)	RP	9.460.806.300,84	48.926.793,00	9.509.733.093,84		-a. Pembukaan Rekening: SKB Menkeu dan Mentamben No. 707/KMK,011/1981 dan No. 1395/KPTS/Pertamben/ 1981 tanggal 1 Desember 1981 b. Pengelolaan Rekening: SKB Menkeu dan Mentamben No. 707/KMK,011/1981 dan No. 1395/KPTS/Pertamben/ 1981 tanggal 1 Desember 1981	Untuk menampung pengembalian kredit listrik pedesaan.
12	Rekening induk dana lingkungan bergulir	RP	19.387.562.050,78	4.399.024.329,81	911.158.660,00	22.875.427.720,59	a. Pembukaan Rekening: financing agreement tanggal 4 Desember 1997, Pemerintah mendapat bantuan berupa grant (hibah) dari KfW sebesar DM 15.600.000 untuk pembiayaan Program Industrial Pollution Control b. Pengelolaan Rekening: financing agreement tanggal 4 Desember 1997, Pemerintah mendapat bantuan berupa grant (hibah) dari KfW sebesar DM 15.600.000 untuk pembiayaan Program Industrial Pollution Control	Untuk menampung pengembalian dan pembayaran dana yang digulirkan untuk pembiayaan efisiensi produksi yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan.
13	Penampungan pengembalian pinjaman proyek pengembangan akuntasi (P2A)	RP	7.666.443,91	113.607,00	114.656,00	7.665.394,91	a. Pembukaan Rekening: IBRD LA No. 2940-IND tanggal 10 Juni 1988 sebesar US\$4,2 juta (eq Rp5.530.600.000,00) b. Pengelolaan Rekening: IBRD LA No. 2940-IND tanggal 10 Juni 1988 sebesar US\$4,2 juta (eq Rp5.530.600.000,00)	Untuk penampungan pengembalian bantuan uang muka IPEDA dan pengembalian pokok, bunga, dan denda eks kredit Bank Dunia (Loan No.2940 IND).
14	Penampungan pengembalian kredit gudang, lantai jemur dan kios KUD (GLK-KUD)	RP	32.869.570,03	207.780.942,62	184.642.648,07	56.007.864,58	a. Pembukaan Rekening: surat Dirjen perbendaharaan No.S-4767/PB 2006 tanggal 30 Juni 2006 b. Pengelolaan Rekening: surat Dirjen perbendaharaan No.S-4767/PB 2006 tanggal 30 Juni 2006	Untuk menampung setoran angsuran (fee) pangan pengembalian GLK-KUD dari KUD yang menerima sarana fisik GLK dan pengembalian pinjaman peralatan KUD (alat pemipil dan pengereng jagung).
15	penampungan nisbah bagi hasil dalam rangka KKPA bagi hasil bank muamalat	RP	13.147.218,55	405.495.318,28	386.345.268,22	32.297.268,61		Untuk menampung penerimaan nisbah bagi hasil atas pinjaman pendanaan KKPA (Kredit Kepada Koperasi Primer untuk Anggotanya).
16	Proyek P3 Bali (proyek pemuliaan dan pengembangbiakan sapi bali)	RP	14.760.083,28	3.565.386,00	8.172.387,00	10.153.082,28		Menampung pengembalian pinjaman pembiayaan proyek peternakan (pengembangan pemibitan sapi bali (P3 Bali) di Bali dan Dompur, NTB dan pinjaman petani peternak yang digunakan untuk membiayai pembinaan para petani peternak (80% disetor ke RDI)).
17	Proyek redistribusi ternak	RP	13.794.994,70	10.229.021,20	13.792.948,00	10.231.067,90		

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2012 DAN 2011

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
	I. ACEH		246.974.287.980	188.416.495.674
1	BANDA ACEH	001	123.269.177.573	86.077.181.048
2	LANGSA	002	18.101.292.915	15.082.906.830
3	MEULABOH	003	13.284.477.031	21.953.058.037
4	TAPAK TUAN	074	18.985.060.789	9.171.385.471
5	LHOKSEUMAWE	089	51.512.878.198	40.342.405.921
6	KUTACANE	105	11.768.772.807	8.129.876.402
7	TAKENGON	122	10.052.628.667	7.659.681.965
	II. MEDAN		551.158.849.169	321.199.207.671
9	MEDAN I	004	191.041.897.059	116.517.432.750
10	PEMATANG SIANTAR	005	42.512.135.860	30.558.035.281
11	PADANG SIDEMPUAN	006	30.017.957.727	16.732.965.415
12	GUNUNG SITOLI	007	15.848.180.267	4.830.717.821
13	RANTAU PRAPAT	075	15.704.695.739	6.934.925.218
14	TANJUNG BALAI	076	27.026.895.538	13.244.293.422
15	SIBOLGA	106	33.323.229.492	18.576.597.817
16	SIDIKALANG	119	17.206.509.739	7.209.056.200
17	MEDAN II	123	112.521.329.136	76.539.868.893
18	TEBING TINGGI	124	35.293.661.237	15.918.964.206
19	BALIGE	125	30.662.357.375	14.136.350.648
	III. PADANG		238.876.601.056	200.126.914.179
20	PADANG	010	131.486.195.196	116.372.676.317
21	BUKIT TINGGI	011	52.174.058.484	45.115.347.189
22	SIJUNJUNG	077	14.771.947.254	7.688.869.045
23	SOLOK	090	20.764.811.257	15.246.445.955
24	LUBUK SIKAPING	091	12.960.429.082	8.885.623.905
25	PAINAN	142	6.719.159.783	6.817.951.768
	IV. PEKANBARU		438.691.060.217	253.137.514.313
26	PEKANBARU	008	212.816.459.495	95.759.045.711
27	TANJUNG PINANG	009	45.162.831.599	26.410.968.448
28	RENGAT	092	15.488.138.983	16.864.617.718
29	DUMAI	120	135.207.910.285	93.484.930.241
30	BATAM	137	30.015.719.855	20.617.952.195
	V. JAMBI		129.103.450.417	107.874.425.306
31	JAMBI	012	64.958.783.085	60.822.369.565
32	SUNGAI PENUH	013	14.892.432.848	7.283.391.670
33	MUARA BUNGO	078	12.230.162.634	7.738.691.912
34	KUALA TUNGKAL	143	22.131.497.091	14.646.910.168
35	BANGKO	159	14.890.574.759	17.383.061.991

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
	VI. PALEMBANG		318.241.511.251	199.873.562.625
36	PALEMBANG	014	143.156.517.444	117.280.832.748
37	LUBUK LINGGAU	070	36.391.208.785	8.510.828.352
38	BATURAJA	109	14.021.373.847	13.395.919.424
39	LAHAT	144	72.760.419.498	34.394.220.638
40	SEKAYU	160	51.911.991.677	26.291.761.463
	VII. BANDAR LAMPUNG		172.834.192.201	124.991.607.152
41	BANDAR LAMPUNG	017	116.047.552.819	83.916.071.055
42	KOTABUMI	116	25.930.855.666	20.121.342.334
43	METRO	126	27.048.408.416	17.587.616.363
44	LIWA	145	3.807.375.300	3.366.577.400
	VIII. BENGKULU		111.594.007.813	76.262.812.730
45	BENGKULU	016	78.048.089.438	50.038.651.771
46	MANNA	121	12.299.025.351	8.872.744.151
47	CURUP	146	17.024.637.405	14.007.964.217
48	MUKO MUKO	181	4.222.255.619	3.343.452.591
	IX. PANGKAL PINANG		62.756.929.547	34.964.306.343
49	PANGKAL PINANG	015	56.123.122.437	30.228.474.436
50	TANJUNG PANDAN	107	6.633.807.110	4.735.831.907
	X. SERANG		374.413.592.759	163.509.005.823
51	SERANG	020	109.559.140.252	69.621.389.505
52	TANGERANG	127	256.134.918.475	87.599.894.052
53	RANGKASBITUNG	161	8.719.534.032	6.287.722.266
	XII. JAKARTA		7.816.449.970.584	6.215.661.070.268
54	JAKARTA I	018	642.959.421.852	342.318.039.905
55	JAKARTA II	019	5.706.749.536.342	4.888.636.130.973
56	JAKARTA III	088	781.645.582.783	466.379.021.887
57	JAKARTA IV	133	310.284.701.751	241.609.957.073
58	JAKARTA V	139	372.962.352.106	276.717.920.430
59	JAKARTA VI	140	1.848.375.750	0
	XII. BANDUNG		1.094.270.704.064	739.473.513.121
60	PURWAKARTA	021	56.376.499.064	41.779.439.077
61	BANDUNG I	022	180.024.223.757	115.247.800.077
62	BOGOR	023	178.209.370.423	118.026.272.859
63	CIREBON	024	64.343.410.527	54.875.582.926
64	TASIKMALAYA	025	64.177.131.460	43.239.923.479

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
65	KARAWANG	086	31.908.349.126	14.161.787.144
66	SUMEDANG	087	24.416.096.967	22.641.355.778
67	BANDUNG II	095	229.533.884.463	172.003.296.805
68	GARUT	096	38.517.004.416	24.293.491.939
69	SUKABUMI	128	65.746.568.111	44.982.917.708
70	KUNINGAN	147	20.305.992.204	24.401.377.157
71	BEKASI	171	140.712.173.546	63.820.268.172
	XIII. SEMARANG		746.099.688.522	575.464.671.600
72	SEMARANG I	026	122.081.919.125	78.317.416.517
73	PURWOREJO	027	23.877.300.041	19.736.629.948
74	SURAKARTA	028	112.301.808.479	81.908.231.762
75	PURWOKERTO	029	51.869.372.205	44.959.483.849
76	PEKALONGAN	072	24.582.428.644	17.481.832.807
77	PATI	097	32.501.460.876	31.528.953.352
78	MAGELANG	115	63.951.723.719	56.162.920.834
79	TEGAL	118	46.354.850.781	38.403.745.347
80	KUDUS	129	58.766.537.753	41.665.343.266
81	CILACAP	130	23.364.683.186	13.792.898.270
82	SEMARANG II	134	92.563.565.896	69.058.848.620
83	KLATEN	148	25.167.978.709	30.224.375.137
84	SRAGEN	162	24.676.502.850	16.125.845.424
85	PURWODADI	163	15.397.089.643	16.043.618.721
86	BANJARNEGARA	164	28.642.466.615	20.054.527.746
	XIV. YOGYAKARTA		213.157.567.756	148.845.090.854
87	YOGYAKARTA	030	191.393.902.908	133.298.807.618
88	WONOSARI	149	9.522.458.646	7.608.087.687
89	WATES	176	12.241.206.202	7.938.195.549
	XV. SURABAYA		1.015.948.425.956	780.833.712.442
90	SURABAYA I	031	226.325.004.900	153.914.701.187
91	MALANG	032	165.847.093.574	131.275.728.795
92	MADIUN	033	77.021.945.020	66.487.469.748
93	KEDIRI	034	95.089.396.277	49.418.890.010
94	BONDOWOSO	035	26.491.382.824	28.447.897.869
95	PAMEKASAN	036	39.155.734.589	33.979.855.463
96	BOJONEGORO	073	18.958.169.672	50.312.400.150
97	MOJOKERTO	098	49.933.426.436	36.372.233.735
98	PACITAN	099	7.230.452.886	4.447.470.212
99	BANYUWANGI	100	16.730.632.502	21.771.804.309
100	JEMBER	131	62.928.357.630	44.893.609.790
101	SURABAYA II	135	125.350.912.640	96.338.089.695
102	BLITAR	150	32.287.581.752	20.073.786.082

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
103	SIDOARJO	165	59.188.458.551	31.623.690.537
104	TUBAN	166	13.409.876.703	11.476.084.860
	XVI. PONTIANAK		169.971.391.027	118.459.122.694
105	PONTIANAK	042	97.578.410.425	65.165.853.136
106	SINTANG	079	15.755.516.160	12.595.983.260
107	SINGKAWANG	093	24.335.644.317	23.681.592.452
108	KETAPANG	094	12.267.294.880	5.152.825.982
109	PUTUSSIBAU	117	8.870.436.313	3.631.276.400
110	SANGGAU	167	11.164.088.932	8.231.591.464
	XVII. PALANGKARAYA		85.124.157.150	71.579.888.714
111	PALANGKARAYA	043	53.092.076.311	46.198.599.855
112	SAMPIT	044	14.597.480.790	8.119.043.616
113	BUNTOK	080	9.648.478.668	10.815.901.393
114	PANGKALAN BUN	102	7.786.121.381	6.446.343.850
	XVIII. BANJARMASIN		198.527.322.727	112.667.726.943
115	BANJARMASIN	045	110.851.018.459	66.483.972.764
116	KOTABARU	081	27.661.531.532	7.244.064.506
117	BARABAI	110	31.768.237.494	16.610.321.737
118	TANJUNG	151	15.063.955.112	17.488.812.949
119	PELAIHARI	168	13.182.580.130	4.840.554.987
	XIX. SAMARINDA		431.941.402.875	175.948.396.725
120	SAMARINDA	046	205.879.766.913	84.901.238.253
121	BALIKPAPAN	047	110.201.466.731	53.184.666.832
122	TARAKAN	048	67.722.959.852	19.656.905.709
123	NUNUKAN	152	30.655.779.485	7.128.688.881
124	TANJUNG REDEP	153	17.481.429.894	11.076.897.050
	XX. DENPASAR		177.272.502.482	132.471.879.720
125	DENPASAR	037	137.016.851.228	99.165.506.726
126	SINGARAJA	132	26.177.909.070	21.881.463.265
127	AMLAPURA	154	14.077.742.184	11.424.909.729
	XXI. MATARAM		130.615.523.727	111.106.739.455
128	MATARAM	038	85.977.835.985	65.409.009.387
129	BIMA	071	17.279.480.779	27.736.875.370
130	SUMBAWA BESAR	101	13.996.899.498	9.215.617.194
131	SELONG	169	13.361.307.465	8.745.237.504
	XXII. KUPANG		128.084.106.822	85.000.812.969

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
132	KUPANG	039	80.072.272.258	50.917.913.971
133	ENDE	040	15.144.157.549	9.667.891.305
134	WANGGUCU	041	8.079.987.812	6.173.899.892
135	RUTENG	111	10.958.838.910	6.939.434.227
136	ATAMBUA	172	8.385.109.176	6.668.597.450
137	LARANTUKA	174	5.443.741.117	4.633.076.124
	XXIII. MAKASAR		393.172.117.245	281.388.541.016
138	MAKASSAR I	054	147.436.830.463	94.684.199.384
139	WATAMPONE	055	27.601.782.569	21.540.286.521
140	BANTAENG	056	15.318.053.683	12.930.842.139
141	PARE-PARE	057	39.570.102.278	33.129.220.883
142	PALOLO	058	19.279.768.040	11.215.487.221
143	MAJENE	059	11.867.495.854	8.021.147.900
144	MAKASSAR II	136	94.180.894.956	74.148.684.755
145	BENTENG	155	3.301.823.460	2.327.701.472
146	MAKALE	170	6.946.291.553	4.092.372.091
147	SINJAI	177	503.255.301	2.984.796.443
148	MAMUJU	178	27.165.819.088	16.313.802.207
	XXIV. PALU		112.893.144.345	83.627.539.607
149	PALU	051	85.177.404.176	63.238.366.826
150	POSO	052	10.852.641.820	8.912.525.305
151	LUWUK	053	10.978.643.692	6.169.225.472
152	TOLI-TOLI	082	5.884.454.657	5.307.422.004
	XXV. KENDARI		125.069.584.448	72.601.273.699
153	KENDARI	060	87.187.148.462	46.995.964.344
154	BAU-BAU	103	19.651.321.099	12.926.099.127
155	KOLAKA	156	12.120.264.095	8.852.652.540
156	RAHA	157	6.110.850.792	3.826.557.688
	XXVI. GORONTALO		52.448.479.858	41.068.814.727
157	GORONTALO	050	47.846.157.884	36.890.096.058
158	MARISA	180	4.602.321.974	4.178.718.669
	XXVII. MANADO		152.000.009.087	117.985.820.918
159	MANADO	049	108.459.020.686	86.266.916.410
160	TAHUNA	083	3.866.393.127	3.502.929.182
161	KOTAMOBAGU	158	14.984.415.024	10.207.836.284
162	BITUNG	179	24.690.180.250	18.008.139.042
	XXVIII. TERNATE		56.047.389.012	33.803.319.339

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	31 DES 12	31 DES 11
163	TERNATE	062	47.177.044.257	30.439.383.635
164	TOBELO	112	8.870.344.755	3.363.935.704
	XXIX. AMBON		97.092.401.969	80.767.163.265
165	AMBON	061	76.245.673.931	64.196.813.365
166	TUAL	084	8.977.016.839	6.472.561.900
167	SAUMLAKI	104	3.586.767.803	2.807.300.200
168	MASOHI	173	8.282.943.396	7.290.487.800
	XXX. JAYAPURA		367.051.591.610	221.445.997.769
169	JAYAPURA	063	129.721.438.062	87.468.959.472
170	BIAK	064	32.621.175.781	16.121.899.746
171	MANOKWARI	065	38.226.433.145	16.635.786.830
172	SORONG	066	39.707.070.576	19.375.235.800
173	FAK-FAK	067	12.164.676.544	6.512.654.739
174	MERAUKE	068	49.793.683.259	30.156.700.640
175	NABIRE	085	10.317.691.576	5.646.511.805
176	WAMENA	113	18.296.279.453	5.880.640.500
177	SERUI	138	8.400.238.890	5.346.098.271
178	TIMIKA	141	27.802.904.324	28.301.509.966
JUMLAH KAS KPPN			16.207.881.963.676	11.870.556.947.661

**KAS PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	245.854.591	10.591.022			1.821.261.971	3.044.874.479
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	4.187.884.264	4.004.839.807	41.098	17.700.000	19.461.343.127	-
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	312.171.706	15.805.535.379			3.285.409.606	2.510.592.423
4	005	Mahkamah Agung	762.775.284	636.667.521	141.405.490	132.571.641	2.208.991.086	6.194.083.868
5	006	Kejaksaan Agung	529.445.200	703.832.326			7.299.844.508	56.727.015.418
6	007	Sekretariat Negara	7.825.054.290	3.035.136.669	12.001.333.379	5.877.625.188	14.732.170.708	15.182.785.648
7	010	Kementerian Dalam Negeri	2.166.221.516	6.415.690.382	876.135.813	488.075.654	5.635.155.491	11.137.702.626
8	011	Kementerian Luar Negeri	74.188.572.032	89.237.337.975	23.617.699.173	22.372.149.618	164.962.221	165.351.188
9	012	Kementerian Pertahanan	-	3.033.990.995	2.150.025.094	14.544.581	204.452.465.878	119.999.965.000
10	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	4.905.638.455	2.517.872.150	5.804.728.975	6.629.895.698	20.417.269.305	2.155.885.364
11	015	Kementerian Keuangan	8.796.459.747	1.439.660.756	6.659.080.618	3.060.880.248	20.739.677.126	8.115.195.871
12	018	Kementerian Pertanian	7.256.928.378	6.029.889.911	727.404.900	970.359.615	221.026.831.575	6.708.498.077
13	019	Kementerian Perindustrian	702.782.550	5.152.527.913	369.140.585	312.270.855	207.920.841	159.994.850
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.056.198.993	707.394.298	855.039.194	23.887.118.524	15.810.637	24.471.542.175
15	022	Kementerian Perhubungan	810.754.169	473.989.973	19.029.872.722	10.024.539.870	3.329.183.847	1.873.343.972
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	27.815.158.787	29.057.547.642	84.169.697.427	99.365.904.969	814.433.874.164	227.389.900.696
17	024	Kementerian Kesehatan	6.262.832.774	6.014.567.167	623.004.566	1.426.762.912	241.587.253.030	380.514.581.981
18	025	Kementerian Agama	4.393.553.295	2.772.512.926	1.033.400.795	2.579.653.331	8.685.980.410	10.104.236.574
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.405.547.026	18.015.981.617	11.776.493.881	9.837.150.157	93.582.296	17.559.844
20	027	Kementerian Sosial	553.837.436	1.176.994.982	115.483.600	60.459.150	186.916.521.611	119.950.889.291
21	029	Kementerian Kehutanan	8.807.078.629	21.898.190.391	11.448.241.591	48.365.486.680	16.274.025.016	31.840.821.036
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	944.490.452	1.477.383.772	150.527.604	83.426.415	2.018.057.651	1.148.074.146
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	288.246.285	895.824.764	-	135.000.000	8.549.586.967	23.732.861.771
24	034	Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	445.960.216	-			53.237.800	-
25	035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian					536.001.150	809.363.470
26	036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1.388.055.759	850.727.715			258.130.322	306.900.481
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	181.674.532	2.740.697.216	57.661.500	11.415.000	5.790.052.021	590.087
28	042	Kementerian Riset dan Teknologi	694.577.314	203.531.790	639	5.829	4.773.916.499	349.089.104
29	043	Kementerian Lingkungan Hidup	280.875.100	1.273.164.777	-	50.000	2.126.233.320	2.791.517.085
30	044	Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	3.330.000	4.528.000			2.913.896.411	2.771.410.906
31	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	556.935.000	734.989.171			4.581.928.445	291.408.075

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
32	048	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	-	900				
33	051	Lembaga Sandi Negara					1.366.311.316	311.794.000
34	054	Badan Pusat Statistik	240.116.614	986.006.527	4.268.005	49.152	2.982.000.066	6.110.643.451
35	055	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	554.826.593	800			3.776.656.767	4.953.263.921
36	056	Badan Pertanahan Nasional	316.869.362	531.237.399	595.548.647	1.906.740.306	1.143.567.599	1.534.150.828
37	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	102.470.469	40.959.025	25.552.580	38.957.292		
38	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	227.054.318	984.785.932	-	126.699.000	1.631.407.114	1.368.981.516
39	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	1.821.055.720	2.891.198.021	4.378.685.000	7.836.183.000	840.182.458.453	329.225.730.631
40	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	119.000.835	19.783.547	86.955.000	86.935.000	70.585.046.807	994.856.264
41	064	Lembaga Ketahanan Nasional	107.950.650	2.642.800			2.684.794.099	6.201.000
42	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	4.563.602.803	2.135.186.973			-	6.835.628
43	066	Badan Narkotika Nasional	626.059.418	158.705.840			56.449.642.805	8.056.788.253
44	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	162.332.300	120.382.875			-	69.980.000
45	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3.678.008.618	6.972.725.190	6.253	6.253	143.063.977	367.839.400
46	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.000.000	24.890.442			5.541.203.601	5.782.675.437
47	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	47.235.076	54.790.671	71.770	1.769.500	100.937	258.441.291
48	076	Komisi Pemilihan Umum	1.988.329.566	734.812.937			31.172.034	2.248.807
49	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	78.334.853	3.319.350	363.781.034	113.839.657	10.891.863.676	197.889.230
50	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	7.852.625	-	338.235.000	93.108.876	7.979.343.984	-
51	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	28.178.205	602.399.087	1.156.811.626	686.634.055	338.726.822	1.763.476.489
52	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	544.241.877	89.071.600			159.105.460	45.777.154
53	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	-	5.214.500	1.171.862.824	1.691.678.894	714.480.987	-
54	084	Badan Standardisasi Nasional			-	2.287.222		
55	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir			-	7.257.500	189.679.500	-
56	086	Lembaga Administrasi Negara			936.601.888	989.778.988	1.040.777.650	12.390.200
57	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	11.940.000	341.292.393	343.000.000	16.482.806	1.681.755.000	254.719.000
58	088	Badan Kepegawaian Negara	32.082.786	22.068.116			2.000.000	-
59	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	162.543.743	10.083.900			28.754.964	177.063.744
60	090	Kementerian Perdagangan	10.005.599.488	12.489.197.859	3.555.160.551	3.552.348.988	342.208.496	117.542.817
61	091	Kemen Perumahan Rakyat	813.252.090	86.383.250			1.140.273.266.395	2.777.737.911
62	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	44.024.750	222.424.000	5.518.200	96.518.700	-	5.106.380.031
63	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.757.620	-			3.500.396	114.918.513
64	095	Dewan Perwakilan Daerah	5.602.098.653	6.721.342.129			3.786.178.476	7.027.164.917
65	100	Komisi Yudisial RI	-	40.747			-	365.408
66	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	674.630.400	-			31.150.008.852	391.580.106.838
67	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	521.092.220	695.086.374			25.821.855	9.457.658

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN		KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN		KAS LAINNYA DAN SETARA KAS	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
68	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-	18.912.929			277.672.560	7.240.000
69	107	Badan SAR Nasional	90.552.483	238.092.195			-	279.739.094
70	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu					105.900.646	-
71	110	Ombudsman Republik Indonesia	10.250.000	10.921.755			99.100.601	20.176.878
72	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	3.235.900			-	1.716.751.838
73	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam					207.517.479	-
74	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	617.156.502	-			501.077.101	-
75	114	Sekretariat Kabinet					606.351.819	-
76	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum					48.765.000	-
77	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	3.742.050	-			7.473.448.131	-
78	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	931.041.030	-			56.392.452.285	-
79	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang			1.581.981.956	-		
80	999.03	Investasi Pemerintah					1.429.667.753	1.912.974.670
81	999.05	Transfer ke Daerah					768.861.261.146	393.906.986.740
82	999.07	Belanja Subsidi					551.551.995.942	1.371.744.022.079
83	999.08	Belanja Lain-lain	4.951.651.724	29.257.142.989			706.180.832.512	3.158.586.431.299
TOTAL			213.458.829.221	292.795.937.959	196.150.458.978	252.900.321.124	6.103.251.516.103	6.756.875.778.441

**UANG MUKA BELANJA DAN BELANJA DIBAYAR DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BELANJA DIBAYAR DI MUKA 31 Desember 2012 (Audited)	UANG MUKA BELANJA 31 Desember 2012 (Audited)	UANG MUKA BELANJA*)
					31 Desember 2011 (Audited)
1	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA	1.650.874.994		1.866.471.405
2	005	MAHKAMAH AGUNG	2.951.231.216		1.192.330.134
3	006	KEJAKSAAN	7.694.940		
4	007	SEKRETARIAT NEGARA	76.128.570		68.052.473
5	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI		20.020.281.442	51.141.529.275
6	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	7.903.132.855		5.208.141.664
7	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA			1.005.479.251
8	015	KEMENTERIAN KEUANGAN RI	23.212.842.494	3.723.250.772	26.926.848.502
9	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	20.232.200		19.694.386
10	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	6.433.650.610		
11	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	160.596.995	19.835.100.558	511.735.738
12	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	56.227.476.637	54.910.107.821	17.218.005.484
13	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	14.233.629.570	168.901.211.223	77.435.394.571
14	025	KEMENTERIAN AGAMA	295.550.010	238.205.273	1.774.516.357
15	027	KEMENTERIAN SOSIAL RI			5.670.248.230
16	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	528.454.898	153.679.300	977.416.167
17	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	173.368.764		53.730.494
18	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	166.458.667		60.375.000
19	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN	57.214.000		
20	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	13.465.522.375	2.086.351.352	6.069.122.250
21	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	41.666.667		
22	054	BADAN PUSAT STATISTIK	322.971.666		476.950.889
23	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	138.875.833	-	61.021.064
24	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.036.431.395.605		947.992.197.260
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9.944.525.682		163.391.100
26	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN		3.699.539.504	7.941.663.771
27	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	314.666.666		451.200.000
28	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	55.033.333		
29	075	BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA	2.614.800	-	6.537.000
30	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	90.125.000		15.000.000
31	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA		400.000.000	11.657.910
32	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	39.666.667		
33	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.642.035.000		
34	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL		338.654.428.427	77.308.639.323
35	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	106.480.000		137.775.000
36	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	502.132.167		606.542.517
37	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN		30.244.896.533	34.152.707.602
38	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT			92.400.000
39	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI		527.083.403	511.512.225
40	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	435.852.250		377.546.250
41	103	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA	15.647.974.391		2.225.666.667
42	104	BNP2TKI		150.415.667	201.080.000
43	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	10.619.014.941		8.034.861.313
44	110	OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA	1.819.275.084		
45	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN		2.626.923.952	1.197.873.875
46	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS BATAM	63.805.871	341.786.000	
47	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI	1.200.320.000		
48	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	206.616.068	38.831.193.252	
TOTAL			1.208.189.107.486	685.344.454.479	1.279.165.315.147

*) Pada Tahun Anggaran 2011 Uang Muka Belanja dan Belanja Dibayar di Muka masih digabung

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN JENIS PAJAK
per 31 Desember 2012
 (dalam rupiah)

Kode Akun	Nama Akun	Neraca Percobaan Tahun Anggaran 2012	Laporan Perkembangan Piutang Pajak (LP3) Modul ALPP	Selisih
115121	Piutang PPh Pasal 21	1.391.617.937.283	1.391.617.937.284	1
115122	Piutang PPh Pasal 22	468.432.815.179	468.432.815.179	0
115124	Piutang PPh Pasal 23	4.918.350.082.956	4.918.350.082.964	8
115125	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.218.354.326.211	1.218.354.326.214	3
115126	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	18.473.224.608.353	18.473.224.608.352	-1
115127	Piutang PPh Pasal 26	2.093.962.968.364	2.093.962.968.364	0
115128	Piutang PPh Final	589.715.652.211	589.715.652.210	-1
115131	Piutang PPN Dalam Negeri	15.704.901.728.808	15.704.901.728.814	6
115141	Piutang PPnBM dalam Negeri	176.236.958.386	176.236.958.386	0
115151	Piutang PBB Pedesaan	2.996.934.810.829	2.996.934.810.828	-1
115152	Piutang PBB Perkotaan	11.591.237.794.772	11.591.237.794.773	1
115153	Piutang PBB Perkebunan	661.307.597.823	661.307.597.822	-1
115154	Piutang PBB Kehutanan	558.001.107.117	558.001.107.119	2
115155	Piutang PBB Pertambangan	7.587.645.821.758	7.587.645.821.760	2
115172	Piutang Pajak Tidak Langsung Lainnya	15.396.781	15.396.781	0
115173	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.291.242.280.829	2.291.242.280.831	2
TOTAL		70.721.181.887.660	70.721.181.887.681	21
Penyisihan Piutang Pajak		42.929.017.362.023	42.929.017.362.025	2
Piutang Pajak Neto (NRV)		27.792.164.525.637	27.792.164.525.656	19

ket: Selisih antara Neraca Percobaan dengan LP3 karena pembulatan

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN JENIS PAJAK
per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)

NO	KANWIL DJP	PPH 25 OP	PPH 25 BDN	PPH 21	PPH 22	PPH 23	PPH 26	PPH 4 (2)	PPN	PPN BM	BP	PTLL	PBB DESA	PBB KOTA	PBB KEBUN	PBB HUTAN	PBB TAMBANG NONMIGAS	PBB TAMBANG MIGAS	BPHTB	JUMLAH	
1	NAD	4.994.284.918	47.673.063.505	29.908.001.206	3.518.378.675	9.305.306.582	1.819.630.082	3.422.505.322	104.752.678.009	48.115.427	324.202.309	-	76.232.506.991	104.162.925.225	28.368.183.029	8.957.760.723	4.715.948.423	184.632.472.440	-	612.835.962.866	
2	SUMUT I	41.584.460.276	258.385.232.889	19.140.679.853	9.573.370.519	14.650.306.780	4.711.761.582	454.820.771.909	2.834.359.708	45.023.295.120	3.823.450	21.813.584.387	34.583.739.518	39.998.169.457	-	-	-	49.760.318.758	-	1.001.541.432.997	
3	SUMUT II	29.863.065.628	32.468.494.692	6.494.833.312	192.194.528	741.262.279	82.156.845	974.437.903	64.579.288.628	30.265.261	487.357.289	-	150.576.725.607	183.334.550.651	212.032.764.034	3.967.136.892	124.760.000	125.402.942.059	-	811.352.235.619	
4	RIAU DAN KEPRI	21.870.969.687	283.395.099.818	45.512.915.903	18.116.502.984	51.887.408.479	9.298.175.656	16.704.216.430	498.120.336.060	10.398.613.026	22.207.423.075	11.248.331	562.475.734.419	560.267.549.941	74.894.364.820	48.424.190.194	5.715.865.795	597.581.067.620	-	2.826.881.682.239	
5	SUMBAR JAMBI	35.816.718.240	137.492.355.562	16.241.975.038	452.734.591	16.744.174.345	2.081.150.342	4.348.418.883	193.187.335.590	154.288.359	4.664.302.808	-	91.592.036.285	287.655.341.601	16.180.683.151	7.195.319.235	6.661.713.383	242.460.999.848	-	1.062.929.547.261	
6	SUMSEL BABEL	32.891.829.094	168.002.845.793	27.051.596.646	328.984.534	28.421.325.179	33.347.303.204	8.580.155.319	239.788.166.750	786.561	47.774.320.058	-	98.103.568.800	82.608.836.698	27.494.298.178	34.009.781.231	190.410.960.158	488.996.701.639	-	1.507.809.458.942	
7	BENGKULU	40.756.498.371	109.751.666.418	22.072.156.190	573.003.129	5.548.225.958	562.095.971	1.731.144.076	169.713.521.174	139.950	4.541.456.156	-	59.690.183.975	82.937.401.731	21.953.156.445	381.783.000	1.414.962.118	168.948.210.644	-	690.575.605.307	
8	JKT PUSAT	68.540.486.462	2.776.926.793.123	85.937.042.424	2.071.855.055	402.483.582.690	119.954.015.365	191.673.913.621	1.559.092.301.419	41.979.759.387	562.755.167.129	325.000	-	372.277.161.731	-	-	-	13.110.007.388	-	6.196.802.410.793	
9	JKT BARAT	62.737.083.734	403.572.711.495	16.413.632.914	2.608.718.249	21.202.447.138	10.819.086.815	7.198.402.712	514.175.802.121	2.779.321.098	20.612.867.811	-	-	664.814.508.311	-	-	-	15.682.546.208	-	1.742.717.128.605	
10	JKT SELATAN	106.853.213.152	1.376.691.453.374	127.134.363.121	5.343.217.349	391.608.731.048	166.794.732.810	47.259.866.187	1.343.244.427.147	36.043.693.932	240.861.764.261	-	1.246.911.860.316	-	-	-	-	15.502.790.708	-	5.104.250.113.404	
11	JKT TIMUR	36.370.233.241	451.526.541.586	39.763.028.486	398.722.987	28.760.005.115	9.019.955.776	7.646.263.756	530.873.091.019	418.990.087	40.835.249.102	-	-	805.553.924.267	-	-	-	15.566.426.793	-	1.966.732.432.215	
12	JKT UTARA	157.248.632.943	668.832.072.749	21.666.282.920	392.513.132.335	29.340.278.830	2.425.311.065	8.892.840.818	1.639.969.860.755	20.870.380.215	13.395.686.453	-	-	702.066.277.317	-	-	-	33.202.918.710	-	3.690.423.675.111	
13	JKT KHUSUS	4.450.226.255	3.482.565.747.873	66.457.234.675	785.660.149	3.236.240.525.675	1.510.715.587.794	28.766.741.327	1.308.444.502.137	2.964.570.479	990.480.639.263	-	-	-	-	-	-	1.958.809.642.709	-	12.590.681.078.337	
14	BANTEN	21.527.356.350	198.255.543.983	37.520.648.515	7.199.053.543	16.131.594.416	11.355.549.538	4.290.770.223	352.755.420.635	6.796.736.815	20.814.547.403	-	188.566.436.824	1.061.973.281.559	-	6.991.000	436.933.538	45.671.231.569	-	1.973.302.095.910	
15	JAWA BARAT I	66.940.170.384	319.702.745.430	49.226.539.704	105.398.917	36.504.964.487	24.804.046.566	15.855.953.802	598.540.734.961	2.125.325.207	13.916.683.866	-	232.356.048.608	1.381.244.625.333	39.695.508.641	177.249.317	599.952.245	102.247.288.112	-	2.884.043.235.580	
16	JAWA BARAT II	49.395.129.393	241.900.631.482	72.473.474.429	98.684.805	35.251.663.858	27.991.462.117	49.641.342.526	637.282.066.148	4.609.265.528	24.670.457.866	-	232.349.735.178	1.146.511.829.705	10.708.066.252	84.975.278	4.940.208.931	259.980.528.702	-	2.797.889.522.197	
17	JAWA TENGAH I	54.925.136.531	189.561.751.260	21.626.524.657	1.748.532.879	22.202.697.535	2.449.995.231	11.264.932.213	419.480.536.085	790.941.410	10.413.760.151	-	123.546.946.014	180.038.761.950	4.058.827.888	-	28.561.376	110.409.706.409	-	1.152.547.611.589	
18	JAWA TENGAH II	30.369.505.246	150.549.520.103	8.874.932.806	67.979.451	10.926.203.100	304.066.630	2.635.508.064	185.792.937.860	1.201.401.306	10.370.893.429	-	195.297.616.348	429.092.550.878	1.551.707.579	-	-	183.146.370	91.432.168.212	-	1.118.650.137.383
19	DIY	13.015.225.933	43.575.552.748	7.267.713.358	2.446.936	2.754.199.930	564.166.023	7.981.427.811	93.206.604.479	385.381.819	5.669.589.066	-	56.445.610.349	176.070.277.486	-	-	-	20.185.907.036	-	427.124.102.975	
20	JATIM I	47.100.340.432	227.018.372.428	18.696.023.785	5.194.959.190	10.886.394.435	2.031.440.242	16.448.646.551	384.705.625.174	12.324.968.337	5.814.446.047	-	-	-	-	-	-	8.812.970.057	-	739.035.186.678	
21	JATIM II	34.168.737.713	123.152.720.337	12.875.869.102	978.073.212	10.624.691.212	3.042.760.855	7.645.810.191	317.277.380.495	2.835.000	6.660.550.550	-	41.387.126.181	84.329.913.850	68.969.976	-	-	12.562.789	247.141.219.041	-	889.369.220.504
22	JATIM III	42.924.121.479	103.756.318.202	11.889.083.527	374.730.586	3.603.162.410	117.231.806	3.854.885.165	202.383.260.483	859.329.199	6.345.642.063	-	268.132.640.735	367.753.442.824	7.123.555.368	1.869.000	193.709.382	131.670.858.114	-	1.150.983.820.343	
23	KALBAR	19.818.585.723	51.323.439.127	11.620.943.740	229.761.578	5.199.656.437	467.153.968	916.153.180	115.446.565.749	1.340.647	11.067.126.592	-	34.508.635.043	74.919.393.536	33.484.059.081	37.129.688.307	15.026.789.776	106.388.957.666	-	517.548.250.150	
24	KALSELTENG	18.305.144.630	176.517.956.856	19.386.928.772	113.211.025	38.055.915.900	1.746.639.146	5.229.760.616	261.427.648.246	2.648.050	8.059.778.926	-	45.715.374.552	209.216.684.046	23.735.463.355	78.801.981.839	96.276.570.137	204.407.799.495	-	1.187.099.505.591	
25	KALTIM	16.611.579.675	420.086.914.607	40.572.567.698	491.213.739	31.754.108.101	15.337.547.434	17.409.729.984	518.704.433.573	30.000	14.791.018.945	-	40.257.736.435	114.507.595.395	71.398.302.766	157.875.015.537	125.457.945.955	684.345.709.959	-	2.269.601.449.802	
26	SULSELBARTRA	42.512.888.457	177.275.894.694	24.240.700.708	2.636.390.129	18.177.961.521	128.540.989	14.214.445.459	256.267.739.070	568.053.253	6.370.848.803	-	114.923.085.898	258.719.379.435	29.376.878.058	13.700.717.075	17.646.810.856	249.726.499.144	-	1.226.486.833.548	
27	SULUTTENGGORMALUT	21.345.571.663	72.274.655.833	14.199.938.765	2.119.141.712	5.575.480.319	805.267.096	4.206.592.654	119.957.466.068	227.006.120	879.021.698	-	104.537.632.500	155.719.828.440	15.153.004.202	37.459.126.253	23.567.487.938	227.619.979.730	-	805.647.200.991	
28	BALI	26.027.672.821	95.964.009.277	12.610.465.449	82.719.239	14.287.454.953	7.315.853.802	15.540.464.764	291.437.612.526	4.434.150.878	10.206.052.084	-	88.895.564.443	565.268.296.324	183.376.416	-	-	24.771.479.606	-	1.157.025.172.583	
29	NUSRA	25.447.764.088	38.524.003.222	9.895.095.151	131.832.050	2.715.257.198	777.877.184	6.393.329.211	80.988.934.000	375.000	555.842.223	-	131.840.373.686	152.487.637.958	426.509.426	-	-	71.669.746	-	576.322.653.695	
30	PAPUA DAN MALUKU	13.831.545.321	119.837.088.894	412.695.520.033	28.781.488	2.965.745.171	7.475.971	4.378.148.256	205.298.749.298	227.735.971	2.628.470.030	-	37.689.907.589	106.112.218.747	3.421.749.700	129.727.522.237	6.229.020.482	537.394.740.434	-	1.582.474.419.622	
31	WAJIB PAJAK BESAR	30.110.148.374	5.526.663.410.992	82.151.244.396	10.353.429.616	413.799.351.883	123.084.930.460	69.950.286.375	2.043.185.931.246	23.156.150.356	138.043.820.245	-	-	-	-	-	-	-	-	8.460.498.703.943	
	Total	1.218.354.326.214	18.473.224.608.352	1.391.617.937.284	468.432.815.179	4.918.350.082.964	2.093.962.968.364	589.715.652.210	15.704.901.728.814	176.236.958.386	2.291.242.280.831	15.396.781	2.996.934.810.828	11.591.237.794.773	661.307.597.822	558.001.107.119	499.715.579.398	7.087.930.242.362	-	70.721.181.887.681	

PIUTANG PAJAK BERDASARKAN KANWIL DJP DAN UMUR PAJAK
per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)

NO	KANWIL DJP	≤ 1 Thn	1 Thn < UT ≤ 2 Thn	2 Thn < UT ≤ 3 Thn	3 Thn < UT ≤ 4 Thn	4 Thn < UT ≤ 5 Thn	> 5 Thn	JUMLAH
1	NAD	61.250.111.185	66.960.833.903	150.497.132.348	151.393.632.444	64.524.902.822	118.209.350.164	612.835.962.866
2	SUMUT I	131.581.170.539	74.797.834.907	100.664.831.500	116.337.731.675	43.686.735.481	534.473.128.895	1.001.541.432.997
3	SUMUT II	204.045.167.819	121.877.875.040	152.672.648.864	98.504.240.523	40.429.582.238	193.822.721.134	811.352.235.618
4	RIAU DAN KEPRI	355.996.623.277	309.091.696.849	246.408.539.431	387.725.735.177	185.924.830.067	1.341.734.257.438	2.826.881.682.239
5	SUMBAR JAMBI	214.630.371.202	123.509.332.452	125.539.799.851	207.124.546.394	78.644.817.701	313.480.679.661	1.062.929.547.261
6	SUMSEL BABEL	470.972.014.248	163.798.722.557	176.117.728.456	387.904.977.406	69.033.826.751	239.982.190.424	1.507.809.459.842
7	BENGKULU	111.726.089.870	67.250.011.733	93.011.430.983	162.329.661.059	36.112.739.450	220.145.672.212	690.575.605.307
8	JKT PUSAT	922.356.095.100	462.632.013.544	678.827.992.791	907.402.748.978	161.647.509.552	3.063.936.050.827	6.196.802.410.793
9	JKT BARAT	273.917.327.111	191.086.494.844	187.759.352.872	104.502.079.240	156.464.312.042	828.987.562.497	1.742.717.128.605
10	JKT SELATAN	598.415.581.365	572.302.639.974	576.275.691.950	661.560.453.425	208.745.311.071	2.486.950.435.618	5.104.250.113.404
11	JKT TIMUR	274.672.253.373	240.144.704.791	238.263.601.681	192.338.088.767	192.008.393.309	829.305.390.295	1.966.732.432.215
12	JKT UTARA	361.049.015.826	302.418.896.334	200.134.462.943	179.950.168.491	1.843.106.288.996	803.764.842.523	3.690.423.675.111
13	JKT KHUSUS	6.525.070.832.501	949.800.986.872	430.237.181.325	596.247.873.995	330.598.306.962	3.758.725.896.682	12.590.681.078.337
14	BANTEN	467.612.141.561	411.172.884.379	203.203.204.289	160.163.470.167	98.142.378.964	633.008.016.550	1.973.302.095.910
15	JAWA BARAT I	481.431.107.824	328.903.574.631	395.452.474.226	325.274.664.819	171.219.812.443	1.181.761.601.637	2.884.043.235.580
16	JAWA BARAT II	593.182.588.554	277.344.733.451	382.982.475.280	364.880.384.231	169.096.998.822	1.010.402.341.859	2.797.889.522.198
17	JAWA TENGAH I	212.391.916.278	168.390.051.496	174.294.274.940	122.089.406.178	84.584.756.397	390.797.206.300	1.152.547.611.589
18	JAWA TENGAH II	240.674.015.674	149.250.317.649	129.046.247.122	149.523.607.142	60.802.692.357	389.353.257.438	1.118.650.137.382
19	DIY	86.789.345.387	69.913.007.217	47.233.311.744	41.195.992.134	30.943.997.334	151.048.449.159	427.124.102.975
20	JATIM I	112.942.826.162	71.758.226.031	132.551.211.651	43.185.909.304	29.385.630.716	349.211.382.814	739.035.186.678
21	JATIM II	94.508.803.301	103.095.290.689	169.504.253.737	272.123.243.031	35.074.079.627	215.063.550.119	889.369.220.504
22	JATIM III	166.506.626.429	117.055.078.911	134.809.788.566	147.044.252.935	58.493.939.719	527.074.133.782	1.150.983.820.343
23	KALBAR	107.535.474.134	55.669.557.956	68.131.100.110	113.602.772.987	31.366.162.197	141.243.182.767	517.548.250.150
24	KALSELTENG	252.170.613.826	217.899.146.692	208.630.357.378	141.828.662.847	72.421.974.491	294.148.750.358	1.187.099.505.592
25	KALTIM	204.477.034.982	230.004.185.645	523.206.035.343	657.411.185.976	136.695.033.908	517.807.973.946	2.269.601.449.801
26	SULSELBARTRA	252.919.566.033	193.034.249.225	213.171.785.400	207.459.327.279	54.716.197.998	305.185.707.616	1.226.486.833.550
27	SULUTTENG GORMALUT	97.917.793.056	76.051.991.870	121.804.235.371	203.513.453.250	55.729.360.852	250.630.366.591	805.647.200.990
28	BALI	228.148.109.274	183.919.476.736	234.315.072.280	116.575.277.974	68.948.113.967	325.119.122.352	1.157.025.172.582
29	NUSRA	84.278.722.985	72.128.398.773	89.932.347.153	114.194.279.815	34.704.386.157	181.084.518.812	576.322.653.695
30	PAPUA DAN MALUKU	407.235.528.833	95.260.930.554	365.497.576.452	329.824.194.867	61.314.570.621	323.341.618.294	1.582.474.419.621
31	WAJIB PAJAK BESAR	5.977.110.715.607	415.155.949.869	480.217.783.462	396.239.985.982	180.348.171.947	1.011.426.097.076	8.460.498.703.943
JUMLAH		20.573.515.583.316	6.881.679.095.571	7.430.393.929.500	8.059.452.008.491	4.844.915.814.960	22.931.225.455.842	70.721.181.887.681

**PENYISIHAN PIUTANG PAJAK, PIUTANG PAJAK DALUARSA, USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
DAN PIUTANG PAJAK YANG DIHAPUSKAN
per 31 Desember 2012
(dalam rupiah)**

JENIS PAJAK	PENYISIHAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DALUARSA	USUL PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK	PIUTANG PAJAK DIHAPUSKAN
PPH Pasal 25 OP	866.983.868.843	263.020.013.467	3.808.470.191	-
PPH Pasal 25 Badan	11.922.280.542.092	2.615.655.348.631	35.121.702.976	-
PPH Pasal 21	941.548.793.298	217.944.933.182	2.343.104.408	-
PPH Pasal 22	437.379.388.706	8.969.330.731	635.493.414	-
PPH Pasal 23	1.715.150.130.774	513.249.757.140	2.045.914.731	-
PPH Pasal 26	1.544.661.253.999	98.740.769.876	285.561.190	-
PPH Pasal 4(2)	390.009.037.796	42.213.456.830	1.802.993.751	-
PPN	11.034.824.793.601	2.159.663.954.649	158.095.651.653	28.075.790.794.612
PPnBM	148.003.842.711	29.605.336.533	150.000	-
Bunga Penagihan	1.731.435.956.726	229.588.821.246	1.216.798.652	-
Pajak Tidak Langsung Lainnya	11.887.369	11.698.503	3.021.982	-
PBB Sektor Pedesaan	1.127.774.505.409	700.857.672.238	115.876.745.424	-
PBB Sektor Perkotaan	3.413.729.102.893	1.660.615.090.670	626.533.488.315	-
PBB Sektor Perkebunan	148.776.916.135	10.631.043.311	-	-
PBB Sektor Perhutanan	313.316.983.775	52.760.295.569	-	-
PBB Sektor Pertambangan Non Migas	7.040.480.536.167	5.198.131.139	-	-
PBB Sektor Pertambangan Migas	152.649.821.732	29.504.384.540	228.278.115.326	-
BPHTB	-	-	-	-
JUMLAH	42.929.017.362.025	8.638.230.038.255	1.176.047.212.013	28.075.790.794.612

**PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			
			31 Desember 2012 Audited			31 Desember 2011 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	002	DPR	7.468.407.149	(37.342.036)	7.431.065.113	8.684.884.505
2	004	BPK	5.082.027.403	(25.410.138)	5.056.617.265	111.159.818
3	005	MA	474.760.446	(424.301)	474.336.145	87.408.524
4	006	Kejaksaan Agung	12.570.632.222.592	(7.825.549.363.203)	4.745.082.859.389	-
5	007	Sekretariat Negara	1.207.113	(6.036)	1.201.077	-
6	010	Kementerian Dalam Negeri	3.549.915.000	(21.729.575)	3.528.185.425	51.901.629.359
7	011	Kementerian Luar Negeri	103.963.942.184	-	103.963.942.184	50.876.235.365
8	012	Kementerian Pertahanan	83.737.774.393	-	83.737.774.393	71.678.009.885
9	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	37.497.955.959	(12.670.630.903)	24.827.325.056	18.343.360.446
10	015	Kementerian Keuangan	96.450.818.001	(51.808.973.643)	44.641.844.358	85.849.145.052
11	018	Kementerian Pertanian	2.463.017.960	(233.518.690)	2.229.499.270	1.553.735.162
12	019	Kementerian Perindustrian	3.433.122.283	(267.203.432)	3.165.918.851	4.284.175.541
13	020	Kementerian ESDM	9.399.082.826.374	(8.229.230.514.076)	1.169.852.312.298	8.504.284.454.650
14	022	Kementerian Perhubungan	146.322.771.124	(28.407.901.233)	117.914.869.891	187.044.736.967
15	023	Kementerian Pendidikan Nasional	21.639.032.813	(257.575.523)	21.381.457.290	240.867.185.876
16	024	Kementerian Kesehatan	132.537.177.149	(53.368.242)	132.483.808.907	8.487.337.460
17	025	Kementerian Agama	3.542.282.517	(2.557.490)	3.539.725.027	3.565.993.353
18	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	-	-	5.305.136
19	027	Kementerian Sosial	72.350.000	(361.750)	71.988.250	249.573.600
20	029	Kementerian Kehutanan	2.067.471.003.070	(1.778.821.775.130)	288.649.227.940	1.502.665.036.007
21	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	144.845.719	(724.247)	144.121.472	5.092.048.911
22	033	Kementerian Pekerjaan Umum	3.479.383.930	(13.425.394)	3.465.958.536	2.124.894.294
23	035	Kemenko Bidang Perekonomian	278.248.981	(1.391.245)	276.857.736	-
24	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	558.536.000	-	558.536.000	2.045.249.040
25	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.573.784.317	(12.865.922)	2.560.918.395	282.400.000
26	041	Kementerian Negara BUMN	79.750.000	(39.875.000)	39.875.000	1.709.508.000
27	043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	501.354.000	(2.506.770)	498.847.230	1.059.796.000
28	044	Kementerian Negara KUKM	-	-	-	53.644.833
29	051	LSN	2.557.251.555	(12.786.258)	2.544.465.297	-
30	054	BPS	89.793.732	(448.968)	89.344.764	167.452.574
31	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	2.197.800	(10.989)	2.186.811	-
32	056	Badan Pertanahan Nasional	6.975.637.424	(34.878.201)	6.940.759.223	1.675.448.928
33	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	24.000.000	(120.000)	23.880.000	3.600.000
34	059	Kementerian Kominfo	2.780.032.927.625	(1.375.490.622.216)	1.404.542.305.409	2.442.864.218.815
35	060	Kepolisian RI	15.700.999.463	(80.970.300)	15.620.029.163	12.958.853.609
36	063	BPOM	-	-	-	6.272.000
37	066	BNN	2.747.692.715	-	2.747.692.715	2.814.006.110
38	068	BKKBN	-	-	-	8.499.808.374
39	075	BMG	10.465.520.491	(52.327.603)	10.413.192.888	9.913.911.993
40	076	KPU	94.615.072	-	94.615.072	17.378.350
41	077	Mahkamah Konstitusi RI	299.201.563	(1.496.008)	297.705.555	34.894.202
42	078	PPATK	25.842.500	(129.213)	25.713.287	-
43	079	LIPI	2.654.712.840	(159.939.521)	2.494.773.319	377.542.612
44	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	803.431.921	(4.017.160)	799.414.761	1.436.574.741
45	081	BPPT	34.195.581.633	(10.477.719.011)	23.717.862.622	34.998.226.149
46	082	LAPAN	409.674.994	(1.912.442)	407.762.552	-
47	083	Bakosurtanal	-	-	-	7.602.799.948
48	084	BSN	31.840.000	(159.200)	31.680.800	65.329.500
49	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	552.899.000	(234.380.305)	318.518.695	915.559.500
50	086	LAN	188.500.000	(942.500)	187.557.500	88.500.000
51	087	ANRI	223.150.531	(1.115.752)	222.034.779	-
52	088	BKN	340.693.544	(323.138.897)	17.554.647	657.337.450
53	090	Kementerian Perdagangan	388.611.870	(18.416.978)	370.194.892	1.648.413.124
54	091	Kemen Perumahan Rakyat	-	-	-	1.681.770.379
55	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	-	-	-	319.912.000
56	093	KPK	516.903.016.873	(30.306.317.535)	486.596.699.338	441.671.318.958
57	095	DPD	-	-	-	82.771.503
58	100	Komisi Yudisial RI	41.676.185	-	41.676.185	-

**PIUTANG PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	PIUTANG BUKAN PAJAK			
			31 Desember 2012 Audited			31 Desember 2011 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
59	104	BNP2TKI	3.028.561.850	(15.142.810)	3.013.419.040	2.164.151.250
60	105	BPLS	37.277.302.290	(12.414.448)	37.264.887.842	2.773.751.395
61	106	LKPBJP	626.131.123	-	626.131.123	-
62	107	Badan SAR	12.643.400.000	(12.643.400.000)	-	15.429.322.590
63	108	KPPU	49.939.919.330	(45.829.210.160)	4.110.709.170	48.923.261.920
64	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	-	-	-	3.827.012.418
65	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS	1.380.700	-	1.380.700	-
66	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	852.606.035	(4.263.030)	848.343.005	-
67	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	67.244.099.178	-	-	-
68	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS	11.122.157.614	-	11.122.157.614	-
69	999.03	BUN (Investasi)	185.384.473.276	(100.617.241.298)	84.767.231.978	54.914.355.161
70	999.05	BUN (DJPk)	3.913.204.981.704	-	3.913.204.981.704	-
71	999.07	BUN (Subsidi)	1.142.775.784.247	(5.713.878.921)	1.137.061.905.326	878.939.094.800
72	999.08	BUN (Belanja lainnya)	211.015.741.654	-	211.015.741.654	7.438.160.200
73	999.99	BUN (Transaksi Khusus)	87.221.853.987.448	(71.832.889.674.798)	15.388.964.312.650	5.148.072.494.298
TOTAL			120.925.758.512.257	(91.342.386.518.501)	29.516.127.894.579	19.885.890.412.635

SALDO KEWAJIBAN 5 (LIMA) BANK DALAM LIKUIDASI EKS PROGRAM PENJAMINAN PEMERINTAH PER 31 DESEMBER 2012

No.	Nama Bank	Dana Penjaminan	Realisasi Hasil Penerimaan								Jumlah Sisa Kewajiban
			2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	TOTAL	
1.	PT Bank Asiatik (DL)	886.579.224.443,83	5.000.000.000,00	18.500.000.000,00	5.000.000.000,00	31.500.000.000,00	-	-	8.000.000.000,00	68.000.000.000,00	818.579.224.443,83
2.	PT Bank Dagang Bali (DL)	1.331.516.911.477,24	-	-	-	269.906.630.005,00	123.389.652.865,00	-	-	393.296.282.870,00	938.220.628.607,24
3.	PT Bank Global Internasional (DL)	804.234.270.395,51	-	-	-	62.260.000.000,00	-	100.000.000.000,00	-	162.260.000.000,00	641.974.270.395,51
4.	PT Bank Ratu (DL)	71.817.985.352,00	-	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-	10.000.000.000,00	-	-	30.000.000.000,00	41.817.985.352,00
5.	PT Bank PrasiDha (DL)	227.134.559.144,00	4.000.000.000,00	-	-	16.497.034.464,52	-	-	401.880.081,00	20.898.914.545,52	206.235.644.598,48
	Jumlah	3.321.282.950.812,58	9.000.000.000,00	28.500.000.000,00	15.000.000.000,00	380.163.664.469,52	133.389.652.865,00	100.000.000.000,00	8.401.880.081,00	674.455.197.415,52	2.646.827.753.397,06

* saldo awal Bank Asiatik adalah sebagaimana tersebut di atas, dikarenakan adanya pengembalian 2 nasabah setelah BAST BNI, yakni Sdr Yeti Nurmasari (Rp 13.495.383,00) dan Sdr. Beng Nagarudin (Rp 5.000.000,00)

Saldo Kewajiban Bank Dalam Likuidasi (BDL) Eks Dana Talangan s.d 31 Desember 2012

No.	ASAL BANK BDL	Kewajiban	Nilai Buku Aset Yang Diserahkan (Berdasarkan)	Hasil Pengelolaan Aset Eks BDL							Jumlah Pengembalian	Sisa Kewajiban	
				s.d Desember 2006	hak tagih saat diserahkan	2007	2008	2009	2010	2011			2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11 = 4+5+6+7+8+9+10	12 = 3-10		
1	PT. Bank Anrico	210.080.728.375,73	140.797.811.123,91	9.532.957.340,07	200.547.771.035,66	9.502.388.722,00	357.853.052,78	1.609.203.328,00	6.540.713.343,00	12.619.581.693,00	1.645.743.999,00	41.808.441.477,85	168.272.286.897,88
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	106.107.201.031,41	183.555.008.000,00	67.500.000.000,00	17.316.896.847,89	2.660.283.085,82	2.048.426.605,69	2.996.154.673,00	3.859.090.506,92	10.668.408.037,00	223.102.267.756,32	27.952.740.243,68
3	PT. Bank Harapan Sentosa	3.866.182.312.852,07	136.297.408.195,04	585.728.056.499,00	3.280.454.256.353,07	41.314.533.283,56	5.204.191.984,61	5.106.988.512,65	8.779.090.328,44	3.495.995.672,14	19.679.459.985,75	669.308.316.266,15	3.196.873.996.585,92
4	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	201.802.166.935,30	172.736.782.621,00	25.098.188.837,19	176.703.978.098,11	6.315.060.527,00	385.357.786,00	190.370.760,00	0,00	0,00	1.389.331.696,00	33.378.309.606,19	168.423.857.329,11
5	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	201.812.614.291,48	157.450.001.984,00	46.872.202.071,00	154.940.412.220,48	30.746.092.410,83	7.878.883.538,00	2.046.975.489,00	3.296.914.583,00	974.999.999,00	2.331.479.260,00	94.147.547.350,83	107.665.066.940,65
6	PT. Bank Mataram Dhanarta	336.763.209.866,98	6.780.484.884,70	31.186.000.000,00	305.577.209.866,98	4.018.000.000,00	3.193.944.737,00	0,00	0,00	0,00	665.664.209,00	39.063.608.946,00	297.699.600.920,98
7	PT. Bank Pacific	2.133.366.434.839,63	1.638.279.007.000,00	332.023.076.267,80	1.801.343.358.571,83	29.347.497.898,00	111.657.561.420,00	14.675.177.662,50	19.726.988.659,30	1.960.001.520,16	74.243.254.273,00	583.633.557.700,76	1.549.732.877.138,67
8	PT. Sejahtera Bank Umum	1.687.349.515.372,53	1.015.640.110.944,00	857.387.217.393,65	829.962.297.978,88	550.081.483,46	66.997.186.362,78	29.887.774.331,00	37.982.436.510,76	28.020.046.077,00	92.456.945.888,90	1.113.081.688.047,55	574.267.827.324,98
9	PT. South East Asia Bank	899.399.023.305,99	181.953.841.474,06	99.302.719.380,89	800.096.303.925,10	28.197.078.896,79	134.453.227,00	3.489.512.824,00	230.736.340,00	27.808.545.454,00	30.880.337.546,00	190.043.383.668,68	709.355.639.637,31
10	PT. Bank Dwipa Semesta	110.105.997.130,87	114.546.599.155,04	6.870.134.600,00	103.135.862.530,87	0,00	27.300.000.000,00	0,00	0,00	329.500.000,00	11.424.546,00	34.611.059.146,00	75.494.937.984,87
11	PT. Astria Raya Bank	578.918.260.698,77	56.733.811.676,21	131.949.603.600,00	446.968.657.098,77	0,00	51.742.862.725,42	0,00	0,00	1.299.224.575,00	6.317.697.524,00	191.309.388.424,42	387.608.872.274,35
12	PT. Bank Pinaesaaan	681.084.490.919,58	82.182.282.117,24	18.456.680.100,11	662.627.810.819,47	745.723.907,00	24.308.490.543,00	3.590.996.621,00	4.534.212.586,00	1.303.214.409,00	5.412.986.712,00	58.352.304.878,11	622.732.186.041,47
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	0,00	120.959.930.061,67	90.034.069.938,33	60.000.000.000,00	21.323.394.608,00	0,00	0,00	2.000.000.000,00	6.710.675.330,00	210.993.999.999,67	0,33
14	PT. Bank Industri	511.470.229.328,68	238.376.301.422,00	279.124.000.000,00	232.346.228.326,68	0,00	0,00	78.318.742.617,00	88.420.788,00	47.841.145,00	461.932.823,00	358.040.837.373,00	153.428.291.953,68
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	8.554.789.642,67	0,00	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000.000,00	6.054.789.642,67
	Total BDL Eks Dana Talangan	11.888.938.781.558,30	4.057.861.644.628,61	2.730.645.774.151,38	9.158.293.007.406,90	228.053.353.976,53	323.144.463.070,41	140.764.168.750,84	84.175.667.811,50	83.718.041.051,22	252.873.341.829,65	3.843.374.810.641,53	8.045.563.970.916,75

ASET KREDIT EKS BPPN

1) Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo Per 31 Desember 2012	Nilai Konversi
Dollar Amerika	319.844.316,23	(281.484,88)	319.562.831,35	3.090.172.579.117,20
Rupiah	6.433.550.316.476,42	(11.207.161.357,22)	6.422.343.187.967,61	6.422.343.187.967,61
Yen Jepang	5.615.941.858,85	-	5.615.941.858,85	628.760.850.516,85
Deutschmark	500.000,00	(500.000,00)	0,00	0,00
Jumlah				10.141.276.617.601,70

*Nilai telah memperhatikan tahap pengurusan yang telah PB/PJPN

2) Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham

Nama Obligor	Bank Asal	Saldo Per 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo Per 31 Desember 2012
Baringin Marulam Hasiholan Panggabean & Joseph Januardy	Bank Namura	170.144.000.000,00		170.144.000.000,00
Trijono Gondokusumo	Bank Putera Surya Perkasa	5.048.095.000.000,00		5.048.095.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Metropolitan	70.460.000.000,00		70.460.000.000,00
Santoso Sumali	Bank Bahari	406.415.000.000,00		406.415.000.000,00
I.M. Sudiarta/IGD Darmawan	Bank Aken	736.350.000.000,00	181.818.181.818,00	554.531.818.182,00
Fadel Muhammad	Bank Intan	136.430.000.000,00		136.430.000.000,00
Hengky Wijaya	Bank Tata Internasional	596.794.000.000,00		596.794.000.000,00
David Nusa Wijaya/Tarunojoyo Nusa	Bank Servitia	4.308.730.000.000,00		4.308.730.000.000,00
Dewanto Kurniawan	Bank Deka	117.609.814.938,82	31.689.400.838,00	85.920.414.100,82
Agus Anwar	Bank Pelita Istismarat	577.812.000.000,00		577.812.000.000,00
Atang Latief	Bank Indonesia Raya	155.727.000.000,00		155.727.000.000,00
Marimutu Sinivasan	Bank Putra Multikarsa	790.557.000.000,00		790.557.000.000,00
Ulung Bursa	Bank Lautan Berlian	424.656.000.000,00		424.656.000.000,00
Lidia Muchtar	Bank Tamara	188.483.118.182,00		188.483.118.182,00
Kaharudin Ongko	Bank Umum Nasional	8.038.848.663.563,18	133.901.178.180,00	7.904.947.485.383,18
Samadikun Hartono	Bank Modern	2.530.304.229.248,00		2.530.304.229.248,00
Jumlah		24.297.415.825.932,00	347.408.760.836,00	23.950.007.065.096,00

*Nilai telah memperhitungkan penjualan lelang 2 barang jaminan obligor yang diterima pada bulan Februari 2012

3) Dikelola Kantor Pusat (ATK)

Mata Uang	Saldo Per 31 Desember 2011	Saldo Per 31 Desember 2012*	Nilai Konversi
Rupiah	21.167.693.030.197,20	13.350.383.864.509,50	13.350.383.864.509,50
Dollar Amerika	1.472.167.923,48	1.048.022.609,17	10.134.378.630.673,90
Yen Jepang	6.644.744.692,87	998.413.744,22	111.782.402.802,87
Deutschmark	500.000,00		-
Euro	13.263.365,67	13.263.365,67	169.901.857.361,51
Dollar Australia	1.332.783,73	1.332.783,73	13.361.676.678,90
Poundsterling	266.124,00	266.124,00	4.145.908.538,64
			23.783.954.340.565,40

*) Berdasarkan pengecekan ulang
SAPB dan MKN

	Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham	Dikelola Kantor Pusat (ATK)	Grand Total
Jumlah	10.141.276.617.601,70	23.950.007.065.096,00	23.783.954.340.565,40	57.875.238.023.263,00

Catatan

Kurs Tengah BI per 28 Desember 2012:

1 Dollar Amerika	9.670,00
2 Yen Jepang	111,96
3 Deutschmark	24.979,23
4 Euro	12.809,86
5 Dollar Australia	10.025,39
6 Poundsterling	15.578,86

ASET KREDIT EKS KELOLAAN PT PPA

1) Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN

Mata Uang	Nilai Awal Penyerahan	Saldo Per 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo Per 31 Desember 2012	Nilai Konversi
Dollar Amerika	93.191.688,16	80.470.696,97	(4.323.539,40)	76.147.157,57	736.343.013.701,90
Rupiah	2.370.429.658.157,60	2.349.909.993.739,11	(10.961.941.940,77)	2.338.948.051.798,34	2.338.948.051.798,34
Yen Jepang	141.216.722,50	141.216.722,50	-	141.216.722,50	15.810.624.251,10
Deutchmark	758.512,78	758.512,78	-	758.512,78	18.947.062.914,02
Jumlah					3.110.048.752.665,36

2) Dikelola Kantor Pusat

Nama Debitur	Bank Asal	Saldo 31 Desember 2011	Mutasi Tahun 2012	Saldo 31 Desember 2012
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	1.299.150.000,00		1.299.150.000,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	108.990.024,00		108.990.024,00
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	34.584.020.409,75		34.584.020.409,75
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	69.168.040.819,50		69.168.040.819,50
Dirgantara Indonesia PT	BBD (Mandiri)	62.099.370.000,00		62.099.370.000,00
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	30.938.810.688,84		30.938.810.688,84
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	112.771.449.858,24		112.771.449.858,24
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	425.983.823.548,50		425.983.823.548,50
Dirgantara Indonesia PT	Mandiri	8.693.911.800,00		8.693.911.800,00
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	91.489.249.097,01		91.489.249.097,01
Dok & Perkapalan Kodja Bahari PT	Fasilitas Restructuring	1.212.685.353.877,93		1.212.685.353.877,93
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	26.981.928.647,65		26.981.928.647,65
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	615.025.707.374,47		615.025.707.374,47
Perusahaan Perdagangan Indonesia PT	Fasilitas Restructuring	45.000.000.000,00		45.000.000.000,00
Jumlah				2.736.829.806.145,89

Jumlah

Telah Dilakukan Pengurusan Oleh PUPN	Dikelola Kantor Pusat	Grand Total
3.110.048.752.665,36	2.736.829.806.145,89	5.846.878.558.811,25

Daftar Aset Kredit yang Diserahkan ke PT PPA Tahun 2012

No.	Debitur	Uang	Nilai Aset
1	Jaya Perkasa Engineering, PT	IDR	151.367.074.750,00
		USD	38,822,432.00
2	Polysindo Eka Perkasa, PT	IDR	459.555.536,00
		USD	960,092.00
3	Texmaco Jaya, PT	IDR	365.572.613,00
		USD	2,435.00
4	Wastra Indah, PT	IDR	10.493.948,00
5	PT Bina Prima Perdana	IDR	470.399.713.486,00
		USD	25,540,008.00
6	PT Tuban Petrochemical Industries	IDR	1.083.805.023.902,64
Total IDR			1.706.407.434.235,64
Total USD			65.324.967,00
Total (setelah konversi ke IDR)			2.334.964.266.709,64

Kurs menggunakan kurs transaksi beli BI tanggal 28 Desember 2012

1 USD = Rp. 9.622,- (65.324.967,00 USD x Rp. 9.622,- = Rp628.556.832.474)

PENYISIHAN PIUTANG

Uraian	Formula Penyisihan Piutang	Jumlah Penyisihan Piutang
Aset kredit eks BPPN	92% x (outstanding piutang tahun 2011 - recovery tahun 2012)	53.245.218.981.402,00
Aset kredit eks kelolaan PT PPA	92% x (outstanding piutang tahun 2011 - recovery tahun 2012)	5.379.128.274.106,35
Aset kredit yang diserahkan kepada PT PPA	92% x (outstanding piutang tahun 2011 - recovery tahun 2012)	2.148.167.125.372,87
Piutang eks BDL	(100% x (outstanding piutang tahun 2012)) - nilai agunan	10.573.232.359.353,80
Piutang pada PT PPA	92% x (Outstanding piutang tahun 2012)	2.590.720.000,00
Total		71.345.746.740.235,00

**BAGIAN LANCAR TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

(Dalam Rupiah)

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI			
			31 Desember 2012 Audited			31 Desember 2011
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	Audited
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	85.162.037	(1.011.204)	84.150.833	82.032.037
2	005	Mahkamah Agung	1.246.335.592	(961.769.723)	284.565.869	227.287.079
3	006	Kejaksaan Agung	2.400.000	(12.000)	2.388.000	.
4	007	Sekretariat Negara	50.240.000	(251.200)	49.988.800	46.434.000
5	010	Kementerian Dalam Negeri	86.972.704	(434.864)	86.537.840	86.972.704
6	011	Kementerian Luar Negeri	33.217.459.509	(32.731.700.958)	485.758.551	31.295.078.475
7	012	Kementerian Pertahanan	5.232.005	-	5.232.005	6.737.920
8	013	Kementerian Hukum dan HAM	178.837.498	(894.188)	177.943.310	168.980.500
9	015	Kementerian Keuangan	9.625.650.721	(9.414.674.698)	210.976.023	9.874.029.786
10	018	Kementerian Pertanian	1.643.001.627	(602.009.332)	1.040.992.295	595.311.033
11	019	Kementerian Perindustrian	1.600.000	(8.000)	1.592.000	66.349.821
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	62.107.000	(310.535)	61.796.465	94.562.000
13	022	Kementerian Perhubungan	69.900.000	(215.000)	69.685.000	46.170.400
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	223.761.170	(959.806)	222.801.364	97.661.170
15	024	Kementerian Kesehatan	44.375.000	(497.875)	43.877.125	270.131.114
16	025	Kementerian Agama	1.500.000	-	1.500.000	.
17	027	Kementerian Sosial	16.359.900	(81.800)	16.278.100	13.499.996
18	029	Kementerian Kehutanan	9.481.645.887	(9.223.360.770)	258.285.117	9.580.872.359
19	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	-	-	-	17.466.664
20	033	Kementerian Pekerjaan Umum	503.214.788	(2.516.074)	500.698.714	261.430.000
21	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	7.251.576	(36.258)	7.215.318	6.840.000
22	041	Kementerian BUMN	3.500.004	(17.500)	3.482.504	4.083.338
23	044	Kementerian KUKM	28.098.410	(140.492)	27.957.918	48.958.800
24	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	24.000.000	(120.000)	23.880.000	.
25	054	Badan Pusat Statistik	16.452.257.474	(16.190.794.280)	261.463.194	362.276.673
26	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	-	-	-	36.090.000
27	056	Badan Pertanahan Nasional	57.600.000	(3.258.000)	54.342.000	58.301.770
28	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	459.093.088	(2.295.466)	456.797.622	194.576.406
29	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	681.930.564	(3.409.653)	678.520.911	44.565.702
30	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	29.285.148	(146.426)	29.138.722	.
31	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	19.000.000	(15.000.000)	4.000.000	17.250.000
32	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.347.250	(6.736)	1.340.514	.
33	077	Mahkamah Konstitusi	14.880.000	(74.400)	14.805.600	.
34	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	104.199.992	(521.000)	103.678.992	52.380.607
35	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	1.838.025.728	(275.936.097)	1.562.089.631	4.217.591.028
36	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	-	-	-	21.340.008
37	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.200.000	(6.000)	1.194.000	2.400.000
38	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	11.304.000	(56.520)	11.247.480	7.200.000
39	084	Badan Standardisasi Nasional	397.413.000	(1.987.065)	395.425.935	.
40	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	6.000.000	(30.000)	5.970.000	6.000.000
41	086	Lembaga Administrasi Negara	-	-	-	1.553.078.099
42	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.964.288	(14.821)	2.949.467	.
43	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.648.114.290	(8.240.571)	1.639.873.719	11.835.000
44	090	Kementerian Perdagangan	363.589.208	(333.443.693)	30.145.515	399.900.208
45	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	-	-	-	9.469.148
46	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	13.200.000	(66.000)	13.134.000	.
47	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	54.847.998	(274.239)	54.573.759	170.498.732
48	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	178.941.115	(178.941.115)	-	173.000.207
49	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	31.696.201	(158.481)	31.537.720	.
50	999.08	Belanja Lain-lain	-	-	-	242.297.208
TOTAL			78.975.494.772	(69.955.682.840)	9.019.811.932	60.470.939.992

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)				
No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	31 Desember 2012 (Audited)	31 Desember 2011 (Audited)
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2.881.355.431	2.004.238.360
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	14.890.423.697	14.613.978.819
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	24.539.681.115	14.149.867.432
4	005	Mahkamah Agung	8.996.475.335	12.794.906.024
5	006	Kejaksaan Agung	160.148.509.223	278.962.662.823
6	007	Sekretariat Negara	203.336.908.519	194.626.516.842
7	007	BLU Sekretariat Negara	74.258.049.593	74.100.536.302
8	010	Kementerian Dalam Negeri	385.938.241.128	31.310.707.268
9	011	Kementerian Luar Negeri	41.167.550.689	73.281.389.166
10	012	Kementerian Pertahanan	44.647.358.307.542	46.209.249.007.353
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	324.101.005.634	274.318.672.069
12	015	Kementerian Keuangan	284.672.873.440	282.731.013.941
13	015	BLU Kementerian Keuangan	913.269.070	1.107.526.185
14	018	Kementerian Pertanian	905.627.537.236	148.145.904.916
15	018	BLU Kementerian Pertanian	17.214.862.186	10.992.397.374
16	019	Kementerian Perindustrian	39.520.592.845	6.169.596.666
17	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	819.945.422.944	397.942.386.202
18	022	Kementerian Perhubungan	154.789.258.848	749.249.628.830
19	022	BLU Kementerian Perhubungan	1.305.581.206	1.170.208.683
20	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	200.038.773.429	143.290.602.535
21	023	BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	195.413.139.998	147.733.438.587
22	024	Kementerian Kesehatan	982.793.939.244	490.573.034.841
23	024	BLU Kementerian Kesehatan	414.626.580.637	339.699.336.087
24	025	Kementerian Agama	80.889.655.702	61.710.862.838
25	025	BLU Kementerian Agama	4.068.412.628	3.632.598.518
26	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.044.362.305	167.195.865.597
27	026	BLU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	534.944.407	603.425.378
28	027	Kementerian Sosial	307.581.276.149	265.005.062.599
29	029	Kementerian Kehutanan	102.210.748.516	27.257.932.644
30	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	335.432.858.964	745.794.093.746
31	033	Kementerian Pekerjaan Umum	397.247.031.751	401.248.691.555
32	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	399.328.494	148.727.855
33	035	Kemenko Bidang Perekonomian	1.072.644.674	897.875.501
34	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	909.558.824	624.294.167
35	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	93.444.658.629	150.587.198.880
36	041	Kementerian BUMN	1.915.538.403	1.352.572.937
37	042	Kementerian Riset dan Teknologi	16.103.260.628	8.288.334.452
38	043	Kementerian Lingkungan Hidup	31.017.567.337	17.284.283.255
39	044	Kementerian KUKM	151.081.644	280.780.075
40	044	BLU Kementerian KUKM	690.774.025	437.460.065
41	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	1.885.079.937	3.036.142.921
42	048	Kementerian PAN	812.707.447	664.284.347
43	050	Badan Intelijen Negara	2.991.965.980	3.273.027.297
44	051	Lembaga Sandi Negara	6.527.651.935	9.671.455.164
45	052	Dewan Ketahanan Nasional	25.513.700	2.414.500
46	054	Badan Pusat Statistik	18.257.177.113	18.293.548.809
47	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	3.419.627.611	1.535.774.403
48	056	Badan Pertanahan Nasional	61.046.164.797	55.673.263.969
49	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	448.464.020	1.411.256.784
50	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	51.655.136.288	36.273.736.429
51	059	BLU Kementerian Komunikasi dan Informatika	11.143.402.700	11.179.209.616
52	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	2.514.597.356.111	2.458.580.229.680
53	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	78.905.931.172	63.592.759.532
54	064	Lembaga Ketahanan Nasional	44.665.005	358.844.130
55	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	9.862.079.965	6.150.770.586
56	066	Badan Narkotika Nasional	18.026.512.814	18.551.276.514
57	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	70.668.031.896	12.310.609.780
58	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	632.375.797.484	666.545.768.411
59	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	84.120.934	63.402.986

PERSEDIAAN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

60	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	21.465.620.019	23.246.417.366
61	076	Komisi Pemilihan Umum	401.403.738.376	485.017.642.483
62	077	Mahkamah Konstitusi	1.260.238.329	1.475.252.202
63	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	813.780.988	595.620.672
64	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	6.554.603.435	5.746.377.474
65	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	56.944.602.898	55.993.169.179
66	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	11.653.945.045	11.082.574.374
67	081	BLU Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	629.120	10.759.155
68	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	34.885.205.578	23.197.781.964
69	082	BLU Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	119.383.110	94.270.840
70	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	133.306.056.181	131.034.968.365
71	084	Badan Standardisasi Nasional	299.852.579	150.922.750
72	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	681.201.740	789.995.836
73	086	Lembaga Administrasi Negara	1.929.728.129	1.566.980.318
74	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	670.406.839	864.181.177
75	088	Badan Kepegawaian Negara	14.097.031.747	10.229.132.916
76	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	7.385.810.532	5.864.852.211
77	090	Kementerian Perdagangan	5.832.728.260	8.388.960.571
78	091	Kemen Perumahan Rakyat	911.749.448.150	151.612.155.419
79	091	BLU Kemen Perumahan Rakyat	12.999.600	34.155.000
80	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	11.286.179.408	72.788.130.273
81	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	26.135.356.185	12.190.358.475
82	094	BRR NAD - Nias	76.642.906.311	78.951.123.713
83	095	Dewan Perwakilan Daerah	2.247.400.031	1.572.238.972
84	100	Komisi Yudisial	824.138.257	945.879.061
85	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	475.216.786.893	355.460.776.110
86	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	54.820.922.799	70.078.320.865
87	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	132.222.804	3.431.763
88	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	1.322.006.083	1.996.296.501
89	107	Badan SAR Nasional	19.306.830.535	8.599.198.546
90	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1.205.184.714	1.140.552.598
91	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	45.377.000	9.408.500
92	110	Ombudsman Republik Indonesia	140.936.150	69.182.560
93	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	636.190.150	452.272.208
94	112	BLU Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	12.577.082.111	-
95	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	4.928.250	-
96	114	Sekretariat Kabinet	1.034.256.952	-
97	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	67.784.000	-
98	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	6.986.630.375	-
99	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	8.072.215.335	-
100	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	3.321.624.103	-
101	999.07	Belanja Subsidi	-	4.841.100.000
102	999.08	Belanja Lain-lain	4.892.498.398.336	2.571.016.619.518
TOTAL			62.016.561.796.415	59.214.846.453.160

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2012
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESEHATAN	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
					1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8 = (6-7)	9	10 = (8-9)	11	12 = 10+11
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2012	Sehat A	866.615	815.768	50.847	21.403	23.338	48.912	-	48.912	12.478	36.434	-	36.434
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	1.487.242	1.385.329	101.914	51.259	163.080	(9.907)	88.065	(97.972)	7.989	(105.961)	137.234	31.273
3		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2012	Sehat AAA	5.963.806	4.819.094	1.144.712	84.899	-	1.229.611	65.022	1.164.590	340.898	823.691	(2.745)	820.946
4		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2012	Sehat AAA	5.419.615	4.248.808	1.170.807	146.147	130.877	1.186.077	191.249	994.828	299.168	695.661	-	695.661
5		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2012	Sehat AA	5.024.326	4.611.226	413.100	46.270	39.276	420.094	-	420.094	107.812	312.282	-	312.282
6		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2012	Sehat AAA	2.198.966	2.000.986	197.980	41.155	40.663	198.472	-	198.472	53.595	144.877	-	144.877
7		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2012	Sehat A	4.360.371	4.082.413	277.957	120.699	335.654	63.002	-	63.002	8.670	54.333	-	54.333
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2012	Sehat AA	1.832.164	1.658.179	173.984	2.909	-	176.894	10.961	165.933	47.282	118.651	-	118.651
9		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2012	Sehat AA	1.392.423	1.103.069	289.354	78.975	48.604	319.725	68.069	251.656	81.971	169.685	(74)	169.611
10		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2012	Sehat AAA	2.145.471	1.660.074	485.397	81.830	45.003	522.225	31.385	490.840	127.372	363.468	15.866	379.334
11		PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2012	Sehat AA	2.100.560	1.881.143	219.417	35.326	61.021	193.722	-	193.722	59.648	134.074	-	134.074
12		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2012	Sehat AA	1.130.258	895.148	235.110	15.473	78.261	172.321	-	172.321	43.668	128.653	-	128.653
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2012	Sehat A	2.953.173	2.807.742	145.431	19.997	105.099	60.329	-	60.329	21.838	38.491	-	38.491
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2012	Kurang Sehat BB	504.141	469.772	34.369	64.608	42.174	56.803	41.849	14.954	2.463	12.491	-	12.491
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Audited 2012	Sehat AA	4.542.736	4.039.673	503.063	78.514	146.490	435.087	-	435.087	128.229	306.858	-	306.858
16	Kehutanan	Perum Perhutani	Audited 2012		3.555.951	3.367.759	188.192	120.248	44.518	263.922	-	263.922	66.854	197.068	-	197.068
17		PT Inhutani I	Audited 2012	Sehat A	138.877	133.489	5.388	146.447	45.514	108.321	-	106.321	-	106.321	-	106.321
18		PT Inhutani II	Audited 2012	Kurang Sehat BB	52.061	70.715	(18.654)	11.863	7.546	(14.336)	-	(14.336)	(495)	(13.841)	(1.042)	(14.883)
19		PT Inhutani III	Audited 2012	Kurang Sehat B	7.168	13.339	(6.171)	6.832	4.762	(4.101)	-	(4.101)	(570)	(3.531)	-	(3.531)
20		PT Inhutani IV	Audited 2012	Sehat A	28.944	35.440	(6.496)	8.232	926	810	-	810	(46)	856	-	856
21	Perikanan	PT Inhutani V	Audited 2012	Sehat A	281	5.347	(5.066)	38.197	23.665	9.465	-	9.465	(40)	9.505	-	9.505
22		PT Perikanan Nusantara	Audited 2012	Sehat A	68.559	73.975	(5.416)	88.867	52.415	31.036	-	31.036	115	30.921	-	30.921
23		Perum Prasarana Perikanan Samudera	Audited 2012		168.525	166.567	1.958	2.171	1.265	2.864	943	1.921	(1.074)	2.995	-	2.995
24	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	Audited 2012	Sehat AA	27.685.978	27.098.491	587.487	767.045	1.088.191	266.341	789.326	(522.985)	(149.638)	(373.347)	-	(373.347)
25		PT Sang Hyang Seri	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	1.914.148	1.892.748	21.400	31.465	149.531	(96.665)	-	(96.665)	(23.465)	(73.200)	-	(73.200)
26		PT Pertani	Audited 2012	Sehat AA	1.335.043	1.332.993	2.050	15.515	52.697	(35.132)	-	(35.132)	(1.921)	(33.210)	-	(33.210)
27	Pupuk	PT Pupuk Indonesia	Audited 2012	Sehat AAA	51.261.674	43.672.604	7.589.070	1.041.607	705.274	7.925.403	1.128.141	6.797.262	1.738.482	5.058.780	66.920	5.125.699
28	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	Audited 2012	Sehat AAA	283.295	220.859	62.436	8.768	3.443	67.762	-	67.762	15.378	52.384	(929)	51.455
29		Perum Jasa Tirta II	Audited 2012	Sehat AA	403.990	345.080	58.910	-	-	58.910	-	58.910	6.901	52.009	-	52.009
30	Pertambangan	PT Antam Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	10.449.886	9.554.021	895.864	3.352.154	118.022	4.129.996	234.501	3.895.495	902.379	2.993.116	(4.091)	2.989.025
31		PT Timah Tbk	Audited 2012	Sehat AA	7.822.560	7.139.536	683.024	45.443	51.523	676.944	30.305	646.639	215.051	431.588	4.110	435.698
32		PT Bukit Asam Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	11.788.422	8.194.912	3.593.510	327.637	5.914	3.915.233	3.646	3.911.587	1.002.166	2.909.421	(640.347)	2.269.074
33		PT Sarana Karya	Audited 2012	Sehat AA	89.128	60.465	28.664	1.772	5.678	24.757	-	24.757	6.613	18.144	-	18.144
34	Energi	PT Pertamina	Audited 2012	Sehat AA	685.839.335	639.769.347	46.069.988	3.944.325	391.828	49.622.485	3.184.360	46.438.125	19.693.709	26.744.416	(137.005)	26.607.411
35		PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	25.121.776	15.273.041	9.848.734	1.464.051	-	11.312.785	208.646	11.104.139	2.253.611	8.850.528	7.326	8.857.854
36		PT Energy Management Indonesia	Audited 2012		28.690	29.054	(364)	307	2.016	(2.074)	-	(2.074)	-	(2.074)	-	(2.074)
37		PT Batan Teknologi	Audited 2012	Kurang Sehat BB	23.458	35.725	(12.267)	368	782	(12.681)	-	(12.681)	(3.134)	(9.547)	-	(9.547)
38	Industri semen	PT Semen Indonesia Tbk	Audited 2012		19.598.248	13.489.234	6.109.014	313.381	134.941	6.287.454	-	6.287.454	1.360.814	4.926.640	(1.848)	4.924.792
39		PT Semen Baturaja	Audited 2012	Sehat AAA	1.098.834	731.701	367.133	28.350	-	395.483	61	395.421	96.909	298.513	-	298.513
40		PT Semen Kupang	Unaudited 2012		18.161	3.153	15.007	84	25.358	(10.267)	-	(10.267)	-	(10.267)	-	(10.267)
41	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Audited 2012		2.985.883	2.968.312	17.571	97.187	19.643	95.115	55.445	39.670	(403)	40.073	(58.722)	(18.649)
42		PT PAL Indonesia	Audited 2012	Kurang Sehat BB	574.200	572.058	2.142	61.714	152.317	(88.461)	154.950	(243.411)	15.501	(258.913)	(3.667)	(262.579)
43		PT Pindad	Audited 2012	Sehat AA	1.508.058	1.377.806	130.252	53.447	77.594	106.105	-	106.105	29.193	76.912	-	76.912
44		PT Dahana	Audited 2012	Sehat A	810.125	807.175	2.949	4.385	-	7.334	-	7.334	(6.718)	14.052	8.312	22.364
45	Ind. Baja, Manufaktur, & Rekay	PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	22.119.593	22.365.753	(246.160)	529.007	39.628	243.220	392.824	(149.605)	39.541	(189.145)	-	(189.145)
46		PT INKA	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	634.056	821.941	(187.885)	-	742	(188.627)	56.213	(244.840)	(425)	(244.415)	295.351	50.935
47		PT Barata Indonesia	Audited 2012	Sehat A	885.900	840.685	45.216	87.378	76.455	56.138	12.213	43.926	10.544	33.382	-	33.382
48		PT Boma Bisma Indra	Unaudited 2012	Kurang Sehat BB	162.286	173.519	(11.233)	53.866	6.682	35.951	9.768	26.183	-	26.183	-	26.183
49	Industri Dok dan Perkapalan	PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2012	Kurang Sehat B	750.249	752.005	(1.756)	54.954	34.632	18.566	10.240	8.326	(1.630)	9.956	-	9.956
50		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Audited 2011	Kurang Sehat B	365.542	331.968	33.574	4.140	12.677	25.037	9.654	15.384	5.542	9.841	-	9.841
51		PT Industri Kapal Indonesia	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	50.425	46.997	3.428	651	1.093	2.986	-	2.986	222	2.764	-	2.764
52	Aneka Industri	PT Industri Sandang Nusantara	Audited 2012	Kurang Sehat B	65.386	144.835	(79.449)	251.174	11.222	160.502	-	160.502	4.102	156.401	(44.279)	112.121
53		PT Garam	Audited 2012	Sehat A	215.760	195.763	19.996	5.862	5.744	20.114	6.012	14.102	1.371	12.731	-	12.731
54		PT Primissima	Audited 2012	Kurang Sehat BB	128.498	143.753	(15.254)	-	3.382	(18.636)	-	(18.636)	1.731	(20.367)	-	(20.367)
55		PT Iglas	Audited 2012	Tidak Sehat CC	310.027	302.453	7.573	54.111	-	61.685	26.053	35.631	(5.254)	40.885	-	40.885

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2012
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH**

(Rp Juta)																
56		PT Industri Soda Indonesia (dalam Likuidasi)	Audited 2005		33.718	51.344	(17.626)	11.790	734	(6.570)	15.435	(22.005)	432	(22.437)		(22.437)
57	Ind. Kertas, Percetakan dan Penerbitan	Perum Peruri	Audited 2012	Sehat A	1.390.783	1.345.153	45.630	51.352	7.142	89.840	63.618	26.222	2.725	23.497		23.497
58		PT Balai Pustaka	Unaudited 2012		77.544	78.859	685	1.667	2.931	(579)	-	(579)	(1.385)	786		786
59		Perum PNRI	Audited 2012	Sehat AA	1.143.739	1.087.781	55.958	4.400	9.638	50.719	-	50.719	9.925	40.794		40.794
60		PT Kertas Leces	Audited 2012	Tidak Sehat CCC	42.487	88.062	(45.575)	24.275	104.008	(125.309)	7.000	(132.309)	(35.735)	(96.574)	105.664	9.090
61		PT Kertas Kraft Aceh	Audited 2012	Tidak Sehat C	-	27.284	(27.284)	-	37.273	(64.557)	-	(64.557)	-	(64.557)	-	(64.557)
62	Industri Farmasi	PT Indofarma Tbk	Audited 2012	Sehat A	1.156.050	1.072.741	83.309	-	651	82.658	20.926	61.732	19.347	42.385	-	42.385
63		PT Kimia Farma Tbk	Audited 2012	Sehat A	3.734.241	3.471.674	262.568	24.135	1.546	285.157	6.872	278.284	72.520	205.764	-	205.764
64		PT Bio Farma	Audited 2012	Sehat AAA	1.437.642	948.354	489.287	53.159	21.346	521.100	0	521.100	135.208	385.892		385.892
65	Telekomunikasi dan Media	PT Telkom Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	77.143.000	52.031.000	25.112.000	3.144.000	4.028.000	24.228.000	-	24.228.000	5.866.000	18.362.000	26.000	18.388.000
66		PT INTI	Audited 2012	Sehat A	1.227.700	1.165.202	62.498	12.089	24.261	50.326	20.020	30.306	13.617	16.689	-	16.689
67		PT LEN Industri	Audited 2012	Sehat AA	2.334.637	2.155.875	178.762	11.113	33.400	156.474	40.475	115.999	56.400	67.792	2.527	70.318
68		Perum LKBN Antara	Audited 2012	Sehat A	170.988	109.760	61.228	1.678	61.465	1.441	-	1.441	1.116	325	-	325
69		Perum Produksi Film Negara	Unaudited 2012	n/a	6.062	7.814	(1.752)	392	0	(1.360)	-	(1.360)	-	(1.360)	-	(1.360)
70	Listrik	PT Perusahaan Listrik Negara	Audited 2012	Sehat AA	232.656.456	203.115.450	29.541.006	2.041.295	5.938.482	25.643.819	24.612.091	1.031.728	(2.173.796)	3.205.524		3.205.524
71	Pelabuhan	PT Pelabuhan Indonesia I	Audited 2012	Sehat AA	1.561.006	950.319	610.687	39.213	126.535	523.366	46.754	476.611	121.579	355.032	-	355.032
72		PT Pelabuhan Indonesia II	Audited 2012	Sehat AA	5.308.299	3.744.798	1.563.501	966.961	84.689	2.445.772	-	2.445.772	495.009	1.950.763		1.950.763
73		PT Pelabuhan Indonesia III	Audited 2012	Sehat AA	4.320.552	2.713.402	1.607.150	112.826	22.933	1.697.042	6.233	1.690.809	442.556	1.248.254		1.248.254
74		PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2012	Sehat AA	1.259.341	849.297	410.043	49.323	35.585	423.781	-	423.781	106.785	316.997		316.997
75	Bandar Udara	PT Angkasa Pura I	Audited 2012	Sehat AA	3.093.536	2.406.987	686.549	302.894	183.117	806.326	-	806.326	144.083	662.243	56.163	718.406
76		PT Angkasa Pura II	Audited 2012	Sehat AAA	3.997.060	2.528.741	1.468.319	248.770	74.904	1.642.184	-	1.642.184	422.917	1.219.268	7.835	1.227.103
77	Angkutan Darat, Udara dan Laut	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2012	Sehat A	6.966.237	6.268.598	697.639	20.881	51.147	667.372	71.468	595.904	170.799	425.105		425.105
78		Perum PPD	Unaudited 2012		76.870	75.575	1.295	3.242	1.524	3.013	-	3.013	3.013			3.013
79		Perum DAMRI	Audited 2012	Sehat AA	745.176	726.003	19.173	12.891	1.489	30.576	-	30.576	10.790	19.786		19.786
80		PT Merpati Nusantara Airlines	Unaudited 2012		1.752.044	2.334.488	(582.444)	(7.339)	389.541	(979.324)	-	(979.324)	-	(979.324)		(979.324)
81		PT Garuda Indonesia	Audited 2012	Sehat AA	33.578.775	31.953.518	1.625.257	83.968	243.925	1.465.300	-	1.465.300	393.453	1.071.848	334.260	1.406.108
82	Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan	PT PELNI	Audited 2012	Sehat A	2.738.567	2.643.876	94.690	-	31.931	62.760	-	62.760	38.562	24.198		24.198
83		PT Angkutan Sungai Danau Penyeberangan	Audited 2012	Sehat AA	1.404.208	1.254.612	149.595	43.987	4.655	188.927	-	188.927	29.219	159.707		159.707
84		PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2012		120.288	162.253	(41.965)	18.079	42.985	(66.870)	3.805	(70.676)	1.886	(72.561)		(72.561)
85	Konstruksi	PT Amarta Karya	Audited 2012	Sehat AA	315.303	298.176	17.127	1.213	144	18.196	2.504	15.692	6.172	9.520		9.520
86		PT Adhi Karya Tbk	Audited 2012	Sehat AA	7.715.034	6.671.815	1.043.220	24.694	558.374	509.540	86.224	423.315	209.998	213.318	334	213.651
87		PT Istaka Karya	Unaudited 2010	n/a	406.225	384.444	21.781	6.076	295	27.562	20.131	7.431	5.430	2.001		2.001
88		PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2012		8.003.873	7.293.048	710.825	176.786	128.476	759.135	213.743	545.392	235.709	309.683	-	309.683
89		PT Hutama Karya	Audited 2012	Sehat AA	5.079.014	4.757.037	321.976	16.547	20.658	317.866	57.451	260.415	152.555	107.860		107.860
90		PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2012		10.013.591	9.168.174	845.417	39.348	40.620	844.144	36.228	807.916	302.791	505.125	3.639	508.764
91		Perum Perumnas	Audited 2012	Sehat A	1.060.276	876.960	183.315	24.526	84.792	123.050	-	123.050	42.425	80.625	-	80.625
92		PT Brantas Abipraya	Audited 2012	Sehat AA	923.407	883.493	39.914	90.010	17.674	112.251	39.953	72.297	21.460	50.837		50.837
93	Konsultan Konstruksi	PT Waskita Karya, Tbk	Audited 2012		8.900.993	8.360.878	540.115	107.230	17.846	629.499	169.586	459.913	205.882	254.031	332	254.363
94		PT Bina Karya	Audited 2011	Sehat A	54.121	49.719	4.402	3.194	679	6.917	1.086	5.831	1.162	4.669		4.669
95		PT Indah Karya	Audited 2012	Sehat A	23.271	21.948	1.323	434	1.076	680	-	680	-	680		680
96		PT Yodya Karya	Audited 2011	Sehat AA	121.715	110.080	11.634	850	3.524	8.960	-	8.960	3.833	5.127		5.127
97		PT Indra Karya	Unaudited 2012	Sehat AA	93.355	86.729	6.626	740	447	6.919	1.461	5.458	2.992	2.466		2.466
98	Kawasan	PT Virama Karya	Audited 2011	Sehat AAA	68.188	59.593	8.595	289	4.778	4.106	-	4.106	1.649	2.457		2.457
99		PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2012	Sehat A	308.121	239.247	68.874	11.447	46.695	33.626	-	33.626	19.580	14.046		14.046
100		PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2012	Sehat AA	41.506	20.252	21.254	2.332	13	23.574	-	23.574	-	23.574	1.238	24.811
101	Pergudangan	PT Kawasan Industri Medan	Audited 2011	Sehat AA	100.602	53.073	47.529	944	10.843	37.630	-	37.630	3.321	34.309		34.309
102		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2012	Sehat AA	26.095	15.403	10.692	1.387	16	12.063	-	12.063	1.686	10.377	-	10.377
103		PT PDIP Batam	Unaudited 2012	Sehat A	66.383	65.109	1.274	1.757	204	2.827	-	2.827	707	2.120		2.120
104	Perbankan	PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2012		271.254	270.772	482	33.325	1.036	32.771	-	32.771	15.073	17.698	-	17.698
105		PT Bhandha Ghara Reksha	Audited 2012	Sehat AAA	641.204	574.665	66.539	2.522	2.591	66.469	-	66.469	17.084	49.386		49.386
106	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2012	Peringkat Komposit(PK - 1 (Sangat Sehat)	48.214.937	18.521.273	29.693.664	13.159.789	22.349.185	20.504.268	-	20.504.268	4.460.650	16.043.618	212.963	16.256.581
107		PT Bank BRI Tbk	Audited 2012	PK - 1,31 (Sangat Sehat)	49.610.421	13.126.655	36.483.766	9.566.766	22.190.960	23.859.572	-	23.859.572	5.172.192	18.687.380	(6.030)	18.681.350
108		PT Bank BNI Tbk	Audited 2012	PK - 2 (Sehat)	31.150.328	22.509.305	8.641.023	258.539	-	8.899.562	-	8.899.562	1.851.200	7.048.362	154.242	7.202.604
109	Asuransi	PT Bank BTN Tbk	Audited 2012	Sehat	9.390.073	7.519.104	1.870.969	-	7.767	1.863.202	-	1.863.202	499.240	1.363.962	(6.123)	1.357.839
110		PT JIWasRAYA	Audited 2012	Sehat AA	6.702.266	6.448.266	254.000	39.986	4.357	289.629	-	289.629	17.409	272.220	-	272.220

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN TAHUN 2012
PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

(Rp Juta)																	
111		PT ASABRI	Audited 2012	Sehat AA	1.731.137	1.587.823	143.314	5.174	-	148.488	-	148.488	183	148.305	-	148.305	
112		PT JAMSOSTEK	Audited 2012	Sehat AA	8.022.208	5.648.934	2.373.274	121.062	-	2.494.336	-	2.494.336	312.394	2.181.942	17.408	2.199.350	
113		PT TASPEN	Audited 2012	Sehat A	16.749.287	16.353.266	396.021	53.852	78	449.795	-	449.795	6.152	443.643	-	443.643	
114		PT ASKES	Audited 2012	Sehat AA	1.350.912	1.226.287	124.625	1.177.186	241.156	1.060.655	-	1.060.655	86.797	973.858	-	973.858	
115		PT JASINDO	Audited 2012	Sehat AA	1.516.544	1.199.523	317.020	8.843	-	325.864	-	325.864	64.022	261.842	15.921	277.763	
116		PT RUI	Audited 2012	-	1.101.966	1.083.230	18.736	101.921	13.950	106.707	-	106.707	12.392	94.314	3.084	97.399	
117		PT Jasa Raharja	Audited 2012	Sehat AAA	5.054.224	2.967.004	2.087.219	11.166	-	2.098.385	-	2.098.385	398.625	1.699.761	-	1.699.761	
118		PT ASEI	Audited 2012	Sehat AAA	333.328	242.869	90.459	3.504	-	93.963	-	93.963	1.164	92.799	2.510	95.308	
119		PT ASKRINDO	Audited 2012	Sehat AA	892.804	685.435	207.369	44.627	8.979	243.017	-	243.017	(3.699)	246.716	-	246.716	
120	Pembiayaan	Perum JAMKRINDO	Audited 2012	Sehat AA	1.399.063	1.152.957	246.106	316.168	-	562.274	-	562.274	52.757	509.517	8.153	517.669	
121		PT PPA	Audited 2012	Sehat AA	2.368.554	2.004.700	363.854	80.713	72.822	371.745	760	370.985	50.109	320.876	160.760	481.636	
122		PT Danareksa	Audited 2012	Sehat AAA	514.197	255.072	259.125	50.299	-	309.424	173.928	135.496	27.511	107.985	-	107.985	
123		PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2012	Sehat AAA	860.570	843.710	16.860	54.047	-	70.907	-	70.907	27.363	43.545	-	43.545	
124		Perum Pegadaian	Audited 2012	Sehat AAA	5.833.075	3.967.112	1.865.963	100.544	2.688	1.963.819	-	1.963.819	519.115	1.444.705	-	1.444.705	
125		PT PANN Multi Finance	Audited 2012	Sehat AAA	279.739	206.535	73.204	65.106	22.055	116.254	-	116.254	29.067	87.187	-	87.187	
126		PT Bahana PUI	Audited 2012	Sehat AAA	619.970	522.589	97.381	25.274	131.478	(8.824)	-	(8.824)	30.996	(39.820)	280.404	240.584	
127	Perdagangan	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia	Unaudited 2012		2.980.012	2.808.810	171.201	92.074	191.835	71.440	-	71.440	14.349	57.090	-	57.090	
128		PT Sarinah	Audited 2012	Sehat AA	276.968	266.038	10.930	24.328	6.198	29.059	-	29.059	3.268	25.792	-	25.792	
129	Sertifikasi	PT Surveyor Indonesia	Audited 2012	Sehat (AAA)	795.896	767.537	103.899	25.915	24.426	105.388	40	105.348	31.961	73.387	368	73.755	
130		PT Sucofindo	Audited 2012	Sehat AA	1.671.648	1.538.671	132.977	21.183	90.187	63.972	-	63.972	4.693	59.279	-	59.279	
131		PT BKI	Audited 2012	Sehat (AAA)	419.176	330.865	88.312	7.481	1.334	94.458	-	94.458	27.020	67.438	-	67.438	
132	Perhotelan dan Pariwisata	PT Hotel Indonesia Natour	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	264.842	284.896	(20.054)	20.589	-	534	-	534	(2.522)	3.056	-	3.056	
133		PT TWC PBR	Unaudited 2012	Sehat AAA	167.462	127.610	39.852	5.548	5.656	39.744	-	39.744	10.298	29.446	-	29.446	
134		PT Pengembangan Pariwisata Bali	Audited 2012	Sehat A	108.050	69.008	39.041	22.387	12.347	49.081	-	49.081	406	48.675	1.309	49.984	
135	Lain-lain	PT Berdikari	Unaudited 2012	Kurang Sehat BB	526.585	516.751	9.834	20.558	5.850	24.542	12.514	12.028	2.957	9.072	-	9.072	
136		PT Jasa Marga Tbk	Audited 2012		9.070.219	6.094.983	2.975.236	-	3.833	2.971.403	916.146	2.055.257	519.445	1.535.812	534	1.536.346	
137		PT Pengerukan Indonesia	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	216.726	246.275	(29.549)	5.212	108.325	(132.662)	-	(132.662)	(14.673)	(117.988)	-	(117.988)	
138		PT Pos Indonesia	Audited 2012	Sehat A	3.335.875	3.162.083	173.793	68.078	29.539	212.332	-	212.332	39.346	172.985	52	173.037	
139		PT Kliring Berjangka Indonesia	Audited 2012	Sehat AAA	49.325	33.016	16.309	27.098	388	43.019	-	43.019	5.665	37.354	(273)	37.080	
140		PT Survai Udara Panas	Unaudited 2010		500	2.198	(1.698)	19	468	(2.147)	-	(2.147)	647	(2.794)	-	(2.794)	
141		Perum LPPNPI	Pendirian		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
GRAND TOTAL					141	1.569.560.269	1.330.980.872	238.654.937	47.320.190	62.649.641	223.325.486	33.456.353	189.869.133	50.467.036	139.410.289	1.023.641	140.433.930

IKHTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2012

(Rp. Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS LAPORAN	KESIHATAN	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA	
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=13x16	
1	Perkebunan	PT Perkebunan Nusantara I	Audited 2012	Sehat A	202.636	646.329	249.570	1.098.536	485.521	422.491	908.011	120.000	8.408	-	25.682	36.434	190.524	-	190.524	100%	190.524	
2		PT Perkebunan Nusantara II	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	479.827	2.091.679	193.746	2.765.252	1.087.219	1.387.119	2.474.338	327.606	-	-	-	-	(36.692)	290.914	-	290.914	100%	290.914
3		PT Perkebunan Nusantara III	Audited 2012	Sehat AAA	2.318.056	7.560.719	330.153	10.208.927	1.724.099	3.758.393	5.482.492	3.298.110	-	-	-	(25.917)	1.454.119	4.726.312	123	4.726.435	100%	4.726.312
4		PT Perkebunan Nusantara IV	Audited 2012	Sehat AAA	2.061.344	7.441.928	-	9.503.272	1.664.458	3.395.313	5.059.771	2.942.116	-	-	-	-	1.261.175	4.203.291	240.210	4.443.501	100%	4.203.291
5		PT Perkebunan Nusantara V	Audited 2012	Sehat AA	1.045.092	3.461.522	167.530	4.674.144	1.216.272	1.594.604	2.810.876	1.313.322	-	-	-	-	549.946	1.863.268	-	1.863.268	100%	1.863.268
6		PT Perkebunan Nusantara VI	Audited 2012	Sehat AAA	542.075	1.639.466	-	2.181.541	561.592	687.106	1.248.698	653.293	-	-	-	-	915.953	16.890	932.843	100%	915.953	
7		PT Perkebunan Nusantara VII	Audited 2012	Sehat A	2.205.874	4.953.875	6.156	7.165.905	1.768.447	3.862.768	5.631.215	365.000	861.223	-	8.889	299.578	1.534.690	-	1.534.690	100%	1.534.690	
8		PT Perkebunan Nusantara VIII	Audited 2012	Sehat AA	769.336	2.252.591	36.781	3.058.709	639.402	1.256.458	1.895.860	270.000	-	-	(5.103)	897.136	1.162.033	816	1.162.849	100%	1.162.033	
9		PT Perkebunan Nusantara IX	Audited 2012	Sehat AA	820.060	1.322.894	66.683	2.209.627	1.242.578	183.114	1.425.692	598.261	-	-	-	185.675	783.936	-	783.936	100%	783.936	
10		PT Perkebunan Nusantara X	Audited 2012	Sehat AAA	1.656.921	1.037.844	-	2.694.765	987.156	290.427	1.277.584	870.596	-	-	-	10.062	533.040	3.484	1.417.182	100%	1.413.698	
11		PT Perkebunan Nusantara XI	Audited 2012	Sehat AA	822.118	876.144	98.831	1.797.092	853.712	222.288	1.076.000	165.000	-	-	-	5	556.087	721.092	-	721.092	100%	721.092
12		PT Perkebunan Nusantara XII	Audited 2012	Sehat AA	378.281	1.217.322	322	1.596.926	354.180	422.603	776.783	572.907	-	-	-	-	243.499	816.406	2.737	819.143	100%	816.406
13		PT Perkebunan Nusantara XIII	Audited 2012	Sehat A	1.286.296	3.332.509	41.628	4.660.434	2.059.535	1.259.096	3.318.631	1.029.738	-	-	205.950	43.228	1.278.915	62.888	1.341.803	100%	1.278.915	
14		PT Perkebunan Nusantara XIV	Audited 2012	Kurang Sehat BB	402.890	580.101	10.738	993.730	757.191	699.955	1.457.147	235.000	-	-	-	(698.417)	(463.417)	-	(463.417)	100%	(463.417)	
15		PT Rajawali Nusantara Indonesia	Audited 2012	Sehat AA	3.016.250	3.374.963	68.357	6.459.570	2.307.798	2.597.335	4.905.123	352.425	-	-	-	933.172	1.285.597	268.850	1.554.447	100%	1.285.597	
16	Hutanan	Perum Perhutani	Audited 2012	Sehat A	1.766.156	677.705	-	2.443.861	478.565	135.609	615.174	700.000	-	-	-	831.300	202.150	-	1.828.887	100%	1.833.450	
17		PT Inhutani I	Audited 2012	Sehat A	174.120	144.891	6.947	325.958	63.641	97.959	161.600	450.333	16.001	-	-	14.805	(316.781)	164.358	-	164.358	100%	164.358
18		PT Inhutani II	Audited 2012	Kurang Sehat BB	36.384	178.596	-	214.981	41.816	69.305	111.121	138.083	6.785	-	-	-	(86.008)	103.859	-	103.859	100%	103.859
19		PT Inhutani III	Audited 2012	Kurang Sehat B	24.796	138.073	-	163.869	3.613	5.601	9.214	324.120	2.302	-	-	103	(171.870)	154.655	-	154.655	100%	154.655
20		PT Inhutani IV	Audited 2012	Sehat A	42.946	19.435	6.071	68.452	5.430	3.425	8.855	92.253	-	-	-	2.301	(34.957)	59.597	-	59.597	100%	59.597
21		PT Inhutani V	Audited 2012	Sehat A	10.204	153.832	12	164.048	127.897	5.586	133.283	132.659	44861	-	-	-	(146.756)	30.764	-	30.764	100%	30.764
22	Perikanan	PT Perikanan Nusantara	Audited 2012	Sehat A	63.114	178.008	80.850	321.972	35.059	130.838	165.896	121.140	-	-	-	-	34.935	156.075	-	156.075	100%	156.075
23		Perum Prasana Perikanan Samudera	Audited 2012	Sehat A	62.839	71.478	1.130	135.448	16.826	33.002	49.828	24.498	16.936	-	34.501	-	9.685	85.620	-	85.620	100%	85.620
24	Penunjang Pertanian	Perum Bulog	Audited 2012	Sehat AA	22.598.410	3.131.700	1.109.572	26.839.682	21.479.235	50.436	21.529.671	6.847.136	-	-	675.251	81.506	(2.293.881)	5.310.012	-	5.310.012	100%	5.310.012
25		PT Sang Hyang Seri	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	1.810.121	225.738	22.885	2.058.745	1.751.051	1.067.719	1.857.847	134.000	-	-	-	140.089	(73.200)	200.897	-	200.897	100%	200.897
26		PT Purnani	Audited 2012	Sehat AA	763.647	151.081	6.939	921.667	682.698	126.923	809.621	51.315	-	-	-	2.489	22.278	112.046	-	112.046	100%	112.046
27	Puguk	PT Puguk Indonesia	Audited 2012	Sehat AAA	35.530.679	16.366.201	-	51.896.880	12.918.590	15.423.721	28.342.311	11.948.054	206.347	-	-	66.890	11.154.976	23.376.267	178.302	23.554.569	100%	23.376.267
28	Jasa Pengairan	Perum Jasa Tirta I	Audited 2012	Sehat AAA	212.778	87.700	103	300.582	62.339	4.825	67.164	15.000	16.701	-	-	-	201.717	233.418	-	233.418	100%	233.418
29		Perum Jasa Tirta II	Audited 2012	Sehat AA	259.182	305.318	-	564.499	70.108	41.405	111.513	164.548	-	-	-	236.429	52.009	452.986	-	452.986	100%	452.986
30	Pertambangan	PT Antam Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	7.646.851	11.999.816	61.874	19.708.541	3.041.406	3.834.819	6.876.225	953.846	8.370	-	-	124.535	11.745.543	12.832.294	22	12.832.316	65%	8.340.991
31		PT Timah Tbk	Audited 2012	Sehat AA	3.929.664	2.171.343	-	6.101.007	959.806	583.001	1.542.807	251.651	-	-	-	13.395	4.172.013	4.557.851	39	4.558.200	65%	2.962.603
32		PT Bukit Asam Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	8.670.070	3.912.798	146.113	12.728.981	1.770.694	2.453.148	4.223.812	1.152.966	30.486	-	-	15.502	7.221.064	8.419.118	86.051	8.505.169	65,02%	5.474.111
33		PT Sarana Karya	Audited 2012	Sehat AA	67.909	2.841	4.809	75.559	2.566	55.260	5.000	7.432	-	-	-	-	7.866	20.298	-	20.298	100%	20.298
34	Energi	PT Pertamina	Audited 2012	Sehat AA	212.987.961	179.611.094	2.733.496	395.332.421	135.060.020	113.358.209	248.418.229	83.090.897	-	-	12.453	(13.405.019)	76.471.056	146.169.187	745.006	146.914.193	100%	146.169.187
35		PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Audited 2012	Sehat AAA	19.183.520	18.996.984	21.425	37.791.930	4.571.487	1.549.842	15.021.081	2.424.151	2.762.100	-	-	(785.670)	16.847.739	21.248.320	1.522.519	22.770.838	56,97%	12.105.168
36		PT Energy Management Indonesia	Audited 2012	Sehat A	27.661	40.585	1.809	70.055	46.882	1.542	48.424	9.100	6.455	-	-	36.465	(30.388)	21.631	-	21.631	100%	21.631
37		PT Batan Teknologi	Audited 2012	Kurang Sehat BB	20.630	4.653	5.408	30.691	19.250	2.658	21.907	27.200	-	-	-	5.821	(24.237)	8.783	-	8.783	100%	8.783
38	Industri semen	PT Semen Indonesia Tbk	Audited 2012	Sehat A	8.231.297	18.293.564	54.223	26.579.084	4.825.205	3.589.025	8.414.230	593.152	1.458.258	-	-	3.976	15.291.927	17.347.313	817.541	18.164.854	51,01%	8.848.098
39		PT Semen Baturaja	Audited 2012	Sehat AAA	659.926	518.008	20.653	1.198.586	171.391	73.057	244.448	640.000	-	-	-	-	314.138	954.138	-	954.138	100,00%	954.138
40		PT Semen Kupang	Unaudited 2012	Sehat A	17.609	608.356	-	625.964	205.964	513.811	719.775	133.713	-	-	-	-	(227.523)	(93.810)	-	(93.810)	61,48%	(57.675)
41	Industri Pertahanan	PT Dirgantara Indonesia	Audited 2012	Sehat A	5.235.587	2.019.644	-	7.255.232	2.676.456	1.992.659	4.669.114	5.604.718	749.745	-	-	1.504.544	(5.272.891)	2.586.117	-	2.586.117	100,00%	2.586.117
42		PT PAL Indonesia	Audited 2012	Kurang Sehat BB	3.103.377	614.944	168.911	3.887.232	2.223.934	1.918.415	4.142.348	1.785.661	600.000	-	-	30.938	(2.671.671)	(255.071)	(44)	(255.071)	100%	(255.071)
43		PT Pindad	Audited 2012	Sehat AA	2.118.401	168.112	232.676	2.519.189	1.547.609	297.475	1.845.084	70.000	597541.6509	-	-	(70.349)	76.913	674.105	-	674.105	100%	674.105
44		PT Dahana	Audited 2012	Sehat A	482.488	466.572	-	949.060	454.687	152.684	607.372	76.090	6.398	-	-	22.047	237.153	341.688	-	341.688	100%	341.688
45	Ind. Baja, Manufaktur, & Reta	PT Krakatau Steel Tbk	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	13.534.654	10.880.036	359.337	24.774.027	12.033.686	1.948.756	13.982.443	7.887.500	1.130.965	-	-	338.131	1.242.363	10.598.959	192.626	10.791.585	80%	8.479.167
46		PT INKA	Audited 2012	Kurang Sehat BBB	770.207	521.487	-	1.291.694	883.364	76.667	960.031	251.843	-	-	-	-	324.054	(250.065)	5.831	331.662	100%	332.832
47		PT Barata Indonesia	Audited 2012	Sehat A	829.268	82.935	82.915	995.119	790.134	86.985	877.119	128.203	15.000	-	-	98.483	(123.686)	118.000	-	118.000	100%	118.000
48		PT Boma Bisma Indra	Audited 2012	Kurang Sehat BB	108.191	52.201	-	160.392	166.390	89.108	255.498	295.372	13.245	-	-	10.427	(414.135)	(95.091)	(16)	(95.107)	100%	(95.091)
49	Industri Dok dan Perkapalan	PT Dok dan Kodja Bahari	Audited 2012	Kurang Sehat B	842.625	508.511	188.588	1.539.742	3.365.680	24.889	3.390.569	76.800	239	-	-	(1.937.241)	9.956	(1.850.446)	-	(1.850.446)	100%	(1.850.446)
50		PT Dok dan Perkapalan Surabaya	Prognosa 2012	Kurang Sehat B	150.854	146.786	8.327	305.967	3													

IKHTISAR PERUSAHAAN NEGARA DAN PENYERTAAN MODAL NEGARA PADA BUMN PER 31 DESEMBER 2012

(Rp. Juta)

73		PT Pelabuhan Indonesia III	Audited 2012	Sehat AA	2.588.118	4.847.903	6.313	7.442.335	1.262.762	1.154.514	2.417.275	1.018.953	-	-	969	3.516.930	4.536.852	488.207	5.025.060	100%	4.536.852
74		PT Pelabuhan Indonesia IV	Audited 2012	Sehat AA	631.932	2.237.868	0	2.869.801	343.877	383.265	727.141	603.148	308.963	0	913.532	316.997	2.142.660	-	2.142.660	100%	2.142.660
75	Bandar Udara	PT Angkasa Pura I	Audited 2012	Sehat AA	3.200.752	8.073.015	-	11.273.766	1.833.227	614.970	2.448.197	3.188.245	-	2.793.109	61.181	2.782.035	8.824.570	1.000	8.825.570	100%	8.824.570
76		PT Angkasa Pura II	Audited 2012	Sehat AAA	3.160.721	7.402.554	206.613	10.769.888	666.643	301.577	870.220	5.081.100	0	313.027	3.186.272	1.219.268	9.799.667	-	9.799.667	100%	9.799.667
77	Angkutan Darat, Udara dan Laut	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2012	Sehat A	2.540.814	5.216.240	252.816	8.009.869	2.176.655	1.460.994	3.637.649	-	-	-	968	1.031.521	4.329.036	43.184	4.372.220	100%	4.329.036
78		Perum PPD	Unaudited 2012		48.925	34.690	18	83.633	123.629	20.220	143.849	231.769	153.873	12.151	9.137	(467.147)	(60.217)	-	(60.217)	100%	(60.217)
79		Perum DAMRI	Audited 2012	Sehat AA	107.932	629.139	18.935	756.007	138.563	235.747	374.310	19.700	257.207	31.844	78.752	(5.808)	381.697	0	381.697	100%	381.697
80		PT Merpati Nusantara Airlines	Unaudited 2012		287.759	1.813.720	781.947	2.883.425	3.317.452	2.747.335	6.064.787	1.964.558	-	-	-	(5.145.920)	(3.181.362)	-	(3.181.362)	96,99%	(3.085.603)
81		PT Garuda Indonesia	Audited 2012	Sehat AA	6.155.595	18.193.443	-	24.349.038	7.293.182	6.274.192	13.567.374	10.392.217	43.980	-	(742.111)	1.069.486	10.763.572	18.092	10.781.664	69,14%	7.441.934
82		PT PELNI	Audited 2012	Sehat A	1.555.767	4.113.962	81.856	5.751.585	583.703	443.100	1.026.803	6.565.092	144	-	55.530	(1.896.464)	4.724.302	480	4.724.782	100%	4.724.302
83		PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberang	Audited 2012	Sehat AA	945.671	1.934.354	2.871	2.882.896	214.015	140.991	355.005	1.092.509	7.741	896.740	371.004	159.897	2.527.891	-	2.527.891	100%	2.527.891
84		PT Djakarta Lloyd	Unaudited 2012		43.155	634.011	196.853	874.019	438.129	693.471	1.131.600	180.640	-	-	667.189	(1.032.849)	(72.561)	-	(257.581)	100,00%	(257.581)
85	Konstruksi	PT Amarta Karya	Audited 2012	Sehat AA	295.680	15.748	558	311.984	236.404	50.643	287.047	11.250	-	-	5.363	24.938	-	24.938	100%	24.938	
86		PT Adhi Karya Tbk	Audited 2012	Sehat AA	7.283.097	554.728	34.248	7.872.074	5.852.574	838.581	6.691.155	180.132	50.004	-	368	943.642	1.174.146	6.773	1.180.919	51,00%	588.814
87		PT Istaka Karya	Unaudited 2010	n/a	595.646	118.351	50.350	764.346	463.261	293.838	757.099	50.000	-	(58.871)	17.119	7.248	-	7.248	100%	7.248	
88		PT Pembangunan Perumahan Tbk	Audited 2012		8.188.945	361.905	-	8.550.851	6.032.342	862.659	6.895.001	484.244	462.166	-	-	709.439	1.655.849	0	1.655.849	51%	844.483
89		PT Hutama Karya	Audited 2012	Sehat AA	4.632.935	254.309	46.190	4.933.434	3.581.960	628.381	4.210.341	500.000	-	-	-	722.792	722.792	301	723.093	100%	722.792
90		PT Wijaya Karya Tbk	Audited 2012		7.186.555	6.396.956	121.698	10.945.209	6.527.628	1.603.576	8.131.204	610.553	743.628	-	23.526	1.196.354	2.574.071	239.935	2.814.006	65,51%	1.686.274
91		Perum Perumnas	Audited 2012	Sehat A	2.326.099	293.754	-	2.619.853	1.444.617	433.712	1.878.329	1.000	474.969	-	183.934	80.200	740.103	1.421	741.524	100%	740.103
92		PT Brantas Abipraya	Audited 2012	Sehat AA	642.730	287.245	-	909.975	424.548	270.893	695.441	161.555	-	-	7.585	42.853	211.793	2.741	214.534	100%	211.793
93		PT Waskita Karya, Tbk	Audited 2012		7.789.715	557.493	19.036	8.368.244	5.291.826	1.067.343	6.359.169	963.224	831.138	-	(2.460)	215.174	2.007.075	-	2.007.075	68%	1.384.811
94	Konsultan Konstruksi	PT Bina Karya	Audited 2012	Sehat A	30.737	26.270	-	57.007	19.995	18.197	38.192	2.728	-	-	273	15.813	18.814	-	18.814	100%	18.814
95		PT Indah Karya	Audited 2012	Sehat A	18.118	4.080	3.199	25.397	21.744	1.363	23.107	7.000	-	-	2.125	(6.834)	2.291	-	2.291	100%	2.291
96		PT Yodya Karya	Audited 2012	Sehat AA	83.989	4.098	150	88.237	53.987	3.823	57.790	8.000	-	-	16.328	6.119	30.447	-	30.447	100%	30.447
97		PT Indra Karya	Audited 2012	Sehat AA	56.430	16.384	-	72.814	42.423	21.507	63.930	2.000	-	-	901	5.984	8.885	-	8.885	100,00%	8.885
98		PT Wirama Karya	Audited 2012	Sehat AAA	54.044	18.775	-	72.819	25.680	24.739	50.399	10.000	-	-	4.499	7.921	22.419	-	22.419	100%	22.419
99	Kawasan	PT Kawasan Berikat Nusantara	Audited 2012	Sehat A	269.306	518.305	9.392	797.003	139.109	35.442	174.551	363.945	-	-	244.462	14.046	622.452	-	622.452	73,15%	455.324
100		PT Kawasan Industri Makassar	Audited 2012	Sehat AA	50.908	42.779	756	94.442	7.073	1.767	8.840	40.000	23.266	-	22.336	85.602	60	85.602	60%	51.361	
101		PT Kawasan Industri Medan	Audited 2012	Sehat AA	189.053	44.093	-	233.146	37.849	5.390	43.239	30.000	-	-	159.907	189.907	189.907	-	189.907	60%	113.944
102		PT Kawasan Industri Wijayakusuma	Audited 2012	Sehat AA	43.072	19.033	-	62.105	9.429	-	9.429	25.863	-	-	16.297	10.516	52.676	-	52.676	51,09%	26.912
103		PT PDIP Batam	Audited 2012	Sehat A	39.305	52.485	-	91.790	11.242	35.032	46.274	19.000	-	-	26.442	74	45.516	-	45.516	100%	45.516
104	Pengudangan	PT Varuna Tirta Prakasya	Audited 2012		69.833	13.547	-	83.380	50.934	25.503	76.437	11.000	3.149	-	-	(7.208)	6.943	-	6.943	100%	6.943
105		PT Bhanda Gharu Reksa	Audited 2012	Sehat AAA	251.275	91.867	-	343.141	94.786	23.159	117.946	140.000	-	-	35.810	49.386	225.196	-	225.196	100%	225.196
106	Perbankan	PT Bank Mandiri Tbk	Audited 2012	Peringkat Komposit/PK - 1 (Sangat Sehat)	300.967.323	334.651.385	-	635.618.708	58.353.706	500.732.137	559.085.843	11.666.667	17.195.760	-	(361.772)	46.079.465	74.580.120	1.952.745	76.532.865	60,00%	44.748.072
107		PT Bank BRI Tbk	Audited 2012	PK - 1,31 (Sangat Sehat)	484.130.858	67.205.932	-	551.336.790	474.640.191	11.814.820	486.455.011	6.167.291	2.773.858	-	785.371	55.080.238	64.806.758	75.021	64.881.779	56,75%	36.777.835
108		PT Bank BNI Tbk	Audited 2012	PK - 2 (Sehat)	310.525.462	20.366.667	2.411.377	333.303.506	161.779.122	127.999.093	289.778.215	9.054.807	14.568.468	-	(220.788)	20.070.536	43.473.023	52.288	43.525.291	60%	26.083.814
109		PT Bank BTN Tbk	Audited 2012	Sehat (Bank)	32.293.417	76.240.425	3.214.751	111.748.593	82.432.783	19.036.940	101.469.723	5.178.220	1.793.503	-	132.112	10.278.871	3.175.038	-	10.278.871	61,35%	6.306.088
110	Asuransi	PT JIWA SARA	Audited 2012	Sehat AA	8.689.620	515.238	58.432	9.263.290	322.593	7.333.591	7.656.184	235.000	-	-	1.099.886	272.220	1.607.106	-	1.607.106	100%	1.607.106
111		PT ASABRI	Audited 2012	Sehat AA	175.847	8.817.824	-	8.993.671	97.509	7.342.118	7.439.627	200.000	-	-	1.205.739	148.305	1.554.044	-	1.554.044	100%	1.554.044
112		PT JAMSOSTEK	Audited 2012	Sehat AA	135.389.826	590.485	1.552.140	137.532.451	475.618	130.504.983	130.980.601	1.000.000	500.000	-	2.930.387	2.121.461	6.551.848	3	6.551.851	100%	6.551.848
113		PT TASPEN	Audited 2012	Sehat A	108.549.963	22.297.934	88.588	130.936.486	5.068.556	111.967.262	117.035.824	100.000	-	-	3.354.408	10.442.167	13.896.575	4.087	13.896.575	100%	13.896.575
114		PT ASKES	Audited 2012	Sehat AA	6.893.250	7.926.190	63.913	14.883.353	5.881.486	216.925	6.098.411	-	1.000.000	-	6.808.693	976.249	8.784.942	-	8.784.942	100%	8.784.942
115		PT JASINDO	Audited 2012	Sehat AA	7.369.797	261.711	35.369	7.666.876	6.154.933	47.545	6.202.478	425.000	-	-	49.355	990.043	1.464.399	-	1.464.399	100%	1.464.399
116		PT RUI	Audited 2012		1.641.869	47.981	5.139	1.694.989	1.084.776	462.299	1.547.075	40.000	14.360	-	54.729	38.818	147.908	6	147.914	100%	147.908
117		PT Jasa Raharja	Audited 2012	Sehat AAA	7.724.973	500.544	16.017	8.241.534	2.716.854	56.564	2.773.417	2.506.200	-	-	90.811	2.871.106	5.468.117	-	5.468.117	99%	5.440.230
118		PT ASEI	Audited 2012	Sehat AAA	1.221.886	73.986	8.018	1.303.890	517.922	8.758	526.680	300.000	-	-	4.554	472.656	777.210	-	777.210	100%	777.210
119		PT ASKRINDO	Audited 2012	Sehat AA	489.644	4.912.809	13.788	5.416.241	583.990	725.840	1.309.830	4.031.000	-	-	7.781	67.627	4.106.407	3	4.106.411	100%	4.106.407
120	Pembiayaan	Perum JAMKRINDO	Audited 2012	Sehat AA	6.450.894	179.895	30.287	6.661.077	1.611.446	-	1.611.446	4.531.789	-	-	8.325	509.517	5.049.631	-	5.049.631	100%	5.049.631
121		PT PPA	Audited 2012	Sehat AA	2.551.507	1.590.902	48.772	4.191.181	1.444.331	207.950	1.652.281	1.996.688	-	-	(116.692)	656.619	2.536.615	2.285	2.538.900	100%	2.536.615
122		PT Danareksa	Audited 2012	Sehat AAA	2.242.339	136.928	26.348	2.405.611	1.207.190	549.174	1.756.364	701.480	85.927	-	-	(138.266)	649.141	106	649.247	100%	649.141
123		PT Permodalan Nasional Madani	Audited 2012	Sehat AAA	682.569	3.174.163	15.933	3.872.664	112.931	3.193.590	3.306.521	300.000	-	-	(198)	259.947	559.748	6.395	566.143	100%	559.748
124		Perum Pegadaian	Audited 2012	Sehat AAA	28.548.902	762.996	-	29.311.898	18.720.492	5.219.521	23.940.014	251.252	-	-	-						

**DAFTAR BPYBDS PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	BUMN	STATUS DATA	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
1	Perum DAMRI	Audited 2012	31.844.050.000,00	161.462.000.000,00
2	Perum PPD	Un-audited 2012	12.150.681.819,00	67.770.841.819,00
3	PT Kereta Api Indonesia	Audited 2012	0,00	826.546.294.645,00
4	PT Perusahaan Listrik Negara	Audited 2012	30.718.066.780.700	29.049.436.783.477,00
5	Perum Jasa Tirta I	Audited 2012	0,00	1.131.342.305,00
6	PT Angkasa Pura I	Audited 2012	2.793.108.893.422,36	3.393.090.807.000,00
7	PT Angkasa Pura II	Audited 2012	313.027.372.227,51	2.221.583.000.000,00
8	Perum BULOG	Audited 2012	675.250.887.482,00	670.113.824.005,00
9	PT Pelindo I	Audited 2012	427.056.982.506,00	435.790.297.506,00
10	PT Pelindo III	Audited 2012	0,00	209.730.528.118,00
11	PT Pelindo IV	Audited 2012	0,00	68.176.454.500,00
12	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan	Audited 2012	896.740.136.947,00	1.304.919.497.954,00
13	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Audited 2012	0,00	1.003.285.000,00
14	Perum Prasarana Perikanan Samudra	Audited 2012	34.501.090.440,00	47.036.685.555,00
15	PT Djakarta Lloyd	Un-audited 2012	667.188.771.346,05	667.188.771.346,05
16	PT Pelayaran Nasional Indonesia	Audited 2012	0,00	2.997.874.185.088,93
17	Perum Perumnas	Audited 2012	0,00	5.068.434.600,00
18	PT Pos Indonesia	Audited 2012	0,00	29.936.024.480,00
19	Perum produksi film Negara (PFN)	Un-audited 2012	14.903.777.061,00	14.903.777.061,00
20	PT Pertamina	Audited 2012	12.452.878.178,53	520.917.962.842,46
21	PT Geo Dipa Energi	Audited 2012	1.979.664.199.753,75	1.670.877.372.176,00
Jumlah			38.575.956.501.883,20	44.364.558.169.478,40

**PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2012
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

(dalam juta Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	PENDAPATAN USAHA	HPP + BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN KOMPREHENSIF	LABA RUGI KOMPREHENSIF
				1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10-11)
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2012		2.175.921	1.495.268	680.653	33.820	1.836	712.637	-	712.637	127.014	585.623	(1.703)	583.920
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2012		435.989	256.457	179.533	-		179.533	-	179.533	39.128	140.405		140.405
3	PT. SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2012		226.037	107.308	118.729	14.021	369	132.380	-	132.380	25.819	106.562	-	106.562
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR INDONESIA	Audited 2012		312.240	51.132	261.108	910	444	261.574	-	261.574	48.196	213.378	-	213.378
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2012		73.164	95.237	(22.073)	7.621	41.924	(56.376)	-	(56.376)	(5.781)	(50.595)	-	(50.595)

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA
NERACA PER 31 DESEMBER 2012
PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA DIBAWAH PEMBINAAN KEMENTERIAN KEUANGAN**

(dalam juta Rupiah)

NO	PERUSAHAAN NEGARA/LEMBAGA	SUMBER	STATUS	ASET LANCAR	ASET TIDAK LANCAR	ASET LAIN	TOTAL ASET	LIABILITAS JANGKA PENDEK	LIABILITAS JANGKA PANJANG	TOTAL LIABILITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYBDS	EKUITAS LAIN	SALDO LABA	EKUITAS YANG DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS	KEPENTINGAN NON PENGENDALI	JUMLAH EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
				1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13=8+9+10+11+12	14	15=13+14	16	17=13*16
1	LEMBAGA PEMBIAYAAN EKSPOR INDONESIA	Audited 2012		33.264.039	41.607	27.105	33.332.751	523.455	25.259.249	25.782.704	6.321.586	-	-	-	1.228.461	7.550.047		7.550.047	100,00%	7.550.047
2	PT. SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL	Audited 2012		2.104.542	4.074.106		6.178.648	1.021.438	2.509.603	3.531.041	2.000.000				647.607	2.647.607		2.647.607	100,00%	2.647.607
3	PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR	Audited 2012		-	-	-	5.132.417	-	-	822.100	2.000.000	2.000.000		52.805	257.713	4.310.317		4.310.317	100,00%	4.310.317
4	PT PENJAMINAN INFRASTRUKTUR	Audited 2012		4.906.766	59.168	903	4.966.837	25.790	23.930	49.720	4.500.000			1.917	415.200	4.917.117		4.917.117	100,00%	4.917.117
5	PT GEO DIPA ENERGI	Audited 2012		245.270	1.905.756	14.620	2.165.647	86.580	204.697	291.278	662.001	-	1.979.664	-	(767.296)	1.874.369		1.874.369	66,67%	1.249.642
																21.299.458				20.674.730

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2012**

No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	% Saham Kepemilikan RI		Nilai Ekuitas	Kepemilikan Pemerintah Per 31 Desember 2012
1	PT Indonesia Asahan Alumunium (INALUM)	Audited 2012 (31 Maret 2012)	41,12%		9.864.836.923.320	4.056.420.942.869
2	PT Surabaya Indah Estate Rungkut (SIER)	Audited 2012	50,00%		271.471.680.248	135.735.840.124
3	PT Jayakarta Indah Estate Pulogadung (JIEP)	Audited 2012	50,00%		224.313.335.000	112.156.667.500
4	PT Asean Copper Product					-
Jumlah I						4.304.313.450.493
No.	Nama Perusahaan	Sumber a)	Saham	% Saham Kepemilika	Jumlah Saham	Kepemilkan Pemerintah
1	PT Bank Bukopin	Audited 2012	A	0,06%	4.736.255	47.362.550.000
			B	13,00%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)	Audited 2012		4,97%	22.366	22.366.000.000
3	PT Freeport Indonesia	Semester I 2012	Biasa	9,36%	21.300	20.597.100.000
4	Kertas Padalarang	Audited 2012		7,74%	25.000	25.000.000.000
5	PT Indosat, Tbk	Audited 2012	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
6	PT Socfindo	Audited 2012	Seri B		1	265.000
			Seri C		2.999	794.735.000
			Seri D		2.000	3.430.000.000
			Total	10,00%	42.250.000.000	
7	PT Prasadha pamunah Limbah Industri (PPLI)	Audited 2011		5,00%	50	11.398.512.500
8	PT Nindya Karya	Audited 2012		1,00%	59.500	59.500.000.000
9	PT Asean Bintulu Fertilizer	Audited 2012		13,00%	39.000	123.225.375.000
10	Asean Infrastructure Fund	Angka Realisasi PMN		25,52%		379.568.226.388
JUMLAH II						874.328.501.388
JUMLAH I + II						5.178.641.951.881

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2012**

NO	LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL	TOTAL PENYERTAAN MODAL				Penyertaan yang masih Berbentuk Promissory
		Mata Uang		USD	IDR	
1	Asian Development Bank	SDR	227.278.100,32	349.308.257,94	3.377.810.854.303,97	
2	International Monetary Fund	SDR	2.079.300.000,00	3.195.717.756,00	30.902.590.700.520,00	26.550.675.238.720,50
	World Bank Group					
3	International Bank for Reconstruction and Development	USD	121.515.290,69	121.515.290,69	1.175.052.860.972,30	
4	International Development Association	USD	16.114.990,97	16.114.990,97	155.831.962.661,00	5.173.139.667,81
5	International Finance Corporation	USD	29.384.013,04	29.384.013,04	284.143.406.096,80	
6	Multilateral Investment Guarantee Agency	USD	3.797.820,00	3.797.820,00	36.724.919.400,00	10.975.624.060,00
7	Islamic Development Bank Group	ID	124.260.000,00	190.977.679,20	1.846.754.157.864,00	
8	International Islamic Trade Finance Corporation	USD	2.060.000,00	2.060.000,00	19.920.200.000,00	
9	Islamic Corporation for Insurance of Investment and Export Credit	ID	125.140,32	192.330,66	1.859.837.488,14	
10	International Fund for Agricultural Development	USD	51.928.728,38	51.928.728,38	502.150.803.434,60	
11	Common Fund for Commodities	USD	1.323.475,70	1.323.475,70	12.798.009.979,88	2.862.368.084,75
12	The Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)	USD	6.160.559,98	6.160.559,98	59.572.615.006,60	
13	Credit Guarantee and Investment Facility	USD	12.600.000,00	12.600.000,00	121.842.000.000,00	
	Jumlah total			3.981.080.902,56	38.497.052.327.727,30	26.569.686.370.533,00

BANK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
AKTIVA		
Emas	38.248.767	33.510.109
Uang Asing	11.842	4.010
Hak Tarik Khusus	26.254.734	24.445.657
Giro	55.434.566	22.514.306
Deposito	98.062.115	76.659.783
Surat Berharga	874.344.507	843.126.744
Surat Berharga Negara Republik Indonesia	108.430.258	82.402.779
Surat Berharga yang dibeli dengan Janji Jual Kembali	0	0
Tagihan Kepada Pemerintah	243.056.782	247.552.945
Tagihan Kepada Bank	3.225.921	4.398.970
Tagihan Kepada Lainnya	6.477.604	6.838.078
Penyertaan	675.212	628.952
Aktiva Lain-Lain	77.595.949	41.022.806
Penyisihan Aktiva	(12.292.109)	(11.263.320)
TOTAL AKTIVA	1.519.526.148	1.371.841.819
KEWAJIBAN		
Uang Asing Dalam Peredaran	439.730.814	372.982.462
Giro	345.491.704	343.132.261
Sertifikat Bank Indonesia	77.282.423	117.367.163
Sertifikat Bank Indonesia Syariah	3.455.000	3.476.000
Penempatan Berjangka	208.511.902	152.839.020
Penempatan Dana	69.024.266	152.474.286
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	15.582.200	17.403.100
Surat Berharga yang Dijual Dengan Janji Dibeli Kembali	99.591.644	68.752.428
Pinjaman dari Pemerintah	98.086	119.084
Pinjaman Luar Negeri	3.427.704	4.477.603
Alokasi Hak Tarik Khusus	29.520.637	27.483.875
Kewajiban Lain-Lain	61.341.300	21.762.262
TOTAL KEWAJIBAN	1.353.057.680	1.282.269.544
EKUITAS		
Modal	17.114.024	16.876.926
Cadangan Umum	17.145.069	41.555.776
Cadangan Tujuan	13.168.140	13.906.146
Keuntungan/Kerugian Belum Realisasi	113.221.542	42.382.140
Surplus (Defisit) Tahun Berjalan	5.819.693	(25.148.713)
TOTAL EKUITAS	166.468.468	89.572.275
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	1.519.526.148,00	1.371.841.819,00

BANK INDONESIA
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
PERIODE 1 JANUARI 2012 S.D 31 DESEMBER 2012
(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2012 - 31 Desember 2012	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011
PENERIMAAN		
Pengelolaan Moneter		
Pengelolaan Devisa	24.697.913,00	23.421.345,00
Pengelolaan SSB Dalam Negeri	7.074.621,00	3.756.152,00
Pemberian Kredit dan Pembiayaan	289.421,00	515.888,00
Selisih Kurs Karena Transaksi Valuta Asing	7.416.842,00	(11.693.801,00)
Pengelolaan Sistem Pembayaran	241.272,00	223.897,00
Pengawasan Perbankan	26.264,00	17.467,00
Lainnya	289.262,00	1.108.197,00
JUMLAH PENERIMAAN	40.035.595,00	17.349.145,00
BEBAN		
Pengendalian Moneter		
Operasi Moneter	19.006.279,00	30.092.015,00
Pengelolaan Devisa	143.487,00	67.827,00
Pinjaman Luar Negeri	92.384,00	178.422,00
Lainnya	31.525,00	19.345,00
Jasa Giro Pemerintah	4.156.871,00	4.666.712,00
Penyelenggaraan Sistem Pembayaran		
Sistem Pembayaran Tunai	1.439.975,00	1.987.204,00
Sistem Pembayaran Non Tunai	24.427,00	22.812,00
Pengaturan dan Pengawasan Perbankan	183.002,00	174.917,00
Umum dan Lainnya		
SDM dan Logistik	5.726.167,00	4.294.839,00
Lainnya	1.135.248,00	1.058.056,00
JUMLAH BEBAN	31.939.365,00	42.562.149,00
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM PAJAK	8.096.230,00	(25.213.004,00)
PENERIMAAN (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	(2.276.537,00)	64.291,00
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	5.819.693,00	(25.148.713,00)

**LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NERACA**

PER 31 DESEMBER 2012

(dalam ribuan Rupiah)

Uraian	31 DESEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
AKTIVA		
Kas dan Setara Kas	609.177.281,00	347.892.634,00
Investasi Surat Berharga	26.971.502.699,00	20.060.287.492,00
Piutang Premi Penjaminan	1.719.554	26.261,00
Piutang Investasi	390.261.604,00	256.463.487,00
Piutang Bank Dalam Likuidasi Bersih	2.975.000,00	3.505.746,00
Piutang Lain-Lain Bersih	3.020.529,00	1.961.253,00
Penyertaan Modal Sementara	6.762.361.000,00	6.762.361.000,00
Aktiva Tetap Bersih	116.881.725,00	125.343.321,00
Aktiva Lain-Lain	21.802.253,00	8.026.880,00
TOTAL AKTIVA	34.879.701.645,00	27.565.868.074,00
KEWAJIBAN		
Hutang Klaim Penjaminan	26.141.776,00	37.869.590,00
Cadangan Klaim Penjaminan	11.184.587.299,00	10.691.811.203,00
Cadangan Manfaat Karyawan	15.278.005,00	11.144.773,00
Hutang Pajak	129.359.106,00	93.223.329,00
Hutang Lain-Lain	33.745.078,00	5.330.325,00
TOTAL KEWAJIBAN	11.389.111.264,00	10.839.379.220,00
EKUITAS		
Modal Awal Pemerintah	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
Cadangan Tujuan	3.898.118.076,00	2.545.297.771,00
Cadangan Penjaminan	15.592.472.305,00	10.181.191.084,00
TOTAL EKUITAS	23.490.590.381,00	16.726.488.855,00
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	34.879.701.645,00	27.565.868.075,00

LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
LAPORAN SURPLUS DEFISIT
 PERIODE 1 JANUARI 2012 S.D 31 DESEMBER 2012
 (dalam ribuan Rupiah)

Uraian	1 Januari 2012 - 31 Desember 2012	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011
PENDAPATAN OPERASI		
Pendapatan Premi Penjaminan	6.201.380.301,00	5.038.287.135,00
Pendapatan Hasil Investasi	1.552.831.073,00	1.367.023.044,00
Pendapatan Kontribusi Kepesertaan	29.584,00	71.473,00
Pendapatan Denda	19.272,00	79.442,00
Pendapatan Pengembalian Klaim	25.458.317,00	5.218.721,00
TOTAL PENDAPATAN OPERASI	7.779.718.547,00	6.410.679.815,00
BIAYA OPERASI		
Biaya Klaim Penjaminan	8.673.939,00	45.563.567,00
Cadangan Klaim Penjaminan Direalisasi	(8.673.939,00)	(45.563.567,00)
Biaya terkait Dengan Resolusi Bank	4.003.447,00	3.537.144,00
Biaya Kenaikan (Penurunan) Cad. Klaim	491.291.384,00	(360.855.919,00)
Biaya Investasi	277.121.635,00	242.234.949,00
Biaya Umum dan Administrasi	195.970.635,00	143.661.267,00
TOTAL BIAYA OPERASI	968.387.101,00	28.577.441,00
SURPLUS (DEFISIT) OPERASI	6.811.331.446,00	6.382.102.374,00
Pendapatan dan Biaya Lain-Lain		
Pendapatan Lain-Lain	51.493.757,00	60.897.742,00
Biaya Lain-Lain	(10.402.972,00)	(12.942.158,00)
Total Pendapatan dan Biaya Lain-Lain	41.090.785,00	47.955.584,00
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SEBELUM PAJAK	6.852.422.231,00	6.430.057.958,00
Pajak Penghasilan Badan		
Biaya PPh Badan Kini	89.637.513,00	1.003.635.369,00
Biaya PPh Badan Tangguhan	(1.370.808,00)	(1.331.845,00)
Total Pajak Penghasilan Badan	88.266.705,00	1.002.303.524,00
SURPLUS (DEFISIT) BERSIH SETELAH PAJAK	6.764.155.526,00	5.427.754.434,00

ASET TETAP PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)														
No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	TANAH		PERALATAN DAN MESIN		GEDUNG DAN BANGUNAN		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		ASET TETAP LAINNYA		KONSTRUKSI DALAM PENGERAJAN	
			31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
1	001	MPR	110.719.212.605	111.688.322.605	97.745.489.058	89.614.499.751	203.392.581.890	202.142.541.298	9.790.961.500	9.790.961.500	56.517.880.193	55.795.990.929		
2	002	DPK	188.409.157.000	184.836.337.000	602.864.782.648	574.671.231.599	808.549.786.883	806.703.452.083	64.901.869.781	64.901.869.781	371.137.337.145	371.137.337.145	4.042.335.400	7.225.560.000
3	004	BPK	1.470.696.300.781	1.432.088.569.622	1.121.296.356.157	922.631.310.356	1.693.294.560.279	1.505.477.580.313	271.686.389.709	230.309.891.623	51.767.516.413	51.486.419.936	21.761.774.500	61.788.162.880
4	005	MA	4.127.704.396.064	4.060.494.388.804	1.804.368.186.164	1.645.039.566.093	4.355.832.378.413	3.873.858.219.689	198.715.162.539	143.083.680.145	58.964.475.083	38.445.291.145	509.891.587.540	409.891.237.319
5	006	Kekjasama Agung	2.339.921.239.706	3.182.151.556.795	1.542.412.159.613	1.396.856.827.367	2.936.131.026.464	2.087.086.708.997	47.391.754.050	37.171.571.480	9.690.342.168	9.323.923.702	152.849.208.264	541.315.091.766
6	007	Sekretariat Negara	12.431.891.082.320	12.430.268.582.320	1.756.710.104.259	1.646.608.325.141	1.345.806.102.822	1.276.323.185.252	111.912.441.221	109.983.853.135	714.205.336.259	923.923.120.164	195.644.778.154	105.768.400.000
7	007	BLU Sekretariat Negara	72.952.681.862.609	72.952.681.862.609	88.005.245.409	76.802.399.004	1.155.146.356.037	1.082.283.396.508	464.728.914.985	464.095.125.985	8.063.698.732	8.063.698.732	24.594.707.755	7.980.688.772
8	010	Kementerian Dalam Negeri	2.257.117.021.625	2.251.934.294.484	2.382.517.300.080	1.460.704.794.390	2.481.771.138.682	1.812.603.000.049	241.047.706.845	196.811.683.980	259.963.071.400	232.178.792.363	317.178.028.279	567.237.679.091
9	011	Kementerian Luar Negeri	10.347.134.394.551	10.335.783.877.802	1.077.618.275.152	969.913.670.494	5.453.006.581.404	5.426.515.357.058	44.802.449.587	44.737.039.187	65.771.614.008	84.614.535.581	24.871.464.854	17.602.533.388
10	012	Kementerian Pertahanan	250.333.224.309.500	215.261.897.232.490	84.968.694.840.711	58.568.746.953.715	25.152.523.125.133	25.081.548.555.619	4.844.040.533.141	4.297.784.721.612	240.478.871.301	166.048.602.587	11.209.658.432.786	2.014.668.151.687
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	11.715.655.610.505	9.987.890.512.711	2.640.006.548.203	2.132.594.242.102	5.570.641.029.594	5.215.456.871.085	161.477.026.280	136.860.127.534	44.614.453.012	24.002.893.923	587.006.702.689	790.108.622.574
12	015	Kementerian Keuangan	17.286.534.823.816	17.210.633.268.536	8.649.450.471.389	8.021.195.465.644	10.635.543.677.167	10.635.543.677.167	348.573.649.280	332.477.687.395	26.339.299.995	21.169.879.443	677.317.480.494	698.283.768.910
13	015	BLU Kementerian Keuangan	545.192.062.827	545.192.062.827	51.293.956.632	43.188.928.397	196.710.647.484	194.255.849.179	18.437.121.332	18.437.121.332	11.807.907.831	11.807.907.831	10.887.286.730	-
14	018	Kementerian Pertanian	8.526.991.615.703	7.794.036.418.871	3.634.424.914.390	3.229.881.428.624	3.099.711.753.431	2.756.699.693.877	418.719.321.493	341.655.950.567	267.827.296.562	254.569.207.378	77.344.598.625	17.707.194.937
15	018	BLU Kementerian Pertanian	647.183.099.926	647.183.099.926	47.912.631.350	45.133.278.350	35.815.129.126	34.096.584.226	10.155.870.130	9.281.942.370	577.988.886	608.916.141		-
16	019	Kementerian Perindustrian	2.026.838.231.901	2.135.917.809.989	2.307.557.284.675	1.938.487.076.538	788.862.119.489	796.124.758.486	45.028.301.608	44.777.821.364	16.630.512.427	18.336.647.468	13.137.042.627	1.850.043.500
17	019	BLU Kementerian Perindustrian	117.727.798.088	-	189.091.263.075	-	86.366.087.736	-	640.415.541	-	3.012.502.496	-		-
18	020	Kementerian ESDM	2.966.270.993.579	2.976.588.676.832	3.059.354.067.098	3.245.064.748.535	1.466.654.428.145	1.410.574.925.484	2.084.355.312.724	1.949.430.762.906	374.245.220.258	308.868.889.659	15.153.499.291.696	12.579.258.730.541
19	022	Kementerian Perhubungan	50.201.701.857.731	49.298.586.833.502	16.888.268.343.786	13.345.181.983.197	7.819.752.237.038	5.578.033.760.765	52.728.985.432.198	47.945.880.057.181	2.433.243.142.358	2.291.839.981.002	25.113.457.585.228	13.861.192.285.665
20	022	BLU Kementerian Perhubungan	1.250.491.053.251	1.223.489.280.480	750.047.580.208	643.140.909.230	1.325.147.647.980	1.199.196.156.350	42.434.655.103	38.866.982.003	13.053.107.171	56.216.277.370	52.457.751.434	
21	023	Kementerian Pendidikan Nasional	10.301.352.112.164	31.332.016.450.985	8.518.977.355.909	9.700.101.318.400	9.812.935.933.408	12.374.182.093.421	484.924.524.185	598.766.831.910	359.292.188.824	509.736.803.341	1.780.099.082.992	3.421.826.821.452
22	023	BLU Kementerian Pendidikan Nasional	41.304.782.082.556	19.748.903.112.894	10.046.279.713.426	4.822.497.605.960	13.109.466.423.145	6.863.452.466.565	584.850.370.291	227.338.833.007	572.187.473.210	287.082.383.865	4.938.270.877.075	2.371.217.228.208
23	024	Kementerian Kesehatan	2.786.838.614.952	2.828.659.753.264	11.029.378.773.845	7.622.606.557.042	3.405.341.806.215	2.816.021.785.094	187.010.954.455	165.308.672.696	69.730.558.579	62.456.681.994	1.974.244.996.993	1.514.015.849.104
24	024	BLU Kementerian Kesehatan	10.451.286.878.102	10.260.958.840.661	6.406.981.172.209	5.346.653.066.414	5.081.785.664.432	4.358.478.222.446	30.810.229.722	274.611.207.512	74.205.613.688	68.914.725.613	900.682.271.965	736.197.739.066
25	025	Kementerian Agama	7.162.300.303.102	7.120.538.505.013	3.121.598.427.876	2.639.418.104.688	12.685.517.209.250	11.562.572.043.252	201.689.754.410	156.205.086.293	549.211.523.509	470.257.745.288	771.520.771.801	631.775.729.496
26	025	BLU Kementerian Agama	3.088.171.642.778	2.996.569.510.060	1.433.378.930.111	1.104.118.591.618	2.456.791.738.974	2.154.299.077.879	95.717.135.245	88.282.422.911	78.974.331.115	68.224.230.158	276.587.331.518	111.772.974.466
27	026	Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.450.460.071.634	1.439.141.652.884	1.369.237.065.772	1.128.726.563.357	639.879.854.145	623.633.687.141	71.416.933.824	64.561.127.686	10.855.397.036	8.942.870.247	151.183.709.969	111.391.109.436
28	026	BLU Tenaga Kerja dan Transmigrasi	318.592.354.000	318.592.354.000	130.617.827.333	90.312.109.832	123.363.122.110	123.330.439.447	7.800.704.921	7.785.658.558	660.280.424	545.354.941		
29	027	Kementerian Sosial	3.410.562.126.743	3.403.244.658.909	957.336.268.845	804.857.117.925	733.799.467.066	680.499.022.989	57.674.514.317	51.704.900.684	34.884.722.279	31.578.151.388	2.122.859.000	34.569.525.695
30	029	Kementerian Ketenan	2.183.593.473.405	2.165.830.060.523	1.851.666.302.911	1.622.236.164.546	1.430.714.945.550	1.260.802.682.039	157.446.133.496	123.696.637.859	42.751.027.327	50.968.864.416	6.380.911.228	
31	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	1.939.105.328.406	1.645.228.838.530	3.118.821.857.279	2.642.885.088.888	2.757.294.289.986	2.452.853.479.134	1.873.015.165.854	1.392.404.703.328	98.538.810.861	51.224.785.825	228.386.263.832	236.298.868.341
32	033	Kementerian Pekerjaan Umum	376.454.897.179.232	234.174.373.823.852	5.997.748.417.018	5.099.489.107.029	7.552.812.528.385	5.945.558.164.359	301.828.323.265.385	282.171.744.628.038	5.387.820.016.284	3.684.133.347.829	26.100.648.639.841	19.159.207.817.174
33	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	4.230.095.600	3.391.595.600	503.060.091.552	478.418.637.653	38.413.085.105	29.805.284.987	30.063.444.680	10.452.107.000	22.201.143.721	20.597.963.642	60.322.217.950	
34	035	Kemenko Bidang Perekonomian			50.208.350.697	43.487.482.262	19.733.715.055	19.733.715.055			67.526.925	67.526.925		
35	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat			40.770.872.388	40.770.872.388	148.974.650		144.386.000		19.223.015.131	19.174.263.571	132.463.022.288	88.339.316.757
36	040	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata	2.524.517.183.826	2.511.281.399.826	421.346.897.421	336.429.183.846	943.757.986.641	833.319.258.089	50.470.234.851	60.450.194.620	160.289.805.590	119.807.910.572	37.713.056.138	118.352.100.117
37	041	Kementerian Negara BUMN	273.198.404.650	273.198.404.650	98.537.478.801	95.639.801.582	174.021.372.308	173.658.682.561	3.201.056.420	3.201.056.420	87			

ASET TETAP PADA K/L DAN BUN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011

(Dalam Rupiah)

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	TANAH		PERALATAN DAN MESIN		GEDUNG DAN BANGUNAN		JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN		ASET TETAP LAINNYA		KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	
			31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011	31/12/2012	31/12/2011
73	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	20.666.122.750	20.484.294.000	52.165.826.786	45.079.846.953	19.584.304.312	19.345.053.312	2.263.658.842	2.054.571.842	1.748.644.053	2.694.099.377		
74	086	LAN	511.094.866.313	510.365.738.729	126.311.289.157	120.914.165.860	389.707.308.680	386.051.686.811	13.295.627.871	13.334.721.910	3.241.280.160	3.117.262.060	11.813.662.483	-
75	087	ANRI	215.554.860.396	215.554.860.396	157.278.538.416	153.677.534.384	175.871.756.557	171.740.978.274	13.419.676.529	13.407.489.629	7.815.257.888	7.626.074.103		
76	088	BKN	407.745.766.569	405.116.266.569	295.801.885.632	272.467.576.232	440.858.400.443	423.341.857.150	18.692.047.270	17.541.491.870	942.450.234	750.936.091	28.268.569.907	7.577.055.567
77	089	BPPK	1.074.635.416.873	1.092.321.261.440	242.659.121.809	231.390.995.303	642.723.054.616	614.582.795.750	10.600.481.125	10.579.958.145	2.268.785.284	2.117.282.385	36.900.000	-
78	090	Kementerian Perdagangan	645.618.488.202	644.835.572.202	674.080.500.075	634.061.383.330	2.519.419.225.039	2.132.435.519.759	25.899.620.044	19.536.342.892	17.980.633.583	26.817.290.684	4.749.788.200	-
79	091	Kemen Perumahan Rakyat			42.406.604.278	35.604.902.043	2.859.949.003.765	1.908.308.766.910	751.251.911.202	748.778.806.202			18.352.633.775	-
80	091	BLU Kemen Perumahan Rakyat			2.630.759.700	2.533.794.700								
81	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	9.238.075.100	9.238.075.100	357.436.620.815	349.173.336.780	272.518.330.859	269.318.248.659	8.756.628.136	8.756.628.136	1.521.823.685	1.521.823.685	541.133.005.008	541.133.005.008
82	093	KPK	119.363.101.000	119.363.101.000	202.377.424.782	168.612.565.621	128.000.060	106.500.000	65.088.219.713	52.273.044.234	47.079.486.449	44.525.665.290		
83	094	BRR NAD - Nias	452.520.454.538	526.785.787.623	526.645.377.630	771.847.368.434	439.593.970.307	1.191.902.923.099	672.892.764.152	1.894.182.520.918	15.021.199.484	20.906.386.326	329.112.111.638	1.026.146.271.124
84	095	DPD	6.925.422.490	6.768.230.000	92.399.298.137	87.697.485.434	99.693.000	368.676.000			36.559.833.130	36.178.599.439	4.776.470.776	4.776.470.776
85	100	Komisi Yudisial RI	47.188.389.400	47.188.389.400	31.500.734.142	29.796.908.077	70.471.586.566	69.839.350.735	3.450.884.028	3.421.134.028	691.761.248	557.717.423		
86	103	BKNPB	75.865.180.100	75.865.180.100	213.282.162.231	147.171.025.450	-	7.722.338.200	-	784.107.913	56.408.661.774	56.401.653.774	6.937.804.600	-
87	104	BNP2TKI	13.089.354.050	11.774.454.050	87.571.579.911	79.452.268.964	43.908.513.272	40.559.234.372	5.864.159.104	5.212.789.609	9.784.549.563	8.938.079.783	2.352.784.000	1.687.814.000
88	105	BPLS	1.534.985.399.118	795.069.274.203	85.193.763.347	81.077.308.407	957.905.100	657.083.100	865.899.662.542	382.925.034.036	428.077.576.423	412.756.054.162	962.473.514	351.711.791.200
89	106	LKPBJP	116.490.960.000	71.603.260.000	37.641.498.333	33.560.303.850					6.956.312.977	6.868.196.480	1.333.452.325	-
90	107	Badan SAR	183.572.447.082	163.958.935.372	1.797.653.284.186	1.530.560.632.941	382.875.928.591	320.602.563.525	16.846.071.672	12.803.122.803	3.463.205.599	3.574.108.599	178.168.109.000	-
91	108	KPPU			23.420.934.919	20.094.938.259					1.768.698.727	1.725.221.227		
92	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu			14.489.675.524	8.242.836.330	5.678.312.775	904.315.000	23.871.707.175	-	8.271.156.750	5.703.592.050	12.409.978.633	5.099.881.393
93	110	Ombudsman Republik Indonesia			12.501.585.010	742.935.470					377.142.800	-		
94	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan			45.815.650.194	26.974.472.350	24.777.659.194	14.285.657.624	108.399.762.040	83.279.757.300	1.514.069.471	377.777.040	16.203.227.736	12.512.710.283
95	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS & PELABUHAN BEBAS	6.064.230.668.678	-	585.467.787.186	-	909.037.244.033	-	6.810.701.847.860	-	15.187.114.384	-	314.281.214.000	-
96	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME			2.406.608.662	-							3.857.738.750	-
97	114	SEKRETARIAT KABINET			3.691.400.921	-					91.650.623	-		
98	115	BADAN PENGAWAS PEMILU RI			19.655.757.466	-			2.575.000	-	2.585.520.900	-		
99	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI	3.010.576.498.280	-	1.013.497.251.360	-	380.490.149.146	-	32.038.729.552	-	14.687.507.081	-	180.166.000	-
100	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI	3.083.576.253.100	-	1.081.563.166.428	-	409.823.500.374	-	19.541.941.537	-	2.425.078.106	-		
101	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS SABANG	527.697.028.425	-	29.662.710.817	-	64.122.236.681	-	135.741.252.108	-	8.613.142.600	-	1.280.994.258.475	-
102	999.08	BUN (Belanja lainnya)	310.062.000.000	7.014.566.178.769	1.015.261.979	2.400.713.948.863	-	893.831.639.647	7.986.086.500	568.813.247.115	-	29.426.173.464	452.934.258.000	1.061.688.059.670
TOTAL			996.878.472.254.880	806.436.356.598.744	238.129.446.805.797	184.852.199.595.042	170.243.266.954.328	152.223.086.918.162	379.236.269.019.824	347.164.628.245.235	14.566.662.581.210	11.517.129.897.802	96.447.328.590.044	65.780.773.332.765

**TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	31 Desember 2012 Audited			31 Desember 2011 Audited
			BRUTO	PENYISIHAN	NETTO	
1	004	Badan Pemeriksa Keuangan	1.805.083.257	(1.805.083.257)	-	1.778.343.870
2	005	Mahkamah Agung	442.849.467	(8.184.243)	434.665.224	1.927.628.763
3	006	Kejaksaan Agung	113.388.627	(37.868.127)	75.520.500	349.936.815
4	007	Sekretariat Negara	13.855.000	(69.275)	13.785.725	56.095.000
5	010	Kementerian Dalam Negeri	18.420.089.235	-	18.420.089.235	18.470.089.235
6	011	Kementerian Luar Negeri	232.336.044	(6.626.237)	225.709.807	1.626.260.460
7	012	Kementerian Pertahanan	4.262.335.790	-	4.262.335.790	4.243.256.085
8	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	1.512.747.503	(77.474.849)	1.435.272.654	423.564.049
9	015	Kementerian Keuangan	171.642.005	(858.210)	170.783.795	26.443.698
10	018	Kementerian Pertanian	2.845.325.250	(2.302.967.643)	542.357.607	2.157.094.620
11	019	Kementerian Perindustrian	-	-	-	181.095.000
12	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	40.265.000	(37.777.500)	2.487.500	93.357.000
13	022	Kementerian Perhubungan	479.001.363	(1.653.998)	477.347.365	423.135.811
14	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	28.050.000	(140.250)	27.909.750	12.350.000
15	023	BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	5.853.574.766	(120.108.099)	5.733.466.667	124.000.000
16	024	Kementerian Kesehatan	576.602.260	(76.450.750)	500.151.510	635.083.757
17	024	BLU Kementerian Kesehatan	-	-	-	28.900.000
18	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	13.771.235.658	(6.885.618)	13.764.350.040	-
19	027	Kementerian Sosial	90.162.000	(86.518.310)	3.643.690	659.024.331
20	029	Kementerian Kehutanan	87.228.974	(35.211.394)	52.017.580	-
21	033	Kementerian Pekerjaan Umum	1.008.724.495	(175.028.615)	833.695.880	59.038.536.783
22	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	31.869.468	(159.347)	31.710.121	39.121.044
23	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	2.485.785.307	(168.064.805)	2.317.720.502	195.289.055
24	041	Kementerian BUMN	61.829.662	(309.148)	61.520.514	65.916.662
25	043	Kementerian Lingkungan Hidup	1.373.636.362	(1.373.636.362)	-	1.650.000.000
26	044	Kementerian KUKM	54.030.207	(9.274.903)	44.755.304	114.403.034
27	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	6.000.000	(30.000)	5.970.000	-
28	054	Badan Pusat Statistik	25.907.973	(4.971.097)	20.936.876	149.631.949
29	056	Badan Pertanahan Nasional	3.155.900.348	(2.109.414.985)	1.046.485.363	3.299.478.133
30	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	1.362.339.403	(354.529.181)	1.007.810.222	781.663.184
31	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	409.157.104	(206.558.597)	202.598.507	439.231.908
32	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	26.844.691	(134.223)	26.710.468	-
33	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	58.000.000	-	58.000.000	67.000.000
34	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	1.347.250	(6.736)	1.340.514	-
35	077	Mahkamah Konstitusi	29.658.827	(148.294)	29.510.533	-
36	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	53.772.171.119	(53.751.607.775)	20.563.344	53.496.444.530
37	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22.491.189.860	(20.235.048.308)	2.256.141.552	20.265.332.478
38	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	67.492.809.337	(67.449.327.837)	43.481.500	49.718.310.377
39	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	1.701.968.664	(169.329.042)	1.532.639.622	1.173.602.576
40	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	13.242.893.007	(10.145.938.649)	3.096.954.358	22.500.000
41	084	Badan Standardisasi Nasional	397.413.000	(1.987.065)	395.425.935	-
42	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	28.676.256	(143.381)	28.532.875	34.676.256
43	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	1.976.188	(9.881)	1.966.307	-
44	088	Badan Kepegawaian Negara	-	-	-	305.950.945
45	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	25.994.008.771	(25.994.008.771)	-	24.843.968.482
46	090	Kementerian Perdagangan	468.184.250	(2.340.921)	465.843.329	699.881.250
47	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	8.500.000	(42.500)	8.457.500	-
48	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	24.563.650	(122.819)	24.440.831	-
49	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	7.536.370	(7.536.370)	-	9.827.278
50	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	252.620.150	-	252.620.150	-
TOTAL			246.721.313.918	(186.763.587.372)	59.957.726.546	249.626.424.418

**ASET TAK BERWUJUD DAN ASET LAIN-LAIN
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	988.499.540	933.829.540	36.844.200	807.641.200
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	18.259.646.774	9.277.485.378	26.772.590.656	27.486.408.656
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	64.337.315.213	46.281.373.781	20.742.811.168	26.300.729.803
4	005	Mahkamah Agung	20.291.891.071	16.585.257.378	39.304.602.239	14.826.970.294
5	006	Kejaksaan Agung	3.309.798.403	2.494.978.123	15.752.248.289	5.917.865.224
6	007	Sekretariat Negara	15.165.235.054	12.662.391.404	1.966.644.881.972	1.948.657.588.647
7	007	BLU Sekretariat Negara	305.659.000	224.599.000	-	651.885.105.326
8	010	Kementerian Dalam Negeri	1.513.687.117.222	751.443.921.142	98.118.807.399	107.135.811.691
9	011	Kementerian Luar Negeri	12.325.132.833	10.758.120.581	139.199.578.914	187.706.944.536
10	012	Kementerian Pertahanan	489.295.668.447	262.525.510.568	3.723.067.557.798	3.598.464.347.679
11	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	288.291.861.880	239.237.022.128	64.318.557.468	28.952.931.315
12	015	Kementerian Keuangan	518.108.669.309	474.893.975.396	379.512.337.729	248.393.281.860
13	015	BLU Kementerian Keuangan	3.177.745.040	2.898.446.790	38.742.000	75.164.492.014
14	018	Kementerian Pertanian	61.924.734.091	19.234.185.300	290.804.071.696	251.030.604.245
15	018	BLU Kementerian Pertanian	4.432.790	4.432.790	47.481.765	240.818.015
16	019	Kementerian Perindustrian	27.012.663.128	9.309.730.559	13.929.819.697	6.518.045.709
17	019	BLU Kementerian Perindustrian	364.970.000	-	197.304.192	-
18	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	1.672.085.287.468	1.631.499.801.236	1.345.105.299.094	712.189.250.764
19	022	Kementerian Perhubungan	1.886.541.933.297	1.465.590.727.842	2.142.196.518.442	1.197.499.645.717
20	022	BLU Kementerian Perhubungan	42.026.303.393	24.093.295.916	1.009.825.900	112.200.000
21	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	361.056.604.717	290.717.673.533	14.137.027.496.322	13.912.326.313.272
22	023	BLU Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	167.096.017.733	63.824.711.360	46.404.100.710	19.613.463.891
23	024	Kementerian Kesehatan	59.933.887.371	42.517.391.731	9.072.903.497.017	8.788.274.613.189
24	024	BLU Kementerian Kesehatan	28.007.851.163	23.372.871.313	66.109.501.512	66.105.923.633
25	025	Kementerian Agama	61.526.128.279	40.990.665.207	66.651.129.597	46.617.514.732
26	025	BLU Kementerian Agama	18.454.671.532	15.851.399.401	10.704.019.400	3.114.844.489
27	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.675.607.153	34.357.200.673	3.057.318.419.569	2.291.751.851.101
28	026	BLU Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	558.042.084	233.452.200	139.136.000	139.136.000
29	027	Kementerian Sosial	19.120.804.306	16.620.459.754	23.593.457.063	21.488.713.387
30	029	Kementerian Kehutanan	65.661.460.948	53.811.575.679	52.646.176.261	33.879.700.436
31	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	37.526.347.402	25.670.748.726	98.751.209.153	95.378.157.264
32	033	Kementerian Pekerjaan Umum	4.919.228.727.633	4.251.358.800.389	590.641.764.292	475.711.122.701
33	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	36.866.485.817	25.090.001.130	2.335.627.675	1.277.717.821
34	035	Kemenko Bidang Perekonomian	217.680.750	217.680.750	-	-
35	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	2.266.145.420	2.182.335.590	1.411.426.095	-
36	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	21.475.791.427	12.132.642.500	8.794.108.241	8.483.623.341
37	041	Kementerian BUMN	15.637.031.192	15.253.927.692	5.451.789.510	4.696.412.561
38	042	Kementerian Riset dan Teknologi	42.527.429.146	41.678.449.646	34.313.194.790	34.041.634.991
39	043	Kementerian Lingkungan Hidup	16.623.377.045	12.324.441.685	5.174.866.915	5.229.223.412
40	044	Kementerian KUKM	15.123.060.962	10.222.932.609	59.008.181.711	61.818.508.592
41	044	BLU Kementerian KUKM	13.030.938.000	13.030.938.000	25.909.000	25.909.000
42	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	3.002.050.500	7.250.505.800	1.018.447.308	344.949.647
43	048	Kementerian PAN	2.575.023.720	2.004.023.720	373.688.861	236.261.898
44	050	Badan Intelijen Negara	421.868.768.788	379.007.042.708	482.212.000	3.183.187.009
45	051	Lembaga Sandi Negara	116.922.073.689	96.884.035.889	113.458.224.100	-
46	052	Dewan Ketahanan Nasional	4.025.245.964	3.576.883.314	-	-
47	054	Badan Pusat Statistik	179.365.871.843	62.265.274.936	33.486.652.486	35.205.833.268
48	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	19.686.419.731	19.363.875.078	61.828.874.529	69.073.284.203
49	056	Badan Pertanahan Nasional	106.850.641.704	136.381.563.351	41.457.371.204	20.422.991.234
50	057	Perpustakaan Nasional Republik Indonesia	56.913.776.992	53.787.976.992	709.713.110	583.937.583
51	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	150.949.043.922	89.461.851.871	284.410.074.101	39.460.355.542
52	059	BLU Kementerian Komunikasi dan	5.461.943.300	4.910.128.300	12.937.849.000	-
53	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	306.455.496.578	208.820.615.494	252.189.434.163	244.662.565.080
54	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	59.377.156.339	8.072.253.591	6.947.984.321	5.625.280.748
55	064	Lembaga Ketahanan Nasional	149.303.736.448	75.497.112.203	1.538.519.680	1.621.497.045
56	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	88.368.164.878	83.041.567.078	76.615.072	76.615.072
57	066	Badan Narkotika Nasional	56.960.938.158	52.616.875.958	58.860.698.533	98.515.035.915
58	067	Kementerian Pembangunan Daerah	14.000.000	14.000.000	17.907.541.150	2.541.108.400
59	068	Badan Kependudukan dan Keluarga	21.769.745.654	17.073.786.308	7.747.216.065	2.765.612.169
60	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1.707.252.089	1.667.352.089	-	-

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	ASET TAK BERWUJUD		ASET LAIN-LAIN	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
61	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan	130.021.054.483	97.524.923.063	18.975.675.618	16.467.950.870
62	076	Komisi Pemilihan Umum	1.729.592.666	903.866.495	23.724.944.099	8.044.921.229
63	077	Mahkamah Konstitusi	5.479.346.974	5.479.346.974	3.565.519.467	3.633.832.467
64	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi	8.444.716.975	4.725.432.026	831.293.429	48.437.300
65	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	11.050.335.154	7.576.012.881	11.512.513.177	16.685.127.770
66	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	27.977.944.914	23.243.139.814	11.354.168.104	6.036.509.332
67	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	60.723.930.817	58.113.195.929	9.335.606.268	2.801.395.090
68	081	BLU Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	34.727.000	34.727.000	4.448.910.924	2.647.606.204
69	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	16.367.334.785	6.463.404.447	7.939.828.321	167.348.384
70	082	BLU Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	4.361.000	3.362.000		
71	083	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional	510.530.952.633	398.981.655.253	681.042.662	681.042.662
72	084	Badan Standardisasi Nasional	1.434.637.750	1.239.937.750	253.498.257	962.310.206
73	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	1.320.219.056	230.203.450	371.030.000	1.639.059.940
74	086	Lembaga Administrasi Negara	3.418.506.100	2.970.828.600	1.667.951.716	260.685.379
75	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	12.659.577.325	11.324.654.375	287.444.199	8.282.196.849
76	088	Badan Kepegawaian Negara	147.886.272.661	145.791.342.374	3.402.454.643	6.391.879.179
77	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	9.983.054.815	9.726.730.615	2.941.957.890	4.290.136.128
78	090	Kementerian Perdagangan	130.199.386.130	114.569.882.280	232.827.451.844	2.989.840.702
79	091	Kemen Perumahan Rakyat	46.815.142.553	46.486.627.553	539.318.215.316	542.230.677.038
80	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	18.430.889.900	17.468.139.900	163.326.368.442	129.981.308.254
81	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	16.453.417.052	12.154.550.178	1.161.224.396	1.098.530.337
82	094	BRR NAD - Nias			516.936.124.188	485.603.480.566
83	095	Dewan Perwakilan Daerah	5.059.536.602	4.224.326.072	97.378.500	3.025.000
84	100	Komisi Yudisial	1.524.651.246	1.306.201.600	302.408.735	209.275.875
85	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	28.331.128.584	23.844.661.884	511.741.762.685	129.924.581.806
86	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	6.314.782.920	5.957.914.170	392.815.650	5.940.000
87	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	549.989.747	449.256.147	410.354.480	160.952.430
88	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa	11.133.566.320	6.444.211.246	66.473.000	66.473.000
89	107	Badan SAR Nasional	28.132.472.322	23.761.391.102	62.062.835.853	52.021.000.336
90	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	9.231.159.346	6.988.859.346	324.193.843	1.988.511.148
91	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	35.432.797.250	16.326.182.650		
92	110	Ombudsman Republik Indonesia	184.549.840	85.000.000		
93	111	Badan Nasional Pengelola Perbatasan	73.375.610.560	55.377.790.710		
94	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan	5.235.025.271	-		
95	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	19.016.400	-		
96	114	Sekretariat Kabinet	889.454.500	-		
97	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	230.267.026	-		
98	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik	1.029.234.318	-	51.360.154.112	-
99	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik	2.479.038.211	-	12.422.072.015	-
100	118	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan			2.877.832.400	-
101	999.03	Investasi Pemerintah			42.346.855.319	142.127.657.545
102	999.04	Penerusan Pinjaman			19.719.281.153.339	19.419.108.122.985
103	999.08	Belanja Lain-lain	-	23.734.946.611	-	46.701.991.689
104	999.99	Transaksi Khusus			43.080.717.197.935	49.476.131.894.229
TOTAL			15.705.813.685.536	12.406.618.813.595	103.540.902.717.961	105.992.977.283.250

ASET TANAH KKKS YANG DICATAT PADA NERACA LKPP 2012

No.	UNIT / KKKS	LOKASI/BLOCK	SALDO PER DESEMBER 2012		KETERANGAN
			LUAS (M2)	NILAI WAJAR TANAH (Rp)	
1	2	3	4	5	6
1	TOTAL INDONESIA E&P	BALIKPAPAN	9.705.925	546.054.937.372	
2	VICO SANGA SANGA	SANGA-SANGA	1.154.632	44.075.198.000	
3	PT. MEDCO E & P TARAKAN	TARAKAN	340.635	28.962.632.000	
4	PT. PERTAMINA EP AREA CEPU	AREA CEPU	42.055	6.392.360.000	
5	PT. CHEVRON INDONESIA COMPANY	BALIKPAPAN	14.459.988	261.863.240.500	
6	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN	437.675.097	10.592.439.949.130	
7	PT. KONDUR PETROLEUM SA	PEKANBARU	6.981.158	230.121.681.000	
8	PT. PETROSELAT LTD	SELAT PANJANG	411.388	10.602.840.000	
9	PT. MEDCO E & P INDONESIA	PEKANBARU - PELALAWAN	6.195.852	84.653.336.280	
10	PT. KALILA (BENTU) LTD.	PELALAWAN & PEKANBARU	361.235	1.945.175.000	
11	PT. KALILA (KORINCI BARU) LTD.	PEKANBARU	464.088	7.592.592.400	
12	PT. PETROCHINA INT. BERMUDA	SORONG	3.862.621	7.307.770.750	
13	PT. PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI	1.660.974	2.654.097.310	
14	KANGEAN ENERGY	KANGEAN BLOCK	898.504	40.817.865.860	
15	PT. MEDCO E & P RIMAU	RIMAU BLOCK	1.497.087	5.562.224.000	
16	MOBIL CEPU LTD	BLORA & BOJONEGORO	587.573	49.679.658.000	
17	EXXONMOBIL OIL INDONESIA	BLOCK B ACEH	504.273	10.501.230.000	
18	PT PERTAMINA EP REGION SUMATERA	SUMATERA	12.540.916	932.092.427.000	
19	CONOCOPHILLIPS SOUTH JAMBI LTD	JAMBI	25.887.874	3.400.038.160	
20	VICO UNIT SEMBERAH	SEMBERAH	12.392.826	51.415.100.000	
21	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN PAMAGUAN	5.689.285	20.536.437.113	
22	VICO UNIT MUTIARA	LAPANGAN MUTIARA	11.686.331	64.787.724.558	
23	VICO UNIT BADAK & NILAM	BADAK DAN NILAM	79.897.257	186.273.424.543	
24	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO	BANGKO BLOCK	1.014.425	19.021.937.352	
25	PT. MEDCO E & P INDONESIA	LEMATANG BLOCK	962.044	3.549.632.633	
26	JOB HESS JAMBI MERANG	JAMBI	871.217	6.029.860.000	
27	JOB PERTAMINA GOLDEN SPIKE - PENDOPO	PENDOPO	955.055	31.627.815.000	
28	JOB PERTAMINA JAVA - TUBAN	TUBAN	569.945	66.459.346.700	
29	CONOCOPHILLIPS GRISSIK LTD	GRISSIK - MUSI BANYUASIN	685.838	502.869.000	
30	PT. MEDCO E & P INDONESIA	CENTRAL SUMATERA/MUSI RAWAS	289.342	2.112.767.000	
31	JOB PERTAMINA TALISMAN	OGAN KOMERING	482.923	2.258.798.000	
32	PT. BOB BUMI SIAK PUSAKO	SIAK - PEKANBARU	132.829	4.100.448.000	
33	TAC PERTAMINA BWP MERUAP LTD	SAROLANGUN	301.743	3.657.675.075	
34	PT. LAPINDO BRANTAS INC.	SIDOARJO	447.275	33.296.382.882	
35	JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI	BLOCK TOILI- SULAWESI	343.689	3.274.558.000	
36	PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA - SIAK	SIAK - PEKANBARU	4.254.516	9.403.683.400	
37	ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG)	SENGKANG	567.485	23.890.286.000	
38	PEARL OIL TUNGKAL LTD	TUNGKAL BLOCK - JAMBI	353.137	1.041.880.133	
39	PT. PETROCHINA INT JABUNG	JABUNG BLOCK - JAMBI	8.449.765	323.833.352.258	
40	KODECO ENERGY LTD.	GRESIK	39.520	1.068.469.575	
41	HESS INDONESIA PANGKAH	GRESIK	286.675	63.497.000.000	
	TOTAL			13.788.358.699.984	
42	PT PERTAMINA EP REGION JAWA BAGIAN BARAT	JAWA BAGIAN BARAT	-	68.597.208.000	Hasil IP 2011
43	Chevron Indonesia Company	East Kalimantan	11.924.889	475.008.806.000	Hasil IP 2011
44	PT PERTAMINA EP Cepu		89.369	30.319.456.000	Hasil IP 2011
	TOTAL			573.925.470.000	
	TOTAL		667.919.254	14.362.284.169.984	

kurs 1 US\$ = Rp9.400

**REKAP ASET NON TANAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
KKKS PRODUKSI							
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru	6.765	223.156.225	962.528.383.135	255.148.897.394	707.379.485.741
2	BP Berau Ltd.	Berau	221	625.356.492	6.420.196.686.910	1.422.531.239.492	4.997.665.447.418
3	BP Muturi Ltd.	Muturi					
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar					
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean	159	47.546.153	207.800.598.620	39.941.725.875	167.858.872.745
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	4.201	736.851.012	3.705.065.244.719	989.571.644.548	2.715.493.600.171
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait	97	435.514.026	2.373.190.921.407	327.570.019.610	2.045.620.901.798
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	701	65.428.478	355.539.808.623	109.019.586.730	246.520.221.893
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	1.681	704.397.899	4.307.496.957.285	1.199.331.551.863	3.108.165.405.422
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	1.141	867.098.247	5.402.435.174.739	1.293.257.428.023	4.109.177.746.715
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B	255	47.765.930	278.741.845.786	25.967.347.718	252.774.498.068
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	1.972	2.288.497.258	20.830.850.030.970	3.212.312.968.494	17.618.537.062.476
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang	501	17.159.299	74.092.281.835	16.729.384.057	57.362.897.778
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	4.865	1.122.134.334	4.977.143.088.940	1.733.413.526.776	3.243.729.562.164
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah	272	347.575.097	3.519.113.744.796	877.970.618.344	2.641.143.126.452
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo	41	8.098.151	75.912.082.730	17.347.506.078	58.564.576.652
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang	188	39.865.582	167.223.579.061	106.850.538.883	60.373.040.178
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili	28	10.653.763	116.093.590.199	23.903.259.672	92.190.330.528
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban	1.007	103.963.783	691.058.024.889	178.602.695.068	512.455.329.822
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung	205	22.220.684	129.918.609.542	54.356.107.279	75.562.502.264
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering	1.001	53.971.488	302.934.160.227	109.951.069.295	192.983.090.932
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang	285	590.664	5.575.792.147	3.154.213.700	2.421.578.447
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru	102	10.269.906	88.309.436.143	33.381.668.907	54.927.767.236
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula	900	6.028.908	31.338.286.668	10.949.005.526	20.389.281.142
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean	383	339.216.478	962.929.613.541	599.944.258.672	362.985.354.869
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	339	221.500.439	2.090.598.649.436	461.437.223.732	1.629.161.425.704
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	1.314	176.477.024	870.230.911.831	150.702.340.910	719.528.570.921
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas	219	18.810.200	128.101.350.329	31.344.431.910	96.756.918.419
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu	1.317	88.533.669	826.944.954.045	180.002.823.263	646.942.130.781
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore	589	437.154.022	2.429.479.131.736	584.933.970.312	1.844.545.161.423
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal	57	14.310.596	132.233.579.776	44.978.350.651	87.255.229.125
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	15	358.564.948	2.085.904.759.378	919.262.958.753	1.166.641.800.625
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi	521	8.141.964	38.980.990.984	5.561.210.146	33.419.780.838

**REKAP ASET NON TANAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	23	409.011	3.827.014.250	1.943.928.845	1.883.085.405
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin	2.863	88.270.903	386.189.722.754	146.001.553.274	240.188.169.480
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	5.632	520.951.856	4.379.413.803.338	1.482.148.882.163	2.897.264.921.175
37	Petroselat Ltd.	Selat Panjang	80	4.795.594	36.406.235.432	11.431.342.547	24.974.892.884
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A	614	305.126.859	1.930.334.016.637	403.866.503.152	1.526.467.513.485
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	300	11.355.965	48.073.381.431	7.100.714.380	40.972.667.051
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	51.933	3.209.853.448	17.533.562.672.650	5.338.955.575.098	12.194.607.097.553
41	PT.SPR Langgak	Mountain Front Kuantan	90	3.689.212	21.743.118.651	3.288.970.257	18.454.148.394
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera	1.123	125.149.323	945.928.371.658	213.422.208.161	732.506.163.497
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang	27	72.692.535	632.459.522.762	85.180.382.623	547.279.140.139
44	PT Medco E&P Malaka	Block A	1	32.080	113.338.000	37.779.333	75.558.667
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau	2.411	179.939.127	1.257.192.761.282	324.897.374.901	932.295.386.381
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan	186	30.446.205	211.008.547.572	65.218.422.979	145.790.124.593
47	PT Pertamina EP*	Indonesia	3.963	639.296.217	5.666.761.000.475	1.769.206.979.464	3.897.554.021.011
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura	13	15.988.607	148.694.046.377	52.042.916.232	96.651.130.145
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang	43	94.343.073	904.968.630.104	170.568.108.932	734.400.521.173
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	707	379.049.130	1.881.318.722.421	1.308.379.471.580	572.939.250.841
51	Total E&P Indonesia	Mahakam	7.032	3.237.019.830	28.778.336.795.030	7.149.852.045.792	21.628.484.749.238
52	Total E&P Indonesia	Tengah Area	54	22.335.338	212.193.394.037	52.871.997.795	159.321.396.242
53	Triangle Pase Inc	Pase	37	60.313.435	427.090.461.000	51.547.370.697	375.543.090.303
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	3.672	1.199.777.816	6.125.994.488.706	1.847.189.033.031	4.278.805.455.675
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			112.146	19.647.688.282	136.119.572.314.994	35.504.581.132.918	100.614.991.182.076
KKKS EKSPLORASI							
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II	12	30.121,00	274.366.543,00	201.778.121,31	72.588.421,69
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan	5	151.231,00	1.687.112.240,00	843.556.120,00	843.556.120,00
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang	14	23.778	215.381.124	161.535.843,00	53.845.281,00
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi	14	23.778	215.381.124	161.535.843,00	53.845.281,00
59	Bungamas International Co.	Bungamas	23	186.894	1.673.658.210	532.071.922,63	1.141.586.287,38
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai	21	25.053,00	193.042.264,00	167.438.030,96	25.604.233,04
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat		0	0	-	-
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat	77	295.765	1.888.014.066	1.561.099.025,32	326.915.040,81
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh	9	49.646,00	298.009.358	298.009.357,81	-
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau	5	7.639	69.692.883	25.553.691,97	44.139.191,13
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan		0	0	-	-

**REKAP ASET NON TANAH
PER 31 DESEMBER 2012**

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah		Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
				Nilai Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limited	Mandar	1	313.721,59	3.435.251.410,50	1.932.328.918,41	1.502.922.492,09
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limite	Surumana	4	319.798,48	3.493.282.376,00	1.961.681.369,00	1.531.601.007,00
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait	95	31.590	304.215.294	136.224.827,24	167.990.466,55
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa	64	158.276	1.508.064.422	634.509.312,02	873.555.110,11
70	Inpex Masela Ltd	Masaela	43	104.713	885.568.533	470.883.092,57	414.685.440,46
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari	50	45.813	379.235.780	308.567.221,05	70.668.558,82
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block	31	78.098	697.871.754	468.530.899,98	229.340.853,67
73	AED Rombebai B.V	Rombebai	90	177.080	1.636.022.894	1.391.079.617,50	244.943.276,50
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku	18	240.684	2.264.167.432	1.572.599.082,13	691.568.350,26
75	Transworld Seruway Exploration LTD.		89	100.221	944.079.540	626.954.055,63	317.125.484,70
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai		-	-	-	-
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			665	2.363.900	22.062.417.248	13.455.936.351	8.606.480.896
TOTAL ASET			112.811	19.650.052.182	136.141.634.732.242	35.518.037.069.269	100.623.597.662.973

**REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN ULANG LHP KKS
DENGAN NILAI WAJAR RP 0,00 (NOL RUPIAH)**

No	KKKS	NERACA					Keterangan	CaLK			Keterangan
		Jumlah Aset	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku		Jumlah Aset	Nilai Perolehan	Nilai Wajar	
1	JOB Pertamina Talisman Ogan Komering	1	187.844	829.702.058	622.276.544	207.425.515					
2	Pertamina EP Prabumulih	1	5.762,00	30.529.775	2.654.763	27.875.012	2 aset sudah digabung ke aset induk				
3	Total EP Mahakam	689	-	-	-	-	sudah digabung ke aset induk				
4	Kondur Petroleum	6	11.327.022,71	61.119.180.066	13.818.092.033	47.301.088.032		387	70.058.375,36	11.496.730.768	dicatat di neraca digabung dengan penyajian subsequent expenditure dapat dikapitalisasi
5	Mont'd Or Oil	2	54.546	121.313.016	13.997.656	107.315.360					
6	CPI Rokan	2.496	128.784.240	424.382.585.479	140.329.345.385	284.053.240.094	dikurangi 3 aset karena dobel pencatatan	162	773.317,00	2.865.857.070	
7	PT Sarana Pembangunan Riau Langgak	1		44.435.495	2.962.366,37	41.473.129,11					
8	Petroselat Ltd.	-	-	-	0	0		1	-	378.000	
9	PT Chevron Pacific Indonesia (Siak)	2		7.469.221	5.417.829,32	2.051.391,62					
	Jumlah	3.198	140.359.415	486.535.215.110	154.794.746.576	331.740.468.534		550	70.831.692	14.362.965.838	

Reklasifikasi line number

1	Petrochina Bermuda	56	11300450,58	40.562.337.436,00	9.780.142.835,11	30.782.194.600,89
---	--------------------	----	-------------	-------------------	------------------	-------------------

DATA ASET SUMUR YANG TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
KKKS PRODUKSI					
1	BOB PT Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu	Coastal Plain Pekanbaru			
2	BP Berau Ltd.	Berau			
3	BP Muturi Ltd.	Muturi	1	2.716.113	31.439.004.734
4	BP WIRIAGAR	Wiriagar			
5	Camar Resources Canada Ltd.	Bawean			
6	Chevron Indonesia Company (Cico)*	East Kalimantan	2	2.611.557	11.813.911.128
7	Chevron Makassar Ltd.	Makassar Strait			
8	Citic Seram Ltd.	Seram Non Bula	11	3.720.663	11.493.492.728
9	CNOOC South East Sumatera Ltd.	Southeast Sumatera	125	42.097.286	176.033.168.096
10	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	15	2.193.677	6.100.083.943
11	ConocoPhillips (South Jambi) Ltd.	South Jambi B			
12	ConocoPhillips Indonesia Ltd.	South Natuna Sea B	2	374.762	947.188.387
13	Energy Equity EPIC (Sengkang) Pty Ltd.	Sengkang			
14	ExxonMobil Indonesia Inc.	Block B	12	10.331.467	36.029.977.761
15	Hess (Indonesia Pangkah) Ltd.	Pangkah			
16	JOB Pertamina - Golden Spike Ltd	Raja Pendopo			
17	JOB Pertamina-Costa International Group Ltd.	North Gebang			
18	JOB Pertamina-Medco E&P Tomori Sulawesi	Senoro-Toili			
19	JOB Pertamina-PetroChina East Java	Tuban			
20	JOB Pertamina-PetroChina Salawati	Kepala Burung			
21	JOB Pertamina-Talisman (Ogan Komering) Ltd.	Ogan Komering			
22	JOB Pertamina-Talisman Jambi Merang	Jambi Merang			
23	Kalila (Korinci Baru) Pty Ltd.	Korinci Baru			
24	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	Bula			
25	Kangean Energy Indonesia	Kangean			
26	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	11	3.805.010	34.872.916.650
27	Kondur Petroleum S.A.	Malacca Strait	2	523.322	2.311.117.255
28	Lapindo Brantas Inc.	Brantas			
29	Mobil Cepu Ltd.	Cepu			
30	Mobil Exploration Indonesia	North Sumatera Offshore			
31	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	Tungkal			
32	Pertamina Hulu Energi ONWJ Ltd	Offshore Northwest Java	4	1.002.456	1.521.997.115
33	Perusda Benuo Taka	Wailawi			
34	PetroChina International (Bangko) Ltd.	Bangko	15	1.504.467	13.867.595.915
35	PetroChina International (Bermuda) Ltd.	Salawati Basin			
36	PetroChina International (Jabung) Ltd.	Tanjung Jabung	2	329.981	3.157.272.500
37	Petrosetat Ltd.	Selat Panjang	1	96.045	442.817.603
38	Premier Oil Natuna Sea BV	Natuna Sea Block A			
39	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak			
40	PT Chevron Pacific Indonesia	Rokan	255	13.653.673,00	36.903.241.484,64
41	PT.SPR Langgak	Mountain Front Kuantan			
42	PT Medco E&P Indonesia	South & Central Sumatera			
43	PT Medco E&P Lematang	Lematang			
44	PT Medco E&P Malaka	Block A			
45	PT Medco E&P Rimau	Barisan Rimau			
46	PT Medco E&P Tarakan	Tarakan			
47	PT Pertamina EP*	Indonesia			
48	Santos (Madura) Pty Ltd.	Madura			
49	Santos (Sampang) Pty Ltd.	Sampang			
50	Star Energy (KAKAP) Ltd.	Kakap	21	13.782.983	60.608.368.588
51	Total E&P Indonesia	Mahakam	131	96.026.008	750.802.929.482
52	Total E&P Indonesia	Tengah Area			
53	Triangle Pase Inc	Pase			
54	Vico Indonesia Co.	Sanga-sanga	13	2.058.840	5.877.521.789
SUB TOTAL KKKS PRODUKSI			623	196.828.310	1.184.222.605.157
KKKS EKSPLORASI					
55	Anadarko Indonesia Company	North East Madura II			
56	Anadarko Indonesia Nunukan Company	Nunukan			
57	Anadarko Papalang Ltd.	Papalang			
58	Anadarko Popodi Ltd.	Popodi			
59	Bungamas International Co.	Bungamas			
60	Elnusa Bangkanai Energy Ltd.	Bangkanai			
61	ENI Ambalat Ltd.	Ambalat			
62	ENI Bukat Ltd.	Bukat			
63	ENI Krueng Mane Ltd.	Offshore North Aceh			
64	ENI Muara Bakau B.V.	Muara Bakau			
65	ENI Bulungan B.V	Bulungan			
66	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia (Mandar) Limited	Mandar			
67	ExxonMobil Exploration and Production Indonesia Surumana Limited	Surumana			
68	Husky Oil (Madura) Ltd.	Madura Strait			
69	Husky Oil North Sumbawa Ltd	North Sumbawa			
70	Inpex Masela Ltd	Masela			
71	Irian Petroleum Ltd	Manokwari			

DATA ASET SUMUR YANG TIDAK DIGUNAKAN

No	Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS)	Kontrak Area (Block)	Jumlah Aset	Hasil IP Minus Tanah	
				Nilai Perolehan (USD)	(Rp)
1	2	3	4	5	6
72	Kalila (Bentu) Ltd.	Bentu Block			
73	AED Rombebai B.V	Rombebai			
74	Pearl Oil (Sebuku)	Sebuku			
75	Transworld Seruway Exploration LTD.				
76	BP Bomberai Ltd	Bomberai			
SUB TOTAL KKKS EKSPLORASI			-	-	-
TOTAL ASET			623	196.828.310	1.184.222.605.157

REKAPITULASI VERIFIKASI DAN VALIDASI ASET SUBSEQUENT EXPENDITURE

NO	KKKS	DATA AWAL			Capitalized			Non Capitalized			unverified			Akumulasi Penyusutan Capitalized	Nilai Buku Capitalized
		JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)	JUMLAH	NILAI PEROLEHAN (USD)	NILAI WAJAR (Rp)		
1	CICo	263	28.194.139	120.452.191.193	244	26.905.686	114.638.066.316	19	1.288.453	5.814.124.876				29.071.528.827	85.566.537.489
2	CML	3	146.166	1.624.895.985	3	146.166	1.624.895.985							356.604.410	1.268.291.575
3	Total Mahakam	1.555	2.869.068.268	19.998.774.266.861	1.548	2.869.827.221	20.012.233.724.490				7	(758.953,16)	(13.459.457.628,39)	4.216.979.744.270	15.795.253.980.219
4	Total Tengah	3	20.829.854	196.196.396.145	3	20.829.854	196.196.396.145							53.954.008.940	142.242.387.205
5	Vico	133	37.069.898	178.227.862.741	133	37.069.898	178.227.862.741							49.014.170.071	129.213.692.670
6	Energy Epic	2	1.990	10.900.152	2	1.990	10.900.152							10.900.152	-
7	Kangean	88	342.203	3.138.526.334	88	331.622	3.042.693.170							2.523.088.615	519.604.555
8	PHE WMO	27	14.223.847	140.742.033.423	25	14.203.847	140.716.169.395	2	20.000	25.864.028				30.741.000.927	109.975.168.468
9	Lapindo	13	1.862.015	17.055.044.587	13	1.862.015	17.055.044.587							5.660.677.894	11.394.366.693
10	PHE ONWJ	5.036	2.046.606.392	8.586.206.989.619	5.034	2.048.579.145	8.620.901.097.471				2	-	-	2.343.603.356.860	6.277.297.740.611
11	Santos Madura	10	12.199.946	113.459.502.248	10	12.199.946	113.459.502.248							39.710.825.787	73.748.676.461
12	Santos Sampang	1	1.475	16.217.625	1	1.475	16.217.625							9.122.414	7.095.211
13	Kalila Korinci Baru	5	747.131	7.136.577.595	5	747.131	7.136.577.595							1.728.014.481	5.408.563.114
14	COPI (Grissik) Ltd.	209	63.759.728	542.311.928.143	196	63.439.759	540.645.365.576	11	342.542	1.666.562.567	2	(22.573)	-	156.032.553.467	384.612.812.109
15	COPI (South Jambii) Ltd.	5	130.870	735.882.869	5	130.870	735.882.869							69.252.740	666.630.129
16	COPI Indonesia	681	1.336.418.730	8.206.056.396.895	636	1.315.642.756	9.101.616.659.707	45	20.775.974	176.006.137.243	-	-	-	2.817.191.474.899	6.284.425.184.808
17	ExxonMobil Indonesia	761	144.943.768	599.051.006.339	755	144.826.806	598.844.569.812	6	116.962	206.436.527				591.285.679.165	7.558.890.647
18	Mobil Capu Ltd	3	6.764	41.262.952	3	6.764	41.262.952							21.472.838	19.790.114
19	Mobil Exploration Indonesia	11	1.213.919	8.191.499.850	11	1.213.919	8.191.499.850							1.668.958.536	6.522.541.314
20	Medco E&P Rimau	9	1.515.128	16.527.649.948	9	1.515.128	16.527.649.948							4.291.871.752	12.235.778.196
21	Pearl Oil (sebuk)	4	6.179	57.124.884	4	6.179	57.124.884							48.408.619.73	8.716.264,10
22	JOB Pertamina Petrochina East Java	86	3.031.300	7.847.750.451	19	1.031.731	4.527.863.925	67	1.999.569	9.731.814.879				1.225.764.987	3.302.098.938
23	Petrochina International Bermuda	437	41.166.063	145.816.269.059	437	41.166.063	145.816.269.059							30.481.079.503	115.335.189.556
24	JOB Pertamina Petrochina Salawati	4	1.384.838	12.855.330.061	4	1.384.838	12.855.330.061							6.748.685.107	6.106.644.954
25	JOB Pertamina Talisman Ogan Komering	111	3.772.002	20.828.753.318	85	2.579.709	13.321.984.824	26	1.192.293	7.506.768.494				4.210.007.976	9.111.976.848
26	Star Energi	6	26.495	27.320.718	6	26.495	27.320.718							11.217.490	16.103.229
27	CNOOC	1.488	582.443.438	1.961.449.898.421	1.457	572.598.968	2.131.573.132.393	30	9.840.037	40.376.378.255	1	4.433	-	281.750.521.967	1.849.822.610.426
28	Premier Oil	162	114.834.929	1.610.055.947.049	162	114.834.929	1.610.055.947.049							256.704.867.703	1.353.351.079.345
29	Citic Seram Ltd.	935	41.668.123	223.138.019.700	932	41.778.072	223.884.838.890				3	(109.949)	(746.819.190)	56.284.470.644	167.600.368.246
30	Kalrez Petroleum (Seram) Ltd.	2	41.155	201.974.467	2	41.155	201.974.467							10.098.723	191.875.744
31	Kondur Petroleum S.A.	558	44.034.331	225.539.973.243	558	114.092.707	237.036.704.011				-	-	-	34.928.089.537	202.108.614.474
32	MontD'Or Tungkal Oil Ltd.	14	243.351	2.374.006.133	13	243.351	2.374.006.133				1			929.861.883	1.444.144.250
33	PetroChina International (Jabung) Ltd.	1.270	148.154.702	1.399.370.950.720	1.270	148.154.702	1.399.423.169.048							581.811.676.314	817.611.492.734
34	Petroselat Ltd.	1	3.790	35.000.650	1	3.790	35.000.650							11.375.211	23.625.439
	Jumlah	13.896	7.560.092.927	44.345.555.350.377	13.674	7.597.424.687	45.453.052.704.746	206	35.575.830	241.334.086.870	16	(887.042)	(14.206.276.818)	11.599.080.432.709	33.853.972.272.037

REKAPITULASI HASIL IP BMN KKKS LANJUTAN TAHUN 2012

Lampiran 5

No	Nama KKKS	PIC	NILAI WAJAR AWAL RB			LHP RB NET TO NERACA			AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LHP RB NET TO CaLK		
			Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)			Jumlah Aset	Harga Perolehan	Nilai Wajar (Rp)
1	BOB Bumi Siak Pusako	Pekanbaru	979	18.667.081	29.583.750.371	57	628.321	1.370.580.833	370.704.383,75	999.876.449,58	922	18.038.761	28.213.169.538
2	AED Rombekhai	Jakarta	1	977	1.084.954	-	-	-	-	-	1	977	1.084.954
3	BP Tangguh		7	687.823	835.940.459	-	-	-	-	-	7	687.823	835.940.459
4	Camar Resources Canada	Bawean dan Jakarta	26	1.091.276	1.627.215.306	-	-	-	-	-	26	1.091.276	1.627.215.306
5	Chevron Indonesia Company	Jakarta	755	4.156.593	6.038.436.562	8	554.235	816.116.749	34.968.355,18	781.148.394,01	747	3.602.358	5.222.319.812
6	Chevron Indonesia Company	Jakarta	11	235.450	343.850.737	11	235.450	343.850.737	132.975.685,16	210.875.052,00	-	-	-
7	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Jakarta	675	2.409.698	3.626.796.689	-	-	-	-	-	675	2.409.698	3.626.796.689
8	Chevron Indonesia Company (Lanjutan)	Samarinda	5	3.352.829	17.069.674.977	4	3.094.105	16.674.782.765	4.952.655.707,63	11.722.127.057,38	1	258.724	394.892.212
9	Citic Seram	Eram Non Bula	56	1.004.502	1.413.888.767	-	-	-	-	-	56	1.004.502	1.413.888.767
10	CNOOC	Jakarta	1.164	25.557.144	44.543.717.711	76	17.189.907	33.517.436.001	11.452.965.971,96	22.064.470.029,04	1.088	8.367.237	11.026.281.710
11	ConocoPhillip Grissik	Grissik	26	2.678.951	4.317.686.254	15	478.839	906.974.736	454.910.757,69	452.063.977,89	11	2.200.112	3.410.711.519
12	ConocoPhillip Indonesia Blok B Natuna	Blok B Natuna	1.959	11.276.049	24.324.791.288	364	2.475.992	6.988.388.209	4.839.307.828,45	2.149.080.380,55	1.595	8.800.057	17.336.403.079
13	ConocoPhillip South Jambi	South Jambi	1	1.295	1.663.298	-	-	-	-	-	1	1.295	1.663.298
14	Energi Equiti Epic Sengkang	Jakarta	69	995.107	1.520.561.964	1	819.043	1.194.497.529	238.899.505,80	955.598.023,20	68	176.064	326.064.435
15	ENI Ambalat	Ambalat	2	4.310	5.255.989	-	-	-	-	-	2	4.310	5.255.989
16	ENI Bukit	Bukat	11	137.432	165.413.966	-	-	-	-	-	11	137.432	165.413.966
17	ENI Krueng Mane	Krueng Mane	46	245.635	299.866.658	-	-	-	-	-	46	245.635	299.866.658
18	Exxon Mobil Indonesia	Aceh dan Jakarta	1.836	96.516.405	147.786.370.455	1.647	95.046.119	145.746.521.412	137.645.242.355,43	8.101.279.056,81	189	1.470.286	2.039.849.042
19	Husky Oil North Sumbawa	Jakarta	2	2.562	24.586.781	-	-	-	-	-	2	2.562	24.586.781
20	Inpex Masela	Jakarta	4	3.835	25.647.537	-	-	-	-	-	4	3.835	25.647.537
21	Irian Petroleum Ecouse	Jakarta	18	23.633	215.740.729	-	-	-	-	-	18	23.633	215.740.729
22	JOB Pertamina Golden Spike		10	1.107.629	10.252.883.251	9	1.107.629	10.252.883.251	2.573.924.049,01	7.678.959.201,99	1	-	-
23	JOB Pertamina Costa Internasional	North Gebang	3	4.404	7.795.000	-	-	-	-	-	3	4.404	7.795.000
24	JOB Pertamina Talisman (Ogan Komering)	Ogan Komering	313	2.336.403	3.388.078.156	7	352.645	522.057.397	333.352.391,72	188.705.005,28	306	1.983.758	2.866.020.759
25	JOB Pertamina Talisman (Jambi Merang)	Jambi Merang	31	29.093	272.586.687	-	-	-	-	-	31	29.093	272.586.687
26	JOB Pertamina Petrochina East java	Tuban	232	723.431	1.272.693.074	4	3.743	5.184.152	4.614.629,06	569.522,62	228	719.688	1.267.508.922
27	JOB Pertamina Salawati	Salawati	101	3.274.604	13.949.906.189	2	5.031	11.857.618	5.928.809,00	5.928.809,00	99	3.269.573	13.938.048.571
28	Kalrez Petroleum	Bula	524	2.356.035	5.336.633.287	31	414.873	2.741.731.802	1.745.202.259,16	996.529.542,84	493	1.941.162	2.594.901.485
29	Kalila Korinci Baru	Pekanbaru	1	1.145	1.978.000	-	-	-	-	-	1	1.145	1.978.000
30	Kangean Energy Indonesia	Kangean	98	1.682.082	2.039.641.273	7	56.556	359.295.812	314.883.586,49	44.412.225,55	91	1.625.526	1.680.345.461
31	Kondur Petroleum	Kondur	54	308.736	1.470.408.642	27	176.389	1.263.561.029	982.390.039,03	281.170.990,41	27	132.348	206.847.613
32	Lapindo Brantas	Surabaya	20	111.186	182.741.529	-	-	-	-	-	20	111.186	182.741.529
33	PT Medco EP Indonesia	Lirik dan SSE	283	952.462	1.381.652.019	4	15.517	24.806.850	4.382.767,52	20.424.082,48	279	936.945	1.356.845.169
34	PT Medco EP Lematang	Lematang	6	2.336.571	3.506.379.367	6	2.336.571	3.506.379.367	892.073.814,50	2.614.305.552,50	-	-	-
35	PT Medco EP Malaka	Malaka	46	363.366	344.621.000	3	96.240	83.369.000	76.421.583,33	6.947.416,67	43	267.126	261.252.000
36	PT Medco EP Rimau	Rimau	178	3.960.450	7.131.641.551	14	339.392	1.804.431.767	349.762.950,39	1.454.668.816,61	164	3.621.058	5.327.209.784
37	PT Chevron pacific Indonesia (Rokan)	Rokan	9.046	199.048.041	339.964.862.903	7.044	174.229.264	302.813.985.381	119.908.414.719,34	182.905.570.661,95	2.002	24.818.777	37.150.877.521
38	Petrochina Internasional Jabung	Jabung	456	3.674.564	8.007.919.882	23	241.470	821.507.527	522.744.234,27	298.763.292,73	433	3.433.094	7.186.412.355
39	Pearl Oil Sebuku	Jakarta	1	2.275	20.083.700	-	-	-	-	-	1	2.275	20.083.700
40	VICO Indonesia Company	Sanga-sanga	858	58.832.439	111.929.946.792	218	50.118.539	95.465.611.311	54.790.357.426,42	40.675.253.884,24	640	8.713.900	16.464.335.481
41	RB Triangle Pase 2010-2011		17	9.876.713	18.410.547.185	4	5.164.812	7.641.378.185	2.780.112.976,67	4.861.265.208,33	13	4.711.901	10.769.169.000
42	RB Transworld Seruway 2010-2011	Jakarta	1	552	6.008.154	1	552	6.008.154	3.004.076,80	3.004.076,80	-	-	-
43	Total E&P Indonesia	Mahakam	312	22.443.423	73.756.730.463	134	18.450.927	67.036.226.699	23.316.629.313,51	43.719.597.385,68	178	3.992.497	6.720.503.764
44	Star Energi (KAKAP) Ltd.		221	910.478	1.756.675.853	7	50.432	63.281.644	31.640.822,00	31.640.822,00	214	860.046	1.693.394.209
45	PT Chevron Pacific Indonesia	Siak	13	1.741.120	2.631.649.862	13	1.741.120	2.631.649.862	406.892.703,05	2.224.757.158,95	-	-	-

REKAPITULASI HASIL IP BMN KKKS LANJUTAN TAHUN 2012

Lampiran 5

No	Nama KKKS	PIC	NILAI WAJAR AWAL RB			LHP RB NET TO NERACA			AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU	LHP RB NET TO CaLK		
			Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)	Jumlah Aset	Harga Perolehan (USD)	Nilai Wajar (Rp)			Jumlah Aset	Harga Perolehan	Nilai Wajar (Rp)
46	Premier Oil Natuna Sea B.V.	Natuna	89	373.497	276.558.568	-	-	-	-	-	89	373.497	276.558.568
47	Kodeco Energy Co. Ltd.	West Madura	85	29.940.371	130.715.256.190	-	-	-	-	-	85	29.940.371	130.715.256.190
48	Pertamina Hulu Energy	ONWJ	5	143.308.095	217.176.723.296	1	142.182.519	215.871.204.047	80.951.701.517,63	134.919.502.529,38	4	1.125.576	1.305.519.249
49	PT Pertamina EP		217	6.858.099	40.706.601.783	21	2.293.594	9.987.273.621	1.934.499.865,37	8.052.773.755,52	196	4.564.505	30.719.328.162
50	Mobil Exploration Indonesia Inc.	North Sumatra Offshore	14	37.711.325	57.381.460.538	14	37.711.325	57.381.460.538	11.020.988.109,73	46.360.472.428,44	-	-	-
51	Mobil Cepu Ltd.	Cepu dan Jakarta	37	264.432	438.698.838	37	264.432	438.698.838	229.227.691,50	209.471.146,50	-	-	-
52	PT Medco E&P	Tarakan	39	395.357	878.498.152	14	215.077	539.898.730	300.595.931,91	239.302.798,55	25	180.280	338.599.422
53	Petroselat	Pekanbaru	65	118.537	142.878.748	-	-	-	-	-	65	118.537	142.878.748
54	Petrochina International	Bermuda	619	4.164.023	7.136.416.368	-	-	-	-	-	619	4.164.023	7.136.416.368
TOTAL			21.648	708.259.525	1.345.649.097.750	9.828	558.090.657	988.832.891.554	463.602.376.818	525.230.514.735	11.820	150.168.868	356.816.206.196

DAFTAR ASET KKKS YANG DIKELUARKAN PENCATATANNYA DARI NERACA KARENA DALAM PROSES PENGHAPUSAN/FUPP

KKKS : Kodeco Energy Co. Ltd
Block : West Madura

No	No Harmoni	Line	Kategori	Deskripsi Aset	Merk/Type	Lokasi	Jumlah Aset	Dasar Perolehan	Tahun Perolehan	Dasar Perolehan		Nilai Wajar	Kondisi	Keterangan
										(US \$)	Rp			
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	93220128	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL OPTIPLEX 210	KE05/Gresik	16		2006	44.022,00	397.078.440,00	401.040.420,00	B	
2	93220115	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL OPTIPLEX	KE05/Gresik	1		2006	9.600,00	86.592.000,00	88.512.000,00	B	
3	93220105	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL	KE05/Gresik	1		2006	5.730,00	51.684.600,00	53.833.350,00	B	
4	93220113	01	G	COMPUTING MACHINES	DELL	KE05/Gresik	1		2006	40.875,00	368.692.500,00	384.020.625,00	B	
JUMLAH							19			100.227,00	904.047.540,00	927.406.395,00		

KOREKSI ATAS NILAI WAJAR HASIL IP TAHUN 2010, 2011, dan 2012

No.	KKKS	Block	ASET BERNILAI WAJAR NEGATIF PER 31 DES 2011			KOREKSI ASET INDUK					
			Aset KKKS (Berdasarkan LHP)		Nilai Wajar (Rp)	Jumlah	Nilai Perolehan (US\$)	Nilai Wajar (Rp) Sebelum Koreksi	Nilai Wajar (Rp) Sesudah Koreksi	Koreksi dalam Neraca	koreksi akumulasi penyusutan
			Jumlah	Nilai Perolehan USD							
1	ConocoPhillips (Grissik) Ltd.	Corridor	1	(5.957)	(53.732.140)	1	87.299.551	458.412.994.335	445.243.644.830	(13.169.349.505)	(1.795.820.387)
	Dilakukan Perhitungan Ulang		1	(5.957)	(53.732.140)	1	87.299.551	458.412.994.335	445.243.644.830	(13.169.349.505)	(1.795.820.387,06)
2	Total EP Indonesia	Mahakam	201	(23.612.415)	(236.538.505.206)	149	404.935.248	3.504.350.930.323	2.224.842.663.120	(1.279.508.267.203)	(216.988.471.926)
	Nilai Wajar Terkoreksi IP 2011		138	(22.296.130)	(223.794.027.042)	88	380.063.407	3.415.179.533.615	2.043.799.437.120	(1.371.380.096.495)	(216.988.471.926,30)
	Nilai Wajar Terkoreksi IP 2012		63	(1.316.284)	(12.744.478.163)	61	24.871.841	89.171.396.708	181.043.226.000	91.871.829.292	0
3	Citic Seram	Seram Non Bula	6	(401.608)	(3.748.610.030)	6	787.000	4.233.030.334	3.891.049.130	(341.981.204)	(537.365.873)
	Nilai Wajar Terkoreksi		4	(71.123)	(675.842.275)	4	787.000	4.233.030.334	3.891.049.130	(341.981.204)	(537.365.872,75)
	Nilai Menjadi Nol		2	(330.485)	(3.072.767.755)	2	-	-	-	-	-
4	Premier Oil Indonesia	Natuna	1	(0,3)	(2.770)	1	-	-	-	-	-
	Nilai Menjadi Nol		1	(0,3)	(2.770)	1	-	-	-	-	-
	Total		209	(24.019.980)	(240.340.850.146)	157	493.021.799	3.966.996.954.992	2.673.977.357.080	(1.293.019.597.912)	(219.321.658.186)
	Mengkoreksi hasil IP 2011		146	(22.703.696)	(227.596.371.983)	93	468.149.958	3.877.825.558.284	2.492.934.131.080	(1.384.891.427.204)	(219.321.658.186)
	Mengkoreksi hasil IP 2012		63	(1.316.284)	(12.744.478.163)	61	24.871.841	89.171.396.708	181.043.226.000	91.871.829.292	-

Catatan:

Hasil koreksi aset yang menjadi Rp 0,00 dikeluarkan dari LHP dan dicatat dalam BA-04, karena nilai aset sudah terkoreksi namun karena sistem yang tidak mengizinkan harmoni tsb dihapuskan maka ditempuh dengan membuat harmoni baru dengan nilai minus

Rincian Aset Properti Eks BPPN

NO.	ASET	UNIT	NILAI
1	BJDA (Verifikasi 2009)	114	618.158.742.000
2	Settlement (Verifikasi 2009)	23	61.301.947.000
3	BJDA (Verifikasi 2011)	314	846.861.639.807
4	Temuan BPK	917	943.801.628.200
5	Griya Potensa	132	23.767.000.000
6	Apartemen Paladian	143	34.069.110.000
7	Sinar Bonana	42	139.208.400.000
Total		1.685	2.667.168.467.007

Surat Berharga Eks BPPN

No.	Nama Aset	Nilai Aset
a. Corporate Bonds		
1	Dgs International Finance Co.	835.000
2	Bank Dagang Nasional Indonesia	38.282.123.925
3	Tpe International Finance Co. Bv	3.914.062.500
4	Ciputra Surya	38.750.000
5	Jakarta International Hotel	800.000.000
6	Mulia Glass Coupon	38.125.000
7	Mulia Keramik Coupon	38.125.000
8	Polysindo Eka Perkasa	526.050.000
9	Tpe International Finance Co. Bv	313.125.000
Total		43.951.196.425
b. Government Bond		
1	Bank Papan	500.000.000
2	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	1.427.328.042
3	Polysindo Eka Perkasa	701.400.000
4	Polysindo Eka Perkasa	1.340.571.458
5	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	150.300.000.000
6	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	7.218.608.400
7	Polysindo Eka Perkasa Medium Term Notes	7.258.287.600
Total		168.746.195.500
c. Non-Convertible Debentures		
1	Polysindo Eka Perkasa	5.000.000.000
Total		5.000.000.000
d. Miscellaneous		
1	Hutama Karya	8.350.000.000
2	Hutama Karya	8.350.000.000
3	Hutama Karya	8.350.000.000
4	Hutama Karya	41.750.000.000
Total		66.800.000.000
Total (a+b+c+d)		284.497.391.925

Aset saham eks BPPN

No.	Nama Emiten	Nilai per 31 Desember 2012
a. Aset Saham Pada Kustodi Citibank		
1	Bank PDFCI	87.500
2	Bank Ficorinvest	20.000
3	Merck, Tbk.	4.000.000
4	Reksadana Perdana	22.404.107.500
5	Multi Sarana R. Agung	63.855.000
6	Bank Surya	240.000
7	Langgeng Makmur	17.659.805.610
8	PT Sierad Produce	1.535.092.000
9	Apac Citra Center	2.667.935.900
10	Apac Citra Centertex	3.109.155.100
11	Holcim Indonesia Tbk, Pt	24.322.375.000
12	Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk	3.468.750
13	Sucaco	1.015.000
14	Sucaco	783.000.000
15	Aster Dharma Ind.	760.000
16	Mulia Industrindo	9.250.000.000
17	Perdana Inti Investama	2.462.575.000
18	Citatah Industri M	836.572.450
19	Citatah Industri M	3.065.186.486
20	Bank Dagang Nasional Indonesia Tbk	27.225
21	Gajah Tunggal	108.000
22	Lippo E-Net	14.000
23	Prima Alloy Steel	187.500
24	Trias Sentosa	17.400
Total		88.169.605.421
b. Aset Saham Pada DJKN		
1	PT Karabha Digdaya	418.734.567.643
2	PT Sukapraja Estetika Padang Golf	1.425.000.000
3	PT Aqua Golden Misisipi	312.000
4	PT Kabelindo Murni	20.389.779.189
Total		440.549.658.832
Total (a+b)		528.719.264.253

Surat Berharga Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Aset	Jenis Surat Berharga	Nilai Aset
1.	Dharmala Intiutama	Obligasi	2.793.450.000
2.	Ometraco Multi Artha	Obligasi	6.499.457.694
3.	Ongko Intl Fin	Obligasi	4.317.150.000
4.	Ongko Intl Fin CO BV	Obligasi	215.857.500
5.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000
6.	Pacific Intl CP	Obligasi	507.900.000
7.	Indonesia Bermuda	Reksadana	1.805.657.589
8.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713
9.	Mulia Keramik I/97 – Mulia Ind Wrt SRA-SL	Warrants	4.934.713
Total			16.657.242.209,00

Saham (Non Bank) Eks Kelolaan PT PPA

No.	Nama Emiten	Nilai per 31 Desember 2012 (Unaudited)	Nilai per 31 Desember 2011 (Audited)
1	PT Asuransi Jiwa Intan Life	223.500	223.500
2	PT Bunas Multifinance	75.000.000	75.000.000
3	PT Danaloka Pratama	141.550.000	141.550.000
4	PT Pama Indonesia Ltd	28.310.000	28.310.000
5	PT Pama Ventura Indonesia	234.871	234.871
6	PT Servitia Finance	1.500.000.000	1.500.000.000
7	PT Aplikanusa Lintasarta	125.015.692	125.015.692
8	PT Bhakti Sarana Ventura	385.154.000	385.154.000
9	PT Dbs Securities Indonesia	0	500.000.000
10	PT Sarana Jambi Ventura	124.823.000	124.823.000
11	PT Sarana Kalbar Ventura	193.544.000	193.544.000
12	PT Sarana Kalsel Ventura	77.950.000	77.950.000
13	PT Sarana Maluku Ventura	31.286.000	31.286.000
14	PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia	8.819.163.000	8.819.163.000
15	PT Asuransi Jiwa Tugu Mandiri	1	1
16	PT Asuransi Putra Mandiri	335.020.000	335.020.000
17	BDNI Reksadana (PT Reksadana Perdana)	6.000.000.000	6.000.000.000
18	PT Sarana Sulut Ventura	61.000.000	61.000.000
19	PT Sarana Sumbar Ventura	275.625.000	275.625.000
20	PT Sarana Irian Ventura	66.150.000	66.150.000
21	PT SMBC Indonesia Finance	3.750.000.000	3.750.000.000
Total		21.990.049.064	22.490.049.064

Saham yang diserahkan kepada PT PPA

Saham Bank					
No	Emiten	31-Des-12		31-Des-11	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	PT Bank Panin	1	287.482.800,00	1	490.505.136,00
2	PT Bank Permata	1	24.672.629.000,00	1	35.949.260.546,00
Jumlah		2	24.960.111.800,00	2	36.439.765.682,00

Saham non bank					
No	Emiten	31-Des-12		31-Des-11	
		Jml	Nilai	Jml	Nilai
1	PT Sejahtera Eka Graha	1	22.470.000.000,00	1	22.470.000.000,00
2	PT Tugu Reasuransi Indonesia	1	34.680.531.082,00	1	28.415.673.000,00
3	PT Asia Natural Resources	1	1.210.357.500,00	1	1.210.357.500,00
4	PT Jemblo Cable Company	1	431.315.500,00	1	406.746.000,00
5	PT Bina Prima Perdana	1	0		-
6	PT Tuban Petrochemical Industries	1	8.750.000,00		-
Jumlah		6	58.800.954.082,00	4	52.502.776.500,00
Total			83.761.065.882,00		88.942.542.182

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
1	001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	126.831.868	102.093.063	86.751.000	-
2	002	Dewan Perwakilan Rakyat	1.122.258.712	-	773.655.004	-
3	004	Badan Pemeriksa Keuangan	35.331.449.393	27.009.591.017	169.368.266	189.313.796
4	005	Mahkamah Agung	269.099.975.148	7.122.222.207	309.260.111	295.004.531
5	006	Kejaksaan Agung	11.986.441.141	52.575.145.987	214.061.690	-
6	007	Sekretariat Negara	93.904.514.134	58.484.424.331	50.627.476	99.400.454
7	010	Kementerian Dalam Negeri	49.497.775.823	240.630.523	1.419.063.688	375.304.509
8	011	Kementerian Luar Negeri	6.873.378.890	6.377.506.628	134.087.731	134.087.731
9	012	Kementerian Pertahanan	5.546.502.560.030	3.238.769.595.999		
10	013	Kementerian Hukum dan HAM RI	53.795.140.417	11.601.007.436	-	60.618.001.500
11	015	Kementerian Keuangan	39.060.216.445	17.174.929.541	4.367.814.771	1.583.445.635
12	018	Kementerian Pertanian	171.647.290.347	6.125.215.601	659.365.245	396.576.000
13	019	Kementerian Perindustrian	963.336.597	952.352.095	6.040.207.934	506.916.100
14	020	Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral	2.427.083.259	26.996.099.190	99.884.602	42.459.875
15	022	Kementerian Perhubungan	103.357.423.491	131.518.928.284	19.802.839.526	19.480.696.134
16	023	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	955.716.455.141	355.436.295.118	434.691.143.607	51.063.936.616
17	024	Kementerian Kesehatan	1.004.941.446.608	757.292.903.523	24.893.173.943	99.880.268.663
18	025	Kementerian Agama	1.891.674.557.774	3.557.037.840.052	9.214.660.077	9.154.923.970
19	026	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi	687.757.769	789.017.524	246.512.196	600.986.660
20	027	Kementerian Sosial	757.165.652	429.229.942		
21	029	Kementerian Kehutanan	7.378.565.495	1.595.997.772		
22	032	Kementerian Kelautan dan Perikanan	41.862.991.794	1.565.102.403	281.560.000	-
23	033	Kementerian Pekerjaan Umum	10.189.555.693	90.256.723.878	186.931.450	464.723.968
24	034	Kemenko Bidang Politik dan Keamanan	141.022.199	89.281.032	90.833.333	67.500.000
25	035	Kemenko Bidang Perekonomian	42.169.490	80.660.791		
26	036	Kemenko Bidang Kesejahteraan Rakyat	70.869.061	502.912.927		
27	040	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	12.924.138.691	1.770.921.240	138.000.000	18.333.333
28	041	Kementerian BUMN	-	16.772.500	311.838.667	-
29	042	Kementerian Riset dan Teknologi	5.116.828.459	821.660.991	205.645.344	-
30	043	Kementerian Lingkungan Hidup	879.908.257	73.607.371	76.600.000	109.200.000
31	044	Kementerian KUKM	3.095.961.959	2.908.617.548	10.474.672.148	7.485.950.149

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
32	047	Kementerian Pemberdayaan Perempuan	2.850.090.666	96.293.000		
33	048	Kementerian PAN	154.497.108	123.191.960		
34	050	Badan Intelijen Negara	2.003.361.402	-		
35	051	Lembaga Sandi Negara	516.892.448	311.794.000		
36	054	Badan Pusat Statistik	3.721.781.542	2.774.401.823		
37	055	Kementerian Negara PPN/ Bappenas	35.485.301	-		
38	056	Badan Pertanahan Nasional	11.423.683.792	9.885.856.284	29.432.450.447	17.406.378.211
39	059	Kementerian Komunikasi dan Informatika	4.447.078.101	1.713.855.113	6.168.415.488.349	6.040.228.256.095
40	060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	268.652.578.034	83.127.696.097	4.702.701.056	9.252.117.772
41	063	Badan Pengawas Obat dan Makanan	69.558.806.730	926.332.863	14.666.560	16.380.000
42	064	Lembaga Ketahanan Nasional	2.684.794.099	6.201.000		
43	065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	307.258.671	626.741.873	610.863.660	-
44	066	Badan Narkotika Nasional	56.109.259.090	8.118.498.620		
45	067	Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal	14.057.177.400	133.951.193		
46	068	Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	144.198.073	223.609.345		
47	074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	134.900.972	-		
48	075	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	2.004.752.106	655.648.487		
49	076	Komisi Pemilihan Umum	557.722.122	369.770.658		
50	077	Mahkamah Konstitusi	377.155.405	10.055.990	-	93.108.000
51	078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	14.983.078	-	10.604.141	18.089.388
52	079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	10.431.755.820	502.174.953	6.914.271	2.513.590
53	080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	11.933.130.260	1.655.754.362	203.388.250	177.566.250
54	081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	8.310.180.650	1.499.328.181	196.250.000	-
55	082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	594.569.452	356.453.745	3.967.792	-
56	084	Badan Standardisasi Nasional	11.987.625	15.625.618	720.066.192	248.500.000
57	085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	418.622.600	300.260.443		
58	086	Lembaga Administrasi Negara	1.362.287.357	191.746.148	728.950.000	903.678.988
59	087	Arsip Nasional Republik Indonesia	2.020.211.749	1.589.126.556		
60	088	Badan Kepegawaian Negara	850.735.555	165.842.208	86.451.000	96.000.000
61	089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	1.076.608.864	1.468.435.491	439.178.505	112.224.813
62	090	Kementerian Perdagangan	173.988.345	141.236.531	355.750.739	652.345.859

**UTANG KEPADA PIHAK KETIGA DAN PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA
PER 31 DESEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011**

No.	BA	Kementerian Negara/Lembaga	UTANG KEPADA PIHAK KETIGA		PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA	
			31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited	31 Desember 2012 Audited	31 Desember 2011 Audited
63	091	Kemen Perumahan Rakyat	977.776.254.227	9.866.226.118		
64	092	Kemen Pemuda dan Olah Raga	540.792.328	1.225.169.654	142.450.000	1.650.000
65	093	Komisi Pemberantasan Korupsi	3.171.908.147	3.828.046.940		
66	095	Dewan Perwakilan Daerah	337.347.888	341.437.793		
67	100	Komisi Yudisial	11.203.459	19.500.000	-	9.798.000
68	103	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	1.476.602.706	364.836.512.063		
69	104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	543.924.482	707.847.172	411.837.430	87.677.562
70	105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	39.357.679	-		
71	106	Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	130.961.136	-		
72	107	Badan SAR Nasional	2.458.823.721	492.047.967	247.553.000	-
73	108	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	233.049.151	24.560.405		
74	109	Badan Pengembangan Wilayah Suramadu	105.900.646	-		
75	110	Ombudsman Republik Indonesia	28.545.197	41.580.400		
76	112	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	497.250.059.265	-		
77	113	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme	25.465.390	-		
78	114	Sekretariat Kabinet	664.661.283	-		
79	115	Badan Pengawas Pemilihan Umum	48.765.000	-		
80	116	Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia	7.549.030.897	-		
81	117	Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia	101.271.821.106	-		
82	999.03	Investasi Pemerintah			-	2.318.040.768.528
83	999.05	Transfer ke Daerah	16.039.742.327.165	18.292.725.677.411		
84	999.08	Belanja Lain-lain	186.675.433.374	3.495.984.368.048		
85	999.992	BUN (Dit. PKN)	1.119.941.138.161	1.137.834.225.993		
TOTAL			29.738.138.976.562	31.780.634.369.020	6.721.668.089.201	8.639.914.082.680

BAGIAN LANCAR UTANG OBLIGASI DALAM NEGERI

Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	Book Value
FIXED RATE BOND			33.013.173.000.000		(71.468.618.000)	32.941.704.382.000
1	FR0019	15-Jun-13	10.477.341.000.000	14,25000%	-	10.477.341.000.000
2	FR0020	15-Dec-13	9.596.751.000.000	11,00000%	-	9.596.751.000.000
3	FR0033	15-Mar-13	8.500.474.000.000	12,50000%	4.975.734.000	8.505.449.734.000
4	FR0049	15-Sep-13	4.438.607.000.000	9,00000%	(76.444.352.000)	4.362.162.648.000
ORI			10.475.875.000.000		-	10.475.875.000.000
1	ORI005	15-Sep-13	2.662.875.000.000	11,45000%	-	2.662.875.000.000
2	ORI007	15-Aug-13	7.813.000.000.000	7,95000%	-	7.813.000.000.000
ZERO COUPON			1.263.000.000.000		(32.112.311.000)	1.230.887.689.000
1	ZC005	20-Feb-13	1.263.000.000.000		(32.112.311.000)	1.230.887.689.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			5.274.926.878.452		-	5.274.926.878.452
1	SU002	1-Apr-13	378.767.858.000	0,10000%	-	378.767.858.000
2	SU002	1-Oct-13	397.706.250.899	0,10000%	-	397.706.250.899
3	SU004	1-Jun-13	957.115.457.252	0,10000%	-	957.115.457.252
4	SU004	1-Dec-13	1.004.971.230.115	0,10000%	-	1.004.971.230.115
5	SU007	1-Feb-13	914.724.307.492	0,10000%	-	914.724.307.492
6	SU007	1-Aug-13	960.460.522.867	0,10000%	-	960.460.522.867
7	SRBI-01	1-Feb-13	322.527.439.916	0,10000%	-	322.527.439.916
8	SRBI-01	1-Aug-13	338.653.811.911	0,10000%	-	338.653.811.911
BAGIAN LANCAR SUN			50.026.974.878.452		(103.580.929.000)	49.923.393.949.452
SPN			22.820.000.000.000		(323.235.977.000)	22.496.764.023.000
1	SPN12130111	11-Jan-13	3.350.000.000.000	-	(4.035.211.000)	3.345.964.789.000
2	SPN12130208	8-Feb-13	1.750.000.000.000	-	(5.711.134.000)	1.744.288.866.000
3	SPN12130307	7-Mar-13	2.100.000.000.000	-	(14.801.398.000)	2.085.198.602.000
4	SPN12130404	4-Apr-13	2.900.000.000.000	-	(28.329.934.000)	2.871.670.066.000
5	SPN12130502	2-May-13	900.000.000.000	-	(11.702.909.000)	888.297.091.000
6	SPN12130606	6-Jun-13	1.880.000.000.000	-	(33.020.951.000)	1.846.979.049.000
7	SPN12130704	4-Jul-13	1.550.000.000.000	-	(33.392.283.000)	1.516.607.717.000
8	SPN12130812	12-Aug-13	990.000.000.000	-	(26.190.296.000)	963.809.704.000
9	SPN12130912	12-Sep-13	2.000.000.000.000	-	(62.065.220.000)	1.937.934.780.000
10	SPN03130107	7-Jan-13	1.000.000.000.000	-	(762.504.000)	999.237.496.000
11	SPN12131007	7-Oct-13	1.200.000.000.000	-	(39.396.781.000)	1.160.603.219.000
12	SPN03130213	13-Feb-13	1.000.000.000.000	-	(4.449.125.000)	995.550.875.000
13	SPN12131113	13-Nov-13	1.000.000.000.000	-	(38.287.582.000)	961.712.418.000
14	SPN03130304	4-May-13	700.000.000.000	-	(2.346.042.000)	697.653.958.000
15	SPN12131204	20-Feb-13	500.000.000.000	-	(18.744.607.000)	481.255.393.000
SUN JANGKA PENDEK (c)			22.820.000.000.000		(323.235.977.000)	22.496.764.023.000
SURAT PERBENDAHARAAN NEGARA SYARIAH (d)			195.000.000.000		(2.480.479.000)	192.519.521.000
1	SPNS03042013	3-Apr-13	90.000.000.000	-	(1.052.020.000)	88.947.980.000
2	SPNS17042013	17-Apr-13	105.000.000.000	-	(1.428.459.000)	103.571.541.000
SBSN			8.583.860.000.000		(1.468.160.000)	8.582.391.840.000
1	SR002	10-Feb-13	8.033.860.000.000	8,7000%	-	8.033.860.000.000
2	IFR004	15-Oct-13	550.000.000.000	9,0000%	(1.468.160.000)	548.531.840.000
SDHI			4.250.000.000.000		-	4.250.000.000.000
1	SDHI 2013A	17-May-13	4.250.000.000.000	7,5500%	-	4.250.000.000.000
BAGIAN LANCAR SBSN RUPIAH (b)			12.833.860.000.000		(1.468.160.000)	12.832.391.840.000
TOTAL SBN JANGKA PENDEK			85.875.834.878.452		(430.765.545.000)	85.445.069.333.452

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			576.240.761.000.000		13.473.294.459.092
1	FR0019	15/06/2013	10.477.341.000.000	14,25000%	69.726.704.355
2	FR0020	15/12/2013	9.596.751.000.000	14,27500%	63.981.538.917
3	FR0026	15/10/2014	13.126.479.000.000	11,00000%	309.404.236.509
4	FR0027	15/06/2015	19.304.000.000.000	9,50000%	85.651.848.000
5	FR0028	15/07/2017	14.055.716.000.000	10,00000%	649.317.856.336
6	FR0030	15/05/2016	10.491.000.000.000	10,75000%	146.422.887.000
7	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	255.633.518.000
8	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	99.366.162.000
9	FR0033	15/03/2013	8.500.474.000.000	12,50000%	317.008.176.882
10	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	100.169.759.200
11	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	66.418.093.750
12	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	368.324.269.500
13	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.712.450.000
14	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	127.972.967.955
15	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
16	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	868.823.732.000
17	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	699.568.409.100
18	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	682.659.367.000
19	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	537.429.676.000
20	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	81.017.600.000
21	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	739.698.530.000
22	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	787.168.480.000
23	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	152.405.470.470
24	FR0049	15/09/2013	4.438.607.000.000	9,00000%	119.181.036.557
25	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	760.849.430.000
26	FR0051	15/05/2014	2.282.123.000.000	11,25000%	33.332.688.538
27	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	932.010.000.000
28	FR0053	15/07/2021	19.123.793.000.000	8,25000%	728.826.875.023
29	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	1.189.135.056.000
30	FR0055	15/09/2016	14.850.000.000.000	7,37500%	326.744.550.000
31	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	428.859.704.000
32	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	167.125.700.000
33	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	164.900.694.000
34	FR0059	15/05/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	242.013.440.000
35	FR0060	15/04/2017	11.600.000.000.000	6,25000%	155.358.800.000
36	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	269.913.600.000
37	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	163.932.000.000
38	FR0063	15/05/2023	10.550.000.000.000	5,62500%	77.046.650.000
39	FR0064	15/05/2028	9.976.000.000.000	6,12500%	79.329.152.000
40	FR0065	15/05/2033	13.850.000.000.000	6,62500%	119.137.700.000
41	FR0066	15/05/2018	5.050.000.000.000	5,25000%	34.420.800.000
ORI			34.152.620.000.000		115.220.237.595
1	ORI005	15/09/2013	2.662.875.000.000	11,45000%	13.934.824.875
2	ORI007	15/08/2013	7.813.000.000.000	7,95000%	28.384.629.000
3	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	36.696.000.000
4	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	36.204.783.720

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
VARIABLE RATE BOND			122.754.933.000.000		562.986.830.700
1	VR0019	25/12/2014	9.411.226.000.000	4,01819%	7.350.167.506
2	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	4,01563%	67.996.931.940
3	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	3,72500%	27.849.048.360
4	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	4,01819%	7.042.080.969
5	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	4,01563%	64.198.255.520
6	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	3,72500%	37.110.328.500
7	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	4,01819%	2.506.463.300
8	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	40.380.693.640
9	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	40.380.693.640
10	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	3,72500%	26.342.307.530
11	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	3,72500%	45.735.138.400
12	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	4,01819%	8.202.854.715
13	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	4,01563%	187.891.866.680
SU DAN SRBI			240.144.465.084.155		80.992.417.836
1	SU002	01/04/2025	18.077.490.987.816	0,10000%	4.556.518.276
2	SU004	01/12/2025	48.921.476.666.168	0,10000%	4.289.006.173
3	SU007	01/08/2025	46.754.718.593.138	0,10000%	19.598.553.273
4	SRBI01	01/08/2033	126.390.778.837.033	0,10000%	52.548.340.114
SBSN			98.622.775.000.000		1.187.093.504.560
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%	120.996.893.700
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	89.596.945.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	72.635.304.000
4	IFR004	15/10/2013	550.000.000.000	9,00000%	10.607.300.000
5	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	48.685.496.000
6	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	66.511.500.000
7	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	73.251.997.000
8	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	6.616.008.000
9	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	155.242.920.000
10	SDHI2013A	17/05/2013	4.250.000.000.000	7,55000%	12.937.000.000
11	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	12.993.105.000
12	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	461.664.000
13	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	9.584.000.000
14	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	26.586.000.000
15	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%	560.000.000
16	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	676.000.000
17	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	3.052.000.000
18	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	815.000.000
19	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	4.845.000.000
20	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	1.167.000.000
21	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	667.000.000
22	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	9.032.000.000
23	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	8.661.000.000
24	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	5.841.816.000
25	SR-002	10/02/2013	8.033.860.000.000	8,70000%	41.334.209.700
26	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,15000%	14.477.260.520
27	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%	25.158.311.640
28	PBS001	15/02/2018	5.920.000.000.000	4,45000%	99.503.360.000

Utang Bunga/Imbalan (*Accrued Interest/Return*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
29	PBS002	15/01/2022	1.208.000.000.000	5,45000%	30.413.816.000
30	PBS003	15/01/2027	2.847.000.000.000	6,00000%	78.910.299.000
31	PBS004	15/02/2037	6.739.000.000.000	6,10000%	155.273.299.000
INTERNATIONAL BOND			264.907.350.000.000		5.183.426.483.222
1	RI0014	10/03/2014	12.571.000.000.000	6,75000%	261.633.937.500
2	RI0015	20/04/2015	9.670.000.000.000	7,25000%	138.267.569.444
3	RI0016	15/01/2016	8.703.000.000.000	7,50000%	300.978.750.000
4	RI0017	09/03/2017	9.670.000.000.000	6,87500%	206.830.555.556
5	RI0018	17/01/2018	18.373.000.000.000	6,87500%	575.432.152.778
6	RI0035	12/10/2035	15.472.000.000.000	8,50000%	288.595.777.778
7	RI0037	17/02/2037	14.505.000.000.000	6,62500%	357.689.270.833
8	RI0038	17/01/2038	19.340.000.000.000	7,75000%	682.809.444.444
9	RI0320	13/03/2020	19.340.000.000.000	5,87500%	340.867.500.000
10	RI140504	04/05/2014	9.670.000.000.000	10,37500%	158.849.895.833
11	RI190304	04/03/2019	19.340.000.000.000	11,62500%	730.689.375.000
12	SNI14	23/04/2014	6.285.500.000.000	8,80000%	104.478.977.778
13	SNI18	21/11/2018	9.670.000.000.000	4,00000%	42.977.777.778
14	SNI22	21/11/2022	9.670.000.000.000	3,30000%	35.456.666.667
15	JPYSH1907	29/07/2019	3.918.950.000.000	2,73000%	45.172.430.333
16	JPYSB2010	12/11/2020	6.718.200.000.000	1,60000%	14.630.746.667
17	RIJPY1122	22/11/2022	6.718.200.000.000	1,13000%	8.224.196.500
18	RI0521	05/05/2021	24.175.000.000.000	4,87500%	183.327.083.333
19	RI0142	17/01/2042	21.757.500.000.000	5,25000%	520.366.875.000
20	RI0422	25/04/2022	19.340.000.000.000	5,25000%	186.147.500.000
TOTAL			1.336.822.904.084.150		20.603.013.933.005

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (28 Des 2012) adalah Rp111.9;

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (28 Des 2012) adalah Rp9.670,

Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			543.227.588.000.000		4.460.562.331.509	547.688.150.331.509
1	FR0026	15/10/2014	13.126.479.000.000	11,00000%	(99.163.077.000)	13.027.315.923.000
2	FR0027	15/06/2015	19.304.000.000.000	9,50000%	50.157.776.509	19.354.157.776.509
3	FR0028	15/07/2017	14.055.716.000.000	10,00000%	223.320.750.000	14.279.036.750.000
4	FR0030	15/05/2016	10.491.000.000.000	10,75000%	(128.381.884.000)	10.362.618.116.000
5	FR0031	15/11/2020	17.899.000.000.000	11,00000%	(342.053.378.000)	17.556.946.622.000
6	FR0032	15/07/2018	1.434.000.000.000	15,00000%	(32.267.061.000)	1.401.732.939.000
7	FR0034	15/06/2021	16.756.400.000.000	12,80000%	183.761.020.000	16.940.161.020.000
8	FR0035	15/06/2022	11.023.750.000.000	12,90000%	(20.135.106.000)	11.003.614.894.000
9	FR0036	15/09/2019	10.735.500.000.000	11,50000%	(3.443.357.000)	10.732.056.643.000
10	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(108.031.371.000)	2.341.968.629.000
11	FR0038	15/08/2018	2.920.757.000.000	11,60000%	(14.668.667.000)	2.906.088.333.000
12	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(37.812.878.000)	4.137.187.122.000
13	FR0040	15/09/2025	26.474.000.000.000	11,00000%	1.130.808.744.000	27.604.808.744.000
14	FR0042	15/07/2027	14.774.100.000.000	10,25000%	(101.093.198.000)	14.673.006.802.000
15	FR0043	15/07/2022	14.417.000.000.000	10,25000%	(92.395.229.000)	14.324.604.771.000
16	FR0044	15/09/2024	18.014.000.000.000	10,00000%	(1.242.730.385.000)	16.771.269.615.000
17	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(23.368.744.000)	6.376.631.256.000
18	FR0046	15/07/2023	16.855.000.000.000	9,50000%	(1.852.703.321.000)	15.002.296.679.000
19	FR0047	15/02/2028	20.840.000.000.000	10,00000%	(1.368.473.042.000)	19.471.526.958.000
20	FR0048	15/09/2018	5.675.970.000.000	9,00000%	(225.410.677.000)	5.450.559.323.000
21	FR0050	15/07/2038	15.686.000.000.000	10,50000%	(428.761.117.000)	15.257.238.883.000
22	FR0051	15/05/2014	2.282.123.000.000	11,25000%	(22.698.799.000)	2.259.424.201.000
23	FR0052	15/08/2030	23.500.000.000.000	10,50000%	(281.644.707.000)	23.218.355.293.000
24	FR0053	15/07/2021	19.123.793.000.000	8,25000%	601.374.141.000	19.725.167.141.000
25	FR0054	15/07/2031	27.096.000.000.000	9,50000%	16.216.315.000	27.112.216.315.000
26	FR0055	15/09/2016	14.850.000.000.000	7,37500%	(27.674.585.000)	14.822.325.415.000
27	FR0056	15/09/2026	17.164.000.000.000	8,37500%	(343.798.211.000)	16.820.201.789.000
28	FR0057	15/05/2041	13.550.000.000.000	9,50000%	587.122.234.000	14.137.122.234.000
29	FR0058	15/06/2032	42.798.000.000.000	8,25000%	5.658.827.629.000	48.456.827.629.000
30	FR0059	15/05/2027	26.630.000.000.000	7,00000%	1.005.759.351.000	27.635.759.351.000
31	FR0060	15/04/2017	11.600.000.000.000	6,25000%	306.432.274.000	11.906.432.274.000
32	FR0061	15/05/2022	29.700.000.000.000	7,00000%	1.778.453.694.000	31.478.453.694.000
33	FR0062	15/04/2042	12.000.000.000.000	6,37500%	(21.768.726.000)	11.978.231.274.000
34	FR0063	15/05/2023	10.550.000.000.000	5,62500%	(165.676.977.000)	10.384.323.023.000
35	FR0064	15/05/2028	9.976.000.000.000	6,12500%	(60.619.377.000)	9.915.380.623.000
36	FR0065	15/05/2033	13.850.000.000.000	6,62500%	(31.020.191.000)	13.818.979.809.000
37	FR0066	15/05/2018	5.050.000.000.000	5,25000%	(5.877.532.000)	5.044.122.468.000
ORI			23.676.745.000.000		-	23.676.745.000.000
1	ORI008	15/10/2014	11.000.000.000.000	7,30000%	-	11.000.000.000.000
2	ORI009	15/10/2015	12.676.745.000.000	6,25000%	-	12.676.745.000.000
VARIABLE RATE BOND			122.754.933.000.000		-	122.754.933.000.000
1	VR0019	25/12/2014	9.411.226.000.000	4,01819%	-	9.411.226.000.000
2	VR0020	25/04/2015	9.164.007.000.000	4,01563%	-	9.164.007.000.000
3	VR0021	25/11/2015	7.436.328.000.000	3,72500%	-	7.436.328.000.000
4	VR0022	25/03/2016	9.016.749.000.000	4,01819%	-	9.016.749.000.000
5	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	4,01563%	-	8.652.056.000.000
6	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	3,72500%	-	9.909.300.000.000
7	VR0025	25/09/2017	3.209.300.000.000	4,01819%	-	3.209.300.000.000
8	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	-	5.442.142.000.000
9	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	4,01563%	-	5.442.142.000.000
10	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	3,72500%	-	7.033.994.000.000
11	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	3,72500%	-	12.212.320.000.000
12	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	4,01819%	-	10.503.015.000.000
13	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	4,01563%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG PEMERINTAH			234.869.538.205.703		-	234.869.538.205.703
1	SU002	01/04/2025	17.301.016.878.917	0,10000%	-	17.301.016.878.917
2	SU004	01/12/2025	46.959.389.978.801	0,10000%	-	46.959.389.978.801
3	SU007	01/08/2025	44.879.533.762.779	0,10000%	-	44.879.533.762.779
4	SRBI01	01/08/2033	125.729.597.585.206	0,10000%	-	125.729.597.585.206
Total SUN Jangka Panjang (a)			924.528.804.205.703		4.460.562.331.509	928.989.366.537.212
SBSN			85.788.915.000.000		(417.246.536.000)	85.371.668.464.000
1	IFR001	15/08/2033	2.714.700.000.000	11,80000%	-	2.714.700.000.000
2	IFR002	15/08/2018	1.985.000.000.000	11,95000%	-	1.985.000.000.000
3	IFR003	15/09/2015	2.632.000.000.000	9,25000%	31.408.858.000	2.663.408.858.000
4	IFR005	15/01/2017	1.171.000.000.000	9,00000%	30.220.669.000	1.201.220.669.000

**Surat Berharga Negara Jangka Panjang Rupiah
Per 31 Desember 2012**

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
5	IFR006	15/03/2030	2.175.000.000.000	10,25000%	14.146.668.000	2.189.146.668.000
6	IFR007	15/01/2025	1.547.000.000.000	10,25000%	4.048.283.000	1.551.048.283.000
7	IFR008	15/03/2020	252.000.000.000	8,80000%	(235.822.000)	251.764.178.000
8	IFR010	15/02/2036	4.110.000.000.000	10,00000%	339.733.383.000	4.449.733.383.000
9	SDHI2014A	09/08/2014	2.855.000.000.000	7,36000%	-	2.855.000.000.000
10	SDHI2014B	25/08/2014	336.000.000.000	7,30000%	-	336.000.000.000
11	SDHI2014C	07/10/2014	2.000.000.000.000	7,13000%	-	2.000.000.000.000
12	SDHI2014D	11/02/2014	6.000.000.000.000	7,85000%	-	6.000.000.000.000
13	SDHI2015A	28/06/2015	1.000.000.000.000	5,21000%	-	1.000.000.000.000
14	SDHI2016A	27/04/2016	1.000.000.000.000	5,03000%	-	1.000.000.000.000
15	SDHI2017A	21/03/2017	2.000.000.000.000	5,16000%	-	2.000.000.000.000
16	SDHI2018A	30/05/2018	2.500.000.000.000	6,06000%	-	2.500.000.000.000
17	SDHI2019A	21/03/2019	3.000.000.000.000	5,46000%	-	3.000.000.000.000
18	SDHI2020A	27/04/2020	1.500.000.000.000	5,79000%	-	1.500.000.000.000
19	SDHI2020B	28/06/2020	1.000.000.000.000	6,20000%	-	1.000.000.000.000
20	SDHI2021A	11/04/2021	2.000.000.000.000	8,00000%	-	2.000.000.000.000
21	SDHI2021B	17/10/2021	3.000.000.000.000	7,16000%	-	3.000.000.000.000
22	SDHI2022A	21/03/2022	3.342.000.000.000	5,91000%	-	3.342.000.000.000
27	SR-003	23/02/2014	7.341.410.000.000	8,15000%	-	7.341.410.000.000
28	SR-004	21/09/2015	13.613.805.000.000	6,25000%	-	13.613.805.000.000
29	PBS001	15/02/2018	5.920.000.000.000	4,45000%	(315.550.644.000)	5.604.449.356.000
30	PBS002	15/01/2022	1.208.000.000.000	5,45000%	(37.866.118.000)	1.170.133.882.000
31	PBS003	15/01/2027	2.847.000.000.000	6,00000%	(109.515.309.000)	2.737.484.691.000
32	PBS004	15/02/2037	6.739.000.000.000	6,10000%	(373.636.504.000)	6.365.363.496.000
Total SBSN Jangka Panjang (b)			85.788.915.000.000		(417.246.536.000)	85.371.668.464.000
TOTAL SBN Jangka Panjang (a+b)			1.010.317.719.205.700		4.043.315.795.509	1.014.361.035.001.210

SURAT BERTAGAS NEGARA JANGKA PANJANG VALAS
Per 31 Desember 2012

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SUN VALAS (USD)			Rp220.031.126.678.670		(Rp1.895.373.321.330)	Rp221.926.500.000.000	Rp579.605.291.000	Rp222.506.105.291.000
1	RI0014	10-Mar-14	Rp11.330.165.221.750	6,75000%	-Rp1.240.834.778.250	Rp12.571.000.000.000	(6.110.274.000)	12.564.889.726.000
2	RI0015	20-Apr-15	Rp9.613.000.000.000	7,25000%	-Rp57.000.000.000	Rp9.670.000.000.000	(17.943.271.000)	9.652.056.729.000
3	RI0016	15-Jan-16	Rp9.099.000.000.000	7,50000%	Rp396.000.000.000	Rp8.703.000.000.000	(20.627.530.000)	8.682.372.470.000
4	RI0017	9-Mar-17	Rp9.370.000.000.000	6,87500%	-Rp300.000.000.000	Rp9.670.000.000.000	(31.350.993.000)	9.638.649.007.000
5	RI0018	17-Jan-18	Rp17.804.549.364.750	6,87500%	-Rp568.450.635.250	Rp18.373.000.000.000	(145.808.104.000)	18.227.191.896.000
6	RI0035	12-Oct-35	Rp15.436.000.000.000	8,50000%	-Rp36.000.000.000	Rp15.472.000.000.000	866.400.002.000	16.338.400.002.000
7	RI0037	17-Feb-37	Rp13.575.648.587.500	6,62500%	-Rp929.351.412.500	Rp14.505.000.000.000	(174.544.207.000)	14.330.455.793.000
8	RI0038	17-Jan-38	Rp18.729.115.845.000	7,75000%	-Rp610.884.155.000	Rp19.340.000.000.000	(351.201.372.000)	18.988.798.628.000
9	RI0320	13-Mar-20	Rp18.550.000.000.000	5,87500%	-Rp790.000.000.000	Rp19.340.000.000.000	-	19.340.000.000.000
10	RI 140504	4-May-14	Rp12.025.000.000.000	10,37500%	Rp2.355.000.000.000	Rp9.670.000.000.000	(16.983.163.000)	9.653.016.837.000
11	RI 190304	4-Mar-19	Rp24.050.000.000.000	11,62500%	Rp4.710.000.000.000	Rp19.340.000.000.000	(107.467.414.000)	19.232.532.586.000
12	RI0521	5-May-21	Rp21.441.986.560.150	4,87500%	-Rp2.733.013.439.850	Rp24.175.000.000.000	311.878.260.000	24.486.878.260.000
13	RI0142	17-Jan-42	Rp20.626.661.099.520	5,25000%	-Rp1.130.838.900.480	Rp21.757.500.000.000	414.508.276.000	22.172.008.276.000
14	RI0422	25-Apr-22	Rp18.380.000.000.000	3,75000%	-Rp960.000.000.000	Rp19.340.000.000.000	(141.144.919.000)	19.198.855.081.000
SBSN VALAS (USD)			Rp25.705.804.674.903		Rp80.304.674.903	Rp25.625.500.000.000	Rp0	Rp25.625.500.000.000
15	SNI14	23-Apr-14	Rp7.031.748.227.903	8,80000%	Rp746.248.227.903	Rp6.285.500.000.000	-	6.285.500.000.000
16	SNI18	21-Nov-18	Rp9.035.050.295.000	4,00000%	-Rp634.949.705.000	Rp9.670.000.000.000	-	9.670.000.000.000
17	SNI22	21-Nov-22	Rp9.639.006.152.000	3,30000%	-Rp30.993.848.000	Rp9.670.000.000.000	-	9.670.000.000.000
SUN VALAS (JPY)			17.198.408.000.000		-Rp156.942.000.000	17.355.350.000.000	-	17.355.350.000.000
18	RIJPY0719	29-Jul-19	3.695.300.000.000	2,73000%	-Rp223.650.000.000	3.918.950.000.000	-	3.918.950.000.000
19	RIJPY1120	12-Nov-20	6.490.800.000.000	1,60000%	-Rp227.400.000.000	6.718.200.000.000	-	6.718.200.000.000
20	RIJPY1122	22-Nov-22	7.012.308.000.000	1,13000%	Rp294.108.000.000	6.718.200.000.000	-	6.718.200.000.000
Jumlah SBSN Valas			25.705.804.674.903		80.304.674.903	25.625.500.000.000	-	25.625.500.000.000
Jumlah SUN Valas			237.229.534.678.670		(2.052.315.321.330)	239.281.850.000.000	579.605.291.000	Rp239.861.455.291.000
TOTAL			262.935.339.353.573		(1.972.010.646.427)	264.907.350.000.000	579.605.291.000	265.486.955.291.000

* Kurs Tengah BI JPY pada tanggal pelaporan (28 Desember 2012) adalah Rp111,97

* Kurs Tengah BI USD pada tanggal pelaporan (28 Desember 2012) adalah Rp9670

**IKHTISAR LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
HASIL INVENTARISASI DAN PENILAIAN BMN PER KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
PER 31 DESEMBER 2012**

(rupiah)

No	Kode BA	Uraian Kementerian/Lembaga	Koreksi Satgas	Koreksi K/L	Selisih Koreksi
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	40.757.932.306	40.757.932.306	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	286.109.778.878	286.109.778.878	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	543.831.559.292	543.831.559.292	-
4	005	MAHKAMAH AGUNG	2.970.658.227.020	2.970.005.609.389	652.617.631
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	2.914.585.329.072	2.914.585.329.072	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	8.725.929.155.982	8.725.929.155.982	-
7	010	KEMENTERIAN DALAM NEGERI	2.192.016.588.273	2.175.836.381.426	16.180.206.847
8	011	KEMENTERIAN LUAR NEGERI	12.172.100.783.749	12.172.100.783.749	-
9	012	KEMENTERIAN PERTAHANAN	102.075.796.507.334	102.075.796.507.334	-
10	013	KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	10.189.864.612.087	10.190.340.621.272	(476.009.185)
11	015	KEMENTERIAN KEUANGAN	13.249.400.523.623	13.249.429.156.619	(28.632.995)
12	018	KEMENTERIAN PERTANIAN	7.875.329.191.147	7.873.675.305.565	1.653.885.582
13	019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN	1.641.341.601.296	1.641.341.601.296	-
14	020	KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	949.328.841.566	949.328.841.566	-
15	022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	16.554.117.154.617	16.555.010.101.226	(892.946.609)
16	023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	46.043.777.865.974	46.027.561.923.110	16.215.942.864
17	024	KEMENTERIAN KESEHATAN	11.699.049.912.317	11.696.920.205.705	2.129.706.612
18	025	KEMENTERIAN AGAMA	13.782.028.340.182	13.782.030.886.082	(2.545.900)
19	026	KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	778.423.960.183	778.423.960.183	-
20	027	KEMENTERIAN SOSIAL	3.211.097.760.823	3.212.126.278.755	(1.028.517.932)
21	029	KEMENTERIAN KEHUTANAN	2.350.286.446.800	2.350.286.446.800	-
22	032	KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.183.335.227.223	1.178.946.690.468	4.388.536.755
23	033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM	123.939.747.214.483	123.963.610.136.845	(23.862.922.362)
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	(881.857.911)	(881.857.911)	-
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	(4.225.575.304)	(4.225.575.304)	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	(4.880.468.733)	(4.880.468.733)	-
27	040	KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	1.809.100.210.346	1.808.866.719.340	233.491.006
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	(8.924.581.782)	(8.924.581.782)	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	2.052.620.811.853	2.052.620.811.853	-
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	(5.948.553.910)	(5.948.553.910)	-
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	824.955.290.882	824.955.290.882	-
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA	(6.577.861.751)	(6.577.861.751)	-
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN RB	722.179.567.356	722.179.567.356	-
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	722.179.567.356	722.179.567.356	-
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	36.929.127.943	36.929.127.943	-
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	(1.020.104.341)	(1.020.104.341)	-
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	502.116.711.427	502.116.711.427	-
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	322.205.984.837	322.205.984.837	-
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.270.589.689.300	1.270.565.500.564	(24.188.736)
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	287.847.560.198	287.847.560.198	-
41	059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	311.680.341.771	311.680.341.771	-
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	23.612.527.267.869	23.612.543.196.988	(15.929.119)
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	5.720.230.913	5.720.230.913	-
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	(12.381.528.148)	(12.381.528.148)	-
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	330.239.133.274	330.239.133.274	-
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	(42.295.121.272)	(42.295.121.272)	-
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	(4.133.861.756)	(4.133.861.756)	-
48	068	BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL	421.352.220.173	421.347.572.119	4.648.054
49	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	(341.407.813)	(341.407.813)	-
50	075	BADAN METEOROLOGI, GEOFISIKA, DAN KLIMATOLOGI	720.727.674.800	720.721.342.312	6.332.488
51	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	64.204.050.470	64.169.085.000	34.965.470
52	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	(6.621.927.918)	(6.621.927.918)	-
53	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	66.090.187.544	66.090.187.544	-
54	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	6.078.270.200.964	6.078.270.200.964	-
55	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.785.168.758.442	1.785.168.758.442	-
56	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	698.296.450.360	698.327.005.260	(30.554.900)
57	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	337.438.406.169	337.438.406.169	-
58	083	BADAN INFORMASI GEOSPASIAL	(93.995.370.940)	(93.995.370.940)	-
59	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	(2.629.521.039)	(2.629.521.039)	-
60	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	(16.701.815.248)	(16.701.815.248)	-
61	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	344.222.513.258	344.222.513.258	-
62	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	228.549.103.080	228.549.103.080	-
63	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	359.937.786.533	359.937.786.533	-
64	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.188.766.767.231	1.188.766.767.231	-
65	090	KEMENTERIAN PERDAGANGAN	378.060.913.009	378.088.228.289	(27.315.280)
66	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-
67	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	67.575.084.826	67.575.084.826	-
68	093	KOMISI MEMBERANTASAN KORUPSI	(6.497.923.875)	(6.497.923.875)	-
69	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH	(4.245.353.621)	(4.245.353.621)	-
70	100	KOMISI YUDISIAL	16.748.000	16.748.000	-
71	103	BNPB	(2.104.777.953)	(2.104.777.953)	-
72	104	BNP2TKI	12.439.626.401	-	12.439.626.401
73	105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	-	-	-
74	106	LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH	-	-	-
75	107	BADAN SAR	(21.706.053.903)	(21.838.923.253)	132.869.350
76	108	KOMISI PERSAINGAN PEGAWASAN USAHA	-	-	-
77	109	BADAN PENGEMBANGAN WILAYAH SURAMADU	-	-	-
78	110	OMBUDSMEN REPUBLIKINDONESIA	-	-	-
79	111	BADAN NASIONAL PENGELOLA PERBATASAN	-	-	-
80	112	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM	-	-	-
81	113	BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME	-	-	-
82	114	SEKRETARIAT KABINET	-	-	-
83	115	BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM	-	-	-
84	116	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA	(13.681.694.047)	(13.681.694.047)	-
85	117	LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA	-	-	-
86	118	BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN SABANG	-	-	-
		TOTAL	430.671.127.139.547	430.643.395.496.033	27.683.266.041

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
NERACA
PER 31 DESEMBER 2012

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESELOK/ISATKER BLU	ASET						KEWAJIBAN			EKUITAS	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			
			Aset Lancar	Investasi Jangka Panjang	Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku Aset Tetap	Aset Lainnya	JUMLAH ASET	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang			JUMLAH KEWAJIBAN		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 6 - 7)	(9)	(10 = 4 + 5 + 8 + 9)	(11)	(12)	(13 = 11 + 12)	(14)	(15 = 13 + 14)		
1	Penyediaan Barang dan/atau Jasa	KEMENTERIAN KESEHATAN (024)														
		RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	332.411.977.869	-	2.356.420.629.525	508.590.559.550	1.847.830.069.975		82.500.001	2.180.324.547.845	68.714.540.606	-	68.714.540.606	2.111.610.007.355	2.180.324.547.961	
		RSUP Fatmawati, Jakarta	74.225.720.364	-	1.712.297.464.902	224.970.158.855	1.487.327.306.047		0	1.561.553.026.411	41.113.154.238	-	41.113.154.238	1.520.439.872.177	1.561.553.026.415	
		RSUP Persahabatan, Jakarta	129.975.345.676	-	224.979.250.888	105.805.164.049	119.174.086.639		710.637.672	249.860.069.987	28.600.483.669	-	28.600.483.669	221.259.586.318	249.860.069.987	
		RSUP Dr.Hasan Sadikin, Bandung	198.142.418.519	-	1.180.523.608.538	353.745.268.415	826.778.340.123		0	1.024.920.758.642	84.463.513.337	-	84.463.513.337	940.457.245.304	1.024.920.758.641	
		RSUP Dr. Kariadi, Semarang	204.934.119.464	-	1.357.163.721.282	227.616.706.840	1.129.547.014.442		236.158.462	1.334.717.292.368	4.567.046.299	-	4.567.046.299	1.330.150.246.068	1.334.717.292.367	
		RSUP Dr.Sardjito, Yogyakarta	230.490.573.789	-	751.817.200.096	251.162.819.318	500.654.380.778		3.609.504.130	734.754.458.697	88.780.189.914	-	88.780.189.914	645.974.269.783	734.754.458.697	
		RSUP Sanglah, Denpasar	108.885.014.249	-	739.948.845.688	234.062.952.874	505.885.892.814		1.357.076.752	617.137.983.815	119.691.938.443	-	119.691.938.443	497.446.045.372	617.137.983.815	
		RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo, Makassar	167.199.928.160	-	652.584.711.474	140.602.596.530	511.982.114.944		509.984.100	679.692.027.204	78.066.145.528	-	78.066.145.528	601.625.881.677	679.692.027.205	
		RSUP Dr. M.Djamil, Padang	58.714.321.762	-	557.717.461.173	238.957.125.546	318.760.335.627		1.837.707.004	379.312.364.393	33.016.853.699	-	33.016.853.699	346.295.510.694	379.312.364.393	
		RSUP Dr.Mohammad Hoesin, Palembang	78.991.066.646	-	1.181.950.981.590	164.741.509.856	1.017.209.471.934		629.272.804	1.096.829.811.184	11.035.296.285	-	11.035.296.285	1.085.794.514.900	1.096.829.811.185	
		RSUP Prof.Dr.R.D. Kandow, Manado	39.636.593.206	-	698.833.641.157	114.961.930.003	583.871.711.154		0	623.508.304.359	25.427.753.452	-	25.427.753.452	598.080.550.907	623.508.304.359	
		RSUP Dr. Soeradi Tirtonegoro, Klaten	74.619.114.262	-	284.402.714.953	94.535.859.331	189.866.855.622		197.108.116	264.683.078.000	8.830.898.063	-	8.830.898.063	255.852.179.937	264.683.078.000	
		RS Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi, Bogor	24.220.521.299	-	525.335.469.407	59.356.442.557	465.979.026.850		516.069.521	490.715.617.670	904.228.915	-	904.228.915	488.811.388.755	490.715.617.670	
		RSUP H.Adam Malik, Medan	203.706.050.799	-	973.471.168.676	354.758.022.420	618.713.146.256		889.911.052	823.309.108.107	84.919.583.518	889.911.051	-	84.909.494.569	738.399.613.539	823.309.108.107
		RSAB Harapan Kita	52.840.526.000	-	1.325.513.336.000	95.235.156.000	1.230.280.180.000		411.600.000	1.283.532.306.000	21.330.773.000	-	21.330.773.000	1.262.201.533.000	1.283.532.306.000	
		RSJPD Harapan Kita	265.482.272.730	-	555.761.358.922	314.195.304.519	241.566.054.403		10.102.129.835	517.150.456.968	117.150.259.047	-	117.150.259.047	400.000.197.921	517.150.456.968	
		RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	9.254.931.371	-	127.361.034.661	29.055.123.248	98.305.911.413		1.210.877.177	108.771.719.961	1.745.352.866	-	1.745.352.866	107.026.367.095	108.771.719.961	
		RS Paru Dr. H.A. Rintisulu	20.371.072.963	-	242.329.337.718	30.283.570.621	212.045.767.097		102.334.673	232.519.174.733	1.069.313.858	-	1.069.313.858	232.519.174.733	232.519.174.733	
		RS Paru Dr. M.Goenawan P. Cisarua	20.733.927.015	-	102.169.889.128	40.197.755.413	61.972.133.715		305.512.102	83.011.572.832	1.365.587.635	-	1.365.587.635	83.011.572.832	83.011.572.832	
		RSJ Dr.Radjiman W. Lawang	30.485.173.907	-	195.732.228.979	69.326.558.150	126.405.670.829		131.904.000	157.022.748.736	2.330.203.967	-	2.330.203.967	154.892.544.769	157.022.748.736	
		RSJ Dr.Soeharto Herdjan	24.313.158.448	-	392.331.362.636	30.931.824.187	361.399.538.449		402.391.000	386.115.087.907	512.077.437	-	512.077.437	385.603.010.470	386.115.087.907	
		RSJ Prof.Dr.Sorojo Magelang	13.114.300.551	-	678.111.864.976	36.209.801.264	641.902.063.712		787.040.000	655.803.404.263	20.655.366.414	7.456.000	-	20.662.822.414	635.140.581.852	655.803.404.266
		RS Kusta Dr.Tadjuddin Chalid Makasar	1.749.038.206	-	118.844.409.798	20.566.111.517	98.278.298.281		0	100.027.336.487	627.267.084	-	627.267.084	99.400.069.401	100.027.336.485	
		RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso	17.359.259.305	-	162.639.004.477	30.501.934.536	132.137.069.941		273.604.060	149.769.933.306	955.869.583	-	955.869.583	148.814.063.724	149.769.933.307	
		RS Mata Cicendo Bandung	50.516.417.557	-	210.277.157.733	78.675.987.668	131.601.170.065		0	182.117.587.622	2.767.588.280	-	2.767.588.280	179.349.999.342	182.117.587.622	
		RS Stroke Nasional Bukitlengg	13.198.167.965	-	116.426.299.100	36.144.773.986	80.281.525.114		1.166.390.297	94.646.083.376	2.176.644.379	-	2.176.644.379	92.468.438.997	94.646.083.376	
		RS Kusta Dr. Sitanala	14.588.625.401	-	412.538.233.001	22.253.068.659	390.285.164.342		0	404.873.789.743	3.771.248.207	-	3.771.248.207	401.102.541.536	404.873.789.743	
		RS Ortopedi Prof. Dr. R.Soeharso	47.751.433.963	-	438.639.434.091	85.759.798.204	352.879.635.887		1.218.840.122	401.849.909.972	3.303.917.632	-	3.303.917.632	398.545.992.930	401.849.909.972	
		RS Kanker Dharmas	17.768.836.429	-	1.169.123.212.402	190.149.863.684	978.973.348.718		60.921.690	1.050.803.106.837	27.984.227.008	-	27.984.227.008	1.022.818.879.829	1.050.803.106.837	
		RS Kusta Palembang	7.802.237.952	-	44.446.612.636	13.492.027.527	30.954.585.109		27.639.000	38.784.462.061	52.458.285	-	52.458.285	38.732.003.776	38.784.462.061	
		RS Ketergantungan Obat Jakarta	4.511.634.371	-	78.408.955.767	44.849.199.758	33.559.756.009		525.959.767	38.597.350.147	924.881.952	-	924.881.952	37.672.468.194	38.597.350.146	
		Politeknik Kesehatan Jakarta III	4.028.027.760	-	245.046.946.601	66.956.833.797	178.090.112.804		224.968.000	182.343.108.564	1.297.779.035	-	1.297.779.035	181.045.329.529	182.343.108.564	
		Politeknik Kesehatan Bandung	25.154.987.695	-	454.516.503.777	26.027.099.965	428.489.403.812		357.173.350	454.001.564.851	1.951.338.071	-	1.951.338.071	452.050.226.786	454.001.564.851	
		Politeknik Kesehatan Medan	3.367.657.787	-	125.546.226.723	12.630.765.047	112.915.461.676		-	116.283.119.463	58.936.385	-	58.936.385	116.283.119.463	116.283.119.463	
		Politeknik Kesehatan Semarang	29.449.775.648	-	367.097.973.701	31.689.929.901	335.408.043.800		1.576.850.000	366.434.669.448	2.942.440.164	-	2.942.440.164	363.492.229.284	366.434.669.448	
		Politeknik Kesehatan Makassar	17.415.501.401	-	255.497.603.914	23.640.016.963	231.857.586.951		784.543.167	250.057.631.519	1.749.775.117	-	1.749.775.117	248.307.856.402	250.057.631.519	
		Politeknik Kesehatan Jakarta II	10.786.533.254	-	113.831.172.962	29.774.048.586	84.057.124.376		275.928.000	95.119.585.630	288.517.500	-	288.517.500	94.831.068.130	95.119.585.630	
		Politeknik Kesehatan Tanjung Karang	9.614.356.021	-	103.227.582.396	8.209.744.240	95.017.848.158		89.813.262	104.722.017.441	1.515.577.219	-	1.515.577.219	103.206.440.222	104.722.017.441	
		Politeknik Kesehatan Surakarta	18.695.356.086	-	248.982.462.417	13.713.925.329	235.268.537.088		1.952.398.728	255.916.291.902	1.732.552.544	-	1.732.552.544	254.183.739.358	255.916.291.902	
		Politeknik Kesehatan Malang	14.947.215.674	-	88.497.410.479	11.979.465.428	76.517.945.051		1.064.104.500	92.529.265.225	2.279.627.354	-	2.279.627.354	90.249.637.871	92.529.265.225	
		Politeknik Kesehatan Surabaya	17.760.004.272	-	502.298.245.846	27.126.003.060	475.172.242.786		305.204.853	493.237.451.911	1.234.324.923	-	1.234.324.923	492.003.126.989	493.237.451.912	
		Politeknik Kesehatan Pontianak	3.176.194.335	-	84.007.507.047	5.904.467.737	78.103.039.310		1.380.573.400	82.659.807.045	279.749.350	-	279.749.350	82.380.057.695	82.65	

5	Universitas Brawijaya Malang	99.203.903.717	-	3.559.216.111.420	193.645.864.792	3.365.570.246.628	4.350.424.822	3.469.124.575.167	49.132.575.542	87.499.963	49.220.075.505	3.419.904.498.662	3.469.124.575.167
6	Universitas Negeri Semarang	138.641.501.160	-	1.048.163.041.796	-	1.048.163.041.796	5.054.353.247	1.191.858.896.203	3.171.182.771	-	3.171.182.771	1.188.687.713.432	1.191.858.896.203
7	Universitas Negeri Surabaya	78.295.922.743	-	2.066.974.741.897	36.661.716.077	2.030.313.025.820	9.107.916.392	2.117.716.864.955	55.119.796.233	-	55.119.796.233	2.062.597.068.722	2.117.716.864.955
8	Universitas Mulawarman Samarinda	91.543.641.476	-	500.039.343.578	-	500.039.343.578	1.811.673.990	593.394.660.954	390.228.855	-	390.228.855	593.004.432.099	593.394.660.954
9	Universitas Sebelas Maret Surakarta	134.029.890.371	-	2.537.835.259.652	277.293.458.993	2.260.541.799.659	6.526.253.282	2.401.097.943.312	17.318.744.925	-	17.318.744.925	2.383.779.198.387	2.401.097.943.312
10	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	70.915.269.368	-	2.365.046.813.579	370.613.897.062	1.994.432.916.517	8.545.504.544	2.073.893.690.429	23.990.282.229	-	23.990.282.229	2.049.903.408.200	2.073.893.690.429
11	Universitas Lampung	58.774.018.397	-	736.066.180.834	13.611.439.103	722.454.741.731	1.137.036.070	782.365.796.198	16.346.704.725	-	16.346.704.725	768.019.091.473	782.365.796.198
12	Universitas Negeri Yogyakarta	85.601.390.521	-	2.007.621.449.213	67.688.014.727	1.939.933.434.486	1.540.323.200	2.027.075.148.207	50.502.733.654	-	50.502.733.654	1.976.572.414.553	2.027.075.148.207
13	Universitas Negeri Gorontalo	6.720.583.729	-	559.581.395.390	2.373.912.599	557.207.472.791	12.890.477.600	576.818.534.120	1.122.536.126	-	1.122.536.126	575.695.997.994	576.818.534.120
14	Universitas Bengkulu		-							-			
15	Universitas Sriwijaya	173.349.128.773	-	2.696.868.758.235	321.520.821.986	2.375.347.936.249	4.817.375.086	2.553.514.440.108	28.959.521.120	-	28.959.521.120	2.524.554.918.988	2.553.514.440.108
16	Universitas Negeri Jakarta	58.260.078.435	-	1.947.676.985.448	-	1.947.676.985.448	14.639.786.245	2.020.576.850.129	8.816.183.316	-	8.816.183.316	2.011.706.666.813	2.020.576.850.129
17	Universitas Andalas	59.594.285.231	0	2.306.669.361.707	728.817.549.850	1.577.851.811.857	4.722.237.950	1.642.168.335.038	16.127.885.824	8.870.350.935	24.998.236.759	1.817.170.098.279	1.642.168.335.038
18	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	71.564.187.419	0	1.994.404.076.984	153.971.657.297	1.840.432.419.687	11.168.178.167	1.923.164.785.273	23.895.981.045	0	23.895.981.045	1.899.268.804.228	1.923.164.785.273
19	Universitas Haluoleo		-							-			
20	Universitas Riau	27.280.192.735	0	932.474.342.893	0	932.474.342.893	420.278.900	960.174.814.528	40.527.821.188	0	40.527.821.188	919.646.993.340	960.174.814.528
21	Universitas Terbuka	781.424.099.459	0	1.271.333.976.930	14.185.070.194	1.257.148.960.736	6.621.230.028	2.045.194.236.223	15.018.990.113	-	15.018.990.113	2.030.175.246.110	2.045.194.236.223
22	Universitas Udayana		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Universitas Gajah Mada	1.010.383.189.358	-	8.021.512.857.439	13.875.711.088	8.007.637.146.351	14.510.255.687	9.032.530.591.876	139.758.154.675	75.737.283.181	215.495.437.856	8.817.035.154.020	9.032.530.591.876
24	Universitas Pendidikan Indonesia		-							-			
25	Universitas Airlangga	93.461.776.667	10.421.613.561	1.251.172.292.494	82.049.682.121	1.169.122.610.373	240.642.424.403	1.513.648.425.004	40.000.702.105	-	40.000.702.105	1.473.647.722.899	1.513.648.425.004
26	Universitas Indonesia	1.427.832.918.558	-	7.512.534.143.330	-	7.512.534.143.330	47.296.990.480	8.987.664.052.368	214.544.562.360	20.854.293.245	235.398.855.605	8.752.265.196.763	8.987.664.052.368
27	Universitas Sumatera Utara	342.021.306.561	-	2.989.705.135.507	178.665.724.420	2.811.039.411.087	928.632.000	3.153.989.349.648	5.591.720.300	-	5.591.720.300	3.148.397.629.347	3.153.989.349.647
28	Institut Teknologi Bandung	500.733.405.567	31.943.949.601	1.325.944.268.161	581.815.926.861	744.128.341.300	26.635.238.624	1.303.440.935.092	69.053.759.997	8.791.882.081	77.845.642.078	1.225.595.293.014	1.303.440.935.092
29	Institut Pertanian Bogor		-							-			
30	Universitas Mataram		-							-			
31	Universitas Tadulako	23.499.621.288.00	0,00	865.597.561.018.00	0,00	865.597.561.018.00	13.987.936.802.00	903.085.118.908	19.920.895.529.00	0,00	19.920.895.529.00	883.164.223.379.00	903.085.118.908
32	Politeknik Negeri Malang	17.059.865.848	-	599.467.070.120	-	599.467.070.120	646.059.830	617.172.995.798	249.764.494	-	249.764.494	616.923.231.304	617.172.995.798
33	Universitas SAT Banten		-							-			
KEMENTERIAN AGAMA (025)													
1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	28.324.848.490	-	1.058.583.428.125	-	1.058.583.428.125	5.239.370.500	1.092.147.647.115	7.045.508.188	-	7.045.508.188	1.085.102.138.927	1.092.147.647.115
2	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	70.736.513.541	-	1.435.917.270.906	320.664.983.732	1.115.252.287.174	2.793.743.608	1.188.782.544.323	1.972.560.253	-	1.972.560.253	1.188.609.984.070	1.188.782.544.323
3	UIN Malang	23.306.775.734	-	617.681.698.698	-	617.681.698.698	691.065.165	641.679.539.597	8.874.808	-	8.874.808	641.670.664.789	641.679.539.597
4	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	9.708.347.814	-	374.830.805.059	50.129.827.847	324.700.977.212	31.580.500	334.440.905.526	168.970.713	-	168.970.713	334.271.934.813	334.440.905.526
5	IAIN Alauddin, Makassar	13.306.716.270	-	1.429.556.929.202	-	1.429.556.929.202	3.601.717.800	1.446.465.363.272	696.754.700	-	696.754.700	1.446.768.608.572	1.446.465.363.272
6	IAIN Sumatera Utara	5.358.255.553	1.031.240.000	322.428.857.610	-	322.428.857.610	-	328.818.353.163	3.382.815.226	-	3.382.815.226	328.815.537.937	328.818.353.163
7	UIN Walisongo Semarang	30.295.165.470	-	699.341.959.892	-	699.341.959.892	849.995.345	730.487.120.707	3.561.223.700	-	3.561.223.700	726.925.897.007	730.487.120.707
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	30.295.165.470	-	699.341.959.892	-	699.341.959.892	849.995.345	730.487.120.707	3.561.223.700	-	3.561.223.700	726.925.897.007	730.487.120.707
9	IAIN Sulthan Thoha Saifudin	2.652.502.233	-	146.081.096.173	-	146.081.096.173	42.826.122	148.776.424.528	141.921.574	-	141.921.574	148.634.502.954	148.776.424.528
10	IAIN Sunan Ampel	19.170.360.220	-	613.351.271.938	-	613.351.271.938	2.259.728.478	634.781.360.636	97.579.087	-	97.579.087	634.683.781.549	634.781.360.636
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	11.669.306.495	-	181.083.688.111	-	181.083.688.111	939.239.000	193.692.233.606	75.798.188	-	75.798.188	193.616.435.418	193.692.233.606
9	IAIN Raden Intan Lampung	6.827.235.368	-	297.205.543.456	50.956.091.810	246.249.451.646	278.013.700	253.354.700.714	825.549.553	-	825.549.553	252.529.151.161	253.354.700.714
13	IAIN Raden Fatah Palembang	4.999.214.053	-	275.078.960.326	-	275.078.960.326	43.995.000	280.122.169.379	25.334.900	-	25.334.900	280.086.834.479	280.122.169.379
14	IAIN Mataram	4.033.572.266	-	138.186.703.755	-	138.186.703.755	137.150.000	142.357.426.021	130.307.293	-	130.307.293	142.227.118.728	142.357.426.021
15	IAIN Ar Raniry Banda Aceh	3.565.571.162	-	467.042.895.953	-	467.042.895.953	4.491.291.300	475.099.758.415	1.468.607.477	-	1.468.607.477	473.631.150.938	475.099.758.415
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI													
1	Balai Besar Pengembangan Latihan Dalam Negeri,	186.524.730	-	264.961.051.878	-	264.961.051.878	469.789.884	265.617.366.492	204.904	-	204.904	265.617.161.588	265.617.366.492
2	Balai Besar Pengembangan Latihan Kerja Luar Negeri,	543.217.236	-	239.271.192.566	-	239.271.192.566	-	239.814.409.802	-	-	-	239.814.409.802	239.814.409.802
3	Balai Besar Latihan Kerja Industri, Serang	801.504.402	-	74.689.398.826	-	74.689.398.826	88.252.200	75.579.155.428	36.515.986	-	36.515.986	75.542.639.442	75.579.155.428
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)													
1	PP IPTEK	2.035.934.183	-	10.185.895.264	6.998.620.331	3.187.274.933	-	5.223.209.116	12.745.893	-	12.745.893	5.210.463.222	5.223.209.115
KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)													
1	Lembaga Layanan Pemasaran-KUKM Jakarta	38.055.631.396	-	615.316.551.674	125.497.270.449	489.819.281.225	7.271.013.856	535.145.926.477	13.885.903.367	-	13.885.903.367	521.260.023.111	535.145.926.478
BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI													
1.	BPPT Enjiniring	21.534.924.554	-	5.226.609.525	1.321.509.651	3.905.099.874	4.448.910.924	29.888.935.352	7.909.202.055	-	7.909.202.055	21.979.733.297	29.888.935.352
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)													
1	RS. Bhayangkara R. Said Sukanto Jakarta	30.177.278.573	-	138.193.315.177	9.736.862.230	128.456.452.947	115875000	158.749.606.520	3422147982	-	3.422.147.982	155.327.458.538	158.749.606.520
2	RS Bhayangkara Tk.III Kediri	17.627.741.044	-	31.458.574.867	3.549.814.657	27.908.760.210	164525271	45.701.026.525	1141424506	-	1.141.424.506	44.559.602.019	45.701.026.525
3	RS Bhayangkara Tk.II H.S. Samsoeri, Mertojo,	9.027.092.351	-	42.115.572.356	5.141.667.698	36.973.904.658	3648610750	49.649.607.759	1487667533	-	1.487.667.533	48.161.940.226	49.649.607.759
4	RS Bhayangkara Tk.II Mappa Oudang, Makassar	16.498.096.335	-	65.848.565.912	3.958.152.840	61.890.413.072	1542510900	79.931.020.307	3256733314	-	3.256.733.314	76.674.286.993	79.931.020.307
5	RS Bhayangkara, Semarang	12.008.626.117	-	32.778.655.502	1.153.098.581	31.626.555.921	87359615	43.722.541.653	1686105338	-	1.686.105.338	42.036.436.315	43.722.541.653
6	RS Bhayangkara, Bandung	2.710.237.711	-	46.975.199.042	2.450.829.793	44.524.369.249	74838509	47.309.445.469	284264408	-	284.264.408	47.025.181.061	47.309.445.469</

[illegible]

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
LAPORAN AKTIVITAS TAHUN 2012
(BERDASARKAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN)**

No	JENIS LAYANAN	KEMENTERIAN/ESE/LON /SATKER BLU	PENDAPATAN					BIAYA	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGI AN	Keuntungan/Kerugi an	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA	Pos-pos Luar Biasa	SURPLUS/DEFISIT BRUTO	SETOR KE KAS NEGARA	SURPLUS/DEFISIT BERSIH	Ket.			
			Pendapatan Usaha dari Jasa Layanan	Hibah	Pendapatan APBN	Pendapatan Usaha Lainnya	JUMLAH PENDAPATAN												
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 4 + 5 + 6 + 7)	(9)	(10 = 8 - 9)	(11)	(12 = 10 + 11)	(13)	(14 = 12 + 13)	(15)	(16 = 14 - 15)	(17)			
1	Penyediaan Barang dan/atau Jasa	KEMENTERIAN KESEHATAN (024)																	
		1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	743.264.457.645	8.016.777.740	261.923.116.305	34.692.660.369	1.047.897.012.059	1.040.800.174.130	7.096.837.929	-	7.096.837.929	-	7.096.837.929	-	7.096.837.929	-	7.096.837.929	
		2	RSUP Fatmawati, Jakarta	391.107.692.029	7.532.316.667	138.321.439.179	2.725.032.720	539.686.480.595	531.340.036.247	8.346.444.348	-	8.346.444.348	-	8.346.444.348	-	8.346.444.348	-	8.346.444.348	
		3	RSUP Persahabatan, Jakarta	178.543.172.608	-	113.348.523.886	47.259.433.826	339.151.130.320	288.933.859.098	50.217.271.222	(1.833.692.619)	48.383.578.603	-	48.383.578.603	-	48.383.578.603	-	48.383.578.603	
		4	RSUP Dr. Hasan Sadikin, Bandung	561.788.611.722	609.000.000	188.015.398.625	23.486.817.066	773.899.827.413	674.200.970.871	98.698.856.542	(2.733.453.143)	96.965.403.399	-	96.965.403.399	-	96.965.403.399	-	96.965.403.399	audited
		5	RSUP Dr. Kariadi, Semarang	352.546.851.520	-	142.497.103.072	17.615.114.507	552.658.069.099	458.340.466.548	94.318.602.551	-	94.318.602.551	-	94.318.602.551	-	94.318.602.551	-	94.318.602.551	
		6	RSUP Dr. Sardjito, Yogyakarta	363.150.877.378	983.958.134	169.698.838.190	13.138.791.709	546.972.465.411	508.223.930.073	38.748.535.338	(1.044.071.903)	37.704.463.435	-	37.704.463.435	-	37.704.463.435	-	37.704.463.435	audited
		7	RSUP Sanglah, Denpasar	279.436.723.114	4.525.853.486	141.152.745.080	42.234.842.127	467.350.163.807	428.107.279.000	39.242.884.807	-	39.242.884.807	-	39.242.884.807	-	39.242.884.807	-	39.242.884.807	audited
		8	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar	313.984.556.636	743.780.000	116.346.089.691	9.307.439.775	440.381.866.102	425.681.374.475	14.700.491.627	(7.661.109.022)	7.039.382.606	-	7.039.382.606	-	7.039.382.606	-	7.039.382.606	
		9	RSUP Dr. M. Djamil, Padang	203.941.391.662	-	139.717.057.464	22.995.678.960	366.654.128.086	309.074.761.429	57.579.366.657	(2.650.538)	57.576.716.119	-	57.576.716.119	-	57.576.716.119	-	57.576.716.119	
		10	RSUP Dr. Mohammad Hoesin, Palembang	326.051.048.734	624.521.394	112.293.821.369	5.738.274.586	444.707.666.083	454.909.441.328	(10.201.775.245)	3.902.182.415	(6.299.592.830)	-	(6.299.592.830)	-	(6.299.592.830)	-	(6.299.592.830)	audited
		11	RSUP Prof. Dr. R.D. Kandow, Manado	170.825.337.518	-	548.559.436.040	1.894.990.208	721.279.763.766	345.337.593.000	375.942.170.766	3.902.182.415	379.844.353.181	-	379.844.353.181	-	379.844.353.181	-	379.844.353.181	
		12	RSUP Dr. Soeradi Tirtonegoro, Klaten	72.343.701.577	44.330.000	74.123.515.132	27.861.357.060	174.372.903.769	149.071.756.415	25.301.147.353	(93.679.228)	25.207.468.126	-	25.207.468.126	-	25.207.468.126	-	25.207.468.126	
		13	RS Jiwa Dr. H. Marzuki Mahdi, Bogor	64.816.905.510	282.110.517	58.157.426.574	3.624.332.337	126.880.774.938	125.977.278.365	903.496.573	-	903.496.573	-	903.496.573	-	903.496.573	-	903.496.573	
		14	RSUP H. Adam Malik, Medan	370.595.887.711	-	245.596.388.935	11.974.797.172	628.167.073.818	531.402.094.673	96.764.979.145	1.415.076.681	98.180.055.826	-	98.180.055.826	-	98.180.055.826	-	98.180.055.826	
		15	RSAB Harapan Kita	152.614.276.000	436.563.000	97.378.314.000	9.755.188.000	260.184.341.000	263.344.069.000	(3.159.728.000)	-	(3.159.728.000)	-	(3.159.728.000)	-	(3.159.728.000)	-	(3.159.728.000)	
		16	RSJPD Harapan Kita	538.663.045.001	-	74.943.779.987	10.791.146.258	624.397.971.246	630.743.865.843	(6.345.894.597)	-	(6.345.894.597)	-	(6.345.894.597)	-	(6.345.894.597)	-	(6.345.894.597)	
		17	RS Paru Dr. Ario Wirawan Salatiga	23.491.407.980	-	34.878.164.014	-	58.369.571.994	50.762.057.337	7.607.514.657	-	7.607.514.657	-	7.607.514.657	-	7.607.514.657	-	7.607.514.657	
		18	RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu	16.595.484.775	-	22.180.892.681	-	38.776.377.456	35.697.088.070	3.079.289.386	-	3.079.289.386	-	3.079.289.386	-	3.079.289.386	-	3.079.289.386	
		19	RS Paru Dr. M. Goenawan P. Cisarua	32.935.542.807	18.725.000	33.249.484.318	3.653.607.939	69.857.360.064	62.872.666.651	6.984.693.413	424.832.586	7.409.525.999	-	7.409.525.999	-	7.409.525.999	-	7.409.525.999	audited
		20	RSJ DR. Radjiman W. Lawang	26.028.785.920	1.196.504.000	60.526.497.467	4.087.744.097	91.839.531.484	84.418.283.983	7.421.247.501	-	7.421.247.501	-	7.421.247.501	-	7.421.247.501	-	7.421.247.501	
		21	RSJ Dr. Soeharto Herdjan	19.895.533.327	-	39.823.493.819	1.519.012.276	61.038.039.422	55.667.873.928	5.370.165.494	-	5.370.165.494	-	5.370.165.494	-	5.370.165.494	-	5.370.165.494	
		22	RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang	34.857.785.789	54.958.000	76.663.524.317	2.079.764.937	113.656.033.043	93.083.949.084	20.562.083.959	(1.133.079.700)	19.429.004.259	-	19.429.004.259	-	19.429.004.259	-	19.429.004.259	audited
		23	RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid Makasar	6.480.214.518	114.000.000	52.956.667.093	238.611.840	59.789.693.451	32.097.542.325	27.692.151.126	-	27.692.151.126	-	27.692.151.126	-	27.692.151.126	-	27.692.151.126	
		24	RSPI Prof. Dr. Sulianto Saroso	25.188.203.926	-	51.635.798.732	308.030.425	77.132.033.083	78.528.468.627	(1.396.435.544)	-	(1.396.435.544)	-	(1.396.435.544)	-	(1.396.435.544)	-	(1.396.435.544)	
		25	RS Mata Cicendo Bandung	82.578.587.016	23.436.000	38.206.843.343	208.612.912	122.018.479.271	102.349.517.519	19.668.961.752	28.600.000	19.697.561.752	-	19.697.561.752	-	19.697.561.752	-	19.697.561.752	
		26	RS Stroke Nasional Bukit Tinggi	30.742.989.155	7.598.055.800	65.427.416.001	582.215.135	104.350.676.091	66.312.465.729	38.038.210.362	67.249.238	38.105.459.600	-	38.105.459.600	-	38.105.459.600	-	38.105.459.600	
		27	RS Kusta Dr. Sitanala	17.566.366.896	-	60.184.278.122	291.707.378	78.032.352.396	50.074.675.057	27.957.677.339	(109.841.050)	27.847.836.289	-	27.847.836.289	-	27.847.836.289	-	27.847.836.289	audited
		28	RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso	76.265.232.347	-	63.736.264.498	8.132.991.431	148.134.488.276	136.155.911.091	11.978.577.185	-	11.978.577.185	-	11.978.577.185	-	11.978.577.185	-	11.978.577.185	
		29	RS Kanker Dharmasi	317.879.616.705	-	101.001.178.644	6.919.856.723	425.800.652.072	400.766.001.970	25.034.650.102	-	25.034.650.102	-	25.034.650.102	-	25.034.650.102	-	25.034.650.102	
		30	RS Kusta Palembang	7.226.825.741	5.990.000	22.529.535.012	521.958.711	30.284.309.464	27.717.527.896	2.566.781.568	448.722.686	3.015.504.254	-	3.015.504.254	-	3.015.504.254	-	3.015.504.254	
		31	RS Ketergantungan Obat Jakarta	11.521.083.000	-	32.924.879.935	139.200.019	44.585.162.954	40.588.933.809	3.996.229.145	(2.885.000)	3.993.344.145	-	3.993.344.145	-	3.993.344.145	-	3.993.344.145	
		32	Politeknik Kesehatan Jakarta III	13.831.253.022	-	64.194.366.704	98.688.067	78.124.307.793	52.765.150.410	25.359.157.383	-	25.359.157.383	-	25.359.157.383	-	25.359.157.383	-	25.359.157.383	
		33	Politeknik Kesehatan Bandung	22.317.144.228	-	62.488.854.190	951.818.316	85.757.816.734	71.390.593.423	14.367.223.311	-	14.367.223.311	-	14.367.223.311	-	14.367.223.311	-	14.367.223.311	
		34	Politeknik Kesehatan Medan	18.124.131.690	-	38.703.840.576	197.617.260	57.025.589.526	60.329.056.131	(3.303.466.605)	(987.466.924)	(4.290.933.529)	-	(4.290.933.529)	-	(4.290.933.529)	-	(4.290.933.529)	
		35	Politeknik Kesehatan Semarang	7.032.740.995	-	10.842.273.028	254.518.281	18.129.532.304	149.791.117.27	3.150.420.577	-	3.150.420.577	-	3.150.420.577	-	3.150.420.577	-	3.150.420.577	audited
		36	Politeknik Kesehatan Makassar	18.399.249.000	-	80.416.068.104	457.123.973	99.272.441.077	56.621.821.546	40.650.619.531	(61.022.720)	40.589.596.811	-	40.589.596.811	-	40.589.596.811	-	40.589.596.811	
		37	Politeknik Kesehatan Jakarta II	14.010.776.224	-	30.471.903.610	422.269.788	44.904.949.622	52.705.381.516	(7.800.431.894)	-	(7.800.431.894)	-	(7.800.431.894)	-	(7.800.431.894)	-	(7.800.431.894)	
		38	Politeknik Kesehatan Tanjung																

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)														
1	Universitas Diponegoro Semarang	358.839.831.082	-	349.843.507.212	23.845.191.304	732.328.529.598	654.215.391.656	78.113.137.942	-	78.113.137.942	-	78.113.137.942	-	78.113.137.942
2	Universitas Padjadjaran Bandung	618.476.694.833	5.281.784.960	361.021.156.898	14.504.625.055	999.284.261.746	957.249.962.044	42.034.299.702	-	42.034.299.702	-	42.034.299.702	-	audited
3	Universitas Negeri Malang	89.870.293.300	-	198.854.854.400	138.546.299.564	427.271.447.264	427.978.021.064	(706.573.800)	-	(706.573.800)	-	(706.573.800)	-	
4	Universitas Hasanudin	250.998.854.335	5.334.628.899	628.271.273.411	113.935.820.254	998.540.576.899	755.919.690.741	242.620.886.158	-	242.620.886.158	-	242.620.886.158	-	
5	Universitas Brawijaya Malang	520.111.454.295	1.028.400.000	475.793.144.478	77.599.105.102	1.074.532.103.875	773.538.936.391	300.993.167.484	1.081.820.786	302.074.988.270	-	302.074.988.270	-	
6	Universitas Negeri Semarang	141.736.556.919	419.408.000	358.177.802.019	9.304.477.241	509.638.244.179	314.488.055.323	195.150.188.856	-	195.150.188.856	(10.558.542.835)	205.708.731.691	-	
7	Universitas Negeri Surabaya	367.980.097.818	34.699.529.218	514.820.084.467	328.376.518.522	1.245.876.230.025	328.376.518.522	917.499.711.503	-	917.499.711.503	-	917.499.711.503	-	
8	Universitas Mulawarman Samarinda	97.196.449.131	14.944.008.300	367.980.097.818	34.699.529.218	514.820.084.467	328.376.518.522	186.443.565.945	-	186.443.565.945	-	186.443.565.945	-	
9	Universitas Sebelas Maret Surakarta	196.963.083.798	6.707.567.773	397.427.152.191	28.126.083.119	629.223.896.881	544.354.301.620	84.869.595.261	-	84.869.595.261	-	84.869.595.261	-	
10	Institut Teknologi Sepuluh Nopember	153.278.310.461	400.000.000	314.436.230.916	128.947.024.544	597.061.565.921	540.520.411.951	56.541.153.970	-	56.541.153.970	-	56.541.153.970	-	
11	Universitas Lampung	100.898.569.031	-	222.196.395.698	5.139.109.047	328.234.073.776	276.387.873.791	51.846.199.985	-	51.846.199.985	-	51.846.199.985	-	audited
12	Universitas Negeri Yogyakarta	143.998.331.127	905.035.400	312.203.286.419	10.684.558.057	467.792.211.003	394.801.174.139	72.991.036.864	-	72.991.036.864	-	72.991.036.864	-	
13	Universitas Negeri Gorontalo	51.799.038.600	3.049.890.000	-	2.477.773.620	57.326.702.220	60.150.908.615	(2.824.206.395)	-	(2.824.206.395)	-	(2.824.206.395)	-	
14	Universitas Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Universitas Sriwijaya	198.043.991.685	3.709.380.576	207.274.408.379	22.904.802.371	431.932.583.371	443.067.265.466	(11.134.682.095)	-	(11.134.682.095)	-	(11.134.682.095)	-	
16	Universitas Negeri Jakarta	173.180.948.106	10.275.945.492	292.666.908.941	58.801.639.795	534.945.442.334	392.236.062.020	142.709.380.314	-	142.709.380.314	-	142.709.380.314	-	
17	Universitas Andalas	156.672.134.823	18.629.326.463	380.343.766.118	2.632.511.521	558.277.738.925	446.217.321.502	112.060.417.422	-	112.060.417.422	-	112.060.417.422	-	
18	Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto	89.205.118.018	21.299.265.729	245.978.069.073	2.968.281.867	359.450.734.687	348.593.711.123	10.857.023.564	-	10.857.023.564	-	10.857.023.564	-	
19	Universitas Haluoleo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20	Universitas Riau	123.152.224.860	1.687.314.700	241.200.036.036	1.269.399.149	367.308.974.745	324.280.123.389	43.028.851.356	-	43.028.851.356	-	43.028.851.356	-	
21	Universitas Terbuka	910.082.593.885	83.321.730	201.325.967.662	210.822.688.673	1.322.314.571.950	856.743.754.649	465.570.817.301	-	465.570.817.301	-	465.570.817.301	-	
22	Universitas Udayana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Universitas Gajah Mada	736.425.861.148	-	58.090.803.508	58.090.803.508	595.790.058.638	-	595.790.058.638	210.074.864.263	-	-	104.859.527.228	314.734.391.491	1.705.041.114.786
24	Universitas Pendidikan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25	Universitas Airlangga	285.598.663.059	12.875.292.895	356.902.439.640	142.411.023.930	797.787.419.524	644.572.252.627	153.215.166.897	29.058.179	153.244.225.076	-	153.244.225.076	-	audited
26	Universitas Indonesia	1.063.331.742.414	6.132.832.393	536.130.923.407	78.553.498.574	1.684.148.996.788	1.388.071.398.827	296.077.597.961	-	296.077.597.961	-	296.077.597.961	-	SAP
27	Universitas Sumatera Utara	371.380.305.600	210.000.000	383.560.664.524	75.490.424.145	830.641.394.269	643.327.997.217	187.313.397.052	-	187.313.397.052	-	187.313.397.052	-	
28	Institut Teknologi Bandung	467.835.593.510	22.091.685.663	391.287.930.666	221.413.202.712	1.102.628.412.551	1.007.754.781.355	94.873.631.196	-	94.873.631.196	-	94.873.631.196	-	
29	Institut Pertanian Bogor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30	Universitas Mataram	19.354.446.323	-	74.443.286.245	-	93.797.732.568	58.975.728.820	34.822.003.748	-	34.822.003.748	-	34.822.003.748	-	
31	Universitas Tadulako	59.525.870.571	15.314.978.290	314.152.712.915	694.193.977	389.687.755.753	140.541.737.844	249.146.017.909	4.963.021.000	254.109.038.909	-	254.109.038.909	-	
32	Politeknik Negeri Malang	29.867.707.839	-	137.444.348.204	497.163.058	167.809.219.101	56.542.499.015	111.266.720.086	-	111.266.720.086	-	111.266.720.086	-	
33	Universitas SAT Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KEMENTERIAN AGAMA (025)														
1	UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	46.110.820.975	-	108.405.831.904	13.201.425.555	167.718.078.434	168.372.229.522	(654.151.088)	-	(654.151.088)	-	(654.151.088)	-	(654.151.088)
2	UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	117.269.763.351	-	207.534.840.468	8.328.483.706	333.133.087.525	295.609.718.648	37.523.368.877	-	37.523.368.877	-	37.523.368.877	-	
3	UIN Malang	44.994.484.501	-	138.683.140.859	736.105.118	185.413.730.478	173.813.407.395	11.600.323.083	-	11.600.323.083	-	11.600.323.083	-	SAP
4	UIN Sunan Gunung Djati, Bandung	41.361.529.005	1.073.403.125	139.049.725.539	340.508.643	181.825.166.312	173.688.478.265	11.888.642.099	3.751.954.052	11.888.642.099	-	11.888.642.099	-	
5	UIN Alauddin, Makassar	42.317.939.334	-	175.922.997.975	2.347.690.123	220.588.627.432	142.405.029.674	78.183.597.758	-	78.183.597.758	-	78.183.597.758	-	
6	UIN Sumatera Utara	17.601.967.100	21.135.244.375	95.938.882.796	1.376.814.801	136.052.909.072	109.531.475.065	26.521.434.007	-	26.521.434.007	-	26.521.434.007	-	
7	UIN Walisongo Semarang	19.947.053.814	3.000.000.000	78.091.914.586	360.535.800	101.399.504.200	83.621.553.466	17.777.950.734	-	17.777.950.734	-	17.777.950.734	-	
8	UIN Sultan Syarif Kasim Riau	61.894.414.433	-	100.337.420.000	1.798.204.795	164.030.039.228	158.301.547.593	5.728.491.635	-	5.728.491.635	-	5.728.491.635	-	
9	IAIN Sulthan Thoha Saifudin	14.326.848.000	-	65.961.784.601	1.967.926.210	82.256.538.811	68.901.231.426	13.355.307.385	-	13.355.307.385	-	13.355.307.385	-	
10	IAIN Sunan Ampel	29.463.357.000	-	148.788.614.946	786.028.020	179.037.999.966	125.886.365.975	53.151.633.991	-	53.151.633.991	-	53.151.633.991	-	
11	IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten	14.226.210.000	-	47.419.656.916	297.788.633	61.943.655.549	57.430.767.711	4.512.887.838	(200.000.000)	4.512.887.838	-	4.512.887.838	-	
9	IAIN Raden Intan Lampung	16.725.570.000	-	73.087.433.463	424.997.420	90.238.000.883	70.316.794.887	19.921.205.996	(151.423.900)	19.769.782.096	-	19.769.782.096	-	
13	IAIN Raden Fatah Palembang	17.658.270.768	-	80.855.131.975	851.081.561	99.364.484.304	83.426.945.732	15.937.538.572	-	15.937.538.572	-	15.937.538.572	-	
14	IAIN Mataram	11.062.518.200	-	56.908.454.619	170.116.350	68.141.089.169	67.999.189.743	141.899.426	-	141.899.426	-	141.899.426	-	
15	IAIN Ar Raniry Banda Aceh	14.240.072.333	46.043.441.480	93.052.571.514	45.678.509	153.381.763.836	88.277.592.116	65.104.171.720	-	65.104.171.720	-	65.104.171.720	-	
KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (026)														
1	Balai Besar Pengembangan Lathin Dalam Negeri, Bandung	1.200.498.756	-	-	-	1.200.498.756	-	1.200.498.756	-	1.200.498.756	-	1.200.498.756	21.418.164	1.179.080.592
2	Balai Besar Pengembangan Lathin Kerja Luar Negeri,	2.922.394.419	-	-	-	2.922.394.419	-	2.922.394.419	-	2.922.394.419	-	2.922.394.419	31.775.839	2.890.618.580
3	Balai Besar Lathin Kerja Industri, Serang	534.150.323	-	-	-	534.150.323	-	534.150.323	188.440.000	722.590.323	1.478.607	721.111.716	189.918.607	531.193.109
KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)														
1	PP IPTK	4.792.974.000	1.751.339.751	4.470.543.357	194.561.789	11.209.418.897	10.087.392.732	1.122.026.165	-	1.122.026.165	-			

2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan	2	Balai Pendidikan dan Pelatihan Ilmu Pelayaran Surabaya	619.116.332.483	5.305.284.960	361.021.156.898	14.504.625.055	999.947.398.396	962.644.268.734	37.303.130.662	-	37.303.130.662	-	37.303.130.662	-	37.303.130.662	audited
		3	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	57.925.987.100	-	101.764.009.872	3.332.114.924	163.022.111.896	112.737.006.962	50.285.104.934	(132.033.683)	50.153.071.251	-	50.601.157.721	-	50.601.157.721	
		4	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	29.952.076.171	-	58.851.670.729	1.475.076.617	90.278.823.517	73.034.470.889	17.244.352.528	-	17.244.352.528	-	17.244.352.528	-	17.244.352.528	
		5	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	40.891.106.500	-	81.435.744.858	984.439.453	123.311.290.811	91.743.399.846	31.567.890.965	-	31.567.890.965	-	31.567.890.965	-	31.567.890.965	
		6	Akademi Teknik dan Keselamatan Penerbangan Surabaya	10.241.430.087	-	78.770.581.890	3.351.800	89.015.363.777	75.250.107.977	13.765.255.800	-	13.765.255.800	-	13.765.255.800	4.033.133	13.761.222.667	
		7	Badan Diklat Transportasi Darat (BPPTD) Tegal	7.055.034.767	-	64.861.026.259	682.873.530	72.598.934.556	48.777.296.861	23.821.637.695	-	23.821.637.695	-	23.821.637.695	-	23.821.637.695	
		KEMENTERIAN ESDM															
		1	Puslitbang Teknologi Minyak & Gas Bumi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT (091)															
		1	Pusat Pembiayaan Perumahan Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		TOTAL PER DEPARTEMEN															
			KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	15.706.101.728	1.481.1781.970	76.053.330.962	454.561.728	93.695.776.388	75.739.181.911	17.956.594.477	-	17.956.594.477	-	17.956.594.477	7.180.935.885	10.775.658.592	
			KEMENTERIAN PERTANIAN (018)	19.580.193.618	-	29.781.019.923	169.150.746	49.530.364.287	50.832.035.829	(1.301.671.542)	-	(1.301.671.542)	-	(1.301.671.542)	-	(1.301.671.542)	
			KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN (019)	59.835.998.267	43.721.135.673	71.054.451.903	43.867.922.324	218.479.508.167	101.173.356.938	117.306.151.229	35.507.533.275	152.813.684.504	-	152.813.684.504	36.638.232	152.777.046.272	
			KEMENTERIAN KESEHATAN (024)	6.103.553.864.793	32.810.879.738	4.077.648.155.786	329.218.651.396	10.543.231.551.712	9.222.884.315.565	1.320.347.236.147	(3.598.782.737)	1.316.748.453.410	-	1.316.748.453.410	10.444.889.682	1.306.303.563.728	
			KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL (023)	7.775.805.776.571	185.079.596.481	8.321.647.251.245	1.792.735.748.287	17.818.450.963.057	13.107.282.398.233	4.711.168.564.824	216.148.764.228	4.121.452.406.151	(10.558.542.835)	4.236.670.476.214	314.734.391.491	5.837.062.063.772	
			KEMENTERIAN AGAMA (025)	509.200.818.814	71.252.088.980	1.611.038.382.161	33.033.385.244	2.224.524.675.199	1.867.582.327.218	356.942.347.981	3.600.530.152	360.542.878.133	(200.000.000)	360.742.878.133	-	360.742.878.133	
			KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	4.657.043.498	-	-	-	4.657.043.498	-	4.657.043.498	188.440.000	4.845.483.498	1.478.607	4.844.004.891	243.112.610	4.600.892.281	
			KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	4.792.974.000	1.751.339.751	4.470.543.357	194.561.789	11.209.418.897	10.087.392.732	1.122.026.165	-	1.122.026.165	-	1.122.026.165	-	1.122.026.165	
			KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (060)	198.616.468.216	672.600.000	147.986.612.149	21.172.020.259	368.447.700.624	352.908.729.547	15.538.971.077	-	15.538.971.077	-	15.538.971.077	-	15.538.971.077	
			BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	69.592.998.414	-	4.996.869.099	628.364.164	75.218.231.677	73.176.089.112	2.042.142.565	-	2.042.142.565	-	2.087.623.816	-	2.087.623.816	
			LEMBAGA PENERBANGAN ANTARIKSA NASIONAL	3.998.874.297	-	-	250.574.041	4.249.448.338	3.089.215.164	1.160.233.174	-	1.160.233.174	-	1.160.233.174	-	1.160.233.174	
			KEMENTERIAN PERHUBUNGAN	818.703.964.693	5.305.284.960	778.737.352.069	23.005.519.199	1.625.752.120.921	1.427.753.410.216	197.998.710.705	(132.033.683)	197.866.677.022	-	322.329.317.541	4.033.133	322.325.284.408	
			KEMENTERIAN ESDM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	15.584.045.076.909	342.074.707.553	15.123.413.968.654	2.244.730.459.176	33.037.446.802.766	26.292.508.452.465	6.744.938.350.300	251.714.451.235	6.190.787.878.634	(10.757.064.228)	6.430.712.591.860	332.644.001.033	8.013.184.569.876	
			SEKRETARIAT NEGARA (007)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno PPK GBK)	127.578.009.550	-	-	17.937.960.489	145.515.970.039	162.020.355.135	(16.504.385.096)	-	(16.504.385.096)	-	(16.504.385.096)	21.808.853.548	(38.313.238.644)	
		2.	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	82.538.559.595	-	-	24.143.452.428	106.682.012.022	93.825.398.059.30	12.856.613.963	-	12.856.613.963	-	12.856.613.963	(23.687.204.943)	(10.830.590.980)	
			Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL PER DEPARTEMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			SEKRETARIAT NEGARA (007)	210.116.569.145	-	-	42.081.412.917	252.197.982.061	255.845.753.194	(3.647.771.133)	-	(3.647.771.133)	-	(3.647.771.133)	(1.878.351.395)	(49.143.829.624)	
			Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN WILAYAH /	210.116.569.145	-	-	42.081.412.917	252.197.982.061	255.845.753.194	(3.647.771.133)	-	(3.647.771.133)	-	(3.647.771.133)	(1.878.351.395)	(49.143.829.624)	
3	Pengelolaan Dana		KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	Pusat Investasi Pemerintah	442.626.663.710	-	4.021.893.627	634.406.728.800	1.081.055.286.137	57.400.590.046	1.023.654.696.091	-	1.023.654.696.091	-	1.023.654.696.091	27.250.173	1.023.627.445.918	
		2	Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP)	255.957.999.744	-	-	423.185.014	256.381.184.758	3.056.364.272	253.324.820.486	-	253.324.820.486	-	253.324.820.486	-	253.324.820.486	
			KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	BID. PENDANAAN SEKRETARIAT BADAN PENGATUR	136.909.197.586	-	-	249.155.565.612	386.064.763.198	9.084.545.868	376.980.217.330	-	376.980.217.330	-	376.980.217.330	-	376.980.217.330	
			KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	BP3TI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1.	Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	96.271.965.335	-	3.030.097.772	43.082.289.696	142.384.352.803	47.484.695.546	94.899.657.257	-	94.899.657.257	-	94.899.657.257	-	94.899.657.257	
			TOTAL PER DEPARTEMEN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			KEMENTERIAN KEUANGAN (015)	698.584.663.454	-	4.021.893.627	634.829.913.814	1.337.436.470.895	60.456.954.318	1.276.979.516.577	-	1.276.979.516.577	-	1.276.979.516.577	27.250.173	1.276.952.266.404	
			KEMENTERIAN KEHUTANAN (029)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM (033)	136.909.197.586	-	-	249.155.565.612	386.064.763.198	9.084.545.868	376.980.217.330	-	376.980.217.330	-	376.980.217.330	-	376.980.217.330	
			KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA(059)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	835.493.861.040	-	4.021.893.627	883.985.479.426	1.723.501.234.093	69.541.500.186	1.653.958.733.907	-	1.653.958.733.907	-	1.653.958.733.907	27.250.173	1.653.932.483.734	
			TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN	16.629.655.507.094	342.074.707.553	15.127.435.862.281	3.170.797.351.519	35.013.146.018.920	26.617.895.705.846	8.395.250.313.074	251.714.451.235	7.841.099.841.408	(10.757.064.228)	8.081.024.554.634	330.792.899.812	9.617.973.223.986	

Ket. : **Keuntungan / kerugian** : Keuntungan merupakan selisih lebih antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar sedangkan kerugian adalah selisih kurang antara harga jual dengan nilai buku aset non lancar

Pos-pos luar biasa : Terdiri dari pendapatan dari kejadian luar biasa dan biaya dari kejadian luar biasa. Pendapatan dari kejadian luar biasa yaitu pendapatan yang timbul diluar kegiatan normal BLU, yang tidak berulang dan diluar kendali BLU. Biaya dari kejadian luar biasa yaitu biaya yang timbul di luar kegiatan normal BLU, yang tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang, dan diluar kendali BLU.

**PENGUNGKAPAN PENYUSUTAN ASET TETAP PADA 105 SATUAN KERJA BADAN LAYANAN UMUM
SESUAI DENGAN KMK NOMOR 53/KMK.06/2012 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KMK NOMOR 04/KMK.06/2013
PER 31 DESEMBER 2012 (Audited)**

					(rupiah)	
No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku		
007	KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA					
1	Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPK-GBK), Jakarta	50.214.126.153.085	257.158.985.262	49.957.267.167.823		
2	Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran (PPKK), Jakarta	24.474.413.820.413	135.606.015.448	24.495.808.668.126		
	Sub Jumlah	74.688.539.973.498	392.765.000.710	74.453.075.835.949		
015	KEMENTERIAN KEUANGAN					
1	Sekolah Tinggi Akuntansi Negara	802.732.706.234	52.727.017.375	750.005.688.859		
2	Pusat Investasi Pemerintah	12.713.220.331	3.607.308.457	9.105.911.874		
	Sub Jumlah	815.445.926.565	56.334.325.832	759.111.600.733		
019	KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN					
1	Akademi Kimia Analisis Bogor	44.477.827.153	17.581.022.164	26.896.804.989		
2	Balai Besar Industri Agro	111.345.587.852	52.320.834.334	59.024.753.518		
3	Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri	37.556.770.402	13.825.725.853	23.731.044.549		
4	B4T Bandung	180.537.248.509	70.306.420.441	110.230.828.068		
5	Baristand Industri Lampung	20.168.564.025	10.279.429.302	9.889.134.723		
	Sub Jumlah	394.085.997.941	164.313.432.094	229.772.565.847		
022	KEMENTERIAN PERHUBUNGAN					
1	Balai Besar Pendidikan Penyegaran dan Peningkatan Ilmu Pelayaran (BP3IP)	171.542.233.044	42.939.822.668	128.602.410.376		
2	Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran (STIP)	911.953.987.409	77.110.045.017	834.843.942.392		
3	Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar	438.507.076.195	42.814.763.409	395.692.312.786		
4	Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang	624.664.718.902	66.155.721.171	558.508.997.731		
5	Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan Tegal	155.452.646.850	19.985.202.806	135.467.444.244		
6	BP2IP Surabaya	613.286.138.174	54.966.117.527	558.320.020.647		
7	ATKP Surabaya	522.462.749.661	50.039.042.141	472.423.707.520		
	Sub Jumlah	3.437.869.550.235	354.010.714.539	3.083.858.835.696		
023	KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL					
1	Institut Teknologi 10 Nopember	2.280.974.356.434	370.613.897.062	1.910.360.459.372		
2	Institut Teknologi Bandung	1.325.944.268.161	581.815.926.861	744.128.341.300		
3	Universitas Airlangga	1.251.172.292.494	82.049.682.121	1.169.122.610.373		
4	Universitas Indonesia	7.664.369.105.052	649.778.734.191	7.014.590.370.861		
5	Universitas Pendidikan Indonesia	963.808.629.560	299.502.379.820	664.306.249.740		
6	Universitas Sumatera Utara	2.989.705.135.507	178.665.724.420	2.811.039.411.087		
7	Universitas Andalas	2.306.669.361.707	728.817.549.850	1.577.851.811.857		
8	Universitas Brawijaya	3.559.216.111.420	193.645.864.792	3.365.570.246.628		
9	Universitas Diponegoro	2.678.651.777.427	289.618.221.583	2.389.033.555.844		
10	Universitas Hasanuddin	3.351.792.169.394	292.360.713.185	3.059.431.456.209		
11	Universitas Lampung	736.066.180.834	13.611.439.103	722.454.741.731		
12	Universitas Mulawarman	611.173.545.531	180.930.194.372	430.243.351.159		
13	Universitas Negeri Gorontalo	24.234.871.340	2.373.912.599	21.860.958.741		
14	Universitas Negeri Malang	839.667.053.204	149.968.319.211	689.698.733.993		
15	Universitas Negeri Surabaya	2.066.974.741.897	36.661.716.077	2.030.313.025.820		
16	Universitas Negeri Yogyakarta	2.007.621.449.213	67.688.014.727	1.939.933.434.486		
17	Universitas Padjadjaran	2.475.033.972.698	523.203.640.707	1.951.830.331.991		
18	Universitas Riau	940.613.742.183	8.139.399.290	932.474.342.893		
19	Universitas Sebelas Maret	2.537.835.259.652	277.293.459.993	2.260.541.799.659		
20	Universitas Sriwijaya	2.696.868.758.235	321.520.821.986	2.375.347.936.249		
21	Universitas Terbuka	1.271.333.976.930	14.185.070.194	1.257.148.906.736		
22	Universitas Negeri Semarang	1.048.163.041.796	-	1.048.163.041.796		
23	Politeknik Negeri Malang	599.467.070.120	-	599.467.070.120		
24	Institut Pertanian Bogor	1.283.687.777.666	526.496.920.729	757.190.856.937		
	Sub Jumlah	47.511.044.648.455	5.788.941.602.873	41.722.103.045.582		
024	KEMENTERIAN KESEHATAN					
1	RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo	2.356.420.629.525	508.590.559.550	1.847.830.069.975		
2	RSUP Fatmawati	1.712.297.464.902	224.970.158.855	1.487.327.306.047		
3	RSUP Persahabatan	225.014.987.054	105.350.572.669	119.664.414.385		
4	RSJPD Harapan Kita	560.876.038.822	314.195.304.519	246.680.734.303		
5	RSAB Harapan Kita	1.325.515.336	95.235.156	1.230.280.180		
6	RS Kanker Dharmais	1.168.772.948.238	190.149.863.684	978.623.084.554		
7	RSUP Dr. Hasan Sadikin	1.180.523.608.538	354.015.448.415	826.508.160.123		
8	RSUP Dr. Kariadi	1.357.163.721.282	227.616.706.840	1.129.547.014.442		
9	RSUP Dr. Sardjito	751.817.200.096	251.162.819.318	500.654.380.778		
10	RSUP Dr. M. Hoesin	1.181.950.981.590	164.741.509.656	1.017.209.471.934		
11	RSUP Dr. M. Djamil	557.717.461.173	238.846.102.547	318.871.358.626		
12	RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo	652.421.713.474	140.602.596.530	511.819.116.944		
13	RSUP Sanglah Denpasar	739.948.845.688	234.062.952.874	505.885.892.814		
14	RSUP H. Adam Malik	973.471.168.676	354.758.022.420	618.713.146.256		
15	RSUP Dr. Soeradji Tirtonegoro	284.402.714.953	94.535.859.331	189.866.855.622		
16	RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou	698.833.641.157	114.961.930.003	583.871.711.154		
17	RS Mata Cicendo	210.277.157.733	78.675.987.668	131.601.170.065		
18	RSO Prof. Dr. R. Soeharso	438.639.434.091	85.759.798.204	352.879.635.887		
19	RSP Dr. H. A. Rotinsulu	242.329.337.718	26.773.282.997	215.556.054.721		

No	Badan Layanan Umum	Nilai Perolehan Aset Tetap	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
20	RSP Dr. Ario Wirawan	125.743.455.691	29.055.123.248	96.688.332.443
21	RSP Dr. Goenawan Partowidigdo	102.169.889.128	40.197.755.413	61.972.133.715
22	RSSN Bukittinggi	116.426.299.100	36.144.773.986	80.281.525.114
23	RSJ Dr. Soeharto Heerdjan	392.331.362.636	30.931.824.187	361.399.538.449
24	RSJ Dr. Marzuki Mahdi	525.335.469.407	59.356.442.557	465.979.026.850
25	RSJ Prof. Dr. Soeroyo	678.111.864.978	36.209.801.264	641.902.063.714
26	RSJ Dr. Radjiman Wediodiningrat	195.732.228.979	69.326.558.150	126.405.670.829
27	RSKO Jakarta	78.408.955.767	44.849.199.758	33.559.756.009
28	RS Kusta Sitanala	44.446.612.636	13.492.027.527	30.954.585.109
29	RSPI Soelianti Saroso	412.538.233.001	22.253.068.659	390.285.164.342
30	RS Kusta Dr. Rivai Abdullah	118.844.409.798	20.566.111.518	98.278.298.280
31	RS Kusta Dr. Tadjuddin Chalid	162.639.004.477	30.501.934.536	132.137.069.941
32	BBLK Jakarta	20.863.001.126	3.061.768.054	17.801.233.072
33	BBLK Makassar	26.173.371.730	8.960.600.685	17.212.771.045
34	BBLK Surabaya	20.973.711.844	11.580.453.055	9.393.258.789
35	BBLK Palembang	20.678.428.739	8.214.456.663	12.463.972.076
36	BBKPM Bandung	39.335.364.149	11.437.604.649	27.897.759.500
37	BBKPM Surakarta	47.431.145.937	5.843.642.755	41.587.503.182
38	BBKPM Makassar	54.837.814.143	10.923.237.875	43.914.576.268
39	BKMM Makassar	19.611.515.188	8.180.277.678	11.431.237.510
40	Politeknik Jakarta 3	245.046.946.601	66.956.833.797	178.090.112.804
41	Politeknik Bandung	454.404.298.177	26.027.099.965	428.377.198.212
42	Politeknik Medan	125.546.226.723	12.630.765.047	112.915.461.676
43	Politeknik Makassar	255.497.603.914	23.640.016.963	231.857.586.951
44	Politeknik Semarang	367.097.973.701	31.689.929.901	335.408.043.800
45	Politeknik Jakarta 2	113.884.031.964	29.774.048.589	84.109.983.375
46	Politeknik Surabaya	502.298.245.846	27.126.003.060	475.172.242.786
47	Politeknik Pontianak	84.007.507.047	5.904.467.737	78.103.039.310
48	Politeknik Tanjungkarang	103.227.592.398	8.209.744.240	95.017.848.158
49	Politeknik Surakarta	248.982.462.417	13.713.925.329	235.268.537.088
50	Politeknik Yogyakarta	135.440.360.053	10.729.894.880	124.710.465.073
51	Politeknik Bengkulu	116.890.000.152	8.094.851.970	108.795.148.182
52	Politeknik Malang	88.584.530.080	11.979.465.428	76.605.064.652
	Sub Jumlah	21.337.744.487.574	4.487.428.420.459	16.850.316.067.115
025	KEMENTERIAN AGAMA			
1	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	1.435.917.270.906	330.565.686.710	1.105.351.584.196
2	Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung	374.830.805.059	36.230.649.935	338.600.155.124
3	IAIN Walisongo Semarang	361.648.882.362	26.289.512.216	335.359.370.146
4	IAIN Raden Intan Lampung	297.205.543.456	50.956.091.810	246.249.451.646
	Sub Jumlah	2.469.602.501.783	444.041.940.671	2.025.560.561.112
029	KEMENTERIAN KEHUTANAN			
1	Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	3.728.546.350	308.963.528	3.419.582.821
	Sub Jumlah	3.728.546.350	308.963.528	3.419.582.821
033	KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM			
1	Bidang Pendanaan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	3.789.636.232	(946.332.725)	4.735.968.957
	Sub Jumlah	3.789.636.232	(946.332.725)	4.735.968.957
042	KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI			
1	Pusat Peragaan IPTEK	10.185.895.264	6.998.620.331	3.187.274.933
	Sub Jumlah	10.185.895.264	6.998.620.331	3.187.274.933
044	KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM			
1	Lembaga Pengelola Dana Bergulir	615.119.514.174	125.497.270.449	489.622.243.725
2	Lembaga Layanan Pemasaran	12.966.495.249	5.862.474.530	7.104.020.719
	Sub Jumlah	628.086.009.423	131.359.744.979	496.726.264.444
059	KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA			
1	Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan	64.193.806.010	11.154.206.722	53.039.599.288
	Sub Jumlah	64.193.806.010	11.154.206.722	53.039.599.288
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI			
1	BPPT Enjiniring	5.222.798.175	1.320.630.398	3.902.167.777
	Sub Jumlah	5.222.798.175	1.320.630.398	3.902.167.777
082	LAPAN			
1	Pusat Pemanfaatan Teknologi Dirgantara (FATEKGAN)	1.505.994.595	172.648.540	1.333.346.056
	Sub Jumlah	1.505.994.595	172.648.540	1.333.346.056
091	KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT			
1	Pusat Pembiayaan Perumahan	2.631.027.700	308.125.207	2.322.902.493
	Sub Jumlah	2.631.027.700	308.125.207	2.322.902.493
	TOTAL	151.373.676.799.800	11.838.512.044.158	139.692.465.618.803

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2012

(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN	REALISASI				JUMLAH REALISASI	SISA	TOTAL ASET BERSIH	NON APBN	KETERANGAN	Keterangan	BA
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	BELANJA LAIN- LAIN							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	9.900.000	-	8.906.448	-	-	8.906.448	993.552	-	-	TA. 2012	Bagian satker	007
2	Badan Amil Zakat Nasional (Baznas)	3.000.000	403.500	226.803	109.189	2.260.508	3.000.000	-	21.940.091	56.601.170	TA. 2012	APBN/Non APBN	025
3	Badan Koordinasi Pemberantasan Rupiah Palsu (BOTASUPAL)	3.126.614	-	3.126.614	-	-	3.126.614	-	-	-	TA. 2012	Bagian satker	050
4	Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA sendiri	-
5	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	29.865.831	4.535.460	17.262.123	314.195	-	22.111.778	7.754.053	5.987.947	-	TA. 2012	Satker	026
6	Badan Kebijakan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional (BKPPN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2011	Tidak aktif	033
7	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKORKAMLA)	225.415.000	6.508.202	80.208.571	120.122.018	-	206.838.791	18.576.209	590.296.555	-	TA. 2012	Satker	034
8	Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional (BKPRN)	1.595.883	262.950	1.326.264	-	-	1.589.214	6.669	1.595.883	-	TA. 2012	Bagian satker	055
9	Badan Pelaksana Pengelola Masjid Istiqlal (BPPMI)	54.000.000	2.685.729	1.313.495	32.697.435	772	36.697.431	17.302.569	91.447.485	-	TA. 2012	Bagian satker	025
10	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	37.892.942	1.051.316	35.794.614	465.875	-	37.311.805	581.137	24.540.101	-	TA. 2012	Satker	033
11	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	268.932.800	10.918.350	113.868.123	4.918.442	-	129.704.915	139.227.885	733.913.701	-	TA. 2012	Satker	020
12	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	2.239.100.173	182.873.015	TA. 2012	Bukan Satker	025
13	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.264.985	-	2.795.633	-	-	2.795.633	469.352	3.551.698	-	TA. 2012	Bagian satker	033
14	Badan Pengelola KAPET Batui - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.002.853	-	1.930.392	-	-	1.930.392	72.461	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
15	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.980.658	-	1.742.324	-	-	1.742.324	218.334	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
16	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.521.478	-	3.326.200	-	-	3.326.200	195.278	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
17	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.386.648	-	2.280.776	-	-	2.280.776	1.105.872	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
18	Badan Pengelola KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.711.862	-	1.684.907	-	-	1.684.907	26.955	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
19	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.982.283	-	1.776.382	-	-	1.776.382	205.901	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
20	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	3.643.078	-	3.328.109	-	-	3.328.109	314.969	-	1.100.000	TA. 2012	Bagian satker	033
21	Badan Pengelola KAPET Manado Bitung - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.140.018	-	2.129.629	-	-	2.129.629	10.389	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
22	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.664.550	-	1.620.272	-	-	1.620.272	44.278	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
23	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.118.400	-	2.107.004	-	-	2.107.004	11.396	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
24	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	5.196.024	-	4.961.838	-	-	4.961.838	234.186	1.194.735	-	TA. 2012	Bagian satker	033
25	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	2.263.208	-	2.198.280	-	-	2.198.280	64.928	-	-	TA. 2012	Bagian satker	033
26	Badan Perlindungan Konsumen Nasional RI (BPKN)	14.800.000	2.716.750	8.623.510	-	-	11.340.260	3.459.740	1.427.407	-	TA. 2012	Satker	090
27	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.170.000	288.150	851.741	-	-	1.139.891	30.109	-	-	TA. 2012	Bagian satker	088
28	Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional (BPKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif	024
29	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	Tidak aktif	040
30	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	4.365.975.880	381.950.072	TA. 2012	Bukan Satker	091
31	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	3.000.000	1.695.813	1.304.187	-	-	3.000.000	-	1.514.520	26.739	TA. 2012	Bukan Satker	025
32	Dewan Buku Nasional (DBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	023
33	Dewan Energi Nasional (DEN)	56.210.141	4.962.926	45.509.923	857.680	-	51.330.529	4.879.612	15.156.396	-	TA. 2012	Satker	020
34	Dewan Gula Indonesia (DGI)	1.084.900	-	1.040.697	-	-	1.040.697	44.203	-	-	TA. 2012	Bagian satker	018
35	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	Bagian satker	999
36	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintar	12.289.128	-	-	-	8.805.467	8.805.467	3.483.661	2.343.883	-	TA. 2012	Bagian satker	999
37	Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Karimur	8.624.962	-	-	-	7.582.409	7.582.409	1.042.553	6.434.373	-	TA. 2012	Bagian satker	999
38	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	11.048.008	-	10.768.551	152.250	-	10.920.801	127.207	1.572.243	-	TA. 2012	Satker	032
39	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	5.721.183	-	5.334.014	-	-	5.334.014	387.169	164.305	-	TA. 2012	Bagian satker	018
40	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	98.991.575	-	92.149.868	-	-	92.149.868	6.841.707	-	-	TA. 2012	Bagian satker	044
41	Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus (DN KEK)	12.000.000	166.547	9.614.603	515.253	-	10.296.403	1.703.597	1.896.069	-	TA. 2012	Satker	035
42	Dewan Nasional Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Dewan Nasional)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	likuidasi	-
43	Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI)	29.300.000	-	24.519.840	4.255.825	-	28.775.665	524.335	11.221.554	-	TA. 2012	Satker	043
44	Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional (DEPANRI/LAPAN)	459.180	-	438.000	-	-	438.000	21.180	-	-	TA. 2012	Bagian satker	082
45	Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (DPKTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	-
46	Dewan Pengupahan Nasional (DEPENAS)	750.265	-	732.265	-	-	732.265	18.000	-	-	TA. 2012	Bagian satker	026
47	Dewan Pers	17.074.536	1.421.856	13.782.577	290.680	-	15.495.113	1.579.423	4.341.280	-	TA. 2012	Satker	059
48	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	1.373.620	-	1.156.207	-	-	1.156.207	217.413	-	-	TA. 2012	Bagian satker	010
49	Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimores)	42.805.397	3.418.364	30.253.158	1.663.249	-	35.334.771	7.470.626	11.454.634	-	TA. 2012	Satker	007
50	Dewan Riset Nasional (DRN)	3.956.710	-	3.376.370	-	-	3.376.370	580.340	3.594	-	TA. 2012	Bagian satker	042
51	Dewan Sumber Daya Air Nasional (DSDAN)	8.024.768	158.528	6.763.565	138.707	-	7.060.800	963.968	2.035.860	-	TA. 2012	Satker	033
52	Dewan Teknologi Informasi Komunikasi Nasional (DETIKNAS)	3.000.000	-	2.628.976	48.425	-	2.677.401	322.599	269.575	-	TA. 2012	Bagian satker	059
53	Komisi Banding Merek	467.280	-	145.996	-	-	145.996	321.284	-	-	TA. 2012	Bagian satker	013
54	Komisi Banding Paten	138.468	-	112.521	-	-	112.521	25.947	-	-	TA. 2012	Bagian satker	013
55	Komisi Hukum Nasional (KHN)	10.670.000	832.500	8.417.197	224.613	-	9.474.310	1.195.690	-	-	TA. 2012	Satker	007
56	Komisi Informasi Pusat (KIP)	12.228.375	2.455.405	8.229.379	370.898	-	11.055.682	1.172.693	5.056.298	-	TA. 2012	Satker	059
57	Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik (KKH PRG)	589.069.000	244.500.000	-	-	261.569.000	506.069.000	83.000.000	-	-	TA. 2012	Bagian satker	043

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL
APBN / NON APBN DAN TOTAL ASET
Per 31 Desember 2012

(dalam Ribuan Rupiah)

58	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	7.603.918	-	5.349.832	-	-	5.349.832	2.254.086	-	-	TA. 2012	Bagian satker	034
59	Komisi Kepolisian Nasional (Kempolnas)	14.675.905	-	9.006.894	-	-	9.006.894	5.669.011	-	-	TA. 2012	Bagian satker	034
60	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	7.268.185	3.242.400	3.005.184	828.447	-	7.076.031	192.154	-	7.038.691	TA. 2012	Bagian satker	074
61	Komisi Nasional Lanjut Usia (KOMNAS LANSIA)	19.338.823	-	3.222.941	-	-	3.222.941	16.115.882	-	-	TA. 2012	Bagian satker	027
62	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN)	16.875.000	-	-	-	14.574.743	14.574.743	2.300.257	17.519.160	99.647.325	TA. 2012	Bagian satker	036
63	Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	025
64	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	26.629.530	3.754.614	20.291.452	570.462	-	24.616.528	2.013.002	8.675.141	-	TA. 2012	Satker	059
65	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	7.474.663	1.426.500	5.272.786	275.411	-	6.974.697	499.966	4.218.895	-	TA. 2012	Satker	047
66	Komite Akreditasi Nasional (KAN)	6.851.864	-	6.759.316	-	-	6.759.316	92.548	-	-	TA. 2012	Bagian satker	084
67	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PRPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	026
68	Komite Ekonomi Nasional (KEN)	6.502.000	-	4.926.646	-	-	4.926.646	1.575.354	-	-	TA. 2012	Bagian satker	035
69	Komite Inovasi Nasional (KIN)	1.643.308	-	1.582.271	28.800	-	1.611.071	32.237	-	-	TA. 2012	Bagian satker	042
70	Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP)	4.000.000	-	3.543.104	-	246.433	3.789.537	210.463	-	-	TA. 2012	Bagian satker	012
71	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	300.000.000	136.400.000	-	-	163.600.000	300.000.000	-	-	-	TA. 2012	Bagian satker	055
72	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	33.662.934	-	23.092.553	4.587.692	-	27.680.245	5.982.689	40.349.659	-	TA. 2012	Satker	022
73	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	9.999.801	-	9.999.801	-	-	9.999.801	-	-	-	TA. 2012	Bagian satker	082
74	Komite Pengarahan Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	Tidak mengelola APBN	048
75	Komite Privatisasi Perusahaan Perseroan (Persero)	311.400	-	-	-	171.000	171.000	140.400	-	-	TA. 2012	Bagian satker	041
76	Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP)	3.015.613	-	2.957.125	-	-	2.957.125	58.488	807.676	-	TA. 2012	Satker	015
77	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran (KSNSU)	423.936	-	370.877	-	-	370.877	53.059	-	-	TA. 2012	Bagian satker	084
78	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	63.206.228	-	21.353.938	31.690.126	-	53.044.064	10.162.164	71.546.853	-	TA. 2012	Satker	024
79	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	Bagian satker	088
80	Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKS TN)	1.320.000	-	977.080	-	-	977.080	342.920	-	-	TA. 2012	Bagian satker	026
81	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (LKP2KS Paca)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Belum Aktif	027
82	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)	53.100.000	1.383.650	32.935.299	4.649.371	-	38.968.320	14.131.680	9.809.820	-	TA. 2012	Satker	007
83	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	461.202	-	388.292	-	-	388.292	72.910	-	-	TA. 2012	Bagian satker	026
84	Lembaga Sensor Film (LSF)	20.750.000	5.217.179	7.781.179	4.257.778	-	17.256.136	3.493.864	32.894.714	-	TA. 2012	Satker	040
85	Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak Aktif	024
86	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	540.080.422	196.462.228	TA. 2012	Non APBN	
87	Sekretariat Pengadilan Paik	32.624.162	21.657.534	8.150.710	2.705.495	-	32.513.739	110.423	14.803.500	-	TA. 2012	Satker	015
88	Staf Khusus Presiden	26.485.765	-	19.182.863	-	-	19.182.863	7.302.902	-	-	TA. 2012	Bagian satker	114
89	Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP-PPP)	66.948.605	15.472.153	27.859.259	10.423.818	-	53.755.230	13.193.375	10.423.818	-	TA. 2012	Satker	007
90	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak aktif	029
91	Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan	250.000	-	222.058	-	-	222.058	27.942	-	-	TA. 2012	Bagian satker	018
92	Unit Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat	90.708.462	24.600.586	28.383.517	930.426	-	53.914.529	36.793.933	1.103.402	-	TA. 2012	Satker	007
93	Badan Pengembangan Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		033
94	Badan Informasi Geospasial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	BA	083
95	Badan Promosi Pariwisata	54.513.129	-	53.500.145	-	-	53.500.145	1.012.984	-	-	TA. 2012	Bagian satker	040
96	Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bagian satker	078
97	Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Lesung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	Tidak mendapat APBN	035
98	Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mankei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TA. 2012	Tidak mendapat APBN	035
99	SKK MIGAS	-	-	-	-	-	-	-	97.314.910	444.164.952	TA. 2012		
	J U M L A H	2.489.487.044	502.136.962	869.783.068	228.092.560	458.810.332	2.058.822.922	430.664.122	8.992.388.327	1.369.864.192			

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN MILIK NEGARA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
PER 31 DESEMBER 2012

(Dalam Ribuan Rupiah)

No.	Badan Hukum Milik Negara	Pendapatan Operasional	Pendapatan Non Operasional	Total Pendapatan	Beban Operasional	Beban Non Operasional	Total Beban	Surplus (Defisit)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)	(6)	(7)	(8)=(6)+(7)	(9)=(5)-(8)
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	87.883.084	-	87.883.084	86.222.574	-	86.222.574	1.660.510
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	5.043.922	-	5.043.922	608.604	3.987.736	4.596.340	447.582
3	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	-	-	-	-	-	-	-
4	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	-	-	-	-	-	-	-
5	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	-	-	-	-	-	-	-
6	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	-	-	-	-	-	-	-
7	Yayasan Pengembangan BUMN	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		92.927.006	-	92.927.006	86.831.178	3.987.736	90.818.914	2.108.092

**IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN YAYASAN
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2012**

(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA YAYASAN	Kementerian/Lembaga	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	Investasi	TOTAL Aset	Kewajiban Jk Pendek	Kewajiban Jk Panjang	TOTAL Kewajiban	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban &	KET
1	2	2a	3	4	5	6	7=(3+4+5+6)	8	9	10=(8+9)	11	12=(10+11)	14
1	Yayasan Harapan Kita/ Badan Pengelola dan Pengembangan TMII	Sekretariat Negara	30.917.056	88.358.710	893.525		120.169.291	5.456.199	3.801.942	9.258.141	110.911.150	120.169.291	TA. 2012
2	Yayasan Gedung Veteran RI "Graha Purna Yudha"	Sekretariat Negara	11.357.924	126.197			11.484.121	3.315	-	3.315	11.480.806	11.484.121	TA. 2012
3	Yayasan Bhumi Bhakti Adiguna	BPN	-	-			-			-	-	-	Likuidasi
4	Yayasan Gedung Arsip Nasional RI	Arsip Nasional RI									-		
5	Yayasan Yustisia Dharmayukti Karini	MA									-		
6	Yayasan Purna Bhakti (YARNATI)	Kementerian dalam Negeri					-			-	-	-	
7	Yayasan Pengembangan BUMN	Kementerian BUMN	-	-			-				-	-	
TOTAL			42.274.980	88.484.907	893.525	-	131.653.412	5.459.514	3.801.942	9.261.456	122.391.956	131.653.412	

**REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
PER 31 DESEMBER 2012**

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
1	I BANDA ACEH	15.134.350.000	
	1 Jl. Persada (Jl. Perdagangan) Kel. Keude Siblah Kec, Blang Pidie, Kab. Aceh Selatan	524.100.000	2008
	2 Jl. Merdeka Kel. Kampung Belakang Meulaboh Kec. Johan Pahlawan Kab. Aceh Barat	1.578.950.000	2008
	3 Jl. Merdeka Blangbengel Kel Blang Paseh Kec. Kota Sigli Kab, Pidie	619.400.000	2008
	4 SD/SMP Muhammadiyah Pantan Labu, Jl. Mesjid Kel. Keude, Pantan Labu Kec. Tanah Jambo Aye Kab. Aceh Utara	1.169.000.000	2009
	5 SKKP Negeri Samalanga, Desa Keude Kec. Samalanga	256.800.000	2009
	6 STM dan SMP Kosgoro, Jl. Perdagangan Lhokseumawe Kel. Peusong Baru Kec. Banda Sakti Lhokseumawe	6.264.200.000	2009
	7 Eks SDN No. 4,5,6, Kantor/Rumah Tinggal, Lap Basket, Jl Jend A. Yani Kuala Simpang	2.810.800.000	2009
	8 SMEAN KANDEPDIKBUDCAM, PEMDA, Tempat Tinggal, Jl MT Zen Langsa Pekan Langsa	1.911.100.000	2009
2	II MEDAN	84.875.778.916	
	1 Jl. Besar, Simpang Dolok Kel. Simpang Dolok Kec. Simpang Dolok Kab. Batubara	202.840.000	2008
	2 Jl. Ahmad Yani (dahulu Jl. Merdeka) Kel. Pangkalan Dodek Kec. Medang Deras Kab. Batubara	242.500.000	2008
	3 Jl. Cokroaminoto No. 73 Kel Kisaran Kec. Kota Kisaran Barat Kab Asahan	648.700.000	2008
	4 Jl. Rivai No. 48 Kisaran, sekarang menjadi Jl. Rivai No.39 Kisaran	4.272.050.000	2008
	5 Jl. Rivai No. 67 dahulu 60 kel.. Kisaran Kota, Kec. Kota Kisaran Barat, Kab. Asahan	779.690.000	2008
	6 Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	6.752.200.000	2008
	7 Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.541.301.000	2008
	8 Jl. Sudirman (Jl. Besar Indrapura) dahulu Jl. Merdeka Kel. Indrapura Kota Kec. Air Putih, Kab. Batubara	232.100.000	2008
	9 Jl. Merdeka, Tanjung Tiram	1.827.820.000	2008
	10 Kel. Tanjung Leidong Kec Kualuh Hilir	184.370.000	2008
	11 Jl. Besar Simandulang, Desa Simandulang, Kec. Kualuh Leidong, dahulu Kec. Kualuh Hilir Kab. Labuhan Batu	150.100.000	2008
	12 Jl. Jenderal Sudirman dahulu Jl. Besar Kota Pinang No.33 Kel. Kota Pinang Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu	234.800.000	2008
	13 Jl. Raya Binjai Serbangan Kel. Binjai Serbangan Kec. Air Joman, Kab. Asahan	695.800.000	2008
	14 Jl. Pulau Rakyat Gunting Saga Kel. Bandar Pulau Pekan, Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan	110.300.000	2008
	15 Jl. Besar Gunug Melayu-Bandar Pulau, Kel. Bandar Pulau Pekan Kec. Bandar Pulau, Kab. Asahan	38.700.000	2008
	16 Jl. Asahan No. 23 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	398.600.000	2008
	17 Jl. Imam Bonjol No. 70 Tanjung Balai, Kel. Karya, Kec. Tg. Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	628.100.000	2008
	18 Jl. Veteran No. 82 Kel. Indra Sakti Kec. Tanjung Balai Selatan, Kota Tanjung Balai	297.300.000	2008
	19 Jl. Mesjid No. 28 Kel. Tg. Balai Kota II Kec Tg. Balai Selatan Kota Tg. Balai	346.430.000	2008
	20 Jl. Sukaramai No. 30 Dusun I desa Bagan Asahan Pekan Kec. Tg. Balai Kab. Asahan	397.125.000	2008

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
21	Jl. Sukaramai Desa Bagan Asahan Kec. Tg. Balai Kab. Asahan	484.310.000	2008
22	Jl. Pajak Pagi/Balai Desa, Desa Pulau Rakyat Pekan Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan	143.300.000	2008
23	Jl. Prof. HM Yamin/M. Said, Kel. Sigambal, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu	623.540.000	2008
24	Jl. Jenderalm Ahmad Yani Kel. Kota Pinang, Kec. Kota Pinang Kab. Labuhan Batu	699.160.000	2008
25	Jl. Kampung Loteng (dahulu Gang Kampung Lorong Tengah) Kel. Langga Payung, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhan Batu	458.836.000	2008
26	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu	1.079.046.000	2008
27	Jl. Jend Ahmad Yani Kel. Sungai Berambang, Kec. Panei Hilir, Kab. Labuhan Batu	1.159.070.000	2008
28	Jl. Mesjid Kel. Tanung Leidong Kec. Kualuh Leidong, Kab. Labuhan Batu	967.400.000	2008
29	SMA Kuala ex SMA Swasta Gotong Royong, Jl. Antara No. 18 Kel. Pekan Keuala Kec. Kuala Kab. Langkat	147.323.000	2009
30	Pertokoan/Ruko, Jl. Mesjid Pangkalan Brandan Kec. Babalan Kab. Langkat	675.607.000	2009
31	SMA Persiapan STABAT, Jl. Perniagaan Stabat Kec. Stabat Kab. Langkat	1.463.910.800	2009
32	SMP PGRI Pulau Kampai, Jl. Pelabuhan Desa Pulau Kampai Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat	6.500.000	2009
33	Pertokoan/Ruko, Jl. KH Zainal Arifin Kab. Langkat	645.700.000	2009
34	SD Filial Gajah Mada, Jl. Anggur Bandar Sinembah Kec. Binjai Barat Kab. Binjai	285.206.430	2009
35	Pertokoan, Jl. MH Thamrin d/h Jl. Binjai Kel. Binjai Kota Kec. Pekan Binjai Kab. Binjai	3.440.907.300	2009
36	Pertokoan, Jl. Belitung Kel. Binjai Kota Kec. Pekan Binjai Kab. Binjai	1.101.073.500	2009
37	Perguruan Setia Budi Abadi, Jl. Serdang No. 157 Simpang Tiga Pekan Kec. Perbaungan Kab. Serdang Bedagai	1.720.000.000	2009
38	Balai Pertemuan Desa, Jl. Besar Rantau Panjang Kec. Pantai labu Kab. Deli Serdang	27.700.000	2009
39	SMA Negeri I Lubuk Pakam, Jl. Dr. Wahidin No. 1 Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang	4.890.140.000	2009
40	SMP Negeri I Sei Rampah, Jl. Sudirman Kec. Sei Rampah Kab. Serdang Bedagai	2.023.266.000	2009
41	SD Negeri 102037, Dusun XII Kebun Sayur Desa Sei Bamban Kec. Sei Bamban	49.000.000	2009
42	SMP Perbaungan (SMA 2 Perbaungan), Jl. Cempaka No. 25 Kel. Simpang III Kec. Perbaungan Kab. Deli Serdang	1.192.005.900	2009
43	Perg.Nas. Budi Basa I (Yay. Tuanku Tambusai), Jl. Dusun 7 Kec. Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	38.684.000	2009
44	Perg.Nas. Budi Basa II (Gdg. P'temuan Sos. Sehati), Jl. Dusun 3 Kota Pari Pantai Cermin Kab. Serdang Bedagai	151.706.000	2009
45	SD Harapan, Jl. Dusun IV Desa Sarang Burung Kec. Pantai Labu Kab. Serdang Bedagai	60.413.000	2009
46	Rumah Kosong, Jl. Jend. Sudirman Pekan Dolok Masihol Kab. Serdang Bedagai	36.495.000	2009
47	SD Negeri (Tanah Kosong), Jl. Perintis Kemerdekaan Desa Pantai Labu Pekan Kab. Deli Serdang	309.279.000	2009
48	Yayasan Perguruan Widyasana Utama dan Yayasan Perguruan Swadaya, Jl. Jose Rizal No. 3A Medan	1.952.770.000	2009
49	Gedung SD dan STM, Jl. Cut Nyak Din No. 1 Lingkungan VII Kel. Beras Basah Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat	199.889.300	2009
50	SMA Negeri I Tanjung Pura, Jl. Jenderal Sudirman No. 52 Kel. Pekan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat	1.637.121.296	2009
51	Kantor Veteran RI, Jl. Dr Wahidin No. 124 Kel. Dwikora Kec. Siantar Barat Kota Pematang Siantar	1.106.700.000	2009
52	Kantor Dinas Pendidikan dan Pengajaran, Jl. Merdeka No. 230 Dwikora Kec. Siantar Barat Kab. Pematang Siantar	5.454.400.000	2009
53	SD/SMP Yayasan Taman Asuhan, Jl. Kapt MH Sitorus Kel. Teladan Kec. Siantar Barat Kab. Pematang Siantar	15.226.300.000	2009
54	SMPN 3, STM YPD, Jl. MH Thamrin No. 50-52 Tebing Tinggi	9.443.100.000	2009

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
55	Kantor Depdikbud, Jl. Veteran No. 38 Tebing Tinggi	1.947.000.000	2009
56	Kantor Primkopad 0204, Jl. Dr Sutomo Tebing Tinggi	830.100.000	2009
57	Sebidang Tanah, Jl. Balai Kota d/h Jl Gereja No. 14 atau Jl Mesjid S. Parman Kec. Tebing Tinggi Kota	764.256.000	2009
58	Rumah Tinggal/Gereja GP, Jl. Pekan Pematang Bandar/Jl. Gereja Kec. Pematang Bandar Kab. Simalungun	142.100.000	2009
59	TK Aisyiyah, Dusun Tiga Nagori Marihat Bandar Kec. Bandar Kab. Simalungun	156.622.000	2009
60	Bangunan Pos Polisi Huta Sei Langgai Bandar Maasilam Kec. Bandar Kab. Simalungun	124.700.000	2009
61	Klenteng, Desa Bandar Tinggi Kec. Bandar Maasilam Kab. Simalungun	32.695.390	2009
62	Bangunan Rumah Toko sbg sarang walet, Jl Diponegoro Perdagangan Kab. Simalungun	412.000.000	2009
63	Tanah dan Bangunan SDN No. 7, Jl. Kampung Melayu Kel. Tanah Jawa Kab. Simalungun	815.700.000	2009
64	SD Al Wasliyah dan SMA Teladan, Jl. Asahan Km. 17 Desa Bangun Kec. Gunung Malela Kab. Simalungun	505.620.000	2009
65	Kedai Kopi, Desa Ujung Padang Kec. Bosar Maligas Kab. Simalungun	264.300.000	2009
3	III PEKANBARU	176.885.951.000	
1	Jl. Ahmad Karim No. 12 Kel. Benteng Pasar Atas Kec. Guguk Panjang Bukit Tinggi	3.935.000.000	2008
2	Jl. Raya Soekarno Hatta No. 35 Kel. Parit Rantang Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh	1.100.000.000	2008
3	Jl. Lundang Kel. Parit Ranting, Kec. Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh	780.000.000	2008
4	Jl. Niaga No. 156 Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	432.530.000	2008
5	Jl. HOS Cokroaminoto No. 12 Kel. Ranah Kongsu Kec. Padang Barat, Padang	432.530.000	2008
6	Jl. Plaua Karam No. 82 Kel. Kp. Pondok Kec. Padang Barat, Padang	6.576.750.000	2008
7	Jl. AR Hakim No. 4 Kel. Belakang Pondok Kec. Padang Selatan, Padang (Jl. Kampung Nias)	2.559.130.000	2008
8	Jl. Sudirman No. 50 Padang Kel. Jatibaru Padang	133.590.000.000	2008
9	Jl. Nipah No. 33 Kel. Berop Nipah Kec. Padang Barat, Padang	10.984.950.000	2008
10	Jl. Klenteng No. 319 Padang Kel. Berok Kec. Padang Timur Padang	242.425.000	2008
11	Jl. Kampung Nias V Kel. Belakang Pondok, Kec. Padang Selatan, Padang	1.791.505.000	2008
12	Jl. Besar Sanglang Kel. Urung Barat Kec. Kundur Utara, Tanjung Batu Kab. Karimun	118.394.000	2008
13	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	683.909.000	2008
14	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun No. 51) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	347.769.000	2008
15	Jl. Klenteng (Sekarang Jl. Usman Harun) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu Kab. Karimun	2.797.248.000	2008
16	Jl. Raya Sungai Ungar Desa Sungai Ungar Kec. Undur Kab. Karimun	163.231.000	2008
17	Jl. Besar Urung Kota Kel. Urung Kec. Kundur Utara, Kab. Karimun	377.534.000	2008
18	Jl. Besar Tanjung Pinang (Sekarang Jl. Jend. Sudirman) Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur Tanjung Batu, Kab. Karimun	2.344.828.000	2008
19	Jl. Nusantara No. 05 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	891.987.000	2008
20	Jl. Trikora No. 43 Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	204.783.000	2008
21	Jl. Trikora Kel. Tanjung Balai Kec. Karimun Kab. Karimun	3.371.495.000	2008

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
22	Jl. A. Yani Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimun	340.741.000	2008
23	Jl. Pegadaian No. 45 Kel. Tanjung Balai Kec Karimun, Kab. Karimun	602.030.000	2008
24	Jl. Gang SD Cahay Meral Kel. Meral Kota Kec. Meral Kab. karimun	826.490.000	2008
25	Jl. Besar Sawang, Kel. Sawang Kota Kec. Kundur Barat, Kab. Karimun	150.351.000	2008
26	Jl. RA Kartini Kel. Pasar Taluk, Kec. Kuantan Tengan, Kab. Kuantan Singingi	770.500.000	2008
27	Jl. Pasar (Jl. Katib Sutan) Kel. Pasar Cerenti Kec. Cerenti Kab. Kuantan Singingi	80.080.000	2008
28	Jl. Sudirman No. 109 Baserah, Kel. Pasar Usang Kec. Kauntan Singingi (Jl. Raya Teluk Kuantan)	389.761.000	2008
4	IV PALEMBANG	383.870.355.814	
1	Jl. Kapten Zen Ali Kel Pasar Lama Kec. Lahat Kab. Lahat	2.261.648.000	2008
2	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	5.226.531.800	2008
3	Jl. Pembangunan Kel. Pasar Bhayangkara Kec. Talang Ubi Kab. Muara Enim	12.540.000	2008
4	Jl. Letnan M. Akip Kel Pasar II Kec. Muara enim, Kab. Muara Enim	820.000.000	2008
5	Jl. Cut Nyak Dien (dh Jl. Tanjung Priuk) Kel. Tungkai Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim	417.500.000	2008
6	Jl. Garuda Hitam (dh Jl. Dharmapala) Kel. Pasar Pemiri Kec. Lubuk Linggau Barat II Kota Lubuk Linggau	5.381.539.500	2008
7	Kel. 15 Ulu Kec. Seb. Ulu I-Palembang	139.270.000	2007
8	Jl. Remiva Rt. 11, Komplek NV Remiva, Kel. Organ Baru Kec. Seb. Ulu I, Palembang (Bekas TK Melati)	44.977.200	2007
9	Jl. Letkol. Iskandar No. 708 Kel. 15 liir Timur I, Palembang	38.632.498.000	2007
10	Jl. Veteran No. 7085 Kel. 20 liir I, Kec. liir Timur I, Palembang	1.466.055.000	2007
11	Jl. Jend. Sudirman No. 31/2 Kel. 20 liir, Kec. liir Timur I, Palembang	129.965.635.000	2007
12	Jl. Padang Selasa Kel. Bukit Lama, Kec. liir Barat I Palembang	3.982.200.000	2007
13	Jl. Jen. Sudirman KM 3,5 No. 74 Palembang	39.753.525.000	2007
14	Jl. Letkol. Iskandar No. 452 Kel. 15 liir Timur I, Palembang	3.820.300.000	2007
15	Jl. Rawakasih Kel. Duku liir Timur II Palembang	4.551.900.000	2007
16	Jl. DI Panjaitan Kel. Plaju Hulu, Kec. Seb. Ulu II, Palembang	1.123.706.578	2007
17	Jl. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	2.397.600.000	2007
18	Kel. Semabung Baru II Pangkal Pinang	376.483.000	2007
19	Jl. Mayor H. Muhidin Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Pangkal Pinang	2.253.372.173	2007
20	Jl. Mesjid Jamik Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	1.891.968.000	2007
21	Jl. Mesjid Jamik No. 26 Kel. Mesjid Jamik, Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	2.141.958.000	2007
22	Jl. Mayor H. Muhidin Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	14.431.964.463	2007
23	Jl. Bukit Intan No. 121, Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	32.954.760.000	2007
24	Jl. Jend. A. Yani Kel. Kacang Pedang Pangkal Pinang	3.166.140.000	2007
25	Jl. Mayor Syafri Rachman Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan, Pangkal	37.879.25.400,00	2007

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
	26 Jl.Yos Sudarso No. 90, Pangkal Pinang	2.399.778.700	2007
	27 Jl. Gudang Padi No. 16, Kel. Gudang Padi, Pangkal Pinang	8.227.460.000	2007
	28 Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih, Pangkal Pinang	34.130.620.000	2007
	29 Jl. Moh Yamin, Jambi	2.198.500.000	2007
	30 Jl. Panglima Polim Jambi Kel. Kasang Jaya	1.820.000.000	2007
	31 aset yang dinilai sebelum tahun 2007	37.879.925.400	sebelum tahun 2007
5	V BANDAR LAMPUNG	1.615.040.000	
	1 Jl. WR Supratman No. 69 Teluk Betung Bandar Lampung	1.615.040.000	2008
6	VI SERANG	28.533.055.000	
	1 Jl. Juhdi No. Kel. Cimunjang, Kec. Serang, Kota Serang, Propinsi	9.490.600.000	2007
	2 Jl. Ki Samaun, Gang Babakan Ledeng No. 06 RT 01 RW 07, Kel. Sukasari,	4.274.000.000	2007
	3 Tangerang Kota, Kota Tangerang, Propinsi Banten		2007
	4 Jl. Ki. Semaun No. 171 Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	9.099.536.000	2007
	5 Jl. Syekh Yusuf RT 005 RW 06 No. 20, Kel. Sujasari, Kec. Tangerang Kota,	2.714.000.000	2007
	Kota Tangerang		2007
	6 Jl. A. Dimiyati No. 52/KH. Sholeh Ali Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	948.000.000	2007
	7 Jl. Raya Curug RT 001/007 Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Banten,	1.171.919.000	2007
	8 Tangerang, Banten	835.000.000	2007
	9 Jl. Raya Kedaung Barat RT 002/01 Desa Kedaung Barat Kec. Sepatan Timur, Tangerang		2007
	Banten		
7	VII JAKARTA	Belum Dinilai	
8	VIII BANDUNG	3.926.481.000	2008
	1 Jl. A. Yani No. 7 Kel. Nagri Tengah Kec. Purwakarta Kab. Purwakarta	3.926.481.000	
9	IX SEMARANG	50.782.163.775	
	1 Jl. Raya Wonogiri Kel. Giritirto Kec. Wonogiri Kota sekarang Jl. Sudirman No. 147A Kel. Giritirto Kec Wonogiri Kab. Wonogiri	1.276.920.000	2008
	2 Jl. Bioskop Sena Kel Kaliurang Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.115.205.000	2008
	3 Jl. Cendrawasih No. 37 Ds. Tanjung Kec. Tanjung Kab. Brebes	712.800.000	2008
	4 Jl. Brebes Ds. Klampok Kec. Wanasari	5.263.440.000	2008
	5 Desa. Dukuh Turi Kec. Bumiayu Kab. Brebes	1.956.475.000	2008
	6 Ds. Paguyangan Kec. Paguyangan	33.325.000	2008

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
7	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Linggapura Kec. Tonjong Kab. Brebes	157.500.000	2008
8	Jl. Tegal Purwokerto Ds. Tonjong Kec. Tonjong Kab. Brebes	209.712.000	2008
9	Jl. Koonel Sugiri No. 10 Krenj Banyumas	1.829.578.700	2008
10	Jl. MT Haryono Purworejo	1.678.315.800	2008
11	Jl. A. Yani No. 33 Kebumen Kab. Kebumen	1.144.720.300	2008
12	Pusat Keterampilan Pemuda, Jl. Beskalan No. 13, 15, 17 Yogyakarta	6.161.523.000	2009
13	SMEA Negeri II, Jl. Kemitiran Kidul No. 47 A Yogyakarta	12.946.820.000	2009
14	TK, SD, SMP Bhineka Tunggal Ika, Jl. Poncowinatan No. 16 Yogyakarta	2.328.700.000	2009
15	DPD Pepabri, Jl Dagen No. 44 Yogyakarta	1.281.422.000	2009
16	Sukowati No. 378 Sragen	3.969.600.000	2007
17	Jl. Gondang Winong, Gondang Sragen	396.340.000	2007
18	Jl. Diponegoro No. 23 Kel. Tasik Aging, Kec. Kota, Kab. Rembang	1.570.200.000	2007
19	Jl. Petungi No. 23 Adiwerna, Tegal 52194	2.087.900.000	2007
20	Jl. Dr. Wahidin No. 2, Kel. Temanggung II, Kec/Kab. Temanggung	2.375.200.000	2007
21	Jl. Stasiun No. 5, Kutowinangun, Kabumen	921.466.975	2007
22	Jl. Jeruk No. 18 Kota Pekalongan	1.365.000.000	2007
10 X	SURABAYA	461.020.708.298	
1	Jl. Kampung Baru, Kel. Gitik, Kec. Rogojampi, Kab. Banyuwangi(sekarang menjadi Jl. Ki Hajar Dewantoro)	5.086.848.000	2008
2	Jl. Genteng Ds. Gendoh Kec. Singojuruh (Skrng Menjadi Jl. Raya No. 155 Ds. Gendoh Kec. Sempu) Kab. Banyuwangi	2.568.685.000	2008
3	Jl. Karyawan No. 4 Mojokerto	3.017.509.000	2008
4	Jl. PB Sudirman No. 40 Mojokerto	1.805.153.000	2008
5	Jl. Kabupaten No. 3 Kel. Mangkujayan, Kec/Kab. Ponorogo	5.471.400.000	2008
6	Jl. Jenderal Sudirman No. 102 dan 105 Kel. Pakunden, Kec/Kab Ponorogo	17.169.205.886	2008
7	Jl. Aris Munandar No. 2-4 Kel. Kidul Dalam Kec. Klojen Kotamadya Malang	8.601.830.000	2008
8	Jl. Madukoro No. 14 Kel. Lawang Kec. Lawang Kab. Lawang	2.939.000.000	2008
9	Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Lamongan (Dahulu Jl. Ki Sarmidi Mangunsarkoro 16 Kel. Tetis, Kec/Kab. Lamongan	3.187.529.000	2008
10	Jl. Pramuka No. 3 Sendangharjo, Kec/Kab. Tuban	6.436.995.000	2008
11	Jl. Stasiun Sepanjang, Wonocolo, Taman, Sidoarjo	4.857.359.000	2008
12	Jl. Wonocolo, Sepanjang, Sidoarjo	2.121.384.000	2008
13	Jl. KH. Marzuki No. 27 Desa Mindi Kec. Porong Kab. Sidoarjo	5.178.803.000	2008
14	Jl. Hasanuddin No. 12 Kel. Karanganyar, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan	13.399.258.000	2008
15	Jl. Pacet mojosari, Desa Seduri, Mojoasri, Kab. Mojokerto	2.958.371.000	2008
16	Jl. Tanimbar No. 24 Malang	42.402.000.000	2008

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
17	Jl. Mujair No. 10 Desa Tawang Kec. Wates Kab. Kediri	2.678.000.000	2008
18	Jl. Yulius Usman No. 58 Malang	19.585.000.000	2008
19	Jl. Kartini No. 5 Kediri	10.321.034.000	2008
20	Jl. Wahidin No. 8 Kediri	2.900.491.527	2008
21	Jl. Erlangga No. 22/26 Kediri	6.511.962.000	2008
22	Jl. Basuki Rachmad No. 96 Tulung Agung	7.481.022.000	2008
23	Jl. Arjuno Malang	16.201.000.000	2008
24	Jl. Lawu No.12 Malang	13.511.000.000	2008
25	Jl. Brawijaya No. 20 Kel. Pocanan, Kec. Kota Kediri, Kediri	18.825.251.000	2008
26	Jl. Monginsidi No. 24 Kel. Setonogedong Kec. Kota Kediri Kodya Kediri	2.117.520.000	2008
27	Jl. Prof. Buya Hamka No. 1A Desa Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang	1.241.971.000	2008
28	Jl. Basuki Rachmat No. 6 Kel. Baliwerti Kota Kediri	9.630.340.000	2008
29	Tanah dan Bangunan Rumah Sakit TK.IV,05,07,02 Kediri	83.555.571.000	2008
30	Tanah dan Bangunan Tempat Perbekalan V-44-02-A Kediri	24.887.683.000	2008
31	Jl. Ki Hajar Dewantoro 18 Ds. Kalibaru Kec. Kalibaru Banyuwangi (Dh Jl. Saleh No,1 Kab. Banyuwangi)	751.313.000	2008
32	Jl. Pattimura Desa. Sepanjang Kec. Glenmore Banyuwangi	486.089.000	2008
33	Jl. Gajahmada Desa. Genteng Kulon, Kec. Genteng Banyuwangi	4.088.161.000	2008
34	Jl. Suprpto Kec. Pesanggrahan Kab. Banyuwangi	570.562.000	2008
35	Desa Kebondalem, Kec. Bangotejo Banyuwangi	873.530.000	2008
36	Jl. A. Yani Ds./Kec. Purwoharjo Kab. Banyuwangi	904.142.000	2008
37	Jl. Muncar, Ds. Kebamen Kec. Srono Banyuwangi	1.112.389.000	2008
38	Jl. Ikan Cakalang Kec. Kapatihan Kab. Banyuwangi	995.491.000	2008
39	Jl. Kalipahit Desa/Kec. Tegaldimo Kab. Banyuwangi	690.140.000	2008
40	Jl. Wijaya Kusuma No.2 Sampang	5.489.396.538	2008
41	Jl. PB Sudirman No. 19 Sampang	562.126.173	2008
42	Jl. Veteran No. 385 Sumenep	843.546.144	2008
43	Jl. Letjen Sunarto No. 15 Bangkalan	2.231.248.871	2008
44	Jl. Niaga No. 21 Pamekasan (dh No 19)	3.007.393.125	2008
45	Jl. Bunguran No. 31-33 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya	15.298.000.000	2007
46	Jl. Bunguran No. 63 Kel. Bongkaran, kec. Pabean Cantikan, Surabaya	17.853.750.000	2007
47	Jl. Pekulan, Sekarang Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42 Kel. Ujung, Kec.	10.519.110.000	2007
48	Jl. Gentengkali 43-45 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.215.625.000	2007
49	Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	3.292.800.000	2007
50	Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kac. Wonokromo, Surabaya	4.599.479.000	2007

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
	51 Jl. Gentengkali 10 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.442.960.000	2007
	52 Jl. Gembong Cantikan No. 48-50 Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya	11.313.400.000	2007
	53 Jl. Waspada No. 94-96 Kel. Bongkaran, Kec., Pabeanan Cantikan	10.553.692.500	2007
	54 Jl. Sidodadi No. 27 Kel. Sawahan, Surabaya	2.434.000.000	2007
	55 Jl. Argopuro No. 27 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya	806.949.000	2007
	56 Jl. Wahid Hasim (d/h Jl. Let. Jend. Panjaitan No. 4) Jember Kidul, Kali	1.511.677.939	2007
	57 Jl. Raya A. Yani 89, Bangsalsari, Jember	924.561.595.00	2007
	58 Aset yang dinilai sebelum tahun 2007	924.561.595	sebelum tahun 2007
11	XI PONTIANAK	8.086.895.780	2009
	1 SDN 2,4, Jl. Kopol Mahmud, Kel. Pasiran, Kec. Pasiran (sekarang Singkawang Barat)	5.173.568.000	2009
	2 SDN VII dan lapangan basket Jl. Gereja, Kel. Pemangkat kota, Kec. Pemangkat	293.760.000	2009
	3 SDN 2 Jl. Raya Sambas-Pemangkat Desa Makrampai B, Kec. Tebas	72.549.000	2009
	4 SDN No.2 Desa Parit Baru, Kec. Selakau	146.232.000	2009
	5 SDN No.4 Jl. Raya Sei Duri , Desa Sei Duri I, Kec. Sei Kunyit	10.280.000	2009
	6 SDN No.2 dan SDN No.3 (inpres) Jl. Raya Sei Kunyit, Desa Sei Kunyit Laut, Kec. Sei Kunyit	28.290.000	2009
	7 SD Inpres No.6 Nusapati Jl. Saliong dalam, Desa Seliung/Nusapati, Kec. Sei Pinyuh	1.446.900	2009
	8 SDN No.6 Pak Bulu Jl. Raya Mandor Desa Kepayang, Kec. Sei Pinyuh	29.113.000	2009
	9 SDN No. 2 Anjungan Jl. Raya Toho, Desa Anjungan Dalam, Kec. Sei Pinyuh	58.320.000	2009
	10 SDN Terap Jl. Raya Toho- Karang, Desa Terap , Kec. Toho	12.183.500	2009
	11 SDN Sei Purun Besar jl. Swadaya Sei Purun Besar Desa Sei Purun Besar, Kec. Siantan	4.836.500	2009
	12 SD Santo Yosef (YP3 GK) Kampung Sinam, Kec. Pemangkat	71.928.000	2009
	13 Tanah/Bangunan Kosong Desa yohandung, Kec. Salamantan	12.500.000	2009
	14 Tempat Tinggal Kepala Sekolah dan Guru SD, Jl. Raya Pontianak-Singkawang, Desa Sei Purun Kecil, Kec. Sei Puyuh	2.209.350	2009
	15 Rumah Tinggal Guru SDN I dan Penyuluh Pertanian Jl. Raya Sei Bakau Kecil Desa Sei Bakau Kecil, Kec. Mempawah Hilir	10.674.950	2009
	16 Madrasah Islamiyah Jl. Raya Panibungan Desa. Manibungan Kec. Mempawah Hilir	62.600.000	2009
	17 Gedung Generasi Muda Jl. Raya Sei Pinyuh Kel. Sei pinyuh, Kec. Sei Pinyuh	79.980.000	2009
	18 SMPN 8 Jl. Dr. Setia Budi Desa Benua Melayu Darat Kec. Pontianak Selatan	312.460.000	2009
	19 Bekas KUD Nanga pinoh Jl. Merak, Kompleks Pasar Nanga Pinoh Kab. Melawi	32.400.000	2009
	20 Perumahan PPL Desa Mensere Kec. Tebas	34.480.000	2009
	21 Asrama Guru/Karyawan Pemda Jl. Merdeka Ketapang, Desa Kampung-Kantor, Kec. Matan Hilir Utara	1.618.896.000	2009
	22 Perumahan Guru SD Jl. Raya Pontianak-Singkawang Desa Sei Bakau Kecil Laut Kec. Sei Pinyuh	668.580	2009
	23 Bekas Kantor depdikbudcam nanga pinoh Jl. Melati Kompleks Pasar Nanga pinoh Kab. Melawi	17.520.000	2009

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
12	XII BANJARMASIN	151.777.333.000	
	1 Jl. H.M. Nurung Kel. Kota Pagatan Kec. Kusan Hilir, Kab. Tanah Bumbu	1.546.416.000	2008
	2 Jl. Lambung Mangkurat No. 10 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	15.032.368.000	2008
	3 Jl. Jend. Sudirman No. 18 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	3.196.085.000	2008
	4 Jl. DI Panjaitan No. 6 Kel. Antasan Besar Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	4.736.905.000	2008
	5 Jl. Lambung Mangkurat No. 9 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin	22.557.091.000	2008
	6 Jl. Surya Gandamana Desa Sebatung, Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru	-	
	7 Jl. P. Samudera No. 95 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	16.770.000.000	2007
	8 Jl. P. Samudera No. 97-99 Kel. Kertak Baru Uli, Kec Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	9.277.500.000	2007
	9 Jl. P. Samudera Kel. Kertak Baru Ulu, Kec.Banjarmasin Tengah, Kota	3.600.000.000	2007
	10 Jl. Brigjen Katamdo Kel. Kertak Baru Ilir, Kec. Banjarmasin Tengah,m Kota	6.305.250.000	2007
	11 Jl. Jend. A. Yani Km 2,5 No. 180 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	12.312.465.000	2007
	12 Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 22 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	14.438.580.000	2007
	13 Jl. Veteran Kel. Kampung Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kot Banjarmasin	38.879.950.000	2007
	14 Jl. K.S Tubun No. 122 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin, Kota Banjarmasin	3.124.723.000	2007
13	XIII SAMARINDA	74.200.602.000	2008
	1. Jl. Mulawarman (P. Hidayattullah) Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.718.363.000	2008
	2. Jl. Nakhoda No.30-32 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.601.252.000	2008
	3. Jl. P. Hidayattullah 64 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.846.480.000	2008
	4. JL. Pangeran Diponegoro 9 Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.355.675.000	2008
	5. Jl. Yos Sudarso Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	20.679.099.000	2008
	6. Jl. Mulawarman Kel. Pelabuhan Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	3.906.875.000	2008
	7. Jl. KH Moh Khalid No. 19 Kel. Pasar Pagi Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	2.250.388.000	2008
	8. Jl. Mulawarman Kel. Karang Mumus Kec. Samarinda Ilir, Kota Samarinda	9.428.370.000	2008
	9. Jl. Bukit Niaga No. 43 Kel. Kelandaran Ilir, Kec. Balikpapan Timur Kota Balikpapan	17.724.000.000	2008
	10. Jl. Sunoi, Rt Kel. Kampung Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	2.791.200.000	2008
	11. Jl. Letjen Suprpto No. 1 Kel. Baru Ilir Kec. Balikpapan Barat Kota Balikpapan	5.898.900.000	2008
14	XIV DENPASAR	Belum Dinilai	
15	XV MAKASSAR	5.454.511.000	
	1 Jl. Sangir Lr. 223 No. 9 (153) Kel. Melayu Kec Wajo, Makassar	151.672.000	2007
	2 Jl. G. Latimojo No. 54 A (No. 124A) Kel. Lariangbangi, Makassar.	755.860.000	2007

No	KANWIL DJKN	NILAI	Tahun Penilaian
	3 Jl. Ranggong Daeng Romo No. No. 7 Kel. Molaku Kec. Ujung Pandang,	499.494.000	2007
	4 Jl. Lembeh No. 63 Kel. Melayu Kec. Wajo, Makassar.	728.068.000	2007
	5 Jl. Jend. Sudirman No. 52 Kel. Parang Kec. Mamajang (No.42), Makassar	2.186.911.000	2007
	6 Jl. Serui No. 18 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makassar.	456.758.000	2007
	7 Jl. Sumba No. 44 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Makassar	675.748.000	2007
16	XVI MANADO	3.053.000.000	
	1. Jl. Sultan Hasanuddin No. 22 Kel. Biawao Kec. Kota Selatan, Kota Gorontalo	3.053.000.000	2008
17	XVII JAYAPURA	720.789.000	
	1 Jl. Macan Tutul No. 137 RT.03/RW.01 Doom	720.789.000	2007
	TOTAL	1.449.937.014.583	

**JUMLAH BEKAS ASET MILIK ASING/CINA YANG TELAH DINILAI
POSISI PER 31 DESEMBER 2012**

NO	KANWIL DJKN	Data Awal		Gek Fisik		Penilaian		NILAI (Rupiah)
		(aset)	(%)	(aset)	(%)	(aset)	(%)	
1	I BANDA ACEH	16	100	16	100	8	50	15.184.350.000,00
2	II MEDAN	138	100	127	91	65	47	84.875.778.816,00
3	III PEKANBARU	76	100	76	100	28	37	178.885.951.000,00
4	IV PALEMBANG	84	100	43	51	30	36	383.870.355.814,00
5	V LAMPUNG	16	100	11	69	1	6	1.615.040.000,00
6	VI SERANG	8	100	8	88	7	78	28.583.055.000,00
7	VII JAKARTA	48	100	10	21	0	0	0,00
8	VIII BANDUNG	104	100	45	43	1	1	3.928.481.000,00
9	IX SEMARANG	58	100	54	93	22	38	50.782.163.775,00
10	X SURABAYA	170	100	144	85	57	34	461.020.708.298,00
11	XI PONTIANAK	158	100	39	25	28	14	8.086.895.780,00
12	XII BANJARMASIN	18	100	18	100	18	100	151.777.383.000,00
13	XIII SAMARINDA	17	100	18	76	11	65	74.200.602.000,00
14	XIV DENPASAR	23	100	20	87	0	0	0,00
15	XV MAHASSAR	40	100	21	53	7	18	5.454.511.000,00
16	XVI MANADO	22	100	4	18	1	5	3.058.000.000,00
17	XVII JAYAPURA	15	100	1	7	1	7	720.765.000,00
	JUMLAH	1009	100	645	64	275	27	1.448.937.014.583,00

Sejak semester II tahun 2009 tidak ada peningkatan jumlah ABMA/C yang telah dinilai, karena adanya hambatan dari pihak penghuni, serta prioritas pekerjaan saat ini adalah ditujukan untuk penyelesaian status hukum ABMA/C sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 188/PMK.06/2008. Hambatan dari pihak penghuni dalam pelaksanaan penilaian di lapangan menyebabkan Penilai DJKN tidak dapat melaksanakan survei fisik atas aset (penghuni/penguasa/pihak ketiga yang menempati tidak memperkenankan Penilai DJKN masuk ke objek yang akan dinilai). Dalam rangka penilaian aset, jika survei fisik aset tidak dapat dilakukan maka dengan sendirinya penilaian tidak dapat dilaksanakan

BPMIGAS
LAPORAN POSISI KEUANGAN
PER 13 NOVEMBER 2012 DAN 31 DESEMBER 2011
(Rupiah Penuh)

URAIAN	13 NOVEMBER 2012	31 DESEMBER 2011
ASET		
ASET LANCAR		
Kas	778.969.241	809.137.300
Bank	661.955.258.238	436.950.656.550
Biaya Dibayar Dimuka	11.953.823.315	0
Panjar Kerja Operasional	5.966.686.229	0
Piutang Lain-Lain	1.362.974.947	131.457.500
Piutang kepada Pemerintah atas Kewajiban Manfaat Kerja	609.742.320.153	0
Persediaan Perlengkapan Kantor	1.037.422.844	532.657.158
JUMLAH ASET LANCAR	1.292.797.454.967	438.423.908.508
ASET TIDAK LANCAR		
Aset Tetap	36.341.536.625	42.285.675.038
Aset Tidak Berwujud	37.933.558.887	29.632.457.633
Pekerjaan Dalam Pelaksanaan	0	10.285.293.588
Aset yang Dibatasi Penggunaannya	3.320.427.758.878	2.421.058.092.313
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	3.394.702.854.390	2.503.261.518.572
TOTAL AKTIVA	4.687.500.309.357	2.941.685.427.080
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN LANCAR		
Hutang Kepada Pemerintah	15.099.331.066	77.095.716.034
Hutang Kepada Pekerja	298.199.589	0
Hutang Kepada Pihak Ketiga	149.190.997.718	68.872.038.021
Hutang Pajak	1.178.327.016	18.274.624.055
Hutang Lancar Lainnya	41.758.200	266.698.449.935
JUMLAH KEWAJIBAN LANCAR	165.808.613.589	430.940.828.045
KEWAJIBAN TIDAK LANCAR		
Hutang pada Pemerintah	3.115.800.808.862	2.271.778.118.631
Hutang pada Pihak Ketiga	204.626.950.016	149.279.973.682
Kewajiban Diestimasi atas Imbalan Pasca Kerja	609.742.320.153	213.177.230.739
JUMLAH KEWAJIBAN TIDAK LANCAR	3.930.170.079.031	2.634.235.323.052
TOTAL KEWAJIBAN	4.095.978.692.620	3.065.176.151.097
EKUITAS		
Kekayaan Awal BPMIGAS	13.303.525.094	13.303.525.094
Surplus Defisit Kinerja Bersih	444.164.951.607	6.257.747.623
Ekuitas Lainnya	134.053.140.036	(143.051.996.733)
JUMLAH EKUITAS	591.521.616.737	(123.490.724.016)
TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS	4.687.500.309.357,00	2.941.685.427.081,00

BPMIGAS
LAPORAN KINERJA KEUANGAN
PERIODE 1 JANUARI 2012 S.D 13 NOVEMBER 2012
(Rupiah Penuh)

Uraian	1 Januari 2012 - 13 November 2012	1 Januari 2011 - 31 Desember 2011
PENDAPATAN	1.606.950.338.447,00	1.306.356.388.095,00
BEBAN		
Beban Pekerja	581.905.439.289,00	620.039.863.848,00
Beban Operasional	466.522.859.060,00	571.869.918.460,00
Beban Perjalanan Dinas	114.357.088.491,00	98.570.548.797,00
Penyesuaian Imbalan Kerja	0,00	9.618.309.367,00
JUMLAH BEBAN	1.162.785.386.840,00	1.300.098.640.472,00
SELISIH PENDAPATAN DAN BEBAN	444.164.951.607,00	6.257.747.623,00
BEBAN LAIN-LAIN	0,00	0,00
SURPLUS KINERJA	444.164.951.607,00	6.257.747.623,00

**MONITORING RENCANA TINDAK LANJUT PEMERINTAH TERHADAP TEMUAN PEMERIKSAAN BPK
ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP) TAHUN 2011**

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
I	TEMUAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN							
1	Pendapatan dan Hibah							
1.1	Inkonsistensi Penggunaan Tarif Pajak dalam Perhitungan PPh Migas dan Perhitungan Bagi Hasil Migas	<p>Setidaknya terdapat 30 KKKS yang tidak konsisten dalam menggunakan tarif Pajak Penghasilan (PPh), KKKS tersebut tidak menggunakan tarif PPh sesuai Pokok-pokok Kerja Sama yang disusun untuk menentukan bagi hasil migas tetapi menggunakan tarif PPh berdasarkan <i>tax treaty</i>. Dengan menggunakan tarif <i>tax treaty</i>, kontraktor memperoleh <i>share</i> lebih dari yang seharusnya dan Pemerintah memperoleh pendapatan yang lebih kecil. Selama tahun 2009 sampai dengan November 2011, Pemerintah kehilangan penerimaan negara sebesar USD259.62 juta (setara Rp2,35 triliun). Klausul kontrak tersebut belum memperhitungkan penerapan <i>tax treaty</i>.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>Pemerintah agar mengupayakan amandemen PSC dan/atau amandemen <i>tax treaty</i> terhadap KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> sehingga potensi berkurangnya pendapatan negara dari PPh Migas tidak terjadi.</p>			X	<p>1. Pemerintah akan meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS untuk melakukan amandemen kontrak bagi hasil migas dengan menambahkan klausul bahwa KKKS tidak boleh memanfaatkan <i>tax treaty</i> atau apabila memanfaatkan <i>tax treaty</i>, maka bagian pemerintah harus disesuaikan sehingga penerimaan pemerintah tetap.</p> <p>2. Pemerintah (dhi: Direktur Jenderal Pajak) telah menyampaikan surat kepada BPMIGAS agar dapat merenegosiasi kontrak kerja dengan KKKS daripada merenegosiasi <i>tax treaty</i> yang membutuhkan waktu yang lebih lama dan melibatkan banyak institusi.</p>	<p>1. Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS telah melakukan koordinasi, antara lain pelaksanaan rapat pada bulan Juni 2012 untuk membahas amandemen kontrak.</p> <p>2. Dirjen Pajak telah mengirimkan surat kepada BPMIGAS-nomor S-137/PJ/2012 tanggal 9 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP TA 2011, mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP namun merupakan kewenangan BPMIGAS. Surat tersebut berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. Sejalan dengan Pasal 33A ayat (4) UU PPh, KKKS wajib memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan yang disepakati sebagaimana dibunyikan dalam kontrak awal. Dengan demikian, dalam hal KKKS melakukan kewajiban perpajakan di luar yang telah disepakati sebelumnya seharusnya dibicarakan terlebih dahulu dengan Pemerintah Indonesia.</p> <p>b. Posisi pemerintah dalam kontrak bagi hasil adalah sebagai pemilik sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 dan juga sebagai regulator. Oleh karenanya,</p>	<p>Koordinasi telah dilakukan pada Juni 2012</p> <p>Surat telah disampaikan pada tanggal Juli 2012</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							<p>menurut hemat kami, akan lebih mudah dan lebih cepat untuk melakukan renegotiasi kontrak daripada renegotiasi <i>tax treaty</i>.</p> <p>c. Dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK tersebut di atas, terkait dengan penggunaan <i>tax treaty</i> dalam menghitung <i>Branch Profit Tax</i> yang dilakukan oleh KKKS lebih dimungkinkan dilakukan melalui amandemen kontrak bagi hasil antara pemerintah dan KKKS. DJP siap untuk membentuk tim bersama dalam rangka merumuskan kebijakan perpajakan di dalam KKKS.</p> <p>Surat tersebut telah ditanggapi oleh BPMIGAS melalui surat nomor 1389/BPC1000/2012/S4 tanggal 3 Agustus 2012 yang berisi hal-hal sebagai berikut:</p> <p>a. BPMIGAS telah melakukan pertemuan dengan KKKS yang menggunakan <i>tax treaty</i> untuk membahas mengenai amandemen PSC</p> <p>b. Dari hasil pertemuan tersebut, KKKS pada dasarnya setuju untuk melakukan amandemen PSC dengan syarat hal tersebut berlaku ke depan dan terhadap penggunaan <i>tax treaty</i> yang telah terlanjur digunakan agar diputihkan.</p> <p>c. Atas persyaratan dari KKKS tersebut BPMIGAS meminta tanggapan dari DJP.</p> <p>DJP kemudian melakukan kajian mengenai penerapan tarif <i>tax treaty</i> untuk <i>Branch Profit Tax</i> oleh WP KKKS, dengan melakukan diskusi pada:</p> <p>a. Tanggal 21 September 2012 dengan konsultan hukum, Hakim Nasution</p> <p>b. Tanggal 3 Oktober 2012 dengan akademisi, Profesor Gunadi</p> <p>c. Tanggal 9 Oktober 2012 dengan kepala divisi hukum BPMIGAS, Sampe L Purba</p> <p>d. Tanggal 16 Oktober 2012 dengan pihak intern DJP (PP1, PP2,P2,PKB,Kanwil Khusus, Kanwil</p>	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>3. Pemerintah akan mengidentifikasi jumlah <i>Production Sharing Contract</i> (PSC) yang akan diamandemen setiap tahun.</p>	<p>LTO, Kanwil Jaksel).</p> <p>Selanjutnya, DJP akan membuat konsep surat dari Menteri Keuangan kepada Menteri ESDM dan Kepala BPMIGAS terkait penggunaan tarif <i>tax treaty</i> dalam perhitungan <i>Branch Profit Tax</i> pada WP KKKS</p> <p>Sehubungan dengan kekurangan pembayaran PPh Migas yang disebabkan inkonsistensi penerapan tarif pajak, Direktur Pemeriksaan dan Penagihan telah menyampaikan surat kepada Kepala KPP Migas nomor S-3064/PJ.04/2012 tanggal 4 Desember 2012 yang meminta agar melakukan penelitian dan verifikasi lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>3. DJP telah menyampaikan daftar PSC yang diusulkan untuk dilakukan amandemen yaitu sejumlah 12 PSC. Sebagai tindak lanjut, DJP akan menyampaikan surat ke BPMIGAS untuk mengusulkan agar dilakukan amandemen PSC. DJP telah mengirimkan surat kepada BPMIGAS melalui surat nomor S-137/PJ/2012 tanggal 9 Juli 2012 hal Tindak Lanjut atas Temuan Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2011, mengingat amandemen PSC bukan merupakan kewenangan DJP namun merupakan kewenangan BPMIGAS.</p>	Berkelanjutan
1.2	Pelaksanaan Monitoring dan Penagihan atas Kewajiban PPh Migas Tidak Optimal	<p>Terdapat beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi optimalisasi penerimaan PPh Migas yaitu:</p> <p>1. Tidak ada tindak lanjut atas hasil rekonsiliasi selisih kewajiban PPh Migas antara laporan gabungan satu wilayah kerja dengan laporan bulanan tahun 2009 dan 2010 sehingga kurang bayar PPh Migas sebesar USD10.15 juta atau</p>	X			<p>1. Telah diterbitkan PMK Nomor 79/PMK.02/2012 tentang Tata Cara Penyetoran dan Pelaporan Penerimaan Negara dari Kegiatan Usaha Hulu Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi dan Penghitungan Pajak Penghasilan untuk Keperluan Pembayaran Pajak Penghasilan Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi Berupa Volume Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi</p>	Telah selesai ditindaklanjuti	Selesai (Mei 2012)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>setara Rp92,06 miliar belum ditagih sesuai peraturan perpajakan yang berlaku;</p> <p>2. Belum ada pengawasan yang memadai terhadap kepatuhan kewajiban perpajakan KKKS sehingga Pemerintah belum mengenakan dan menagih sanksi atas keterlambatan penyetoran PPh Migas sebesar USD72.23 juta atau setara Rp655,02 miliar sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>1. Menentukan ketentuan yang mengatur tentang pembagian kewenangan yang jelas antar instansi yang terkait dalam pengelolaan PPh Migas dari KKKS</p> <p>2. Membuat mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai; dan</p> <p>3. Memverifikasi selisih kewajiban dan keterlambatan pembayaran PPh Migas serta menagih kekurangan dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas sesuai peraturan perpajakan.</p>				<p>yang mengatur:</p> <p>a. KKKS wajib menyampaikan laporan pembayaran PPh Migas kepada DJP, baik secara bulanan ataupun tahunan.</p> <p>b. DJA akan menyampaikan laporan mengenai pembayaran PPh Migas kepada DJP.</p> <p>2. Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, dan BPMIGAS akan meningkatkan koordinasi terkait dengan mekanisme pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai.</p>	<p>Pada tanggal 25 Juni 2012 telah diadakan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait antara lain DJPB, DJA dan BPMIGAS. Berdasarkan hasil rapat tersebut diketahui bahwa:</p> <p>a. Dari total kekurangan pembayaran PPh Migas sebesar US\$10.15 juta, kekurangan PPh tahun 2009 tertulis US\$5.14 juta seharusnya sebesar US\$4,289,275.07 karena terdapat pembayaran a.n Itochu West Java sebesar US\$851,564.00 yang belum diperhitungkan oleh Tim Pemeriksa BPK RI;</p> <p>b. Atas kekurangan pembayaran tersebut, dilakukan klarifikasi ke BPMIGAS terkait dengan tata cara perhitungan jumlah pajak yang terutang dan pemisahan pembayaran antara PPh Badan dan PPh pasal 26 ayat (4) melalui S-1962/PJ.04/2012 tanggal 3 Juli 2012.</p> <p>c. Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan telah mengirimkan surat kepada KPP Migas nomor S-2082/PJ.04/2012 tanggal 30 Juli 2012 tentang Tindak Lanjut Penyelesaian Kekurangan PPh Migas Berdasarkan hasil Temuan Pemeriksaan BPK RI atas SPI Kementerian Keuangan Tahun 2011., KPP Migas telah melakukan tindak lanjut dengan menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak.</p>	Selesai (Juni 2012)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>3. Pemerintah dalam hal ini DJP telah melakukan:</p> <p>a. Pembentukan KPP Migas yang akan melakukan pemantauan dan penagihan kewajiban PPh Migas yang lebih memadai atas KKKS (PMK No. 29/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal DJP).</p> <p>b. Dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap penerimaan negara dari kegiatan migas, BPMIGAS, DJA, dan DJP akan melakukan rekonsiliasi secara periodik terkait dengan bagian negara dan PPh Migas (Pasal 16 PMK Nomor 79/PMK.02/2012).</p> <p>4. DJP akan melakukan verifikasi dan menerbitkan ketetapan terhadap kekurangan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas dari KKKS yang bersangkutan.</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah ditindaklanjuti (berkelanjutan)</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Ketetapan terhadap kekurangan pembayaran dan sanksi atas keterlambatan pembayaran PPh Migas belum dapat dilaksanakan. Saat ini DJP telah menyampaikan Surat Himbauan dan melakukan konseling kepada Wajib Pajak sebagai tahapan dalam penerbitan ketetapan kurang bayar.</p>	<p>Selesai (April 2012)</p> <p>Selesai (April 2012)</p> <p>Target selesai Agustus 2012. Saat ini masih dalam proses</p>
2.	Sistem Pengendalian Aset							
2.1	Terdapat Kelemahan dalam Pencatatan dan Penatausahaan Aset Tetap	<p>Terdapat kelemahan dalam pencatatan dan penatausahaan Aset Tetap yang berpengaruh terhadap kewajaran penyajian Aset Tetap dalam Neraca LKPP Tahun 2011, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat Aset Tetap pada sepuluh KL dengan nilai perolehan Rp4,13 triliun belum dilakukan IP; 2. Masih terdapat selisih nilai koreksi hasil IP pada DJKN dan SIMAK BMN pada 40 KL senilai Rp1,54 triliun; 3. Terdapat Aset Tanah Jalan Nasional 	X			<p>Terkait dengan Aset Tetap yang belum dilakukan IP:</p> <p>Memetakan aset yang belum di IP dan melaksanakan penilaian atas Aset Tetap yang belum dilakukan IP.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan masing-masing K/L telah dilaksanakan dengan hasil sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Terhadap satker Kementerian Agama dan Mahkamah Agung dinyatakan tidak terdapat Aset Tetap yang belum dilakukan IP. b. Untuk 8 K/L lainnya telah didapatkan 849 Satker yang memiliki Aset Tetap yang belum dilakukan IP. 2. DJKN telah melakukan pemetaan dan Dirjen Kekayaan Negara telah menetapkan target kepada KPKNL melalui surat nomor: 	<p>Target selesai Oktober 2012 (IP masih dalam proses)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp109,06 triliun tidak dapat diyakini kewajarannya karena belum selesai dilakukan IP dan hasil IP tidak memadai;</p> <p>4. Aset Tetap pada 14 KL senilai Rp6,89 triliun tidak diketahui keberadaannya;</p> <p>5. Aset Tetap hasil IP pada tiga KL senilai Rp3,88 triliun dicatat ganda;</p> <p>6. Pelaksanaan IP belum mencakup penilaian masa manfaat Aset Tetap sehingga Pemerintah belum dapat melakukan penyusutan Aset Tetap;</p> <p>7. Aset Tetap belum didukung dokumen kepemilikan pada 23 KL senilai Rp81,06 triliun; dan</p> <p>8. Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN pada 20 KL senilai Rp1,00 triliun</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>1. Memetakan seluruh aset tetap yang belum dilakukan IP dan menyelesaikan IP atas aset tetap tersebut;</p> <p>2. Menyelesaikan proses rekonsiliasi pencatatan hasil IP;</p> <p>3. Memverifikasi hasil IP yang diragukan kewajarannya;</p> <p>4. Mempercepat pengukuran masa manfaat aset sehingga dapat menerapkan penyusutan; dan</p> <p>5. Melakukan upaya pengamanan aset dengan menertibkan pemanfaatan aset</p>	X			<p>Terkait selisih nilai koreksi hasil IP:</p> <p>1. Melaksanakan pengumpulan data rinci selisih koreksi nilai hasil IP BMN per satker per KPKNL.</p> <p>2. Melaksanakan rapat koordinasi dengan 40 K/L yang masih terdapat selisih koreksi hasil IP BMN.</p> <p>3. Menyampaikan surat kepada 40 K/L dan seluruh KPKNL terkait pelaksanaan verifikasi dan validasi atas selisih koreksi nilai hasil IP.</p> <p>4. Melakukan <i>update</i> koreksi hasil IP BMN ke dalam LBP dan LBMN.</p>	<p>a. S-1499/KN/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk satker di Kem. PU, KKP, dan Kemdikbud.</p> <p>b. S-1629/KN/2012 tanggal 13 Juli 2012 untuk satker di Kem. Pertanian, BIN, dan BPOM.</p> <p>c. S-1705/KN/2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk satker di Kem. Pertahanan dan Kem. Perhubungan.</p> <p>d. Saat ini sedang dalam proses IP pada 8 K/L dengan progress per 7 Februari 2013 telah diselesaikan 882 Satker dari 884 satker atau 99,77%.</p> <p>1. Rincian data selisih koreksi nilai hasil IP BMN per satker per KPKNL telah diperoleh.</p> <p>2. Telah dilakukan rapat koordinasi dengan 40 KL terkait tindak lanjut IP pada tanggal 27 s.d. 28 Juni 2012.</p> <p>3. Dirjen Kekayaan Negara telah menyampaikan surat No. S - 1596/KN/2012 tanggal 9 Juli 2012 kepada KPKNL dan Kanwil DJKN untuk melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan validasi hasil IP, serta surat Dirjen Kekayaan Negara No. S-1597/KN/2012 tanggal 9 Juli 2012 kepada 40 KL terkait untuk melakukan rekonsiliasi, verifikasi dan validasi hasil IP;</p> <p>4. Telah dilakukan verifikasi dan validasi koreksi hasil IP dengan hasil selisih neto per 31 Januari 2013 adalah sebesar Rp249,68 miliar dan selisih absolut sebesar Rp371,03 miliar.</p>	<p>Selesai (Minggu II Juni 2012)</p> <p>Selesai (Minggu IV Juni 2012)</p> <p>Selesai (Minggu IV Juni 2012)</p> <p>Pelaporan BMN Semester I Tahun 2012</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		negara oleh pihak ketiga dan memproses sertifikat seluruh aset yang dimiliki	X			Terkait Aset Tanah Jalan Nasional pada Kementerian PU: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sedang dilakukan pemetaan sebaran wilayah kerja KPKNL berdasarkan data satker dan BMN. 2. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian PU terkait data tanah jalan nasional yang belum di IP. 3. Melaksanakan pemetaan permasalahan dan target untuk setiap wilayah kerja KPKNL/Kanwil DJKN. 4. Melaksanakan penilaian. 	<p>Data Satker dan BMN sudah diterima, dan sedang dilakukan pemetaan sebaran menurut wilayah kerja KPKNL.</p> <p>Koordinasi dengan Kementerian PU telah dilaksanakan dan data satker telah disampaikan kepada KPKNL untuk dilaksanakan penilaian.</p> <p>DJKN telah melakukan pemetaan permasalahan. Dirjen Kekayaan Negara juga telah menetapkan target kepada KPKNL melalui surat Nomor:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. S-1499/KN/2012 tanggal 25 Juni 2012 untuk satker di Kem. PU, KKP, dan Kemdikbud. b. S-1629/KN/2012 tanggal 13 Juli 2012 untuk satker di Kem. Pertanian, BIN, dan BPOM. c. S-1705/KN/2012 tanggal 24 Juli 2012 untuk satker di Kem. Pertahanan dan Kem. Perhubungan. <p>Saat ini masih dilakukan proses penilaian terhadap aset jalan nasional dan aset yang belum di IP pada 8 K/L dengan progress 7 Februari 2013 telah diselesaikan 882 Satker dari 884 satker atau 99,77%.</p>	<p>selesai</p> <p>selesai</p> <p>selesai</p> <p>Target selesai Oktober 2012. Saat ini masih dalam proses)</p>
			X			Terkait aset yang tidak diketahui keberadaannya: <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyampaian Surat Menteri Keuangan Nomor S-392/MK.06/ 2012 tanggal 8 Juni 2012 kepada 14 KL hal Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKPP 2011, yang 	<p>Telah selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Selesai (Minggu II Juni 2012)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>menyatakan agar K/L:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjuk unit yang bertanggung jawab di lingkungan KL untuk membentuk tim internal guna menelusuri dan melakukan verifikasi atas barang yang tidak ditemukan; - Menyiapkan rincian barang yang tidak ditemukan; - Menindaklanjuti permasalahan barang yang tidak ditemukan pada saat IP sebagaimana diatur dalam KMK Nomor 271/KMK.06/2011. <p>2. Menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada BPK atas rincian aset tetap yang menjadi temuan (telah disampaikan surat Direktur BMN Nomor S-131/KN.2/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK hal Penjelasan rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, yang berisi permintaan rincian nilai aset tetap per akun neraca per KL untuk masing – masing temuan; dan nilai aset tetap yang disebutkan ‘TANPA NILAI’ pada 7 KL).</p> <p>3. Melakukan koordinasi teknis dengan masing - masing KL terkait rincian aset tetap yang menjadi temuan dan tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing - masing KL.</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti (BPK belum menyampaikan jawaban)</p> <p>DJKN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum pada tanggal 9 Juli 2012 untuk membahas BMN yang tidak diketahui keberadaanya pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp6,59 triliun (96% dari total temuan senilai Rp6,89 triliun). Kementerian PU telah melakukan penelusuran dengan hasil sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • telah ditemukan kembali Rp4,9 triliun; • tidak ditemukan Rp148 miliar (Rp147,75 miliar dalam proses penghapusan dan Rp313 juta dalam proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR); • masih dalam penelusuran Rp1,18 triliun. 	<p>Selesai (Minggu II Juni 2012)</p> <p>Selesai (Minggu II Juli 2012)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
			X			<p>4. Melaksanakan pertemuan tripartit (BPK, KL dan Kemenkeu) dalam rangka pembahasan teknis terkait temuan dan tindak lanjut sebagaimana telah disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada 14 KL atas barang yang tidak diketahui keberadaannya.</p> <p>5. Monitoring tindak lanjut temuan BPK atas barang yang tidak diketahui keberadaannya dan penyelesaiannya sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011.</p> <p>Terkait hasil IP yang dicatat ganda:</p> <p>1. Meningkatkan koordinasi internal Ditjen Kekayaan Negara dalam penyampaian laporan hasil IP prasarana kereta api.</p> <p>(Telah disampaikan surat Direktur BMN surat nomor S-963/KN/2012 tanggal 14 Mei 2012 kepada 35 KPKNL untuk menyampaikan laporan penilaian hasil IP prasarana kereta api).</p> <p>2. Meningkatkan koordinasi dengan 3 K/L untuk menindaklanjuti temuan atas pencatatan ganda aset tetap hasil IP (telah disampaikan surat Menteri Keuangan Nomor S-391/MK.06/2012 tanggal 8 Juni 2012 kepada 3 K/L untuk menindaklanjuti temuan BPK tersebut dengan melakukan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menunjuk unit yang bertanggung jawab di lingkungan KL untuk bersama-sama melaksanakan tindak 	<p>Telah dilaksanakan rapat pertemuan tripartit pada tanggal 19 Juli 2012 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. Dari pertemuan tersebut telah diperoleh rincian temuan aset tetap pada K/L, namun demikian masih terdapat temuan yang 'TANPA NILAI'.</p> <p>Telah diproses TGR atas BMN yang tidak diketahui keberadaannya pada Kementerian Pekerjaan Umum senilai Rp148 miliar.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pembahasan tindak lanjut temuan BPK atas pencatatan ganda aset tetap yang dihadiri oleh Dit. Penilaian, Kanwil VII DJKN, dan KPKNL Jakarta yang menyimpulkan bahwa perlu data rinci dari BPK terkait aset tetap yang dicatat ganda.</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pertemuan tripartit pada tanggal 19 Juli 2012 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p>	<p>Selesai (Minggu III Juli 2012)</p> <p>Juli-Desember 2012</p> <p>selesai</p> <p>Selesai (Minggu I Juni 2012)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>lanjut terhadap temuan tersebut;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan data nama satker, jenis dan jumlah BMN yang berdasarkan temuan BPK dicatat ganda). <p>3. Menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada BPK atas rincian aset tetap yang menjadi temuan. (telah disampaikan surat Direktur BMN Nomor S-131/KN.2/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK hal Penjelasan rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011.</p> <p>4. Melaksanakan penelusuran pencatatan ganda aset tetap hasil IP.</p> <p>5. Melakukan monitoring dan asistensi atas koreksi atas pencatatan ganda.</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti (BPK belum menyampaikan jawaban)</p> <p>Dalam rangka penelusuran aset tetap yang dicatat ganda:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Direktur BMN melalui surat No. S-153/KN.2/2012 tgl 9 Juli 2012 telah mengirimkan semua laporan penilaian yang diterima oleh Kantor Pusat DJKN kepada KPKNL Jakarta I; ▪ Telah dilaksanakan rapat pembahasan pada tanggal 2 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Dit. BMN, Dit. Penilaian dan KPKNL Jakarta I dengan hasil: sudah teridentifikasi semua nilai IP yang bersinggungan dengan nilai pengembangan aset tetap; dan disepakati untuk melakukan koreksi pencatatan ganda dengan menggunakan hasil IP. <p>Berdasarkan hasil monitoring diketahui bahwa telah dilakukan koreksi atas pencatatan ganda aset tetap hasil IP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pencatatan ganda pada Kejaksaan Agung dan Basarnas telah dikoreksi pada Laporan Barang Pengguna 2011 (Audited); • Telah dilakukan koreksi pencatatan ganda aset tetap pada Kementerian Perhubungan pada September 2012. Berdasarkan verifikasi data pada Kementerian Perhubungan, BMN senilai Rp3,88 triliun yang teridentifikasi dicatat ganda 	<p>Selesai (Minggu II Juni 2012)</p> <p>Juli - Oktober 2012 (masih dalam proses)</p> <p>November 2012</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
				X		<p>Terkait penyusutan aset tetap:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan KMK Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, yang antara lain mengatur penerapan penyusutan pada satker BLU yang mulai diterapkan pada tahun 2011. 2. RPKM tentang Penyusutan Barang Milik Negara Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sedang dalam proses finalisasi penyusunan. 3. Selanjutnya Pemerintah akan melakukan langkah-langkah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a) Menyusun tabel masa manfaat terkait rencana implementasi penyusutan pada TA 2013. b) Mengembangkan aplikasi, sosialisasi dan <i>piloting</i> pada beberapa K/L. Dengan progress: Pengembangan aplikasi, sosialisasi, dan <i>piloting</i> akan diterapkan tahun 2012. c) Menerapkan pada seluruh K/L dengan menyesuaikan terhadap implementasi akuntansi berbasis akrual. Dengan progress: Penerapan penyusutan pada seluruh satker K/L dilakukan pada 	<p>adalah Rp1,62 triliun. Setelah dilakukan penelaahan ulang atas nilai Rp1,62 triliun pada SIMAK-BMN maka diperoleh nilai Rp1,39 triliun yang dicatat ganda dan telah dikoreksi pada SIMAK BMN Semester II Tahun 2012.</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah diterbitkan PMK No. 1/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat sebagai dasar penyusutan yang mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2013.</p> <p>Tabel Masa Manfaat BMN telah disusun, dan saat ini sedang menunggu masukan dari Kementerian Pekerjaan Umum terkait masa manfaat beberapa sub-sub kelompok BMN</p> <p>Aplikasi dalam tahap penyusunan</p> <p>Penerapan penyusutan pada seluruh satker K/L dilakukan pada tahun 2013</p>	<p>Selesai</p> <p>Target selesai akhir 2012</p> <p>Target akhir tahun 2012</p> <p>Target selesai akhir tahun 2012</p> <p>Target dilaksanakan tahun 2013</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
			X			<p>tahun 2013.</p> <p>Terkait aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada BPK atas rincian aset tetap yang menjadi temuan (telah disampaikan surat Direktur BMN Nomor S-131/KN.2/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK hal Penjelasan rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011. Meminta KL untuk menindaklanjuti BMN yang tidak didukung dokumen tanah dan selain tanah setelah diperoleh rincian dari BPK. Berkoordinasi terus menerus dengan BPN untuk mendorong percepatan sertifikasi atas BMN berupa tanah. (Untuk BMN berupa tanah, DJKN telah menyurati KL untuk melakukan identifikasi dan pendataan terhadap tanah yang belum bersertifikat atau sudah bersertifikat tetapi tidak sesuai ketentuan). 	<p>Telah selesai ditindaklanjuti (BPK belum menyampaikan jawaban)</p> <p>Telah dilaksanakan rapat pertemuan tripartit pada tanggal 19 Juli 2012 untuk membahas rincian temuan aset tetap dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL. Temuan aset tetap yang belum didukung dokumen kepemilikan sampai dengan 2 November 2012 telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp6,56 miliar.</p> <p>DJKN telah melaksanakan rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum, BPN, BAPPENAS, dan DJA pada tanggal 9 Juli 2012 untuk membahas BMN yang tidak didukung dokumen kepemilikan senilai Rp77,87 triliun (96% dari total temuan senilai Rp81,058 triliun).</p> <p>Biaya sertifikasi BMN akan dialokasikan <i>on top</i> pada BPN. Adapun bidang tanah yang <i>free</i> dan <i>clear</i> untuk disertipatkan tahun 2013 adalah 3.232 bidang tanah (termasuk jalan nasional). Penganggaran sertifikasi untuk tanah jalan nasional yang menjadi <i>new initiative</i> II tidak disetujui DPR sehingga bidang tanah yang akan disertipatkan tahun 2013 adalah 2.000 bidang tanah.</p> <p>Untuk BMN berupa tanah yang belum didukung</p>	<p>Selesai (Minggu II Juni 2012)</p> <p>Selesai (Minggu II Juli 2012)</p> <p>2013 – 2015 (kecuali tanah dalam sengketa)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							<p>dokumen kepemilikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Telah diterbitkan Peraturan Bersama Menkeu No. 186/PMK.06/2009 & Kepala BPN No. 24/2009 tentang Pensertipikatan BMN berupa Tanah; Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-556/MK.06/2011 tanggal 19 September 2011 kepada Kepala BPN tentang permasalahan dalam pensertipikatan BMN berupa tanah pada Kementerian Negara/Lembaga; Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara No. S-104/ KN/2012 tanggal 11 Januari 2012 kepada DJA tentang Pengalokasian Anggaran Pensertipikatan BMN berupa tanah; Telah diterbitkan surat Menteri Keuangan No. S-4/MK.6/2012 tanggal 11 Januari 2012 meminta BPN berkoordinasi dengan BAPPENAS & DJA untuk menyusun rencana penganggaran terkait pelaksanaan sertipikasi BMN sebagai 'new initiative' dalam APBN (on Top di DIPA BPN); Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara No. S-426/ KN/2012 tanggal 27 Februari 2012 kepada Sestama BPN tentang penetapan target sertipikasi Tahun 2013 sebanyak 5.000 bidang tanah; Telah diterbitkan surat Dirjen Kekayaan Negara No. S-506/KN/ 2012 tanggal 12 Maret 2012 kepada seluruh K/L ttg identifikasi dan pendataan BMN berupa tanah dan penyampaian aplikasi Sistem Manajemen Pendataan Tanah Pemerintah (SIMANTAP); Telah dilaksanakan beberapa kali rapat koordinasi dengan BPN, BAPPENAS dan DJA, terakhir pada tanggal 9 s.d. 10 Juli 2012 untuk memverifikasi data tanah yang akan disertipikatkan. 	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
			X			<p>Terkait Aset Tetap dikuasai/digunakan pihak lain yang tidak sesuai ketentuan pengelolaan BMN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyampaikan surat permintaan penjelasan kepada BPK atas rincian aset tetap yang menjadi temuan. (telah disampaikan surat Direktur BMN Nomor S-131/KN.2/2012 tanggal 14 Juni 2012 kepada BPK hal Penjelasan rincian Aset Tetap Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011. Berkoordinasi dengan KL terkait tindak lanjut dengan mengacu pada KMK Nomor 271/KMK.06/201. Melakukan monitoring atas pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 271/KMK.06/2011 terkait BMN yang digunakan/dikuasai tidak sesuai ketentuan. 	<p>Telah selesai ditindaklanjuti (BPK belum menyampaikan jawaban).</p> <p>Telah dilaksanakan rapat koordinasi dengan KL terkait pada tanggal 10 Juli 2012 untuk membahas temuan dan progress tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh masing-masing KL.</p> <p>Temuan aset tetap yang dikuasai/digunakan pihak lain tidak sesuai dengan ketentuan sampai dengan 2 November 2012 yang telah selesai ditindaklanjuti sebesar Rp46,33 miliar (4,62% dari total temuan sebesar Rp1.002,9 miliar).</p>	<p>Selesai (Minggu II Juni 2012)</p> <p>Selesai (Minggu II Juli 2012)</p> <p>Des 2012 (masih dalam proses)</p>
2.2	Terdapat Kelemahan dalam Pelaksanaan IP atas Aset KKKS	<p>Pemerintah telah menyelesaikan IP atas seluruh aset KKKS, tetapi masih terdapat kelemahan dalam penatausahaan dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 belum disajikan dalam LKPP; IP belum mencakup aset-aset eks <i>Contract of Work</i> (CoW) dan aset-aset yang belum ditemukan; Hasil IP Aset KKKS berupa pengeluaran setelah tanggal perolehan (<i>subsequent expenditure</i>) pada 34 KKKS senilai Rp44,35 triliun belum diidentifikasi dan 	X			<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah akan terus meningkatkan koordinasi secara intensif antara Kementerian Keuangan dengan KESDM, BPKP, BPMIGAS dan KKKS dalam rangka: <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian penyajian aset KKKS perolehan setelah tahun 2010. IP aset eks. CoW dan aset yang belum diketemukan. Identifikasi dan verifikasi <i>Subsequent Expenditure</i> yang dapat dan tidak dapat dikapitalisasi. Identifikasi dan verifikasi terhadap aset dengan nilai nol dan nilai negatif. Identifikasi dan verifikasi aset dalam 	<ol style="list-style-type: none"> DJKN telah menyampaikan surat kepada BPMIGAS dengan surat nomor S-432/KN.4/2012 tanggal 15 Juni 2012 hal Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS Aset CoW dan Aset yang Belum Ditemukan sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN dan LKPP Tahun 2011 yang pada intinya meminta BPMIGAS untuk melakukan <i>mapping/pemetaan</i> atas aset-aset eks CoW dan aset-aset yang belum dilakukan IP. IP BMN KKKS khususnya untuk PT Chevron Pacific Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2012. DJKN telah meminta BPMIGAS untuk melakukan pemetaan dan verifikasi atas <i>subsequent expenditure</i>, aset dengan nilai nol, nilai negatif dan aset rusak berat melalui surat nomor S-430/KN.4/2012 tanggal 13 Juni 2012 hal Rapat 	<p>Target selesai seluruh temuan Oktober 2012. Saat ini IP masih dalam proses penyelesaian.</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>dipisahkan antara yang dapat dan tidak dapat dikapitalisasi;</p> <p>4. Terdapat 4.536 item aset yang dicatat dengan nilai wajar nol dan 209 item aset dengan nilai wajar negatif; dan</p> <p>5. Pemerintah belum membedakan penilaian atas aset KKKS yang berupa scrap dengan aset yang kondisinya rusak berat.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>1. Memperbaiki metode dan pengendalian atas pelaksanaan IP Aset KKKS yang masih berlangsung dan memverifikasi kembali hasil IP yang sudah dilaksanakan;</p> <p>2. Menetapkan prosedur verifikasi data Harmoni III ke dokumen sumber atas Aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010.</p>				<p>kondisi rusak berat.</p> <p>- Melakukan monitoring atas penyajian aset KKKS perolehan setelah tahun 2010, penyelesaian IP, <i>Subsequent Expenditure</i>, aset dengan nilai nol, nilai negatif dan aset rusak berat.</p>	<p>Kerja Kelompok Kerja IP BMN KKKS, S-433/KN.4/2012 tanggal 15 Juni 2012 hal Penyelesaian Hasil Inventarisasi dan Penilaian BMN KKKS berupa Pengeluaran setelah tanggal perolehan (<i>Subsequent Expenditure</i>) sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN dan LKPP 2011, S-434/KN.4/2012 tanggal 15 Juni 2012 hal Penyelesaian Hasil IP BMN KKKS dengan kondisi rusak berat dan rusak total sebagai Tindak Lanjut Temuan BPK atas LKBUN dan LKPP 2011.</p> <p>c. Verifikasi kelayakan kapitalisasi <i>Subsequent Expenditure</i> (SE) sejumlah 13.896 item aset dengan nilai perolehan US\$8,589,430,703 dan nilai wajar Rp44.345.555.350.377 pada 34 KKKS telah dilakukan dengan memeriksa dokumen pendukung (misal AFE) yang ada.</p> <p>d. Verifikasi kewajaran penilaian aset <i>scrap</i> sejumlah 21.610 item aset dengan nilai perolehan US\$709,879,824 dan nilai wajar Rp1.349.258.916.873 pada 48 KKKS telah dilakukan dengan memeriksa surat keterangan dari KKKS.</p> <p>e. Pemerintah telah menyampaikan klarifikasi kepada BPK tentang penghapusan BMN KKKS, berdasarkan klarifikasi tersebut tidak terdapat proses penghapusan BMN KKKS yang berjalan lambat.</p> <p>f. Terkait dengan aset KKKS yang dikuasai dan digunakan oleh pihak ketiga, pemerintah telah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> DJKN telah meminta BPMIGAS/KKKS untuk menyelesaikan proses serah terima pengelolaan berdasarkan ketentuan PP Nomor 6 Tahun 2006; BMN KKKS PT.CPI telah diserahkan pengelolaannya kepada Yayasan PCR; PT.CPI telah menindaklanjuti dengan mengajukan proses pelepasan dan penghapusan kepada BPMIGAS aset KKKS PT.CPI yang telah diserahkan pengelolaannya 	

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							<p>kepada Yayasan PCR.</p> <p>g. Target IP BMN KKKS tahun 2012 adalah senilai US\$2,34 miliar yang tersebar dalam 72 lokasi KKKS pada 12 Kanwil DJKN. Laporan hasil IP BMN KKKS 2012 yang sudah diterima per 25 Januari 2013 adalah sebanyak 21.026 item aset dengan nilai perolehan sebesar US\$959,957,738.33 atau 41,03% dari target IP tahun 2012. c) Dengan pencapaian tersebut, maka IP BMN KKKS telah menyelesaikan 95.05% aset KKKS perolehan s/d 31 Desember 2010 (US\$29,84M dari US\$31,22M). Sisanya (US\$1.38M) merupakan aset yang tidak ditemukan dan saat ini sedang disiapkan kebijakan setingkat Menteri untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.</p>	Selesai (Juni 2012)
						<p>2. Menyempurnakan Buletin Teknis Inventarisasi dan Buletin Teknis. Penilaian dalam rangka perbaikan metode dan pengendalian IP terhadap Aset KKKS yang belum di IP (Buletin Teknis inventarisasi dalam proses konsultasi dengan BPK RI melalui surat S-450/KN.4/2012 tanggal 20 Juni 2012).</p> <p>3. Menetapkan prosedur verifikasi data Harmoni III atas aset KKKS yang diperoleh setelah tahun 2010 untuk kemudian disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk dipedomani.</p>	<p>a. Buletin Teknis Inventarisasi Aset KKKS telah selesai diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 02 Juli 2012</p> <p>b. Buletin Teknis Penilaian Aset KKKS telah selesai diperbaiki/disempurnakan pada tanggal 18 Juli 2012</p> <p>c. Bultek Inventarisasi dan Bultek Penilaian telah dikomunikasikan ke BPK RI pada rapat tanggal 2 November 2012.</p> <p>Dalam rangka menetapkan prosedur validasi dan verifikasi data Harmoni III tersebut, telah diadakan workshop/pembekalan oleh BPMIGAS mengenai proses dan mekanisme pencatatan aset yang diperoleh/dibeli KKKS dalam Harmoni III pada tanggal 18-19 Juli 2012. Hasil kegiatan tersebut, menjadi bahan penyusunan prosedur validasi dan verifikasi data Harmoni III untuk aset perolehan di atas 2010.</p>	<p>Target selesai Oktober 2012</p> <p>Oktober 2012</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
							Pemerintah telah menerbitkan PMK No. 245/PMK.05/2012 sebagai pengganti PMK No. 02/PMK.05/2011 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Aset berupa BMN yang berasal dari KKKS dan PMK No. 248/PMK.05/2012 sebagai pengganti PMK No. 234/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus, yang antara lain mengatur tentang verifikasi dokumen sumber sehingga akan memudahkan Kementerian ESDM untuk memverifikasi dokumen sumber, dan melakukan pencatatan serta pelaporan aset KKKS secara berjenjang.	
2.3	Pelaksanaan IP Aset Eks BPPN Tidak Berdasarkan Dokumen yang Valid	<p>Terdapat kelemahan dalam pelaksanaan inventarisasi, perhitungan, dan penilaian terhadap Aset Eks BPPN yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah belum menemukan dokumen cession atas Aset Eks BPPN berupa Aset Kredit senilai Rp 18,25 triliun; 2. Aset eks BPPN yang telah diserahkan kepada PUPN senilai Rp11,18 triliun tidak didukung oleh dokumen sumber yang valid; 3. Aset Eks BPPN berupa tagihan PKPS senilai Rp8,68 triliun belum didukung kesepakatan dengan Pemegang Saham; 4. Nilai aset properti sebanyak 917 item belum dinilai; dan 5. Pemerintah juga belum dapat menyajikan nilai bersih yang dapat direalisasikan atas Aset Eks BPPN yang berupa piutang <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>Memperbaiki inventarisasi dan perhitungan Aset Eks BPPN dengan memastikan</p>	X			<p>Pemerintah akan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penelusuran dan peminjaman seluruh <i>cession</i> Bank Asal. 2. Penyempurnaan Metode Perhitungan sesuai dengan: <ol style="list-style-type: none"> a. Pendapat hukum (<i>legal opinion</i>) atas dasar penggunaan nilai <i>outstanding</i> pada <i>Back-Up Bunisys</i> sebagai dasar pengelolaan aset kredit Aset Transfer Kit (ATK) dan nilai pada Dokumen Kredit sebagai dasar pengelolaan aset kredit Non-ATK. b. Petunjuk pengakuan dan pencatatan serta penyajian atas sisa aset eks BPPN, khususnya aset kredit, dokumen sumber yang diakui, dan metode pencatatan dalam Laporan Keuangan. c. Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (<i>in kracht van gewijsde</i>) atas nilai kewajiban obligor 	<p>Sesuai dengan Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011, seluruh dokumen peralihan piutang/cession dari Bank Asal kepada BPPN telah ditemukan.</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Selesai (Juni 2012)</p> <p>Selesai (Juli 2012)</p> <p>Selesai (Juni 2012)</p> <p>Selesai (Juli 2012)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		keberadaan aset ATK (dibuktikan dengan <i>cessie</i>), menyepakati nilai PKPS dengan pemegang saham, menilai seluruh aset properti dan menyajikan nilai wajar Aset Eks BPPN				<p>PKPS eks Kejaksaan Agung.</p> <p>3. Terhadap aset kredit:</p> <p>a. Verifikasi <i>database</i> aset kredit ATK pada Modul KN II dengan data SAPB dan dokumen <i>cessie</i>.</p> <p>b. Rekonsiliasi data hasil pengelolaan aset kredit TA 2011 dan Semester I TA 2012 dengan PUPN.</p> <p>c. Verifikasi <i>database</i> aset kredit Non-ATK pada Modul KN II dengan dokumen hukum dan jaminan aset.</p> <p>4. Terhadap aset properti:</p> <p>a. Penilaian 917 aset properti yang belum dilakukan penilaian sedang dalam proses penilaian oleh penilai eksternal.</p> <p>b. Penggandaan dokumen aset.</p> <p>c. Pengadaan Jasa Konsultan Penilai.</p> <p>d. <i>Updating database</i> aset Modul KN II.</p>	<p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah dilakukan penilaian atas 917 aset properti dengan hasil + Rp782 miliar. dan telah sesuai dengan rekomendasi sebagaimana disampaikan kepada Tim Pemeriksa BPK RI serta tertuang dalam Berita Acara Pembahasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2011 tanggal 2 November 2012.</p>	<p>Selesai (Juni 2012)</p> <p>Selesai (Juli 2012)</p> <p>Selesai (September 2012)</p> <p>Selesai (Agustus-September 2012)</p>
2.4	Penyelesaian BPYBDS Berlarut-Larut dan Penetapannya dalam PP dapat Berbeda dengan Penyerahan Awal	<p>Penetapan BPYBDS dalam PP PMN berlarut-larut dan dapat berbeda dengan penyerahan awal sebagai berikut.</p> <p>1. Nilai BPYBDS cenderung terus meningkat, tetapi belum ada mekanisme yang memadai untuk mempercepat penetapan BPYBDS dalam PP.</p> <p>2. DJKN selaku Unit Akuntansi Pembantu BUN-Invetasi Pemerintah tidak dilibatkan dalam tahap perencanaan dan penganggaran proyek pengadaan BMN yang akan diserahkan kepada BUMN;</p>	X			<p>1. Meningkatkan koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L teknis (telah disampaikan surat Dirjen KN atas nama Menteri Keuangan No: S-324/MK.6/2012 yang meminta kepada K/L penyalur BPYBDS untuk segera mengusulkan penetapannya dengan dilengkapi BASTO dan revidu BPKP).</p> <p>Selanjutnya akan disampaikan surat dari Kementerian Keuangan (DJKN) kepada K/L mengenai petunjuk proses penetapan BPYBDS menjadi PMN (mengacu Pasal 33 (1) UU APBN terkait BPYBDS).</p>	<p>a. Saat ini sedang disusun peraturan tentang perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang ditetapkan dalam PP, yang antara lain mengatur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Apabila nilai BASTO lebih besar dari nilai revidu BPKP, selisih akan dijadikan penambahan PMN, apabila K/L akan menarik kembali BMN tersebut, maka K/L akan mencatat dalam daftar BMN. • Apabila nilai BASTO lebih kecil dari nilai hasil revidu BPKP, BUMN melakukan koreksi pada pencatatan, nilai yang ditetapkan dalam PP adalah nilai revidu BPKP. 	Juli 2012

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>3. Masih terdapat BPYBDS senilai Rp8,46 triliun yang belum direviu BPKP; dan</p> <p>4. Pemerintah belum menetapkan kebijakan atas selisih nilai BPYBDS yang ditetapkan dalam PP dengan nilai penyerahan awal sesuai BASTO.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>1. Perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN sebagai PMN dengan melibatkan DJKN selaku unit akuntansi BUN-Investasi Pemerintah</p> <p>2. Mekanisme penetapan BPYBDS sebagai PMN; dan</p> <p>3. Perlakuan atas selisih nilai antara pencatatan BPYBDS dengan nilai yang akan ditetapkan dalam PP.</p>				<p>2. Menata perencanaan dan penganggaran atas BMN yang akan diserahkan kepada BUMN menjadi PMN (telah disampaikan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: S-1256/KN/2012 tanggal 1 Juni 2012 kepada Direktur Jenderal Anggaran untuk berkoordinasi dalam perencanaan belanja modal pada K/L yang sejak awal pengadaannya direncanakan untuk disertakan sebagai PMN pada BUMN).</p> <p>Pada tanggal 19 Juni 2012 telah dilakukan rapat koordinasi dengan DJA dan DJPU dengan kesepakatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pembahasan lebih lanjut yang melibatkan DJA, DJKN, DJPU, Bappenas, dan Kementerian BUMN (dikoordinasikan oleh DJA); - Melakukan sosialisai bersama (DJKN, DJPU, DJA) kepada K/L terkait perencanaan K/L yang mengusulkan pinjaman luar negeri untuk pengadaan BMN yang selanjutnya diserahkan kepada BUMN (dikoordinasikan DJKN). <p>3. Akan dilakukan pertemuan dengan PLN dan Kementerian ESDM untuk membahas kemungkinan pemberian dana PMN (<i>fresh money</i>) langsung kepada PT PLN (bukan sebagai belanja Kementerian ESDM).</p>	<p>b. Langkah selanjutnya yaitu memproses usulan PMN yang berasal dari BPYBDS yang telah diusulkan ke DJKN diantaranya yang sedang dalam proses yaitu perum Damri, PT ASDP, PT PLN .</p> <p>Pada tanggal 9 Agustus 2012 telah dilaksanakan rapat di DJA yang dihadiri DJKN, DJPB, Bappenas, Kementerian BUMN, dan DJA yang dituangkan dalam nota dinas bersama antara DJA, DJKN, dan DJPB, tertanggal 31 Agustus 2012, dengan kesimpulan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jangka Pendek: Dalam rangka penyusunan RAPBN 2014 perlu diadakan forum pertemuan antara DJA, DJKN, Kementerian BUMN, dan BUMN terkait untuk meningkatkan kesesuaian alokasi anggaran dengan kebutuhan K/L atau BUMN dimaksud. Forum tersebut juga dapat dilakukan sebelum penelaahan alokasi anggaran (Pagu Definitif TA 2013). - Jangka Panjang: Menetapkan kriteria alokasi dana yang diperlukan sebagai penugasan kepada BUMN, dan secara teknis akan dikaji mengenai tuntutan dalam penganggaran untuk meningkatkan <i>value for money</i> serta meningkatkan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran. <p>Dirjen Kekayaan Negara telah menyampaikan surat kepada Sekjen Kementerian ESDM No. S-1720/KN/2012 tanggal 26 Juli 2012 yang berisi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Permintaan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK. - Permintaan agar proyek-proyek inkutring yang bersifat <i>multiyears</i> dan <i>multifinance</i>, dapat didanai oleh internal PLN, sehingga aset yang dihasilkan 	<p>Juli 2012</p> <p>Juli 2012</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>4. Telah dilakukan pemetaan jenis selisih tersebut dari sisi nilai dan jumlah aset. Selanjutnya DJKN akan menyampaikan surat kepada BUMN dan K/L terkait perlakuan terhadap masing-masing selisih tersebut.</p> <p>5. Sejak Tahun Anggaran 2013 tidak ada lagi penganggaran untuk aset yang akan diserahkan kepada BUMN/yang akan dijadikan PMN.</p> <p>6. Nilai wajar (<i>fair value</i>) aset yang akan diserahkan dalam BASTO dalam neraca Pemerintah adalah harga perolehan.</p>	<p>tidak lagi dikategorikan sebagai BMN.</p> <p>Pada tanggal 11 September 2012 telah dilaksanakan rapat antara DJKN bersama dengan Kementerian ESDM dan PT PLN untuk melaksanakan rekonsiliasi guna mencari selisih nilai BPYBDS sesuai hasil temuan BPK. Saat ini sedang menunggu jawaban tertulis Kementerian ESDM atas hasil rekonsiliasi dimaksud.</p> <p>Telah dilakukan rapat untuk menindaklanjuti selisih tersebut yaitu pada Perum Damri, PT Angkasa Pura I, PT Angkasa Pura II.</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Juli 2012</p> <p>Juli 2012</p>
2.5	Sistem Pertanggung jawaban dan Pelaporan Lembaga Non Struktural, Yayasan, dan Badan Lainnya dalam LKPP Belum Diatur Secara Konsisten dan Komprehensif	<p>Berdasarkan hasil pemeriksaan atas desain dan implementasi SABL tersebut, terdapat permasalahan diantaranya sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah perlu mengkaji pengakuan aset UBL sebagai investasi karena sifatnya tidak sesuai dengan kriteria investasi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004; 2. Identifikasi/inventarisasi atas entitas/organisasi yang memenuhi kriteria UBL belum selesai dilaksanakan; 3. SABL belum mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan belanja Non APBN yang dikelola UBL berbentuk satker; 4. BPMIGAS ditetapkan sebagai UBL, tetapi kekayaan BPMIGAS merupakan kekayaan negara yang dipisahkan berdasarkan PP Nomor 42 Tahun 2002 tentang BPMIGAS; 	X			<p>1. Pemerintah akan melakukan kajian tentang pengakuan dan penyajian aset UBL agar sesuai dengan UU Nomor 1 Tahun 2004 serta kajian tentang sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan dan badan lainnya termasuk Penyempurnaan PMK 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Lainnya (SAPBL) terkait pengakuan aset LNS atau Badan Lainnya dalam rangka penyajian Laporan Keuangan.</p>	<p>Telah disusun kajian awal Badan Lainnya dan akan dibuat kajian lebih lanjut yang lebih mendalam. PMK tentang SAPBL sedang dalam proses finalisasi.</p> <p>Telah diterbitkan PMK No. 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas PMK No. 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Badan Lainnya. Revisi tersebut antara lain mengatur:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menambahkan kriteria penetapan UBL sehingga seluruh Badan Lainnya yang memenuhi kriteria tersebut sudah masuk dalam Unit Badan Lainnya. - Pertanggungjawaban UBL satker yang memperoleh dana non APBN - Mengeluarkan BPMIGAS dari bagian UBL. - Konsistensi penyajian UBL sebagai aset lainnya dan bukan sebagai investasi. <p>Identifikasi telah selesai dilakukan dan telah dituangkan dalam PMK No. 200/PMK.05/2012</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti, PMK 235/PMK.05/2011 (diperbaharui dengan PMK No. 200/PMK.05/2012)</p>	<p>September 2012 (Revisi PMK SAPBL dalam proses finalisasi)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>5. Terdapat lima badan lainnya yang sudah dilaporkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan (ILK) UBL pada LKPP 2011, tetapi belum ditetapkan sebagai UBL per 31 Desember 2011.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>Memperbaiki sistem pertanggungjawaban dan pelaporan lembaga non struktural, yayasan dan badan lainnya</p>				<p>2. Menyelesaikan identifikasi/ inventarisasi atas entitas/organisasi yang memenuhi kriteria UBL.</p> <p>3. Terkait dengan temuan bahwa SABL belum mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan belanja Non APBN yang dikelola UBL berbentuk satker, pada PMK 235/PMK.05/2011 tentang SAPBL, khususnya Pasal 5 telah diatur mengenai penerimaan non APBN yang dikelola UBL berbentuk satker yaitu pendapatan dana di luar APBN diperlakukan sebagai pendapatan hibah sehingga mengikuti ketentuan mengenai pendapatan hibah dan belanja yang bersumber dari hibah.</p> <p>4. Telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 184/PB/2011 tentang Penambahan dan Pengurangan UBL dalam daftar UBL Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BL. Pemerintah akan menetapkan Badan Lainnya yang baru dibentuk maupun yang sudah terbentuk namun belum ditetapkan sebagai UBL.</p>	<p>tentang SAPBL telah mengatur pertanggungjawaban dan pelaporan penerimaan dan belanja Non APBN yang dikelola UBL berbentuk satker.</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Selesai (September 2012)</p> <p>Selesai (September 2012)</p> <p>Desember 2012</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
3.	Sistem Pengendalian Ekuitas							
3.1	Terdapat Selisih Nilai SAL Tahun 2011 antara Fisik dengan Catatannya	<p>Hasil pemeriksaan terhadap saldo kas dan nilai SAL menunjukkan selisih sebesar Rp17,43 miliar antara saldo fisik kas per 31 Desember 2011 dengan nilai catatan SAL. Selisih tersebut terjadi antara lain karena hal-hal sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat akumulasi Uang Persediaan yang sudah digunakan oleh Kementerian Luar Negeri sebesar Rp99,88 miliar, tetapi belum dipertanggungjawabkan; 2. Penurunan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2011 berbeda sebesar Rp6,45 miliar dengan mutasi transito selama tahun 2011; 3. Masih terdapat selisih kurang antara nilai transaksi penerimaan Kiriman Uang (KU) dengan transaksi pengeluaran KU sebesar Rp12,82 miliar; dan 4. Belum efektifnya rekonsiliasi realisasi belanja antara SAU dan SAI sehingga masih terdapat selisih sebesar Rp50,03 miliar. <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperbaiki pengelolaan dan pencatatan transaksi non anggaran; dan 2. Segera menyelesaikan selisih nilai SAL dengan fisik uang. 	X			<p>Terkait saldo UP di Kemenlu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk menetapkan langkah-langkah penyelesaian permasalahan UP di Kemenlu yaitu meliputi penetapan dan penyelesaian Kas di Bendahara Pengeluaran yang telah direklasifikasi menjadi Aset Lain-lain, dan penetapan mekanisme dan prosedur penyetoran UP di Kemenlu secara lebih memadai. 2. Pemerintah dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan telah mempersiapkan draf Peraturan Menteri Keuangan mengenai pencairan Uang Persediaan dalam Valuta Asing dan direncanakan dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. 3. Penyediaan dana dalam bentuk valas akan dilakukan oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan untuk valas USD, JPY, dan EURO sesuai mekanisme yang selama ini telah dilaksanakan oleh KPPN Jakarta VI, untuk valas selain USD, JPY, dan Euro akan disediakan dana dalam bentuk USD yang selanjutnya dikonversi ke valas di masing-masing perwakilan luar negeri Kementerian Luar Negeri. 	<p>Langkah-langkah penyelesaian permasalahan UP di Kemenlu masih dalam proses pembahasan</p> <p>PMK masih dalam proses pembahasan.</p> <p>Penyediaan dana dalam bentuk valas akan dilaksanakan pada TA 2013</p>	<p>Desember 2012 (dalam proses)</p> <p>Target selesai September 2012. Saat ini masih dalam proses.</p> <p>2013</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>Terkait dengan saldo Kas di Bendahara Pengeluaran</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan sedang dalam proses pengumpulan, penelusuran dan analisis data saldo di kas Bendahara Pengeluaran pada LKPP Tahun 2011 yang dikirimkan oleh K/L sebagai salah satu dasar penyusunan kebijakan penyelesaian saldo yang tidak dapat ditelusuri lagi. 2. Kementerian Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan akan meminta data penelusuran saldo kas di BP pada LKPP KPPN tahun 2011 yang akan digunakan sebagai dasar rekomendasi saldo kas di BP yang akan diputihkan/diselesaikan. 3. Pemerintah akan membuat Kebijakan dalam bentuk PMK untuk menyelesaikan Saldo kas di Bendahara Pengeluaran (BP) yang sudah tidak bisa ditelusuri lagi (saat ini draft PMK telah disusun dan proses penetapan PMK tersebut akan berdasarkan hasil penelusuran dan penelitian saldo kas di BP yang masih sedang dalam proses). 4. Pelaksanaan rekonsiliasi mutasi UP yang dilakukan secara bulanan antara KPPN dengan Satker akan terus diintensifkan termasuk penelusuran sisa UP pada Satker yang sudah tidak aktif maupun peningkatan kesadaran Satker dalam penyusunan LPJ Bendahara sehingga Saldo UP dapat 	<p>Sebagai tindak lanjut surat Direktorat PKN No. S-7840/PB.3/2012 tanggal 27 September 2012 perihal rekonsiliasi Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dalam rangka pemutihan kepada seluruh KPPN, KPPN menyampaikan data yang dijadikan dasar oleh Direktorat PKN untuk <i>mencluster</i> saldo kas di Bendahara Pengeluaran.</p> <p>Telah diterbitkan, PMK No. 15/PMK.05/2013 tentang Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</p> <p>Telah diterbitkan: KMK No. 7/KMK.05/2013 tentang Besaran Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Kementerian Luar Negeri pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara; KMK No 8/KMK.05/2013 tentang Besaran Penyesuaian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Selain Kementerian Luar Negeri pada Neraca Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara Tingkat Daerah/Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara</p> <p>Rekonsiliasi sudah dilaksanakan dan akan terus dilaksanakan secara periodik</p>	<p>Selesai (Agustus 2012)</p> <p>Target selesai Juli 2012. Saat ini proses pemutihan saldo kas di BP masih dalam proses</p> <p>Desember 2012</p> <p>Berkelanjutan</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>disajikan secara tepat dan mengurangi kemungkinan selisih pencatatan SAL.</p> <p>Terdapat selisih kurang antara nilai transaksi penerimaan Kiriman Uang (KU)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan rekonsiliasi akan terus dilanjutkan dan ditingkatkan efektifitasnya antara Direktorat PKN dengan KPPN dan antar KPPN. 2. Melanjutkan dan meningkatkan kegiatan monitoring dan evaluasi pencatatan KU pada KPPN. 3. Membangun aplikasi monitoring KU yang dilaksanakan oleh Kanwil DJPB untuk memantau KU di KPPN. Saat ini implementasi aplikasi tersebut memasuki tahap UAT. 4. Penerapan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-78/PB/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembebanan Dana Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri melalui Mekanisme Rekening Khusus pada KPPN Jakarta VI. 	<p>Pelaksanaan rekonsiliasi telah dan akan terus dilaksanakan antara Direktorat PKN dengan KPPN setiap bulan (BAR telah diterbitkan).</p> <p>Dit. PKN telah melaksanakan monitoring dan evaluasi langsung ke KPPN untuk memperbaiki pembukuan Kiriman Uang yang salah di KPPN. Tahun 2012 telah dilaksanakan 3 kali movev ke KPPN untuk memperbaiki pembukuan KU di KPPN.</p> <p>Monitoring KU merupakan salah satu komponen dalam Aplikasi Monitoring Kanwil (MOKA). Aplikasi tersebut telah diluncurkan kepada semua Kanwil DJPB untuk dapat dipergunakan sebagai salah satu alat monitoring selisih KU pada KPPN. Tindak lanjut penyelesaian atas selisih KU tersebut berpedoman pada Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-29/PB/2012 tentang Penggunaan Aplikasi Monitoring Kanwil Dalam Rangka Pelaksanaan Penerimaan, Pembagian dan Penyaluran Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan, Monitoring Transaksi Kiriman Uang antar KPPN, Monitoring Penerimaan Perhitungan fihak ketiga dan Monitoring Retur SP2D.</p> <p>PER-78/PB/2011 sudah diterapkan mulai tanggal 2 Juli 2012 sehingga tidak lagi terjadi pembiayaan pada KPPN Jakarta VI.</p>	<p>Berkelanjutan (per Triwulanan)</p> <p>Berkelanjutan (per Triwulanan)</p> <p>Selesai (Agustus 2012)</p> <p>selesai</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
II	TEMUAN PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN							
1	Pendapatan dan Hibah							
1.1	Terdapat PNPB yang Terlambat/Belum Disetorkan ke Kas Negara, Kurang/Belum Dipungut, Digunakan Langsung Di Luar Mekanisme APBN, dan Dipungut Melebihi Tarif PP	<p>Hasil pemeriksaan atas pengelolaan PNPB pada KL menunjukkan adanya PNPB pada 28 KL senilai Rp331,94 miliar dan USD2.01 juta yang terlambat / belum disetorkan ke kas negara, kurang / belum dipungut, digunakan Langsung tanpa mekanisme APBN, dan dipungut melebihi tarif yang ditetapkan dalam PP, dengan rincian sebagai berikut.</p> <p>1. Pungutan PNPB pada 15 KL terlambat disetor ke Kas Negara senilai Rp69,30 miliar;</p> <p>2. Pungutan PNPB Tahun 2011 pada 12 KL senilai Rp89,55 miliar dan USD1.00 juta belum disetorkan ke Kas Negara sampai dengan 31 Desember 2011;</p> <p>3. PNPB pada sembilan KL kurang / belum dipungut senilai Rp12,36 miliar dan USD1.01 juta;</p> <p>4. Pungutan PNPB pada sebelas KL senilai Rp159,41 miliar tidak disetorkan ke Kas Negara dan digunakan langsung tanpa melalui mekanisme APBN; dan</p> <p>5. PNPB pada dua KL dipungut melebihi tarif yang ditetapkan senilai Rp1,34 miliar.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>1. Memperbaiki peraturan PNPB terkait mekanisme penyetoran PNPB ke Kas Negara;</p>	X			<p>Pemerintah akan melakukan:</p> <p>1. Menyelesaikan temuan pemeriksaan BPK dengan berkoordinasi dengan K/L sehingga:</p> <ul style="list-style-type: none">- PNPB yang terlambat disetor tidak terulang kembali- PNPB yang belum disetor, kurang/belum dipungut dapat segera disetor ke kas negara- PNPB dikelola sesuai dengan mekanisme APBN- Pungutan PNPB sesuai dengan tarif <p>Langkah-langkah yang dilakukan adalah :</p> <ul style="list-style-type: none">- mengundang satu persatu K/L yang tidak tertib dalam mengelola PNPB.- Menyusun langkah strategis akan ditempuh.- Menyusun <i>time table</i> pelaksanaan langkah dimaksud.- Pembahasan akan melibatkan Itjen/Inspektorat Utama K/L yang diharapkan akan terus terlibat dalam monitoring pelaksanaan langkah-langkah strategis tersebut di K/L masing-masing.- Sebagai langkah awal, telah diselenggarakan <i>Kick Off Meeting</i> pembahasan <i>exit strategy</i> tindak lanjut temuan BPK terkait pengelolaan PNPB pada K/L di tingkat pimpinan. Hal ini	<p>1. Tindak lanjut :</p> <p>a. Telah dilaksanakan <i>Kick Off Meeting</i> pada tanggal 10 Juli 2012 bertempat di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan.</p> <p>b. Telah dilakukan koordinasi dengan mengundang K/L terkait temuan pemeriksaan BPK RI atas LKPP pada tanggal 18 dan 23 Juli 2012 bertempat di Ditjen Anggaran, dan telah disusun Berita Acara yang berisi komitmen masing-masing Pimpinan K/L untuk menindaklanjuti temuan BPK.</p> <p>c. Selanjutnya, dalam rangka koordinasi, upaya Pemerintah antara lain :</p> <p>1) Telah melaksanakan Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah pada tanggal 11-12 September 2012. Dalam Rakernas tersebut, Komisi III membahas tentang pengelolaan PNPB, dengan kesimpulan, untuk mengatasi Temuan BPK :</p> <p>a) Untuk PNPB yang tidak disetor tepat waktu/belum disetor, disepakati untuk segera dilakukan penyetoran ke Kas Negara</p> <p>b) Untuk PNPB digunakan langsung di luar mekanisme APBN disepakati untuk :</p> <ul style="list-style-type: none">• Penggunaan langsung PNPB tidak diperbolehkan• Segera mengusulkan persetujuan penggunaan sebagian PNPB kepada Menteri Keuangan• Kementerian Keuangan	<p>selesai</p> <p>selesai</p> <p>selesai</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>2. Meningkatkan penyelesaian revisi DIPA PNBPN;</p> <p>3. Mengatur sanksi yang tegas atas keterlambatan penyetoran dan penggunaan langsung;</p> <p>4. Merevisi UU PNBPN terutama yang menyangkut kewenangan penetapan jenis dan penyesuaian tarif PNBPN yang memudahkan pelaksanaannya; dan</p> <p>5. Melakukan pendataan dan monitoring atas potensi PNBPN di seluruh K/L</p>				<p>diperlukan sebagai komunikasi awal dan koordinasi semua K/L terkait langkah strategis di tingkat teknis.</p>	<p>berkomitmen untuk mempercepat pemrosesan persetujuan penggunaan sebagian dana PNBPN</p> <p>c) Untuk PNBPN kurang/belum dipungut, disepakati untuk segera melakukan penagihan/ pemungutan PNBPN dan diselesaikan dalam tahun 2012</p> <p>d) Untuk PNBPN belum didukung dengan dasar hukum yang memadai, disepakati untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menempatkan pungutan tersebut dalam PP tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis PNBPN. • Menghentikan pemungutan PNBPN yang belum didukung dengan dasar hukum yang memadai • Mempercepat pemrosesan penyusunan PP Tarif PNBPN atau revisi PP Tarif PNBPN <p>2) Menteri Keuangan telah menerbitkan Surat Nomor S-559/MK.02/2012 tanggal 30 Juli 2012 hal Pemberian sanksi terkait temuan BPK yang berulang kepada 28 Pimpinan K/L, yang antara lain telah meminta agar Pimpinan K/L :</p> <p>a) Menindaklanjuti rekomendasi BPK terkait dengan pengenaan sanksi kepada pejabat pengelola PNBPN yang tidak tertib dalam mengelola PNBPN,</p> <p>b) Memperbaiki ketidaktertiban pengelolaan PNBPN sebagaimana temuan BPK tahun 2011 dan mencegah temuan-temuan dimaksud terulang lagi di tahun 2012 dan tahun-tahun mendatang</p> <p>c) Lebih memberdayakan aparat pengawasan internal (inspektorat) untuk memantau tindak lanjut penyelesaian temuan BPK tahun 2011, serta melakukan pengawasan</p>	<p>selesai</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>lebih melekat sehingga temuan-temuan dimaksud tidak terulang di tahun 2012 dan di tahun-tahun mendatang</p> <p>3) Sebagai tindak lanjut Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi supervisi dan pengendalian PNBPN pada K/L, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mengeluarkan Surat Edaran No. 17 Tahun 2012 tentang Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Supervisi dan Pengendalian PNBPN pada K/L.</p> <p>2. Terkait dengan Revisi DIPA PNBPN: Pengaturan tentang penyelesaian Revisi DIPA PNBPN telah dimuat dalam PMK Nomor: 49/PMK.02/2012 tanggal 28 Maret 2012 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2012, yang mengatur antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perubahan karena perubahan target. Perubahan karena pencairan blokir /tanda bintang. Kewenangan dan Tata cara Revisi Anggaran. <p>3. Melakukan penyempurnaan peraturan di bidang PNBPN, sebagai berikut: Menyusun dan menyempurnakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Draft naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBPN; Draft revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBPN; 	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <p>Upaya Kementerian Keuangan terkait penyempurnaan peraturan perundang-undangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Naskah akademik revisi UU 20 Tahun 1997 tentang PNBPN telah diselesaikan pada tahun 2011 Telah disusun draf perubahan UU No. 20 Tahun 1997 tentang PNBPN 	<p>selesai</p> <p>Selesai</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<ul style="list-style-type: none"> - Draft Revisi PP 73 Tahun 1999 tentang penggunaan PNBP; - Draft PMK penyetoran, dalam rangka memperbaiki pengelolaan PNBP secara Komprehensif. <p>4. Melakukan perbaikan sistem pengelolaan PNBP, antara lain melalui:</p> <p>1. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada K/L dalam rangka penyesuaian jenis dan tarif PNBP dengan kondisi terkini dan dalam rangka penempatan potensi PNBP dalam PP sehingga pemungutan PNBP didukung dasar hukum yang sesuai, antara lain pada: Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; Kementerian Kelautan dan Perikanan; Kementerian Kehutanan; Kementerian Agama; Kementerian Keuangan; Kementerian Kominfo; Perpusnas; BPK; ANRI.</p>	<p>3) RPKM penyetoran PNBP telah disampaikan kepada Menteri Keuangan.</p> <p>1. Revisi PP tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada K/L, dengan progres sebagai berikut:</p> <p>a) Telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sosial (PP No.3 Tahun 2012) - Kementerian Energi dan SDM (PP No. 9 Tahun 2012) - Kementerian Pekerjaan Umum (PP No. 38 Tahun 2012) - Kementerian Perdagangan (PP No. 45 Tahun 2012) - Kementerian Pertanian (PP No. 48 Tahun 2012) - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (PP No. 65 Tahun 2012) <p>b) Dalam proses penuangan dalam naskah asli di Sekretariat Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kesehatan <p>c) Dalam proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Kehutanan - Kementerian Keuangan <p>d) Dalam proses pembahasan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Hukum dan HAM - Kementerian Kelautan dan Perikanan - Kementerian Pertahanan - Kementerian Agama - Kementerian Kominfo - Perpusnas 	<p>Desember 2012</p> <p>Desember 2012</p> <p>2012/2013</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						<p>2. Dalam rangka meminimalisasi penggunaan langsung PNBП, dilakukan penyusunan draft/revisi KMK Ijin Penggunaan PNBП pada K/L antara lain; Kementerian Perindustrian; Kementerian Sosial; Kementerian Hukum dan HAM; Kem. Sekretariat Negara; Kem. Pemuda dan Olahraga; BKN; MA; BATAN, Menyusun PMK tentang penyetoran PNBП secara berkala dalam rangka meminimalisasi keterlambatan penyetoran PNBП ke Kas Negara.</p> <p>3. Melakukan sosialisasi kepada K/L terkait pengelolaan PNBП sehingga PNBП dipungut sesuai jenis dan besaran tarif yang ditetapkan dalam PP, secepatnya disetor ke kas negara, dikelola dalam mekanisme APBN.</p> <p>4. Tetap melakukan inventarisasi potensi PNBП pada K/L.</p>	<p>- BPK</p> <p>- ANRI</p> <p>2. Revisi KMK tentang Persetujuan Penggunaan Sebagian Dana PNBП pada K/L, dengan progres sebagai berikut :</p> <p>a) Telah ditetapkan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (KMK Nomor 10/KMK.02/2012) - Ditjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan (KMK Nomor 20/KMK.02/2012) <p>b) Menunggu penetapan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Sekretariat Negara <p>c) Dalam proses pembahasan :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kementerian Pertanian - Kementerian Sosial - Kementerian Perindustrian - Kementerian Pekerjaan Umum - Kementerian Pemuda dan Olah Raga - BKN - MA - BATAN <p>3. Telah dilakukan sosialisasi terkait <i>exit strategy</i> tindak lanjut temuan pemeriksaan BPK terkait PNBП pada LKPP TA 2011 kepada K/L serta dengan menghadiri undangan K/L dalam rangka melakukan sosialisasi pengelolaan PNBП untuk lingkungan internal masing-masing K/L.</p> <p>4. Telah diterbitkan surat Dirjen Anggaran kepada Menteri Pertahanan No.S-1993/AG/2012 tanggal 31 Juli 2012 dan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor S-2024/AG/2012 tanggal 2 Agustus 2012, untuk meminta agar dilakukan inventarisasi potensi PNBП pada Kementerian dimaksud.</p>	<p>2012/2013</p> <p>Desember 2012</p> <p>Berkelanjutan</p> <p>Berkelanjutan</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
						5. Saat ini tengah dibangun Sistem <i>Billing</i> PNB <i>Online</i> sebagai bagian dari Sistem Modul Penerimaan Negara 2 (MPN2) dalam rangka menciptakan sistem pengadministrasian penerimaan negara yang akuntabel dan <i>real time</i> , yang diharapkan mampu memperbaiki pengelolaan dan monitoring atas penyeteroran dan realisasi PNB.	5. Telah dilakukan pembangunan sistem <i>Billing</i> PNB <i>Online</i> (SIMPONI) yang saat ini dalam proses finalisasi pengembangan aplikasi.	Desember 2012
1.2	Penetapan PBB Migas atas Areal <i>Onshore</i> Tidak Sesuai dengan UU PBB dan UU Migas	<p>Pemerintah telah melakukan penagihan PBB Migas tahun 2011 sesuai UU PBB, tetapi penetapannya masih belum sesuai dengan UU PBB dan UU Migas yaitu sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah masih mengenakan PBB Migas pada areal <i>onshore</i> atas seluruh wilayah kerja KKKS termasuk areal yang bukan objek pajak PBB. Pengenaan PBB Migas atas seluruh wilayah kerja juga berpotensi pengenaan PBB atas objek pajak yang telah dikenakan PBB sektor pedesaan, sektor perkotaan, sektor perkebunan, sektor kehutanan, dan sektor pertambangan nonmigas. 2. Pemerintah seharusnya mengenakan PBB Migas hanya atas areal yang dikuasai, dimiliki, dan/ atau dimanfaatkan sebagaimana UU PBB dan UU Migas; dan NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB Migas atas areal <i>onshore</i> sebagian ditetapkan secara seragam dan tidak ditentukan melalui perbandingan harga tanah sekitarnya. 	X			<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah diterbitkan PMK No. 15/PMK.03/2012 tanggal 1 Februari 2012 tentang penatausahaan dan pemindahbukuan PBB Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Migas dan Panas Bumi; 2. Telah diterbitkan Perdirjen Pajak nomor PER-11/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 dan Surat Edaran Dirjen Pajak nomor SE-21/PJ/2012 tanggal 20 April 2012 tentang tata cara pengenaan PBB sektor pertambangan migas dan panas bumi 3. Telah dilaksanakan sosialisasi penatausahaan PBB Migas pada bulan Februari dan Maret 2012 4. Penetapan PBB Migas tahun 2012 telah diterbitkan pada bulan Juni 2012 dan telah diajukan permintaan pembayaran PBB Migas kepada DJA pada tanggal 8 Juni 2012. 	<p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p> <p>Telah selesai ditindaklanjuti</p>	<p>Selesai (Februari 2012)</p> <p>Selesai (April 2012)</p> <p>Selesai (Maret 2012)</p> <p>Selesai (Juni 2012)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>Pemerintah agar menetapkan secara jelas objek pajak PBB Migas sesuai UU PBB dan UU Migas serta memperbaiki petunjuk pengisian SPOP dan mekanisme penetapan PBB Migas.</p>						
1.3	Terdapat perbedaan Realisasi Pendapatan Hibah antara LKPP dengan LK BA Pengelolaan Hibah yang Tidak Dapat dijelaskan dan Penerimaan Hibah Langsung KL Belum Dilaporkan kepada BUN dan Dikelola Di Luar Mekanisme APBN	<p>Pemerintah telah menyempurnakan Sistem Akuntansi Hibah serta menerbitkan mekanisme pengelolaan hibah dan pengesahan hibah langsung bentuk uang dan penyampaian memo pencatatan hibah langsung bentuk barang/jasa/surat berharga. Namun, pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat perbedaan realisasi Pendapatan Hibah TA 2011 antara LKPP dan LK BA Pengelolaan Hibah senilai Rp183,94 miliar yang tidak dapat dijelaskan; dan 2. Penerimaan hibah langsung berupa uang/barang/jasa pada 15 KL senilai Rp292,43 miliar dan USD781.99 ribu serta belanja yang bersumber dari hibah pada 14 KL senilai Rp311,30 miliar dan USD776.96 ribu belum dilaporkan kepada Menteri Keuangan selaku BUN. <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan BA 999.02 dengan catatan BUN; 2. Menetapkan peraturan mengenai 	X			<p>Pemerintah akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan rekonsiliasi antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dengan K/L dan BUN setiap Triwulanan; 2. Menyusun draft revisi PMK 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah, untuk mengakomodasi monitoring penerimaan hibah langsung; 3. Merevisi aturan mengenai batas waktu pengesahan hibah; 4. Menerbitkan surat Menteri Keuangan kepada K/L dan Donor tentang amandemen atas perjanjian hibah yang sudah ada dan menyusun perjanjian berikutnya dengan menambahkan klausul penerbitan BAST. 	<p>Rekonsiliasi telah dan akan terus dilakukan antara DJPU dengan K/L dan BUN secara periodik.</p> <p>Telah dilakukan pembahasan draft revisi PMK 224/PMK.08/2011 untuk mengakomodasi monitoring penerimaan hibah langsung, saat ini dalam proses pengesahan di Kementerian Hukum dan HAM.</p> <p>Telah ditindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan dan telah diakomodir dalam Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-37/PB/2012 tentang Langkah-Langkah dalam Menghadapi Akhir Tahun Anggaran 2012.</p> <p>DJPU telah mengirimkan surat ke negara donor dan K/L namun hasilnya masih terdapat kendala-kendala seperti negara donor yang tidak menambahkan klausul seperti USAID. Selanjutnya akan diadakan rapat dengan donor pada tanggal 29 November 2012.</p> <p>Selain itu dalam rangka monitoring penerimaan hibah telah disediakan aplikasi monitoring penerimaan hibah antara data SP2HL dan MPHBJBS dan telah diterbitkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-29/PB/2012 tentang Monitoring Penerbitan Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung</p>	<p>Berkelanjutan</p> <p>Target selesai September 2012. Saat ini masih dalam proses</p> <p>Desember 2012</p> <p>Selesai (Juli 2012)</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>monitoring penerimaan hibah langsung di tingkat K/L, pelaporan dan sanksi bagi satuan kerja yang tidak melaporkan hibah langsung yang diterimanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>3. Menetapkan peraturan mengenai penetapan batas waktu pengesahan hibah; dan</p> <p>4. Menteri Keuangan dan Menteri/Pimpinan Lembaga penerima hibah melakukan amandemen atas perjanjian hibah sudah ada dan menyusun perjanjian berikutnya dengan menambahkan klausul penerbitan BAST antara pihak negara/lembaga donor dengan K/L penerima hibah.</p>					Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga	
1.4	Pemerintah Belum Menetapkan Status Pengelolaan Keuangan Tujuh PT yang Telah Dibatalkan Status BHP-nya	Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP). Untuk menindaklanjuti putusan MK tersebut, Pemerintah menetapkan PP Nomor 66 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa pengelolaan keuangan eks BHMN menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU). Namun, sampai dengan Tahun 2011 berakhir, PP tentang tujuh Perguruan Tinggi (PT) eks BHMN tersebut belum dicabut dan peraturan penetapan sebagai BLU atas PT eks BHMN juga belum diterbitkan. Pada Tahun 2011, ketujuh PT tersebut telah menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Ketujuh PT tersebut adalah Institut Pertanian Bogor, Universitas Airlangga, Universitas	X			<p>Pemerintah akan mempercepat proses penetapan RPP Perubahan PP 23/2005 yang akan menjadi dasar hukum penetapan pengelolaan 7 PTN eks BHMN mengikuti pola Pengelolaan Keuangan BLU;</p> <p><i>Progress penyelesaian draf RPP Perubahan PP 23/2005, sebagai berikut:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menteri Keuangan melalui Surat No. S-328/MK.05/2012 tanggal 14 Mei 2012 telah menyampaikan draf RPP Perubahan PP 23/2005 kepada Presiden RI untuk mendapatkan penetapan. 2. Menteri Sekretaris Negara melalui surat No. B-734/M. Sesneg/D-4/PU.02/05/2012 tanggal 29 Mei 2012, menyampaikan permohonan paraf atas draf RPP Perubahan PP 23/2005 kepada Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan 	Pemerintah telah menetapkan PP No. 74/2012 tentang Perubahan atas PP 23/2005 tentang pengelolaan keuangan BLU tanggal telah 28 Agustus 2012. Dalam Pasal 37A PP 74/2012, 7 PTN eks BHMN ditetapkan menjadi satker BLU penuh.	Selesai (September 2012)

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		<p>Gajah Mada, Universitas Indonesia, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Sumatera Utara, dan Institut Teknologi Bandung.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <p>Pemerintah agar segera menetapkan status hukum pengelolaan keuangan atas tujuh PT eks BHMN</p>				<p>Menteri Dalam Negeri.</p> <p>3. Saat ini draf RPP Perubahan PP 23/2005 tersebut telah diparaf oleh Menteri Keuangan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, serta dalam proses pembubuhan paraf oleh Menteri Dalam Negeri.</p>		
1.5	Penyelesaian Kesepakatan antara Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo atas <i>Risk Sharing</i> Tunggakan KUT TP 1998/1999 Pola Channeling Berlarut-larut	<p>Pemerintah telah mencatat Kewajiban atas <i>Risk Sharing</i> Kredit Program KUT TP 1998/1999 Pola Channeling tersebut sebagai bagian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Lainnya dalam Neraca LKPP Tahun 2011 sebesar Rp1,91 triliun (52,25% x Rp3,66 triliun). Namun, Pemerintah, BI, dan Perum Jamkrindo belum menyepakati <i>risk sharing</i> atas Kredit Program KUT khususnya atas tunggakan yang tidak didukung dokumen lengkap. Dalam rangka menciptakan pengelolaan keuangan Negara yang tertib, kesepakatan ketiga pihak tersebut seharusnya segera diselesaikan.</p> <p><u>Rekomendasi BPK:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas dengan BI dan Perum Jamkrindo untuk menyepakati <i>risk sharing</i> atas KUT TP 1998/1999 secara akuntabel dengan mempertimbangkan rasa keadilan; dan 2. Melakukan upaya hukum bila ditemukan penyimpangan dalam 			X	<p>Pemerintah akan melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Kementerian Koperasi dan UKM, dan BI untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap data debitur; 2. Monitoring pelaksanaan kegiatan verifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM; 3. Melakukan evaluasi hasil verifikasi data debitur oleh Kementerian Koperasi dan UKM; 4. Mendapatkan kesepakatan dari BI dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Telah dilakukan rapat koordinasi penyelesaian tunggakan KUT pada Kemenko Bidang Perekonomian sesuai surat undangan no. UND-58/D.II.M.EKON.5/07/2012 tanggal 12 Juli 2012. • Verifikasi terhadap data debitur sangat sulit dilakukan, berdasarkan hasil rapat tanggal 15 Agustus 2012 yang dipimpin oleh Menko Perekonomian. • Saat ini Menteri Koordinator Perekonomian, Menteri Koperasi dan UKM, dan Menteri Keuangan sedang dalam proses koordinasi untuk dapat melakukan pembicaraan dengan komisi-komisi terkait di DPR (surat menteri Koperasi Nomor 93/DEP.2/XI/2012 tanggal 6 November 2012) 	<p>Telah ditindaklanjuti</p> <p>Juli s.d Des 2012</p> <p>Januari s.d. Maret 2013</p> <p>April s.d. Juni 2013</p>

No	TEMUAN	PENJELASAN TEMUAN	KLASIFIKASI *)			RENCANA TINDAK	PROGRESS REPORT	JADWAL PENYELESAIAN
			1	2	3			
		penyaluran KUT TP 1998/1999.				<p>Perum Jamkrindo serta merumuskan kebijakan penyelesaian <i>risk sharing</i> KUT Tahun Penyediaan 1998/1999;</p> <p>5. Menyampaikan kebijakan penyelesaian KUT kepada DPR RI;</p> <p>6. Menindaklanjuti kesepakatan Pemerintah dengan DPR.</p>		<p>Juli s.d. Sep 2013</p> <p>Oktober 2013 s.d.</p>

Keterangan:

Klasifikasi 1: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berjalan;

Klasifikasi 2: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam tahun anggaran berikutnya;

Klasifikasi 3: Temuan Pemeriksaan BPK diselesaikan dalam 2-3 tahun anggaran berikutnya.

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT BERHARGA NEGARA TAHUN 2012

I. PENDAHULUAN

Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Berharga Negara ini disusun untuk memenuhi amanat pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Berharga Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2012 dan berakhir 31 Desember 2012, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

Dalam peta kebijakan fiskal, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) termasuk dalam sumber pembiayaan dan pengelolaan portofolio utang negara. Pengelolaan utang selain terkait dengan cara mengisi kesenjangan pembiayaan, dalam jangka panjang juga berperan dalam pengelolaan portofolio yang mendukung kesinambungan fiskal. Tujuan penerbitan Surat Berharga Negara adalah untuk:

- a. Membiayai defisit APBN
- b. Menutupi kekurangan kas jangka pendek akibat ketidaksesuaian antara arus kas penerimaan dan pengeluaran dari Rekening Kas Negara dalam satu tahun anggaran (*cash-mismatch*)
- c. Mengelola portofolio utang negara

Pemerintah pusat berwenang menerbitkan Surat Berharga Negara setelah mendapat persetujuan DPR yang disahkan dalam kerangka APBN dan setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Atas penerbitan tersebut, Pemerintah berkewajiban membayar bunga dan biaya lainnya serta pokok SBN pada saat jatuh tempo. Dana untuk pembayaran bunga dan biaya lainnya serta pokok SBN disediakan dalam APBN. Adapun manfaat penerbitan SBN adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai Instrumen Fiskal

Penerbitan SBN diharapkan dapat menggali potensi sumber pembiayaan APBN yang lebih besar dari investor pasar modal.

- b. Sebagai Instrumen Investasi

SBN menyediakan alternatif investasi yang relatif bebas risiko gagal bayar dan memberikan peluang bagi investor dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi portofolionya guna memperkecil risiko investasi

- c. Sebagai Instrumen Pasar Keuangan

Surat Berharga Negara dapat memperkuat stabilitas sistem keuangan dan dapat dijadikan acuan (*benchmark*) bagi penentuan nilai instrument pasar keuangan lainnya.

Surat Berharga Negara (SBN) terdiri atas Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Pengertian Surat Utang Negara (SUN) menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Sedangkan pengertian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau dapat disebut Sukuk Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.

Secara umum, SUN dapat dibagi dalam dua jenis yaitu Surat Perbendaharaan Negara (*Treasury Bills*) dan Obligasi Negara (*Treasury Bonds*). Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto. Sedangkan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan dengan kupon dan/atau pembayaran bunga secara diskonto. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap (*fixed rate*) dan ON dengan tingkat bunga mengambang (*floating rate*). Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu *Zero Coupon* (ZC).

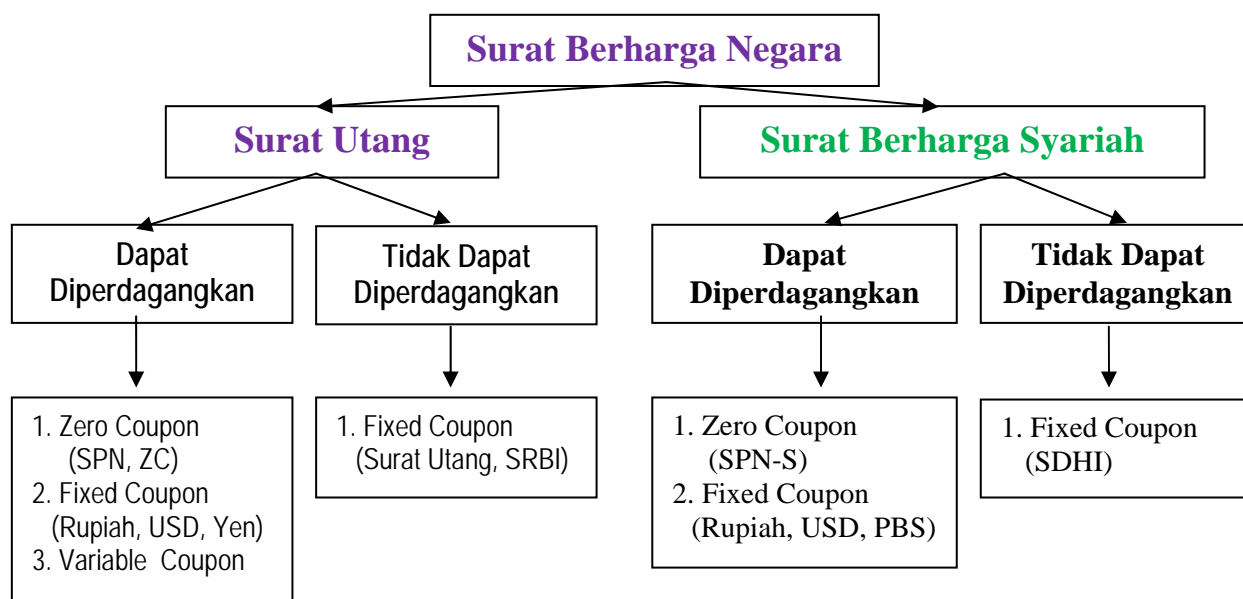
Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2002, SUN diterbitkan dalam bentuk warkat maupun tanpa warkat (*scriptless*). SUN dengan warkat adalah surat berharga yang kepemilikannya berupa sertifikat baik atas nama maupun atas unjuk. Sertifikat atas nama adalah sertifikat yang nama pemiliknya tercantum di lembar sertifikat tersebut, sedangkan sertifikat atas unjuk adalah sertifikat yang tidak mencantumkan nama dan pelaku pasar untuk melakukan diversifikasi pemilik sehingga setiap orang yang menguasainya portofolionya guna memperkecil risiko investasi. adalah pemilik yang sah. Surat Utang Negara tanpa warkat (*scriptless*) adalah surat berharga yang kepemilikannya dicatat secara elektronis (*book entry system*). Dalam hal SUN tanpa warkat maka bukti kepemilikan yang otentik dan sah adalah pencatatan kepemilikan secara elektronis. Cara pencatatan secara elektronis dimaksudkan agar pengadministrasian data kepemilikan (*registry*) dan penyelesaian transaksi perdagangan SUN di pasar sekunder dapat diselenggarakan secara efisien, cepat, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara (SUN) menyatakan bahwa SUN dapat diterbitkan dalam bentuk yang dapat diperdagangkan (*tradable*) atau bentuk yang tidak dapat diperdagangkan (*non-tradable*). Surat Utang Negara yang dapat diperdagangkan pertama kali diperdagangkan oleh Pemerintah di pasar primer / pasar perdana. Perdagangan SUN selanjutnya ada di pasar sekunder baik di dalam maupun di luar negeri. Perdagangan dapat dilakukan melalui bursa dan atau di luar bursa (*over the counter/ OTC*). Surat Utang Negara yang tidak diperdagangkan adalah SUN yang tidak diperjualbelikan di Pasar Sekunder dan biasanya diterbitkan secara khusus untuk pemodal institusi tertentu, baik domestik maupun asing, yang berminat untuk memiliki SUN sesuai dengan kebutuhan spesifik dari portofolio investasinya.

SBSN adalah SBN yang berbasis syariah. Pemerintah mulai menerbitkannya pada tahun 2008 dengan denominasi rupiah yakni setelah disahkannya UU No 19 Tahun 2008 tentang SBSN. Berdasarkan metode penerbitan, SBSN tidak berbeda dengan SBN konvensional yaitu SUN. Yang membedakannya dengan SUN adalah SBSN bukan surat pernyataan utang sehingga dalam penerbitannya dibutuhkan *underlying transaction* dan *underlying asset* sebagai obyek transaksi. Adapun tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek-proyek pembangunan pemerintah seperti proyek infrastruktur dalam sektor energi, telekomunikasi, perhubungan, pertanian, industri manufaktur, dan perumahan rakyat).

Penerbitan SBSN dilakukan melalui SPV (*Special Purpose Vehicle*) sebagai penerbit. Yang bertindak sebagai SPV adalah Perusahaan Penerbit SBSN (PP SBSN), yang berbadan hukum. PP SBSN didirikan berdasarkan Undang-Undang SBSN untuk penerbitan SBSN. Ketentuan pendirian dan pengelolaan PP SBSN diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 56 tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit SBSN.

Adapun gambaran struktur penerbitan Surat Berharga Negara secara umum pada tahun 2012 adalah berikut:



Gambar 1 Struktur Surat Berharga Negara

II. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SUN TAHUN 2012

Target pembiayaan APBN-Perubahan tahun 2012 dari SBN Neto ditetapkan sebesar Rp 159.596.700.000.000. Jumlah nominal tersebut merupakan target neto, yaitu jumlah penerbitan SUN baru setelah dikurangi dengan jumlah SUN yang jatuh tempo maupun dibeli kembali oleh Pemerintah sebelum jatuh tempo (*buyback*).

A. Penerbitan Obligasi Negara dalam Rupiah

Obligasi Negara (ON) dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2012 dilelang sebanyak 22 kali, yang dilakukan sejak bulan Januari sampai Desember 2012.

Penerbitan Obligasi Negara secara reguler dilakukan dengan cara lelang di pasar perdana. Pada setiap penerbitan, jumlah penawaran yang dimenangkan lebih rendah dari jumlah penawaran yang masuk dengan *bid to cover ratio* berkisar dari 1,01 kali sampai 15,60 kali.

Total nilai net nominal ON dalam denominasi Rupiah yang diterbitkan pada tahun 2012 dengan tingkat bunga tetap (*Fixed Rate*) adalah sebesar Rp.122.245.000.000.000, ON dengan tingkat bunga mengambang (*Variable Rate*) dan ON dengan pembayaran bunga secara diskonto (*Zero Coupon*) tidak diterbitkan pada tahun 2012, serta ORI yang ditawarkan dengan metode *book building* diterbitkan sebanyak 1 kali penerbitan sebesar Rp 12.676.745.000.000. Penerbitan ON dalam denominasi Rupiah mempertimbangkan berbagai aspek, antara lain: (i) struktur jatuh tempo utang yang sudah ada, (ii) pengembangan pasar sekunder SUN, dan (iii) *cost of borrowing*.

Penjualan Obligasi Negara Ritel (ORI) yang dilakukan sebanyak 1 kali penerbitan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperluas basis investor SUN dan ditujukan untuk investor dengan metode *bookbuilding* melalui Agen Penjual yang diseleksi oleh Panitia Seleksi. *Bookbuilding* adalah salah satu metode penerbitan surat berharga, yaitu investor akan menyampaikan penawaran pembelian atas suatu surat berharga, biasanya berupa jumlah dan harga (*yield*) penawaran pembelian, dan dicatat dalam *book order* oleh *investment bank* yang bertindak sebagai *bookrunner*. Atas penerbitan ORI009 tersebut mendapat sambutan yang cukup positif dari masyarakat, terbukti dengan jumlah penawaran yang masuk mencapai Rp12.765.145.000.000.

B. Penerbitan Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN adalah Surat Utang Negara yang jangka waktu jatuh temponya sampai dengan 12 bulan. Pada tahun 2012, Pemerintah menerbitkan 23 seri SPN, dengan total penerbitan SPN mencapai Rp.30.520.000.000.000, dengan rincian sebagai berikut:

No	Seri	Tanggal Penerbitan	Jatuh Tempo	Kupon	Face Value
1	SPN03120411	10 Januari 2012	11 April 2012	-	1,000,000,000,000
2	SPN12130111	10 Januari 2012	11 Januari 2013	-	3,350,000,000,000
3	SPN03120429	26 Januari 2012	29 April 2012	-	800,000,000,000
4	SPN03120508	07 Februari 2012	08 Mei 2012	-	1,000,000,000,000
5	SPN12130208	07 Februari 2012	08 Februari 2013	-	1,750,000,000,000
6	SPN03120522	21 Februari 2012	22 Mei 2012	-	1,000,000,000,000
7	SPN03120607	06 Maret 2012	07 Juni 2012	-	500,000,000,000
8	SPN12130307	06 Maret 2012	07 Maret 2013	-	2,100,000,000,000
9	SPN03120621	20 Maret 2012	21 Juni 2012	-	250,000,000,000
10	SPN12130404	03 April 2012	04 April 2013	-	2,900,000,000,000
11	SPN03120718	17 April 2012	18 Juli 2012	-	300,000,000,000
12	SPN12130502	04 Mei 2012	02 Mei 2013	-	900,000,000,000
13	SPN12130606	07 Juni 2012	06 Juni 2013	-	1,880,000,000,000
14	SPN03120920	19 Juni 2012	20 September 2012	-	500,000,000,000
15	SPN12130704	05 Juli 2012	04 Juli 2013	-	1,550,000,000,000
16	SPN03121018	19 Juli 2012	18 Oktober 2012	-	500,000,000,000
17	SPN12130812	09 Agustus 2012	12 Agustus 2013	-	990,000,000,000
18	SPN03121112	09 Agustus 2012	12 Nopember 2012	-	850,000,000,000
19	SPN03121212	11 September 2012	12 Desember 2012	-	1,000,000,000,000
20	SPN12130912	11 September 2012	13 September 2012	-	2,000,000,000,000
21	SPN03130107	08 Oktober 2012	07 Januari 2013	-	1,000,000,000,000
22	SPN12131007	08 Oktober 2012	07 Oktober 2013	-	1,200,000,000,000
23	SPN03130213	14 Nopember 2012	13 Februari 2013	-	1,000,000,000,000
	Jumlah				30.520,000,000,000

Tabel 21 Jenis dan Outstanding SPN tahun 2012

Untuk meningkatkan minat investor atas instrumen SPN dan mendorong perkembangan pasar SPN, Pemerintah telah melakukan perubahan terhadap PP nomor 11 tahun 2006 dengan menerbitkan PP Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atas diskonto SPN, dimana pemungutan pajak atas diskonto SPN dilakukan di pasar sekunder dan pada saat jatuh tempo dengan tarif sebesar 20% final.

C. Penerbitan SUN dalam Valuta Asing (*International Bonds*)

Total penerbitan SUN Valas (*International Bonds*) dalam tahun 2012 mencapai Rp.46.018.969.099.520 yang terdiri dari US\$ 4.250.000.000 atau setara dengan 39.006.661.099.520 dan JP¥60.000.000.000 atau setara dengan 7.012.038.000.000. Mempertimbangkan daya serap pasar SBN domestik, pada tahun 2012 dilaksanakan 2 kali penerbitan *International Bonds* yaitu pada bulan April 2012 yaitu seri RIO422 dengan tingkat yield 5,2500% dan pada bulan September 2012 yaitu seri RIO142 dengan tingkat yield 5,2500%. Sementara untuk *samurai bond* melalui program Guarantee and Acquisition toward Tokyo market Enhancement (GATE) diterbitkan seri Japanese Yen BS 2012 sebesar JP¥60.000.000.000 pada bulan November 2012.

Sebagaimana penerbitan sebelumnya, penerbitan pada tahun 2012 ini juga mendapatkan sambutan yang baik di pasar internasional. Hasil penerbitan ini menunjukkan kepercayaan investor internasional terhadap manajemen fiskal dan prospek ekonomi Indonesia jangka panjang.

SUN Valas	MTU	Jumlah (Rupiah)
GMTN	US\$ 4.250.000.000	39.006.661.099.520
Guarantee and Acquisition toward Tokyo Market Enhancement (GATE)	JPY 60.000.000.000	7.012.038.000.000
Total		46.018.969.099.520

Tabel 22 Realisasi Penerbitan SUN Valas s.d. 31 Desember 2012

D. Pelaksanaan *Debt Switching/Buyback*

Total pelaksanaan *debt switching* pada tahun 2012 adalah sebanyak 4 kali dengan jumlah nominal SUN yang ditukar sebesar Rp.11.859.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal Debtswitch	Penawaran yang Masuk	Jumlah Dimenangkan
1	14-Juni-2012	10.883.000.000.000	5.455.000.000.000
2	31-Juli-2012	9.028.000.000.000	4.978.000.000.000
3	19-November-2012	1.608.000.000.000	738.000.000.000
4	11-Desember-2012	1.607.000.000.000	688.000.000.000
JUMLAH		23.126.000.000.000	11.859.000.000.000

Tabel 23 Realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2012

Tanggal	Source				Destination		
	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Nominal	Seri	Jatuh Tempo	Kupon
14-Jun-12	FR0023	15-12-2012	11.00000%	100,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	FR0033	15-03-2013	12.50000%	3,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	ORI005	15-09-2013	11.45000%	2,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	FR0020	15-12-2013	14.27500%	54,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	FR0051	15-05-2014	11.25000%	2,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	VR0019	25-12-2014	3.08000%	1,230,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	VR0020	25-04-2015	3.30573%	100,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	FR0027	15-06-2015	9.50000%	4,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	VR0021	25-11-2015	3.30573%	10,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	VR0022	25-03-2016	3.08000%	250,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
	VR0025	25-09-2017	3.08000%	3,700,000,000,000.00	FR0059	15-05-2027	7.00000%
				5,455,000,000,000.00			
	FR0023	15-12-2012	11.00000%	137,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0033	15-03-2013	12.50000%	407,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
31-Jul-12	FR0019	15-06-2013	14.25000%	620,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	ORI007	15-08-2013	7.95000%	110,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0049	15-09-2013	9.00000%	128,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	ORI005	15-09-2013	11.45000%	2,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0020	15-12-2013	14.27500%	192,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0051	15-05-2014	11.25000%	49,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0026	15-10-2014	11.00000%	208,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	VR0019	25-12-2014	3.89781%	2,015,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	VR0020	25-04-2015	3.98906%	635,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0027	15-06-2015	9.50000%	196,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	121,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
	FR0028	15-07-2017	10.00000%	158,000,000,000.00	FR0058	15-06-2032	8.25000%
				4,978,000,000,000.00			
	FR0033	15-03-2013	12.50000%	50,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
19-Nov-12	FR0019	15-06-2013	14.25000%	139,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0049	15-09-2013	9.00000%	220,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0020	15-12-2013	14.27500%	219,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0026	15-10-2014	11.00000%	20,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0027	15-06-2015	9.50000%	50,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	40,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
				738,000,000,000.00			
	FR0033	15-03-2013	12.50000%	440,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
11-Dec-12	FR0019	15-06-2013	14.25000%	220,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0051	15-05-2014	11.25000%	3,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0030	15-05-2016	10.75000%	5,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
	FR0055	15-09-2016	7.37500%	20,000,000,000.00	FR0064	15-05-2028	6.12500%
				688,000,000,000.00			
				11,859,000,000,000.00			

Tabel 24 Rincian realisasi pelaksanaan *Debtswitching* tahun 2012

Selain itu pada tahun 2012 juga telah dilakukan transaksi langsung (*direct payment*) *cash buyback* SUN melalui *dealing room* DJPU sebanyak 6 kali dengan jumlah yang telah dibeli pemerintah sebanyak Rp.1.137.527.000.000 dari target Rp.2.000.000.000.000 dengan perincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Seri	Jatuh Tempo	Volume	Nominal	Harga Rata-rata Tertimbang
1	24 Februari	FR0053	15 Juli 2021	498.207	498.207.000.000	119.96
	Sub total			498.207	498.207.000.000	
2	27 Februari	FR0026	15 Oktober 2014	101.270	101.207.000.000	115.25
	Sub total			101.270	101.207.000.000	
3	31 Agustus	FR0055	15 September 2016	30.000	30.000.000.000	106.00
	Sub total			30.000	30.000.000.000	
4	1 November	FR0028	15 Juli 2017	8.050	8.050.000.000	119.10
	Sub total			8.050	8.050.000.000	
5	27 November	FR0055	15 September 2016	500.000	500.000.000.000	108.05
	Sub total			500.000	500.000.000.000	
6	29 November	FR0030	15 Mei 2016	-	-	
	Sub total			-	-	
	TOTAL			1.137.527	1.137.527.000.000	

Tabel 25 Transaksi *Buyback* tahun 2012

Pada akhir tahun 2012, profil jatuh tempo SUN terkonsentrasi dengan jumlah cukup besar pada kurun waktu 2012 -2014. Dalam rangka mengurangi risiko pelunasan pokok SUN pada kurun tahun 2012 -2014 tersebut, Pemerintah berupaya untuk menata ulang struktur jatuh tempo SUN melalui debt switching, yaitu dengan membeli seri-seri Obligasi Negara jangka pendek dan menukarkannya dengan Obligasi Negara yang mempunyai jatuh tempo jangka menengah dan panjang. Jumlah SUN yang jatuh tempo pada kurun tahun 2012 -2014, yang berada pada kisaran di atas Rp 32,4 triliun, digeser ke jangka waktu jatuh tempo yang lebih panjang. Kondisi ini juga memberikan keleluasaan bagi Pemerintah untuk menerbitkan instrumen SUN jangka pendek, baik berupa Obligasi Negara Ritel maupun Surat Perbendaharaan Negara. Upaya lain yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mengurangi *refinancing risk* adalah dengan memberikan prioritas penerbitan Obligasi Negara jangka menengah dan panjang.

Di samping *debtswitch*, Pemerintah juga melakukan kegiatan *cash buyback* yang merupakan salah satu strategi pengelolaan portofolio SUN dengan cara melaksanakan pembelian Obligasi Negara yang belum jatuh tempo di pasar sekunder. Dalam periode tahun anggaran 2012, *cash buyback* sebanyak 6 kali melalui *dealing room* DJPU. *Buyback* dilakukan melalui pembelian langsung (*direct payment*) *cash buyback* dengan jumlah nominal sebesar Rp.1.137.527.000.000 dari target sebesar Rp.2.000.000.000.000. Obligasi Negara yang telah dibeli tersebut kemudian dinyatakan lunas atau jatuh tempo, sehingga mengurangi total *outstanding* SUN. Pada saat pasar mengalami *bearish*, dimana harga SUN cenderung diskon, penerapan strategi *cash buyback* ini akan lebih menguntungkan Pemerintah, dibanding jika harus membayar pelunasan pokok pada saat jatuh tempo nantinya. Disamping itu pelaksanaan *cash buyback* oleh Pemerintah pada saat kondisi pasar *bearish* ini juga dapat menahan penurunan harga yang makin dalam dan melakukan stabilisasi pasar SUN.

III. PENGELOLAAN PORTOFOLIO SBSN TAHUN 2012

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah telah menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah *sukuk*. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan *sukuk*, serta adanya *aqad* atau perjanjian antara para pihak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 7 Mei 2008 telah disahkan dan menjadi landasan legal pengelolaan SBSN. Secara garis besar UU tersebut mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- b. Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
- c. Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- d. Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- e. Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- f. Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Sesuai dengan UU Nomor 19 Tahun 2008, tujuan penerbitan SBSN adalah untuk membiayai APBN termasuk membiayai proyek. Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SBSN pada Agustus 2008 melalui metode *bookbuilding* di pasar perdana dalam negeri.

Pada tahun anggaran 2012, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan SBSN seri PBS (*Project Based Sukuk*). SBSN berbasis proyek selain sebagai instrumen pembiayaan APBN juga sekaligus berfungsi mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur dan pengembangan pasar keuangan syariah di dalam negeri. Manfaat dari penerbitan SBSN berbasis proyek antara lain adalah untuk mendiversifikasi sumber pembiayaan, mendukung percepatan pembangunan proyek infrastruktur, mendukung pengembangan pasar keuangan, khususnya pasar keuangan syariah, mendorong peningkatan pelayanan umum, pemberdayaan industri dalam negeri serta meningkatkan transparansi pelaksanaan kegiatan oleh K/L karena perkembangan pelaksanaan proyek akan dipantau oleh investor dan publik. Penerbitan SBSN seri PBS tersebut dilakukan dengan mekanisme sistem lelang yang ada di Bank Indonesia.

Dalam rangka pengembangan infrastruktur pasar, pada tahun 2012 pemerintah mengimplementasikan *Greenshoe Option* (GSO) dalam lelang SBSN. GSO adalah lelang tambahan dimana lelang dilaksanakan satu hari setelah pelaksanaan lelang reguler yang pelaksanaannya diputuskan pada rapat penetapan pemenang reguler. Pelaksanaan lelang GSO diatur melalui PMK Nomor 05 Tahun 2011.

Total jumlah penerbitan SBSN yang telah diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2012 adalah sebesar Rp.57.088.811.152.000 yang terdiri dari 6 jenis instrumen yakni IFR, SR, SDHI, PBS, SPN-S dan SNI. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut:

No	Seri	Tanggal Terbit	Maturity Date	Coupon	Jumlah	Metode Penerbitan
					57,088,811,152,000	
Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPN-S)					1,380,000,000,000	Lelang
	SPN-S 14092012	13 Maret 2012	14 September 2012	3.79592%	280,000,000,000	
	SPN-S 09112012	08 Mei 2012	09 Nopember 2012	3.82887%	905,000,000,000	
	SPN-S03042013	04 Oktober 2012	03 April 2013	4.69444%	90,000,000,000	
	SPN-S17042013	18 Oktober 2012	17 April 2013	4.78075%	105,000,000,000	
Sukuk Retail (SR)					13,613,805,000,000	Bookbuilding
	SR004	21 Maret 2012	21 September 2015	6.25000%	13,613,805,000,000	
Sukuk Dana Haji Indonesia (SDHI)					15,342,000,000,000	Private Placement
	SDHI2017A	21 Maret 2012	21 Maret 2017	5.16000%	2,000,000,000,000	
	SDHI2019A	21 Maret 2012	21 Maret 2019	5.46000%	3,000,000,000,000	
	SDHI2022A	21 Maret 2012	21 Maret 2022	5.91000%	3,342,000,000,000	
	SDHI2016A	27 April 2012	27 April 2016	5.03000%	1,000,000,000,000	
	SDHI2020A	27 April 2012	27 April 2020	5.79000%	1,500,000,000,000	
	SDHI2018A	30 Mei 2012	30 Mei 2018	6.06000%	2,500,000,000,000	
	SDHI2015A	28 Juni 2012	28 Juni 2015	5.21000%	1,000,000,000,000	
	SDHI2020B	28 Juni 2012	28 Juni 2020	6.20000%	1,000,000,000,000	
Ijarah Fixed Rate (IFR)					400,000,000,000	Lelang
	IFR0010	02 Februari 2012	15 Februari 2036	10.00000%	400,000,000,000	
Project Based Sukuk (PBS)					16,714,000,000,000	Lelang
	PBS001	27 Februari 2012	15 Februari 2018	4.45000%	5,920,000,000,000	
	PBS002	27 Februari 2012	15 Januari 2022	5.45000%	1,208,000,000,000	
	PBS003	27 Februari 2012	15 Januari 2027	6.00000%	2,847,000,000,000	
	PBS004	27 Februari 2012	15 Februari 2037	6.10000%	6,739,000,000,000	
Sukuk Valas					9,639,006,152,000	Bookbuilding
	SNI22	21 Nopember 2012	21 Nopember 2022	3.30000%	\$ 1,000,000,000	

Tabel 26 Rekapitulasi Hasil Lelang SBSN tahun 2012

IV. STRUKTUR PORTOFOLIO SURAT BERTAGIH NEGARA SELAMA TAHUN 2012

A. Surat Bertagih Negara Berdenominasi Rupiah

Surat Bertagih Negara berdenominasi Rupiah dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

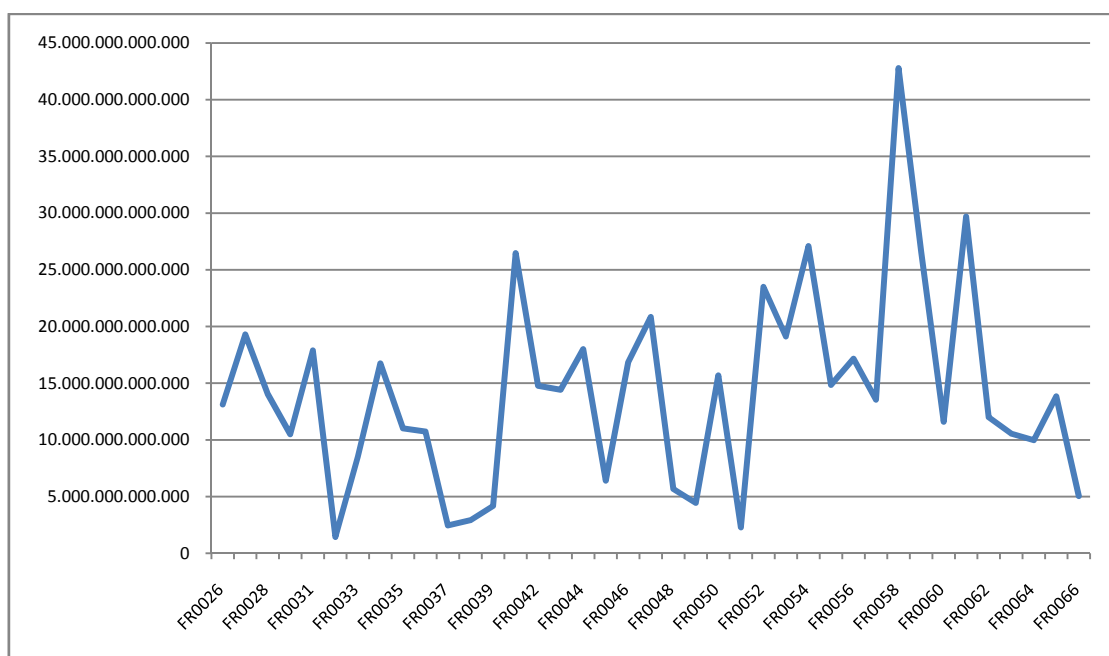
a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annually*). Berdasarkan posisi akhir tahun 2012, terdapat 45 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 5,25 % sampai dengan 15 % dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2041. Obligasi jenis FR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. Adapun outstanding sampai dengan Desember 2012 adalah sebagai berikut:

No	Series	First Issued Date	Maturity Date	Coupon	Face Value
1	FR0019	20-Nov-02	15-Jun-13	14.25000%	Rp 10,477,341,000,000
2	FR0020	20-Nov-02	15-Dec-13	14.27500%	Rp 9,596,751,000,000
3	FR0026	26-Aug-04	15-Oct-14	11.00000%	Rp 13,126,479,000,000
4	FR0027	27-Jan-05	15-Jun-15	9.50000%	Rp 19,304,000,000,000
5	FR0028	24-Feb-05	15-Jul-17	10.00000%	Rp 14,055,716,000,000
6	FR0030	19-May-05	15-May-16	10.75000%	Rp 10,491,000,000,000
7	FR0031	16-Jun-05	15-Nov-20	11.00000%	Rp 17,899,000,000,000
8	FR0032	1-Sep-05	15-Jul-18	15.00000%	Rp 1,434,000,000,000
9	FR0033	26-Jan-06	15-Mar-13	12.50000%	Rp 8,500,474,000,000
10	FR0034	26-Jan-06	15-Jun-21	12.80000%	Rp 16,756,400,000,000
11	FR0035	16-Feb-06	15-Jun-22	12.90000%	Rp 11,023,750,000,000
12	FR0036	20-Apr-06	15-Sep-19	11.50000%	Rp 10,735,500,000,000
13	FR0037	18-May-06	15-Sep-26	12.00000%	Rp 2,450,000,000,000
14	FR0038	24-Aug-06	15-Aug-18	11.60000%	Rp 2,920,757,000,000
15	FR0039	24-Aug-06	15-Aug-23	11.75000%	Rp 4,175,000,000,000
16	FR0040	21-Sep-06	15-Sep-25	11.00000%	Rp 26,474,000,000,000
17	FR0042	25-Jan-07	15-Jul-27	10.25000%	Rp 14,774,100,000,000
18	FR0043	22-Feb-07	15-Jul-22	10.25000%	Rp 14,417,000,000,000
19	FR0044	19-Apr-07	15-Sep-24	10.00000%	Rp 18,014,000,000,000
20	FR0045	24-May-07	15-May-37	9.75000%	Rp 6,400,000,000,000
21	FR0046	19-Jul-07	15-Jul-23	9.50000%	Rp 16,855,000,000,000
22	FR0047	30-Aug-07	15-Feb-28	10.00000%	Rp 20,840,000,000,000
23	FR0048	27-Sep-07	15-Sep-18	9.00000%	Rp 5,675,970,000,000
24	FR0049	14-Feb-08	15-Sep-13	9.00000%	Rp 4,438,607,000,000
25	FR0050	24-Jan-08	15-Jul-38	10.50000%	Rp 15,686,000,000,000
26	FR0051	15-Jan-09	15-May-14	11.25000%	Rp 2,282,123,000,000
27	FR0052	20-Aug-09	15-Aug-30	10.50000%	Rp 23,500,000,000,000
28	FR0053	8-Jul-10	15-Jul-21	8.25000%	Rp 19,123,793,000,000
29	FR0054	22-Jul-10	15-Jul-31	9.50000%	Rp 27,096,000,000,000
30	FR0055	23-Sep-10	15-Sep-16	7.37500%	Rp 14,850,000,000,000
31	FR0056	23-Sep-10	15-Sep-26	8.37500%	Rp 17,164,000,000,000
32	FR0057	21-Apr-11	15-May-41	9.50000%	Rp 13,550,000,000,000
33	FR0058	21-Jul-11	15-Jun-32	8.25000%	Rp 42,798,000,000,000

34	FR0059	15-Sep-11	15-May-27	7.00000%	Rp	26,630,000,000,000
35	FR0060	6-Oct-11	15-Apr-17	6.25000%	Rp	11,600,000,000,000
36	FR0061	6-Oct-11	15-May-22	7.00000%	Rp	29,700,000,000,000
37	FR0062	9-Feb-12	15-Apr-42	6.37500%	Rp	12,000,000,000,000
38	FR0063	13-Aug-12	15-May-23	5.62500%	Rp	10,550,000,000,000
39	FR0064	13-Aug-12	15-May-28	6.12500%	Rp	9,976,000,000,000
40	FR0065	30-Aug-12	15-May-33	6.62500%	Rp	13,850,000,000,000
41	FR0066	25-Oct-12	15-May-18	5.25000%	Rp	5,050,000,000,000

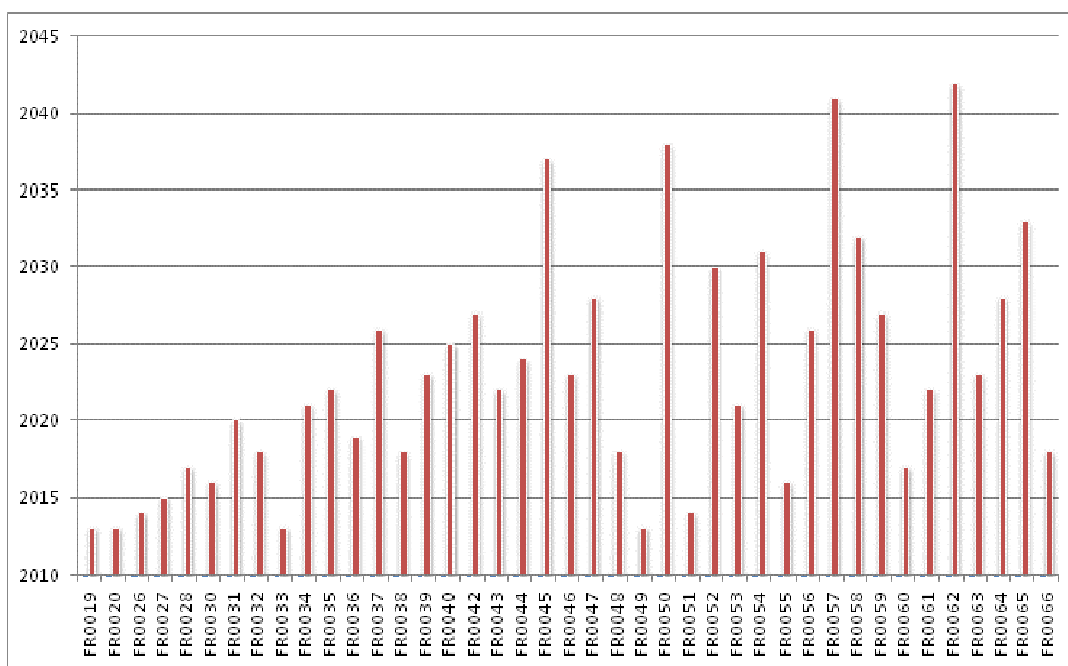
Tabel 27 Outstanding SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2012

Grafik 43 Struktur *Outstanding* ON Rupiah seri FR per 31 Desember 2012

No.	Seri	Jatuh Tempo	No.	Seri	Jatuh Tempo
1	FR0019	15 Juni 2013	22	FR0047	15 Februari 2028
2	FR0020	15 Desember 2013	23	FR0048	15 September 2018
3	FR0026	15 Oktober 2014	24	FR0049	15 September 2013
4	FR0027	15 Juni 2015	25	FR0050	15 Juli 1938
5	FR0028	15 Juli 2017	26	FR0051	15 Mei 2014
6	FR0030	15 Mei 2016	27	FR0052	15 Agustus 1930
7	FR0031	15 Nopember 2020	28	FR0053	15 Juli 2021
8	FR0032	15 Juli 2018	29	FR0054	15 Juli 1931

9	FR0033	15 Maret 2013	30	FR0055	15 September 2016
10	FR0034	15 Juni 2021	31	FR0056	15 September 2026
11	FR0035	15 Juni 2022	32	FR0057	15 Mei 1941
12	FR0036	15 September 2019	33	FR0058	15 Juni 1932
13	FR0037	15 September 2026	34	FR0059	15 Mei 2027
14	FR0038	15 Agustus 2018	35	FR0060	15 April 2017
15	FR0039	15 Agustus 2023	36	FR0061	15 Mei 2022
16	FR0040	15 September 2025	37	FR0062	15 April 1942
17	FR0042	15 Juli 2027	38	FR0063	15 Mei 2023
18	FR0043	15 Juli 2022	39	FR0064	15 Mei 2028
19	FR0044	15 September 2024	40	FR0065	15 Mei 1933
20	FR0045	15 Mei 1937	41	FR0066	15 Mei 2018
21	FR0046	15 Juli 2023			

Tabel 28 Jatuh Tempo SBN seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2012

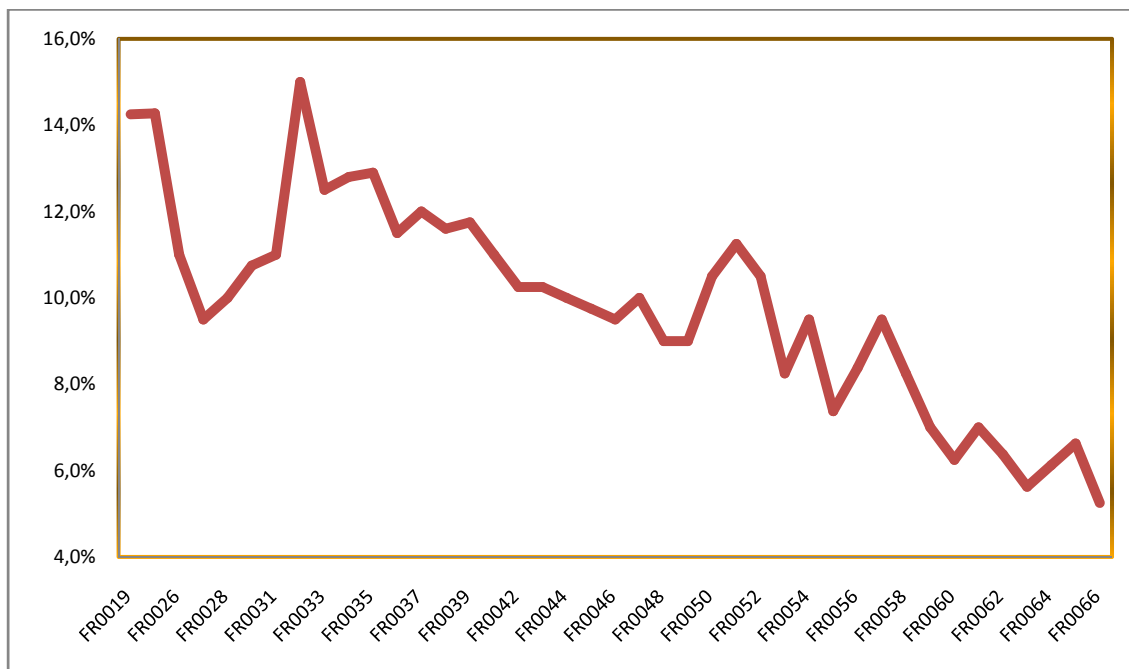


Grafik 44 Struktur Jatuh Tempo ON Rupiah Seri FR per 31 Desember 2012

No.	Seri	Kupon	No.	Seri	Kupon
1	FR0019	14.25000%	22	FR0047	10.00000%
2	FR0020	14.27500%	23	FR0048	9.00000%
3	FR0026	11.00000%	24	FR0049	9.00000%
4	FR0027	9.50000%	25	FR0050	10.50000%
5	FR0028	10.00000%	26	FR0051	11.25000%

6	FR0030	10.75000%	27	FR0052	10.50000%
7	FR0031	11.00000%	28	FR0053	8.25000%
8	FR0032	15.00000%	29	FR0054	9.50000%
9	FR0033	12.50000%	30	FR0055	7.37500%
10	FR0034	12.80000%	31	FR0056	8.37500%
11	FR0035	12.90000%	32	FR0057	9.50000%
12	FR0036	11.50000%	33	FR0058	8.25000%
13	FR0037	12.00000%	34	FR0059	7.00000%
14	FR0038	11.60000%	35	FR0060	6.25000%
15	FR0039	11.75000%	36	FR0061	7.00000%
16	FR0040	11.00000%	37	FR0062	6.37500%
17	FR0042	10.25000%	38	FR0063	5.62500%
18	FR0043	10.25000%	39	FR0064	6.12500%
19	FR0044	10.00000%	40	FR0065	6.62500%
20	FR0045	9.75000%	41	FR0066	5.25000%
21	FR0046	9.50000%			

Tabel 29 Kupon SBN Seri Fixed Rate (FR) per 31 Desember 2012



Grafik 45 Tingkat kupon Seri FR per 31 Desember 2012

b. Obligasi Negara Ritel (ORI)

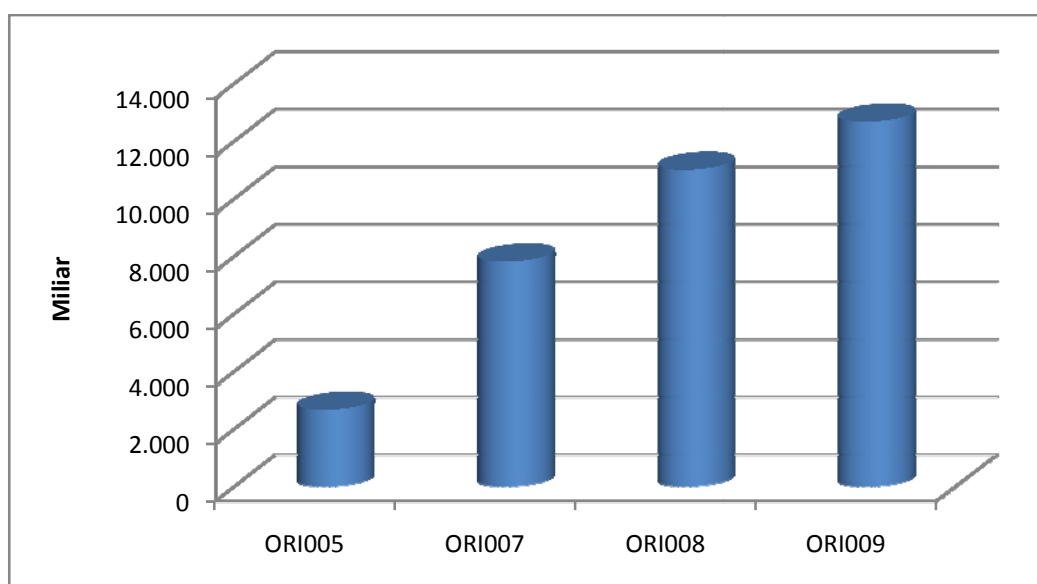
ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. ORI memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara

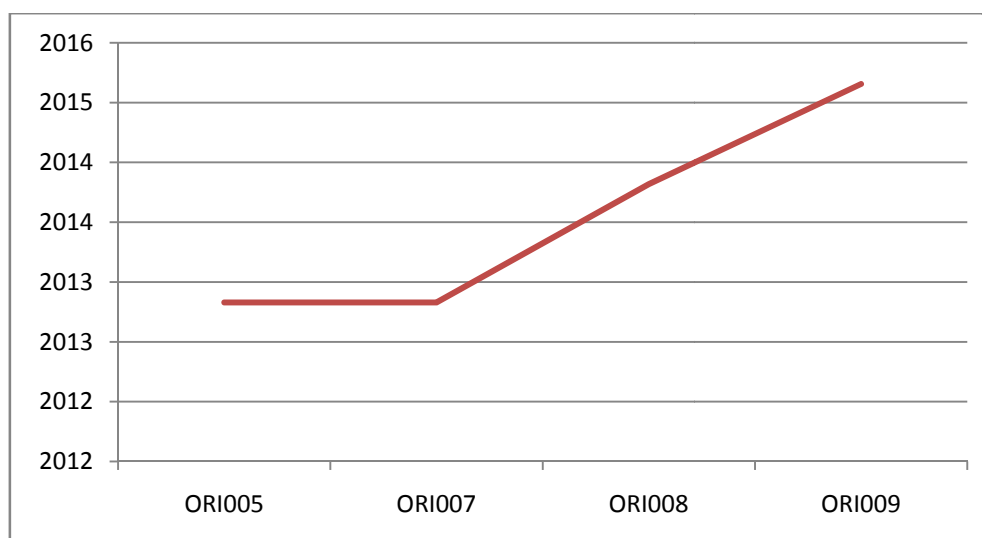
periodik. Kupon ORI dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2010 – 2014 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 380/KMK.08/2010. Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito. Tahun 2012 pemerintah menerbitkan satu seri ORI baru yaitu ORI009 dengan tingkat kupon 6.25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp. 12.676.745.000.000 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2012 menunjukkan ada 4 seri ORI dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

No	Seri	Outstanding	Jatuh Tempo
1	ORI005	2.662.875.000.000	15 September 2013
2	ORI007	7.813.000.000.000	15 Agustus 2013
3	ORI008	11.000.000.000.000	15 Oktober 2014
4	ORI009	12.676.745.000.000	15 Oktober 2015
	Jumlah	21,475,875,000,000	

Tabel 30 Nilai dan Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012

Grafik 46 Struktur *Outstanding* ORI per 31 Desember 2012



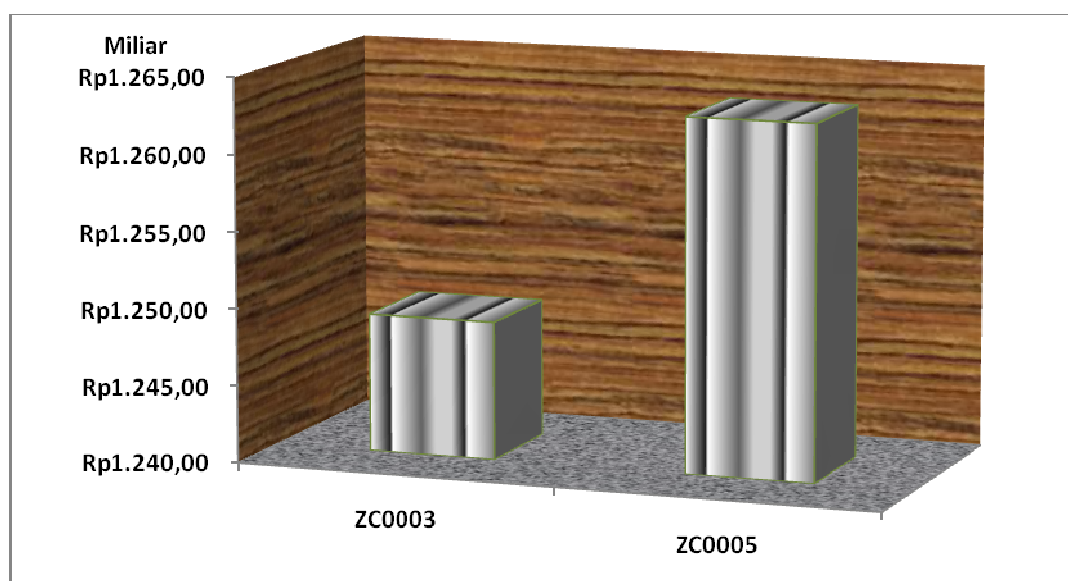
Grafik 47 Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012

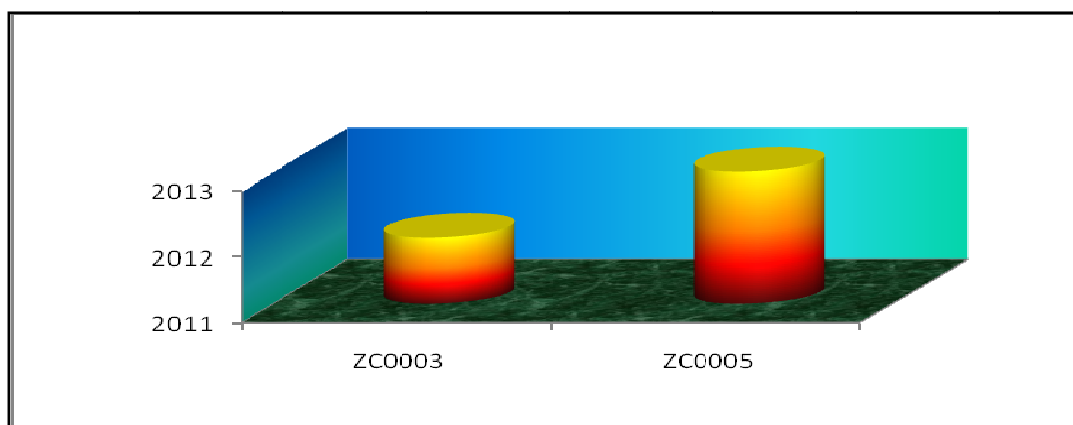
c. Obligasi tanpa bunga (zero coupon – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Berdasarkan posisi akhir tahun 2012, terdapat 1 seri ZC dengan *outstanding* berkisar dari Rp 1,263.000.000.000 dengan masa jatuh tempo pada tahun 2013. *Zero coupon* dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder. ZC0003 telah dilakukan pelunasan pada tahun 2012.

No	Seri	Nilai Outstanding	Jatuh Tempo	Ket
1	ZC0003	Rp 1.249.000.000.000,00	20 Nopember 2012	Lunas
2	ZC0005	Rp 1.263.000.000.000,00	20 Februari 2013	

Tabel 31 Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2012


Grafik 48 Struktur *Outstanding* Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2012



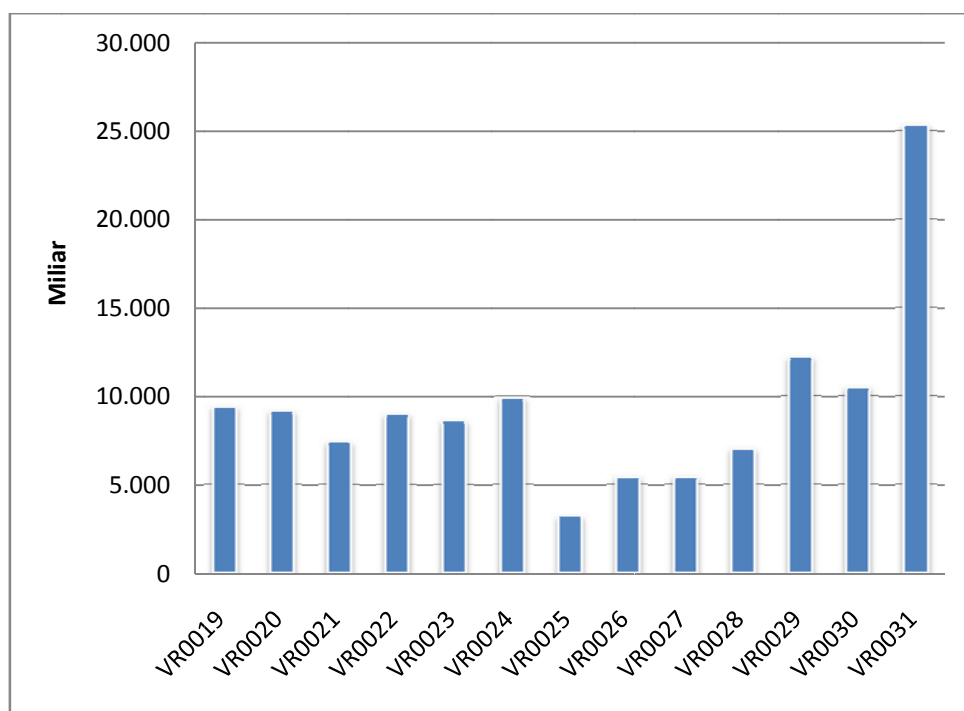
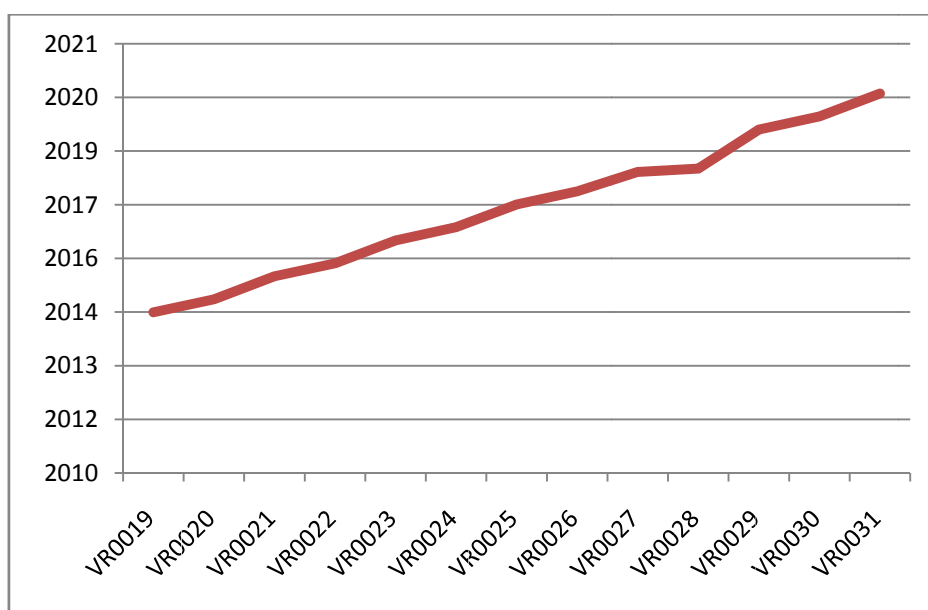
Grafik 49 Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon (ZC) per 31 Desember 2012

d. Obligasi berbunga mengambang (variable rate bonds – VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 13 seri VR dengan *outstanding* berkisar dari Rp 3,20 T sampai dengan Rp 25 T dengan masa jatuh temponya berkisar antara tahun 2014 sampai dengan 2020. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

No	Seri	Nilai Outstanding	Jatuh Tempo
1	VR0019	9,411,226,000,000.00	25 Desember 2014
2	VR0020	9,164,007,000,000.00	25 April 2015
3	VR0021	7,436,328,000,000.00	25 November 2015
4	VR0022	9,016,749,000,000.00	25 Maret 2016
5	VR0023	8,652,056,000,000.00	25 Oktober 2016
6	VR0024	9,909,300,000,000.00	25 Februari 2017
7	VR0025	3,209,300,000,000.00	25 September 2017
8	VR0026	5,442,142,000,000.00	25 Januari 2018
9	VR0027	5,442,142,000,000.00	25 Juli 2018
10	VR0028	7,033,994,000,000.00	25 Agustus 2018
11	VR0029	12,212,320,000,000.00	25 Agustus 2019
12	VR0030	10,503,015,000,000.00	25 Desember 2019
13	VR0031	25,322,354,000,000.00	25 Juli 2020

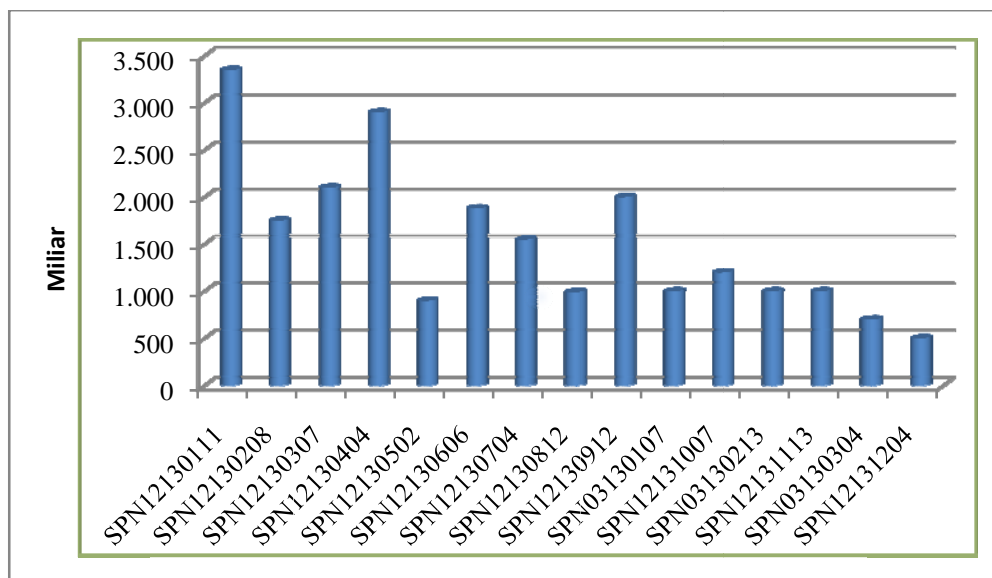
Tabel 32 Nilai dan Jatuh Tempo SBN seri Variable Rate (VR) per 31 Desember 2012


Grafik 50 Struktur *Outstanding* VR per 31 Desember 2012


Grafik 51 Struktur Jatuh Tempo VR per 31 Desember 2012

e. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

SPN merupakan instrumen utang jangka pendek dengan penerbitan secara diskonto. Sampai akhir tahun 2012, terdapat 16 seri SPN yaitu SPN12130111, SPN12130208, SPN12130307, SPN12130404, SPN12130502, SPN12130606, SPN12130704, SPN12130812, SPN12130912, SPN03130107, SPN12131007, SPN03130213, SPN12131113, SPN03130304, SPN12131204 dengan *outstanding* berkisar Rp 500 M dan Rp 3,3 T yang akan jatuh tempo pada tahun 2013. SPN dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

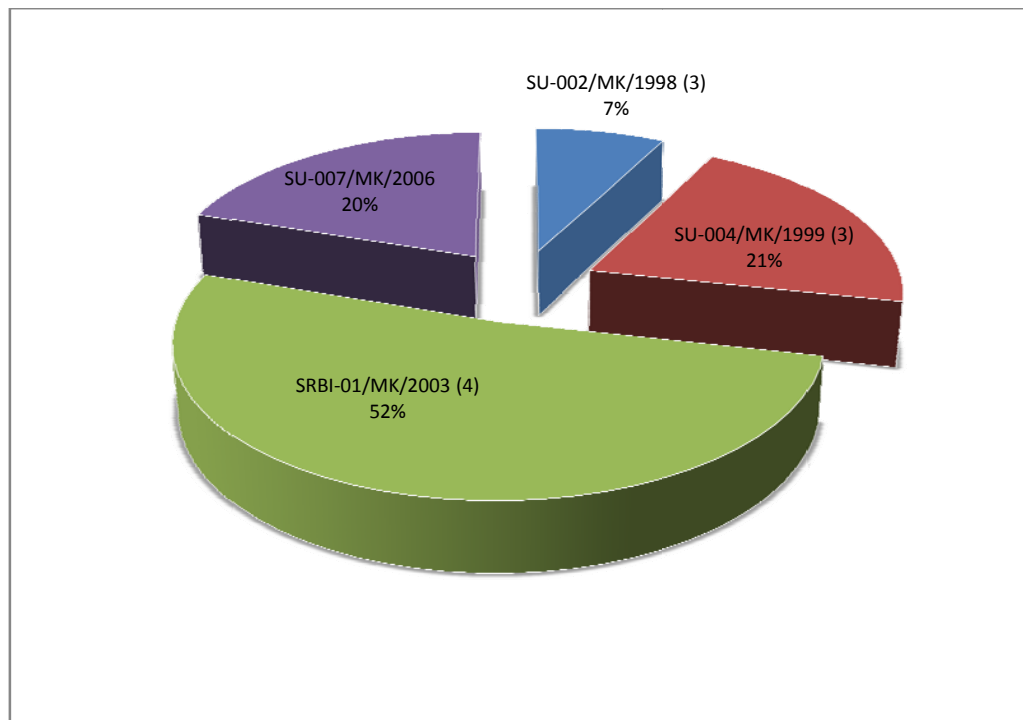
Grafik 52 Struktur *Outstanding* SPN per 31 Desember 2012

f. Surat Utang Pemerintah (SUP) kepada BI

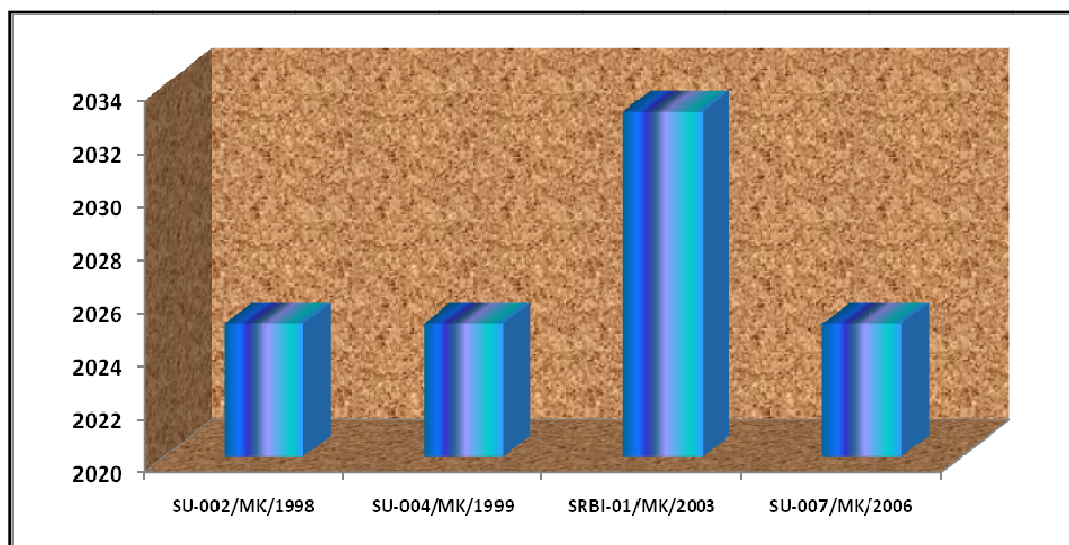
Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia terdiri dari lima seri yaitu SU002, SU004, SU007, dan *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Kupon SUP dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga.

No	Nama	Outstanding	Jatuh Tempo
1	SU-002/MK/1998	18,077,490,987,816	01 April 2025
2	SU-004/MK/1999	48,921,476,666,168	01 Desember 2025
3	SRBI-01/MK/2003	126,390,778,837,033	01 Agustus 2043
4	SU-007/MK/2006	46,754,718,593,138	01 Agustus 2025
JUMLAH		240,144,465,084,155	

Tabel 33 Nilai dan Outstanding Surat Utang Pemerintah per 31 Desember 2012



Grafik 53 Struktur *Outstanding* SUP per 31 Desember 2012



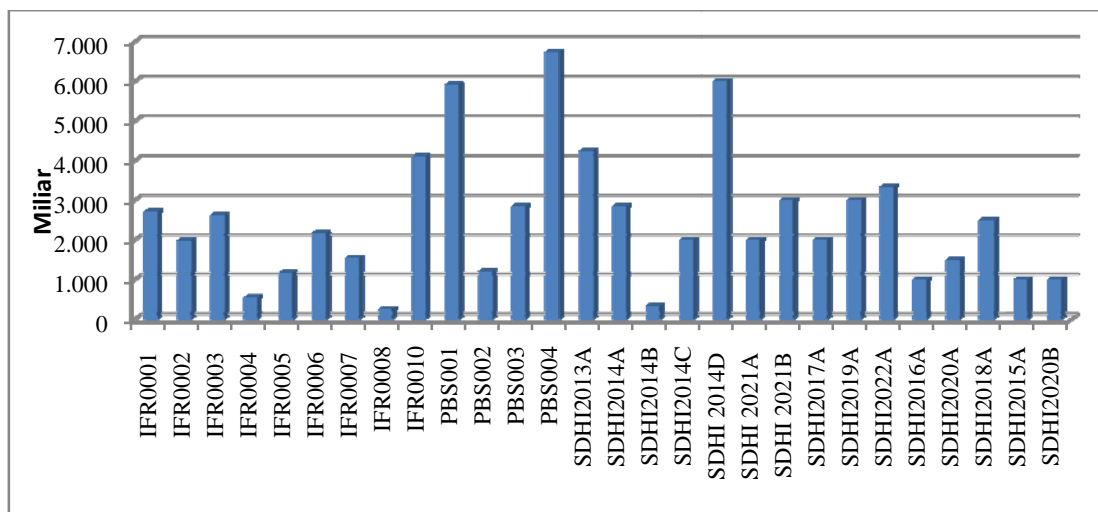
Grafik 54 Struktur Jatuh Tempo SUP Per 31 Desember 2012

g. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

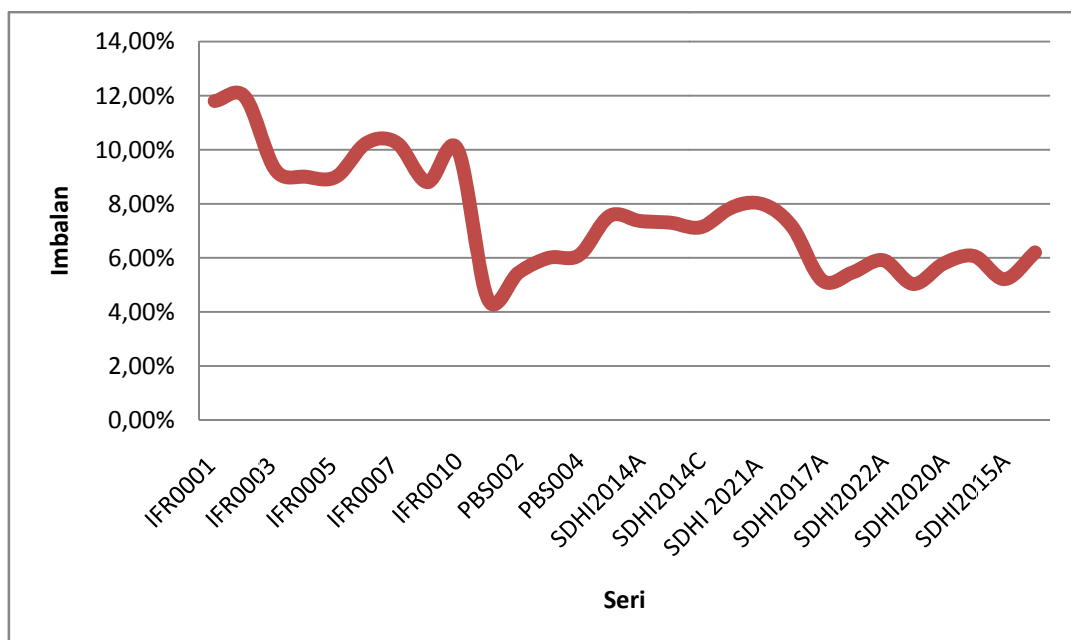
Pada akhir tahun 2012, terdapat 12 seri *fixed rate* SBSN yaitu IFR0001, IFR0002, IFR0003, IFR0004, IFR0005, IFR0006, IFR0007, IFR0008, IFR0010, SR-002, SR-003, SR-004 dengan masa jatuh tempo antara tahun 2013 sampai dengan 2036 dengan tingkat imbalan antara 8,15% sampai dengan 12,00%. Selain itu terdapat 8 seri SDHI (Sukuk Dana Haji Indonesia) yaitu SDHI2013A, SDHI2014A, SDHI 2014B, SDHI2014C, SDHI2014D, SDHI2021A, SDHI2021B, SDHI2017A, SDHI2019A, SDHI2022A, SDHI2016A, SDHI2020A, SDHI2018A, SDHI2015A, SDHI2020B dengan masa jatuh tempo 2013 sampai dengan tahun 2022. Di samping itu pada tahun 2012 ini, pemerintah Indonesia mulai menerbitkan SBSN seri PBS (*Project Based Sukuk*) dengan masa jatuh tempo antara tahun 2018 sampai dengan 2037 dan tingkat imbalan antara 4,45 % sampai dengan 6,10%.

No	Seri	Jatuh Tempo	Imbalan	Outstanding
1	IFR0001	15-Aug-15	11.80000%	2,714,700,000,000
2	IFR0002	15-Aug-18	11.95000%	1,985,000,000,000
3	IFR0003	15-Sep-15	9.25000%	2,632,000,000,000
4	IFR0004	15-Oct-13	9.00000%	550,000,000,000
5	IFR0005	15-Jan-17	9.00000%	1,171,000,000,000
6	IFR0006	15-Mar-30	10.25000%	2,175,000,000,000
7	IFR0007	15-Jan-25	10.25000%	1,547,000,000,000
8	IFR0008	15-Mar-20	8.80000%	252,000,000,000
9	IFR0010	15-Feb-36	10.00000%	4,110,000,000,000
10	PBS001	15-Feb-18	4.45000%	5,920,000,000,000
11	PBS002	15-Jan-22	5.45000%	1,208,000,000,000
12	PBS003	15-Jan-27	6.00000%	2,847,000,000,000
13	PBS004	15-Feb-37	6.10000%	6,739,000,000,000
14	SDHI2013A	17-May-13	7.55000%	4,250,000,000,000
15	SDHI2014A	9-Aug-14	7.36000%	2,855,000,000,000
16	SDHI2014B	25-Aug-14	7.30000%	336,000,000,000
17	SDHI2014C	7-Oct-14	7.13000%	2,000,000,000,000
18	SDHI 2014D	11-Feb-14	7.85000%	6,000,000,000,000
19	SDHI 2021A	11-Apr-21	8.00000%	2,000,000,000,000
20	SDHI 2021B	17-Oct-21	7.16000%	3,000,000,000,000
21	SDHI2014D	11-Feb-14	7.85000%	6,000,000,000,000
22	SDHI2021A	11-Apr-21	8.00000%	2,000,000,000,000
23	SDHI2021B	17-Oct-21	7.16000%	3,000,000,000,000
24	SDHI2017A	21-Mar-17	5.16000%	2,000,000,000,000
25	SDHI2019A	21-Mar-19	5.46000%	3,000,000,000,000
26	SDHI2022A	21-Mar-22	5.91000%	3,342,000,000,000
27	SDHI2016A	27-Apr-16	5.03000%	1,000,000,000,000
28	SDHI2020A	27-Apr-20	5.79000%	1,500,000,000,000
29	SDHI2018A	30-May-18	6.06000%	2,500,000,000,000
30	SDHI2015A	28-Jun-15	5.21000%	1,000,000,000,000
31	SDHI2020B	28-Jun-20	6.20000%	1,000,000,000,000
Total				61,451,260,000,000

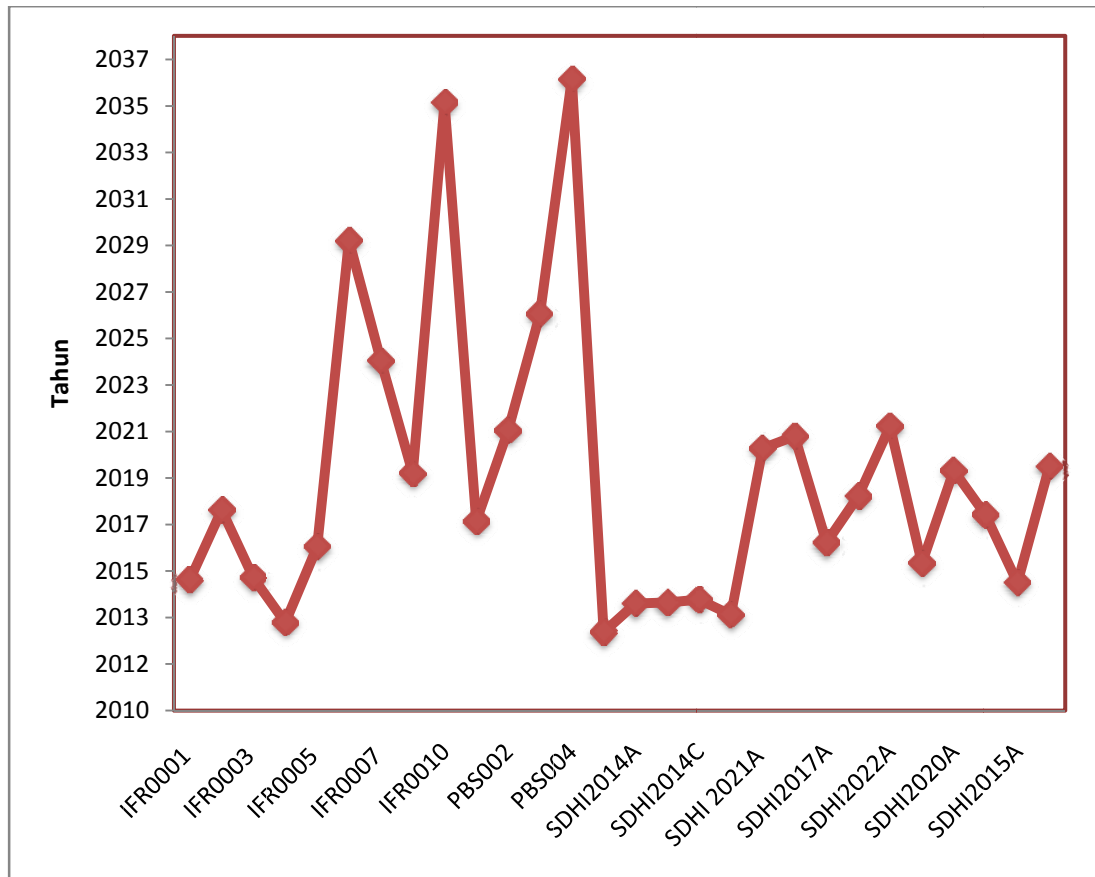
Tabel 34 Nilai Outstanding dan Jatuh Tempo SBSN Rupiah per 31 Desember 2012



Grafik 55 Struktur *Outstanding Fixed Rate* SBSN per 31 Desember 2012



Grafik 56 Tingkat Imbalan SBSN per 31 Desember 2012



Grafik 57 Struktur Jatuh Tempo SBSN per 31 Desember 2012

B. Sukuk Ritel (SR)

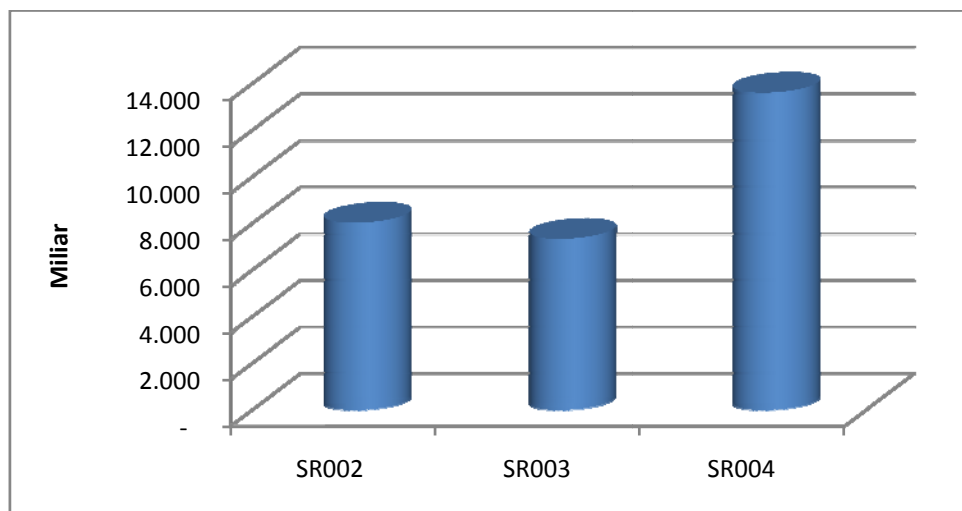
Sama halnya seperti ORI, Sukuk Ritel (SR) adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. SR memiliki tingkat imbal hasil yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Imbal hasil SR dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Penerbitan SR dimaksudkan untuk memperluas pembiayaan sumber APBN, diversifikasi investor dan instrumen, memberikan alternatif instrumen ritel berbasis syariah, dan memberikan kesempatan kepada investor kecil untuk berinvestasi dalam instrumen pasar modal yang aman dan menguntungkan. Selain itu, keberadaan SR dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

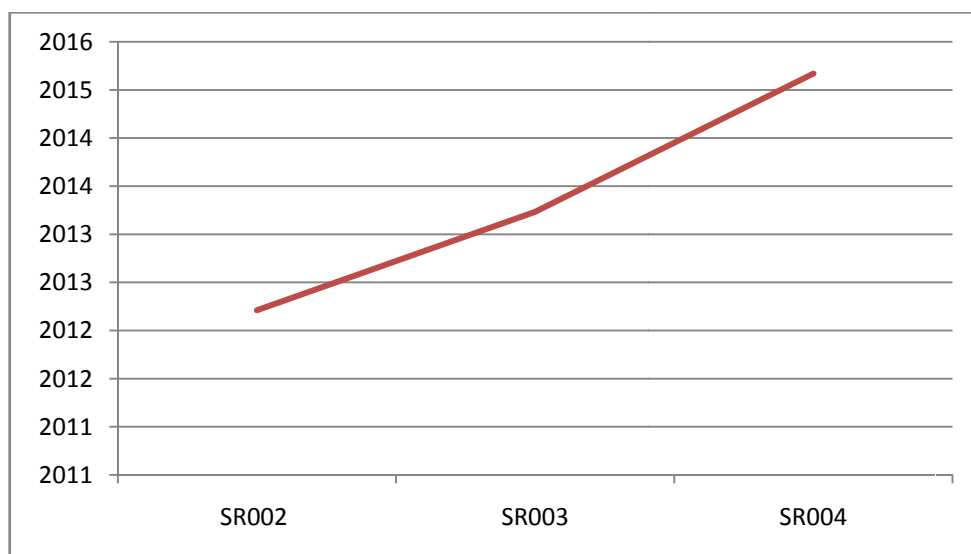
Tahun 2012, pemerintah menerbitkan satu seri SR yaitu SR004 dengan tingkat imbal hasil 6,25% dan mampu menghimpun dana investor sebesar Rp. 13.613.805.000.000 sehingga posisi *outstanding* pada akhir 2012 menunjukkan ada 3 seri SR dengan jatuh tempo berkisar antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

No	Seri	<i>Outstanding</i>	Jatuh Tempo
1	SR002	8.033.860.000.000	10 Januari 2013
2	SR003	7.341.410.000.000	23 Februari 2014
3	SR004	13.613.805.000.000	21 September 2015
	Jumlah	28.988.075.000.000	

Tabel 35 Nilai dan Jatuh Tempo SR per 31 Desember 2012



Grafik 58 Struktur *Outstanding* SR per 31 Desember 2012



Grafik 59 Struktur Jatuh Tempo ORI per 31 Desember 2012

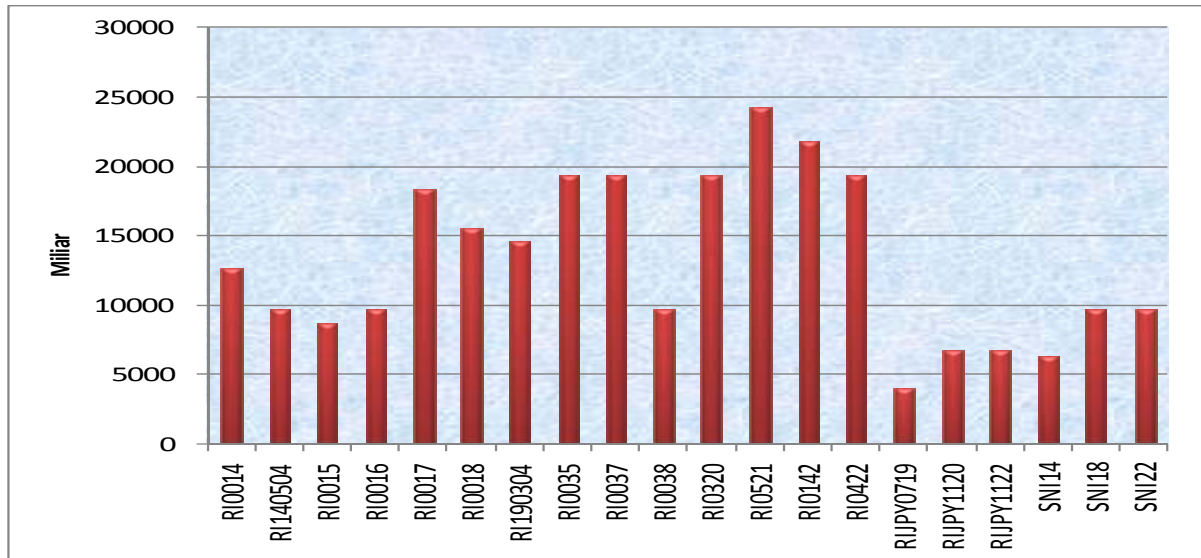
C. Surat Berharga Negara Berdenominasi Valas

Surat Berharga Negara (SBN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SBN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan obligasi negara dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara.

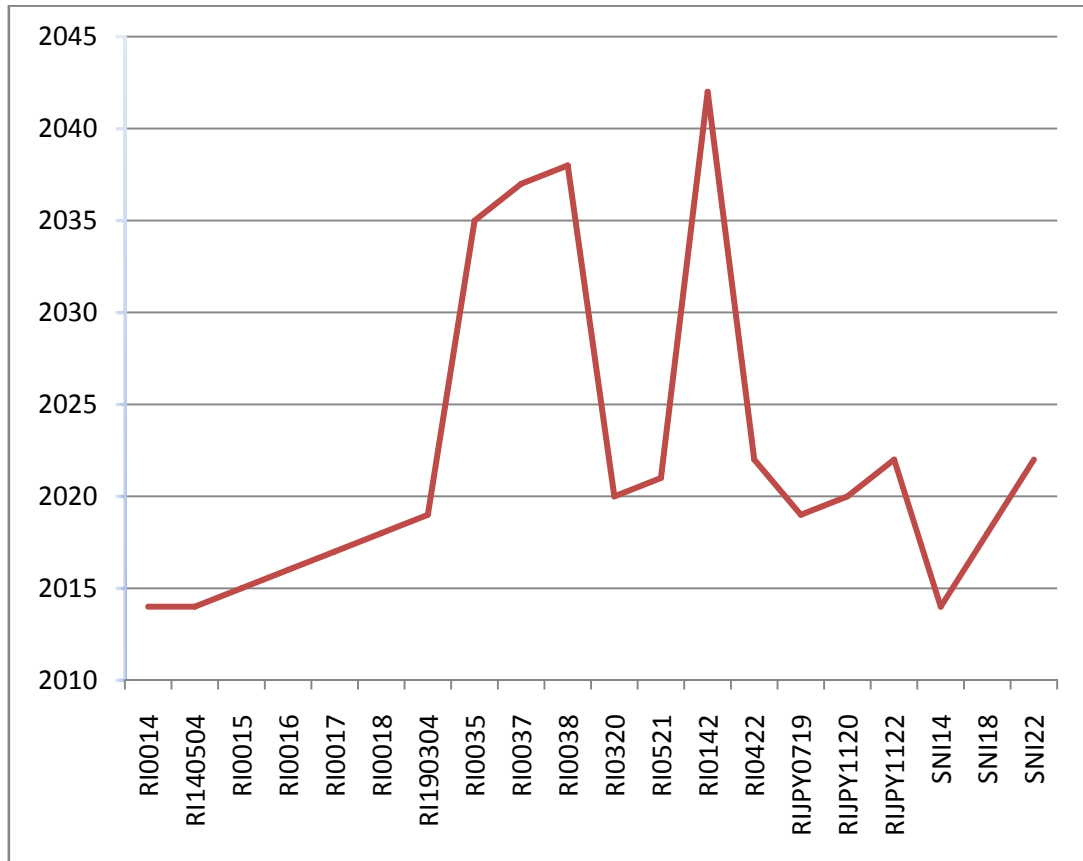
Sampai dengan akhir tahun 2012, terdapat 20 seri SBN Valas dengan 17 seri memiliki denominasi USD dan 3 seri dengan denominasi JPY yaitu seri RIJPY0719 dan RIJPY1120 dan RIJPY1122. SUN valas tersebut memiliki tingkat kupon mulai dari 1,13% sampai dengan 11,625% dengan masa jatuh tempo mulai dari tahun 2014 sampai dengan 2038. Selain itu terdapat 3 seri SBSN Valas yaitu seri SNI14 sebesar USD 650.000.000 setara Rp. 5,8 T dan USD 1.000.000.000 setara Rp. 9.07 T serta SNI22 sebesar USD 1.000.000.000 setara Rp.18.38 T.

No	Seri	Jatuh Tempo	Kupon	Outstanding	
				Valas	Rupiah
1	RI0014	10-Mar-14	6.75000%	USD 1,300,000,000	12.571.000.000.000
2	RI140504	4-May-14	10.37500%	USD 1,000,000,000	9.670.000.000.000
3	RI0015	20-Apr-15	7.25000%	USD 1,000,000,000	8.703.000.000.000
4	RI0016	15-Jan-16	7.50000%	USD 900,000,000	9.670.000.000.000
5	RI0017	9-Mar-17	6.87500%	USD 1,000,000,000	18.373.000.000.000
6	RI0018	17-Jan-18	6.87500%	USD 1,900,000,000	15.472.000.000.000
7	RI190304	4-Mar-19	11.62500%	USD 2,000,000,000	14.505.000.000.000
8	RI0035	12-Oct-35	8.50000%	USD 1,600,000,000	19.340.000.000.000
9	RI0037	17-Feb-37	6.62500%	USD 1,500,000,000	19.340.000.000.000
10	RI0038	17-Jan-38	7.75000%	USD 2,000,000,000	9.670.000.000.000
11	RI0320	13-Mar-20	5.87500%	USD 2,000,000,000	19.340.000.000.000
12	RI0521	5-May-21	4.87500%	USD 2,500,000,000	24.175.000.000.000
13	RI0142	17-Jan-42	5.25000%	USD 2,250,000,000	21.757.500.000.000
14	RI0422	25-Apr-22	3.75000%	USD 2,000,000,000	19.340.000.000.000
15	RIJPY0719	29-Jul-19	2.73000%	JPY 35,000,000,000	3.918.950.000.000
16	RIJPY1120	12-Nov-20	1.60000%	JPY 60,000,000,000	6.718.200.000.000
17	RIJPY1122	22-Nov-22	1.13000%	JPY 60,000,000,000	6.718.200.000.000
18	SNI14	23-Apr-14	8.80000%	USD 650,000,000	6.285.500.000.000
19	SNI18	21-Nov-18	4.00000%	USD 1,000,000,000	9.670.000.000.000
20	SNI22	21-Nov-22	3.30000%	USD 1,000,000,000	9.670.000.000.000
Total				USD 25.600.000.000	247.552.000.000.000
				JPY 155.000.000.000	17.355.350.000.000
					264.907.350.000.000

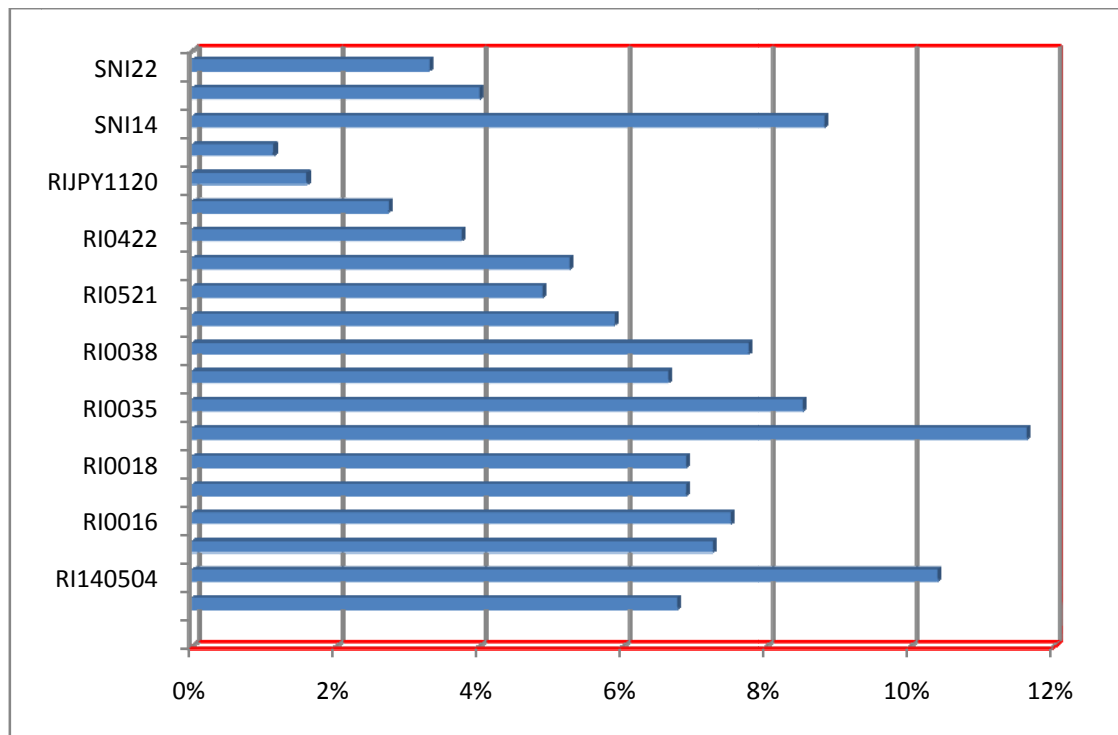
Tabel 36 Outstanding dan Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012



Grafik 60 Struktur *Outstanding* SBN Valas per 31 Desember 2012 (dalam rupiah)

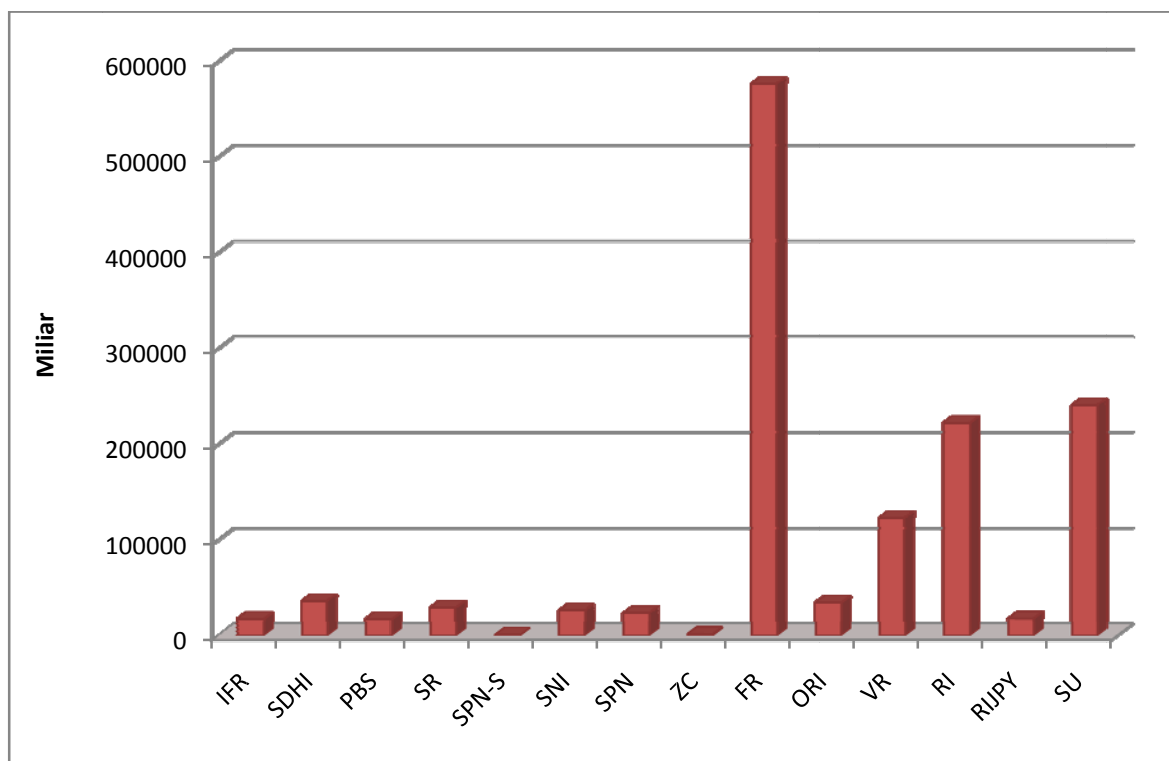


Grafik 61 Struktur Jatuh Tempo SBN Valas per 31 Desember 2012



Grafik 62 Tingkat Kupon/Imbalan SBN Valas per 31 desember 2012

Secara umum, struktur Surat Berharga Negara pada akhir tahun 2012 dapat digambarkan sebagai berikut:



Grafik 63 Struktur Outstanding SUN dan SBSN Rupiah per 31 Desember 2012

V. MUTASI SURAT BERHARGA NEGARA SELAMA TAHUN 2012

Surat Berharga Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Adapun ringkasan perubahan posisi SBN tahun 2012 adalah sebagai berikut:

No	Jenis SBN	31 Desember 2012		31 Desember 2011	Mutasi
1	2	3		4	5= (3-4)
1	IFR		17,136,700,000,000	16,736,700,000,000	400,000,000,000
2	SDHI		35,783,000,000,000	23,783,000,000,000	12,000,000,000,000
3	SR		28,989,075,000,000.00	20,931,560,000,000	8,057,515,000,000
4	PBS		16,714,000,000,000	0	16,714,000,000,000
5	SPN-S		195,000,000,000	1,320,000,000,000	-1,125,000,000,000
6	SNI		25,625,500,000,000	14,962,200,000,000	10,663,300,000,000
			1,650,000,000	1,650,000,000	0
7	SPN		22,820,000,000,000	29,900,000,000,000	-7,080,000,000,000
8	ZC		1,263,000,000,000	2,512,000,000,000	-1,249,000,000,000
9	FR		576,240,761,000,000	474,525,756,000,000	101,715,005,000,000
10	ORI		34,152,620,000,000	42,616,370,000,000	-8,463,750,000,000
11	VR		122,754,933,000,000	135,063,416,000,000	-12,308,483,000,000
12	RI		221,926,500,000,000	169,571,600,000,000	52,354,900,000,000
			22,950,000,000	18,700,000,000	4,250,000,000
13	RIJPY		17,355,350,000,000	11,096,000,000,000	6,259,350,000,000
			155,000,000,000	95,000,000,000	60,000,000,000
14	SU		240,144,465,084,155	244,636,437,364,007	-4,491,972,279,852
Total	USD		22,950,000,000	18,700,000,000	4,250,000,000
	JPY		155,000,000,000	95,000,000,000	60,000,000,000
	Rp.		1,361,100,904,084,150	1,187,655,039,364,010	173,445,864,720,148

Tabel 37 Mutasi Principle Outstanding SBN Tahun 2012

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SBN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SBN berbunga mengambang (VR) serta menurunnya porsi Surat Utang Pemerintah kepada Bank Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SBN.

VI. PENCAPAIAN TARGET APBN TA 2012

Target APBN atas pengelolaan Surat Berharga Negara (SBN) ditetapkan dalam dua pos yaitu pos Bunga Utang SBN dan Kewajiban Biaya Lain (SUN + SBSN) serta Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri yang menjadi fungsi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara Pengelolaan Utang (999.01)

A. Bunga Utang Surat Berharga Negara

Berdasarkan APBN-P TA 2012, total pagu Bunga dan Biaya Utang SBN Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp 84.749.300.000.000 sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN Dalam Negeri mencapai Rp 69.537.803.731.618, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 15.211.496.268.382. Secara prosentase, realisasi pembayaran bunga utang dalam negeri mencapai 82,05%.

Pagu Bunga Utang SBN Valas ditetapkan sebesar Rp 17.051.800.000.000 sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya SBN valas mencapai Rp 15.940.825.138.918, sehingga terdapat sisa pagu anggaran sebesar Rp 1.110.974.861.082. Secara prosentase, realisasi pembayaran bunga utang valas mencapai 93,48%.

B. Surat Berharga Negara Neto

Surat Berharga Neto adalah selisih antara SBN yang diterbitkan dengan SBN yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SBN dalam APBN ditetapkan dalam bentuk penerbitan SBN Neto, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SBN dan jumlah pembelian kembali.

Untuk tahun 2012, realisasi SBN Neto mencapai Rp 159.704.323.637.096. Adapun rincian sebagaimana terlampir di bawah ini.

Uraian	Akun	Jumlah
Penerbitan SBN		
Penerbitan SPN	711411	30,520,000,000,000.00
Penerbitan SUN Dalam Negeri	711421	146,780,745,000,000.00
Penerimaan Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>) Dalam Negeri	711422	2,251,726,240,000.00
Penerimaan Penerbitan SBSN-Jangka Panjang	711441	46,069,805,000,000.00
Penerimaan Penerbitan SPNS Syariah	711451	1,380,000,000,000.00
Penerimaan Imbalan SBSN-jangka Panjang	711442	171,346,293,000.00
Penerbitan SUN - Valas	711611	46,018,969,099,520.00
Penerbitan SBSN - Valas	712341	9,639,006,152,000.00
Penerimaan Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>) - Valas	712312	65,670,205,270.00
Total Penerbitan SBN		282,897,267,989,790.00
Pembiayaan SBN		
Pelunasan SPN	721311	37,600,000,000,000
Pelunasan SUN - Dalam Negeri	721321	58,582,418,279,852
Pembelian Kembali SUN Dalam Negeri	721322	12,996,527,000,000
Pembayaran Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>) - Dalam Negeri	721324	2,384,108,740,000
Pembayaran Utang Bunga (<i>Accrued Interest</i>) - Valas	722313	67,699,621,842
Pelunasan SPN-S	721351	2,505,000,000,000
Pelunasan SBSN-Jangka Panjang	721341	8,898,290,000,000
Pembayaran imbalan dibayar dimuka SBSN Dalam Negeri-Jangka Panjang	721343	158,900,711,000
Pelunasan SUN -Valas	722311	-
Pembelian kembali SUN-Valas	722312	-
Pembayaran imbalan dibayar dimuka SBSN Valas-Jangka Panjang	722343	-
Total Pelunasan SBN		123,192,944,352,694
SBN Neto		159,704,323,637,096

Keterangan: Realisasi SBN Neto dengan Penerimaan dan Pembayaran Utang Bunga

**KEMENTERIAN KEUANGAN
JALAN WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA PUSAT**

